Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 1945–2018

KEMENTERIAN PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 1945–2018

Pengarah
Muhadjir Effendy
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Hilmar Farid
Direktur Jenderal Kebudayaan

Triana Wulandari
Direktur Sejarah

Narasumber
Anhar Gonggong

Editor
Mukhlis PaEni
Karsono H. Saputra

Penulis
Gusti Asnan
Mohammad Iskandar
Agus Mulyana
Sri Margana
Didik Pradjoko

Sekretariat dan Produksi
Suharja
Tirmizi
Agus Hermanto
Budi Harjo Sayoga
Bariyo
Dwi Artiningsih
Dirga Fawakih
Esti Warastika
Krida Amalia Husna
Oti Murdiyati Lestari
Isti Sri Ulfiarti
Surya Agung
Muhammad Khalid Abdul Azis

Tata Letak dan Grafis
Bimo Trisaksono

Penerbit
Direktorat Sejarah
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telp/Fax: +62-21-5725044

@2018

Hak Cipta dimiliki oleh Penerbit dan dilindungi Undang-undang. Dilarang memperbanyak atau mengutip sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis pemegang Hak Cipta.

ISBN : 978-602-1289-93-8

SAMBUTAN
Direktur Sejarah

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, telah muncul banyak tokoh yang berperan dalam membangun bangsa. Mereka adalah tokoh bangsa yang jasa-jasanya perlu diingat dan ditulis untuk menjadi inspirasi dan penguatan karakter bagi generasi mendatang. Buku yang berjudul Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 1945-2018 ini berusaha untuk memenuhi tujuan tersebut dan menjadi pijakan dalam menguatkan pendidikan dan memajukan kebudayaan di masa kini dan akan datang.

Sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 hingga tahun 2018, Indonesia mempunyai 37 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam proses menjadi negara maju di alam kemerdekaan, Indonesia telah mengalami berbagai perubahan, termasuk dalam bidang pendidikan. Perubahan itu adalah hal wajar karena perubahan adalah tuntutan yang lahir seiring perkembangan zaman. Pada aspek inilah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam usahanya mencerdaskan kehidupan bangsa berperan menjawab tantangan zamannya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan yang inovatif. Setiap menteri tentu memiliki gaya kepemimpinan dan tekanan yang berbeda-beda sesuai tantangan zamannya. Buku ini mencoba merekam perjalanan pendidikan dan kebudayaan melalui pemikiran dan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dari masa ke masa. Beragam kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tetap berdasarkan satu tujuan, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah ikut ambil bagian dalam proses penyusunan buku ini. Kepada para penulis yang dengan sabar dan gigih mengumpulkan fakta demi fakta dan merangkainya sehingga buku ini menarik untuk dibaca. Kepada narasumber yang memberikan masukan berharga dan editor yang dengan cermat dan teliti menelaah substansi dan setiap kata untuk kesempurnaan buku ini. Akhirnya, saya berharap buku ini dapat menginspirasi dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yang telah diupayakan dari masa lalu hingga masa kini. Selamat membaca.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Direktur Sejarah

Triana Wulandari

SAMBUTAN
Direktur Jenderal Kebudayaan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Sejak awal bangsa kita memiliki tradisi pendidikan sendiri yang dikelola oleh masyarakat atau komunitas yang dipengaruhi oleh adat istiadat, tradisi, budaya, agama, dan kepercayaannya masing-masing. Kemudian setelah kedatangan bangsa Eropa, sistem pendidikan mengalami pergeseran. Salah satu tujuan penerapan pendidikan oleh pemerintah kolonial adalah menyebarkan agama dan ideologi kolonial yang didasarkan pada politik etis. Produk sistem pendidikan ini justru menghasilkan pencerahan bagi pemuda bumiputera (elit baru) sehingga dapat menyusun kekuatan untuk memerdekakan bangsanya, berbalik dari tujuan pendidikan kolonial (mengabdi untuk kepentingan kolonial).

Dari catatan sejarah tersebut dapat dikatakan bahwa pendidikan adalah pokok utama bagi kemajuan sebuah bangsa. Kemajuan sebuah bangsa sejalan dengan kemajuan pendidikan dan kebudayaan rakyatnya. Bangsa Indonesia dapat lepas dari penjajahan juga berkat perjuangan rakyatnya yang terdidik dan berkarakter dalam memperjuangkan bangsanya. Pendidikan dan kebudayaan sangat penting dalam proses pembangunan bangsa dan negara dalam menuju arah kemajuan.

Ki Hajar Dewantara dalam pendiriannya mengatakan bahwa pendidikan nasional harus berdasarkan kepada kebudayaan nasional atau berorientasi kepada kebudayaan sendiri dengan tujuan mengangkat derajat rakyat, berdaya guna bagi negara dan bahkan juga bagi bangsa-bangsa lain untuk kemuliaan segenap manusia di dunia. Sejarah kemudian mencatat bagaimana perjuangan Ki Hajar Dewantara di masa pemerintahan kolonial Belanda dalam memajukan pendidikan bagi kaum bumiputera lewat Taman Siswa yang didirikannya. Kendati harus menghadapi berbagai tantangan, Taman Siswa mampu menjadi pelopor dalam memajukan pendidikan kaum bumiputera yang tidak mendapatkan pendidikan dari Pemerintah kolonial Belanda.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan mengamanatkan negara untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia. Sudah sepatutnya kemajuan kebudayaan selaras dengan kemajuan pendidikan. Sebagaimana payung hukum legal formal pertama di bidang pendidikan yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah untuk Seluruh Indonesia. Undang-undang tersebut menyatakan khususnya pada bab III pasal 4 bahwa "Pendidikan dan Pengajaran berdasar atas asas-asas yang termaktub dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan atas Kebudayaan Kebangsaan Indonesia". Dari undang-undang tersebut terlihat bahwa kebudayaan telah mendapat perhatian pemerintah sejak awal kemerdekaan dan mengintegrasikan kebudayaan ke dalam pendidikan. Dan buku ini memberikan gambaran kepada kita mengenai dinamika perjuangan dan tantangan para Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam menguatkan pendidikan dan memajukan kebudayaan.

Saya menyambut baik penerbitan buku ini sebagai usaha nyata dalam teladan bagi generasi penerus bangsa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memperkuat karakter bangsa di masa kini dan masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Direktur Jenderal Kebudayaan

Hilmar Farid

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Setelah perjuangan yang lama yang tidak hanya mengorbankan materi tetapi juga jiwa dan raga sampailah kita pada pintu gerbang kemerdekaan. Sesuatu yang diidam-idamkan dan menjadi mimpi segenap anak bangsa. Tetapi ada satu catatan penting sehingga kita mencapai kemerdekaan, bahwa mereka yang telah tercerahkan setelah mengalami proses pendidikanlah yang telah mampu menyatukan semua elemen bangsa untuk bersama-sama menentukan nasib bangsanya sendiri yang hal itu dapat mengantar bangsanya ke alam kemerdekaan.

Setelah tercapainya kemerdekaan, bangsa ini menyadari akan pentingnya persoalan pendidikan dan kebudayaan. Oleh karenanya, pendidikan dan kebudayaan menjadi salah satu aspek pembangunan yang mendapatkan perhatian utama. Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setelah mencapai kemerdekaan, tujuan nasional yang menjadi kewajiban bangsa ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Maju dan tidaknya sebuah bangsa ditentukan oleh baik atau tidaknya pendidikan yang diterima oleh rakyatnya terutama pendidikan generasi penerusnya.

Merdeka tidak hanya dimaknai terbebas dari penjajahan, tetapi juga dimaknai sebagai pembebasan pola pikir dari pola pikir kolonial ke pola pikir menuju kemajuan bersama, menciptakan masyarakat baru untuk mencapai kesejahteraan dan berkeadilan dengan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Para tokoh yang telah diberi kepercayaan untuk mencurahkan pikiran dan tenaganya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sudah sepatutnya dituliskan agar apa yang mereka pikirkan dan meraka curahkan untuk pendidikan bangsa dapat menginspirasi generasi penerus.

Buku ini, yang berkisah tentang pemikiran dan perjuangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dari tahun 1945 sampai saat ini dalam memajukan Pendidikan dan kebudayaan, dapat kita baca sebagai refleksi terhadap usaha-usaha yang telah kita perjuangkan di bidang pendidikan. Dalam waktu yang bersamaan kita menerawang ke depan atau membuat proyeksi tentang pendidikan nasional yang kita cita-citakan. Kita perlu merenung sejenak untuk menengok ke belakang, melihat apa yang telah kita kerjakan di bidang pendidikan, untuk kemudian bergegas melangkah ke depan guna menggapai cita-cita masa depan pendidikan nasional yang didambakan.

Di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003, BAB I, Pasal 1 ayat 2, disebutkan bahwa pendidikan nasional kita adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan kebudayaan nasional adalah akar pendidikan nasional. Di sinilah terjadinya titik temu antara pendidikan dan kebudayaan. Jika kebudayaan nasional kita menghunjam kuat di dalam tanah tumpah darah Indonesia, akan subur dan kukuh pulalah bangunan pendidikan

nasional Indonesia. Di samping itu, disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan akan mempertegas posisi kebudayaan nasional sebagai ruh, pemberi hidup, dan penyangga bangunan pendidikan nasional kita. Oleh sebab itu, kebudayaan yang maju adalah prasyarat yang harus dipenuhi jika ingin pendidikan nasional tumbuh subur, kukuh, dan menjulang. Atas dasar pikiran tersebut, kita berkomitmen untuk terus berikhtiar membangun pendidikan. Pendidikan yang dihidupi dan disinari oleh kebudayaan nasional. Kita yakin bahwa kebudayaan yang maju akan membuat pendidikan kita kuat. Begitu pula sebaliknya, jika pendidikan kita subur dan rindang, akar kebudayaan akan lebih menghunjam kian dalam di tanah tumpah darah Indonesia.

Pada akhirnya, cita-cita pendidikan dan kebudayaan nasional hanya bisa terwujud jika kita bekerja keras dan berdaya jelajah luas. Hanya dengan cara itu, kerja pendidikan dan kebudayaan dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Dan buku ini, saya berharap, dapat menginspirasi kita semua dapat dalam membangun Indonesia sebagai bangsa adidaya budaya dengan pendidikan yang kuat di masa kini dan akan datang. Selamat membaca.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Muhadjir Effendy

DAFTAR ISI

Sambutan III
Direktur Sejarah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia

Sambutan IV
Direktur Jenderal Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia

Sambutan VI
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia

Pendahuluan 1

Ki Hadjar Dewantara 15

Todung Sutan Gunung Mulia 41

Mohammad Sjafei 49

Soewandi 59

Goenarso 65

Ali Sastroamidjojo 69

Teuku Moehammad Hasan 81

Ki Sarmidi Mangunsarkoro 93

Abu Hanifah 109

Bahder Djohan	127
Wongsonegoro	145
Muhammad Yamin	161
Soewandi Notokoesoemo	179
Sarino Mangun Pranoto	185
Prijono	195
Iwa Kusuma Sumantri	209
Toyib Hadiwijaya	225
Artati Marzuki Sudirdjo	241
Soemardjo	255
Johannes Leimena	263
Mohammad Said Reksohadiprodjo	277
Mohammad Sanusi Hardjadinata	291
Mashuri Saleh	307
Soemantri Brojonegoro	321
Teuku Mohammad Syarif Thayeb	329
Daoed Joesoef	343
Nugroho Notosusanto	359
Fuad Hasan	371
Wardiman Djojonegoro	385
Wiranto Arismunandar	401
Juwono Sudarsono	411
Yahya A. Muhaimin	425
Abdul Malik Fadjar	439
Bambang Soedibyo	453
Muhammad Nuh	467
Anies Rasyid Baswedan	485
Muhadjir Effendy	499
Penutup	513
Daftar Pustaka	516
Indeks	536
Narasumber	548
Tim Editor	549
Tim Penulis	550

BHINNEKA TUNGGAL IKA

PENDAHULUAN

Oleh Mukhlis PaEni

Pada tanggal 19 Agustus 1945, dua hari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Ki Hajar Dewantara dilantik menjadi Menteri Pengajaran pada Kabinet Presidensial I yang masa kerjanya sangat pendek, hanya empat bulan, dari 19 Agustus 1945 s/d 14 November 1945. Walau hanya berumur empat bulan, pengangkatan Ki Hajar Dewantara sangat penting artinya karena Ki Hajar Dewantara-lah yang meletakkan dasar-dasar pendidikan nasional Indonesia, yang formalnya diambil secarah utuh dari Konsep Pendidikan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan swasta yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 juli 1922, yang ketika itu bernama National Onderwijs Istitut Taman Siswa.

Pengangkatan Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri Pengajaran yang pertama dianggap sebagai sebuah momentum untuk memotong mata rantai sistem pendidikan kolonial yang didirikan Pemerintah Hindia Belanda yang dianggap sangat intelektualistik dan materialistik. Menurut Ki Hajar Dewantara, sistem pendidikan kolonial itu sangat gersang karena berbagai kebutuhan bangsa tidak terjawab atau dengan kata lain tidak terpenuhi. Lulusan Holand Indise School (HIS) yang didirikan pemerintah kolonial untuk bumiputera, misalnya, sekalipun memberi kesempatan yang luas pada bumiputera untuk memperoleh pendidikan, namun oleh Ki Hajar Dewantara dianggap tidak memberi harapan seperti yang diinginkan banyak orang.

Kegelisahan itulah yang mendorong Ki Hajar Dewantara merombak sistem pendidikan warisan kolonial dengan mengembalikannya ke suatu bentuk sistem baru, yang disebut dengan "Konsep Pendidikan Nasional Indonesia". Dasar-dasar Konsep Pendidikan Nasional berasal dari kepribadian bangsa. Dengan demikian, menurut Ki Hajar Dewantara, proses pembelajaran harus bertumpu pada ketiga hal berikut:

1. *Ing ngarsa sung tuladha,* yang berarti seseorang yang berada di depan harus dapat memberi teladan atau contoh. Siswa tidak hanya mempelajari pengetahuan semata, tetapi juga belajar tentang lingkungannya, termasuk belajar mengenai pribadi pendidiknya secara personal. Oleh karena itu para pendidik dituntut dan diharuskan memiliki karakter dan kepribadian yang dapat ditiru oleh anak didiknya.

2. *Ing madya mangun karsa,* yang berarti seseorang dituntut memiliki kemampuan untuk menciptakan kreativitas, prakarsa, ide-ide di antara orang lain. Kreativitas tersebut pada dasarnya menuntut seseorang agar dapat membangkitkan minat dan semangat belajar muridnya/siswanya. Dalam hal ini seorang guru tidak diperlukan mengajar terlalu banyak, tetapi diminta agar memberi motivasi sebanyak-banyaknya kepada murid/siswanya agar mampu berpikir kritis, mandiri, dan aktif.

3. *Tut wuri handayani,* seorang pendidik harus dapat memberi dorongan dan arahan kepada murid dan siswanya untuk mencapai tujuan dan cita-citanya. Caranya adalah seorang guru harus memberi dorongan kepada murid dan siswanya agar memahami bahwa dalam belajar selalu harus tuntas dan berkelanjutan karena itu merupakan kunci sukses.

Penunjukan Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri Pengajaran tidak dimaksudkan hanya sebatas pengajaran dalam arti sekolah dan pendidikan secara sempit, tetapi juga mencangkup masalah-masalah kebudayaan. Ki Hajar Dewantara merumuskan secara konsisten pandangannya tentang pembangunan kebudayaan nasional Indonesia, sebagaimana dilontarkankannya dalam "Polemik Kebudayaan" tahun 1930-an, bahwa yang disebut dengan kebudayaan nasional Indonesia sesungguhnya adalah "puncak-puncak kebudayaan daerah".

Dengan demikian, menurut Ki Hajar Dewantara, kebudayaan nasional Indonesia ialah puncak-puncak dan sari-sari kebudayaan yang bernilai tinggi di seluruh kepulauan, baik yang lama maupun ciptaan baru, yang berjiwa nasional. Karena itu janganlah segan-segan:

1. menghentikan pemeliharaan segala kebudayaan lama yang merintangi kemajuan kehidupan peri kemanusiaan;
2. meneruskan pemeliharaan kebudayaan yang bernilai dan bermanfaat bagi hidup dan peri kehidupan yang perlu perubahan diperbaiki dan disesuaikan dengan alam dan zaman baru; serta
3. memasukkan segala bahan kebudayaan dari luar ke dalam alam kebudayaan kebangsaaan kita, asalkan yang dapat memperkaya dalam kehidupan bangsa kita.

Pemahaman dasar tentang proses pembangunan kebudayaan nasional Indonesia dari Ki Hajar Dewantara inilah yang menjadi inti program pelestarian kebudayaan Indonesia yang dilakukan hingga kini, yang bertopang pada prinsip perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Pemahaman dasar tentang pelestarian kebudayaan Ki Hajar Dewantara inilah yang mengilhami Undang-undang Pemajuan Kebudayaan No. 5 Tahun 2017, seperti yang dituangkan dalam Undang-undang (UU) Pemajuan Kebudayaan sebagai berikut:

1. Bahwa untuk memajukan kebudayaan nasional indonesia diperlukan langkah strategis berupa upaya pemajuan kebudayaan melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.
2. Pemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.
3. Perlindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
4. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan kebudayaan.
5. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan objek pemajuan kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
6. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.

Ada tiga hal utama yang menjadi tonggak pembangunan pendidikan dan kebudayaan menurut Ki Hajar Dewantara, yakni sebagai berikut:

1. Pemotongan mata rantai sistem pendidikan buatan kolonial yang telah berlangsung lama, yang dianggap sangat intelektualistik dan materialistik.
2. Diletakannya sistem pendidikan nasional yang dasar-dasarnya berasal dari kepribadian bangsa, yang bertumpu pada *ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani.*

3. Pembangunan kebudayaan nasional Indonesia yang bertopang pada prinsip pelestarian budaya melalui kinerja, perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan.

Ketiga hal utama itulah yang sesungguhnya diolah dan dikembangkan dengan berbagai program oleh para Menteri Pendidikan dan Kebudayaan selanjutnya hingga hari ini. Ketika terjadi penggantian kabinet pada bulan November 1945, dari Kabinet Presidential ke Kabinet Syahril I, jabatan Menteri Pengajaran yang dijabat Ki Hajar Dewantara diserahterimakan ke tangan Mr. Todung Sutan Gunung Mulia Harahap, yang secara konsisten melanjutkan program pembangunan pendidikan dan kebudayaan yang telah diletakan dasar-dasarnya oleh Ki Hajar Dewantara, yang menyangkut tiga hal utama, yakni 1) mengubah kurikulum agar sesuai dengan wawasan kebangsaan, 2) memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan, serta 3) memperluas jangkauan lembaga-lembaga pendidikan agar tidak terfokus pada pendidikan umum saja, namun juga pada pendidikan agama. Selain itu Mr. Todung Sutan Gunung Mulia Harahap berhasil menerbitkan Surat Keputusan Pemerintah yang menetapkan bahwa urusan keagamaan yang semula bagian dari Departemen Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan berubah menjadi urusan Departemen Dalam Negeri. Mr. Todung Sutan Gunung Mulia Harahap hanya menjabat Menteri Pengajaran selama empat bulan, karena setelah Kabinet Syahrir II dibentuk ia pun diganti oleh Muh Syafei sampai dengan 2 oktober 1946, yang kemudian digantikan lagi oleh Mr. Soewandi. Keduanya dapat dikatakan tidak terlepas dari bayang-bayang kebijakan Menteri Pengajaran sebelumnya; bahkan ketika Mr. Soewandi menjabat sebagai Menteri Pengajaran ia membentuk Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia yang diketuai oleh Ki Hajar Dewantara. Salah satu tujuan utama panitia ini adalah menjabarkan secara rinci Program Kebijakan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan yang telah diletakkan oleh Ki Hajar Dewantara agar dapat diaplikasikan dalam program aksi dan dapat dilaksanakan secara merata di seluruh Indonesia. Sepanjang tahun sejak Kemerdekaan Indonesia 1945 s/d 1950 tidak banyak yang dapat dilakukan oleh para menteri kecuali melanjutkan kebijakan dan mengisi berbagai program dan melanjutkan tugas-tugas rutin di Kementerian Pengajaran. Dr. Abu Hanifah DT. Marajo Ameh menjadi Menteri Pengajaran Republik Indonesia Serikat (RIS) pertama dan sekaligus Menteri Pengajaran RIS terakhir. Masa jabatannya relatif lebih lama dibanding menteri-menteri pengajaran sebelumnya, yang rata-rata hanya menjabat kurang dari satu tahun, seperti Mr. Soewandi, Mr. Gunarso, Mr. Ali Sastroamidjojo, dan Mr. Teuku Moh Hasan, kecuali Sarmidi Mangunsarkoro yang menjabat lebih dari satu tahun.

Ada tiga hal penting yang menandai masa jabatan Sarmidi Mangunsarkoro selaku Menteri Pengajaran, yakni mewajibkan pengajaran agama untuk masing-masing penganut dan pembenahan Balai Pustaka menjadi lembaga penerbitan yang berada secara langsung di bawah Kementerian PP dan K dan ditargetkan secara khusus agar menerbitkan buku-buku bermutu untuk bacaan di semua sekolah. Hal ini penting karena kebutuhan buku untuk mendukung kegiatan belajar sangat penting artinya. Setelah Dr. Abu Hanifah, Dr. Bahder Djohan (1950–1951) dan (1952–1953) menjabat sebagai Menteri PP dan K. Ada tujuh hal utama yang menjadi fokus perhatian Dr. Bahder Djohan dalam pembangunan Pendidikan Nasional, yakni sebagai berikut:

1. Menentukan corak, macam, serta isi pendidikan dan pengajaran kepada warga negara baik dalam maupun di luar sekolah.

2. Menyelenggarakan, memimpin, menyokong, serta mengamati semua macam pendidikan pengajaran yang dimaksud pada butir "1".

3. Mengamat-amati pendidikan dan pengajaran bahasa asing.

4. Menyelidiki menurut syarat-syarat ilmu pengetahuan soal pendidikan dan pengajaran.

5. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi mengenai pendidikan dan pengajaran.

6. Mengikuti serta membantu perkembangan gerakan pemuda.
7. Menyelenggarakan berbagai macam perpustakaan guna pendidikan dan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintah.

Seperti yang diakui oleh Dr. Bahder Djohan bahwa ketujuh *point* yang disebutnya sebagai ruang lingkup yang harus dikerjakan oleh Kementerian PP dan K sesungguhnya seluruh dasar-dasarnya telah dirancang oleh menteri-menteri PP dan K sebelumnya.

Masa tugas Dr. Bahder Djohan selaku Menteri PP dan K berada di dua masa kabinet, yakni Kabinet M. Natsir dan Kabinet Wilopo. Masa itu disebut sebagai masa yang amat kritis dalam kehidupan kenegaraan kita setelah Indonesia Merdeka. Hal ini di sebabkan oleh 1) masalah Aceh, yang berawal ketika dibentuknya Provinsi Sumatera Utara dan pelantikan gubernur pertama provinsi itu setelah Kemerdekaan Indonesia yang beribukota di Medan, sementara Aceh diberi status hanya setingkat karesidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara; sementara ketika itu Aceh berada di bawah Gubernur Militer Tengku Muh Daud Beureueh; 2) masalah Irian Barat, yang disebut dalam keputusan Konferensi Meja (KMB) akan diserahkan kepada Indonesia setahun kemudian terhitung diakuinya kedaulatan Republik Indonesia Serikat (RIS) oleh Belanda, dalam hal ini menjadi tugas Kabinet Natsir. Dalam perundingan dengan Belanda mengenai Irian Barat terbaca bahwa Belanda menunjukkan keengganan menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Akibatnya Kabinet Natsir mendapat misi tidak percaya dari wakil PNI di kabinet dan Perdana Menteri Moh Natsir mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno. Jabatan Menteri PP dan K pun diserahkan oleh Dr. Bahder Djohan ke tangan Mr. Wongsonegoro dalam Kabinet Soekarno, yang masa kekuasaannya sangat pendek. Mr. Wongsonegoro tidak dapat melakukan banyak hal kecuali melanjutkan tugas-tugas kementerian yang sudah berjalan secara rutin. Masa jabatan menteri yang sangat pendek kembali terulang seperti sebelumnya. Moh Syafei hanya menjabat selama tujuh bulan (12 Maret–2 Oktober 1946), Mr. Soewandi sembilan bulan (2 Oktober 1946–Juni 1947), Mr. Gunarso 10 bulan (2 Oktober 1946–27 Juni 1947), Mr. Ali Sastroamitjoyo relatif lebih lama, yakni 2 tahun 2 bulan, mulai 3 Juni 1947 hingga 4 Agustus 1949.

Lain halnya dengan masa jabatan Mr. Moh Yamin relatif panjang (30 juli 1953–12 Agustus 1955), sehingga beberapa hal strategis pun banyak dilakukan. Hal ini juga sangat erat hubungannya dengan kecintaan Moh Yamin secara pribadi terhadap pendidikan, seni, dan kebudayaan. Paling tidak ada empat hal penting yang dilakukannya dan sangat strategis dampaknya hingga hari ini, yakni sebagai berikut:

1. Dirancangkannya secara resmi pemugaran Candi Prambanan.
2. Mengembalikan 1.151 benda budaya dari Belanda ke Indonesia, termasuk naskah-naskah Nusantara.
3. Kebijakan mendirikan Institut Keguruan Ilmu Pendidikan (IKIP) hingga berdiri 10 IKIP di seluruh Indonesia ketika itu.
4. Mengirim mahasiswa Indonesia belajar ke berbagai universitas luar negeri dan mengundang dosen-dosen asing untuk mengajar di berbagai universitas di Indonesia.

Selepas kepemimpinan Mr. Moh Yamin jabatannya Menteri PP dan K dipegang oleh Dr. Ir. RM. Soewandi Notokoesoemo, yang menjabat hanya tujuh bulan lamanya, dari tanggal 12 Agustus 1955 s/d 24 Maret 1956. Oleh karena masa jabatan yang pendek Ir. Soewandi hanya melanjutkan mekanisme dan rutinitas kementerian yang sudah berjalan baik. Demikian juga menteri selanjutnya. Ketika Kementerian PP dan K di bawah kepemimpinan Sarino Mangun Pranoto perhatian utamanya tidak lepas dari upaya menerapan kebijakan dari kebijakan menteri-menteri sebelumnya, terutama menjalankan program-program yang sudah diletakkan dasar-dasarnya oleh Ki Hajar Dewantara, Menteri Pengajaran RI Pertama. Walau

demikian barulah pada masa Sarino Mangun Pranoto mulai diterapkan sistem pendidikan nonformal dalam tatanan pendidikan nasional. Kiprah serius Mangun Pranoto di bidang pendidikan bukan hanya sejak menjadi Menteri PP dan K, tapi jauh sebelumnya. Ki Sarino Mangun Pranoto sudah dikenal sebagai tokoh pemikir bidang pendidikan di Taman Siswa. Oleh karena itu Ki Sarino Mangun Pranoto sangat tahu betapa besar peran pendidikan nonformal dan harus menjadi bagian penting dalam tatanan pendidikan nasional. Kepedulian dan perhatian yang sangat besar terhadap dunia pendidikan menyebabkan Ki Sarino Mangun Pranoto diangkat menjadi Menteri PP dan K untuk kedua kalinya pada tanggal 8 Maret 1966 pada Presidium Kabinet Dwikora II dan diangkat lagi pada Kabinet Ampera I yang diketuai oleh Jenderal Soeharto. Ki Sarino Mangun Pranoto diangkat kembali menjadi Menteri PP dan K s/d 14 Oktober 1967.

Di antara sederetan nama menteri PP dan K sampai dengan berakhirnya era Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, nama Prof. Dr. Prijono sangat menonjol, bukan era jabatannya selaku menteri Koordinator PP dan K yang sangat lama (1957–1967)—kurang lebih 10 tahun—tetapi juga karena banyaknya rancangan dan program yang ia kerjakan, yang dianggap sangat penting dan strategis untuk mendukung gagasan tentang penegasan Pancasila dan Manipol sebagai landasan pendidikan nasional. Atas alasan itulah Presiden Soekarno mengangkatnya sebagai menteri Koordinator Pendidikan dan kebudayaan. Pada tanggal 14 Maret 1957 Prof. Dr. Prijono pertama kali diangkat menjadi Menteri PP dan K pada akhir demokrasi liberal Kabinet Juanda (tahun 1957–1959).

Perubahan politik sejak Dekrit Presiden Soekarno 5 Juli 1959 secara perlahan juga mempengaruhi arah pendidikan nasional secara keseluruhan. Prof. Dr. Prijono sebagai salah satu seorang loyalitalis Presiden Soekarno dengan sangat cepat mengaitkan Manipol/USDEK dengan program-program pendidikan yang berjalan di Kementerian PP dan K.

Kebijakan sistem pendidikan nasional yang dianut ketika itu adalah pendidikan yang menghasilkan terciptanya/tersedianya tenaga ahli dalam pembangunan yang sesuai dengan syarat manusia sosialis Indonesia, yaitu berwatak luhur dan mampu melaksanakan Manipol/USDEK di bidang mental/agama/kebudayaan dengan syarat spiritual dan material agar setiap warga negara dapat mengembangkan kepribadiannya dan kebangsaan Indonesia serta menolak pengaruh buruk kebudayaan asing.

Kecintaan Prof. Dr. Prijono terhadap kebudayaan Indonesia, khususnya kebudayaan daerah, tidak dapat diragukan. Menurut Prijono kebudayaan daerah yang berkualitas tinggi, yang oleh Ki Hajar Dewantara disebut puncak-puncak kebudayaaan, akan memperkaya kebudayaan nasional.

Kesenian bangsa Indonesia haruslah berupa kesenian nasional dalam rohnya, tetapi dalam bentuknya bisa berupa kesenian daerah. Konsep Prof. Dr. Prijono tentang kesenian nasional tersebut menempatkan kesenian daerah dan pembangunan kesenian daerah berarti juga sama dengan pembangunan kesenian nasional. Oleh karena itu tidak mengherankan jika pada masa Prof. Dr. Prijono tumbuh dengan pesat kelompok-kelompok kesenian daerah dengan lagu-lagu daerah ataupun tarian daerah silih berganti pentas di ibukota atau di depan presiden di Istana Negara. Demikian juga grup kesenian berbagai daerah berkeliling dunia memperkenalkan Indonesia melalui tarian-tarian tradisional: tari Pakarena dari Makassar, tari Geding Sriwijaya dari Palembang, aneka tari Bali, Jawa, termasuk Grup Folk song Gardon Tabing yang berkeliling dunia dengan lagu-lagu Batak, dan seterusnya. Dinamika berkesenian pada masa Prof. Dr. Prijono sangat menekankan pentingnya kebudayaan daerah yang bermutu tinggi sebagai ikon nasional. Menurut Prijono komitmen pembangunan kebudayaan daerah haruslah diarahkan untuk menanamkan keutuhan kebangsaan sebagai suatu bangsa, bukan untuk suku-suku tertentu. Kesadaran atas kesukuan harus dihapus dan dibuang jauh-jauh, sebaliknya kesadaran kemanusiaan perlu ditingkatkan ke arah kesadaran kebangsaan dalam *nation bulding and education*.

Kebijakan Prof. Dr. Prijono tentang sistem pendidikan nasional yang disebut Panca Wardhana adalah rangkuman sistem pendidikan nasional yang pada hakikatnya adalah pendidikan yang diarahkan dengan pemusatan pada pertumbuhan dan perkembangan pribadi yang bercorak nasionalistik sesuai tuntutan revolusi Indonesia yang sedang berjalan. Tidak berlebihan untuk menyebut Prof. Dr. Prijono sebagai Menteri PP dan K yang paling berpengaruh pada masa kekuasaan Presiden Soekarno karena Prof. Dr. Prijono-lah yang paling menjiwai pandangan dan pemikiran Presiden Soekarno dengan mengadopsinya ke dalam kurikulum di semua lapisan/jenjang pendidikan.

Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kebijakan pendidikan yang berjalan selama masa kepemimpinan Orde Lama di bawah Presiden Soekarno sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sepenuhnya diwarnai oleh kebijakan yang lahir dari buah pikiran, perenungan, dan kreativitas Prof. Dr. Prijono selaku Menteri koordinator PP dan K. Pada masa Prof. Dr. Priyono menjabat selaku Menteri Koordinator Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian PP dan K dipecah menjadi dua Departemen:

1. Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (PD dan K), dan
2. Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (Departemen PTIP) Kementerian / Departemen PTIP bertugas:
   a) mengatur, menyelenggarakan, membimbing, dan mengawasi semua usaha pendidikan tinggi baik negeri maupun swasta, dan
   b) membimbing dan mengawasi perkembangan ilmu pengetahuan.

Menteri PTIP pertama adalah Prof. Iwa Kusuma Sumantri. Di antara tugas penting yang harus dilaksanakan oleh Menteri PTIP adalah menjaga pendidikan pemuda-pemudi kita agar tidak terkena "subversi mental". Untuk itu ia ditugasi melakukan pembersihan di kalangan dosen dan guru besar yang menjadi sumber subversi mental, yang berakibat tidak diterimanya Manipol/USDEK dalam implementasi sistem pembelajaran, sehingga perlu *retool* dan diganti dengan dosen-dosen dan guru-guru besar yang lebih muda yang lebih revolusioner dan progresif. Sebenarnya apa yang dilakukan Prof. Iwa Kusuma Sumantri melalui peremajaan dosen dan guru besar ketika itu merupakan implementasi program Ki Hajar Dewantara yang bertekad memotong mata rantai sistem pendidikan kolonial. Prof. Iwa melihat realitas bahwa dosen-dosen dan guru-guru besar ketika itu masih sangat bermental kolonial dan berjiwa Belanda, karena itu perlu dilakukan peremajaan dan mutasi secara besar-besaran.

Dalam masa jabatan yang tidak begitu lama, hanya sekitar delapan bulan (6 Maret 1962–13 November 1963) Prof. Iwa sempat meresmikan dua universitas baru, yakni Unversitas Syiah Kuala di Banda Aceh (1 Juli 1961) dan Universitas Sam Ratulangi di Manado (4 Juli 1961). Prestasi penting lain Prof. Iwa adalah terwujudnya UU Perguruan Tinggi.

Selepas kepemimpinan Prof. Iwa Kusuma Sumantri, Menteri PTIP dijabat oleh Prof. Dr. Ir. Toyeb Hadiwijaya yang mengembannya 1 tahun 6 bulan (1962–1964). Pada masa Prof. Toyeb Hadiwijaya inilah untuk pertama kalinya program/ konsep Tri Dharma Perguruan Tinggi diperkenalkan. Konsep tersebut mencakup tiga hal utama yang menjadi tonggak keberadaan Unversitas:

1. Pendidikan dan pengajaran,
2. Penelitian, dan
3. Pengabdian pada masyarakat.

Pada masa Jabatan Prof. Prijono selaku Menteri Koordinator Pendidikan dan Kebudayaan yang berlangsung dari tahun 1959-1966 ada beberapa Menteri yang bertugas di bawah koordinasinya antara lain sebagai berikut:

1. Prof. Iwa Kusuma Sumantri, selaku Menteri PTIP (Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan).
2. Prof. Dr. Ir. Toyeb Hadiwijaya selaku Menteri PTIP (Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan).
3. Ny Artati Marzuki Sudirdjo selaku Menteri PD dan K (Pendidikan dasar dan Kebudayaan).
4. Sumardjo, selaku Menteri PD dan K (Pendidikan dasar dan Kebudayaan).
5. Dr. J.Leimena selaku Menteri PTIP (Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan) di samping ia juga menjabat selaku waperdam II.
6. Moh. Reksohadipridjo selaku Menteri PD dan K (Pendidikan dasar dan Kebudayaan).

Tumbangnya kekuasaan Orde Lama di bawah Presiden Soekarno ditandai dengan berdirinya kekuasaan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Ketika itu Kabinet Ampera I yang dibentuk Presiden Soekarno masih berjalan sampai dengan Oktober 1967, namun karena situasi politik yang sangat panas Kabinet Ampera I berlangsung satu tahun saja dan diangkatlah Moh. Sanusi Hardjadinata menjadi menteri PD dan K mengawali kekuasaan Orde baru. Era ini ditandai dengan pesatnya Pembangunan Fisik/ Infrastruktur. Sementara di sisi lain, pada pembangunan pendidikan dan kebudayaan, tidak bergeser dari kebijakan yang telah digariskan oleh Ki Hajar Dewantara, yang oleh Kabinet Ampera II lebih dirinci dan diimplementasikan dalam Pokok-pokok Pikiran Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut:

1. Konsep pemikiran bahwa manusia sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat saling bergantung untuk mewujudkan suatu kehidupan yang akan melahirkan suatu usaha pendidikan yang timbal balik.
2. Pendidikan adalah suatu usaha memelihara setiap jiwa individu untuk tumbuh dan berubah bagi kebaikan dirinya dan kebaikan bangsanya serta untuk kepentingan umat manusia.
3. Dengan adanya pendemokrasian pendidikan dapat ditumbuhkan jiwa individu yang berkembang tanpa terkekang, sehingga membuahkan hasil yang sesuai dengan bakat masing-masing.
4. Mendidik adalah usaha mengurangi sifat yang tidak baik (menipiskan) dan menambah (menebalkan) sifat yang baik; inilah yang disebut pendidikan untuk mempribadikan seseorang, yaitu tahu harga diri, tidak merasa congkak, tetapi juga tidak merasa rendah diri.
5. Usaha pendidikan yang disebutkan di atas adalah suatu penerapan pembangunan mental melalui prinsip demokrasi, dengan semua pihak merasa memiliki hak dan kewajiban yang sama.
6. Pembangunan mental yang dilengkapi dengan pembangunan spiritual mendorong manusia pada suatu kecerdasan yang tertuju pada rasio. Kecerdasan membawa suatu rasionalitas yang dapat menumbuhkan kreativitas di dalam daya pikir seseorang, sehingga dapat menghasilkan sesuatu.
7. Mendidik tidak hanya menanamkan jiwa demokrasi dan sosial terhadap sesama, tetapi juga memberi pengajaran guna kecerdasan otak seseorang.
8. Kecerdasan tidak hanya mengarah ke intelektualisme, tetapi juga dapat melahirkan spirit sebagai suatu kemampuan untuk menyelenggarakan pembangunan material.
9. Pendidikan harus dimulai dari lingkungan keluarga, kemudian sekolah, lalu masyarakat. Pendidikan dalam keluarga mula-mula ditekankan pada pendidikan mental, kemudian spiritual, akhirnya pendidikan material. Dalam lingkungan sekolah dimulai dari pendidikan spiritual, material, dan kemudian pendidikan mental. Di lingkungan masyarakat arah pendidikan berjalan secara simultan, baik mental, spiritual, maupun material.

10. Pendidikan yang dimulai sejak di lingkungan keluarga dan dilanjutkan dengan tambahan pengajaran dengan sistem sekolah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat yang menghadapi pembangunan ekonomi dan penyempurnaan teknologi.

11. Pendidikan harus menganut falsafah bahwa manusia sendiri yang mengadakan (membangun) industri, perdagangan, transportasi, dan bukan ekonomi yang melahirkan manusia. Oleh karena itu mendidik harus diartikan memberi kemampuan untuk mengadakan sesuatu bagi keperluan hidup.

12. Pendidikan dengan sistem persekolahan secara prinsipil harus diubah dari "*theorie school*" menjadi "*doe school*", artinya mengusahakan sifat *vocasional* dari keilmuan yang bersifat teoritis. Orientasi anak harus diubah dari kontrasentris menjadi memakmurkan desa dengan industri agraris, sehingga desa merupakan ruang sekolah.

13. Kurikulum harus ditinjau secara menyeluruh; harus diadakan sinkronisasi dari SD sampai perguruan tinggi. Karena keadaan geografi, sosial, dan budaya diperlukan diferensiasi dengan pembangunan daerah masing-masing. Di samping itu ada unit kurikulum dalam beberapa mata pelajaran pokok guna mencapai kesatuan bangsa seperti bahasa, sejarah, ilmu bumi, dan *civics* (Suradi, 1986: 158; Dewantara, 1977).

Bahwa untuk mencapai cita-cita pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan maka prinsip pokok pembangunan pendidikan-kebudayaan harus didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 yang prinsip-prinsip pokoknya terkandung dalam Mukaddimah UUD 1945. Karena itulah maka warna pembangunan pendidikan dan kebudayaan Kabinet Ampera II didominasi oleh penerapan pendidikan Pancasila melalui berbagai sarana, seperti pendidikan agama, pendidikan perikemanusiaan, pendidikan kesatuan bangsa, pendidikan kerakyatan, dan pendidikan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Akhir jabatan Sanusi Hardjadinata ditandai dengan berakhirnya pula masa Kabinet Ampera II yang kemudian diganti dengan Kabinet Pembangunan I, yang ditandai dengan pengangkatan Mashuri Saleh, S.H. selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (1968–1973). Periode ini sangat penting bagi tonggak kekuasaan Orde Baru di bidang pendidikan dan kebudayaan. Mashuri Saleh-lah yang menetapkan pentingnya kebebasan ilmiah dan kebebasan mimbar bagi perguruan tinggi yang sebelumnya bertentangan dengan kebijakan Presiden Soekarno. Saat itu Mashuri Saleh masih menjadi Dirjen Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (1967–1968). Kebijakannya digunakan lagi untuk mengawali jabatannya selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam Kabinet Pembangunan (1968–1973). Pada saat itulah Presiden Soeharto selaku penguasa Orde Baru menyatakan keinginannya untuk menjadikan pendidikan nasional Indonesia selaku *saka guru* utama dalam Negara Republik Indonesia.

Menteri zaman Orde Baru selepas Mashuri Saleh, S.H. adalah Prof. Sumantri Brodjonegoro, Letjen TNI Dr. Teuku Syarif Thayeb, Prof. Dr. Nugroho Notosusanto, dan Prof. Dr. Fuad Hasan. Di antara menteri–menteri Orde Baru yang menonjol adalah Dr. Teuku Syarif Thayeb, yang menekankan pengulangan pentingnya *tut wuri handayani*, melakukan perluasan kesempatan belajar dan pembebasan SPP, serta perbaikan mutu pendidikan. Teuku Syarif Thayeb jugalah yang memulai pembangunan infratruktur gedung/sekolah/bangunan lain yang berhubungan dengan program pendidikan menggunakan dana Inpres.

Menteri–menteri lain yang menonjol adalah Prof. Daoed Yoesoef. Dialah satu-satunya menteri, selain Ki Hajar Dewantara, yang memiliki konsep utuh tentang pembangunan pendidikan dan kebudayaan sebelum dilantik menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Di antara kebijakannya yang menonjol dan mengundang kontroversial adalah pemberlakuan "Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK)". Kebijakan NKK/BKK dimaksudkan untuk menghilangkan kegiatan politik dan organisasi kampus. Menteri Orde Baru lain yang populer adalah Prof. Nugroho Notosusanto.

Periode jabatannya selaku menteri Dekdikbud tidak terlalu lama, walau demikian beberapa kebijakan yang dihasilkan antara lain menetapkan perubahan Kurikulum 1975 menjadi Kurikulum 1984 dan masuknya Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa" (PSPB) sebagai mata pelajaran wajib. Ketika itulah terjadi pergantian nomenklatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Gagasan Prof. Dr. Nugroho Notosusanto yang momentum dan kontroversial adalah implementasi kebijakan Orde Baru yang ingin menyatukan seluruh ormas dan partai politik di bawah bendera Pancasila. Untuk itu, selain menggalakkan Pendidikan Pancasila, Pendidikan Sejarah, PSPB, dan penataan P4, kebijakan tentang "Pancasila *in action*" perlu digalakkan, yakni Pancasila dalam tata pergaulan dan tata krama perlu dilaksanakan berdasarkan pembinaan dan keselarasan.

Selapas Menteri Nugroho Notosusanto, yang meninggal di tengah berbagai kebijakannya yang dianggap sangat kontroversial, Prof. Fuad Hassan diangkat menjadi Mendikbud. Masa jabatannya cukup lama, meliputi tahun 1985–1988 dan 1988–1993 atau sekitar sembilan tahun. Pada tahun-tahun pertama kepemimpinannya selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Fuad Hassan tidak dapat berbuat banyak, karena jabatan pertamanya sangat pendek (naik di tengah jalan). Barulah pada masa jabatan kedua tahun 1988–1993 berbagai kebijakan Fuad Hassan mulai mewarnai sistem pendidikan nasional. Salah satu di antaranya adalah pelaksanaan Evaluasi Tahap Akhir Nasional (Ebtanas) secara desentralisasi. Hal ini penting karena, menurut Fuad Hasan, prinsip desentralisasi menjamin mutu sekolah tetap terjaga. Fuad Hassan-lah yang melakukan perubahan penamaan gelar kesarjanaan yang dianggap sangat berbau kolonial, seperti Drs, Dra, Ir, dan sebagainya dengan gelar yang bernuansa Indonesia dan sekaligus menyebut bidang keilmuan dan kesarjanaan pemegang gelar. Salah satu sumbangannya di bidang kebudayaan adalah upaya memugar Galeri Nasional, yang baru selesai pada masa Prof. Wardiman Djoyonegara, yang juga populer dengan konsep *link and match* (kesesuaian dan keterpaduan), suatu konsep yang dikembangkan untuk meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan pembangunan. Di bidang kebudayaan Wardiman mempunyai peran sangat besar dalam penggunaan bahasa Indonesia di kalangan para pengusaha, industri, perbankan, dan pengembang. Dengan kata lain Wardiman adalah tokoh terdepan "kampanye pemasaran" bahasa Indonesia.

Tanggal 18 Maret 1998 Prof. Wiranto Arismunandar dilantik menggantikan Prof. Wardiman Djoyonegara menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Prof. Wiranto Aris Munandar merupakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terakhir zaman Soeharto. Prof. Wiranto sesungguhnya kurang bahagia ketika Presiden Soeharto memintanya menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menggantikan Prof. Wardiman. Prof. Wiranto Aris Munandar sangat menyadari bahwa ketika itu ia harus berhadapan dengan situasi yang amat panas yang mengarah ke istana. Demonstrasi dan pergolakan di kampus yang dipelopori mahasiswa mulai bermunculan. Ada yang mengaitkan pengangkatan Prof. Wiranto dimaksudkan agar ia dapat mengendalikan kampus, seperti ketika ia menjabat Rektor ITB yang terkenal amat keras, tegas, dan tak segan memberi *skorsing* pada mahasiswa yang membandel. Namun arus politik ketika itu sudah sangat besar dan deras yang sama sekali sulit untuk dibendung.

Pada masa akhir kekuasaannya Presiden Soeharto membentuk Kabinet Pembangunan VIII, berumur sangat singkat, efektif hanya tiga bulan (14 Maret 1998–21 Mei 1998). Juwono Sudarsono ketika itu menjabat Menteri Negara Lingkungan Hidup, akan tetapi pada era reformasi di bawah Presiden BJ. Habibie ia dipercaya menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang umurnya juga sangat singkat (1998–1999).

Hal utama yang menggangu ketenangan Juwono bekerja secara optimal pada masa kerjanya yang sangat singkat itu ialah timbulnya gelombang protes atas penerimaan dan legitimasi BJ. Habibie sebagai presiden karena Presiden Soeharto dianggap menyerahkan kekuasaan kepada BJ. Habibie secara sepihak dan BJ. Habibie dianggap masih produk Orde Baru. Walaupun masa jabatannya sangat singkat, tetapi karyanya di bidang pembangunan pendidikan dan kebudayaan sangat besar,

terutama pengesahan amandemen UUD 1945 pasal 31 tentang pendidikan yang menyatakan bahwa: negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnyya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Masa Yuwono menjadi sangat penting bagi pelaksanaan UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bertumpu pada desentralisasi, yang kemudian lebih populer dengan istilah otonomi pendidikan dan kemudian berdampak pada kurikulum muatan lokal. Pada masa Yuwono pulalah terjadi Perubahan IKIP secara besar-besaran menjadi universitas.

Selepas Yuwono Sudarsono jabatan menteri pendidikan selanjutnya didominasi oleh tokoh-tokoh yang didukung dua kekuatan besar organisasi Islam yang nonpolitik, yakni Yahya Muhaimin (Muhammadiyah), Abdul Malik Fajar (Muhamamdiyah), Bambang Soedibyo (Muhammadiyah), Muhammad Nuh (Nahdlatul Ulama/NU), Anies Baswedan (Muhammadiyah) dan Muhajir Effendi (Muhammadiyah).

Yahya Muhaimin mengawali kariernya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1999. Ketika itu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan diganti nama menjadi Departemen Pendidikan Nasional, yang mengakibatkan urusan kebudayaan pindah dan bergabung dengan pariwisata menjadi Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Sementara itu situasi politik dalam negeri kurang kondusif sebagai akibat kurang harmonisnya hubungan antara Presiden Abdul Rahman Wahid dengan berbagai tokoh nasional lainnya, termasuk DPR RI. Hal ini berdampak secara langsung pada kinerja menteri-menteri Kabinet Persatuan Nasional ketika itu, termasuk Yahya Muhaimin selaku Menteri Pendidikan Nasional yang terpaksa mengakhiri masa tugasnya seiring berhentinya Presiden Abdul Rahman Wahid selaku Presiden pada tanggal 9 Agustus 1999.

Ketika Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden dan membentuk Kabinet Gotong Royong (2001–2004), Prof. Abdul Malik Fajar diangkat menjadi Menteri Pendidikan Nasional. Salah satu gebrakan Malik Fajar adalah lahirnya UU Sistem Pendidikan Nasional (Sikdiknas) 2003. UU ini dinilai sangat reformatif karena memuat berbagai aturan sebagai tanggapan atas tuntutan keterbukaan, pendidikan harus futuristik, memandang jauh ke depan akan tetapi tidak boleh mengabaikan nilai-nilai esensi budaya sebagai warisan dari generasi ke generasi berikutnya. Ia bahkan menyebut bahwa "pendidikan harus berakar kuat pada nilai sejarah masa lalu".

Selepas Prof. Malik Fajar jabatan Menteri Pendidikan Nasional tetap dipegang oleh aktivis organisasi sosial berbasis keagamaan Muhammadiyah, yakni Prof. Dr. Bambang Sudibyo. Ia bukan hanya aktivis Muhammadiyah, tetapi juga seorang petinggi Partai Amanat Nasional (PAN) dengan jabatan Ketua Dewan Ekonomi. Bambang Sudibyo merupakan salah seorang yang ikut mendirikan PAN dan sekaligus menjadi anggota Majelis Amanat Rakyat (MAR). Ketika menjadi Menteri Pendidikan Nasional ia menekankan pada pendidikan transformatif yang menjadikan pendidikan sebagai motor penggerak perubahan masyarakat maju. Pemikiran dan gagasan Bambang Sudibyo ini sebenarnya berakar dari pandangan Muhammadiyah dalam transformasi pendidikan yang dasar-dasarnya telah diletakan oleh K.H. Ahmad Dahlan, Pendiri Muhammadiyah, bahwa tujuan pendidikan adalah lahirnya manusia-manusia baru yang mampu tampil sebagai ulama intelek dan intelek ulama, yaitu seorang Muslim yang memiliki keteguhan iman dan ilmu yang luas, kuat jasmani dan rohani.

Salah satu programnya yang sangat strategis adalah program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program ini ditunjukkan Pemerintah untuk memberi bantuan operasional sekolah yang berperan dalam pencapaian-pencapaian ketuntasan wajib belajar. Selain itu ia juga menerbitkan Peraturan Menteri tentang Sertifikasi Guru dalam jabatan. Melalui kebijakan ini Kementerian Pendidikan Nasional akan memiliki tenaga pendidik/guru yang terakreditasi. Hal ini sangat penting karena mutu guru/tenaga pendidik berhubungan langsung dengan kualitas murid/siswa yang dihasilkan.

Berbeda dengan tiga menteri sebelumnya, yakni Dr. Yahya Muhaimin, Prof. A. Malik Fajar, dan Prof. Dr. Bambang Sudibyo—yang ketiganya berasal dari basis Muhammadiyah—Prof. Dr. Ir. Muhammad Nuh, DEA berasal dari NU. Ia dilantik menjadi Menteri Pendidikan Nasional pada Kabinet Indonesia Bersatu II di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2009–2014). Pada zamannyalah urusan kebudayaan yang sebelumnya bergabung pada Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dikembalikan lagi pengurusannya pada Kementerian Pendidikan Nasional. Oleh karena itu kementerian ini bernama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada masa kepemimpinan Nuh-lah jabatan Wakil Menteri diadakan, yang ketika itu di duduki oleh Prof. Fasli Jalal, tetapi kemudian ketika terjadi *reshuffle* kabinet Prof. Dr. Fasli Jalal diganti oleh dua orang, yakni Prof. Dr. Ir. Musliar Kasim, M.S. yang menagani masalah pendidikan dan Prof. Wiendu Nuryanti, Ph.D. yang mengurusi bidang kebudayaan. Keduanya dilantik tanggal 19 Oktober 2011. Pengangkatan kedua Wakil Menteri tersebut tidak terlepas dari tugas berat yang dibebankan kepada Muh Nuh untuk segera menciptakan *grand design* pendidikan karakter bangsa.

Selepas Prof. Ir. Muhammad Nuh jabatan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan diserahterimakan kepada Dr. Anies Baswedan. Berbeda dengan menteri-menteri sebelumnya Anies adalah seorang akademisi yang juga tumbuh menjadi seorang aktivis yang memiliki berbagai kegiatan, yang hampir seluruh kegiatannya berhubungan dengan pendidikan. Selama 21 bulan atau 1 tahun 9 bulan banyak ide besarnya tentang pendidikan tidak bisa terwujud. Gerakan "Indonesia Mengajar" dan program "Indonesia Pintar" yang merupakan payung dari seluruh kebijakannya dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan terpaksa berhenti di tengah jalan karena *reshuffle* kabinet pada Juli 2016 dan jabatannya harus diserahterimakan ke tangan Prof. Dr. Muhadjir Effendy pada tanggal 27 Juli 2016.

Sejak dilantik pada tanggal 27 Juli 2016, selama dua tahun empat bulan masa jabatan, Prof. Muhadjir Effendy disibukkan penerapan kebijakannya yang sangat sterategis untuk pembangunan pendidikan dan kebudayaan Indonesia, antara lain memperkenalkan *voucher* biaya sekolah atau Rekening Tabungan Pendidikan, yang bertujuan untuk meningkatkan prestasi akademik pada siswa dan menghindari kemungkinan adanya korupsi dalam penyelenggaraan pendidikan. Selain itu ia juga memperkenalkan kebijakan *full day school*, yang dianggapnya dapat meningkatkan penguatan karakter peserta didik.

Kebijakan *full day school* mengundang kontroversi karena ditentang dan ditolak keras Prof. Ir. Muhammad Nuh, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebelumnya, yang membawakan suara penolakan dari NU. Masalah menarik lain yang mewarnai kebijakan Prof. Muhadjir adalah pencapaian Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun 2017 yang dinilai sangat buruk, di samping isu yang mengemuka bahwa mutu pendidikan nasional untuk jenjang SMP dan SMA mengalami penurunan massif. Berdasarkan atas realitas itu Prof. Muhadjir Effendy melakukan kebijakan moratorium UN yang kemudian dianulir oleh Presiden Joko Widodo dengan tetap menyelenggarakan UN sebagai parameter kelulusan. Duapuluh delapan bulan selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Muhadjir Effendy telah melakukan banyak hal tentang pembangunan pendidikan dan kebudayaan yang masih berlangsung hingga saat ini.

Ketigapuluh tujuh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengikuti pergantian kabinet/kekuasaan silih berganti dalam rentang perjalanan sejarah Indonesia yang sangat panjang selama 73 tahun (1945–2018) dengan penggantian kabinet sebanyak 41 kali, dimulai dari Kabinet Presidensial (9 September 1945–14 November 1945) di bawah Ir. Soekarno sampai dengan Kabinet Kerja di bawah Presiden Joko Widodo (27 Oktober 2014–sekarang). Dinamika sejarah yang panjang itu memperlihatkan sebuah panorama yang beraneka warna tentang berbagai kebijakan yang diterapkan untuk pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Indonesia.

Beraneka kebijakan yang sudah dilakukan ada yang melanjutkan kebijakan secara utuh program menteri sebelumnya, ada yang hanya mengambil ide kebijakannya saja kemudian memformulasikannya dalam bentuk baru, ada yang menolak kebijakan sebelumnya dan menciptakan kebijakan baru yang serupa

tapi tak sama, ada yang sama sekali menciptakan sesuatu yang baru dan mengundang pro-kontra keras. Keanekaragaman kebijakan itu pada dasarnya adalah tanggapan para menteri terhadap irama zaman yang berbeda-beda, serta tuntutan masyarakat mengenai kebutuhan pendidikan dan sentuhan kebudayaan yang selalu harus diaktualkan.

Namun demikian dari semua varian kebijakan yang silih berganti dari era yang satu ke era yang lain ada benang merah yang membentang dari hulu. Berawal dari buah renungan Ki Hajar Dewantara *ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani.* Benang merah ini bertaut melintas zaman hingga ke tujuan pendidikan nasional seperti yang sedang berproses hari ini: mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

SKEMA PEMIKIRAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1. Era Menteri Kebudayaan 19 Agustus 1945–5 Juli 1959 didominasi oleh program yang berlandaskan pada semangat mencari identitas pendidikan Nasional dan pembangunan kebudayaan yang berasal dari puncak-puncak Kebudayaan Daerah:
   Pandangan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan kebudayaan menjadi arus utama arah pembangunan, Pendidikan dan Kebudayaan
2. Era Demokrasi Terpimpin
   Tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno menyampaikan Dekrit kembali ke UUD 1945. Dekrit ini diikuti dengan pembentukan Kabinet Kerja I–IV (1959–1966), Kabinet Dwikora I–II (1964–1966), Kabinet Ampera I (25 Juli 1966–17 Oktober 1967). Masa ini disebut masa Demokrasi Terpimpin, disebut juga dengan Orde Lama, sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sampai dengan lahirnya Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Pada masa Demokrasi Terpimpin inilah Prof. Dr. Prijono menjadi Menko Pendidikan dan Kebudayaan, yang membawahi dua kementerian yang mengurusi pendidikan dan kebudayaan, yakni:
   a) Menteri Pendidikan Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP), dan
   b) Menteri Pendidikan dasar dan Kebudayaan.
   Hampir semua kegiatan di kedua kementerian ini didominasi oleh pemikiran Bung Karno tentang pembangunan manusia Indonesia masa depan, yang diterjemahkan oleh Prof. Prijono dalam sebuah rancangan tentang landasan pendidikan nasional yang disebutnya Panca Wardhana, terdiri atas:
   a) perkembangan cinta bangsa dan tanah air, moral, nasional/internasional keagamaan,
   b) perkembangan intelegensia,
   c) perkembangan emosional, artistik, atau rasa keharuan dan keindahan lahir batin,
   d) perkembangan kerajinan tangan, serta
   e) perkembangan jasmani.
3. Era Orde Baru
   Masa ini diawali dengan dibentuknya Kabinet Pembangunan I s/d VII, berlangsung mulai 6 Juni 1968 hingga 21 Mei 1998. Pergantian kabinet yang menyebabkan penggantian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tetapi presidennya tetap satu orang, yaitu Presiden Soeharto. Jadi dapat dikatakan bahwa semua Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kebijakan pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan ditujukan untuk menyebar luaskan pandangan Presiden Soeharto di bidang pendidikan dan kebudayaan, bahkan juga diperuntukkan menjaga kelanggengan kekuasaan Orde Baru.

4. Era Reformasi

Era reformasi ditandai dengan dibentuknya Kabinet Reformasi Pembangunan oleh BJ. Habibie 21 Mei 1998–26 Oktober 1999. Sangat banyak variasi dan kebijakan yang berganti secara cepat ketika itu. Pada masa kabinet parlementer pergantian kabinet sangat cepat dengan jatuh bangunnya kabinet, sejak 19 agustus 1945 s/d 5 juli 1959, yang secara langsung menyebabkan terjadinya penggantian menteri-menteri pendidikan dan kebudayaan, namun hampir tidak tampak adanya perubahan yang mendasar tentang arah dan tujuan dan kebijakan yang diterapkan di bidang pendidikan dan kebudayaan karena kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara selalu menjadi rujukan dari semua Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kabinet mana pun. Peran Taman Siswa sangat besar, karena idealisme Pendidikan Taman Siswa dapat menembus sekat partai dan kabinet mana pun.

Lain halnya pada era Reformasi. Pergantian kabinet berdampak pada penggantian presiden dan pergantian menteri, artinya program-program pun berganti secara cepat mengikuti kebijakan-kebijakan penguasa yang juga silih berganti, antara lain

a) Kabinet Reformasi Pembangunan (21 Mei 1998–26 Oktober 1999) di bawah Presiden BJ. Habibie.
b) Kabinet Persatuan Nasional 25 Oktober 1999–2001 Presiden Abdul Rahman Wahid.
c) Kabinet Gotong Royong 9 Agustus 2001–2004 Presiden Megawati Soekarnoputri.
d) Kabinet Indonesia Bersatu I–II Presiden Susilo Bambang Yudoyono 21 Oktober 2004–2014.
e) Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo 27 Oktober–sekarang.

Ki Hadjar Dewantara

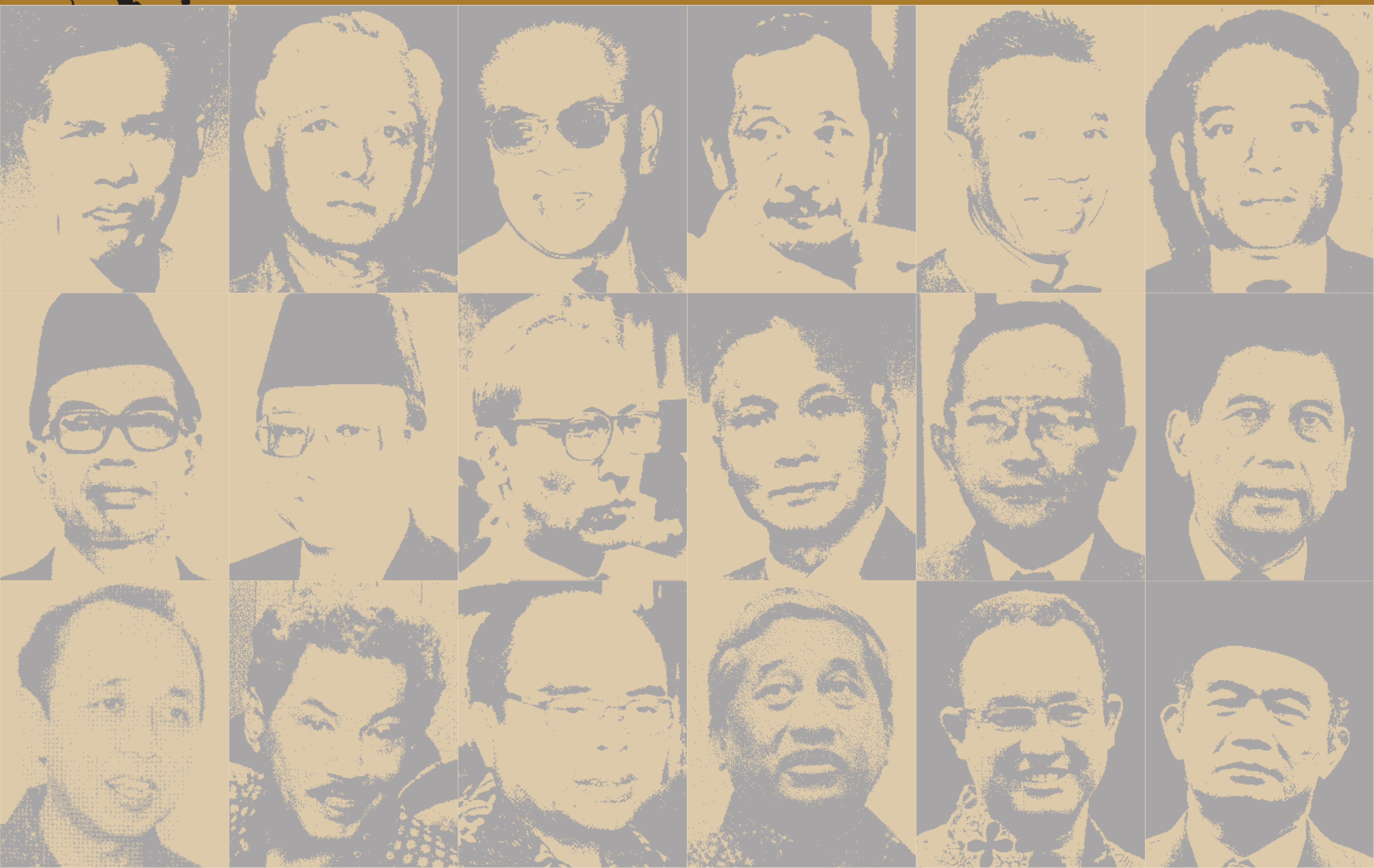

Masa Jabatan
19 Agustus 1945 – 14 November 1945

Ki Hadjar Dewantara

MASA KECIL DAN PENDIDIKAN

Ki Hadjar Dewantara lahir di Yogyakarta tanggal 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Soewardi Soerjaningrat,[1] putra bangsawan Pakualaman Gusti Pangeran Harjo Soerjaningrat dan cucu Sri Paku Alam III.[2] Sebagai bangsawan Jawa Soewardi Soerjaningrat berhak mendapat kesempatan menempuh pendidikan seperti anak-anak bangsa Eropa. Oleh karena itu sekolahnya dimulai di Europeesche Lagere School (ELS), yakni sekolah rendah untuk anak Eropa.[3] Pengiriman Soewardi dan kerabat Paku Alam ke sekolah Belanda tidak merusak pendidikan kejawaan, sebab di istana Paku Alam—seperti halnya di istana raja-raja Jawa lainnya—selalu disediakan guru untuk mengajar sejarah, kesusastraan, dan kesenian dalam arti luas.

Di kalangan keluarga dekat Soewardi dipanggil dengan *paraban* 'julukan' Denmas Jemblung. Nama itu selengkapnya Jemblung Joyo Trunogati.[4] Nama ini diberikan oleh sahabat ayahnya, Kyai Soleman, yang mendapat firasat bahwa dari tangis bayi yang lembut itu kelak suaranya akan didengar orang di seluruh negeri. Perutnya yang *jemblung* 'buncit' memberi firasat bahwa bayi itu kelak akan menelan dan mencerna ilmu yang banyak dan sesudah memasuki masa dewasa akan menjadi pemuda yang penting.

Masa kecil dan remaja Suwardi dikelilingi oleh budaya Jawa bercampur dengan Islam. Walaupun begitu sejak kecil Soewardi dikenal sebagai orang yang berjiwa merdeka dan penentang. Hal ini membuatnya tidak suka pada tradisi yang diterapkan di keraton, seperti adat *ndhodhok sembah*, yang mengharuskan seseorang berjalan jongkok sambil menyembah jika ingin bertemu dengan raja.[5]

Soewardi berkepribadian sangat sederhana dan sangat dekat dengan *kawula* 'rakyat'. Jiwanya menyatu lewat pendidikan dan budaya lokal (Jawa) guna menanggapi kesetaraan sosial dan politik dalam masyarakat kolonial. Kekuatan-kekuatan inilah yang menjadi dasar Soewardi dalam memperjuangkan kesatuan dan persamaan lewat nasionalisme kultural sampai dengan nasionalisme publik.[6]

Di lingkungan keluarganya ia merupakan orang yang tekun berolah sastra. Selain itu adanya langgar dan mesjid di dekat rumahnya mempertebal keyakinan agamanya. Setiap hari Jumat ayah Soewardi sholat di mesjid bersama ulama-ulama lain. Dari ayahnya, Pangeran Soeryaningrat, yang tinggi keagamaannya, Soewardi menerima ajaran Islam. Ayahnya memegang prinsip, "Syariat tanpa hakikat adalah kosong, hakikat tanpa syariat adalah batal". Selain agama, Soewardi juga mendapat pelajaran adat lama yang dipengaruhi oleh filsafat Hindu yang tersurat dalam ceritera wayang. Pun seni sastra, *gendhing*, dan seni suara dipelajari secara mendalam. Karena sejak kecil dididik dalam suasana religius dan dilatih mendalami soal-soal sastra dan kesenian lain, maka ketika dewasa ia sangat menyukai dan mahir dalam bidang-bidang tersebut. Pada waktu tinggal di Negeri Belanda sebagai orang buangan, misalnya, ia dikenal sebagai ahli sastra Jawa. Ia mendapat undangan Panitia Kongres Pengajaran Kolonial I di Den Haag untuk ikut serta dalam kongres tersebut (1916) dan diminta menyampaikan prasaran. Soewardi Soerjaningrat selalu berpendapat bahwa pendidikan kesenian sangat penting, karena pendidikan

---

1 Yohanes Suryo Bagus Tri. H, dkk., 2014, *Memoria Indonesia Merdeka*, Jakarta: Megawati Institute, hlm 55.

2 Darsiti Soeratman, 1989, *Ki Hadjar Dewantara*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, hlm. 8.

3 Suhartono Wiryopranoto, 2017, *Ki Hadjar Dewantara "Pemikiran dan Perjuangannya"*, Jakarta: Museum Kebangkitan Nasional, hlm. 9-10.

4 *Truno* berarti 'pemuda', *gati* (*wigati*) berarti 'penting'.

5 Yohanes Suryo, *Loc.Cit.*

6 *Loc.Cit.*, Suhartono Wiryopranoto.

Ki Hadjar Dewantara dan Nyonya, beberapa saat setelah melangsungkan pernikahan

(Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia)

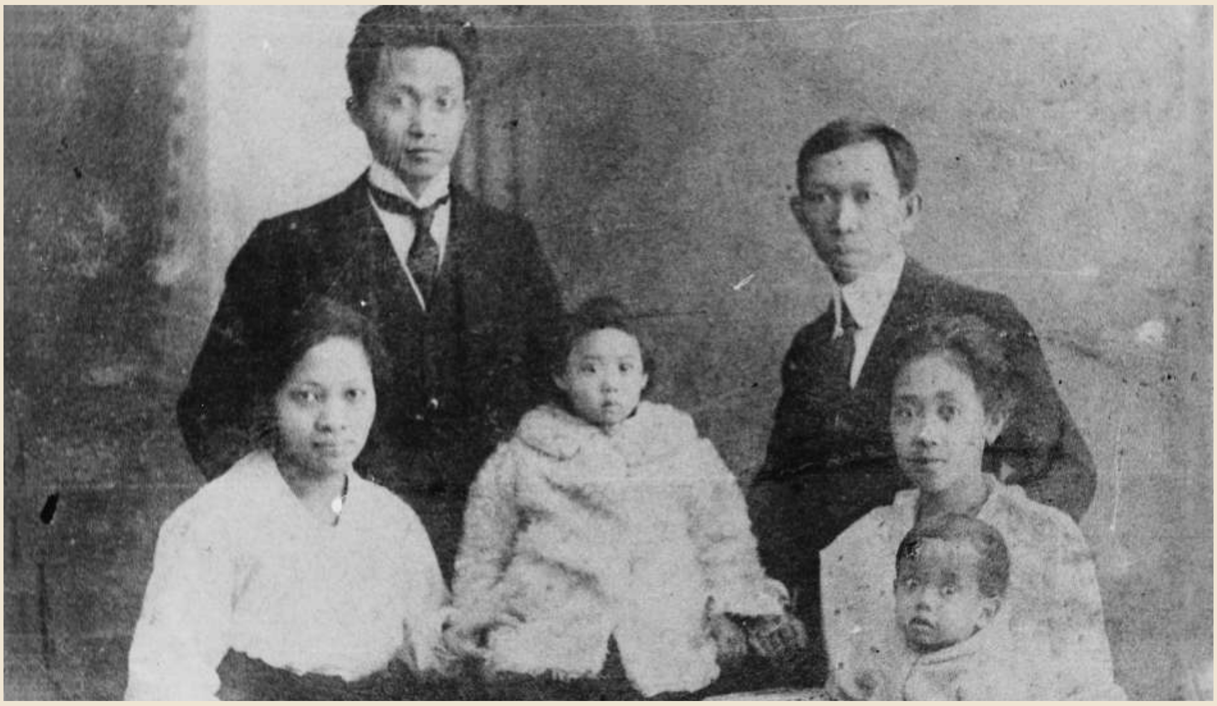

Ki Hadjar Dewantara bersama Keluarga

(Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia).

kesenian—yang disebut pula sebagai pendidikan estetis—dimaksudkan untuk menghaluskan perasaan terhadap segala bentuk lahir yang bersifat indah. Pendidikan estetis ini melengkapi pendidikan etis atau pendidikan moral, yang bertujuan menghaluskan hidup kebatinan anak. Dengan pendidikan etis anak-anak dapat mengembangkan berjenis-jenis perasaan, seperti religius, sosial, dan individual.[7]

Sesudah tamat sekolah dasar pada tahun 1904, timbul masalah dalam diri Soewardi, yakni ke mana akan meneruskan sekolah. Akhirnya Soewardi masuk Kwekschool (Sekolah Guru) di Yogyakarta. Tidak lama kemudian datang dokter Wahidin Soediro Hoesodo di Pura Paku Alaman dan menawarkan siapa yang mau masuk School tot Opleiding voor Indiesche Artsen (STOVIA, biasa disebut Sekolah dokter Jawa) di Jakarta dengan bea siswa. Soewardi menerima tawaran tersebut[8] dan mendapat kesempatan belajar di STOVIA (1905-1910), tetapi bea siswanya dicabut karena tidak naik kelas akibat sakit selama empat bulan. Ia terpaksa meninggalkan sekolah. Dari direktur sekolahnya ia mendapat surat keterangan istimewa atas kepandaiannya dalam bahasa Belanda. Sesungguhnya ada alasan lain yang lebih politis Soewardi dikeluarkan dari STOVIA. Pada suatu pertemuan ia membaca sebuah sajak dengan penuh penghayatan yang menggambarkan keperwiraan Ali Basah Sentot Prawirodirdjo. Tentu saja Direktur STOVIA tidak senang pada tindakan Soewardi.[9]

Walaupun tidak dapat menyelesaikan studi di STOVIA, tetapi ia memperoleh banyak pengalaman baru. Sebagai mahasiswa STOVIA ia harus masuk asrama. Jumlah anak yang tinggal di asrama tersebut sebanyak 200 orang dan berasal dari berbagai daerah di Indonesia dengan agama berbeda-beda. Bagi Soewardi tempat tinggal yang baru itu berbeda sekali dengan tempat asalnya. Suasana feodal yang dialami di rumah orang tuanya di Yogyakarta tidak terdapat di kota besar Jakarta. Oleh karena itu ia harus menyesuaikan diri. Seperti asrama pada umumnya, di asrama STOVIA juga berlaku peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh penghuninya, misalnya pada malam Idul Fitri penghuni asrama dilarang merayakannya dengan membunyikan petasan; padahal Idul Fitri bagi rakyat Indonesia mempunyai sifat nasional, sehingga yang merayakan bukan hanya orang-orang yang beragama Islam saja dan dengan kebiasaan membunyikan petasan. Oleh sebab itu Soewardi bersama dengan teman-temannya membunyikan beberapa puluh mercon. Akibatnya pemimpin asrama marah dan Soewardi bersama kawan-kawannya dimasukkan ke dalam kamar tertutup sebagai hukuman.[10]

7 *Op.Cit.*, hlm. 14-15.

8 *Ibid.*, hlm. 17-18.

9 *Ibid.*, hlm. 150.

10 *Ibid.*, hlm. 18-19.

Dari kiri ke kanan: Dr. Tjipto Mangunkusumo, Dr. E.F.E. Douwes Dekker dan Ki Hadjar Dewantara

(Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia)

DUNIA PERGERAKAN

Setelah keluar dari STOVIA, Soewardi sempat bekerja sebagai analis di laboratorium Pabrik Gula Kalibagor, Banyumas,[11] sebelum akhirnya kembali ke Yogyakarta dan bekerja di sebuah apotik.[12] Ia tidak terlalu lama tinggal di Yogyakarta karena kemudian pindah ke Bandung pada tahun 1912. Ketertarikannya terhadap pers mengantarkannya bekerja sebagai anggota redaksi harian *De Express* pimpinan E.F.E. Douwes Dekker dan ikut membantu *Oetosan Hindia* pimpinan H.O.S. Tjokroaminoto. Selain di kedua harian tersebut, Soewardi juga aktif di beberapa surat kabar, seperti *Sedjatama*, harian *Kaoem Moeda*, *Midden Java*, *S.I. Soerabaija*, *Tjahaja Timoer* (Malang), dan *Het Tijdschrift* (Bandung).

Selain jurnalistik Soewardi juga aktif dalam organisasi politik, bahkan sejak tahun 1908 ia menjadi anggota Boedi Oetomo. Ia juga menjadi Ketua Sarekat Islam (SI) cabang Bandung.

Perkenalan pertama kali Soewardi Soerjaningrat dengan Douwes Dekker berlangsung sekitar tahun 1908. Pada waktu itu Douwes Dekker menjadi redaktur *Bataviasche Nieuwsblad* yang dipimpin oleh Zaalberg. Douwes Dekker, nama lengkapnya Ernest Francois Eugene Douwes Dekker, adalah seorang jurnalis yang cakap. Pada tahun 1902, ketika kembali ke Indonesia dari tempat pembuangannya di Sailan (ia diasingkan oleh Inggris karena ikut Perang Bur di Afrika Selatan melawan Inggris) ia diterima menjadi koresponden surat kabar *De Locomotief*. Ia Kemudian pindah ke Harian *Soerabaijasch Handelsblad* dan sesudah itu pindah ke harian *Bataviasche Nieuwsblad*. Douwes Dekker dan Zaalberg sama-sama orang indo, tetapi sikap mereka terhadap bangsa Indonesia sangat berbeda. Zaalberg merendahkan bangsa Indonesia, sedangkan Douwes Dekker membela kepentingan bangsa Indonesia. Sebagai redaktur yang mempunyai wibawa terhadap atasannya, Zaalberg, Douwes Dekker dapat memasukkan beberapa pembantu dari bangsa Indonesia, di antaranya Suryopranoto, Cokrodirjo, Cipto Mangunkusumo, dan Gunawan Mangunkusumo. Dengan demikian harian tersebut sering memuat tulisan-tulisan yang mempropagandakan cita-cita kebangsaan, yang pada waktu itu sedang tumbuh dengan hebat. Soewardi menyebut bahwa "infiltrasi" yang amat efektif ini berkat jasa pertama kawannya, Douwes Dekker, sebagai "pelopor" pergerakan nasional.

Dalam waktu satu tahun kemudian tersiarlah cita-cita kebangsaan bangsa Indonesia di kalangan orang-orang Belanda yang terkemuka baik di lingkungan pemerintah maupun masyarakat Hindia Belanda. Karena dianggap berbahaya untuk keamanan orang-orang Belanda, direksi memecat Douwes Dekker dari jabatannya sebagai redaktur *Bataviaasch Nieuwesblad*. Meskipun demikian Douwes Dekker tidak berhenti bekerja untuk mencapai cita-citanya. Ia menerbitkan majalah *Het Tijdschrif*, yang cukup tersiar dan terbaca oleh kaum cendekiawan bangsa Indonesia. Soewardi yang pada waktu itu menjadi Ketua SI cabang Bandung sangat tertarik pada kegiatan Douwes Dekker. Bersama pemimpin-pemimpin lain yang berjiwa nasionalis dan revolusioner ia menjadi pembantu tetap majalah tersebut. Kemudian ia ikut mengasuh Harian *De Express*, sedang dr. Cipto Mangunkusumo menjadi anggota sidang pengarang.[13]

Soewardi, yang kemudian bergabung dalam kelompok Douwes Dekker, menambah kekuatan untuk mencapai cita-cita. Douwes Dekker merasa mendapat keuntungan besar karena kawan-kawannya yang baru tersebut berotak tajam, serta teguh pendirian dan keyakinan. Dalam gelanggang perjuangan tiga pimpinan itu, yaitu Douwes Dekker, Soewardi Soerjaningrat, dan dr. Cipto mangunkusumo, bekerja bahu-membahu. Mereka juga disebut *janget kinatelon* 'tiga serangkai'. Sesudah aliran nasionalisme dan revolusioner disiarkan melalui *Het Tijdschrift* dan *De Expres* serta dapat memasuki alam pikiran dan perasaan bangsa Indonesia, maka pada tanggal 6 September 1912 didirikanlah Indiesche Partij (IP).

11 *Ibid.*, hlm. 151.

12 Linda Sunarti, dkk., *Tokoh Indonesia Teladan Buku Kesatu*, Jakarta: Kementrian Dalam Negeri RI, 2017, 114.

13 Darsiti Soeratman, *Op.Cit.*, hlm. 36-37.

Sejak lahir partai ini secara langsung memperkenalkan diri sebagai "partai politik" yang berhaluan kebangsaan, kerakyatan, dan kemerdekaan.[14] Dalam memperjuangkan cita-citanya, yakni Indonesia Merdeka Berdaulat, ketiga pemimpin tersebut bersemboyan *rawe-rawe rantas, malang-malang putung.* Keanggotaan IP tidak memedulikan kebangsaan. Asal mengakui Indonesia sebagai negara dan tanah air, orang dapat masuk menjadi anggota IP. Dasar pemersatu bagi IP adalah penderitaan bersama di bawah kolonial.[15]

Manuver IP mengkhawatirkan pemerintah kolonial Belanda karena tujuan IP mencapai kemerdekaan Hindia Belanda dari Belanda. Oleh karena itu pada tanggal 31 Maret 1913 pucuk pimpinan IP mengambil keputusan untuk menyelamatkan anggota-anggotanya dengan membubarkan IP dan menganjurkan agar seluruh anggotanya pindah ke Insulinde pimpinan Douwe Dekker. Dengan jalan demikian IP tetap ada, tetapi dengan pakaian lain. Sementara itu Douwes Dekker berpendapat dibutuhkan organisasi nasional yang harus berjuang untuk mencapai persamaan derajat bagi seluruh bangsa Hindia Belanda dan persiapan-persiapan yang nyata untuk kemerdekaan bangsa dan tanah air.

Pada awal Juli 1913 Cipto Mangunkusumo dan Soewardi Soerjaningrat mendirikan Komite Boemiputera sebagai tandingan Komite Perayaan 100 Tahun Kemerdekaan Belanda, yang dimaksudkan untuk menampung isi hati rakyat yang memprotes penyelenggaraan perayaan memperingati satu abad kemerdekaan Kerajaan Belanda. Peringatan akan dirayakan baik di Negeri Belanda maupun di tanah jajahan[16] dan puncaknya akan dilangsungkan pada tanggal 15 November 1913. Brosur pertama yang dikeluarkan oleh Komite berupa karangan Soewardi Soerjaningrat berjudul "*Als Ik een Nederlander was*" (Seandainya Saya Orang Belanda). Pada bagian akhir tulisan tersebut Soewardi memberi gambaran segi-segi negatif tindakan ikut merayakan hari Kemerdekaan Belanda bagi Bangsa Indonesia. Ia menulis bahwa perayaan itu sedikit pun tidak ada manfaatnya bagi bangsa Indonesia.[17]

Bahwa niat perayaan itu mengingatkan kepada rakyat: selama Idenburg menjabat sebagai wali negara, Negeri Belanda tidak akan memberi kemerdekaan kepada Indonesia.

Hajat perayaan itu memberi pengajaran kepada kita, bahwa tiap-tiap orang wajib memperingati hari pernyataan kemerdekaan rakyatnya dengan sekhitmad-khitmadnya.

Soewardi juga menulis kritik melalui artikel "*Een voor Allen, Maar ook Allen voor Een*" (Satu untuk Semua tetapi juga Semua untuk Satu) yang dimuat di harian *De Express* edisi bulan Juli 1913.[18]

Soewardi menganjurkan pembentukan "Panitia Nasional" untuk bangsa Indonesia dengan maksud agar pada hari perayaan Kemerdekaan Nederland itu panitia mengirim telegram pernyataan selamat kepada Ratu Belanda dengan disertai permohonan agar artikel 111 Peraturan Pemerintah dibatalkan dan segera dibentuk parlemen. Dalam membela rakyatnya Soewardi menulis "bukan saja tidak adil, tetapi sangat tidak patut, apabila penduduk bumiputera disuruh menyumbang uang untuk membelanjai perayaan itu. Tidak hanya diminta untuk ikut berpesta, tetapi juga hendak dikosongkan kantongnya". Menurut Soewardi sungguh suatu penghinaan lahir dan batin.[19] Sementara itu Tjipto Mangoenkoesoemo menulis artikel "*Kracht of Vrees?*" (Kekuatan atau Ketakutan?).

Akibat kritik tajam itu Soewardi dan Tjipto Mangoenkoesoemo diasingkan oleh pemerintah kolonial

14 *Ibid.*, hlm. 37-38.

15 *Ibid., hlm. 38*-39.

16 *Ibid.*, hlm. 39-40.

17 *Ibid.*, hlm. 43.

18 *Ibid.*, hlm. 115.

19 *Ibid.*, hlm. 44-45.

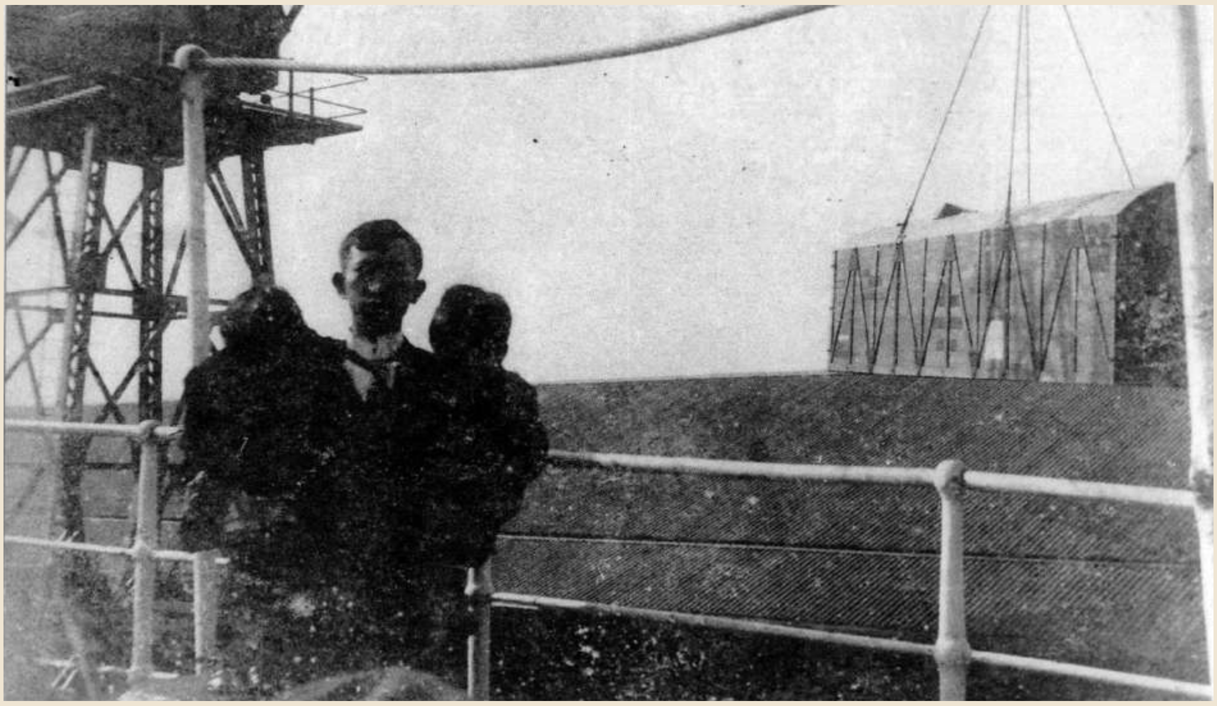

Ki Hadjar Dewantara pada masa pembuangan. Ia menjalani pembuangan dari tahun 1913-1919

(Sumber: Biro Umum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)

Belanda. Soewardi ditahan di Bangka, sedang Tjipto Mangoenkoesoemo ditahan di Banda Neira. Sementara itu Douwes Dekker diasingkan ke Kupang sesuai dengan Keputusan Pemerintah Hindia Belanda No. 2a tanggal 18 Agustus 1913. Douwes Dekker ditahan karena memuji tulisan teman-temannya melalui artikel "*Onze Helden, Tjipto Mangoenkoesoemo en R.M. Soewardi Soerjaningrat*" (Pahlawan-pahlawan kita, Tjipto Mangunkusumo dan R.M. Soewardi Soerjaningrat). Akhirnya mereka dipindahkan ke Belanda.[20]

Pada saat sidang pengadilan dan vonis dijatuhkan, Soerjaningrat hadir. Begitu sidang ditutup, Soewardi menghampiri ayahandanya. Sesaat Soerjaningrat mengulurkan tangannya seraya berkata, "Aku bangga atas perjuanganmu. Terimalah doa dan restu Bapak. Ingat, seorang kesatria tidak akan menjilat ludahnya kembali."[21] Pada saat itu Soewardi pengantin baru; meskipun sudah menikah, tetapi belum diresmikan di depan masyarakat. Peresmian terpaksa tidak dilaksanakan karena Soewardi dan istri harus segera meninggalkan tanah air. Pada malam hari sebelum mereka berangkat diadakan pergelaran wayang kulit untuk menghormati keberangkatan pemimpin-pemimpin tersebut bersama dengan keluarganya di Negeri Belanda, tempat pengasingan mereka. Bapak Muhammadiyah Kiai Haji Dahlan bersama istri hadir pada malam itu. Keduanya sangat terharu.[22] Soewardi berangkat ke Belanda bersama istrinya naik kapal Bungalow milik maskapai pelayaran Jerman pada pada tanggal 6 September 1913.

Setibanya di tanah pengasingan yang harus dilakukan pertama-tama oleh Soewardi dan istrinya adalah menyesuaikan diri dengan iklim dan lingkungan tempat tinggal baru. Di daerah tropis orang pada umumnya tidak memusingkan pakaian untuk musim panas atau musim hujan. Tidak demikian halnya di negeri dingin. Setiap orang harus memiliki baju, mantel, dan alat perlengkapan, seperti sepatu, sarung tangan, topi, dan kain leher khusus untuk musim dingin. Selain itu juga harus tersedia beberapa selimut tebal untuk keperluan tidur, di samping alat pemanas di rumah. Cara mengatur rumah juga harus disesuaikan dengan lingkungan dan keadaan baru.[23] Di tanah pengasingan Soewardi dan dua orang kawan seperjuangannya hidup dengan biaya yang sangat terbatas. Pemerintah Belanda memberi bantuan namun sangat terbatas karena mereka menolak keputusan sebelumnya. Bantuan lain diterima dari Indonesia yang dikirim oleh "Dana TADO", yakni dana dari perkumpulan Nationaal Indiesche Partij (NIP), partai baru yang menampung bekas anggota IP. Pengumpulan dana tersebut dimaksudkan

20 Suhartono Wiryopranoto, dkk., *Op.Cit*. Hlm. 152.

21 *Ibid*., hlm. 153.

22 Darsiti Soeratman, *Op.Cit*., hlm. 46.

23 *Ibid.,* hlm. 51.

Rumah Ki Hadjar Dewantara di jalan Tanjung (sekarang jalan Gajah Mada) yang bagian serambinya dijadikan sebagai ruang kelas. Ki Hadjar Dewantara dan keluarganya menempati dua ruang tengah pada rumah ini

(Sumber: Biro Umum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)

untuk menunjang perjuangan menuju kemerdekaan. Soewardi dan istri mendapat kiriman f 150 per bulan. Demikian pula Cipto Mangunkusumo dan istri. Adapun Douwes Dekker dan istri dengan dua orang anakknya mendapat kiriman f 250 per bulan.[24] Walaupun dengan keuangan sangat terbatas Soewardi selalu memegang teguh prinsip berdiri di atas kaki sendiri. Ia menolak bantuan yang sekiranya akan mengikat agar tidak kehilangan kebebasan.

Di Negeri Belanda Soewardi bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang sedang menuntut ilmu di berbagai universitas di negeri tersebut, di antaranya Sartono, Soebardjo, Laoh, dan Samsi. Soewardi sering mengadakan pertemuan dengan mereka untuk bertukar pikiran. Pertemuan biasanya dilangsungkan di tempat kediaman Soewardi sambil menikmati masakan Indonesia. Keluarga Soewardi sering membeli hati ayam, ampela, iso, babad, dan sejenisnya karena harganya sangat murah. Orang Belanda tidak mau makan *jeroan* ‘bagian dalam’ ayam dan bagian lain, seperti, sayap, leher, kepala, dan kaki. Berhubung Soewardi sering membeli *jeroan* ayam dalam jumlah besar, suatu ketika bertanyalah si penjual, “Berapakah anjing tuan di rumah?”. Perlu diketahui bahwa di Barat *jeroan* dan sejenisnya menjadi makanan anjing.[25]

Untuk mencukupi biaya hidup yang tinggi, Soewardi mengirim artikel atau karangan lain ke surat kabar atau majalah di Negeri Belanda. Ia juga tetap membantu menulis untuk surat kabar *Oetoesan Hindia* yang diasuh oleh Cokroaminoto. Sebagai imbalannya ia menerima uang f 50 setiap bulan. Dari sahabat-sahabatnya orang Indonesia yang telah lebih lama tinggal di Negeri Belanda, Soewardi mendapat bantuan barang dan bahan makanan. Mr. Gondowinoto, misalnya, memberi bantuan alat-alat rumah tangga, beras, dan pakaian. Dari bekas gurunya di STOVIA, Dr. Koolemans Beymen, yang pada waktu itu menjadi profesor di Universitas Den Haag, dan keluarganya ia menerima banyak bantuan untuk keperluan kesehatan.[26] Ia juga bersahabat dengan seorang bangsawan yang mengikuti zaman, seorang putra raja yang mempunyai dasar demokratis dan banyak memikirkan kepentingan rakyat. Nama bangsawan itu RMA Suryo Pranoto, putra Mangkunegaran. Betapa gembira Soewardi ketika mendengar berita bahwa RMA Suryo Pranoto dinobatkan menjadi Mangkunegara VII pada tahun 1916. Besar harapannya bahwa sahabatnya yang berpikiran modern itu—yang kemudian mempunyai kesempatan untuk melaksanakan cita-citanya—dapat bekerja sesuai dengan gagasannya yang demokratis. Soewardi menilai raja baru tersebut sebagai orang yang berpendirian kuat dan telah melalui beberapa percobaan

24 *Ibid*., hlm. 55.

25 *Ibid.,* hlm. 57.

26 *Ibid*., hlm. 57-58.

Atas

Ki Hadjar Dewantara dan keluarga bersama teman-teman dekatnya di negeri Belanda sebelum kembali ke Tanah Air pada tanggal 19 September 1919

(Sumber: Biro Umum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)

Tengah

Ki Hadjar Dewantara (duduk bersila paling kanan) berfoto bersama kawan-kawannya di Negeri Belanda menjelang kepulangan Dokter Cipto Mangunkusumo ke Hindia Belanda.

(Sumber: Biro Umum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)

Bawah

Keluarga Ki Hadjar Dewantara sesaat setelah tiba dari pengasingan di negeri Belanda

(Sumber: Biro Umum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)

Atas

Ki Hadjar Dewantara dan Nyi Hajar Dewantara bersama anak-anak didiknya pada peringatan tujuh bulan berdirinya Perguruan Taman Siswa 11 Januari 1923

(Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia)

Tengah

Ki Hadjar Dewantara bersama siswa Taman Guru dari Perguruan Taman Siswa. Gambar tersebut diambil pada tanggal 6 Juli 1935 di depan sekolah Taman Guru

(Sumber: Biro Umum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)

Bawah

Ki Hadjar Dewantara bersama para Siswa Taman Indria di depan Pendapa Agung Taman Siswa

(Sumber: Biro Umum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)

Sekolah Taman Siswa yang pertama, mulanya diadakan di rumah Ki Hadjar Dewantara

(Sumber: Biro Umum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)

dalam hidup sehingga mencapai kematangan pribadi. Pada waktu masih belajar di Negeri Belanda Suryo Pranoto terkenal sebagai tokoh yang sangat simpatik dan pandai bergaul dengan orang-orang muda ataupun orang tua. Ia seorang pemuda yang selalu gembira dan disebut oleh kawan-kawannya "lebah yang selalu menyanyi". Keluarga Soewardi sangat senang apabila ia tiba-tiba muncul di rumah mereka pada malam-malam yang dingin. Kedatangannya selalui disertai kebiasaan bersenandung lagu-lagu Jawa.[27]

Soewardi sangat bangga terhadap pangeran tersebut, seorang yang meninggalkan kehidupan mewah, bekerja sebagai pembantu juru tulis yang pada waktu itu disebut dengan istilah *magang*, kemudian menjadi *mantri* di kabupaten, dan sebagian pendapatannya ditabung untuk membiayai berbagai kursus guna menambah pengetahuan. Karena mempunyai kepandaian yang cukup dalam Bahasa Belanda dan Bahasa Jawa, Suryo Pranoto diangkat menjadi penerjemah di Surakarta, dan kemudian pergi ke Negeri Belanda untuk memperdalam pengetahuan mengenai bahasa-bahasa di Nusantara dan bahasa Belanda. Selama berada di negeri dingin itu Suryo Pranoto tetap mengikuti kejadian-kejadian di tanah air. Perhatiannya terhadap pergerakan Jawa Muda sangat besar. Oleh sebab itu ketika kembali ke tanah air Suryo Pranoto mendapat penghargaan dari bangsanya, diangkat menjadi ketua Boedi Oetomo. Hubungan erat Soewardi dengan Suryo Pranoto berlanjut hingga Soewardi Soerjaningrat dikenal dengan nama Ki Hadjar Dewantara. KGPAA Mangkunegara VII itu memberi perhatian dan bantuan yang besar bagi lembaga Taman Siswa yang didirikan Soewardi, di antaranya meminjamkan gedung milik Mangkunegaran untuk Taman Siswa Cabang Sala. KGPAA Mangkunegara VII juga memberi bantuan berupa uang untuk membangun penginapan di komplek Pendapa Agung Yogyakarta bagi tamu putri dari India yang belajar tari serimpi di Taman Siswa.

Di Belanda Soewardi dan kawan-kawannya bergabung dalam Indonesia Vereeniging 'Perhimpunan Indonesia'. Soewardi aktif menulis di *De Indier* (majalah Het Indonesische Verbond van Studerenden) dan *Hindia Poetera* (majalah Perhimpunan Indonesia).[28] Selain itu Soewardi juga mendapat kesempatan menimba ilmu selama di pengasingan. Sementara itu pada tahun 1914 dr. Cipto Mangoenkoesoemo diizinkan pulang kembali ke Hindia Belanda karena menderita sakit. Pada tahun 1916 Soewardi berhasil mendapat ijazah guru Eropa dalam bidang paedagogie.[29] Atas anjuran perkumpulan "Algemeen Nederlandsch Verbond", "Oost en West", dan "Sociaal Democraties Arbeiders Party" Soewardi

27 *Ibid.*, hlm. 59-60.

28 Dr. B. Setiawan, dkk., *Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 8*, Jakarta: PT Delta Pamungkas, 2004, 330.

29 *Ibid.*

Ki Hadjar Dewantara Bersama Nyi Hajar Dewantara berkunjung ke Balai Pustaka Jakarta Tahun 1936

(Sumber: Biro Umum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)

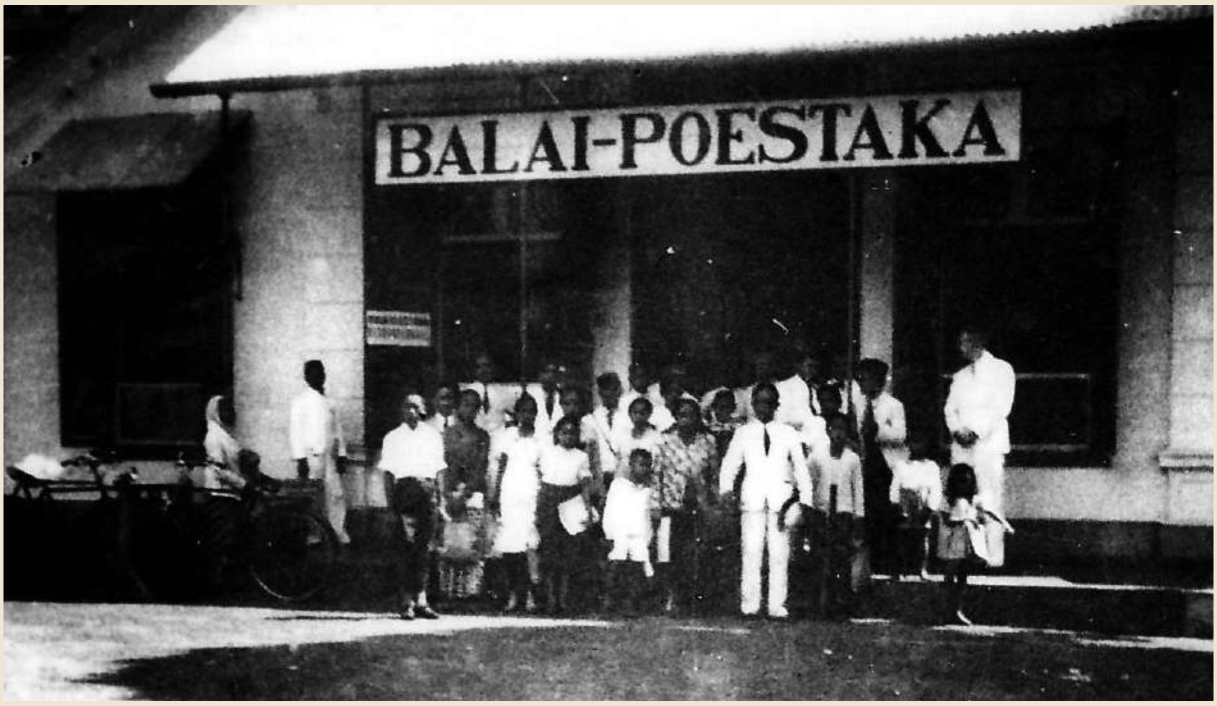

berkeliling memberi ceramah dan penerangan dengan menggunakan film. Ia menerangkan keadaan sebenarnya mengenai Indonesia, keinginan rakyat, serta menyanggah cerita-cerita bohong yang disebarkan oleh Pemerintah Belanda tentang keadaan Indonesia.[30]

Selain menulis di *De Indier* dan *Hindia Poetera* Soewardi juga menulis di *Het Volk* dan *De Groene Amsterdammer*. Salah satu tulisannya yang di muat di *Het Volk* adalah "*Terug naar het front*" (Kembali ke Medan Perjuangan). Ia juga memimpin pertunjukan kesenian dalam peringatan ulang tahun kesepuluh Boedi Oetomo pada tanggal 20 Mei 1918 serta turut menerbitkan buku kenang-kenangan *Sumbangsih* bersama Drs. Sosrokartono dan RM Notosuroto. Pada bulan September 1918 ia mendirikan kantor berita Indonesische Persbuereau di Belanda. Kantor berita ini merupakan kantor berita pertama yang menggunakan nama "Indonesia" dan digunakan di suratkabar negeri Belanda. Melalui berbagai tulisan kantor berita ini melakukan perlawanan terhadap rencana pemerintah kolonial Belanda membentuk Koloniale Raad.[31] Kantor berita tersebut juga menjadi tempat berkumpul orang-orang Indonesia yang menuntut ilmu di Belanda dan menjadi pusat propaganda bagi pergerakan kemerdekaan Indonesia. Pada tahun yang sama Dr. E.F.E. Douwes Dekker kembali ke Hindia Belanda menyusul dr. Tjipto Mangoenkoesoemo. Soewardi Soerjaningrat sebenarnya sudah bebas dari masa hukuman sejak tanggal 17 Agustus 1917, namun karena pada saat itu perang dunia sedang berkecamuk di Eropa Soewardi belum bisa kembali ke Hindia Belanda. Selain itu masalah keuangan juga membuatnya kesulitan untuk mendapatkan tiket pulang. Sebenarnya Mr. Van Deventer dan kawan-kawan sempat menawarkan bantuan, tetapi ia menolak dengan sopan.[32]

Keputusan Pemerintah Belanada mengakhiri pengasingan membuat Soewardi dan keluarganya merasa keluar sebagai pemenang dari segala duka derita.[33] Ia kembali ke Hindia Belanda pada tahun 1919 bersama istri dan kedua putranya yang lahir Belanda, Astri Wandansari dan Subroto Ario Mataram (nama anak kedua merupakan pemberian dr. Douwes Dekker, teman senasib dan seperjuangan Soewardi).[34] Setibanya di Hindia Belanda ia diangkat sebagai Ketua Pengurus Besar Nasional IP dan sebagai pembina *De Express*, *De Beweging*, dan *Persatoean Hindia* yang berkedudukan di Semarang. Namun tak lama kemudia ia menjadi jurnalis pertama Indonesia yang terkena ranjau

30 Suhartono Wiryopranoto, dkk., *Op.Cit*., hlm. 154.

31 *Ibid*., hlm. 157.

32 *Ibid*., hlm. 156.

33 *Ibid*., hlm. 61.

34 Darsiti Soeratman, *Op.Cit*., hlm. 62.

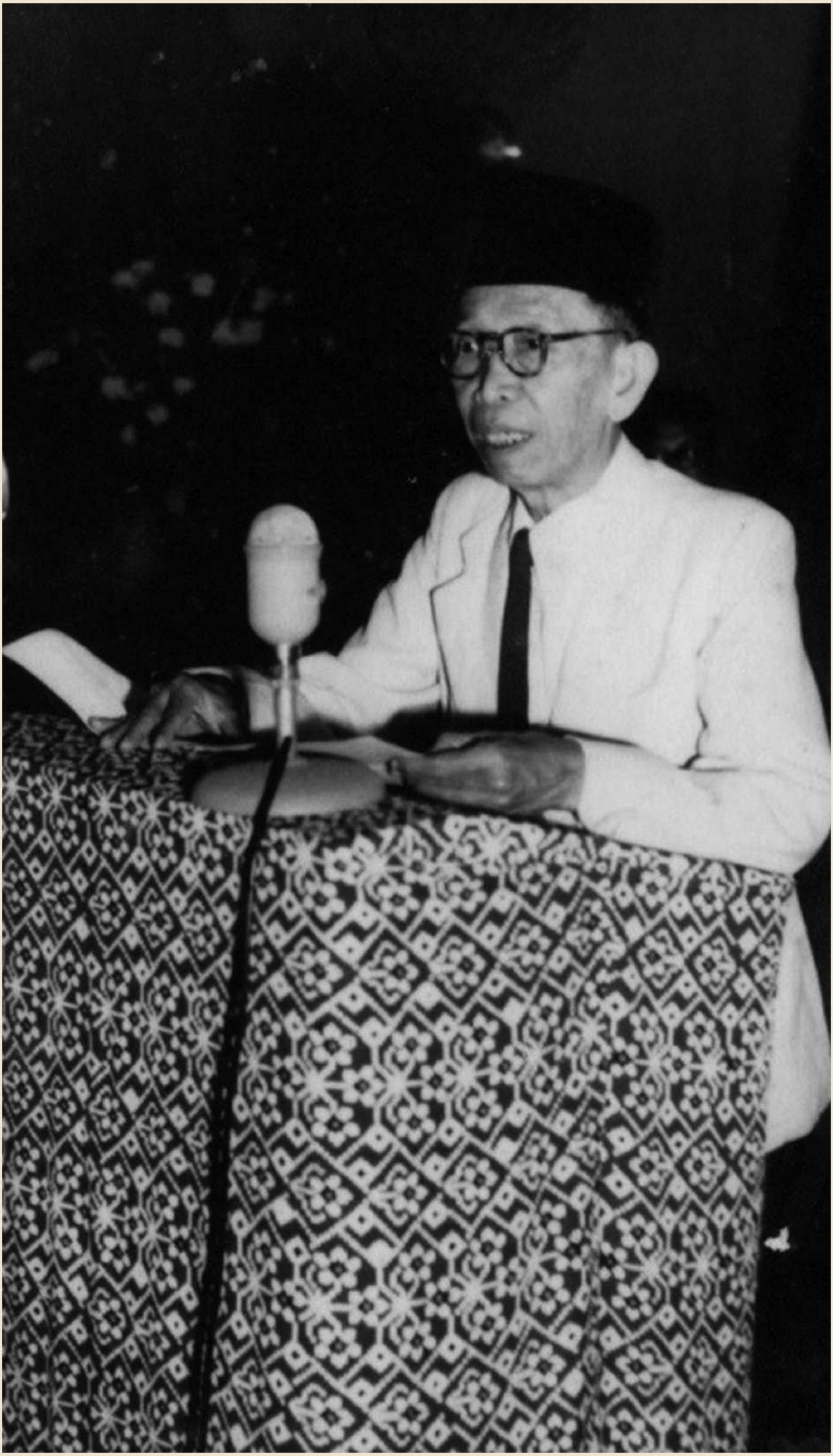

Ki Hadjar Dewantara menyampaikan pidato pada Kongres Taman Siswa

(Sumber: Biro Umum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)

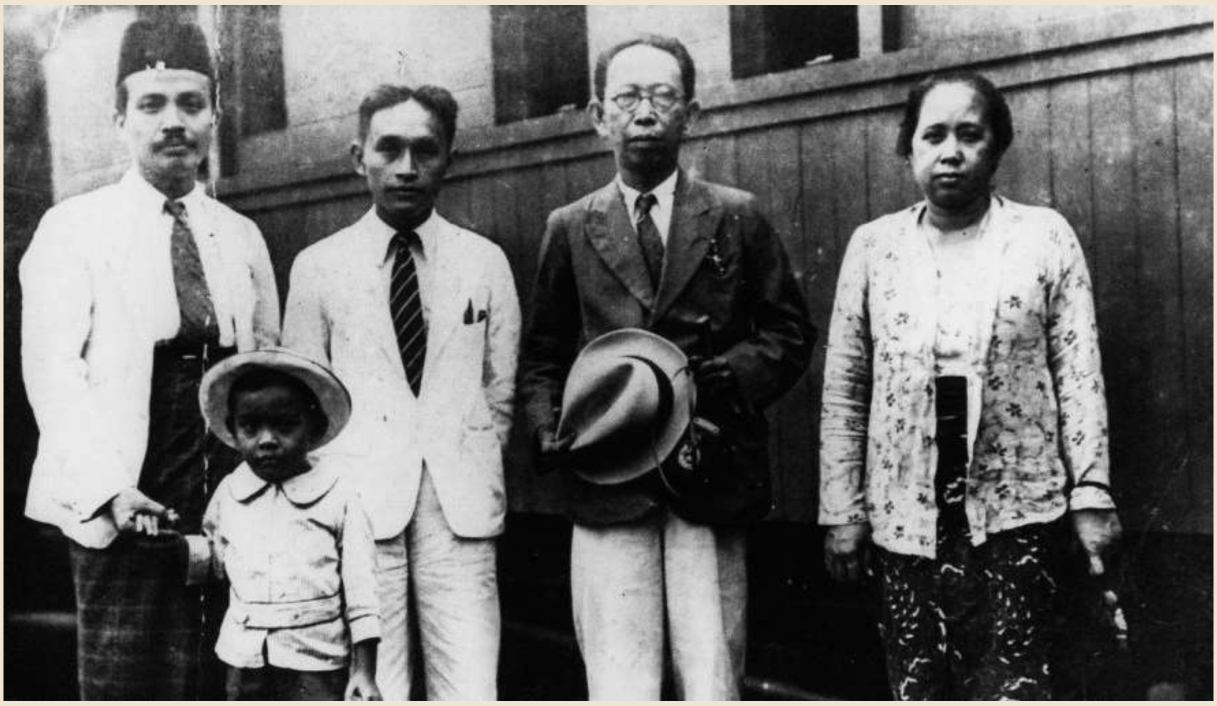

Atas

Ki Hadjar dan Nyi Hajar tiba di Stasiun Tanah Abang untuk menghadiri Konferensi Taman Siswa di Jakarta setelah sebelumnya mengunjungi cabang-cabang Taman Siswa di Lampung dan Sekitarnya. Dari kanan ke kiri Nyi Hajar, Ki Hadjar, Ki Ah Hamid, Ki Mangunsarkoro

(Sumber: Biro Umum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)

Tengah

Ki Hadjar Dewantara menyampaikan pidato berjudul Pendidikan Anak Perempuan dalam acara Kongres Perserikatan Perkumpulan Istri Indonesia (PPII) di Surabaya pada tanggal 14 Februari 1930

(Sumber: Biro Umum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)

Bawah

Gamelan Taman Siswa Ki dan Nyi Hajar Dewantara

(Sumber: Biro Umum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)

Suasana Konferensi Taman Siswa yang dihadiri oleh Ki Hadjar Dewantara dan Nyi Hajar Dewantara

(Sumber: Biro Umum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)

delict pers atas pidato dan tulisannya yang pedas. Ia dikenai hukuman penjara di Semarang pada tanggal 5 Agustus1920. Pada bulan November 1920 untuk kedua kalinya ia terkena delik pers dan dituduh menghina Sri Baginda Ratu Wilhelmina, Badan Pengadilan, Pangreh Praja, dan menghasut untuk merobohkan Pemerintah Hindia Belanda.[35] Akibat kasus ini ia ditahan di Semarang selama tiga bulan sebelum akhirnya dipindahkan ke Pekalongan.

TAMAN SISWA

Pada akhirnya terjadi perubahan dalam diri Soewardi dalam memandang pergerakan. Ia yang semula berminat pada dunia politik berubah menjadi orang yang ingin mengabdikan diri pada pendidikan. Pandangannya terhadap keadaan sosial di Hindia Belanda tidak berubah, akan tetapi ia berpendapat bahwa pemikiran tentang bangsa yang merdeka harus ditanamkan sejak dini ke masyarakat melalui pendidikan. Sejak tahun 1921 Soewardi mulai menitikberatkan perhatian pada dunia pendidikan. Ia menjadi guru di Adhi Darmo, sekolah yang didirikan oleh kakaknya, Raden Mas Soerjopranoto.

Pada tanggal 3 Juli 1922 ia mendirikan sekolah dengan nama Nationaal Onderwijs Instituut Taman Siswa—lebih dikenal dengan nama Taman Siswa—bertempat di Jalan Tanjung, Pakualaman, Yogyakarta. Dalam hal ini ia mendapat bantuan beberapa anggota perkumpulan "sarasehan Selasa Kliwonan", yang beranggotakan tokoh-tokoh politik, kebudayaan, dan kebatinan, antara lain RM Sutatmo Suryokusumo, Ki Sutopo Wonoboyo, Ki Pronowidigdo, Ki Prawirowiworo, RM Gondoatmojo, BRM Subono, RMH Suryo Putro (paman Soewardi), dan Ki Ageng Suryomataram.[36] Sistem pendidikan yang diterapkan di Taman Siswa disebut *among*, yang dijiwai prinsip-prinsip *ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani.*[37] Di samping itu pada tanggal 7 Juli 1924 ia juga mendirikan Mulo Kweekshool, setingkat SMP dengan pendidikan guru empat tahun sesudah pendidikan dasar.[38] Sekitar empat tahun kemudian, tepatnya tanggal 3 Februari 1928, Soewardi Soerjaningrat mengubah namanya menjadi Ki Hadjar Dewantara. Menurut Ki Utomo Darmadi, *hadjar* memilik arti 'pendidik', *dewan* memiliki arti 'utusan', dan *tara* memiliki arti 'tak tertandingi', sehingga dapat disimpulkan bahwa makna

35 *Ibid.*, hlm. 158.

36 *Ibid.*, hlm. 160.

37 *Ing ngarsa sung tulada* berarti 'yang didepan harus memberi teladan'; *ing madia mangun karsa* berarti 'yang di tengah kelompok membangun motivasi'; *tut wuri handayani* berarti 'yang dibelakang memberi semangat'.

38 *Ibid.*, hlm. 161.

Atas

Ki Hadjar bersama Hatta dan Mas Mansur (Poetera)

(Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia)

Tengah

"Empat Serangkai" dari kiri ke kanan: Ki Hadjar Dewantara, Mohammad Hatta, Soekarno, dan K.H. Mas Mansur, di kantor pusat Poetera (Poesat Tenaga Rakjat)

(Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia)

Bawah

Empat Serangkai yang terdiri dari Bung Karno, Bung Hatta, Ki Hadjar Dewantara, dan Kyai Haji Mas Mansyur bertemu dengan Hideteki Tojo

(Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia)

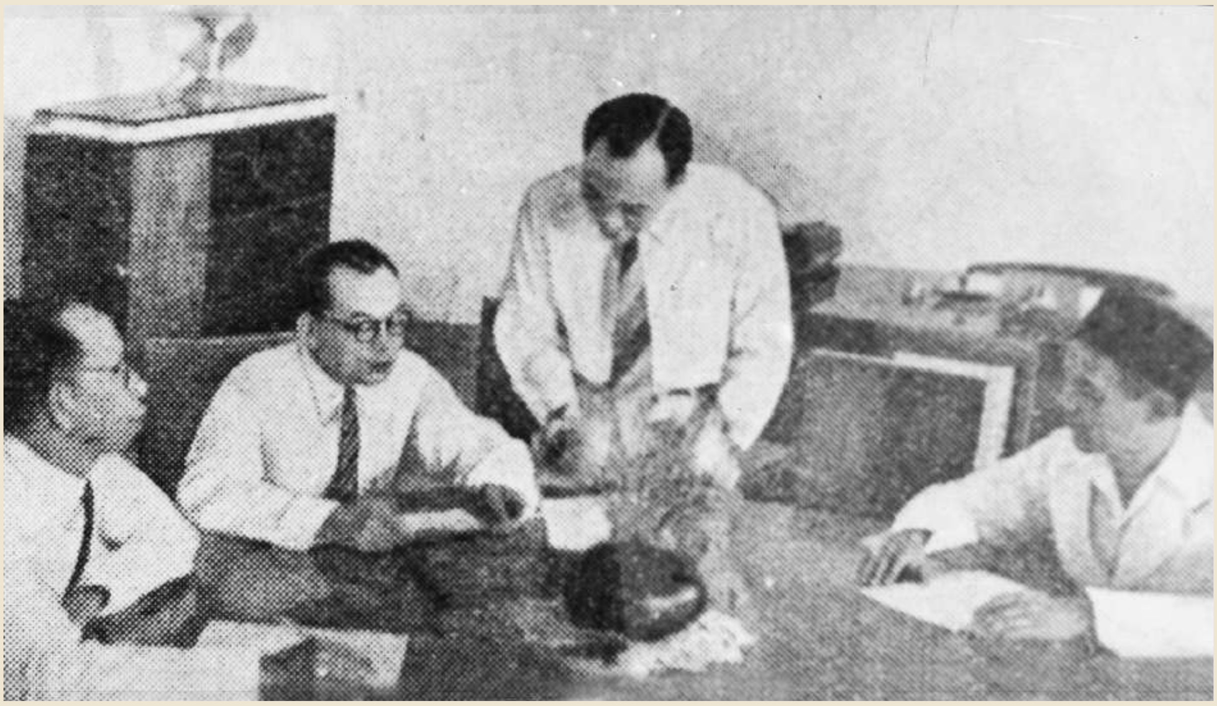

Ki Hadjar Dewantara menemui KRT Koeseoma Oetoya di jalan Kebon Sirih Jakarta Pusat dalam rangka penyusunan dan penerbitan buku *Dari Kebangunan Nasional sampai Proklamasi Kemerdekaan*

(Sumber: Biro Umum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)

Ki Hadjar Dewantara adalah Bapak Pendidik utusan rakyat yang tak tertandingi dalam menghadapi kolonialisme.[39]

Pada Kongres Perkumpulan Partai-partai Politik Kebangsaan Indonesia (PPKI) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 1928 di Surabaya, Ki Hadjar Dewantara memberi prasaran tentang pendidikan nasional dan penyelenggaraan atau pembinaan perguruan nasional. Pada tahun yang sama, ia aktif menebitkan majalah, di antaranya *Wasita*, *Poesara* (1931), *Keluarga*, dan *Keluarga Putera* (1936). Di samping aktif di dunia jurnalisitik dan pendidikan, Ki Hadjar Dewantara juga aktif dalam bidang kesenian. Selama pengasingan di Belanda ia belajar seni drama pada Herman Kloppers. Ia bahkan mengarang buku metode atau notasi nyanyian daerah Jawa, *Sari Swara*, yang diterbitkan tahun 1930 oleh JB Wolters. Yang menarik, dari royalti yang didapat dari buku tersebut Ki Hadjar Dewantara dapat membeli sebuah mobil sedan *Chevrolet*.

Meskipun demikian pada akhirnya Ki Hadjar Dewantara tetap mengutamakan pendidikan sebagai tujuan hidupnya. Sekolah yang didirikannya, Taman Siswa, mendapat banyak tentangan baik dari masyarakat pribumi maupun pemerintah kolonial. Peraturan tentang Ordonansi Sekolah Liar yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1932, misalnya, sempat menyulitkan Taman Siswa dan sekolah swasta lainnya. Ordonansi tersebut sesuai dengan isi *Staatsblad* 1932 No. 494 yang mulai berlaku pada 1 Oktober 1932. Tentu saja Ki Hadjar Dewantara tidak tinggal diam. Ia mengirim telegram kepada Gubernur Jenderal di Bogor yang isinya menentang pengesahan peraturan tersebut. Dengan berbagai dukungan yang diterimanya Ki Hadjar Dewantara berhasil menunda pengesahan peraturan tersebut. Walaupun begitu Ordonansi Sekolah Liar tetap diterbitkan sesuai dengan *Staatsblad* No. 66 tanggal 21 Februari 1933. Perjuangan Ki Hadjar Dewantara mempertahankan Taman Siswa tidak sampai di situ. Pada tahun 1935 pemerintah Hindia Belanda melakukan provokasi: jika mendaftarkan anaknya ke Taman Siswa *vrijbijljet* atau kartu gratis pegawai kereta api akan dicabut. Sementara itu untuk pegawai negeri yang mendaftarkan anaknya di Taman Siswa *kindertoelage* atau tunjangan anak dicabut dan disusul *loon belasting* atau pajak upah juga ikut dicabut. Ki Hadjar Dewantara melawan kebijakan pemerintah Hindia Belanda tersebut dengan tetap menerapkan sistem kekeluargaan di lingkungan Taman Siswa, sehingga akhirnya pada tanggal 15 Juli 1940 pemerintah Hindia Belanda terpaksa mengakui aturan di lingkungan Taman Siswa dan pajak upah pun dibebaskan. Dengan berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi, Taman Siswa dianggap sebagai cikal bakal landasan sistem pendidikan nasional.

39 *Op.Cit.*, Suhartono Wiryopranoto, dkk., hlm. 162.

Atas

Ki Hadjar Dewantara didampingi oleh keluarga sedang terlibat dalam pembicaraan dengan Ki Kotot Sukardi dalam rangka pembuatan film dokumenter tokoh Nasional Ki Hadjar Dewantara pada tahun 1951

(Sumber: Biro Umum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)

Tengah

Ki Hadjar Dewantara berpidato di hadapan Presiden Soekarno dalam salah satu kegiatan Peringatan Hari Kebangunan Nasional tahun 1952

(Sumber: Biro Umum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)

Bawah

Hari Kebangkitan Nasional : Peringatan hari Kebangkitan Nasional Indonesia 20 Mei 1948 di Istana Kepresidenan Yogyakarta dengan amanat Presiden Soekarno, tampak hadir antara lain ; Wakil Presiden. Moh. Hatta, para Menteri Dr. Radjiman Wedyodiningrat, Ki Hadjar Dewantara, A.M. Sangaji dan para tokoh lainnya

(Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia).

Jepang berhasil menduduki Hindia Belanda. Ki Hadjar Dewantara ditunjuk oleh pemerintahan militer Jepang memimpin Putera (Pusat Tenaga Rakyat) besama dengan Soekarno, Mohammad Hatta, dan Kiai H. Mansyur.[40] Setelah Putera dibubarkan tahun 1944, Ki Hadjar Dewantara diangkat menjadi anggota Naimuhu Bunkyokyoku Sanyo 'Kantor Urusan Pengajaran dan Pendidikan'.

MASA KEMERDEKAAN

Setelah Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945 Ki Hadjar Dewantara diangkat menjadi menteri pengajaran pada kabinet pertama Indonesia. Pada malam hari setelah pelantikannya sebagai menteri ia menyempatkan diri hendak makan malam bersama keluarganya, tetapi pada pagi harinya terjadi insiden di Gondangdia yang mengakibatkan kekurangan bahan untuk lauk pauk. Dewantara, anak Ki Hadjar Dewantara, berinisiatif membeli bakmi.[41] Pada malam itu Ki Hadjar Dewantara menghabiskan waktu bersama keluarganya sambil menyantap bakmi dan bercerita.

Pada tahun 1946 Ki Hadjar Dewantara diberi tugas menjadi Ketua Panitia Penyelidik Pengajaran dan pada tahun 1948 diberi tugas menjadi Ketua Badan Penasihat Pembentukan Undang-undang dengan menempatkan dasar-dasar bagi pendidikan dan pengajaran dalam undang-undang tersebut. Hasil usaha tersebut tertuang dalam UU No. 4 Tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah. Atas jasa-jasanya Ki Hadjar Dewantara dianugerahi penghargaan Bintang Mahaputra. Ia juga memperoleh gelar *Doctor Honoriscausa* dalam bidang kebudayaan dari Universitas Gadjah Mada.

Sejak pemerintah Republik Indonesia hijrah ke Yogyakarta Ki Hadjar Dewantara menduduki beberapa jabatan, antara lain sebagai Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Sesudah penandatanganan perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB), yang disusul berdirinya Republik Indonesia serikat (RIS), secara pribadi Bung Karno meminta agar Ki Hadjar Dewantara bersedia menjadi anggota parelemen RIS dengan alasan untuk memperkuat kubu kaum republikan. Sebagai anggota DPA sudah selayaknya Ki Hadjar Dewantara masuk keanggotaan parlemen RIS, namun Ki Hadjar Dewantara secara kukuh dan konsisten menolak kompromi Indonesia dengan Belanda sejak perundingan Renville, Linggarjati, sampai KMB. Oleh sebab itu Presiden Soekarno menganggap perlu melakukan pendekatan secara pribadi pada Ki Hadjar Dewantara. Maka terjadilah kesepakatan antara Ki Hadjar Dewantara dan Presiden Soekarno. Ki Hadjar Dewantara akan berada di parlemen RIS sampai kaum republikan berhasil membatalkan perjanjian KMB serta bentuk dan kedaulatan negara pulih menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkonstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan berasas Pancasila.

Demikianlah kesepakatan yang terjadi di balik pentas politik. Seperti apa yang sudah dilaporkan, Ki Hadjar Dewantara berada di pos ini sampai tanggal 1 April 1954. Beberapa saat sesudah perjanjian KMB batal RIS dilikuidasi dan parlemen RIS dirombak menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS RI). Kemudian Ki Hadjar Dewantara mengundurkan diri dari parlemen atas dasar permintaannya sendiri. Adapun alasan yang resmi ialah demi regenerasi, di samping kesehatan jasmani tidak mengizinkannya lagi.[42]

Ki Hadjar Dewantara wafat pada tanggal 26 April 1959. Jenazahnya dimakamkan pada tanggal 29 April 1959 dengan upacara militer yang dipimpin Inspektur Upacara Kolonel Soeharto di makam Taman Wijaya Brata, Celeban, Yogyakarta.[43] Tanggal kelahirannya ditetapkan oleh pemerintah sebagai hari pendidikan nasional. Tidak hanya dalam bidang pendidikan, kiprahnya dalam dunia pers juga diakui. Hal

---

40 Sering dikenal dengan istilah "empat serangkai".

41 Bambang S. Dewantara, *Ki Hadjar Dewantara Ayahku*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989, 111.

42 Bambang S. Dewantara, 1989, *Ki Hadjar Dewantara Ayahku*, Jakarta: Pustaka SInar Harapan, hlm. 50.

43 Suhartono Wiryopranoto, dkk., *Op.Cit.*, hlm.163.

ini ditandai dengan diangkatnya Ki Hadjar Dewantara menjadi Ketua Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pada tahun 1959; bahkan pada tahun 1976 juga mendapatkan gelar Perintis Pers Indonesia yang diberikan langsung oleh Pemerintah Republik Indonesia.[44] Sementara itu atas inisiatif Ki Hadjar Dewantara pada tanggal 20 Mei 1948 diperingati sebagai tanggal lahir Boedi Oetomo yang ke-40 untuk pertama kalinya dan diperingati di ibukota negara saat itu, yaitu Yogyakarta. Ki Hadjar Dewantara yang menjadi Ketua Panitia menyatakan lahirnya Boedi Oetomo sebagai Hari Kebangunan Nasional, yang oleh Presiden Soekarno istilah Kebangunan Nasional kemudian diganti menjadi Hari Kebangkitan Nasional.[45]

44 Dr. B. Setiawan, *Loc.Cit.*

45 Suhartono Wiryopranoto, dkk., *Op.Cit.*, hlm.168.

Atas

Ki Hadjar Dewantara menyampaikan rencana persiapan peringatan Hari Kebangunan Nasional tahun1952 di hadapan anggota panitia. Peringatan ini akan diadakan di seluruh Indonesia. Sebuah buku berjudul Dari Hari Kebangunan Nasional sampai Proklamasi Kemerdekaan juga akan diterbitkan dalam peringatan ini

(Sumber: Biro Umum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)

Tengah

Ki Hadjar Dewantara sebagai Ketua Hari Kebangunan Nasional bertemu dengan Presiden Soekarno dan Fatmawati

(Sumber: Biro Umum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)

Bawah

Panitia Hari Kebangkitan Nasional tahun 1952 bergambar bersama di depan gedung Parlemen RI, Lapangan Banteng Jakarta Pusat

(Sumber: Biro Umum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)

Atas

Presiden Soekarno menjenguk Ki Hadjar Dewantara di Yogyakarta

(Sumber: Biro Umum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)

Tengah

Ki Hadjar Dewantara wafat pada tanggal 26 April 1959. Jenazahnya dimakamkan pada tanggal 29 April 1959 dengan upacara militer yang dipimpin Inspektur Upacara Kolonel Soeharto di makam Taman Wijaya Brata, Celeban, Yogyakarta

(Sumber: Biro Umum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)

Bawah

Massa Rakyat memberikan penghormatan Ki Hadjar Dewantara di sepanjang jalan Kusuma Negara dari Taman Siswa sampai Taman Wijaya Brata pada tanggal 29 April 1959

(Sumber: Biro Umum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)

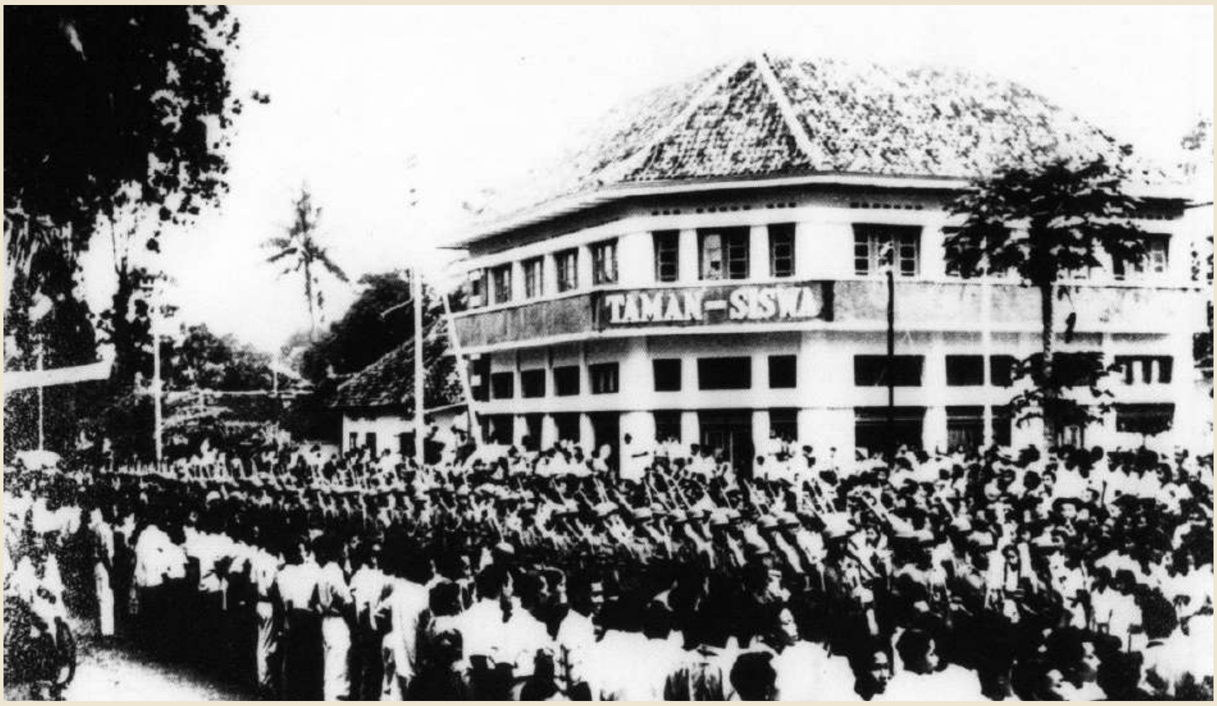

Atas

Ki Subroto Aryo Mataram melepas burung merpati sebagai tanda peringatan 1000 hari wafat Ki Hadjar Dewantara disaksikan Ki Soeratman, Ki Sajoga, Ki Y. Padmopuspito dan cucu Ki Hadjar Dewantara

(Sumber: Biro Umum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)

Tengah

Upacara Selamatan 1000 hari wafatnya Ki Hadjar Dewantara pada bulan Desember 1961

(Sumber: Biro Umum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)

Bawah

Nyi Hajar Dewantara menerima penyematan gelar Pahlawan bagi Ki Hadjar Dewantara dari Menteri Sosial RI

(Sumber: Biro Umum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)

Todung Sutan Gunung Mulia

Masa Jabatan
14 November 1945 – 12 Maret 1946

Todung Sutan Gunung Mulia

PENDIDIKAN

Dr. Todung Sutan Gunung Mulia Harahap—sering akrab disapa Mulia—lahir di Padang Sidempuan, Sumatera Utara, pada tanggal 21 Januari 1896, yang secara silsilah keluarga masih memiliki hubungan darah dengan Amir Sjarifuddin Harahap. Ia seorang bangwasan Batak dan beragama Kristen, sehingga selain mempelajari pengetahuan umum ia juga mempelajari agaman Kristen dengan sungguh-sungguh. Masa kecilnya dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satu contoh tantangan tersebut adalah ketika ia menganut agama Kristen sesuai dengan lingkungan tempat tinggalnya. Oleh karena itu ia berseberangan dengan keluarganya yang bermarga Harahap dan mayoritas beragama Islam, salah satunya Amir Sjariffuddin, padahal saat itu di Padang Sidempuan Pemerintah Kolonial Belanda menerapkan politik adu domba dengan menonjolkan stratifikasi sosial melalui agama.

Dalam hal pengetahuan umum ia tergolong orang yang pandai dan bahkan fasih berbahasa Belanda. Ia mengenyam pendidikan di Europeesche Lagere School (ELS) sebelum akhirnya melanjutkan pendidikan ke jurusan hukum Universitas Leiden, Belanda. Selama kuliah di Leiden ia aktif bersosialisasi, terutama dengan para aktivis Kristen. Ia berkenalan dengan Hendrik Kraemer, seorang misiolog, teolog awam, dan tokoh ekumenis Hervormd. Mereka berdua sering membicarakan gerakan Kristen pada masa yang akan datang. Persahabatan mereka terus berlanjut setelah Mulia kembali ke Hindia Belanda dan kelak mereka mendirikan gereja di berbagai daerah sebagai bentuk perjuangan gerakan Kristen yang mereka rintis sebelumnya.

Sepulangnya dari Belanda pada tahun 1919 Mulia menjadi guru. Hanya berselang setahun ia diangkat menjadi kepala sekolah di Hollandsch–Indlandsche School (HIS) di Kotanopan, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Walaupun telah menjadi seorang kepala sekolah namun ia tetap giat membangun hubungan yang kuat antaraktivis gereja di Sumatera. Ia juga pernah mengajar kursus Hoofdacte di Bandung.

Sebagai seorang pendidik yang cerdas dan religius Mulia juga terjun dalam pergerakan nasional. Memasuki tahun 1920-an ia bergabung dengan Jong Sumatranen Bond (JSB) dan menjadi aktivis muda bersama Sanusi Pane dan Amir Sjarifuddin. Akan tetapi baru beberapa tahun Mulia bergabung JSB mengalami kemunduran. Oleh karena itu ia bersama tokoh Batak lain, di antaranya Sanusi Pane, membentuk Jong Batak. Selain aktif dalam organisasi pemuda pada tahun 1922 ia mewakili suku Batak dalam Volksraad. Ia menjadi anggota sidang Volksraad dalam periode cukup lama, yaitu 1922–1927 dan 1935–1942. Mulia juga menunjukkan ketertarikan pada dunia jurnalistik. Dengan ilmu agama Kristen yang dimilikinya ia menerbitkan majalah mingguan bernama *Zaman Baroe*, yang memuat pemikiran dan gagasan para aktivis dan orang-orang Kristen.

Pada tahun 1928 Mulia mengikuti Konferensi Pengkabaran Injil Sedunia di Yerusalem. Di konferensi ini ia bertemu dengan sahabat lama sekaligus gurunya, Hendrik Kraemer. Setelah konferensi mereka bertukar pikiran dan bertukar gagasan untuk memperluas jaringan pendidikan, keagamaan, dan politik guna menampung suara umat Kristen. Perbincangan mereka menghasilkan partai politik Kristen bernama Christelijk Etische Partij (CEP) yang selanjutnya berganti nama dan dikenal dengan nama Christelijk Staatkundige Partij (CSP), padahal sebelumnya CSP merupakan bagian dari CEP. Perubahan itu terjadi karena perbedaan pendapat di dalam CEP tentang gagasan perwalian bahwa Tuhan memberi kewajiban terhadap Belanda untuk membimbing rakyat pribumi. Mulia dan kalangan progresif Kristen pribumi lain yang tidak setuju dengan pemikiran CEP ini kemudian memisahkan diri dan mendirikan CSP. Walaupun sibuk dengan urusan organisasi politik, Mulia dan Kraemer secara bersama menerjemahkan Alkitab

Atas

Todong Sutan Gunung Mulia yang disisi kirinya adalah Hendrik Kreamer

(Sumber: Istimewa).

Tengah

Todong Sutan Gunung Mulia Ketika menjadi guru Hollandsche Indiesche School (HIS) di Kotanopa, Manddailing, Sumatera Utara

(Sumber: Istimewa)

Bawah

Pengangkatan Todong Sutan Gunung Mulia menjadi Menteri Pengajaran oleh Presiden Soekarno

(Sumber: Istimewa)

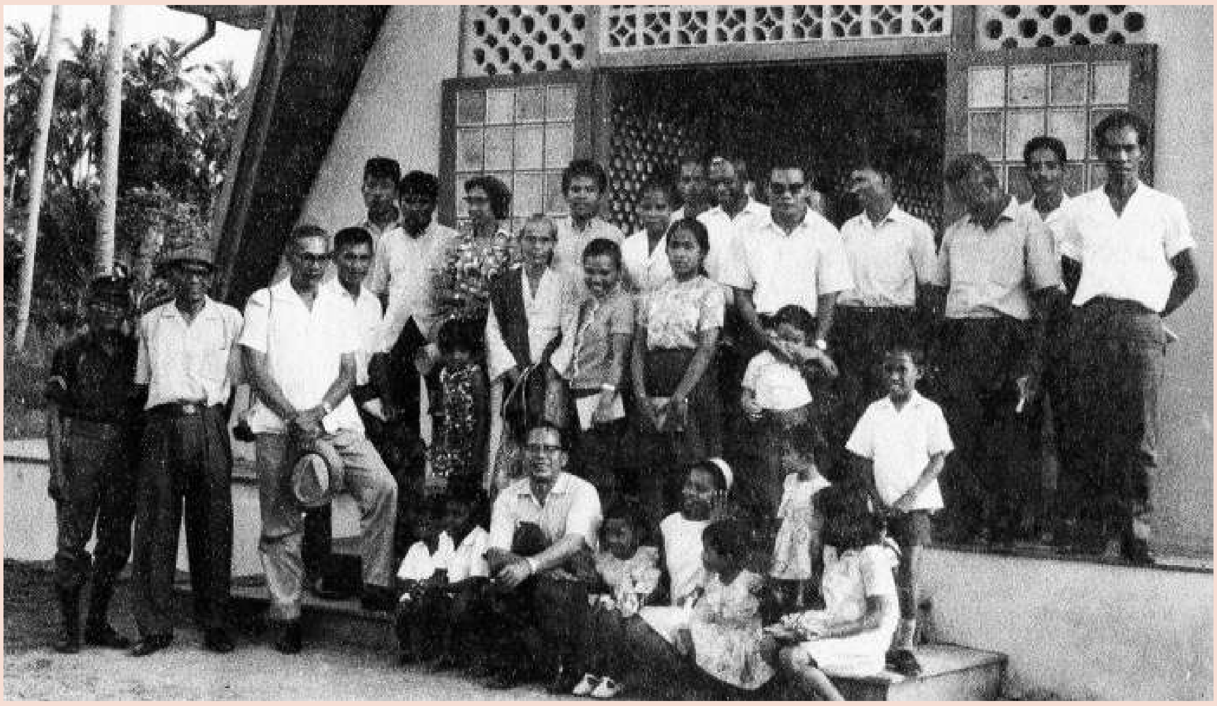

Todong Sutan Gunung Mulia bersama rekan-rekannya di depan Gereja Immanuel

(Sumber: Istimewa)

untuk kemudian disebarluaskan ke seluruh wilayah di Hindia Belanda. Pada tahun 1932 Mulia terlibat dalam konferensi pemuda Kristen Batak di Padalarang. Konferensi tersebut menghasilkan wadah bagi para pemuda Batak yang dikenal dengan Naposobulung Kristen Batak (NKB).

Sesudah kemerdekaan Indonesia, Mulia melanjutkan karier politiknya. Pada tanggal 10 November 1945 ia bersama para tokoh Kristen mendirikan Partai Kristen Indonesia (Parkindo). Hanya berselang empat hari setelah pembentukan Parkindo ia ditunjuk oleh Presiden Soekarno menggantikan Ki Hadjar Dewantara sebagai Menteri Pengajaran. Saat itu kondisi pendidikan di Indonesia kacau karena perbedaan sistem pendidikan yang digunakan di Hindia Belanda dan yang diterapkan oleh Jepang selama masa pendudukan. Pemerintah Hindia Belanda memfokuskan pendidikan agar "bisa dinikmati" secara luas sesuai dengan Politik Etis, walaupun pada praktiknya pendidikan diberikan dengan tujuan mencetak *ambtenar* 'tenaga pemerintahan' untuk kepentingan Pemerintah Kolonial Belanda. Berbeda halnya dengan Jepang. Sesuai dengan *Osamu Sirei* No. 1 dan maklumat lain tentang penyelenggaraan pendidikan Jepang lebih memfokuskan pendidikan dengan indoktrinisasi propaganda Jepang. Keadaan ini merupakan tantangan baru bagi Mulia sebagai orang yang giat pada dunia pendidikan.

Ketika menjabat sebagai menteri, Mulia melakukan beberapa kebijakan. Pertama, mengubah kurikulum agar sesuai dengan wawasan kebangsaan sebagai kelanjutan kurikulum yang dilakukan oleh menteri sebelumnya. Kedua, memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan, seperti renovasi fasilitas pendidikan dan penambahan tenaga pengajar. Ketiga, memperluas lembaga pendidikan yang ada agar tidak terfokus pada pendidikan umum saja namun juga pendidikan berlatar belakang agama. Kebijakan nomer tiga kemudian direvisi dengan keluarnya Penetapan Pemerintah Tahun 1945 No. 3/S.D yang menyatakan bahwa urusan keagamaan yang semula menjadi bagian dari Departemen Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan berubah menjadi urusan Departemen Dalam Negeri.

Mulia hanya menjabat selama satu tahun, dari 14 November 1945 hingga 2 Oktober 1946, sebagai Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan. Meskipun demikian waktu satu tahun tersebut meninggalkan kebijakan yang khas, yaitu menghidupkan kembali pendidikan yang berorientasi dan berlatar belakang keagamaan, terutama agama Kristen. Karena kebijakannyalah masyarakat Kristen dapat membangun jaringan pendidikan Kristen secara kuat.

Setelah berhenti sebagai menteri, Mulia tetap mengabdikan diri pada dunia pendidikan. Pada tahun 1951 ia menjadi Guru Besar Universtias Darurat Indonesia dan Universitas Indonesia. Sebelumnya, pada tahun 1950, ia bersama dengan Mr. Yap Thiam Hien dan Benjamin Thomas Philip Sigar mendirikan Universitas Kristen Indonesia. Pada tahun yang sama ia turut mendirikan dan menjadi ketua pertama

Dewan Gereja-Gereja Indonesia periode 1950 hingga 1960. Pada tahun 1955 Mulia bersama Prof. K.A.H. Hidding menjadi pemimpin Redaksi Ensiklopedia Indonesia, yang merupakan ensiklopedia pertama yang menggunakan bahasa Indonesia, terdiri dari tiga volume, dan disusun menggunakan ejaan Soewandi.[1] Ia memperoleh gelar Doktor Honoris Causa dalam bidang ilmu theologia dari Vrije Universiteit, Amsterdam, pada tanggal 20 Oktober 1966. Di samping itu ia mengarang buku dengan judul *India*, yang berisi sejarah politik dan pergerakan kebangsaan India, yang diterbitkan oleh Balai Pustaka pada tahun 1959.

Pada tanggal 11 November 1966 Mulia meninggal di Amsterdam dan dimakamkan di Jakarta.

1 Ejaan yang berlaku di Indonesia sejak tahun 1947.

Mohammad Sjafei

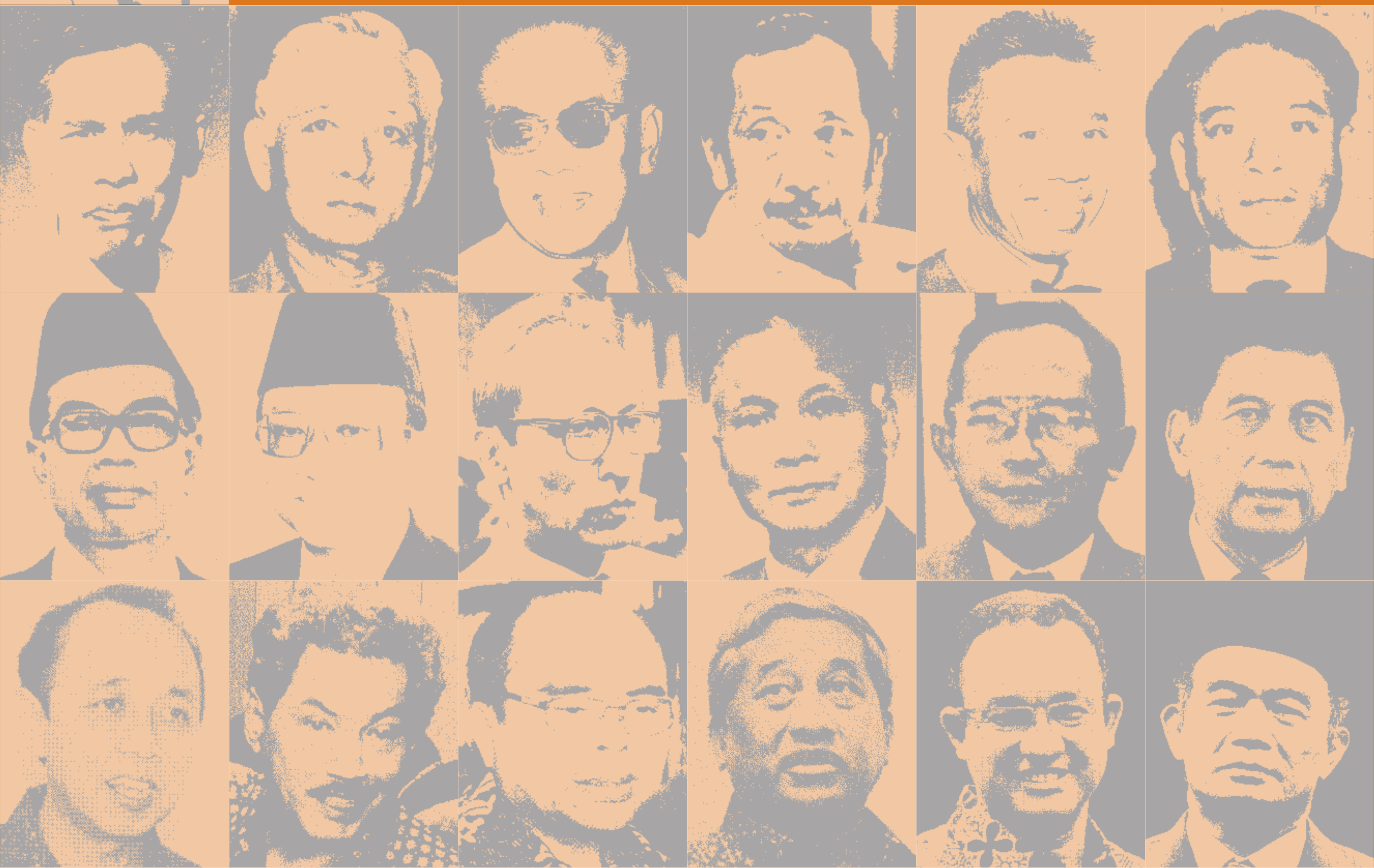

Masa Jabatan
12 Maret 1946 – 2 Oktober 1946

Mohammad Sjafei

PENDIDIKAN

Mohammad Sjafei lahir di Ketapang, Kalimantan Barat, pada tahun 1893. Ia anak angkat Ibrahim Marah Sutan dan Andung Chalijah.[1] Ayah angkat Sjafei, Marah Sutan, seorang pendidik yang memiliki pengalaman mengajar di berbagai daerah dan aktif dalam Indische Partij (IP). Marah Sutan dan Andung Chalijah merupakan pasangan berpendidikan, bercita-cita besar, dan hidup berpindah-pindah karena pekerjaannya sebagai guru. Mereka tidak memiliki anak kandung, sehingga di berbagai tempat yang mereka tempati mereka mengangkat anak yang mempunyai keinginan untuk maju untuk diasuh dan dididik. Sjafei "ditemukan" ketika Marah Sutan sedang mengajar di Pontianak. Ia sering mendapati Sjafei kecil turut menyimak pelajaran dari jendela, kadang-kadang ikut bernyanyi, atau sekadar menyimak pelajaran, terutama pelajaran sejarah. Maka Sjafei pun diangkat dari ibu kandungnya, Sjafiah, yang bekerja sebagai pedagang kue.[2]

Sjafei melanjutkan pendidikan di Kweekschool 'Sekolah Guru' (Sekolah Raja) di Bukit tinggi dengan berbekal sepenggal nasihat ayah angkatnya, "Jadilah engkau jadi engkau."[3] Marah Sutan menyampaikan pesan tersebut dengan maksud agar Sjafei tetap menjadi dirinya sendiri sekalipun pendidikan dan lingkungan baru dapat mempengaruhi sikap seseorang. Oleh karena itu ketika harus mempelajari bidang pendidikan, Sjafei lebih menyukai seni. Ia pandai bermain biola dan melukis. Ia sempat mengajukan permintaan berhenti dari sekolah guru, namum ditolak oleh Direktur J. Lavell. Mendengar aduan perihal keinginan berhenti tersebut Marah Sutan kembali mengiriminya pesan, "Jadilah engkau jadi engkau". Pesan tersebut disertai dengan kiriman banyak surat kabar, majalah, dan bacaan. Sjafei pun menjadi lebih banyak membaca sehingga wawasannya terbuka. Bagian-bagian tulisan yang dianggap penting ditandainya dengan pensil merah.

Setelah enam tahun Sjafei lulus dari Kweekschool. Ia ditawari pemerintah Belanda mengajar di Hollandsch-Inlandsche School (HIS) Padang, namun ia memilih mengajar di Kartini School di Jakarta. Keputusan ini diambil berdasarkan saran dr. Soetomo, Ketua Boedi Oetomo, yang berpendapat bahwa memberi pendidikan pada anak-anak perempuan di Kartini School memiliki relevansi pada cita-cita memajukan bangsa Indonesia.[4]

Sambil mengajar ia juga menekuni hobinya di bidang seni. Ia mengambil kursus melukis pada de Graaf, guru gambar di Hogere Burgerschool (HBS). Ia lulus dari kursus tersebut setelah 18 bulan dengan predikat bagus. Lama-kelamaan ketidaksukaannya menjadi guru berubah, terutama karena pergaulannya di Partai Insulinde, Boedi Oetomo, dan organisasi Putri Mardika di Jakarta.[5] Ia menyukai mata pelajaran kerajinan tangan, sesuai dengan hobi seninya, dan didukung oleh rekan sesama guru, Nona C. M. Vanger, guru bahasa Prancis dan kerajinan tangan. Di sisi lain Marah Sutan menganggap pelajaran kerajinan tangan tidak relevan dengan kebutuhan perempuan Indonesia pada masa itu. Mata pelajaran kerajinan tangan hanya memuat kegiatan untuk mengsi waktu senggang, seperti menjahit, menyulam, dan merajut. Pelajaran kerajinan tangan yang relevan dengan kemajuan bangsa, menurut Marah Sutan, harus produktif dan bernilai ekonomis. Oleh karena itu Sjafei kemudian disekolahkan

1 Asep Yana, "Pendidikan menurut Mohammad Syafei". Diakses dari: http://asepyana666.blogspot.com/2013/02/pendidikan-menurut-mohammad-syafei.html. Pada tanggal 17 Mei 2018 pukul 14.32.

2 Navis, A. A. 1996. *Filsafat dan Strategi Pendidikan M. Sjafei.* Jakarta: PT Grasindo.

3 *Ibid,* hlm. 17.

4 *Ibid,* hlm. 18.

5 *Ibid.*

ke pusat kerajinan di Jawa Barat, seperti Tasikmalaya dan Bogor. Materi kerajinan tangan yang dibawa oleh Sjafei dari hasil kursusnya mendapat sambutan baik dari pimpinan sekolah, Nyonya Evenhuis. Hasil kerajinan tangan murid-murid Kartini School mendapat banyak pujian saat dipamerkan di kongres NIOG di Jakarta.

Sjafei kemudian melanjutkan pendidikan ke Belanda dengan menggunakan tabungannya sebagai biaya. Rencana semula ia akan menempuh pendidikan untuk mendapatkan akta utama atau *hoofdacte*, tetapi kemudian dialihkan pada kursus, seperti kerajinan tangan, musik, dan melukis. Ia merasa telah memiliki ilmu keguruan dan kemampuan mengajar yang didapatkannya selama bersekolah di Kweekschool ditambah dengan pengalaman mengajar di Kartini School. Lagi pula akta *hoofdacte* hanya berguna untuk menjadi guru di sekolah negeri. Meskipun jabatan dan gaji lebih tinggi, tetapi sistem dan metode pendidikan di sekolah pemerintah tidak akan mengangkat harkat dan martabat bangsa sebagai manusia yang mandiri dalam negara yang merdeka;[6] padahal tujuan utamanya pergi ke Belanda untuk mempelajari bagaimana dinamika bangsa tersebut sehingga menjadi maju dan kuat. Itu pula sebabnya selama di Belanda ia mengunjungi pusat-pusat industri dan sekolah kerajinan. Dalam mengisi waktu senggangnya ia menulis buku pelajaran membaca Arab dan Latin untuk sekolah rendah.

Di samping mempelajari industri serta mengunjungi pusat-pusat kerajinan tangan Sjafei juga aktif di Indonesisc Vereeniging dan menjadi redaktur rubrik pendidikan pada majalah organisasi tersebut. Mohammad Hatta yang enam bulan lebih dulu berada di Belanda merasa heran Sjafei ke Belanda untuk mempelajari kerajinan tangan, padahal di hampir seluruh wilayah Indonesia sudah memiliki kerajinan rakyat. Mengapa harus jauh-jauh ke Belanda? Menurut Sjafei, pelajaran kerajinan tangan dan pendidikan kerajinan tangan berbeda. Pelajaran kerajinan tangan dapat diberikan melalui kursus atau pelatihan, yang fungsinya sebagai keterampilan tenaga kerja; sedangkan pendidikan kerajinan tangan berfungsi untuk membangkitkan minat kerajinan dan kemauan bekerja. Karena itulah ia ke Belanda untuk mencari sistem dan metode pendidikan kerajinan.[7]

Sjafei akrab dengan Hatta dan sering berdiskusi. Mereka menemukan pandangan yang sama bahwa bangsa yang merdeka adalah bangsa yang terdidik sebagai bangsa yang merdeka. Bukan hanya oleh semangatnya saja, tetapi juga oleh kadar intelektual dan kemampuan menjadi bangsa yang mandiri di bidang ekonomi. Ekonomi dapat digerakkan melalui industri. Industri hanya dapat dikelola oleh bangsa yang memiliki mental rajin, ulet, teliti, dan disiplin. Berangkat dari pemikiran tersebut Hatta mendirikan Pendidikan Nasional Indonesia (PNI), atau yang dikenal sebagai PNI Baru, dan Sjafei mendirikan Indonesische Nederlandsche School (INS) di Kayutanam.[8]

INS KAYU TANAM DAN PERGERAKAN

Pada tahun 1925 Sjafei menyelesaikan pendidikannya di Belanda dan mendapat tawaran dari pemerintah Hindia Belanda menjadi *Ajunct Inspektur* pendidikan, namun tawaran tersebut ditolak dengan alasan ia ingin mendirikan sekolah yang sesuai dengan jiwa dan kebudayaan Indonesia.[9]

Sjafei mendirikan Indonesische Nederland School (INS) pada tanggal 31 Oktober 1926 di Kayu Tanam, Sumatera Barat, sehingga kemudian dikenal dengan Sekolah INS Kayu Tanam, dengan sistem

6 *Ibid*, hal. 20

7 *Ibid*, hlm. 21.

8 *Ibid*.

9 Kanalbaca. "Biografi Mohammad Sjafei" Diakses dari: http://kanalbaca.com/lectura/biografi-mohammad-sjafei/, pada 6 November 2018,pukul 14.03 WIB.

Mohammad Sjafei bersama teman-temannya ketika bersekolah di *Kweekschool*
(Sumber: Istimewa)

pendidikan bertumpu pada Ketuhanan dan Nasionalisme. Ia menolak subsidi yang diberikan oleh pemerintah untuk pembiayaan dan lebih memilih membiayai sekolah tersebut dengan hasil penjualan buku-buku yang ditulisnya. Ia mendapat dana tambahan berupa sumbangan dari ayahnya, para donatur, dan penggalangan dana melalui acara pertandingan olah raga atau pelelangan karya seni karya murid-muridnya. Ia menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan bahasa Inggris sebagai bahasa asing yang wajib dipelajari.

INS Kayu Tanam lahir karena saat itu corak pendidikan Barat hanya mementingkan segi intelektual dan bercorak verbalistis, sehingga hanya menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki wawasan pendidikan rendah.[10] Sekolah INS Kayu Tanam terkenal di Kota Padang karena merupakan sekolah pribumi yang memiliki fasilitas memadai. Uniknya, INS Kayu Tanam juga bekerjasama dengan organisasi buruh (VBPSS) dan para perantau Minangkabau di Jakarta. Pada awal pendirian INS Kayu Tanam memiliki 75 siswa. Ketika Perang Dunia II pecah INS Kayutaman diduduki paksa oleh Belanda dan pada masa pendudukan Jepang namanya diubah menjadi Indonesische Nippon School oleh Pemerintah Pendudukan.

Selain di bidang pendidikan Sjafei juga berperan pada dunia politik. Kepeduliannya terhadap politik tumbuh—lagi-lagi karena didikan Marah Sutan—bermula dari membaca tulisan-tulisan Tjipto Mangunkusumo, Soewardi Soerjaningrat, dan Douwes Dekker, pendiri Indische Partij (IP) yang dimuat dalam majalah *Hindia Poetra*, yang dikirim secara teratur oleh Marah Sutan ketika Sjafei masih di Sekolah Raja. Pada awal pendiriannya IP sangat terkenal karena semboyan perjuangan yang secara terang-terangan menyerukan kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Sementara organisasi lain hanya bertujuan untuk "kemajuan yang selaras bagi nusa dan bangsa" sehingga dinilai terlalu "lembek". Saat ketiga tokoh tersebut dibuang oleh Pemerintah Hindia Belanda, IP menjelma dengan nama Partai Insulinde. Sjafei menjadi anggota aktif partai tersebut setelah menamatkan sekolah dan menetap di Jakarta. Ia menjadi pengurus cabang Jakarta bersama Marah Sutan dengan fungsi tambahan sebagai koordinator seluruh cabang di luar Pulau Jawa.[11]

Sjafei juga menjadi anggota aktif Boedi Oetomo dan menulis banyak artikel untuk majalah organisasi tersebut. Pada Kongres Boedi Oetomo bulan Agustus 1915 di Bandung, sehubungan dengan kemungkinan Perang Dunia merembes ke Indonesia, ada mosi kepada pemerintah agar diberikan hak milisi kepada

10 Kemdikbud RI, "INS Kayu Tanam (1926)" Diakses dari: http://ensiklopedia.kemdikbud.go.id/sastra/artikel/INS_Kayutanam. Pada 17 Agustus 2018 pukul 16.54

11 *Ibid*, hlm. 25-26.

bangsa Indonesia. Hak milisi tersebut harus diatur dalam undang-undang yang disahkan oleh parlemen. Usul mosi agar Indonesia memiliki parlemen dalam kongres dikemukakan oleh Sjafei selaku delegasi cabang Jakarta. Menurut Sjafei, buat apa bangsa Indonesia ikut membela kekuasaan Belanda apabila tidak diberi hak untuk membela bangsa sendiri. Mosi tersebut ditolak pemerintah karena Belanda tahu bahwa mosi itu merupakan strategi yang memanfaatkan ketakutan Belanda tentang kemungkinan perang dunia akan meluas hingga ke tanah jajahannya.[12]

Pada awal tahun 1916 Sjafei dan Alimin, yang kemudian menjadi tokoh komunis, mengajukan resolusi lagi kepada pemerintah melalui Kongres Partai Insulinde. Mereka menginginkan agar anak-anak Indonesia diberi kesempatan lebih banyak untuk memperolah pelajaran bahasa Belanda. Pada masa itu buku-buku ilmu pengetahuan hanya tersedia dalam bahasa Belanda. Apabila anak-anak Indonesia mahir berbahasa Belanda, mereka akan semakin bisa memperluas khazanah penegtahuannya. Namun lagi-lagi mosi tersebut ditolak pemerintah.[13] Pada Kongres Partai Insuline di Semarang tahun 1917 Sjafei kembali mengajukan usul agar Kongres membuat resolusi untuk menghapus sistem *poenale sanctie*, yaitu sistem kontrak terhadap kuli perkebunan Belanda yang tidak berbeda dengan bentuk perbudakan gaya baru yang mengandung ancaman hukum bagi yang melakukan mogok atau lari dari pekerjaannya. Buruknya sistem tersebut diketahui Sjafei ketika bersama Marah Sutan terlibat dalam usaha menggagalkan pengangkutan buruh gelap dan perdagangan perempuan. Usulan tersebut, lagi-lagi, tak digubris pemerintah.[14] Pada tahun 1918, ketika gubernur jenderal dijabat Graaf van Limburg Stirum, sistem *ponarie sanctie* dihapus dan dibentuk Volksraad. Sjafei ditawari menjadi anggota Volksraad, namun ia menolak karena merasa percuma duduk di kursi dewan yang didominasi oleh Belanda. Usul-usulnya pada akhirnya akan ditolak juga.

Pada tahun 1925 ketika kembali ke Jakarta, ia dan ayahnya sepakat untuk bergerak di bidang pendidikan saja dan tidak di politik. Kegiatan dalam gerakan politik mereka tinggalkan berdasarkan pertimbangan bahwa gerakan politik yang semula bertujuan untuk mencapai kemerdekaan beralih pada perebutan kepemimpinan dalam partai. Terjadi banyak sengketa yang menimbulkan perpecahan antarsesama pemimpin politik serta pengikutnya. Bersandar pada kekuatan politik tertentu dalam membangun suatu lembaga pendidikan hanya akan menumbuhkan banyak lawan, sementara itu pemerintah anti terhadap politik.

Walapun telah diusahakan agar terhindar dari percaturan politik, Sjafei tetap tidak lepas dari "pertempuran" kaum politisi yang sedang berseteru. Saat INS didirikan, situasi politik di Sumatera Barat sedang panas-panasnya. Ia sangat berhati-hati berhadapan dengan gerakan politik mana pun demi memelihara kelanjutan cita-cita pendidikannya. Ia khawatir apabila INS terlibat ke dalam organisasi politik, pemerintah akan bertindak dan sulit diduga.[15]

Sikap kalangan madrasah pun terhadap Sjafei berubah ketika melakukan aksi bersama mengenai "ordonansi sekolah liar". Dalam rapat yang dihadiri oleh hampir seluruh sekolah swasta di Sumatera Barat Sjafei berkata, "Kami lebih memilih menutup perguruan INS daripada menerima ordonansi itu." Sejak saat itu berbagai perguruan Islam melakukan banyak kerja sama dengan INS.

Sejak tahun 1922 pemerintah mulai mengkhawatirkan perkembangan perguruan swasta, terutama terhadap perguruan Cina yang lebih berorientasi pada negeri leluhurnya. Oleh karena itu pemerintah merencanakan peraturan yang terkenal sebagai "guru ordonansi", yang bertujuan

12 *Ibid*, hlm 27.

13 *Ibid.*

14 *Ibid.*

15 *Ibid*, hlm. 29-31.

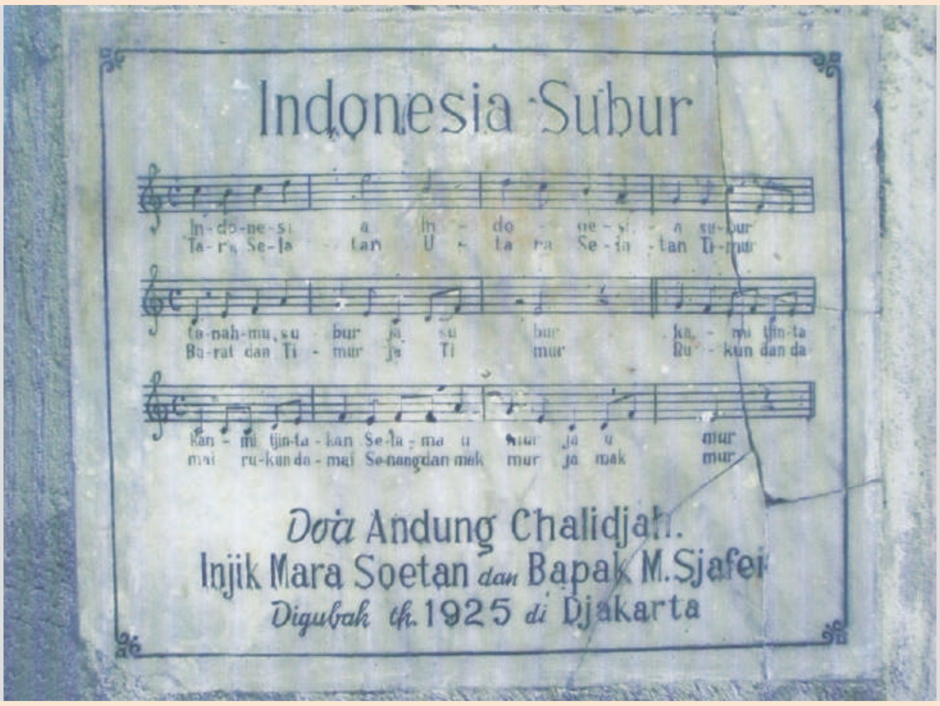

Lagu Indonesia Subur karya Mohammad Sjafei

(Sumber: Biro Umum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)

menyeleksi dan mengarahkan guru-guru sekolah swasta agar memberi pengajaran sesuai dengan kebijakan pemerintah. Dari sudut pandang kepentingan gerakan nasional, juga Islam, ordonansi itu dicurigai sebagai upaya pemerintah menghambat kehendak rakyat Indonesia mencapai kemajuan melalui pendidikan, tetapi ordonansi itu bagi INS bukan masalah karena secara administratif INS akan dapat menunaikan peraturan itu. Meski demikian, mengingat watak kolonialisme Belanda yang bersifat "minta sedikit tapi mengambil banyak" serta dampak negatif pada umumnya terhadap pergerakan pendidikan bangsa Indonesia, Sjafei tidak dapat menerima ordonansi itu. Ketika ordonansi diumumkan Sjafei pergi menemui Marah Sutan di Jakarta untuk menentukan sikap. Keduanya mendapat usul Muhammad Yamin agar menemui Ki Hadjar Dewantara. Yamin mengatakan tanpa keikutsertaan Ki Hadjar Dewantara bobot aksi akan lemah. Taman Siswa yang telah hadir di berbagai daerah merupakan suatu kekuatan yang tidak dimiliki oleh perguruan swasta lain yang merupakan perguruan bersifat lokal. Pada mulanya Ki Hadjar Dewantara menolak memimpin aksi tersebut, akan tetapi Sjafei meyakinkan bahwa program pendidikan nasional telah menjadi resolusi Perhimpunan Indonesia pada 1922 di Belanda. Tanpa memajukan pendidikan tidak mungkin memajukan bangsa dan mencapai cita-cita bangsa yang adil dan makmur. Akhirnya Ki Hajar mengirim telegram kepada Gubernur Jenderal yang berisi penentangannya pada ordonansi itu. Ketika Sjafei dan Marah Sutan menemui Ki Hadjar Dewantara Taman Siswa akan menyelenggarakan konferensi. Sjafei diminta memberi ceramah tentang sistem pendidikan INS. Pada kesimpulannya sistem INS disebut sebagai "arbijdschool", sedangkan Taman Siswa "zending school".[16]

Ketika Jepang menduduki Sumatera Barat kebetulan Soekarno sedang "terdampar" di Padang karena tak sempat dilarikan Belanda dari Bengkulu ke suatu tempat di utara Sumatera. Oleh karena itu Soekarno tampil menghimpun massa dan di bawah pimpinannya mendirikan Komite Rakyat di Padang, suatu badan yang fungsi formalnya membantu menjaga keamanan. Setelah Soekarno berangkat ke Jakarta beberapa bulan kemudian, Sumatera Barat seperti mengalami kekosongan pemimpin. Orang-orang melihat Sjafei sebagai sosok yang dapat memainkan peran sebagai tokoh utama. Bisa jadi pilihan yang lebih baik dari kalangan politisi, karena selama ini ia dianggap tidak terlibat dalam perseteruan. Sjafei bukanlah sosok yang buta politik, melainkan lebih merupakan seorang ideologis daripada seorang politisi. Kepadanya orang lebih mengharapkan sebagai "imam" daripada seorang penggerak organisasi. Ketika situasi Perang Pasifik mulai menyulitkan Jepang, dibentuklah suatu lembaga perwakilan, Syu Sang Kai, dan Sjafei diangkat sebagai ketua. Saat Jepang mulai di ambang kekalahan, dibentuk lagi suatu perwakilan yang bersifat kedaerahan Sumatera,

16 *Ibid*, hjm. 30-34.

Chuo Sangi In, dan Sjafei kembali diangkat menjadi ketua. Di Pulau Jawa jabatan tersebut dipegang oleh Soekarno. Selaku Ketua Chou Sangi In Sumatera Sjafei dibawa ke Tokyo sedikit lebih kemudian daripada keberangkatan Soekarno dan Hatta selaku pimpinan Chou Sangi In Pulau Jawa. Sepulang dari Jepang sikap Sjafei banyak berubah. Dia yang biasanya suka bicara menjadi lebih banyak berdiam. Kepada murid-muridnya pun ia lebih suka memberikan amanah pendek-pendek. Temanya sama saja, seperti, "Bekerja dan belajarlah sungguh-sungguh. Gali dan ambillah ilmu Jepang itu sebanyak-banyaknya." Dalam acara-acara di INS, ketika para muridnya datang, ia berpidato di luar kebiasaan. Matanya sering memandang ke loteng seperti menahan air mata. Lebih-lebih saat lagu "Indonesia Subur" dinyanyikan.

Rupanya perubahan sikap itu disebabkan oleh pengalamannya selama di Jepang. Dia bertemu dengan pimpinan pemuda Burma. Pemuda itu mengisahkan betapa kejam Jepang terhadap rakyat Burma. Yang mereka alami lebih kejam karena Jepang langsung berhadapan dengan sekutu di perbatasan India.[17]

Sejak kembali dari Belanda pada 1925 Sjafei tidak lagi tergabung dalam suatu partai politik. Yang menjadi program utama baginya ialah membangun suatu perguruan yang memberi pendidikan berwawasan nasional bagi masyarakat yang berwatak merdeka dalam artian luas. Bukan hanya merdeka dari segi politik, namun juga bermental wirausaha yang membebaskan bangsa dari ketergantungan terhadap bangsa lain. Sjafei merupakan seorang guru yang lebih berfungsi mengembangkan wawasan pikiran baru kepada muridnya.

Menurut beberapa pemuda, pada saat Proklamasi Kemerdekaan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945, Sjafei bergerak lamban. Jahja Djalil, seorang muridnya, mempunyai kontak dengan kelompok Chairul Saleh di Jakarta. Sjafei memerlukan waktu untuk membicarakan proklamasi dengan teman-temannya, seperti Dokter Rasidin, Chatib Sulaiman, dan Anwar St. Saidi. Persoalannya bukan masalah mengumumkan proklamasi, melainkan juga untuk mengetahui reaksi Jepang agar tidak terjadi banyak korban dari pihak rakyat. Setelah ada jaminan dari pimpinan tertinggi militer Jepang bahwa mereka akan bersikap netral, barulah tanggal 29 Agustus 1945 proklamasi itu diumumkan Sjafei atas nama bangsa Indonesia, yang berbunyi sebagai berikut:

PROKLAMASI

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenahi pemindahan kekoeasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan tjara saksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja.

Djakarta, 17 Bl. 8 Th. 1945

Atas nama bangsa Indonesia

Soekarno-Hatta

17 *Ibid*, hlm. 36-38.

Maka kami Bangsa Indonesia di Soematra dengan ini mengakui Kemerdekaan Indonesia seperti dimaksud dalam Proklamasi di atas dan menjoenjoeng keagungan kedoea pemimpin Indonesia itoe.

Boekit Tinggi hari 29 Bl. 8 Th. 1945

Atas nama Bangsa Indonesia di Soematra

Mohammad Sjafei[18]

Sjafei bukanlah tipe pemimpin seperti Soekarno. Ia lebih sesuai dengan tipe Ki Hadjar Dewantara. Namun masyarakat politik di Sumatera Barat menghendaki Sjafei seperti Soekarno yang telah diangkat menjadi presiden yang memimpin negara.[19]

Mohammad Sjafei yang mendukung kemerdekaan Republik Indonesia diberi kepercayaan menjadi Menteri Pengajaran dalam Kabinet Sjahrir II,[20] akan tetapi pada akhirnya ia menentang sistem pemerintahan yang tersentralisasi. Ia lebih menyukai kebijakan otonomi daerah. Oleh karena itu ia bergabung dengan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Dalam pemerintahan PRRI ia diangkat menjadi Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan (PP&K) sekaligus Menteri Kesehatan. Mohammad Sjafei meninggal pada tanggal 11 November 1966.

18 *Ibid.*, hlm. 39.

19 *Ibid.*, hlm. 40

20 Petrik Matanasi, "INS Kayutanam: Sekolah Alternatif yang Melawan Kurikulum Belanda". Diakses dari: https://tirto.id/ins-kayutanam-sekolah-alternatif-yang-melawan-kurikulum-belanda-cJLR. Pada 17 Agustus 2018, pukul 16,55.

Soewandi

Masa Jabatan
2 Oktober 1946 – 27 Juni 1947

Soewandi

Mr. Raden Soewandi lahir pada bulan Oktober 1899 di Karanganyar, Jawa Tengah. Ia mengeyam pendidikan dasar hingga lulus Sekolah Pangreh Praja (OSVIA) di Madiun pada tahun 1917. Soewandi melanjutkan pendidikan hingga meraih gelar sarjana hukum di Rechtshoogeschool te Batavia.[1] Sambil menempuh pendidikan hukum ia juga bekerja sebagai *klerk* pada Departement van Onderwijs en Eeredienst atau yang dikenal dengan istilah Kementerian Pengajaran.[2] Pada tahun 1923 ia mendapat ijazah notaris dan menjadi orang pribumi pertama yang mendapatkan ijazah tersebut. Sebelum menjadi Menteri Pendidikan dan Pengajaran pada awal kemerdekaan, Soewandi pernah menjabat sebagai *referendaris* di Departement van Onderwijs en Eeredienst.[3] Sebagai salah satu sarjana hukum, karier Soewandi dapat dikatakan cukup cemerlang. Soewandi dipercaya sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada Kabinet Sjahrir II (November 1945–Oktober 1946) dan kemudian dipercaya kembali menjadi Menteri Pendidikan dan Pengajaran pada Kabinet Sjahrir III (2 Oktober 1946–27 Juni 1947). Suwandi membentuk Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia (PPPRI) yang diketuai oleh Ki Hadjar Dewantara, yang bertugas meletakkan dasar-dasar dan susunan ejaan baru.[4]

Pada masa Soewandi inilah diberlakukan Ejaan Republik Indonesia atau yang sering dikenal dengan Ejaan Suwandi atau dikenal juga dengan sistem Ejaan Republik Indonesia. Ejaan Suwandi menggantikan Ejaan van Ophuijsen pada 19 Maret 1947 dan berlaku selama 25 tahun hingga bulan Agustus 1972. Sebelumnya Indonesia menggunakan Ejaan van Ophuijsen.[5] Sebagai contoh perbedaan Ejaan Suwandi dengan Ejaan van Ophuijsen dapat dilihat pada huruf "oe" menjadi "u", sehingga kata "pelakoe" (Ejaan van Ophuijsen) menjadi "pelaku" (Ejaan Suwandi). Selain itu juga bunyi hamzah atau bunyi sentak, yang sebelumnya dinyatakan dengan tanda (') pada Ejaan van Ophuijsen ditulis menjadi "k" pada Ejaan Suwandi, misalnya pada kata-kata ta', pa', dan ma'lum (Ejaan van Ophuijsen) menjadi tak, pak, dan maklum (Ejaan Suwandi). Perbedaan lain, misalnya "dj" menjadi "j", "tj" menjadi "c", dan "j" menjadi "y".

Soewandi selaku Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan menugaskan R.T. Amin Singgih Tjitrosomo menyiapkan pembentukan lembaga negara yang menangani masalah pemeliharaan dan pembinaan bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Namun pembentukan lembaga tersebut belum dapat dilaksanakan karena pada saat itu para ahli dan sarjana bahasa banyak yang mengungsi ke luar kota Jakarta. Persiapan yang dilakukan baru sampai pada pembentukan Panitia Pekerja berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Nomor 700/ Bhg.A. tanggal 18 Juni 1947. Panitia Pekerja itu merupakan satu unit yang dikepalai oleh Mr. St. Takdir Alisjahbana dengan R.T. Amin Singgih Tjitrosomo sebagai sekretaris dan dibantu oleh lima orang anggota, yaitu Adinegoro, W.J.S. Poerwadarminta, Ks. St. Pamuntjak, R. Satjadibrata, dan R.T. Amin Singgih Tjitrosomo.[6]

---

1 PNRI. Biodata Pejabat Menteri. Diakses dari: http://kepustakaan-presiden.pnri.go.id/cabinet_personnel/ popup_profil_pejabat.php?id=50&presiden_id=1&presiden=sukarno. Pada tanggal 7 September 2018 Pukul 17.18.

2 R.Z. Leirissa, dkk, *Ensiklopedi Tokoh Kebudayaan*, Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan Depdikbud RI, 1994, hlm. 291.

3

4 Library Pendidikan, "*Daftar Nama-Nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dari Masa ke Masa*", diakses dari http://www.librarypendidikan.com/2017/04/sejarah-dan-daftar-nama-nama-menteri.html, pada tanggal 17 November 2018 pukul 14:08 WIB.

5 Laksa Mahadikengrat, "*Soewandi, sosok penting di dunia bahasa Indonesia sebelum EYD*", diakses dari: https://www.brilio.net/sosok/soewandi-sosok-penting-di-dunia-bahasa-indonesia-sebelum-eyd-1710261.html, pada tanggal 7 September 2018 pukul 17:20 WIB.

6 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *"Sejarah Badan Bahasa"*, diakses dari http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/sejarah, pada tanggal17 November 2018, pukul 14.15 WIB.

Rapat para anggota politik dari Indonesia. Dari kiri ke kanan Dr. R. Soetomo pemimpin Persatuan Bangsa Indonesia (Jawa Barat) R. Soewandi wakil dari Boedi Oetomo (Jawa Tengah) dan Baginda Dahlan Abdullah wakil dari Sarikat Soematra (Sumatra)

(Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia)

Soewandi ikut aktif mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang baru diraih saat itu. Ia memimpin delegasi Indonesia dalam perundingan dengan Belanda di Hooge Veluwe, Belanda.[7] Pada tahun 1950 Soewandi membuka kantor notaris di Jakarta. Soewandi juga turut serta penyusunan *Ensiklopedia Indonesia*. Sebelumnya ia menjadi ketua tim penyusunan ensiklopedia tersebut, tetapi terpaksa tidak melanjutkannya karena sakit. Soewandi meninggal di Jakarta pada tanggal 26 Desember 1960. Duabelas tahun kemudian Ejaan Suwandi digantikan oleh Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).[8]

7 R.Z. Leirissa, dkk., *Op.Cit*. Hlm. 292.

8 Yommi Hanna. "Sebelum EYD, Ada Ejaan Suwandi dalam Bahasa Indonesia". Diakses dari: http://bobo.grid.id/read/08680164/sebelum-eyd-ada-ejaan-soewandi-dalam-bahasa-indonesia?page=all. Pada tanggal 7 September 2018 Pukul 17:21.

Mr. Suwandi Memberi Laporan Kepada St. Sjahrir Pada Bulan April 1947

(Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia)

Goenarso

Masa Jabatan
2 Oktober 1946 – 27 Juni 1947

Goenarso

Prof. Ir. R. Goenarso lahir di Ponorogo, Jawa Timur, pada tanggal 22 Oktober 1908. Ia memperoleh pendidikan hingga meraih gelar insinyur teknik sipil di Technische Hoogeschool te Bandoeng (TH) pada tahun 1935.

Beberapa lama sebelum Jepang mendarat di Indonesia TH terpaksa ditutup karena para dosennya masuk wajib militer dan kampus TH sempat dijadikan markas militer Jepang. Atas desakan beberapa guru besar TH dari kalangan Belanda, dan berkenaan dengan keperluan perang Jepang, laboratorium di kompleks TH kembali dibuka dengan nama Institute of Tropical Disease. Pada 1 April 1944 Pemerintah militer Jepang kembali membuka TH dan mengganti namanya menjadi Bandung Kyogo Daigaku dengan dua tingkatan, yaitu Daigakubu (Sekolah Tinggi Teknik) dan Senmonbu (Sekolah Menengah Teknik). Bandung Kyogo Daigaku memiliki tiga bagian dengan masing-masing masa studi selama tiga tahun, yaitu Dobukuka (Bagian Sipil), Oyakagukuka (Bagian Kimia), serta Denki dan Kikaika (Bagian Listrik dan Mesin). Kampus ini dipimpim oleh seorang rektor berkebangsaan Jepang, Isyihara. Di samping para pengajar dari Jepang terdapat tenaga ajar dari kalangan orang Indonesia, di antaranya Goenarso yang mengajar Ilmu Pasti dan Fisika, Ir. R. Roosseno Soerjohadikusumo yang mengajar Mekanika dan Beton, Ir. R.M. Soewandi Notokoesoemo di bagian Bangunan, S.M. Abidin di bidang Ilmu Pasti, serta Ir. Soenarjo di bidang Irigasi, Hidrolika, dan Mesin.[1] Bandung Kyogo Daigaku tidak bertahan lama.

Setelah merdeka pada bulan Agustus 1945 sekolah tinggi tersebut berganti nama menjadi Sekolah Tinggi Teknologi (STT) Bandung dan Goenarso tetap menjadi dosen di sana. Pada bulan November 1945 STT Bandung dipindahkan ke Yogyakarta. Ia juga turut hijrah ke Yogyakarta bersama semua dosen dan pegawai STT Bandung. Kuliah diadakan di gedung Sekolah Menengah Tinggi B Negeri Yogyakarta untuk tiga program studi, yaitu Bagian Bangunan Jalan dan Air, Bagian Kimia, dan Bagian Mesin dengan lama studi masing-masing empat tahun. Rekan-rekan pengajar lain yang juga hijrah ke Yogya di antaranya Prof Ir. Roosseno, Ir. Soewandi, Ir. Soenarjo, Ir. Wreksondiningrat, Ir. Abdoelmutalip Danoeningrat, Ir. Ali Djojoadinoto, Ir. Soedoro, dan Herman Jones.[2]

Goenarso diangkat menjadi Menteri Muda Pengajaran dalam Kabinet Sjahrir III (2 Oktober 1946–27 Juni 1947) dan menteri pertama yang mencanangkan pemberantasan buta huruf. Goenarso termasuk salah seorang yang berpengaruh dalam pendirian Institut Teknologi Bandung (ITB). Selain di ITB Goenarso juga mengajar di beberapa perguruan tinggi lain, seperti Akademi Teknik Angkatan Darat (ATEKAD).

Goenarso mendapat penghargaan dari Dewan Mahasiswa ITB untuk mahasiswa yang aktif dalam kegiatan dan studi.[3] Kini namanya diabadikan sebagai nama salah satu ruang seminar di Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung. Goernarso meninggal pada tanggal 6 Maret 1992 dalam usia 83 tahun.[4]

1 Sakri, A. (1979). *Dari TH ke ITB: Kenang-kenangan Lustrum Keempat 2 Maret 1979, Jilid I: Selintas Perkembangan ITB*. Bandung: Penerbit ITB, hal. 26-27.

2 *Ibid*, hlm. 27.

3 *Ibid*, hlm 71.

4 Pusaka Jawatimuran, "Prof. Ir. R. Goenarso, Kabupaten Ponorogo". Diakses dari http://jawatimuran.net/ 2013/02/26/prof-ir-r-goenarso-kabupaten-ponorogo/. Pada tanggal 8 September 2018 pukul 12.00.

Ali Sastroamidjojo

Masa Jabatan
3 Juli 1947 - 4 Agustus 1949

Ali Sastroamidjojo

MASA KECIL DAN PENDIDIKAN

Ali Sastroamidjojo dilahirkan pada tanggal 21 Mei 1903 di Grabag Merbabu, suatu daerah di kaki Gunung Merbabu, lebih kurang 20 km dari Magelang. Sebagai ibukota kewedanan Grabag Merbabu memang dapat dinamakan kota, walaupun sifat dan jiwa masyarakatnya kedesa-desaan. Ayah Ali bernama R.Ng. Sastroamidjojo, seorang pensiunan pegawai negeri, anak R. Wirjodipuro Wedana Batur, Banyumas. Ayah Ali bekerja di kantor Bupati Magelang Raden Tumenggung Ario Danuningrat II. Sastroamidjojo bekerja dengan sangat rajin sehingga mendapat penghargaan dan kepercayaan bupati. Setelah beberapa tahun bekerja sebagai *magang*, Sastroamidjojo naik pangkat menjadi jurutulis, kemudian dinikahkan dengan Kustiah, anak nomer 19 Bupati Magelang.

Setelah menikah Sastroamidjojo naik pangkat menjadi asisten wedana dan beberapa tahun kemudian menjadi Wedana Jetis, Kabupaten Temanggung. Pada zaman itu seorang pegawai negeri yang menjadi menantu bupati dapat dinaikkan pangkat dengan agak cepat. Dari hasil pernikahan tersebut lahir dua belas orang anak, enam laki-laki dan enam perempuan. Setelah pensiun Sastroamidjojo pindah ke Grabag Merbabu. Di sanalah Ali dan adiknya, Usman, lahir. Untuk menambah uang pensiun Sastroamidjojo bekerja sebagai mantri garam, yaitu pegawai penjual garam yang menjadi monopoli pemerintah.

Ali masuk sekolah desa untuk belajar membaca, menulis, dan berhitung bersama dengan teman-teman desanya yang merupakan anak petani. Sekolah desa tidak memuaskan hati Sastroamidjojo, apalagi ketika kakak-kakak Ali yang bersekolah di kedokteran dan teknik datang dari Semarang dan Jakarta untuk berlibur. Mereka menganjurkan Ali dan Usman belajar bahasa Belanda, sebab pandai berbahasa Belanda merupakan kunci kemajuan, tetapi sekolah Belanda pada waktu itu hanya terbuka untuk anak-anak orang Belanda dan anak-anak orang Indonesia kelas bangsawan atau priyayi tinggi. Karena sekolah desa tidak mengajarkan bahasa Belanda Sastroamidjojo mengambil keputusan pindah ke Magelang. Rumah Ali di Grabag dijual untuk membeli rumah di Jalan Kerkopan no. 11 di Magelang.

Perjuangan ayah Ali untuk memasukan anaknya ke sekolah berbahasa Belanda tidak berjalan mulus. Awalnya Ali ditolak karena belum dapat berbahasa Belanda, sedang ayahnya hanya pensiunan pegawai negeri yang tidak dapat berbahasa Belanda. Meskipun demikian Sastroamidjojo pantang menyerah. Pada sore hari Ali disekolahkan pada seorang guru bahasa Belanda, Tuan Westendorp namanya. Baru kemudian Ali diterima di sekolah Belanda nomer dua. Murid-muridnya kebanyakan anak-anak Indo-Belanda yang nakal dan sering bertindak kejam terhadap anak Indonesia seperti Ali. Oleh karena suasana sekolah Belanda yang sangat tidak menyenangkan, Ali hanya bertahan selama satu tahun di sekolah tersebut. Sastroamidjojo berusaha keras memindahkan Ali ke sekolah Belanda nomer satu. Kehidupan Ali kecil memang merupakan hasil kebijaksanaan orang tuanya. Ali, dalam buku yang ditulisnya, mengucapkan terima kasih kepada orang tuanya karena pengatahuan Ali tentang bahasa Jawa dan agama Islam setidak-tidaknya menjadi pengerem ketotalan pengaruh pendidikan dan kebudayaan Belanda dalam pertumbuhan jiwa dan pemikirannya.

Pendidikan Ali berlangsung dengan lancar. Pada tahun 1918, ketika berada di kelas tujuh di Eerste Europese Lagere School, Ali harus mengikuti ujian untuk melanjutkan sekolah. Terdapat tiga kemungkinan sekolah yang dapat diikuti Ali, yakni 1) sekolah pamongpraja di Magelang, 2) sekolah teknik di Surabaya, dan 3) sekolah Hogere Burger School (HBS) yang berada di Semarang, Surabaya, dan Jakarta. Akhirnya Ali melanjutkan ke HBS Jakarta.

Kehidupan di HBS sangat berbeda dengan kehidupannya di Magelang. Pandangan Ali yang semula terbatas dan serba sempit, mulai berkembang dan menjadi lebih luas saat berada di Jakarta. Dalam

Waktu Ali masih berada di sekolah rendah Belanda, di tahun 1911. Dari kiri ke kanan: Ayah Ali, Usman adik Ali, dan Ali

(Sumber: Istimewa)

pergaulan ia mulai mengenal pemuda-pemuda dari berbagai kepulauan lain di Indonesia, seperti Ambon, Sumatera, dan Nusa Tenggara. Ia kemudian menjadi anggota perkumpulan Jong Java (1918-1922) serta menjadi anggota perkumpulan Inlandse HBS Vereniging, yaitu perkumpulan para pelajar Indonesia di HBS.

Minatnya terhadap kebudayaan Eropa Barat mulai tumbuh. Kewajiban mempelajari bahasa dan kesusastraan Belanda, Jerman, Perancis, dan Inggris itulah yang menumbuhkan minatnya terhadap sastrawan-sastrawan besar Barat, seperti Shakespeare, Bernard Shaw, La Martine, Balzac, Goethe, Schiller, Heine, Mutatuli, Willem Kloos, dan Van Deysel. Ia juga mengembangkan minat olahraga melalui perkumpulan olahraga Lucurgus di HBS.

Selain kebudayaan dan olahraga, Ali juga mengamati perkembangan politik yang terjadi. Pertemuan dan diskusinya dengan Alimin, yang pada saat itu menjadi pemimpin pergerakan Sarekat Islam (SI), merupakan salah satu hal yang meningkatkan minat Ali terhadap politik. Menjelang akhir tahun 1922 minatnya terhadap politik tertunda karena ia harus fokus pada sekolah untuk mempertahankan beasiswanya di HBS. Akhirnya Ali lulus dengan nilai memuaskan, terutama di bidang sastra.

Lulus HBS merupakan babak baru kehidupan Ali: pertemuan dengan Titi Roelia yang kelak menjadi istrinya dan keputusan mengenai kelanjutan sekolah. Kakak Ali, Sastrowidjono, mengusahakan Ali melanjutkan studi ke Negeri Belanda dengan syarat Ali bersedia memilih Jurusan Orientalise Letteren (Sastra dan Kebudayaan Timur). Ali menyetujui permintaan kakaknya walau dengan berat hati karena lama sekolah di jurusan tersebut sembilan tahun. Pada tahun 1922 Ali pergi ke negeri Belanda untuk melanjutkan pendidikan.

Sesampainya di Belanda, Ali mengurus dan mendaftrakan diri sebagai mahasiswa Fakultas Sastra dan Filsafat Jurusan Sastra dan Kebudayaan Timur. Ternyata ijazah HBS belum memenuhi syarat untuk masuk fakultas dan jurusan tersebut, karena Ali harus memiliki ijazah bahasa dan kesusastraan Latin dan Yunani. Ali harus belajar lebih kurang dua tahun untuk mendapat ijazah tersebut. Setelah berbagai pertimbangan dan atas saran teman-temannya, Ali membatalkan niat masuk Jurusan Sastra dan Kebudayaan Timur dan memilih mendaftarkan diri ke Jurusan Hukum Hindia Belanda Fakultas Hukum Universitas Leiden. Ilmu hukum tidak membutuhkan masa studi yang lama serta tidak ada syarat memiliki ijazah bahasa Latin dan Yunani, sehingga memungkinkan Ali mempersingkat masa pendidikan.

Pendidikan hukum lebih kurang lima tahun lamanya dengan dua kali ujian, yaitu ujian kandidat yang dapat ditempuh dalam waktu dua tahun dan ujian doktoral yang ditempuh dalam tiga tahun. Lulusan

Waktu Ali sekolah di HBS dan menjadi anggota Jong Java, 1921. Dari kiri ke kanan, berdiri: Santoso Tohar, kakak Ali R. Tohar, dan Ali. Duduk: Istri R. Tohar dan ibu Ali

(Sumber: Istimewa)

Sebagian dari anggota Perhimpunan Indonesia pada tahun 1923

(Sumber: Istimewa)

ujian doktoral mendapatkan gelar Meester in de Rechten (Mr.). Ia bertekad menempuh ujian kandidat dalam waktu satu tahun agar bisa segera menikahi kekasihnya, Titi Roelia. Dalam waktu sembilan bulan ia mengikuti ujian kandidat, namun gagal karena terlalu tegesa-gesa. Ia kembali mengikuti ujian dalam waktu tiga bulan kemudian dan ia lulus kandidat sarjana hukum.

Ali menikahi Titi Roelia, yang dilangsungkan melalui surat kuasa Ali kepada temannya, Wasito. Musim semi tahun 1924 Titi Roelia yang sudah menjadi istri Ali menyusul dan tiba di Belanda. Pada tanggal 24 Desember 1925 lahir anak laki-laki pertama Ali dan diberi nama Kemal Mahisa. Nama Mahisa diambil dari sejarah Jawa kuna, sesuai dengan lambang di atas bendera merah putih Perhimpunan Indonesia (PI). Lambang tersebut menggambarkan cita-cita perhimpunan itu tentang bangsa Indonesia.

POLITIK DAN PERGERAKAN

Ali bergabung dalam PI di Belanda. Sejak kedatangan Ali pada awal tahun 1923, PI mengalami perkembangan yang sangat cepat. Ketika Ali baru menjadi anggota PI, pimpinan lama PI, Mr. Hermen Kartowisastro, meletakkan jabatan dan digantikan Iwa Kusumasumantri yang dipilih oleh rapat anggota untuk periode 1923-1924. Waktu itu PI bernama "Indonesische Vereniging" dengan majalah *Hindia Poetra*. Akibat kegiatan politik yang meresahkan pemerintah Hindia Belanda, Ali bersama dengan Mohammad Hatta, Natzir Dt. Pamuncak, dan Abdul Madjid ditawan polisi Belanda pada tahun 1927.

Sekembalinya dari Belanda ke Indonesia pada tahun 1928 dan memperoleh gelar Meester in de Rechten (Mr., Sarjana Hukum), Ali bekerja sebagai pengacara bersama dengan Sujudi S.H. dan Dr. Sukiman di Yogyakarta (1928), kemudian pindah ke Madiun (1932-1942). Selain menjadi pengacara ia juga menjadi editor majalah mingguan *Djanget* di Surakarta dan koresponden harian *Sedio Utomo*. Ia juga mengajar di Perguruan Taman Siswa (1928-1929).

Pada tahun 1928 ia menjadi anggota eksekutif Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan oleh Soekarno dan menjadi editor majalah *Soeloeh Indonesia Moeda* milik PNI. Setelah Pemerintah Hindia Belanda membubarkan PNI pada tanggal 25 April 1931, Ali ikut mendirikan Partai Indonesia (Partindo). Setelah Partindo juga dibubarkan pada bulan November 1936, Ali bergabung dalam Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo). Asas dan tujuan Gerindo sama dengan Partindo, yaitu nasional revolusioner tetapi berhaluan kooperatif.

MASA KEMERDEKAAN

Pada tahun 1945 Ali aktif kembali menjadi angota PNI dan menjabat Ketua Dapartemen Politik merangkap anggota Dewan Eksekutif. Ketika kabinet pertama dibentuk oleh Presiden Soekarno pada tanggal 2 Desember 1945 ia masuk dalam Kementerian Penerangan dan menjadi pegawai tinggi. Oleh karena Amir Sjarifuddin yang ditunjuk sebagai Menteri Penerangan[1] masih belum berada di Jakarta Kementerian menugaskan Ali menghadiri sidang-sidang kabinet yang diadakan di rumah bersejarah Pegangsaan Timur nomor 56 (sekarang Jalan Proklamasi), rumah kediaman Bung Karno sekaligus tempat Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia.

Oleh karena ketidakpastian kapan Menteri Penerangan Amir Sjarifuddin tiba di Jakarta setelah meringkuk di dalam tahanan Kempetai di Malang, Ali diangkat menjadi Wakil Menteri Penerangan. Pekerjaan di Kementerian Penerangan pada waktu itu belum begitu teratur.[2] Pegawainya masih belum terlalu banyak. Pekerjaan yang paling menyibukkan adalah pelayanan kepada para pemuda dan koresponden surat-surat kabar asing yang pada zaman permulaan revolusi masuk ke Indonesia bersama dengan tentara Inggris dan disebut sebagai *war correspondents*.

Pada tanggal 6 Juni 1946 Dewan Pertahanan Negara dibentuk dan Ali diangakat sebagai sekretaris. Kantor sekretariat badan ini bertempat di gedung BP Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) di Jalan Malioboro, Yogyakarta.[3] Ali menjabat sekretaris Dewan Pertahanan Negara lebih kurang satu tahun, dari awal Juni 1946 sampai dengan permulaan Juli 1947. Pada awal bulan November 1947 terjadi perubahan susunan kabinet (*reshuffle*). Ali diangkat sebagai Menteri Pengajaran dalam Kabinet Amir Sjarifuddin I (3 Juli 1947-11 November 1947) dan dilanjutkan pada Kabinet Amir Sjarifuddin II (11 November 1947-29 Januari 1948).

Ketika Kabinet Hatta menggantikan Kabinet Amir Sjarifuddin pada tahun 1948, Ali juga diangkat menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan dalam Kabinet Hatta I (29 Januari 1948-4 Agustus 1949). Hanya sedikit hal yang bisa dilakukan oleh Ali. Kantor Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan saja sudah tidak begitu menguntungkan.[4] Kantor Menteri dan stafnya ada di Yogya, sedang bagian lain berada di Sala di bawah pimpinan Sekretaris Jenderal Mr. Santoso. Paling sedikit dua kali seminggu ia harus mondar-mandir antara Yogya dan Sala. Meskipun demikian ia terbantu karena pegawai-pegawai kementeriannya merupakan orang-orang berpengalaman bekas pegawai Dapartement Onderwijs en Eredienst Hindia Belanda, sehingga pekerjaan rutin bisa dilaksanakan. Sayangnya pembaharuan bidang pendidikan dan pengajaran sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia belum bisa tercapai. Ali belum dapat mencurahkan perhatian sepenuhnya pada soal-soal pendidikan atau pelajaran karena baru dapat mengajukan perencanaan undang-undang pokok pendidikan dan pengajaran kepada KNIP. Pusat perhatian Ali lebih pada pemberantasan buta huruf yang sangat penting bagi negara. Ia dibantu oleh dua orang pegawai yang tekun dan penuh dedikasi terhadap pemberantasan buta huruf, yaitu Sutedjo Brondjonegoro dan Tartib Prawirodihardjo.

Ketika Republik Indonesia Serikat (RIS) terbentuk Ali diangkat menjadi Duta Besar untuk Amerika Serikat dan ketika terwujud Negara Kesatuan RI diangkat sebagai Duta Besar RI untuk Amerika Serikat, Kanada, dan Mexico dengan gelar Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (1950-1955). Pengangakatan Duta Besar dilakukan Hatta di dalam pesawat terbang yang sedang melayang di atas Yogyakarta dan akan mendarat di Maguwo. Hal ini agak menyimpang dari kebiasaan Bung Hatta yang

1 Ali Sastroamidjojo, *Op.Cit*. Hlm. 180.

2 *Ibid*. Hlm. 183.

3 *Ibid*. Hlm. 202.

4 *Ibid*. Hlm. 223.

Perundingan Indonesia-Belanda di bawah pengawasan Komisi Tiga Negara (KTN) di Jl. Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta. Tampak wakil dari Indonesia Moh. Roem, Ali Sastroamidjoyo, dan Dr. J. Leimana, serta utusan KTN, Paul van Zealand (Belgia) dan Frank Graham (Amerika Serikat)

(Sumber: Arsip Nasional Republik Indonesia)

selalu memegang teguh ketertiban dan keresmian.[5] Di samping itu Ali juga pernah duduk sebagai anggota Panitia Politik, Keamanan, dan Perwakilan untuk Sidang Umum PBB ke-VIII.

Setelah kembali ke tanah air Ali menjabat Perdana Menteri dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo I (1 Agustus 1953-12 Agustus 1955) dan dalam Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Bandung ia menjabat Ketua. Ali terpilih kembali menjadi Perdana Menteri dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo II (24 Maret 1956-9 April 1957). Pada tanggal 15 Desember 1959 ia mengunjungi Kuba atas undangan Menteri Luar Negeri Kuba Roul Roa. Sekembalinya dari tanah air ia ditunjuk sebagai anggota Panitia Persiapan Front Nasional oleh golongan partai berdasar Keppres No.34/1960-23 Maret 1960) dan pada tanggal 15 Agustus 1960 diangkat sebagai anggota PB Front Nasional (Keppres 198/1960) dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) wakil Golongan Karya (Keppres No.199/1960).

Pada tanggal 10 November 1960 ia diangkat sebagai Wakil Ketua MPRS (Keppres No. 292/1960) dan tanggal 29 Desember 1960 ditetapkan sebagai anggota Dewan Pembangunan Pembantu Presiden (Keppres No. 343/1960). Pada tanggal 8 Januari 1961 Ali ditetapkan sebagai Wakil Ketua PB Front Nasional dari golongan politik (Keppres No. 0/1961) dan sebagai anggota Pengurus Harian Pusat Front Nasional dari golongan politik (Keppres No. 10/1961). Dalam rombongan Presiden Soekarno ke KTT Beograd 29 Agustus 1961, Ali turut serta di dalam rombongan tersebut. Pada bulan Agustus 1961 ia diangkat menjadi Wakil Delegasi RI ke Sidang Umum PBB untuk menggagalkan usul mengenai *Self Determination* bagi Irian Barat (Irian Jaya).

Dalam Kabinet Kerja ke-III (6 Maret 1962-13 November 1963) Ali menjabat sebagai Menteri/Wakil Ketua MPRS. Di samping sebagai Menteri/Wakil Ketua MPRS, ia ditetapkan sebagai anggota Panitia Negara untuk peninjauan kembali Rencana Undang-undang (RUU) Pemilihan umum MPR, DPR, DPRD Tingkat I dan Tingkat II (Keppres No. 107/1962-22 Mei 1962), anggota Panitia Penghapus Keadaan Bahaya (25 Oktober 1962), anggota Panitia 13 untuk menetapkan Ekonomi Keuangan (4 Maret 1963), dan ketua Delegasi gabungan MPRS dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) ke Eropa Timur yang terdiri dari 12 orang anggota MPRS/DPRGR dan 14 orang staf negara. Adapun negara yang dikunjungi meliputi Soviet, Jerman Timur, Ceko, Hongria, Bulgaria, Rumania, dan Yugoslavia. Kemudian pada tanggal 2 September 1963 Ali terpilh sebagai Ketua Umum PNI dalam kongres PNI ke-X di Purwokerto.

5 *Ibid*. Hlm. 301.

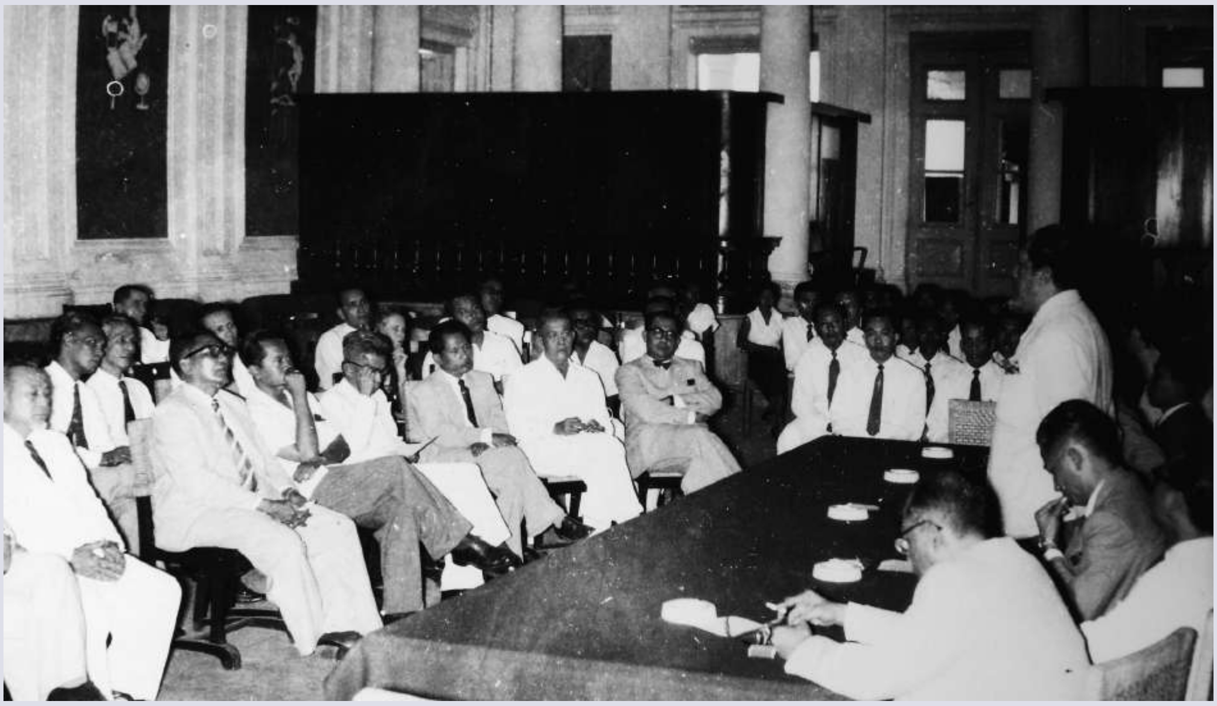

Atas

Suasana penandatanganan Perjanjian Renville di atas kapal USS Renville. Tampak Presiden Sukarno sedang menandatangani dokumen perjanjian, disaksikan Mr. amir Sjarifuddin, H. Agus Salim, Dr. Leimena dan Mr. Ali Sastroamidjoyo sebagai wakil Indonesia

(Sumber: Arsip Nasional Republik Indonesia)

Tengah

Pengangkatan Ali Sastroamidjojo sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat

(Sumber: Istimewa)

Bawah

Upacara penyerahan ijazah kepada para lulusan Akademi Dinas Hubungan Ekonomi Luar Negeri oleh P. M. Mr. Ali Sastroamidjojo, tanggal 2 Juli 1956

(Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia)

Ali Sastroamidjojo bersama sang isteri disambut oleh tentara
(Sumber: Istimewa)

Ali bukan hanya seorang tokoh politik ternama, tetapi juga penulis yang baik. Ia rajin menuangkan gagasan-gagasannya dalam buku, antara lain *Pengantar Hukum Internasional* (1971), *Politik Luar Negeri Indonesia Dewasa Ini* (1972), otobiografi *Tonggak-tonggak di Perjalananku* (1974), dan *Empat Mahasiswa Indonesia di Negeri Belanda* (1975). Dr. Ali Sastroamidjojo S.H. meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 13 Maret 1975.

Teuku Moehammad Hasan

Masa Jabatan
1948 - 1949

Teuku Moehammad Hasan

MASA KECIL

Mr. Teuku Muhammad Hasan (TM Hasan) dilahirkan pada tanggal 4 April 1906 di Gampong Peukan Sot, sebuah kampung yang terletak kira-kira 2,5 km dari kota Sigli yang sekarang menjadi ibukota Daerah Tingkat II Kabupaten Pidie, Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Ayahnya bernama Teuku Bintara Pineung (TBP) Ibrahim bin TBP Po Itam bin TBP Sigee, seorang *uleebalang* kenegrian Pineueng dan Raja Peukan Baro, sebuah kota pelabuhan di perairan Selat Malaka yang ramai disinggahi kapal-kapal asing sebelum pelabuhan Sigli dibuka oleh pemerintah Kolonial Belanda pada awal abad ke-20. Ibunya bernama Cut Manyak binti Teuku Muhammad (Teungku di Bubue).

Pada waktu lahir TM Hasan diberi nama Teuku Sarung. Keadaan fisik Teuku Sarung kecil dari hari ke hari tidak bertambah baik, kesehatannya selalu terganggu, sedang badannya kelihatan kurus. Ada kepercayaan dalam masyarakat Aceh umumnya bahwa keadaan anak yang demikian terutama disebabkan oleh pemberian nama yang tidak sesuai. Oleh karena itu beberapa tahun kemudian nama Teuku Sarung diganti dengan nama baru, yaitu Teuku Muhammad Hasan. Setelah penggantian nama TM Hasan menjadi lebih sehat dan kelihatan semakin gemuk. TM Hasan kecil tidak lama tinggal di Gampong Peukan Sot. Ia dipindahkan ayahnya ke Gampong Sukon. Rumah tempat tinggalnya yang baru dikenal oleh masyarakat sekeliling dengan nama *rumoh buluko*, dekat dengan *rumoh* (rumah) *geudong*, yaitu rumah TBP Ibrahim yang lain yang ditempati oleh saudara-saudara TM Hasan lain ibu bersama dengan ibu mereka.

Ada alasan tertentu yang menyebabkan TM Hasan bersama ibunya pindah ke *rumoh buluko* di Gampong Sukon. Alasan utama adalah rumah itu terletak dalam lingkungan masjid, sehingga suasana keagamaan akan lebih terasa pada diri TM Hasan kecil. Ini penting artinya bagi pembentukan watak anak-anak, khususnya bagi pembentukan nilai-nilai keagamaan, apalagi jika anak itu diharapkan menjadi orang yang saleh di kemudian hari. Alasan lain adalah agar TM Hasan lebih mengenal dan dapat bergaul dengan saudara-saudaranya lain ibu serta dapat mengenal lingkungan yang lebih luas daripada di Peukan Sot. Sehubungan dengan yang disebut terakhir akan lebih tampak setelah beberapa tahun kemudian ketika TM Hasan bersama dengan ibu serta adik-adiknya pindah lagi ke rumah yang baru di Keude Baro, Lampoh Saka, masih di daerah wilayah *Uleebalang* Pineung. Jika sebelumnya TM Hasan tinggal di dekat pantai di Peukan Sot dan Sukon sehingga dapat merasakan suasana kehidupan para nelayan, sekarang dapat mengenal lingkungan kehidupan para petani dengan segala keluh kesahnya setelah tinggal di tempat yang baru di daerah Selatan yang hawanya sejuk dan segar.

Sebagai anak seorang *uleebalang* TM Hasan diasuh dan dididik agar pada saatnya nanti dapat menjadi seorang *uleebalang* pengganti ayahnya yang berwibawa dan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesejahteraan rakyat di daerahnya. Sehubungan dengan itu pula TM Hasan diberi kesempatan seluas-luasnya bergaul dan bermain dengan anak-anak sebayanya, yang tidak hanya berasal dari kalangan keluarga *uleebalang*, tetapi juga dari kalangan rakyat biasa agar dapat lebih mengenal lingkungan kehidupan dan aspirasi rakyat kecil yang kelak dipimpinnya. Karena itu tidak mengherankan apabila setiap saat ia bermain dengan gembira bersama anak-anak orang biasa di sepanjang pinggir jalan ataupun berenang di Sungai Krueng Beurebo ketika tinggal di rumah *buluko* Gampong Sukon. Setelah pindah ke Rumah Sagoe di Keudee Baro ia juga bermain dengan teman-teman sebayanya di kali kecil di tengah sawah di antara para petani yang sedang membajak sawah. Setelah meningkat remaja ia bersama dengan para pemuda di kampungnya sering berburu binatang di hutan pinggir kampung, sehingga kebiasaan berburu itu menjadi salah satu hobinya sampai dewasa. Ia sering menembak babi dan elang yang selalu mengganggu tanaman dan binatang peliharaan penduduk kampung. Dalam hal berburu ia memperoleh

pelatihan ayahnya, bahkan juga belajar membuat peluru sendiri, karena berburu merupakan tradisi kaum bangsawan Aceh pada zaman itu. Demikian pula ia sering diajak berjalan kaki ayahnya ke sawah untuk mengawasi pengairan, terutama dalam pembagian air sawah agar merata bagi setiap petani; bahkan ia juga ikut bertanam tembakau di sawah atau memangkas tembakau di perkebunannya di antara para petani sekampungnya.

Sejak kecil Hasan dipupuk dengan jiwa keagamaan (Islam), sebab—menurut pendapat orang tuanya—bagaimanapun cakap dan terampil seorang pemimpin kalau tidak dilandasi dengan jiwa keagamaan yang kuat kepemimpinannya dapat dipastikan akan sumbang dan tidak pernah sempurna. Orang yang teguh berpegang pada prinsip agama dengan sendirinya nilai-nilai keanusiaan pun akan terpateri kuat di dadanya. Oleh karena itu sejak awal TM Hasan diajarkan mengerjakan sembahyang dan tidak pernah meninggalkan sembahyang lima waktu. Pengaruh pendidikan keagamaan keluarganya sangat kuat sehingga ketika melanjutkan pendidikan ke Belanda sekalipun ia selalu taat beribadat. Pelajaran agama TM Hasan setahap demi setahap meningkat, dari membaca ayat-ayat suci *Al-Quran* hingga ilmu fiqih, tafsir, dan hadist tingkat mula.

Hasan masuk ke sekolah Belanda Volkschool (Sekolah Rakyat) sebagai layaknya seorang anak *uleebalang* pada masa itu yang berhak bersekolah di sekolah Belanda di Lampoih Saka, ibukota Kecamatan Peukan Baro sekarang, pada tahun 1914 ketika umurnya menginjak 8 tahun. Beberapa bulan kemudian ia meninggalkan sekolah itu dan baru pada tahun 1915 orang tuanya mengantarkannya kembali ke sekolah tersebut. Sejak itu ia belajar dengan tekun. Ia cepat menguasai pelajaran, terutama pelajaran berhitung, salah satu pelajaran yang dianggap cukup penting pada masa itu. Selain itu pelajaran huruf Arab bahasa Melayu—dalam bahasa Aceh sering disebut huruf Jawi atau Jawoe—juga bukan mata pelajaran yang sukar baginya, sebab ia sudah belajar sejak masa kanak-kanak pada guru agama, terutama pada neneknya sendiri, Cut Halimah.

Suatu ketika pada saat di Sekolah Rakyat TM Hasan mendapat hukuman gurunya karena datang terlambat. Tangannya dipukul dengan rotan. Gurunya tidak tahu bahwa ia anak seorang *uleebalang*. Setelah mengetahui bahwa murid yang dihukum itu anak *Uleebalang* Pineuguru guru tersebut bergegas menemuinya dan memohon maaf. TM Hasan berkata pada gurunya bahwa hukuman itu sudah wajar baginya karena datang terlambat.

TM Hasan hanya dua tahun bersekolah di Volkschool karena ayahnya memindahkannya ke sekolah Belanda, Europeesche Lagere School (ELS), di Sigli. ELS merupakan sekolah anak raja (*uleebalang*), anak bangsawan, dan anak orang terkemuka. Anak Belanda yang bersekolah di ELS hanya dua orang, yakni anak asisten residen dan anak Kontrolir Sigli. Ada beberapa orang anak Indo, anak orang Manado, serta anak orang Ambon berpangkat tinggi dalam ketentaraan Belanda. Semasa di sekolah ELS Hasan belajar mengaji pada seorang ulama terkemuka zaman itu, Tengku Alibasyah, Wakil Kadhi Landschap Pineung.

Setelah tujuh tahun bersekolah di ELS (1917-1924) Hasan ditawari ikut ujian masuk Koningen Wilhelmnia School (KWS) di Batavia. Ia menerima tawaran tersebut, meskipun seandainya tidak mengikuti ujian di Batavia ia dapat melanjutkan sekolah Meer Uitgebreid Lagere Onderwijs (MULO) di Kutaraja tanpa perlu mengikuti ujian. Pada tahun 1924 Hasan meninggalkan kampung halamannya pergi ke Batavia, tetapi sebelum pergi ia dinikahkan dengan sepupunya, Pocut Hijo, anak pamannya, Teuku Manyak atau dikenal dengan Teuku di Tiba. TM Hasan dan Pocut Hijo menikah di Kuta Tuha, di rumah kediaman pamannya. Penduduk desa meramalkan bahwa barangsiapa menikah di Kuta Tuha kelak akan menjadi orang besar dan ternama. Pada saat mendengar ramalan penduduk desa tersebut TM Hasan hanya mengucapkan "Amin".

Meskipun telah berkeluarga bukan berarti sekolahnya terlantar; bahkan sebaliknya ia semakin tekun belajar. Dari pihak istrinya ia memperoleh dorongan moral untuk terus memperdalam ilmu pengetahuan.

Teuku Muhammad Hasan dan Pocut Hijo setelah menikah

(Sumber: Istimewa)

Teuku Muhammad Hasan ketika menjadi mahasiswa di Belanda bersama pelajar Indonesia lain

(Sumber: Istimewa)

Hal ini tampak setelah ia meneruskan pelajaran ke Batavia (Jakarta) dan kemudian ke Negeri Belanda. Istrinya, Pocut Hijo, rela ditinggal di kampung halaman. Di Batavia TM Hasan mengikuti ujian masuk KWS dengan mengambil jurusan sipil basah, jurusan membuat jembatan, dan semacamnya. Ia lulus dan mengikuti pendidikan di sekolah tersebut. Sekali atau dua kali dalam seminggu ia mengenakan pakaian kerja hijau untuk praktek. TM Hasan tinggal di asrama Internaat Jan Pieterszoon Coen Stichting (JPC) di Jl. Guntur, dekat Pasar Manggis. Sebagai seorang anak *uleebalang* yang terpandang di Aceh ia dengan mudah dapat diterima di asrama tersebut. Di sana tinggal tidak kurang 150 orang pelajar yang umumnya terdiri dari anak-anak para bangsawan dan Indo yang berasal dari seluruh Indonesia. Mereka ada yang sedang belajar di MULO, Algemeene Middelbare School (AMS), Hoogere Burgerschool (HBS), KWS, dan lain-lain. Hal ini sangat menguntungkan TM Hasan, sebab di samping dapat berkenalan dengan teman-teman sebangsa yang berasal dari seluruh Indonesia ia juga dapat menambah pengetahuan dari mereka yang sudah lebih tinggi tingkat pendidikannya.

Selama bersekolah di KWS dan bertempat tinggal di asrama JPC TM Hasan benar-benar menggunakan waktu sebaik mungkin. Ia sangat tekun belajar, sehingga Pasar Manggis yang letaknya sangat dekat dengan asrama hampir tidak pernah dikunjungi kecuali kalau ada keperluan mendesak. Sebagian besar waktu di asrama digunakan untuk membaca buku, baik yang dipinjam dari sekolah maupun yang dibelinya. Waktu senggang pada umumnya digunakan untuk belajar biola dari guru khusus yang didatangkan ke asrama.

Asrama JPC mempunyai peraturan ketat, baik mengenai waktu belajar dan istirahat, kewajiban pembayaran uang iuran asrama, maupun ketentuan-ketentuan lain, misalnya dalam pergaulan sehari-hari di asrama diharuskan menggunakan Bahasa Belanda. Dalam hal ini tentu tidak terlepas dari politik kolonial Belanda, khususnya di bidang kebudayaan. Mereka yang akan keluar asrama ini kelak diharapkan memiliki sikap kebelandaan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Setiap penghuni asrama dikenakan uang iuran sebanyak 50 gulden tiap bulan dan.

TM Hasan senang karena tidak diajarkan bahasa asing lain di sekolah itu selain bahasa Belanda yang juga digunakan sebagai bahasa pengantar. Hal ini berlainan dengan di MULO, HBS, dan AMS, yang selain terdapat Bahasa Belanda sebagai mata pelajaran juga diajarkan bahasa-bahasa Inggris, Jerman, dan Prancis. Meski demikian karena sangat berminat memahami dan dapat berbicara bahasa asing tersebut, terutama Bahasa Inggris, ia mengambil inisiatif sendiri. Caranya, melalui teman-temannya yang belajar di MULO, AMS, ataupun HBS. Dari teman-temannya itulah TM Hasan memperoleh buku-buku pelajaran bahasa Inggris, Jerman, dan Prancis dan yang kemudian dipelajarinya dengan tekun. Teman-temannya

juga berjasa besar bagi TM Hasan dalam pembelajaran ketiga bahasa tersebut, terutama dalam kaitan cara mengucapkan huruf dan kata.

Agar keterampilan berbahasa dikuasai sebaik mungkin diperlukan latihan baik secara lisan maupun secara tertulis. TM Hasan menempuh cara yang patut dipuji, yaitu dengan cara pekerjaan rumah teman-temannya selalu dijadikan bahan latihan dan diselesaikannya dengan tekun. Untuk mengoreksinya ia menggunakan jawaban teman-temannya yang telah diperiksa dan diperbaiki oleh guru mereka di sekolah. Dengan cara demikian secara bertahap TM Hasan berhasil menguasai bahasa-bahasa Inggris, Jerman, dan Prancis kendatipun yang disebut terakhir tidak sebaik bahasa Inggris dan Jerman. Selain itu ia berminat menempuh ujian MULO dan AMS karena ingin masuk perguruan tinggi. Sementara itu lulusan KWS tidak bisa langsung masuk ke perguruan tinggi, tetapi wajib bekerja terlebih dahulu. Oleh sebab ia tidak terdaftar pada MULO dan AMS, satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah melalui ujian *ekstranei*, yang rupanya tiap tahun ajaran baru selalu dibuka untuk memberi kesempatan bagi mereka yang berminat.

Setelah tiga tahun menjadi penghuni asrama JPC TM Hasan meminta izin Kepala Asrama JPC untuk mengikuti ujian ekstra MULO. Kepala asrama pun menyampaikan keinginan TM Hasan kepada Direktur KWS. TM Hasan diberi izin oleh Direktur KWS karena prestasinya di KWS sangat memuaskan. Waktu itu sedang tidak ada ujian MULO di Batavia. Yang ada ada di Bandung, di MULO Douwes Dekker. TM Hasan diizinkan pergi ujian *extranei* MULO Bandung. Pada waktu itu terdapat 13 orang peserta ujian dan TM Hasan satu-satunya peserta dari Batavia. Ia berada di Bandung selama tiga hari untuk ujian sekaligus menunggu pengumuman hasil ujian. Ketika hasil ujian diumumkan hanya peserta dari Batavia saja yang lulus, yaitu TM Hasan. Ia segera memberi khabar Kepala Asrama JPC dan Kepala Asrama JPC pun meneruskan khabar tersebut kepada Direktur KWS. Direktur KWS sangat senang. Ketika TM Hasan tiba di Batavia Direktur KWS membuat pesta makan malam untuk merayakan keberhasilan TM Hasan lulus ujian MULO.

Berkat semangat belajar yang tidak kenal menyerah TM Hasan berhasil mewujudkan cita-citanya. Pada tahun 1927 ia berhasil meraih ijazah MULO melalui ujian *ekstranei* di Bandung, ijazah KWS—tempat ia terdaftar secara resmi sejak kelas satu—diperolehnya pada tahun 1928, dan pada tahun 1929 ia mengikuti ujian *ekstranei* AMS di Batavia dengan hasil memuaskan. Dengan demikian selama lima tahun TM Hasan berhasil memperoleh tiga ijazah sekolah menengah; suatu prestasi yang sangat membanggakan.

Dengan ijazah yang dimilikinya sudah tentu tidak mengalami kesulitan bagi TM Hasan memasuki salah satu sekolah tinggi. Masalahnya ialah bidang studi apa yang harus dipilih sesuai dengan bakat dan cita-citanya. Setelah dipertimbangkan masak-masak, terutama dikaitkan dengan tugas-tugas kepemimpinan di masa depan, akhirnya ia memilih memperdalam ilmu di bidang hukum. Maka pada tahun ajaran 1929/1930 ia mendaftarkan diri pada Rechtshoogeschool 'Sekolah Tinggi Hukum' di Batavia. Seperti ketika belajar di sekolah menengah, ia tidak menemui kesulitan berarti dalam mengikuti kuliah. Dengan mudah ia dapat mengikuti semua mata pelajaran yang diharuskan selesai pada tingkat pertama. Pada tahun 1930 ia lulus tingkat *Candidaat I* 'ijazah tingkat persiapan'. Demikian pula pada kuliah tingkat berikutnya. Tahun 1931 ia lulus *Candidaat II* 'sarjana muda'. Setelah berhasil meraih gelar sarjana muda di Rechthoogeschool ia berhasrat melanjutkan pendidikan ke Negeri Belanda, pada tingkat doktoral (sarjana hukum) di Rijks Universiteit Leiden. Oleh karena itu ia pulang ke kampung halaman untuk musyawarah dengan orang tuanya di samping menjenguk keluarganya yang sudah lama ditinggalkan, meskipun tidak berarti selama tujuh tahun di Batavia ia tidak pernah pulang karena ada masa libur yang merupakan kesempatan untuk pulang kampung.

Berhubung ada rencana ke Negeri Belanda sudah tentu TM Hasan tidak lama tinggal di kampung halamannya. Namun demikian dalam waktu yang singkat itu, sambil mengunjungi sanak keluarganya di sekitar Kenegrian Pineung, ia sempat bertani menanam kacang bersama penduduk di kampung

istrinya, Kuta Tuha. Hal ini sangat mengesankan rakyat Kenegrian Pineung, sebab TM Hasan yang diperkirakan kelak akan menjadi *Uleebalang* Kenegrian Pineung menggantikan ayahnya benar-benar seorang pemimpin yang mengerti dan menghayati keluh-kesah kehidupan petani. Dalam pandangan rakyat, anak seorang *uleebalang* yang sarjana muda hukum mau turun ke sawah menanam kacang bersama rakyat kecil merupakan kejadian luar biasa dan tidak masuk akal.

Sesuai rencana pada bulan September 1931 TM Hasan meninggalkan kampung halamannya dengan diantar oleh sanak keluarga. Ia ke Kutaraja untuk seterusnya naik kapal di Pelabuhan Sabang. Ia menumpang kapal Willem Ryus dari maskapai pelayaran Belanda. Di atas kapal ia berjumpa dengan Teuku Tahir, anak Teuku Chuk Muhammad Thayeb, *Uleebalang* Pereulak, bekas anggota *Volksraad* dan seorang tokoh pergerakan yang disegani dan ditakuti oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Teuku Tahir akan melanjutkan pendidikan ke Fakultas Teknik Delft, Negeri Belanda.

Tak beberapa lama berselang setelah tiba di Negeri Belanda TM Hasan mendaftarkan diri sebagai mahasiswa bidang Indische Recht Fakultas Hukum Rijks Universiteit Leiden. Adapun mata kuliah yang wajib diikuti sehubungan dengan bidangnya itu meliputi Hukum Adat, Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hukum Acara Perdata, Sejarah Islam, Bahasa Jawa, Bahasa Melayu, Bahasa Arab, Tafsir Al-Quran, dan Tafsir Surat kabar. Semua mata kuliah tersebut diperlukan untuk menempuh ujian sarjana guna memperoleh gelar Meester in de Rechten (Mr.). Selain itu ia masih mengikuti beberapa mata kuliah yang sebenarnya hanya sekadar menambah atau memperluas pengetahuan saja, yaitu Hukum Antar Bangsa, Filsafat, Ilmu Kepolisian, dan Parapsikologi. Mata kuliah-mata kuliah tersebut diperlukan apabila tiba saatnya ia terjun ke masyarakat. Salah satu guru di universitas tersebut Prof. Dr. Snouck Hurgronje (mata kuliah Tafsir Al-Quran). Seperti dimaklumi guru besar tersebut dikenal luas di Indonesia, setidak-tidaknya di kalangan para ilmuwan. Ia menjadi arsitek penaklukan Aceh dan pernah bergaul dengan ayah TM Hasan, TBP Ibrahim, pada waktu bertugas di Pidie tahun 1898.[1]

TERJUN KE DUNIA PERGERAKAN

Selain tekun belajar TM Hasan juga aktif dalam kegiatan organisasi, di antaranya Perhimpunan Indonesia (PI), suatu organisasi pergerakan mahasiswa Indonesia yang dengan gigih memperjuangkan Indonesia Merdeka. Selain itu ia juga menjadi anggota perkumpulan Gadjah Mada, suatu organisasi yang secara teratur mengadakan pembahasan dan diskusi dalam berbagai masalah keilmuan, terutama di bidang Hukum Indonesia. Karena selalu aktif mengikuti diskusi dan sering mengajukan makalah untuk dibahas, ia diberi piagam penghargaan oleh organisasi tersebut. Piagam itu bertanggal 9 Desember 1933 dan ditandatangani oleh ketuanya, Mr. Klein. Kendatipun anti komunis secara konsekuen TM Hasan menjadi anggota organisasi komunis Vrienden voor Soviet Unie (VVSU) agar lebih memahami komunisme beserta sepak terjangnya. Ia menggunakan nama samaran Abdul Gaffar untuk menghindari pengawasan dari Pemerintah Belanda terhadap mahasiswa Indonesia yang melakukan kegiatan politik, apalagi dalam kegiatan komunisme. Dalam organisasi tersebut ia dapat melihat sendiri bagaimana komunisme melancarkan agitasi yang pada umumnya cukup menjijikkan terhadap lawannya.

Selain dapat menimba sejumlah pengalaman dan ilmu pengetahuan di Negeri Belanda, TM Hasan juga dapat berkenalan dengan sejumlah pemuda dan mahasiswa Indonesia, terutama dengan mereka yang gigih memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, antara lain Achmad Soebardjo, Ichsan, Maria Oelfah, Siti Sundari, Mas Soelaiman, Prijono, Darsono, Oetojo Ramelan, Tjokrohadisoemarto, Aboetari, dan R. Soekanto (dari Pulau Jawa); Rustam Effendi yang menjadi anggota Parlemen Belanda, Nasrun, dan Mohammad Hatta (dari Sumatera Barat); Sutan Gunung Mulia dan Luat Siregar (dari Tapanuli); Tengku Djalaluddin dan Ildrem (dari Sumatera Timur); Tajuddin Noor (dari Kalimantan); dan masih banyak

1 *Ibid*., 34-35.

lagi, bahkan juga dengan Soumokil yang kemudian menjadi tokoh sparatisme pendiri Republik Maluku Selatan (RMS) yang ingin melepaskan diri dari Negara Republik Indonesia.[2]

Rupanya apa yang dilakukan TM Hasan tidak terlepas dari pengawasan pihak Belanda. Oleh karena itu sewaktu tiba kembali di Pelabuhan Ulee Lheu Kutaraja, semua bukunya disita untuk pemeriksaan karena dicurigai terdapat buku yang berkait dengan paham pergerakan dan membahayakan kedudukan Pemerintah Kolonial Belanda, khususnya Aceh. Buku-buku tersebut kemudian dikembalikan setelah melalui proses pemeriksaan yang lama.[3]

TM Hasan mendirikan Perguruan Taman Siswa di Kutaraja pada tanggal 11 Juli 1937. Dalam kepengurusan lembaga yang diprakarsai oleh Ki Hajar Dewantara itu ia menjadi ketua, sementara Teuku Nyak Arief menjadi sekretaris. Sesaat setelah pembentukannya, Hasan mengirim utusan, Teuku M. Usman el Muhammady, menemui Ki Hajar Dewantara di Yogyakarta untuk memohon agar Taman Siswa memperluas jaringan dengan mendirikan cabang di Aceh. Majelis Luhur Taman Siswa mengirim tiga orang guru ke Aceh, yaitu Ki Soewondo Kartoprojo beserta istrinya yang juga sebagai guru Taman Siswa dan Soetikno Padmosoemarto. Dalam waktu relatif singkat, TM Hasan dan pengurus Taman Siswa di Kutaraja berhasil membuka empat sekolah Taman Siswa di Kutaraja, yaitu Taman Anak, Taman Muda, Taman Antara, dan Taman Dewasa. Pada saatnya, berkat pengalaman di bidang pendidikan, TM Hasan memutuskan pergi ke Batavia dan bekerja sebagai pegawai di Afdeling B, Departemen Van Onderwijsen Eiredeienst (Departemen Pendidikan).[4]

Pada tahun 1938 Mr. TM Hasan dipindahkan ke Medan sebagai *Adjunct Refrendarist* pada kantor *Gouverneur van Soematra* 'Kantor Gubernur Sumatera' bagian *Algemmene Zaken en Wetgeving*. Di tempat kedudukannya yang baru ia tetap giat berusaha sejauh kemampuan dan kesempatan yang diumungkinkan untuk kemerdekaan bangsanya. Dalam hubungan kerja di kantor gubernur ia sering berhadapan dengan Dr. Beck, residen yang diperbantukan pada Kantor Gubernur Sumatera. Pada suatu perjumpaan Beck mengkritik secara tajam kaum nasionalis yang secara gigih memperjuangkan nasib bangsanya di *Volksraad*. Menurut Beck, apa yang mereka tuntut, yaitu kemerdekaan, belum masanya diberikan sebab rakyat Indonesia sebagian besar masih dalam kebodohan, sedang kaum terpelajar masih terbatas sekali. Kalaupun diberikan mereka tidak akan mampu mengendalikan pemerintahan di alam kemerdekaan. TM Hasan menjawab melalui suatu pernyataan: "Apakah tidak lebih baik apabila Pemerintah Belanda merencanakan dan sekaligus menjanjikan untuk memberikan kemerdekaan pada bangsa Indonesia dalam batas waktu tertentu, umpamanya dalam waktu sepuluh tahun mendatang, dan selama masa tenggang itu bangsa Indonesia secara intensif disiapkan untuk tenaga-tenaga ahli, khususnya di bidang pemerintahan, seperti *kontrolir* (wedana), asisten-residen, residen, gubernur, dan sebagainya. Dengan cara begini pertentangan dan kesenjangan yang terjadi selama ini antara Pemerintah Belanda di satu pihak dan para pemimpin Indonesia di pihak lain dapat dihindari." Beberapa hari kemudian TM Hasan dipanggil oleh Sekertaris Gubernur Sumatera Mr. Nolting. Ia diperintahkan untuk tidak mencampuri dan melakukan kegiatan politik. Peringatan itu diberikan Nolting atas nama Gubernur Sumatera.[5]

Dalam pada itu kecurigaan penguasa Kolonial Belanda terhadap TM Hasan tidak pernah hilang bahkan sampai menjelang akhir penjajahannya di Indonesia. Beberapa hari sebelum tentara Jepang mendarat di Aceh, pada bulan Maret 1942, meletus pemberontakan dan perebutan kekuasaan yang dilancarkan oleh

2 *Ibid*., hlm. 36.

3 *Ibid*., hlm. 40.

4 Dzikry Subhani,"*Jejak Kepahlawanan Teuku Muhammad Hasan, Gurbernur Pertama Sumatera*", diakses dari https://daerah.sindonews.com/read/1181235/29/jejak-kepahlawanan-teuku-muhammad-hasan-gubernur-pertama-sumatera-1487433250, pada tanggal 16 November 2018, pukul 19.38 WIB.

5 *Ibid*., hlm. 45-46.

rakyat di Sigli dan sekitarnya. Pemberontakan itu, menurut dugaan Belanda, didalangi oleh TM Hasan. Oleh karena itu Pemerintah Kolonial Belanda segera mengerahkan tentara untuk mencari TM Hasan di sekitar Sigli dan kalau tidak ditemukan akan diadakan penyelidikan lebih lanjut. Namun sebelum pencarian dan penyelidikan selesai dilaksanakan, tentara Jepang telah lebih dahulu menduduki Indonesia. Belanda pun terpaksa harus menyerahkan kekuasaannya pada penguasa baru yang datang dari negara matahari terbit.[6]

Selama masa pendudukan Jepang (1942-1945) berbagai kegiatan politik dibekukan oleh pihak militer Jepang. Kalaupun ada beberapa pemimpin Indonesia yang bergerak harus melakukannya secara diam-diam, yang secara luas dikenal dengan istilah "kegiatan di bawah tanah". Umumnya para pemimpin Indonesia pada saat itu bekerja sama dengan pihak Jepang. Demikian juga halnya dengan TM Hasan. Hal ini tidak berarti perjuangan mereka terhenti dan pudar. Taktik kerja sama yang dipraktekkan atas dasar perhitungan situasi dan kondisi masa itu adalah semata-mata sebagai jalan keluar yang mungkin ditempuh untuk menuju ke gerbang kemerdekaan.[7]

Pada masa penjajahan Jepang TM Hasan tetap berada di Medan dan bekerja di sejumlah tempat. Ketika Jepang hendak angkat kaki dari Aceh pada tahun 1945 ia menjadi salah satu tokoh Aceh yang bersedia bergabung dengan para nasionalis di Jakarta. Sementara itu dalam usaha menjalin hubungan secara lebih akrab dengan rakyat—tentu saja bagi kemenangan perang Asia Timur Raya—pemerintah militer Jepang mengadakan dua lembaga baru dalam badan pemerintah, yaitu Kantor *Tinzukyoku* (Kantor permohonan rakyat kepada *Gunseibu*) dan Kantor *Koseikyoku* (Kantor Kemakmuran Rakyat). TM Hasan ditunjuk sebagai kepala kedua kantor tersebut dengan tugas mempelajari semua surat permohonan rakyat yang dialamatkan kepada *gunseibu* dan kemudian memberi pertimbangan atau saran sehubungan dengan permohonan tersebut. Dengan penempatannya sebagai kepala kedua kantor tersebut sekali lagi ia mendapat kesempatan secara lebih leluasa untuk mengabdi kepada rakyat yang sedang dalam keadaan sangat menderita.

MASA KEMERDEKAAN

Pada tanggal 7 Agustus 1945 Mr. Teuku Muhammad Hasan bersama dengan Dr. M. Amir dan Mr. A. Abbas diangkat menjadi anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indoensia (PPKI) mewakili Sumatera.[8] Bersamaan dengan pemberitahuan tentang pengangkatannya tersebut ia dan kedua temannya diundang untuk menghadiri sidang PPKI yang direncanakan akan diadakan pada tanggal 16 Agustus 1945. Untuk memenuhi undangan tersebut tepat pada hari penyerahan Jepang kepada Sekutu, yakni tanggal 14 Agustus 1945, ia berangkat ke Jakarta dengan lebih dahulu singgah di Singapura karena direncanakan bergabung dengan Bung Karno dan Bung Hatta yang sedang dalam perjalanan pulang dari Saigon. Setiba di Jakarta keadaan sama sekali berubah. Sidang PPKI yang semula diadakan pada tanggal 16 Agustus 1945 di bawah pengawasan pemerintah militer Jepang batal. Jepang tentu tidak mungkin lagi mencampuri urusan yang berkenaan dengan kemerdekaan Bangsa Indonesia.[9]

Pada tanggal 30 September 1945 para pemuda yang digerakkan oleh Achmad Tahir, Sugondho Kartoprodjo, dan beberapa yang lain mengadakan rapat besar di Gedung Pertemuan Taman Siswa, Jalan Amplas, Medan. Pada rapat itu TM Hasan hadir dan memberi kata sambutan. Dalam rapat inilah TM Hasan secara terbuka mengumumkan Proklamasi 17 Agustus 1945 kepada khalayak ramai. Dengan semangat bergelora dan penuh keberanian ia mengemukakan bahwa "Indonesia Merdeka telah menjadi kenyataan Proklamasi yang didengungkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta ke seluruh dunia". Sampai

6 *Ibid*., hlm. 47

7 *Ibid*., hlm. 50.

8 Dzikry Subhani., *Op.Cit*.

9 *Ibid*., 52-53.

akhir kalimat ini tepuk tangan pun menggema di seluruh ruangan yang padat dengan manusia dan TM Hasan lega serta bangga atas keberhasilan tugas yang diembannya.[10]

Setelah kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 22 Agustus 1945, TM Hasan diangkat menjadi Gubernur Sumatera dengan ibukota provinsi di Medan. Ia lalu mengangkat residen dan walikota di seluruh Sumatera. Ia pun menginstruksikan seluruh residen dan walikota bahwa terhitung tanggal 4 Oktuber 1945 di setiap kantor, rumah penduduk, dan tempat keramaian harus dikibarkan bendera Merah Putih. Dalam rapat umum di Lapangan Fukuraido (sekarang Lapangan Merdeka) pada tanggal 4 Oktober 1945 Gubernur Teuku Muhammad Hasan mengumumkan kembali Proklamasi Kemerdekaan RI yang dibacakan Soekarno pada 17 Agustus 1945 di Jakarta. Kepada rakyat yang membanjiri Lapangan Merdeka ia meminta agar rela berkorban mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan RI.[11]

Teuku Muhammad Hasan menjabat Gubernur Sumatera hingga 1948. Setelah itu, pada tahun 1948, Sumatera dibagi menjadi tiga provinsi, yakni Sumatera Utara dipimpin Sultan M Amin Nasution, Sumatera Tengah dipimpin Muhammad Nasroen, dan Sumatera Selatan dipimpin Mohammad Isa. Selain menjadi Gubernur Sumatera Utara TM Hasan juga pernah menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Wakil Ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, dan Menteri Agama._Di samping itu ia aktif dalam berbagai kegiatan sosial, seperti Ketua Umum Yayasan Rahmat Ilahi, Ketua Badan Penasihat Taman Iskandar Muda, Ketua Dewan Kantor Universitas Islam Jakarta yang dijabat sejak tahun 1950, dan masih banyak lagi. Semua itu semata-mata didorong oleh rasa tanggung jawabnya kepada nusa dan bangsa tercinta. Atas jasa-jasa yang telah disumbangkannya itu rakyat dan Pemerintah Republik Indoensia memberi berbagai tanda penghargaan. Tanda kehormatan Satyalanjana Peringatan Perdjuangan Kemerdekaan dan tanda jasa Bintang Gerilya dianugerahkan oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia masing-masing tertanggal 20 Mei 1961 dan 5 Oktober 1961. Sementara Dewan Harian Nasional Badan Penggerak Pembina Potensi Angkatan-45 dan Pimpinan Pusat Taman Iskandar Muda menganugerahkan Piagam Penghargaan masing-masing tanggal 19 April 1982 (penyerahan secara resmi, piagam penghargaan bertanggal 1 April 1982) dan 12 Mei 1982. Sementara itu Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan surat tertanggal 14 April 1982, No. x811.611/2/SJ atas nama Presiden Republik Indonesia menganugerahkan Bintang Mahaputra, suatu bintang kehormatan tinggi yang memang patut dan berhak diterimanya.

TM Hasan meninggal pada 21 September 1997.[12]

10*Ibid*., hlm. 59.

11 Dzikry Subhani, Op.Cit.

12*Ibid.*

Ki Sarmidi Mangunsarkoro

Masa Jabatan
4 Agustus 1949 - 20 Desember 1949

Ki Sarmidi Mangunsarkoro

PENDIDIKAN

Ki Sarmidi Mangunsarkoro lahir pada tanggal 23 Mei 1904 di Desa Banyuanyar, Colomadu, Surakarta, Jawa Tengah. Nama aslinya Sarmidi, sedangkan Mangunsarkoro merupakan nama ayahnya. Sarmidi berasal dari keluarga priyayi rendah. Ayahnya seorang *abdi dalem* Keraton Surakarta dengan gelar "rangga", sehingga namanya menjadi Rangga Mangunsarkoro. Gelar tersebut diperoleh Mangunsarkoro sebagai pejabat yang memimpin suatu daerah setingkat desa untuk mengelola tanah dan hasil buminya kemudian disetorkan ke keraton. Nama Mangunsarkoro terdiri dari dua kata, yaitu *mangun* yang berarti 'mengelola' dan *sarkoro* yang berarti 'gula'. Dengan demikian jelas bahwa Desa Banyuanyar di Colomadu merupakan salah satu wilayah penghasil gula. Tugas dan nama demikian diberikan langsung dari Keraton Surakarta. Sebagai orang yang dilahirkan dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga pegawai keraton Surakarta, Sarmidi mengetahui suasana tradisi dan lingkungan feodal yang dicerminkan oleh perbedaan besar dalam kemakmuran antara kaum bangsawan dan orang kebanyakan dari kalangan rakyat.

Dengan jabatan yang dimiliki ayahnya, Sarmidi memiliki nasib yang lebih baik daripada anak-anak lain di desanya. Pada umur 10 tahun ia masuk ke Sekolah Angka Loro di Sawahan, Surakarta. Setelah tamat Sekolah Angka Loro 2 pada tahun 1923 ia melanjutkan pendidikan di Sekolah Teknik Prinses Juliana School Yogyakarta. Meski mengenyam pendidikan di sekolah teknik, namun ia cenderung mempelajari ilmu di luar bidang teknik tersebut, seperti pendidikan dan psikologi. Hal ini terlihat dari bergabungnya Sarmidi ke dalam Islam Studie Club di sekolah tersebut. Setelah lulus dari Sekolah Teknik Prinses Juliana School, ia merantau ke Batavia dan melanjutkan pendidikan di Sekolah Guru Arjuna. Kepindahannya ke Batavia membuat dirinya dekat dengan kegiatan pergerakan. Sebelumnya ia telah bergabung dengan Jong Java pada tahun 1922 dan memimpin majalah terbitan Jong Java, *Soeara Afdeling Djogja*; bahkan pada tahun 1926 ia terpilih menjadi Ketua Jong Java.

TAMAN SISWA

Setelah menamatkan pendidikannya di Sekolah Guru Arjuna pada tahun 1926 Sarmidi kembali ke Yogyakarta dan menjadi guru di Taman Muda Perguruan Taman Siswa. Gelar "Ki" didapatkannya ketika ia mengajar di sana. Sarmidi menghabiskan waktunya menjadi guru di Taman Siswa selama tiga tahun sebelum akhirnya pindah ke Jakarta pada tahun 1929. Di Jakarta, Sarmidi diangkat sebagai kepala sekolah HIS Budi Utomo dan kemudian juga menjadi kepala sekolah HIS Marsudi Rukun. Pada tahun 929 tersebut Sarmidi bersama teman-temannya menggabungkan HIS Budi Utomo dan Marsudi Rukun yang menjadi cikal bakal berdirinya sekolah Taman Siswa Jakarta. Satu tahun kemudian ia bersama Angron Sudirjo dan Basirum mendirikan Perguruan Taman Siswa pertama di Jakarta atas permintaan penduduk Kemayoran dan direstui oleh Ki Hadjar Dewantara. Adapun modal pertama sebesar Rp 500,00. Sejak Perguruan Taman Siswa Jakarta berdiri ia mengabdikan diri dalam perguruan ini, baik sebagai guru maupun pengurus Majelis Luhur Taman Siswa.

Pada upacara Penutupan Kongres atau Rapat Besar Umum Taman Siswa pertama di Yogyakarta pada 13 Agustus 1930, Ki Sarmidi bersama Ki Sadikin, Ki S. Djojoprajitno, Ki Poeger, Ki Kadiroen, dan Ki Safioedin Soerjopoetro atas nama Persatuan Taman Siswa seluruh Indonesia menandatangani Keterangan Penerimaan Penyerahan "Piagam Persatuan Perjanjian Pendirian" dari tangan Ki Hadjar Dewantara, Ki Tjokrodirjo, dan Ki Pronowidigdo untuk mewujudkan usaha pendidikan yang beralaskan hidup dan penghidupan bangsa dengan nama Taman Siswa yang didirikan pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Sebagai salah satu orang yang terpilih oleh Ki Hadjar Dewantara untuk memajukan, menggalakkan,

serta memodernisasikan Taman Siswa berdasar rasa cinta tanah air serta berjiwa nasional, Ki Sarmidi Mangunsarkoro mempunyai beberapa pemikiran demi terlaksananya cita-cita pendidikan Taman Siswa. Melaui pendidikan ia bercita-cita membentuk kebudayaan baru Indonesia. Hal ini berarti Taman Siswa Jakarta dengan sadar menerima dan mengikuti perkembangan dan pergantian Bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan nasional.

Pada tahun 1931 Sarmidi ditugasi menyusun Rencana Pelajaran Baru dan pada tahun 1932 disahkan sebagai "Daftar Pelajaran Mangunsarkoro". Atas dasar tugas tersebut pada tahun 1932 ia menulis buku *Pengantar Guru Nasional*. Buku tersebut mengalami cetak ulang pada tahun 1935. Dalam "Daftar Pelajaran Mangunsarkoro" yang mencerminkan cita-cita Taman Siswa dan *Pengantar Guru Nasional* itu di dalam arus pergerakan nasional di Indonesia khususnya dan Asia pada umumnya dapat disimpulkan pemikiran Sarmidi mewakili aspek kebangunan nasionalisme, yaitu "aspek kebudayaan", "aspek sosial ekonomis", dan "aspek politik". Aspek kebudayaan pada hakikatnya merupakan usaha menguji hukum-hukum kesusilaan dan mengajarkan berbagai pembaharuan sesuai dengan alam dan zaman, aspek sosial ekonomis adalah usaha meningkatkan derajat rakyat dengan menumbangkan cengkeraman ekonomi bangsa-bangsa Eropa Barat, sedangkan aspek politik adalah usaha merebut kekuasaan politik dari tangan Pemerintah Kolonialisme Belanda.

Pada awalnya Taman Siswa Jakarta menempati sebuah gedung di Jalan Garuda No. 34 Jakarta. Di bawah pimpinan Sarmidi Taman Siswa Jakarta tumbuh dan berkembang baik secara horizontal maupun secara vertikal. Taman Siswa Jakarta terdiri atas Taman Kanak-Kanak (Taman Indria) dan Taman Muda, kemudian pada tahun 1931 dibuka pula Taman Dewasa (Sekolah Menengah Pertama) dan pada tahun 1933 dibuka Taman Dewasa, yang kemudian berkembang menjadi Taman Dewasa Raya (Sekolah Menengah Lima Tahun), setingkat Hoogere Burgerschool (HBS), dengan semboyan "Menuju Masyarakat dan Sekolah Tinggi Nasional" sekaligus sebagai persiapan Perguruan Tinggi Kebangsaan. Taman Dewasa Raya mempunyai program "*Literrir Ekonomis*", yang timbul karena ada anggapan bahwa tanpa pengetahuan ekonomi bangsa Indonesia tidak akan bertahan dalam perputaran dunia. Tujuan *Literrir Ekonomis* adalah mendidik pekerja-pekerja dalam bergaul agar selalu berjiwa cinta pada tanah air dan bangsa.

Taman Siswa Jakarta yang pada awalnya kecil akhirnya kebanjiran murid, baik di Taman Kanak-Kanak, Taman Muda, Taman Dewasa, maupun di Taman Dewasa Raya sebagai persiapan perguruan tinggi kebangsaan. Sarmidi memang sangat pandai mendekati rakyat. Meskipun demikian usaha Sarmidi tidak mudah. Ada saja hambatan yang menghampirinya. Sebagai contoh, pada tahun 1934 terjadi "pemberontakan" di lingkungan Taman Siswa Jakarta. Sarmidi mengambil langkah untuk menyelamatkan Taman Siswa terhadap tindakan Armijn Pane dan kawan-kawan, yang oleh Majelis Luhur Taman Siswa dianggap *oentoelaatbaar* 'dilarang keras'. Duapuluh dua orang guru menyatakan tidak setuju terhadap kebijaksanaan Sarmidi yang mereka sebut diktator. Akibatnya Sarmidi sempat mengundurkan diri, tetapi Majelis Luhur campur tangan dan berpihak pada Sarmidi. Sarmidi dilantik kembali, tetapi dari 22 orang guru yang memberontak 17 orang menyatakan keluar dari Taman Siswa, di antaranya Mr. Sumanang, Armijn Pane, Yusupadi, dan Nona Burdah. Beberapa Perguruan Taman Siswa melepaskan diri, sedangkan Taman Siswa Cabang Jakarta—yaitu Kemayoran dan Jatinegara—tetap berada di bawah kepemimpinan Sarmidi.

Sarmidi mempunyai pendirian kuat, tidak mudah terpengaruh oleh siapa pun, ulet, dan mempunyai keyakinan kuat. Walapun zaman berubah, Sarmidi Mangunsarkoro tetap seperti gunung yang tegar menghadapi segala cuaca. Sifat-sifat ini, misalnya, tampak saat berselisih pendapat dengan Muhammad Said. Para guru muda yang berdarah panas dan penuh emosional mengecam Sarmidi sebagai orang yang kurang rasa sosial dalam segala tindakan. Perselisihan ini berakhir dengan mundurnya Sarmidi sebagai Ketua Cabang Taman Siswa, yang kemudian digantikan oleh Sukanto.

Atas

Sejak tahun 1926 setelah menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Guru Arjuna, Ki Sarmidi Mangunsarkoro kembali ke Yogyakarta dan menjadi Pamong di sekolah Taman Muda. Ki Sarmidi Mangungsarkoro bersama para pamong yang lain mendampingi siswa Taman Anak (Taman Muda) melakukan permainan anak "Koko"

(Sumber: Biro Umum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)

Tengah

Ki Sarmidi Mangunsarkoro dalam rapat orang tua/wali siswa Taman Siswa cabang Jakarta Jl. Garuda no. 25 Jakarta.

(Sumber: Biro Umum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)

Bawah

Ki Mangunsarkoro, duduk di depan ketiga dari kiri, bersama rekan-rekannya di Taman Siswa

(Sumber: Museum Sumpah Pemuda)

Ki Sarmidi Mangunsakoro dan Sri Wulandari pada saat sesudah pernikahan di Taman Siswa

(Sumber: Istimewa)

Sarmidi menulis buku yang berisi bagaimana pentingnya pendidikan bagi bangsa dan anak-anak Indonesia. Buku itu, di antaranya, mengatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan nasional bertujuan agar anak-anak kelak menjadi manusia yang berjiwa nasionalis, dalam arti pembawa cita-cita nasional. Dengan demikian hal itu berarti mengganti masyarakat lama dan telah rusak menjadi masyarakat baru, masyarakat nasional yang dapat menjamin kebahagiaan untuk rakyat sebanyak-banyaknya.

Pada waktu itu pergerakan nasional semakin berkembang meskipun mengalami hambatan dari pemerintahan kolonial serta perpecahan di dalam organisasi mereka sendiri. Sesuai dengan keadaan tersebut, semakin dalamlah kesadaran Sarmidi bahwa mengetahui warisan kebudayaan bangsa sendiri merupakan suatu keharusan bagi keberhasilan pergerakan nasional. Tentang peran dan kedudukan budaya sendiri di dalam pergerakan nasional terdapat dua pendapat. Pendapat pertama berasal dari kaum politik nasional: bahwa hal-hal kenegaraan yang lebih luas harus ada lebih dulu, karena kehidupan kebudayaan baru terjamin jika pergerakan politik sudah cukup kuat dan berpengaruh. Adapun pendapat kedua berasal dari kaum budaya nasionalis: bahwa lebih dahulu meningkatkan kebudayaan sendiri, yang berarti mempermudah kebebasan politik, sehingga rakyat lebih maju dan dapat menanggung resiko yang dibebankan dalam alam merdeka. Dalam hal ini Taman Siswa menitikberatkan usaha sesuai dengan pendapat yang kedua, meskipun tidak dapat disangkal bahwa sewaktu-waktu Taman Siswa dapat memberikan dorongan berpolitik yang nyata seperti ketika menolak politik pengajaran gubernur dan ketika menghadapi Onderwijs Ordonantie Sekolah Partikelir (Undang-Undang Sekolah Liar).

Pada tahun 1937 Ki Sarmidi Mangunsarkoro menulis "*Het Nationalisme in de Taman SiswaBeweging* (Nasionalisme Dalam Pergerakan Taman Siswa) yang dimuat dalam *Nationale Studien* No. 2 Tahun 1937. Berdasarkan pengertiannya tentang kebudayaan, Ki Sarmidi Mangunsarkoro mengadakan penelitian tentang nasionalisme di dalam Taman Siswa yang dikaitkan dengan usaha mewujudkan pendidikan nasional. Usaha tersebut ingin dicapai melalui "rencana pelajaran" berdasarkan unsur-unsur kebudayaan sendiri dengan prioritas bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Selanjutnya ia menunjukkan segi-segi religi dalam nasionalisme Taman Siswa dan bahwa nasionalisme itu bertujuan untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi bagi manusia, yakni kemanusiaan. Dalam tulisan itu ia menjawab pertanyaan apakah nasionalisme dalam Taman Siswa juga bersifat politik. Ia mengungkapkan pendapat Ki Hadjar Dewantara pada tahun 1933, yang menggambarkan hubungan Taman Siswa dengan pergerakan politik ibarat ladang atau sawah—tempat yang ditanam dan yang dibutuhkan untuk mempertahankan kehidupan—dengan pergerakan politik nasional sebagai pagarnya. Guru Taman Siswa boleh menjadi anggota partai politik, tetapi dilarang keras membawa politik ke ruang sekolah. Setiap guru Taman Siswa harus berjanji memperhatikan dan menaruh kepentingan sekolah di atas segala-galanya dan—sesuai dengan azas perguruan—guru harus menganggap pekerjaan mendidik merupakan tugas hidupnya.

Ki Sarmidi Mangunsarkoro juga menjelaskan bagaimana Taman Siswa melihat hubungan nasionalisme dalam lingkungan internasional. Dalam hal ini ia mengemukakan "asas konsentrisitas" atau "teori trikon". Melalui teori trikon ia mengemukakan asas-asas utama pendidikan dalam satu tritunggal, yaitu konfergensi dari bakat dan pendidikan, kontinuitas dalam perkembangan, serta konsentrisitas dalam pendirian tentang masyarakat. Ia menjelaskan bahwa konsentrisitas bersangkut paut dengan masing-masing pribadi memiliki beberapa posisi dalam lingkungan masyarakatnya, yang digambarkannya sebagai lingkaran konsentris. Lingkaran pertama adalah keluarga, lingkaran kedua suku atau keturunan, lingkaran ketiga negara, dan lingkaran keempat seluruh umat manusia. Jumlah lingkaran dapat saja ditambah, tetapi pendirian tidak akan berubah. Setiap orang mempunyai kewajiban dan hak terhadap semua lingkungan kemasyarakatan itu dengan cara sedemikian rupa; bahwa sekarang lingkungan yang satu dan kemudian yang lain lebih banyak menonjol, tergantung pada perkembangan harmonis secara keseluruhannya. Dengan demikian nasionalisme Taman Siswa pada dasarnya tidak pernah bermusuhan

terhadap nasionalisme yang lain atau terhadap asas internasional, tetapi dengan syarat bahwa semua nasionalisme harus saling menghormati. Dengan demikian Taman Siswa berusaha mengabdi pada bangsa sendiri dan juga dunia. Dengan meninjau sistem *among*, Ki Sarmidi Mangunsarkoro mengambil dua asas Taman Siswa sebagai pangkal tinjau, yaitu asas kedua dan asas keempat. Asas kedua Taman Siswa berbunyi: "Dalam sistem ini maka pengajaran berarti mendidik anak menjadi manusia yang merdeka batinnya, merdeka pikirannya, dan merdeka tangannya". Jadi dalam sistem ini pendidikan ke arah kepribadian merupakan tugas utama. Akan tetapi kepribadian masyarakat seperti yang dikehendaki oleh asas keempat, yakni mengakui pribadi-pribadi kuat sebagai pendorong perkembangan negara. "Kekuatan negeri itu jumlahnya kekuatan orang-orangnya", demikianlah asas keempat.

Pada masa pendudukan Jepang, Sarmidi bekerja sebagai Kepala Bagian Penerangan Djawa Hokokai. Pada kurun waktu 1943–1945 ia bertugas sebagai Kepala Bagian Kebudayaan dan Pendidikan Kantor Pusat Djawa Hokokai dan sebagai pemimpin redaksi majalah *Djawa Hokokai*, yaitu Majalah Indonesia Merdeka. Pada zaman pendudukan Jepang, Taman Siswa mengalami hambatan karena Pemerintah Pendudukan Jepang mengeluarkan peraturan tentang "Sekolah Partikelir". Peraturan ini berisi bahwa sekolah-sekolah yang dikelola partikelir hanya diperbolehkan membuka sekolah kejuruan dan tidak boleh mengelola sekolah guru. Dengan adanya peraturan "Sekolah Partikelir" maka pada tanggal 18 Maret 1944 Taman Dewasa diubah menjadi Taman Tani, sedangkan Taman Madya dan Taman Guru dibubarkan. Murid-murid yang pindah ke sekolah pemerintah akan diterima. Demikian juga guru-gurunya yang berkeinginan menjadi pegawai negeri akan diterima dan masa kerjanya akan dihargai. Dengan pembubaran Taman Madya dan Taman Guru berarti jumlah sekolah yang dikelola oleh Taman Siswa menjadi berkurang. Demikian juga dengan pengubahan Taman Dewasa menjadi Taman Tani mengurangi jumlah siswa karena Pemerintah Pendudukan Jepang mengadakan pembatasan jumlah siswa. Pemerintah Jepang takut pada perkembangan sekolah-sekolah yang dikelola Taman Siswa yang berdasarkan kebangsaan. Berhubung Ki Hadjar Dewantara diangkat oleh pemerintah Jepang menjadi Naimubu Bunkyokyuku Sanjo, Majelis Luhur menyelenggarakan Rapat Besar ke VIII pada tanggal 24–26 Desember 1944 di Yogyakarta. Rapat Besar ini membicarakan masalah tugas-tugas Majelis Luhur setelah Ki Hadjar Dewantara diangkat sebagai Naimubu Bunkyokyuku Sanjo sehingga jabatan sebagai Pemimpin Umum dilepas, meskipun sebagai bapak keluarga Taman Siswa tetap berlaku. Dengan demikian susunan Majelis Luhur juga berubah. Dalam susunan Majelis Luhur yang baru Ki Sarmidi Mangunsarkoro duduk sebagai Majelis Pertimbangan Pemeliharaan Organisasi.

Pada bulan Agustus 1946, Taman Siswa mengadakan Rapat Besar yang ke IX di Yogyakarta, membicarakan beberapa masalah yang berkait dengan suasana baru dalam alam kemerdekaan. Rapat Besar ini bertujuan membentuk panitia yang bertugas merumuskan kembali "Keterangan Asas" yang ditulis dan diresmikan dalam protokol pendirian Taman Siswa 1922. Panitia dipimpin oleh Ki Sarmidi Mangunsarkoro, yang lebih dikenal dengan sebutan Panitia Mangunsarkoro. Hasil kesimpulan Panitia Mangunsarkoro sebagai berikut:

1. Adanya rumusan baru yang merupakan Keterangan Dasar-dasar Taman Siswa tahun 1947, yang isinya diambil dari Keterangan Asas 1922.
2. Sebagian Asas 1922 tidak digunakan lagi karena perjuangan sudah berbeda dengan saat Taman Siswa berdiri pada tahun 1922.
3. Dasar-dasar Taman Siswa 1947 yang disahkan oleh Rapat Besar Umum tahun 1947 mengandung pengertian dasar yang dikenal dengan *Panca Dharma*, yaitu kodrat alam, kemerdekaan, kebudayaan, kemanusiaan, dan kemanusiaan.
4. Bahwa Taman Siswa adalah lanjutan cita-cita Suwardi Suryaningrat dan kawan-kawan yang tergabung dalam kelompok Selasa Kliwon. Suwardi Suryaningrat adalah ahli pendidik dan tenaga kreatif revolusioner yang dapat menghimpun cita-cita, kemasyarakatan, dan pendidikan gerombolan Selasa Kliwon.

Suasana pada saat Kongres Pemuda Indonesia II yang dilaksanakan di Jakarta 28 Oktober 1928

(Sumber: Istimewa)

KEHIDUPAN BERKELUARGA

Tahun 1929 merupakan tahun penting bagi Sarmidi. Ia menemukan jodoh dan menikah dengan Sri Wulandari yang juga merupakan salah satu pamong di Perguruan Taman Siswa. Pernikahannya menjadi istimewa karena Ki Hadjar Dewantara berkenan menjadi salah satu wali nikah. Dalam mengarungi bahtera rumah tangga, keluarga Sarmidi mengalami suka dan duka. Suka apabila segala apa yang dicita-citakan kedua pasangan hidup ini tentang organisasi Taman Siswa berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan Ki Hadjar Dewantara, sedang duka apabila melihat dan mendengar bahwa rasa nasionalisme dalam pendidikan menurun. Keluarga Sarmidi memang keluarga yang memiliki intelektual tinggi, meskipun demikian Sarmidi juga menunjukkan keinginan terhadap soal-soal kebatinan dan kejiwaan pada umumnya dan khususnya pendidikan budi pekerti. Dari pernikahannya itu ia memiliki delapan orang anak.

Sarmidi memiliki sikap tersendiri mengenai kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ia percaya adanya kodrat dari Yang Maha Besar sebagai pusat kesatuan seluruh alam. Manusia wajib menghadapi segala sesuatu di dunia ini dengan ikhlas, baik yang menyenangkan maupun yang menyusahkan, yang baik maupun yang buruk. Bukankah semua itu ada karena kodrat alam dan oleh sebab itu juga terikat oleh hukum evolusi, hukum yang berkembang sesuai dengan dasar dan kekuatan yang terkandung di dalamnya. Inilah sikap *nrima* yang menjadi dasar hidupnya. Sikap demikian dilakukannya dengan gembira, hidup bersahaja dalam suasana pengorbanan dengan keikhlasan. Gembira karena kepuasan batin karena gelora hatinya suci mendapat jalan dan irama yang sama. Dirasakannya bahwa bunga melati yang putih bersih di dalam taman jiwannya dapat berkembang dan memberi keharuman di sekitarnya, serta ada kemungkinan cita-cita *kawula-gusti* akan terwujud sebagai sumber bahagia yang tiada bandingannya. Sumber bahagia keluar dalam bentuk pengabdian mutlak terhadap Yang Maha Kuasa. Dalam mencapai cita-cita *kawula-gusti* setiap agama menjadi penunjuk jalan bagi pemeluknya dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Agama yang dirasakan paling cocok dengan hati nuraninya itulah yang dapat menjadi petunjuk yang paling dapat diterima jiwanya. Setiap agama mempunyai dasar jiwa tertentu. Itulah sebabnya agama dipaksakan harus diterima oleh seseorang. Meski demikian satu hal yang tidak boleh dilupakan, yakni bahwa setiap agama menghendaki kesempurnaan kemajuan manusia. Oleh karena itu barang siapa memberikan hidupnya untuk kepentingan kesempurnaan kemajuan umat manusia dan berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa, maka manusia tersebut akan mendapat kehormatan berada di sisi Yang Maha Kuasa.

Ki Sarmidi Mangunsakoro bersama teman-teman DPP PNI ketika bertemu dengan Presiden Soekarno di Istana

(Sumber: Istimewa)

POLITIK DAN MASA PERGERAKAN

Sarmidi selalu menganjurkan paham Indonesia bersatu. Ternyata anjurannya menjadi kenyataan. Dalam kongres Jong Java di Sala tahun 1926 tujuan Jong Java berubah menjadi berusaha memajukan rasa persatuan para anggota dengan semua golongan bangsa Indonesia, akan bekerjasama dengan perkumpulan-perkumpulan pemuda Indonesia lain, dan ikut serta menyebarkan dan memperkuat paham Indonesia bersatu. Setahun setelah pengangkatannya sebagai Ketua Jong Java pada tahun 1926 ia diangkat menjadi Ketua Jong Theosofien Yogyakarta. Ia semakin serius mendalami ilmu pendidikan di Dreijarige Normaalcursus Djogjakarta pada tahun 1927.

Pada saat menjadi anggota Pengurus Besar Pemuda Indonesia ia sangat tertarik pada Partai Nasional Indonesia (PNI) karena cita-cita politik persatuan dalam PNI tidak disembunyikan dan dapat dikatakan berterus terang. Atas dasar itulah pada tahun 1928 Sarmidi secara resmi masuk menjadi anggota PNI dan sejak itu pula ia aktif berjuang di bidang politik melalui PNI. Nasionalisme melalui persatuan rakyat yang selalu ditekankan oleh PNI tidak hanya terungkap dengan terbentuknya Pemufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI), tetapi juga berpengaruh pada organisasi-organisasi pemuda yang melahirkan Sumpah Pemuda. Sebagaimana dicatat bahwa Sumpah Pemuda atau Kongres Pemuda Indonesia II pada hari Minggu tanggal 27-28 Oktober 1928 di Gedung Oost-Java Bioscoop, Jakarta, yang dipimpin oleh Sugondo Joyopuspito itu dihadiri oleh utusan organisasi-organisasi pemuda, termasuk Pemuda Indonesia. Sarmidi juga hadir dalam kongres tersebut. Sebagai salah satu wakil Pemuda Indonesia ia menyampaikan pidato dengan judul "Pentingnya Pendidikan Kebangsaan Bagi Pemuda". Kongres juga memperkenalkan lagu *Indonesia Raya* ciptaan Wage Rudolf Supratman dan bendera Merah Putih yang diagap sebagai bendera pusaka Indonesia. Peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 merupakan salah satu puncak pergerakan nasional, sehingga peristiwa bersejarah tersebut setiap tahun diperingati sebagai hari besar nasional.

Di samping perjuangan dalam pergerakan nasional dan keteguhan hati dalam menciptakan persatuan bangsa yang tinggi, di sisi lain Ki Sarmidi Mangunsarkoro mempunyai kepribadian yang unik, terutama dalam hal berpakaian. Ia selalu memakai peci hitam, kemeja *schiller* putih, bersarung Samarinda, sepasang sendal, dan berkumis tebal. Semula ia senang mengenakan celana panjang, berdasi, dan tidak berpeci; tetapi sejak peci menjadi tanda kaum pergerakan ia menyesuaikan diri dengan mengenakan peci. Ia selalu bersarung untuk menunjukkan sifat berani: berani tampil beda di hadapan orang lain, berani menjadi pusat perhatian pada acara resepsi yang semua tamu mengenakan celana panjang.

Setelah PNI dibubarkan dan berubah menjadi Partindo, Sarmidi aktif menjadi Ketua Badan Pendidikan, dan ketika aktif di Gerindo ia aktif menulis di majalah bulanan *Sin Tit Po*, Surabaya.

Pada tahun 1940 Ki Sarmidi Mangunsarkoro dipercaya menjadi anggota pengurus Perhimpunan untuk Memajukan Ekonomi Rakyat (POMER). Dalam hal ini ia menganjurkan perluasan pendidikan perekonomian di Perguruan Nasional Taman Siswa. Di samping itu ia menjadi pemimpin redaksi dan menulis sejumlah karya dalam *Kebudayaan dan Masyarakat*, majalah bulanan berdasar kebangsaan dan beralamat di Vliegveldlaan 34, Batavia Centrum. Ki Hadjar Dewantara menjadi anggota kehormatan dengan anggota-anggota Susilowati, R. Atmowirogo, Mr. Hindromartono, Dr. Murjani, Mr. Samsudin, dan W. Suryokusumo. *Kebudayaan dan Masyarakat* terbit setiap satu bulan sekali, memuat masalah-masalah sosial, politik, dan kebudayaan. Majalah ini bubar pada bulan Desember 1941 karena meletus perang Asia Timur Raya. Pada tahun 1941 itu juga Ki Sarmidi Mangunsarkoro mendirikan sekolah dagang kecil, "Taman Masyarakat Dagang", di Jakarta.

Pada tanggal 8 Maret 1942 Letnan Jenderal Terpoten dan Gubernur Jenderal Tjarda Van Starkenborg Stachouwer menyerah tanpa syarat kepada Letnan Jenderal Hitoshi Imamura di lapangan terbang Kalijati, Bandung. Dengan penyerahan tersebut, maka berakhirlah penjajahan Belanda atas Indonesia dan diganti kekuasaan Kemaharajaan Jepang. Rakyat Indonesia yang sama sekali tidak dipersiapkan untuk menentukan nasibnya sendiri dilempar begitu saja oleh pihak Belanda pada kekejaman penguasa Jepang. Dengan demikian secara moril pihak Belanda telah kehilangan hak atas Indonesia.

MASA KEMERDEKAAN

Pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada sekutu. Pada waktu itu di Indonesia sedang dalam keadaan *vacum of power* 'kekosongan kekuasaan', yang kemudian dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para pemimpin bangsa untuk memproklamasikan kemerdekaan. Menjelang akhir perang Asia Timur Raya semangat nasionalisme bangsa Indonesia dalam posisi kuat, sehingga mampu melaksanakan proklamasi kemerdekaan dan membentuk kabinet untuk melancarkan roda pemerintahan. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dalam sidang tanggal 19 Agustus 1945 menetapkan 12 kementerian di lingkungan pemerintah. Namun demikian, pembentukan kabinet Negara Republik Indonesia yang pertama baru dapat terlaksana pada tanggal 2 September 1945. Kabinet pertama ini merupakan kabinet presidensial. Presiden memiliki dua fungsi dan kedudukan, yaitu sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. Oleh sebab itu kabinet pertama ini dipimpin oleh presiden, sesuai dengan sistem pemerintahan berdasarkan UUD 1945. Kabinet ini berlangsung hingga pergantian kabinet pada tanggal 14 November 1945.

Setelah Indonesia merdeka Ki Sarmidi Mangunsarkoro menjadi sekretaris Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). KNIP bersidang untuk pertama kalinya pada tanggal 29 Agustus 1945, dipimpin oleh Mr. Kasman Singodimejo sebagai Ketua. Atas dasar Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945 KNIP memiliki wewenang tambahan dalam urusan legislatif. Pada bulan Oktober 1945 kelompok sosialis di dalam KNIP mendorong pembentukan Badan Pekerja Kamite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP), sehingga pada tanggal 29 Oktober 1945 dibentuklah BP-KNIP dan Ki Sarmidi beserta istrinya menjadi anggota.

Ki Sarmidi pernah ditunjuk sebagai Ketua Partai Serikat Rakyat Indonesia (Serindo), suatu partai yang didirikan pada tanggal 4 Desember 1945 di Jakarta oleh beberapa mantan anggota PNI, Perindo, dan Gerindo. Tujuan Serindo meneruskan cita-cita ketiga partai tersebut, tetapi dalam suasana kemerdekaan yang belum stabil cita-cita itu harus diperjuangkan dengan segala taktik. Para pemimpin Serindo di mana pun berada berjuang sekuat tenaga, baik di bidang politik maupun di bidang militer. Sementara itu

ibukota Republik Indonesia untuk sementara dipindahkan ke Yogyakarta pada tanggal 4 Januari 1946 akibat pertempuran yang dahsyat melawan Belanda dan sekutunya. Serindo tetap mengambil bagian aktif di dalam perjuangan. Setelah diadakan perudingan dengan beberapa partai politik lain yang sama asas dan tujuan—antara lain PNI di Pati, Madiun, Palembang, dan Sulawesi; Partai Republik Indonesia di Madiun; Gerakan Republik Indonesia; dan beberapa partai lain—diselenggarakanlah kongres Serindo di Kediri pada tanggal 29-31 Januari 1946. Semua partai tersebut berfusi menjadi satu partai, yaitu PNI. Ki Sarmidi Mangunsarkoro terpilih sebagai ketua dan sejak saat itu PNI mengawali perjuangan mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan. Dalam Anggaran Dasar Pasal 2 ditetapkan bahwa PNI berasas sosio nasional demokrasi (kebangsaan, kerakyatan, sama rata sama rasa), yang tercermin dalam lambang PNI: segitiga dengan kepala banteng di dalamnya. Lambang ini menggambarkan sintesis nasionalisme, demokrasi, dan sosialisme.

Pada tanggal 10 sampai dengan 15 November 1946 di kota kecil Linggarjati, dekat Cirebon, dilangsungkan perundingan antara Republik Indonesia dan Belanda dengan dipimpin oleh Lord Killern. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Sutan Syahrir, sedangkan pihak Belanda dipimpin oleh Schermerhom. Perundingan Linggarjati menghasilkan persetujuan yang diparaf oleh kedua belah pihak pada tanggal 15 November 1945. Setelah persetujuan diparaf oleh kedua belah pihak, masih diperlukan pengesahan dari parlemen masing-masing negara. Oleh karena itu pada tanggal 25 Februari–6 Maret 1947 KNIP mengadakan sidang di Malang membicarakan naskah hasil perundingan Linggarjati. Dalam sidang itu Ki Sarmidi Mangunsarkoro menentang isi persetujuan Linggarjati karena tidak mengandung pengakuan terhadap Republik Indonesia secara *de jure* dan hanya pengakuan samar-samar *de facto*. Ki Sarmidi Mangunsarkoro sangat keberatan dengan konsepsi Uni Indonesia-Belanda yang dikepalai oleh Ratu Belanda. Meskipun demikian sidang pleno KNIP menerima hasil Perundingan Linggarjati setelah melalui perdebatan sengit: 284 orang setuju melawan 2 orang yang tidak setuju; satu di antara yang tidak setuju adalah Ki Sarmidi Mangunsarkoro. Penandatanganan naskah Perundingan Linggarjati diadakan di Jakarta pada tanggal 25 Maret 1947. Kemudian pada tanggal 31 Maret 1947 pemerintah Inggris mengakui secara *de facto* wilayah Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera.

Pada sidang KNIP di Malang para penyokong Perundingan Linggarjati sangat jengkel melihat dan mendengar serangan-serangan Ki Sarmidi Mangunsarkoro. Mereka yang tidak suka mengatakan bahwa Ki Sarmidi Mangunsarkoro keras kepala, tetapi ternyata kemudian banyak di antara mereka tidak mengakui Perundingan Linggarjati meskipun awalnya menerima. Ki Sarmidi Mangunsarkoro memang pandai berdebat. Salah satu sifatnya yang mungkin memanaskan hati lawan berdebatnya ialah bahwa ia tetap tenang meskipun diserang habis-habisan, tetapi pada saat yang tepat ia ganti menyerang habis-habisan. Dengan tenang ia mendengarkan segala serangan dari pihak lawan, kemudian setelah lawan bicaranya berhenti ia meminta waktu bicara.

Isi perundingan Linggarjati menimbulkan berbagai macam tanggapan dalam masyarakat. Ada yang setuju dan ada yang menentang. Golongan yang setuju ialah partai-partai politik pemerintah, yaitu golongan sosialis yang tergabung dalam sayap kiri; sedangkan yang menentang di antaranya PNI, Masyumi, Partai Wanita Rakyat, dan Partai Rakyat Indonesia yang tergabung dalam Benteng Republik Indonesia. Meskipun ada golongan dalam masyarakat yang menentang hasil Perundingan Linggarjati, namun pemerintah tetap pada garis politiknya: menaati dan melaksanakannya, karena pemerintah menilai Perundingan Linggarjati hanya sekedar jembatan untuk mencari jalan baru bagi perjuangan bangsa Indonesia pada masa kemudian.

Pada tanggal 1 Oktober 1947 BP-KNIP mengadakan sidang untuk membicarakan laporan anggota BP-KNIP yang ditugaskan memeriksa keadaan di berbagai front. Ki Sarmidi Mangunsarkoro, yang merupakan salah satu pembicara, mangatakan bahwa baik-buruk segala sesuatu dapat dilihat dari anasir militer, politik, sosial, ekonomi, keamanan, dan penerangan. Hubungan antara pemimpin militer

Ki Sarmidi Mangunsarkoro ketika masa tua, menjabat sebagai ketua BMKN

(Sumber: Istimewa)

dan sipil kurang baik akibat beberapa sikap prajurit. Di beberapa tempat mereka tidak mendapatkan simpati rakyat, padahal simpati itu sangat penting jika kita hendak mengadakan pertahanan bergerilya. Ki Sarmidi Mangunsarkoro juga melaporkan bahwa bantuan kepada kaum pengungsi kurang. Banyak juga yang menggugat sebelum waktunya, yang diakibatkan oleh *fluistercompagne* musuh. Hal semacam ini harus diberantas. Politik dalam negeri harus ditujukan pada pembulatan tekad seluruh rakyat, yaitu memelihara semangat pembelaan, meniadakan pertikaian politik sesama kita, dan pengawasan atas inflitrasi musuh. Tentang pepolit dan TNI Bagian Masyarakat, Ki Sarmidi Mangunsarkoro berpendapat bahwa badan-badan itu merupakan aliran politik. Ia mengusulkan supaya pimpinannya yang 80%-100% di tangan sayap kiri diubah, sehingga seluruh tenaga dan kekuatan organisasi rakyat ikut ambil bagian. Dengan demikian seluruh kekuatan rakyat dapat ditujukan ke arah perjuangan dan dapat tecipta perjuangan demokrasi. Sebelum pemerintah dapat mengeluarkan rencana anggaran Ki Sarmidi Mangunsarkoro meminta supaya dibuat perhitungan tentang pengeluaran ulang atas perhitungan yang sudah dilakukan. Jika tidak mungkin, hendaknya Badan Keuangan Negara yang mengusahakan lebih baik mengenai Kementerian Pertahanan karena setiap bulan Kementrian Pertahanan memerlukan 80% dari pengeluaran pemerintah secara keseluruhan. Mengenai pengangkatan Wikana—tokoh kiri yang bukan militer—sebagai Gubernur Militer Surakarta, Ki Sarmidi Mangunsarkoro mengharapkan agar Gubernur Militer Surakarta itu menunjukkan sikap dan usaha yang membuktikan bahwa pengangkatan atas dirinya sudah tepat.

Pada tanggal 8 Desember 1947 dibentuk Komisi Tiga Negara (KTN) setelah Perjanjian Renville. Delegasi Indonesia diketuai oleh Dr. Leimena dan Ki Sarmidi Mangunsarkoro menjadi salah satu anggota. Dengan tegas PNI menolak hasil perundingan karena menganggap membahayakan kedaulatan RI sebagaimana dipaparkan oleh Ki Sarmidi Mangunsarkoro dalam sidang BP-KNIP pada tanggal 17 Februari 1948, bahwa perjanjian gencatan senjata yang berlaku sebelum tercapai persetujuan politik yang akan menetapkan status republik merugikan republik. Namun naskah Perjanjian Renville yang telah ditandatangani merupakan kenyataan politik yang tidak dapat diabaikan dalam perjuangan selanjutnya. Dalam menghadapi perundingan tersebut sebenarnya posisi RI kuat karena pada tanggal 20 Desember 1947 BP-KNIP telah menerima mosi percaya yang diajukan oleh Ki Sarmidi Mangunsarkoro selaku ketua fraksi PNI, "kepercayaan penuh atas politik pemerintah dalam membela kemerdekaan negara." Mosi kepercayaan itu diterima karena politik yang dijalankan pemerintah dianggap berdasarkan pembelaan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Syarat pertama untuk mencapai itu adalah menuntut pengakuan *de jure* pihak Belanda atas daerah-daerah Republik Indonesia yang secara *de facto* telah diakui oleh negara-negara lain dan akan diadakan plebisit yang bebas di daerah-

daerah Indonesia lainnya. Ki Sarmidi Mangunsarkoro menegaskan bahwa titik berat mosinya adalah perjuangan menegakkan kemerdekaan bangsa dan negara karena kemerdekaan merupakan satu-satunya pegangan bagi Bangsa Indonesia dalam menghadapi semua masalah. Ia juga menjelaskan bahwa kedaulatan Republik Indonesia sudah diakui di luar. Oleh sebab itu kekuatan internal harus dipelihara untuk mendukung perjuangan ke luar dan dalam hal ini berdasar kebulatan tekad. Harus ada dasar yang nyata, yang bersumber pada persatuan pendapat dan strategi perjuangan. Hasil Perundingan Renville merugikan RI dan menguntungkan Belanda. Meskipun demikian Belanda yang sudah kalap dan bernafsu menguasai dan menjajah Indonesia kembali merasa tidak puas mengenai hasil perundingan tersebut, sehingga Perundingan Renville pun diingkari oleh pihak Belanda yang kemudian melancarkan Agresi Militer Belanda II. Pada masa Agresi Belanda II ini Sarmidi ditangkap dan ditahan di Penjara Wirogunan dan baru bebas kembali setelah diselenggarakan Konferensi Meja Bundar (KMB).

MENJADI MENTERI

Dalam Kabinet Hatta II (4 Agustus 1949-14 Desember 1949) Ki Sarmidi Mangunsarkoro diangkat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan (PP dan K). Tidak seperti menteri lain yang segera pindah ke rumah dinas, keluarga Ki Sarmidi Mangunsarkoro tetap tinggal di rumahnya yang sangat sederhana, rumah kuna model "Bale Malang": separuh bagian bawah berupa tembok batu dan separuh bagian atas terbuat dari dinding bambu. Ki Sarmidi Mangunsarkoro mempunyai pendapat bahwa apabila nanti kabinet jatuh dan tidak dipilih kembali sebagai menteri tidak perlu memindahkan barang-barang rumah tangganya dari rumah dinas ke rumah pribadi kembali.

Sebagai Menteri PP dan K, Ki Sarmidi Mangunsarkoro mempunyai pendirian dan prinsip teguh: tidak mau bekerjasama dengan Belanda. Ia berpendapat bahwa kebudayaan universal, tidak memandang bangsa, dan kerjasama merupakan hal yang baik; tetapi kejadian-kejadian sebelumnya menunjukkan bahwa pihak Belanda sering menggunakan kebudayaan untuk maksud lain yang merugikan bangsa Indonesia. Itulah sebabnya ia menolak kerjasama dengan Belanda. Pernah pihak Belanda menawarkan buku-buku untuk Perpustakaan Negara kepada Ki Sarmidi Mangunsarkoro selaku Menteri PP dan K, tetapi ia menjawab tegas bahwa pihaknya akan menerima dengan catatan tanpa ada ikatan. Demikian pun apabila pihak Belanda memerlukan buku-buku dari RI akan diberi juga.

Salah satu prestasi Ki Sarmidi selaku Menteri PP dan K adalah keberhasilan membuat Undang-undang (UU) Pendidikan dan Pengajaran. Ia juga meletakkan dasar-dasar atas kelahiran Universitas Gadjah Mada (UGM), terutama pada saat anggota dari The United Nations Technical Assistance Commissions (Dr. Hatta Akrawi) mengusulkan supaya Fakultas Kedokteran, Kedokteran Gigi, dan Farmasi dipindah dan digabungkan dengan Fakultas Kedokteran di Jakarta, dengan alasan Yogyakarta kekurangan dosen. Akan tetapi pihak Senat di bawah pimpinan Dr. Sardjito—yang didukung oleh Presiden RI (saat itu) Mr. Asaat dan Menteri PP dan K Ki Sarmidi Mangunsarkoro—menolak dan tetap mempertahankan ketiga fakultas tersebut. Akhirnya UGM lahir dengan Surat Keputusan yang ditandatangani Menteri PP dan K Ki Sarmidi Mangunsarkoro dan Presiden Mr. Asaat. Di samping itu Ki Sarmidi Mangunsarkoro juga mendirikan Akademi Seni Rupa Indonesia (ASRI) Yogyakarta dan Konservatori Karawitan Surakarta.

Pada tahun 1952 Ki Sarmidi diangkat sebagai Ketua Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional (BMKN). Pada tahun itu juga ia diangkat sebagai Ketua Badan Pertimbangan Kebudayaan Nasional Pemerintah Republik Indonesia. Sebagai Ketua BMKN ia menganjurkan berkembangnya kebudayaan rakyat. Kemudian pada tahun 1954 ia menjadi Ketua Panitia Penyantunan ASRI untuk menentukan apa yang akan dilaksanakan ASRI. Pada tahun 1955, dalam Kongres Kebudayaan di Sala, ia dipaksa oleh sekelompok pemuda agar memberi kekuasaan kepada mereka dalam BMKN yang akan datang. Namun ia menolak dan tetap pada pendiriannya. Akhirnya rencana para pemuda tersebut menguasai BMKN

gagal. Dalam kedudukannya sebagai ketua BMKN ia pernah memipin delegasi kebudayaan ke Thailand. Pada tahun 1955 pula ia menjadi anggota Dewan Penyantun UGM dan ASRI.

Pada tahun 1954 Ki Sarmidi ditunjuk menjadi anggota DPR sebagai wakil PNI. Dalam Kongres PNI ke-7 di Bandung tanggal 15–22 Desember 1954 ia duduk sebagai Wakil Ketua Umum I. Setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Konstituante hasil Pemilihan Umum tahun 1955 terbentuk ia dipercaya lagi menjadi wakil PNI di DPR. Di samping itu ia juga diangkat sebagai wakil PNI di Konstituante. Dalam lembaga perwakilan rakyat tersebut, baik di DPR maupun Konstituante, ia dipercaya sebagai Ketua Fraksi PNI. Jabatan sebagai Ketua Fraksi PNI di DPR, Konstituante, dan Wakil Ketua Umum I PNI dipangkunya sampai ia meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 1957. Kepergian Ki Sarmidi Mangunsarkoro merupakan pukulan berat bagi PNI, karena sangat besar jasanya terhadap partai, bangsa, dan negara. Ia meninggalkan nama baik dan nama harum. Seperti bunyi pepatah "gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, dan manusia mati meninggalkan nama". Sarmidi meninggal karena sakit pada hari Sabtu, 8 Juni 1957 Pukul 10.10 WIB di Rumah Sakit CBS Jakarta.

Begitu banyak sumbangan Ki Sarmidi Mangunsarkoro dalam bidang pendidikan dan kebudayaan yang sangat berguna bagi bangsa Indoensia.

Abu Hanifah

Masa Jabatan
20 Desember 1949 – 6 September 1950

Abu Hanifah

Dr. Abu Hanifah Dt. Marajo Emas atau Dt. Marajo Ameh, yang lebih dikenal dengan nama panggilan Abu Hanifah, merupakan salah satu menteri Kabinet Hatta pada masa Republik Indonesia Serikat (RIS), yang menjabat Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan (PP&K). Jabatan itu berakhir setelah RIS dinyatakan bubar. Dengan demikian ia menjadi Menteri PP&K pertama dan terakhir pada era RIS, yang dijabat sejak tanggal 19 Desember 1949 sampai dengan 6 September 1950. Masa jabatan itu relatif lama jika dibandingkan dengan umumnya masa jabatan para menteri PP&K sebelumnya.

Nama Abu Hanifah lebih akrab atau dikenal sebagai dokter yang aktif dalam politik pergerakan kebangsaan dan rajin menuliskan buah pikiran dan pengalamannya, baik berupa buku maupun artikel-artikel pendek yang dimuat dalam berbagai media, seperti majalah *Soematranen Bond*, *Pemuda Indonesia*, dan *Indonesia Raya*.

Abu Hanifah dilahirkan pada tanggal 6 Januari 1906, yang bertepatan dengan tahun 1327 Hijrah (H), di Padang Panjang, suatu kota kecil yang terletak di daerah perbukitan antara kota Padang dan kota Bukittinggi, di antara dua gunung yang menjulang tinggi ke angkasa, yaitu Gunung Merapi dan Gunung Singgalang, Sumatera Barat. Menurut penuturan masyarakat, Padang Panjang merupakan daerah *darek* alam Minangkabau, yang berarti 'daerah asal pusat kebudayaan Minangkabau yang terletak di daerah pedalaman'.[1] Ayahnya bernama Ismail gelar Datuk Manggung, seorang guru bahasa Melayu. Ia paman Prof. Dr. Moh. Ali Hanifah, yang dikenal sebagai pembina palang merah Indonesia, sedangkan ibunya bernama Fatimah Zahra.

Abu Hanifah merupakan anak pertama dari perkawinan Ismail gelar Datuk Manggung dengan Fatimah Zahra. Ia mempunyai lima orang adik, yaitu Nursiah Dahlan, Ahmad Munandar, Kartini, Siti Nuraini, dan Usmar Ismail. Adik bungsunya ini kemudian dikenal masyarakat Indonesia sebagai aktivis dan pembina perfilman Indonesia.

Sebagai seorang guru pada Opleiding School tot voor Inlandsche Ambtenaren (OSVIA) di Bukittinggi, Ismail, ayah Abu Hanifah, merupakan orang terpandang di lingkungan masyarakatnya pada waktu itu. Ia seorang *datuk* yang menjadi *penghulu negeri*. Sebagai guru ia sering berpindah-pindah tempat, sehingga anak-anaknya—termasuk Abu Hanifah—terpaksa pula sering berpindah-pindah sekolah sesuai dengan tempat penugasan ayahnya, misalnya bertugas di Makassar. Oleh karena jabatan ayahnya ia dapat masuk menjadi murid pada Europeesche Lagere School (ELS) di kota Makasar, tetapi baru berhasil menyelesaikan sekolah ELS-nya di Bandung pada masa ayahnya ditempatkan di kota itu—yang pada waktu itu dikenal sebagai "kota kembang".[2] ELS pada dasarnya diperuntukkan bagi orang-orang Eropa dan yang dipersamakan dengan orang Eropa.

Setamat dari ELS Abu Hanifah meneruskan pendidikan formal ke School tot Opleiding Voor Inlandsche Artsen (STOVIA/Sekolah Pendidikan Kedokteran Untuk Kaum Pribumi). Pada bulan-bulan awal masa pendidikannya di sekolah kedokteran itu ia mengalami masa "penggojlogan" mental dari para seniornya, mirip dengan masa prabakti (Mapras) pada awal pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Mapram di perguruan tinggi pada awal Orde Baru. Alasannya agar para calon dokter mempunyai ketahanan fisik dan kematangan mental yang sangat diperlukan oleh seorang dokter. Para pelajar STOVIA sering dipanggil dengan sebutan "*cleve*". Entah karena salah dengar atau sulit mengucapkan kata tersebut, sebutan kepada para calon dokter Jawa ini berubah menjadi "klepek".

Lama Pendidikan di STOVIA 10 tahun, yang dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama merupakan masa persiapan, yang disebut *voorbreidende afdeling* (VA), dengan lama pendidikan tiga tahun. Tahap kedua khusus kedokteran, yang disebut *geneeskundige afdeling* (GA), berlangsung selama 7–8 tahun.

Selama menjalani masa pendidikan semua murid STOVIA diasramakan. Setiap murid diatur penempatan kamarnya sejak tahun pertama sampai dengan kelulusan. Ada semacam rotasi berkala dalam hal kamar, sehingga para murid pernah merasakan tidur di kamar yang berada di ruang A, B, C, dan D. Ada aturan dan pengawas yang mengawasi pelaksanaan tata tertib di asrama, yang dinilai ketat oleh para murid STOVIA. Tujuan pengawasan tiada lain agar para murid tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu kelancaran dan ketepatan waktu belajar di sekolah kedokteran tersebut.

Walaupun demikian tidak berarti semua murid menaati semua aturan. Ada saja di antara mereka yang melanggar dengan berbagai alasan dan cara, misalnya banyak murid yang "membongkar" genteng kamar kecil atau toilet agar dapat keluar asrama untuk membeli makanan atau kopi yang tidak dapat diperoleh di asrama atau di luar jam makan. Abu Hanifah merupakan salah seorang siswa yang juga pernah melakukan kenakalan demikian. Yang masih di kenangnya sampai ia menjadi seorang dokter dan politisi adalah sewaktu menerobos ke luar asrama hanya sekedar membeli kopi ekstra dari Bang Amat dan tahu Long yang mangkal di daerah Senen.

Di STOVIA terdapat beberapa organisasi sekolah yang sedikit banyak memberi kebebasan kepada para murid untuk berekspresi atau menyalurkan bakat. Ada beberapa perkumpulan di sekolah yang dibentuk dan diurus oleh para murid STOVIA, misalnya perkumpulan senam dan anggar, perkumpulan sepak bola, perkumpulan tenis, perkumpulan musik, perkumpulan tari Jawa, perkumpulan catur dan dam, perkumpulan pencak Sumatera, dan perkumpulan musik Hawaii. Dari sekian banyak perkumpulan itu beberapa di antara menjadi tempat Abu Hanifah mengembangkan hobi, yakni sepak bola (perkumpulan sepak bola), musik (perkumpulan musik), dan pencak Sumatera. Salah satu alat musik yang menjadi favoritnya dan sering dimainkannya dalam latihan bersama adalah biola. Ia mempunyai biola warisan dari ayahnya. Hobi lain yang sering dilakukan oleh Abu Hanifah adalah menulis, melukis, dan memancing. Kegiatan ekstra kurikuler seperti inilah yang mengantarnya berkenalan dengan murid-murid lain yang berasal dari berbagai daerah yang berbeda adat istiadat dengan kampungnya. Dari sekian banyak temannya, beberapa di antaranya menjadi tokoh terkenal, baik pada masa pergerakan nasional maupun pada masa sesudahnya, antara lain Sutomo, Cipto Mangunkusumo, Gunawan, dan Bahder Djohan.

Pada tahun terakhir masa pendidikannya di STOVIA Abu Hanifah memutuskan keluar asrama. Ia memilih tinggal di *Indonesische Clubgebaouw* (IC), sebuah asrama atau tempat kontrakan di daerah Jalan Kramat Raya, yang menjadi tempat favorit para aktivis pelajar kaum pribumi. Dari nama gedungnya, IC, sudah menyiratkan warna politis para pelajar yang menjadi penghuninya. Tentu bukan sekadar kaum pribumi semata, apalagi orang Belanda, melainkan hanya kaum pribumi yang berani mengaku diri sebagai orang Indonesia (pada masa itu pengakuan demikian mengandung risiko, yakni sewaktu-waktu bisa masuk penjara). Kenyataan itu sekaligus menunjukkan jati diri Abu Hanifah sebagai seorang pelajar pemberani, yang berani menunjukan keberpihakannya kepada kaum pergerakan nasional yang sedang berupaya memerdekakan kaumnya dari belenggu penjajahan Belanda. Semangat para pemuda pelajar semakin besar, terutama sejak Kongres Pemuda yang akhirnya menghasilkan Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928. Dalam renungannya tentang Sumpah Pemuda, Abu Hanifah mengatakan bahwa Sumpah Pemuda lahir sebagai letusan semangat yang membakar jiwa raga dan hati nurani pemuda-pemudi Indonesia. Satu-satunya jalan untuk mempersatukan pemuda-pemudi bangsa yang terserak di seluruh Nusantara, tanpa mengetahui dan sadar bahwa pada hakikatnya mereka satu bangsa, yang satu nasib dan satu penanggungan, karena menderita dijajah bangsa lain yang negaranya jauh ribuan mil dari Indonesia.[3] Sebagai catatan, di IC inilah Abu Hanifah bertemu dengan pemuda aktivis pergerakan nasional yang telah lebih dahulu tinggal di situ, seperti Moh. Yamin, Amir Syarifuddin, dan Asa'at Abbas.

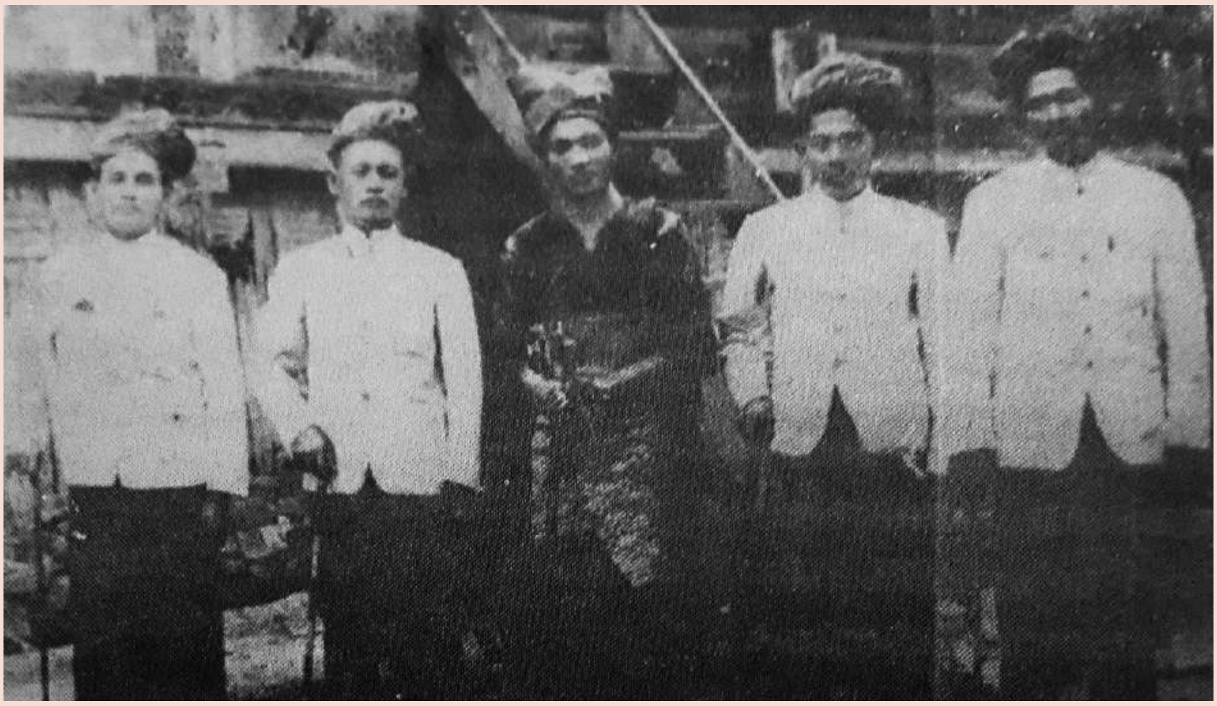

Abu Hanifah setelah dilantik sebagai Datuk Maharajo Emas. Abu Hanifah berdiri ketiga dari kiri

(Sumber: Repro Buku *Prof. Dr. Abu Hanifah Dt, ME: Karya dan Pengabdiannya*)

Setamat dari STOVIA Abu Hanifah kembali ke kampung halamannya. Selain untuk melepas rindu terhadap kampung halamannya, ia juga mau minta doa restu kedua orang tuanya untuk tugasnya sebagai dokter yang baru diterimanya, serta mau minta pertimbangan tentang niatnya untuk berumah tangga.

Abu Hanifah tidak lama tinggal di kampung halaman karena harus segera pergi ke Medan untuk bekerja sebagai asisten Prof. Heineman di Rumah Sakit Tanjung Morawa, Medan (1932–1934). Ia cukup beruntung menjadi asisten Prof. Heineman dalam bidang penyakit dalam dan kandungan. Perkenalan dengan Prof. Heineman ini merupakan keberuntungan tersendiri bagi Abu Hanifah, karena Prof. Heineman-lah yang memungkinkan dirinya dapat mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi tanpa harus kehilangan pekerjaan. Ia dapat melanjutkan pendidikan di Geneeskundige Hogeschool, Jakarta (Batavia).

KEPALA RUMAH TANGGA YANG BAIK

Seperti telah disinggung di atas, setelah selesai pendidikan di STOVIA pada tahun 1932 Abu Hanifah pulang ke kampungnya di Padang Panjang dengan tujuan meminta pertimbangan sekaligus izin dari orang tuanya untuk menikah. Ia merasa lega karena, seperti yang diharapkan, kedua orang tuanya menyetujui. Oleh karena itu pada tahun itu juga, tepatnya pada tanggal 19 Oktober 1932, ia melangsungkan perkawinan dengan buah hatinya, Hafni Zahra Thaib, putri pasangan Moh. Samin Thaib dan Siti Ara Dati.

Abu Hanifah mengenal anak gadis itu bukan karena dipertemukan oleh orang tuanya ataupun orang tua Hafni, melainkan karena aktivitasnya dalam organisasi pemuda, yaitu Pemuda Indonesia. Hafni merupakan salah seorang gadis yang aktif sebagai anggota Indonesia Muda. Sebagai catatan, pada mulanya Hafni tinggal dan bersekolah di kota Medan, namun karena aktivitasnya di Indonesia Muda dikeluarkan dari sekolahnya, bahkan setengah dipaksa harus meninggalkan kota tersebut. Dengan pertimbangan tertentu ia memilih kota Jakarta (Batavia) sebagai tempat tinggal barunya.

Dari perkawinan itu Abu Hanifah dikaruniai tiga orang anak, yaitu Elsam (lahir di Medan pada 11 September 1934), Chalid (lahir di Kuantan pada 23 Oktober 1937), dan Siti Nurhati (lahir di Jakarta pada 20 Desember 1952). Abu Hanifah sangat mencintai ketiga anaknya dan membesarkan mereka dengan penuh kasih sayang. Karena kasih sayang itu ia menerapkan nilai kedisiplinan kepada ketiga anaknya serta memberi pengertian tentang hak dan kewajiban anak terhadap orang tuanya.

Abu Hanifah (No.2 dari kanan, berpeci) sebagai Menteri PP&K pada Kabinet Hatta di era RIS

(Sumber: buku *Prof. Dr. Abu Hanifah Dt, ME: Karya dan Pengabdiannya*)

Keberhasilan Abu Hanifah dan istrinya mendidik dan membesarkan anak-anaknya membuat keluarganya sering dijadikan contoh tauladan oleh masyarakat sekitar, terutama saudara-saudaranya di Padang Panjang atau Batusangkar. Karena sifat kepemimpinannya akhirnya ia dipilih menjadi kepala suku Pisang (salah satu suku Minangkabau). Di dalam suku Pisang terdapat empat rumpun keluarga, yang masing-masing diwakili oleh seorang *datuk*. Keempat *datuk* ini bersama tetua-tetua kampung melakukan musyawarah memilih Abu Hanifah menjadi kepala suku Pisang. Oleh karena itu, berdasarkan permusyawaratan adat dalam suku Pisang, pada tahun 1936 Abu Hanifah dijemput ke Kuantan. Ia dipilih menjadi "Datuk Maharajo Amah" atau "Datuk Maharajo Emas". Dengan "jabatan" itu dirinya diserahi tanggung jawab sebagai kepala suku.

TERJUN KE DUNIA POLITIK

Selama belajar di STOVIA Abu Hanifah sering bertemu dan berdiskusi dengan beberapa pelajar progresif yang kritis terhadap lingkungannya, terutama terhadap nasib bangsanya, seperti Sutomo, M. Suradji, Gunawan Mangunkusumo, dan Moh. Soleh. Pembicaraan dan diskusi itulah yang membuat Abu Hanifah semakin tertarik pada perjuangan atau politik pergerakan kebangsaan. Ia mengagumi bagaimana Sutomo, Gunawan, dan yang lain begitu cepat menangkap ide-ide dr. Wahidin Sudirohusono yang mengunjungi para pelajar STOVIA dalam perjalanan keliling untuk membentuk *studie fond*. Seperti sudah banyak dipublikasikan dalam beberapa karya sejarah, *studie fond* kelak akan digunakan untuk membantu kaum muda yang berbakat penerima bantuan itu agar dapat menuntut ilmu—yang hasilnya kelak—menjadi pemimpin yang mampu "memerintah diri dan bangsanya sendiri". Ide Wahidin ini kemudian mendorong para pemuda pelajar STOVIA mendirikan organisasi Boedi Oetomo (BO). Ia merasa bangga karena semasa belajar di STOVIA dapat bertemu dengan para pendiri BO. Semasa di STOVIA pula ia mendengar perjuangan Sarikat Islam (SI) dan Indische Partij (IP) yang jajaran pimpinannya merupakan pendiri BO, yakni Gunawan Mangunkusumo (SI) dan Cipto Mangunkusumo (IP).

Ketertarikannya terhadap pergerakan kebangsaan membuat Abu Hanifah lebih mudah bergaul dengan para pemuda pelajar lain yang telah menjadi aktivis pergerakan kebangsaan. Akhirnya ia ikut bergabung menjadi anggota Jong Sumatranen Bond (JSB), yang setelah Kongres Pemuda pertama berubah nama menjadi "Pemuda Sumatera". Dalam organisasi ini ia bertemu kembali dengan teman satu daerah, seperti Moh. Yamin dan Bahder Djohan. Bersama-sama mereka pula, kalau pulang liburan ke kampung atau daerah masing-masing, menyempatkan diri mempropagandakan organisasinya kepada kalangan pemuda setempat, sekaligus menjelaskan tujuan perjuangan. Aktivitas mereka seperti itu terbukti

berdampak positif di kalangan pemuda setempat. Kesadaran pemuda setempat tentang pentingnya belajar dan tentang pergerakan demi kemajuan bangsa semakin meluas di kalangan pemuda pribumi. Oleh karena itu pula sewaktu pada tahun 1926 digagas penyelenggaraan Kongres Pemuda yang pertama kali kalangan pemuda menyambut luar biasa; bahkan dikatakan selangkah lebih maju dibandingkan dengan kaum pergerakan nasional yang lebih senior yang bergabung dalam organisasi sosial-politik, seperti BO, SI, Al-Irsyad, PKI, dan Muhammadiyah.

Kerapatan Besar Pemuda, yang lebih dikenal dengan sebutan Kongres Pemuda, pertama kali diselenggarakan pada tanggal 30 April–2 Mei 1926 di Gedung Setan (Kimia Farma), Vrijmetse Laar (sekarang Jl. Budi Utomo No. 1). Meskipun Kongres tidak berhasil menyatukan seluruh organisasi pemuda seperti yang diharapkan, namun kongres berhasil merumuskan "Ikrar Pemuda" yang kelak dibacakan pada Kongres Pemuda kedua pada 28 Oktober 1928. Satu hal perlu dicatat dan tidak banyak diketahui bahwa Kongres Pemuda inilah yang sebenarnya menggodok kelahiran "Bahasa Indonesia". Pada waktu-waktu sebelumnya masyarakat memang tidak mengenal Bahasa Indonesia. Yang mereka kenal adalah Bahasa Melayu. Karena itu dalam draf pertama "Ikrar Pemuda" yang disusun Moh. Yamin susunannya sebagai berikut:

Pertama	Kami poetra dan poetri Indonesia mengakoe bertoempah darah jang satoe, Tanah Indonesia
Kedoea	Kami poetra dan poetri Indonesia mengakoe berbangsa jang satoe, Bangsa Indonesia
Ketiga	Kami Poetra dan poetri Indonesia mendjoendjoeng bahasa persatoean, Bahasa Melajoe

Tabrani tidak setuju dengan urutan yang ketiga karena dinilai tidak elok. Pada bagian pertama dan kedua yang menyangkut tanah tumpah darah dan bangsa dengan ikrar "Indonesia". Mengapa giliran yang ketiga yang menyangkut bahasa, bunyi ikrarnya "Melayu"? Mohammad Yamin sempat memberikan alasan mengapa menggunakan "Melayu" pada ikrar ketiga: realitasnya pada waktu itu belum ada bahasa Indonesia, dan berdasarkan hasil perbincangan yang berpotensi menjadi bahasa persatuan adalah bahasa Melayu. Terhadap argumentasi Yamin, Tabrani kembali bertanya, apakah realita waktu itu sudah ada bangsa Indonesia dan tanah air Indonesia? Kalau bangsa dan tanah air Indonesia bisa diciptakan, mengapa bahasa Indonesia tidak. Kita adakan bahasa Indonesia yang basisnya bahasa Melayu, yang kelak akan berkembang dan terus berkembang melalui penyerapan kosa kata dari berbagai bahasa suku bangsa yang ada di Indonesia. Sementara bahasa Melayu tetap berkembang sebagai bahasa Melayu.

Kemudian kedua orang ini meminta pendapat dari dua orang yang juga dikenal sebagai orang-orang yang paham dalam hal kebahasaan. Pertama, Djamaloeddin, yang ternyata condong kepada pendapat Yamin. Kedua, Sanusi Pane, yang ternyata setelah berpikir sependapat dengan Tabrani, sehingga dengan pendapat ini skor menjadi seimbang. Akhirnya mereka sepakat masalah ikrar pemuda itu dibawa ke kongres berikutnya agar Yamin—yang mereka kenal sebagai ahli bahasa—lebih leluasa mempelajarinya. Ternyata dalam Kongres Pemuda ke II yang diketuai oleh Sugondo Joyopuspito konsep ikrar pemuda langsung dibawa ke sidang pleno dan secara aklamasi diterima. Susunannya seperti yang telah diperdebatkan dalam Kongres Pemuda yang ke I sebagai berikut:[4]

Pertama	Kami poetra dan poetri Indonesia mengakoe bertoempah darah jang satoe, Tanah Indonesia
Kedoea	Kami poetra dan poetri Indonesia mengakoe berbangsa jang satoe Bangsa Indonesia
Ketiga	Kami Poetra dan poetri Indonesia mendjoendjoeng bahasa persatoean, Bahasa Indonesia

Hanya judulnya bukan lagi "Ikrar Pemuda" melainkan "Sumpah Pemuda". Sebagai catatan tambahan, Gabungan Politik Indonesia (Gapi) pada bulan Desember 1939 mengakui pula secara resmi bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Karena itu dalam rangka menghormati perjuangan para pemuda ini sudah sepatutnya jika tanggal 2 Mei diperingati sebagai hari lahirnya Bahasa Indonesia.

Abu Hanifah baru ikut terlibat dalam Kongres Pemuda pada tanggal 27-28 Oktober 1928, walaupun pada waktu itu ketokohannya tidak setenar rekan-rekan sedaerahnya seperti Moh. Yamin atau Sanusi Pane. Dalam kongres itu ia menjadi wakil Pemuda Sumatera dengan jabatan Sekretaris Umum Pemuda Sumatera, sekaligus menjadi redaktur bulletin *Jong Sumatranen Bond* (1923-1926). Melalui buletinnya itu ia banyak menulis tentang gerakan pemuda beserta ide-ide perjuangannya. Setelah terbentuk oraganisasi Pemuda Indonesia yang merupakan hasil fusi seluruh organisasi pemuda kedaerahan, Abu Hanifah pun ikut pindah menjadi anggotanya sekaligus menjadi pimpinan redaksi buletin *Pemuda Indonesia*. Sebagai tambahan, Abu Hanifah juga aktif sebagai anggota kepanduan, yaitu dalam organisasi Indische Padvinders Organisatie. Setelah itu ia pindah menjadi pelatih pada Pandu Indonesia.

Menjelang penyelenggaraan Kongres Pemuda kedua tahun 1928, Abu Hanifah pindah dari asrama STOVIA ke Indonesische Clubhuis (IC) yang beralamat di Jalan Kramat 126. Menurut apa yang didengar dan dilihatnya, inisiatif penyelenggaraan kongres datang dari para pemuda yang tergabung dalam Perhimpunan Pemuda Pelajar Indonesia (PPPI), yang didirikan pada bulan September 1926. Mereka mendapat dukungan kuat dari anggota Perhimpunan Indonesia (PI) dari negeri Belanda, baik yang masih belajar dan berdomisili di negeri Belanda maupun yang telah kembali ke Indonesia. Selain itu dukungan juga datang dari beberapa anggota Partai Nasional Indonesia (PNI). Seperti sudah banyak ditulis oleh beberapa pakar sejarah dan politik, Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan pada 27–28 Oktober 1928 tersebut berhasil mengeluarkan suatu keputusan yang sangat monumental, yaitu "Sumpah Pemuda".

Sekitar empat tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1932, Abu Hanifah berhasil menyelesaikan studinya di STOVIA. Tak lama setelah itu ia kembali ke kampung halamannya, Batusangkar, Sumatera Barat. Selain untuk "melaporkan" tentang keberhasilannya. Ia pun ingin melepaskan rindu terhadap kedua orang tuanya sekaligus kampung halamannya. Beruntung baginya karena kedua orang tuanya telah kembali ke kampung halaman setelah pensiun dari jabatannya sebagai guru bahasa.

Selain untuk melepas rindu dan silaturahmi kepada kedua orang tuanya ia sekaligus mau mohon pamit dan doa restu karena ia ditugaskan sebagai seorang dokter di Landschap Tanjung Morawa, Medan. Jabatan atau statusnya asisten Prof. Heineman, seorang dokter keturunan Jerman. Sambil bekerja Abu Hanifah mendapat kesempatan memperdalam pengetahuan di bidang penyakit dalam dan kandungan di bawah bimbingan Prof. Heineman yang mempunyai keahlian di bidang itu. Setelah itu ia bekerja sebagai Direktur Dinas Kesehatan Indragiri dan kemudian Scheepsart KPM. Semasa memegang jabatan ini perang meletus di negeri Belanda. Ia ikut dimiliterisir dan menjadi *Officer van Gezondheid 1e Klasse*

Menteri PP&K Abu Hanifah dalam Konferensi Unesco di Florence, Itali

(Sumber: Repro Buku *Prof. Dr. Abu Hanifah Dt, ME: Karya dan Pengabdiannya*)

pada K.M. Allied Forces, yang secara berturut-turut ditempatkan di Bombay, Singapura, dan Konvoi (1940, 1941, dan 1942). Ketika ditempatkan di Jatipetamburan sebagai Direktur Rumah Sakit Marine ia ditangkap polisi militer Jepang. Oleh pemerintahan Jepang kemudian ia ditempatkan sebagai dokter di Rumah Sakit Pusat Jakarta (CBZ). Tak lama setelah itu ia diangkat menjadi Kepala Rumah Sakit St. Lidwina (milik zending Katholik), yang sekarang dikenal dengan nama Rumah Sakit Mr. Syamsuddin.

Ketika bertugas sebagai asisten Prof. Heinenmann di Tanjung Morawa, Abu Hanifah melihat kesehatan para kuli perkebunan sedemikian buruk dan semua buruh yang dilihatnya itu sebangsa dengannya. Pada dasarnya pemerintah pun memperhatikan masalah kesehatan para buruh, namun dengan motivasi berbeda, yaitu ekonomi. Pemerintah takut apabila kesehatan para buruh dibiarkan terus memburuk akan berdampak pada produksi. Hasil produksi akan merosot atau berkurang. Sebagai sesama kaum pribumi, Abu Hanifah merasa tersentuh melihat nasib kaumnya dengan standar kesehatan sangat buruk. Oleh karena itu ia tidak sekadar ikut mengobati penyakit, melainkan juga berupaya meningkatkan kesadaran para buruh terkait dengan pentingnya meningkatkan kesehatan dan kebugaran mereka. Dengan kata lain, meskipun statusnya hanya sekadar dokter perkebunan, batinnya adalah kaum pergerakan kebangsaan yang ingin memajukan kaum pribumi supaya lebih bermartabat.

Pada waktu Jepang masuk dan menduduki Hindia Belanda (Indonesia) Abu Hanifah aktif sebagai anggota Barisan Pemuda Asia Raya. Selain itu ia diangkat menjadi Wakil Pemimpin Harian barisan *Seinendan* untuk wilayah Keresidenan Jakarta, bahkan sempat pula dicalonkan sebagai anggota Pasukan Pembela Tanah Air (Peta) dengan jabatan sebagai *daidancho* atau Komanda Batalyon. Namun karena sesuatu sebab ia tidak jadi masuk Peta, sebaliknya menjelang akhir Pendudukan Jepang ia pindah ke Sukabumi dan bertugas pada ruamah sakit kota Sukabumi. Di kota inilah pada awal kemerdekaan Indonesia ia menjadi salah seorang pimpinan barisan Hizbullah yang merupakan *onderbouw* Partai Masyumi.

Tidak lama berada di Sukabumi, ia pindah ke Bogor dan menjabat sebagai Dewan Pimpinan Daerah Keresidenan Bogor (1945-1946), sekaligus merangkap menjadi Ketua Komite Nasional Indonesia Daerah Keresiden Bogor (KNID Bogor). Sewaktu Badan Keamanan Rakyat (BKR) dibentuk Abu Hanifah diangkat menjadi ketuanya. Jabatan ketua dipegang sampai terjadi perubahan pada organisasi itu. Karena situasi politik dan adanya tuntutan rakyat agar Republik Indonesia (RI) membentuk tentara kebangsaan bukan sekedar organisasi semi militer seperti BKR, Presiden Soekarno menerbitkan maklumat untuk mengubah BKR menjadi menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Sebagai tokoh Dewan Pimpinan Daerah Keresiden Bogor ia menjadi target penculikan kelompok Ki Nariya yang melakukan aksi daulat di daerah Bogor, namun beruntung ia lolos. Sementara itu Ki Nariya beserta

Presiden Sukarno dan Menteri Pengajaran, Abu Hanifah duduk di barisan depan sedang mendengarkan pidato seorang mahasiswa di istana Rijswijk

(Sumber: Arsip Nasional Republik Indonesia).

kelompoknya melarikan diri ke Leuwiliang dan petualangannya berakhir setelah ditangkap oleh Lasykar Leuwiliang pimpinan Soleh Iskandar. Pada tahun 1947 Abu Hanifah menjadi anggota Masyumi dan kemudian mewakili partai itu menjadi anggota KNID sebagai Ketua Fraksi Masyumi.

Sebagai Ketua Barisan Hizbullah, Abu Hanifah pernah memimpin pasukannya dalam beberapa kontak senjata melawan tentara Sekutu dan NICA. Salah satu pertempuran yang melibatkan pasukannya adalah pertempuran melawan tentara Sekutu (Inggris), yang kemudian diketahuinya merupakan kesatuan Gurkha dari Divisi ke-23. Sewaktu menghadapi Belanda dalam Agresi I ia tertangkap, lalu dijebloskan ke penjara Tangerang pada bulan Agustus 1947. Setelah dibebaskan pada bulan Februari 1948 ia diusir dari daerah pendudukan oleh pihak Belanda. Ia pergi ke Yogyakarta, kembali ke barisan Hizbullah dan Masyumi. Ketika Kabinet Hatta dibentuk menggantikan Kabinet Amir Syarifuddin, ia diangkat sebagai penasihat kabinet.

Pada waktu terjadi Agresi Militer II Abu Hanifah kembali tertangkap oleh pasukan KNIL. Ia bersama tahanan lain dibebaskan setelah tercapai kesepakatan antara pihak RI dan Belanda untuk mengadakan Konferensi Meja Bundar (KMB) yang akan diselenggarakan di Den Haag, Belanda. Ia duduk sebagai salah satu anggota delegasi RI yang diketuai oleh Mr. Susanto. Sewaktu Moh. Hatta menbentuk Kabinet Republik Indonesia Serikat (RIS) Abu Hanifah dipercayai sebagai salah satu menteri, yaitu Menteri PP&K.

Salah satu program kerja Kementrian PP&K pada masa kepemimpinannya antara lain melakukan pembenahan terhadap Balai Pustaka yang pada waktu itu ditempatkan di bawah PP&K. Tujuan pembenahan itu antara lain agar lembaga tersebut dapat segera menerbitkan buku-buku berkualitas dan bermutu, yang dapat dijadikan bacaan oleh para remaja Indonesia.

Semasa kepemimpinannya, Kementrian PP&K merencanakan melakukan perubahan terhadap sistem pendidikan yang sedang berjalan, yang masih menggunakan sistem pendidikan dan kurikulum warisan kolonial. Untuk tujuan itu ia memimpin delegasi RI ke Konferensi UNESCO di Florence, Italia, yang diselenggarakan pada bulan Mei 1950. Tak lama setelah itu ia kembali memimpin delegasi RI ke Missi Goodwill ke negeri Belanda. Masukan-masukan yang diperoleh dari kedua forum internasional tersebut kemudian dijadikan bahan perbaikan sistem pendidikan nasional di Indonesia. Sistem pendidikan nasional itu berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sehingga mewajibkan ada pelajaran agama di tiap jenjang pendidikan.

Setelah RIS bubar dan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), ia ditunjuk sebagai *advisor general* pada Kementrian Luar Negeri dengan pangkat Duta Besar Keliling. Jabatan ini sekaligus

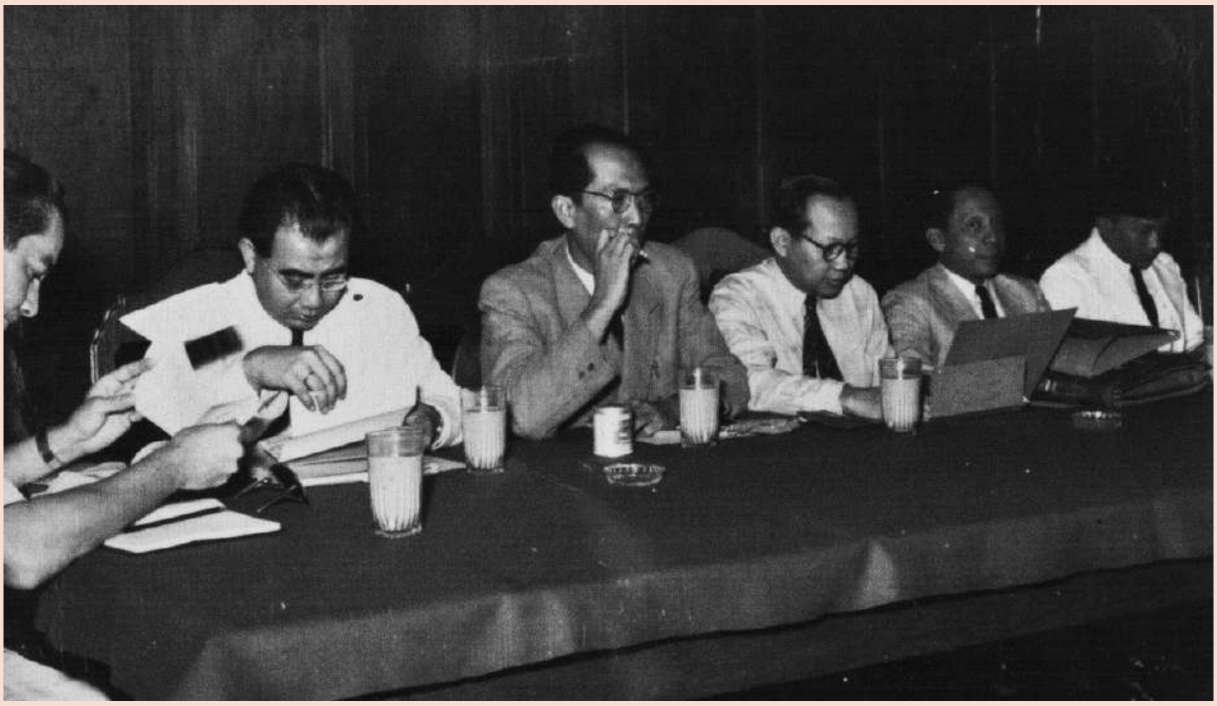

Atas

Presiden Sukarno duduk di kursinya saat Sidang Parlemen RIS dan di sebelah kanannya para menteri yaitu (dari kiri ke kanan) Sultan Hamid II, Wahid Hasjim, Wilopo, Abu hanifah, Herling Laoh, Ida Anak Agung

(Sumber: Arsip Nasional Republik Indonesia)

Tengah

Sidang pertama Kabinet RIS di Gedung Dewan Menteri (dari kiri ke kanan) Menteri Negara, Sultan Hamid II; Menteri Dalam Negeri, Ida Anak Agung Gde Agung; Menteri Negara Dr. R. Soeparno; Menteri Kehakiman, R. Soepomo; Menteri Perburuhan, Mr. Wilopo; Menteri Pengajaran, Dr. Abu Hanifah

(Sumber: Arsip Nasional Republik Indonesia)

Bawah

Menteri Pengajaran, Dr. Abu Hanifah (kedua dari kiri) sedang berdiskusi dengan tokoh

(Sumber: Arsip Nasional Republik Indonesia).dalam Moehkardi, 1982/1983: 120)

menjadi awal karier luar negerinya. Dalam masa jabatannya itu ia diangkat sebagai anggota delegasi RI ke Konferensi UNICEF di New York. Kemudian pada bulan Oktober 1951 ia bersama dengan Ahmad Subardjo ikut menghadiri Konferensi Perdamaian di San Fransisco, Amerika Serikat. Pada tahun itu juga Abu Hanifah diangkat menjadi penasihat delegasi Indonesia ke Goodwill Mission Indonesia di Canberra, Australia. Pada tahun 1953 ia kembali menjadi anggota delegasi RI ke Perserikatan Bangsa-bangsa dan menjadi ketua delegasi sampai dengan tahun 1957. Jabatan itu, jika dibandingkan dengan masa kini, sama dengan Duta Besar Indonesia untuk PBB.

Selepas dari jabatannya sebagai Duta Besar Indonesia di PBB, Abu Hanifah beberapa kali masih terpilih menjadi anggota atau ketua delegasi RI ke beberapa forum internasional, sampai akhirnya pada tahun 1958 ia dipanggil ke istana oleh Presiden Soekarno. Dalam pertemuan itu ia mendapat tugas sebagai Duta Besar di Italia, yang dijalaninya sampai dengan tahun 1960. Selama menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Italia ia masih diberi tugas tambahan, seperti menjadi delegasi RI ke negara-negara yang baru merdeka di benua Afrika bagian barat dan Selatan; menjadi wakil pemerintah RI dalam membicarakan permasalahan dunia—seperti pemberontakan rakyat Hongaria terhadap Perdana Menteri Kadar, beberapa pemberontakan di Afrika seperti di Tunisia, Maroko, dan Aljazair; dan bahkan juga menjadi anggota delegasi di PBB dalam pembicaraan Irian Barat.

Selama kariernya ia mendapat banyak penghargaan baik dari dalam negeri maupun luar negeri, misalnya bintang kehormatan dari Vatikan dan pemerintah Italia atas jasanya menyelamatkan gereja-gereja Katholik di Sukabumi pada masa pendudukan Jepang, yaitu *Medal of the Italian Navy* dan *Medal of Merit, Holy See*, yang diserahkan oleh Paus Yohannes XXIII di Roma.[5]

Pada tahun 1961 ia kembali diangkat menjadi Duta Besar RI untuk Brazil. Masyarakat Brazil pada waktu itu umumnya belum mengenal Indonesia. Oleh karena itu, sebagai Duta Besar, ia berupaya memperkenalkan negara dan bangsa Indonesia kepada rakyat Brazil dalam berbagai kesempatan, antara lain dengan menghadiri dan berbicara dalam berbagai konferensi internasional di Chilie, Argentina, dan Guatamala. Selain itu ia juga sering menyelenggarakan gelar budaya Indonesia. Dengan bantuan staf kedutaan ia juga mengadakan bazar dan pameran hasil-hasil kerajinan Indonesia. Di samping itu ia menulis buku dengan judul *Indonesia My Country*, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Portugis (bahasa resmi Brazil) dengan judul *Indonesie Meu Paese.* Buku ini memuat sejarah singkat terbentuknya Negara Indonesia, perjuangannya, pemerintahannya, serta pembangunannya sampai sekitar tahun 1962. Upaya membina hubungan baik antara Indonesia dan Amerika Latin tidak hanya dengan Brazil saja, tetapi juga dengan negara-negara lain. Pada tahun 1963, misalnya, ia memimpin delegasi RI ke negara-negara Amerika Latin dan Amerika Tengah. Atas jasa-jasanya mengembangkan persahabatan itu ia memperoleh bintang kehormatan *Grant Cross – Cruseire de Sul* dari pemerintah Brazil. Sementara pemerintahan RI pada tahun 1966 menganugerahkan bintang Satya Lencana Karya Satya.

KARYA TULIS

Sebagai seorang dokter Abu Hanifah beruntung karena mewarisi bakat ayahnya sebagai seorang pemusik dan penulis. Bakatnya sebagai pemusik, khususnya sebagai pemain biola, pernah "dikembangkan" semasa menjadi pelajar STOVIA. Seperti telah disinggung di atas, STOVIA terkenal dengan organisasi-organisasi kesenian, seperti musik, wayang, dan gamelan, dan Abu Hanifah aktif di perkumpulan musik. Keahliannya dalam memainkan biola pernah menjadi solusi mengatasi masalah dana pendidikannya, yang berkali-kali menimpa karena wesel orang tuanya datang terkambat. Pada dasarnya keterlambatan seperti itu umum terjadi karena infrastruktur dan transportasi pada masa itu relatif masih sederhana jika di bandingkan masa kini. Untuk mengatasi masalah kekurangan dana itulah ia sering *manggung* dengan biolanya.

Abu Hanifah di masa tuanya

(Sumber foto: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia)

Adapun bakatnya dalam bidang tulis-menulis mulai dikembangkan sejak tahun 1926, tepatnya sejak aktif sebagai pemimpin redaksi (Pemred) buletin *Jong Islamieten Bond*, yang kemudian dilanjutkan menjadi Pemred majalah *Pemuda Indonesia*. Selain menulis dalam buletin dan majalahnya sendiri ia juga mengirimkan tulisannya ke majalah lain, misalnya mingguan *Indonesia Raya.* Selain tulisan-tulisan populer dan ringan, kadangkala ia menulis artikel yang serius berisi kritikan terhadap kebijakan pemerintah Hindia Belanda. Akibatnya sesekali ia harus berurusan dengan Politie Inlichten Dienst (PID).Tulisan-tulisannya yang dimuat pada tahun 1939-1940, terutama yang dimuat dalam majalah *Panji Islam* Medan, membuat dirinya terkenal atau dikenal para pembaca.

Ia juga menulis banyak artikel yang bersifat akademik dan dimuat oleh berbagai majalah berbahasa Belanda, Inggris, dan Jerman. Salah satu karya ilmiah itu adalah "Strumma Endemica in de Koeantan Districten (Midden-Sumatra)", yang merupakan hasil penelitiannya di bidang kedokteran pada masyarakat di Sumatera Tengah. Dari penelitian itu ia menemukan adanya penyebaran penyakit gondok di kalangan masyarakat di daerah-daerah pedesaan.

Tulisan lain di bidang kedokteran yang telah dibukukan antara lain *Ibu dan Anak*, yang berisi cara-cara pemeliharaan dan penjagaan kesehatan ibu yang sedang hamil dan bayinya sejak masih dalam kandungan sampai melahirkan. Buku ini dicetak untuk pertama kali pada tahun 1936. Pada dasarnya karya itu ditujukan untuk masyarakat Indonesia di daerah Sumatera Barat tempat ia pernah bertugas. Jadi semacam rasa terima kasih kepada masyarakat daerah itu. Buku tersebut sudah mengalami cetak ulang yang disertai perbaikan isinya. Pada tahun 1979, misalnya, buku ini dicetak kembali untuk kedelapan kalinya dengan mendapat tambahan satu bab, yaitu bab tentang keluarga berencana.

Buku-buku nonfiksi lain karya Abu Hanifah antara lain *Perang, Damai, dan Kolonialisme*; *Rintisan Filsafat Jilid I dan II*; *Cita-cita Perdjoangan*; *Agama dan Republik Indonesaia*; *Pahlawan-pahlawan Islam Abad 16 dan 17*; dan *Renungan Perjuangan Bangsa Dulu dan Sekarang.* Karya yang disebut terakhir, yang diterbitkan oleh Yayasan Idayu tahun 1978, merupakan ceramah ilmiahnya pada 6 Nopember 1977 di Gedung Kebangkitan Nasional, Jakarta. Isi ceramah itu menguraikan tumbuh kembang pergerakan nasional sejak Budi Utomo berdiri sampai dengan terbentuknya RIS sebagai hasil kesepakatan KMB. Sebagai sebuah renungan, pada bagian akhir tulisannya ia mengajak untuk merenungi bagaimana upaya para pendahulu dalam menegakkan negara dan bangsa Indonesia. "Kalau dilihat dari kaca mata sekarang Kabinet RIS ini penuh dengan teknokrat-teknokrat. Tetapi sebenarnya mereka juga sekaligus pemimpin-pemimpin rakyat yang berjuang benar-benar untuk kemerdekaan Bangsa dan Negara. Bukan teknokrat tok. Tetapi tidak dapat diingkari bahwa kabinet terpaksa bekerja keras. Bayangkan, mempunyai hutang jutaan gulden, tidak ada satu sen simpanan, segala ekonomi masih kucar kacir, dan ongkos-ongkos negara amat besar. Hal ini sering dilupakan benar." Hal ini juga patut direnungkan oleh yang menamakan dirinya Orde Baru, kata Abu Hanifah.

Abu Hanifah juga menuliskan buah pikirannya dalam bahasa Inggris dan diterbitkan di luar negeri, antara lain *Indonesia My Country* (vol. I dan II) yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Portugis dengan judul *Indonesia Meu Oase*. Buku ini diterbitkan pada tahun 1961 sewaktu ia menjabat sebagai duta besar RI untuk Brazil. Ia juga menerbitkan *Conflict in the Pasific* dan *Tales of Revolution*. Buku yang disebutkan terakhir ditulis sebagai reaksi terhadap buku biografi Soekarno karya Cindy Adams. Sebab, menurut pendapatnya, banyak isi cerita yang ditulis oleh Cindy Adams tidak benar, banyak mengandung kebohongan di dalamnya. Oleh karena itu, selain ada yang memujinya, tidak sedikit pula yang mengkritik dengan keras. Mereka menilai Abu Hanifah "kurang jantan" karena berani mengkritik karya Cindy Adams setelah Bung Karno yang menjadi tokohnya meninggal dunia. Salah seorang *reviewer* atau kritikus yang cukup netral dan relatif objektif terhadap buku *Tales of a Revolution* karya Abu Hanifah adalah Achdiat Kartamihardja. Menurut pendapat Achdiat, karya tersebut merupakan karya yang lebih mengikat, lebih bagus daripada karya-karya sastra yang pernah ditulis oleh Abu Hanifah, walaupun

harus diakui pula bahwa banyak kesalahan dan kecerobohan yang tidak sengaja di dalamnya, misalnya salah menuliskan kepanjangan NICA. Abu Hanifah mengatakan NICA merupakan kependekan dari *Netherlands Indies Civil Affairs*, padahal yang benar adalah *Netherlands Indies Civil Administration.* Menurut Achdiat, dengan "Tales" itu Abu Hanifah termasuk salah seorang Indonesia yang beruntung mampu membukukan dongeng-dongengnya di samping Sutan Syahrir dengan *Renungan Indonesia*-nya, T.B. Simatupang dengan *Laporan dari Banaran*-nya, dan Moh. Bondan dengan *Genderang Proklamasi*-nya.[6]

Beberapa buku fiksi juga lahir dari tangan Abu Hanifah. Berbeda dengan buku-buku kedokteran yang selalu menggunakan nama aslinya, dalam menulis cerita fiksi ia menggunakan nama samaran, El Hakim. Karya-karya itu antara lain *Dewi Reni*, *Mambang Laut*, *Taufan di atas Asia*, *Insan Kamil*, *Rokayah*, dan *Dokter Rimbu*. Dua karyanya yang disebut pertama, yang ditulis sebelum kemerdekaan, pernah dipentaskan oleh kelompok Sandiwara Maya pada masa Pendudukan Jepang. *Dokter Rimbu* berkisah tentang kehidupan seorang dokter bernama Hakam yang mengabdikan dirinya pada perkerjaan sebagai seorang dokter pada masyarakat "Rimbu" yang jauh dari kota dalam kondisi yang relatif miskin sehingga tidak mampu menyisihkan uang untuk memelihara kesehatannya, ditambah lagi dengan adat istiadat yang kolot yang masih dipegang terus oleh masyarakat tersebut. Kisah itu pada dasarnya merupakan sebagian dari pengalamannya sewaktu bertugas sebagai dokter. Buku ini ditulis pada tahun 1949 sewaktu terjadi konflik bersenjata antara kaum *republikein* dan kaum kolonialis Belanda beserta antek-anteknya mulai mereda dan diakhiri dengan KMB.

Karya-karya lain buah tangannya pada masa "pensiun" dari tugas-tugas negara berupa artikel yang disampaikannya pada acara diskusi dan di berbagai intansi. Beberapa ceramahnya diterbitkan sebagai buku kecil oleh Yayasan Gunung Agung, di antaranya *Renungan Perjuangan Bangsa Dulu dan Sekarang* (1977), *Indonesia dalam Pergeseran Peta Politik Internasional* (1975), dan *Pemuda Tidak Boleh Pernah Puas* (1979).

Abu Hanifah meninggal dunia pada hari Jum'at pukul 3.34 subuh bertepatan dengan tanggal 4 Januari 1980. Menurut keterangan keluarga ia meninggal setelah cukup lama menderita penyakit lever dan komplikasi dari pembengkakan pembuluh darah (trombosit) yang dideritanya sejak tujuh bulan terakhir. Sebelum dimakamkan di pemakaman umum Karet, jenazahnya disembahyangi di masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru. Dalam acara pemakamannya, Prof. Mochtar Kusumaatmadja menyampaikan sambutannya mewakili pemerintah Orde Baru.

ENDNOTES

1 Depdikbud, *Sejarah Sosial di Daerah Sumatera Barat.* Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek IDSN, 1983/84, hal. 18.

2 Ohorella, G.A., *Prof. Dr. Abu Hanifah DT M.E.: Karya dan Pengabdiannya.* Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek IDSN, 1985. hlm. 7.

3 Abu Hanifah, Prof. Dr. "Renungan Tentang Sumpah Pemuda", *Bunga Rampai Soempah Pemoeda.* Jakarta: Balai Pustaka, 1978, hlm. 337.

4 Kridalaksana, Harimurti, *Masa-masa Awal Bahasa Indonesia.* Depok: Lembaga Lesikologi dan leksikografi – FIBUI, cetakan ke-2, 2010, hlm. 16-17.

5 Ohorella, *Op.cit.* hlm. 88.

6 Achdiat K. Mihardja, "Tales of Revolution"-nya Abu Hanifah", *Sinar Harapan,* 9 April 1973.

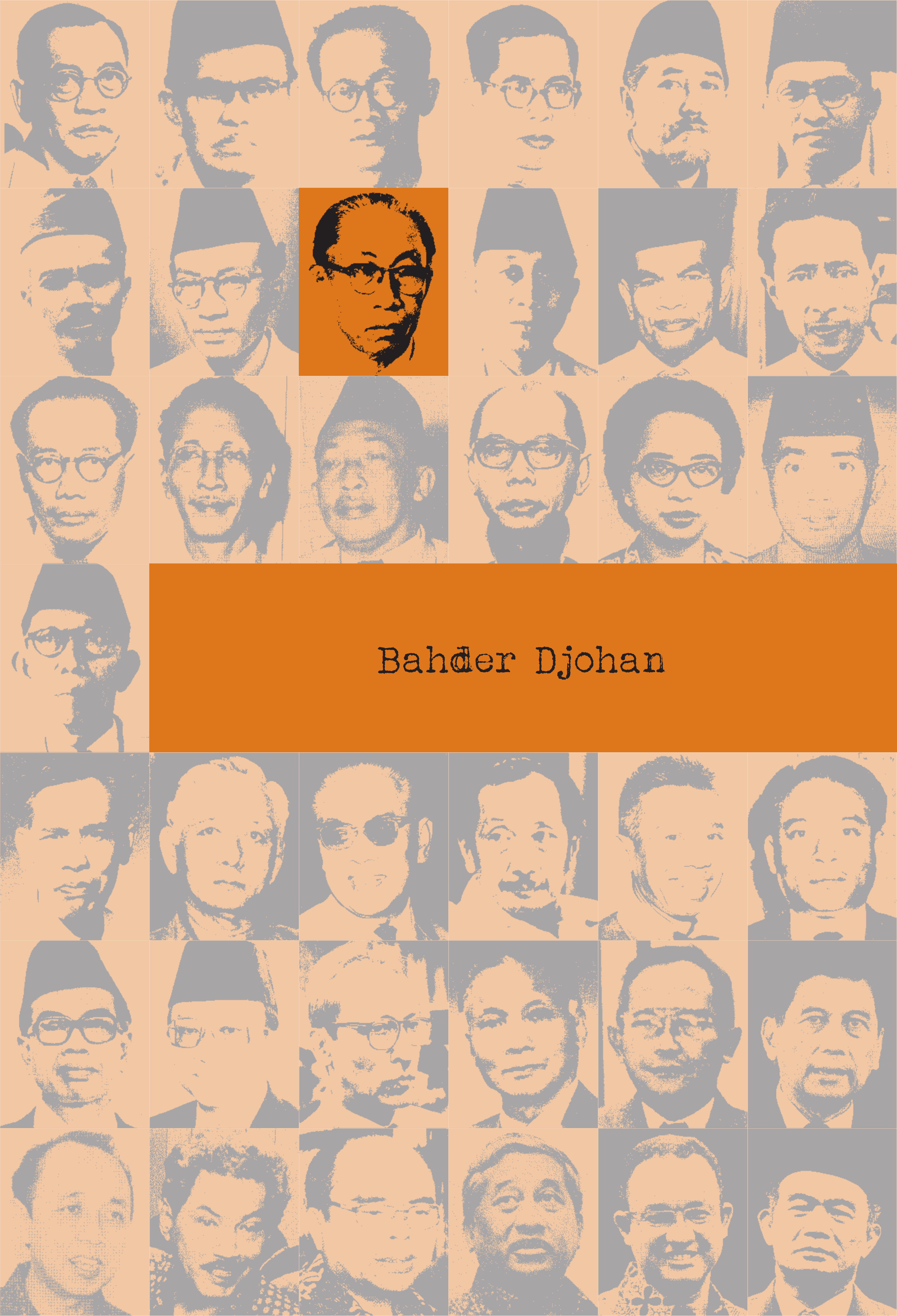

Bahder Djohan

Masa Jabatan
6 September 1950 – 27 April 1951 dan
3 April 1952 – 30 Juli 1953

Bahder Djohan

Bahder Djohan merupakan seorang dokter tamatan School Tot Opleiding Voor Indische Artsen (STOVIA) (*Indisch Art*) yang pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan (PP&K) dua periode dalam dua kabinet berbeda. Periode pertama pada masa Kabinet Natsir yang berlangsung dari tanggal 6 September 1950 sampai dengan 20 Maret 1951, sedang periode kedua pada masa Kabinet Wilopo yang berlangsung sejak 3 April 1952 sampai dengan 30 Juli 1953.

Bahder Djohan lahir di Lubuk Begalung, Padang, pada 30 Juli 1902, putra seorang jaksa terpandang di Sumatera Barat, bernama Mohammad Rapal gelar Sutan Boerhanuddin, asal Koto Gadang, Agam, Bukittinggi, Sumatera Barat. Ibunya bernama Lisah asal Padang, Sumatera Barat. Bahder Djohan merupakan anak kelima dari sepuluh bersaudara, lima laki-laki dan lima perempuan.

Sampai dengan awal abad ke-20 masih sangat sedikit kaum pribumi Indonesia yang mengenyam pendidikan formal di sekolah dengan sistem Barat. Selain segan menyekolahkan putra-putrinya ke sekolah Belanda yang "sekuler", banyak keluarga pribumi muslim lebih memilih mengirimkan putra-putrinya ke madrasah atau pesantren yang mengajarkan pendidikan agama Islam. Untuk bisa menjadi peserta didik pada sekolah-sekolah pemerintah pun ternyata tidak mudah. Ada semacam diskriminasi sehingga hanya anak-anak orang kaya, anak orang terpandang, atau anak orang berpangkat yang diterima pada sekolah-sekolah tersebut. Bahder Djohan beruntung karena orang tuanya jaksa terpandang di daerahnya, berpikir relatif modern, serta melihat sekolah pemerintah yang sekuler itu akan membawa perubahan bagi keluarganya, khususnya anak-anaknya. Oleh karena itu sewaktu umurnya menginjak 6 tahun, yang bertepatan dengan tahun 1908, ia disekolahkan ke sekolah dasar—yang pada masanya dikenal dengan nama "Sekolah Melayu"—di kota kelahiran ibunya, Padang. Sekolah dengan menggunakan sistem pengajaran Belanda atau Barat mulai diperkenalkan di Sumatera Barat pada tahun 1853 dengan didirikannya sekolah kelas dua (Sekolah Melayu) di Padang. Tiga tahun kemudian Pemerintah Hindia Belanda mendirikan sekolah serupa di Bukittinggi. Sekolah itu kemudian dikenal dengan sebutan "Sekolah Raja".

Seperti umumnya pegawai negeri yang suatu waktu pindah tempat tugas dari satu kota ke kota lainnya, demikian pula dengan Sutan Boerhanuddin, ayah Bahder Djohan. Dari Padang tugasnya sebagai jaksa dipindahkan ke Payakumbuh, lalu dipindahkan lagi ke Pariaman. Perpindahan tugas itu membuat Bahder Djohan juga terpaksa harus pindah sekolah ke Bukittinggi. Di kota yang sejuk ini memang sudah ada sekolah yang didirikan Belanda pada paruh akhir abad ke-19, yaitu Normaals School, yang merupakan sekolah pendidikan guru bagi kaum pribumi. Sekolah ini berdiri sebagai wuhud Peraturan Pemerintah yang membolehkan kaum pribumi bersekolah di sekolah-sekolah Belanda; bahkan—menurut laporan Gubernur van Swieten tanggal 12 Februari 1852—sejak tahun 1819 di kota Padang telah berdiri sekolah yang disubsidi kaum missionaris untuk, terutama, penduduk pribumi yang beragama Kristen.[1]

Pada tahun 1913 Pemerintah Hindia Belanda mendirikan I Klasse Inlandsche School atau "sekolah kelas I" di Sumatera Barat, yang masa pendidikannya selama enam tahun. Sebelumnya sudah ada Tweede Klasse Inlandshe School, yang oleh masyarakat Jawa disebut sekolah "angka loro" dengan masa pendidikan hanya tiga tahun. Pada dasarnya Sekolah Kelas Dua bertujuan untuk memberantas buta huruf dan belajar ilmu berhitung. Bahasa Belanda juga dipelajari, tetapi sebagai bahasa pengantar dan bukan sebagai bahasa pengetahuan. Adapun yang menjadi bahasa pengantar adalah bahasa daerah. Lulusan Tweede Klasse Inlandsche School alias Angka Loro dapat meneruskan pendidikan ke Schakel School (semacam sekolah persamaan) selama lima tahun. Tamatan Schakel School dinilai sederajat dengan tamatan Hollandsch Indlandsche School (HIS) yang berbahasa pengantar bahasa Belanda.

Selain sekolah Schakel School Pemerintah Hindia Belanda juga mendirikan Vervolgschool (semacam sekolah lanjutan) di beberapa daerah. Di Sumatera Barat, misalnya, didirikan Vervolgschool pada tahun 1916. Sekolah ini terutama untuk menampung para siswa tamatan Volkschool alias Sekolah Rakyat yang sederajat dengan Sekolah Kelas Dua. Volkschool didirikan di Sumatera Barat sejak tahun 1912. Para lulusannya juga dinilai sederajat dengan lulusan HIS.

Kehadiran beberapa sekolah dengan sistem Barat yang sangat baik di kota Bukittinggi membuat Bahder Djohan tetap bersekolah di kota ini meskipun pada waktu itu ayahnya sedang bertugas sebagai jaksa di Pariaman. Dengan terpaksa ia harus *indekost* (menyewa kamar berikut makan pagi, siang, dan sore) di rumah yang letaknya tidak berjauhan dengan sekolah tempatnya belajar. Untuk sekedar melepas rindu kepada keluarganya ia sering berkirim surat atau berhubungan dengan keluarga ayahnya yang bertempat tinggal di Koto Gadang, yang letaknya tidak begitu jauh dari Bukittinggi. Paling tidak dalam satu minggu ia berjumpa dengan saudara ayahnya, yaitu hari Rabu dan Sabtu yang merupakan hari pasar. Biasanya banyak penduduk Koto Gadang datang ke Bukittinggi pada hari-hari tersebut. Dengan kata lain pada hari-hari pasar itulah peluang besar diperoleh untuk bertemu dengan sanak keluarga dari pihak ayah sehingga tidak disia-siakannya.[2]

Bahder Djohan dapat dikatakan sebagai anak yang mudah bergaul dan berteman. Oleh karena itu selama belajar di Bukittinggi ia memiliki banyak teman, baik dari kalangan pelajar maupun masyarakat setempat yang menjadi tetangganya. Salah seorang temannya adalah Mohammad Hatta, seorang pemuda Minangkabau asal Bukittinggi.

Pada tahun 1915 sekolah Bahder Djohan dipindahkan ke Padang, walaupun pada waktu itu ayahnya masih bekerja di Pariaman. Oleh karena itu, seperti di Bukittinggi, ia harus kembali *indekost*. Tindakan ayahnya memindahkan Bahder Djohan ke Padang mungkin dengan pertimbangan agar Bahder Djohan dapat meneruskan pendidikan ke HIS, karena pada waktu itu di Kota Padang—selain telah ada sekolah Sekolah Rakyat (Sekolah Kelas I)—pemerintah Hindia Belanda juga mendirikan HIS dan Europeesche Lagere School (ELS). Bahasa pengantar pada kedua sekolah itu Bahasa Belanda. Yang membedakan antar keduanya adalah HIS diperuntukkan anak-anak kaum pribumi, sedangkan ELS diperuntukkan anak-anak Belanda (Eropa dan yang dipersamakan dengan orang Eropa). Adapun untuk orang-orang Cina didirikan Hollandsch Chinese School (HCS), yang juga diperbolehkan diikuti anak-anak Timur Asing lainnya.[3]

Ketika masih duduk di bangku HIS Bahder Djohan pernah ditanya oleh gurunya, seorang Belanda, tentang keinginannya setelah menamatkan sekolah. Dengan spontan ia menjawab ingin menjadi seorang geolog. Jawaban itu ditanggapi oleh guru Belandanya dengan nada cemooh, "Masa seorang pribumi akan menjadi seorang geolog." Cemoohan itu sempat membuat darah mudanya mendidih, karena sangat merendahkan martabat kaum pribumi. Ia berhasil meredam kemarahannya dan bertekad menyelesaikan pendidikannya dengan cepat agar dapat membuktikan bahwa orang pribumi pun dapat menjadi seorang geolog kalau diperjuangkan dengan penuh semangat.

Pada tahun 1917 Bahder Djohan berhasil menyelesaikan HIS dan meneruskan ke Meer Uitgebreid Lagere Onderwijs (MULO), juga di Padang. Di MULO inilah Bahder Djohan bertemu kembali dengan sahabatnya semasa di Bukittinggi, Mohammad Hatta. Selain sebagai teman sekolah, Bahder Djohan dan Mohammad Hatta mempunyai hobi yang sama, yang membuat keduanya bertambah akrab, yakni sepak bola. Keduanya bernaung dalam perkumpulan sepakbola yang sama pula, yaitu perkumpulan sepak bola "Swallow". Yang menjadi anggota perkumpulan ini hampir semuanya murid MULO Padang. Kadangkala perkumpulan ini melakukan pertandingan dengan perkumpulan sepak bola dari kota lain, seperti perkumpulan sepak bola Sekolah Raja Bukittinggi.[4]

Hobi lain yang membuat Bahder Djohan semakin akrab dengan Hatta adalah masalah agama. Keduanya senang mempelajari/mengaji Al-Quran. Mereka mengikuti pelajaran agama Islam di MULO secara intensif. Sewaktu di Bukittinggi ia mengikuti pelajaran membaca/mengaji Al-Quran, walaupun sifatnya masih "ikut-ikutan" orang lain. Secara kebetulan masuknya pelajaran agama dalam kurikulum MULO merupakan cita-cita yang lama dimimpikan oleh orang-orang tua dan tokoh masyarakat Padang, seperti Taher Marah Sutan dari Sarekat Usaha. Sekitar delapan bulan Taher Marah Sutan melobi para pejabat terkait agar memasukkan pelajaran agama ke dalam kurikulum; tidak terbatas pada agama Islam, tetapi juga agama lain seperti Katholik dan Protestan. Perjuangan Taher Marah Sutan bersama Sarekat Usaha berhasil. Pada pertengahan tahun 1918 pemerintah memberi kesempataan murid-murid MULO Padang mempelajari agama Islam yang diberikan satu jam pelajaran dalam seminggu (menurut kepercayaan masing-masing) di luar tanggung jawab pemimpin sekolah.[5] Guru agama Islam waktu itu adalah Haji Abdullah Ahmad. Sebagai catatan, Haji Abdullah Ahmad merupakan ulama Islam reformis terkemuka di Minangkabau serta pendiri sekolah Adabiah yang mengadaptasi model sekolah Belanda.

Pengaruh pelajaran agama pada Bahder Djohan tampak pada praktik keagamaannya. Sejak di MULO ia lebih tekun mempelajari agama serta mempraktikannya, terutama dalam *shalat fardu*.

Sejak Sarekat Usaha memperjuangkan pelajaran agama bagi murid-murid sekolah MULO banyak kaum muda tertarik terhadap kegiatan Sarekat Usaha. Kantor Sarekat Usaha pun menjadi pusat pertemuan antara orang terkemuka dan kaum cerdik pandai di Padang. Atas bantuan Taher Marah Sutan pula pada bulan Januari 1918 Nazir Dt. Pamuncak yang datang dari Jakarta (Batavia) sebagai utusan Jong Soematranen Bond (JSB) berhasil mendirikan cabang JSB di kota Padang. Sementara itu Bahder Djohan dan Mohammad Hatta yang sering berhubungan dengan Sarekat Usaha ikut pula terlibat dalam pendirian cabang JSB tersebut. Bahder Djohan terpilih sebagai sekretaris, sementara Hatta terpilih sebagai bendahara. Pengurus lainnya adalah Anas Munaf sebagai Ketua, Ainsyah Yahya dan Malik Hitam sebagai komisaris.[6]

Kegiatan dalam JSB tidak mengurangi atau menghambat tugas utamanya sebagai seorang pelajar. Bahder Djohan mampu membagi waktu sehari-hari dengan baik. Ketika mempelajari dan mengkaji pelajaran-pelajaran yang diperoleh dari sekolah tidak terkurangi oleh kegiatan hobi main sepak bola dan mengaji Al-Quran, serta tidak terganggu pula oleh kegiatannya sebagai pengurus JSB. Kemampuan itu mungkin karena ia sudah terbiasa hidup mandiri.

Pada tahun 1918, ketika sedang menunggu pengumuman kenaikan kelas MULO dari kelas-2 ke kelas-3, Bahder Djohan menerima tawaran masuk STOVIA di Jakarta. Semula ia ingin menyelesaikan MULO lebih dulu, namun peluang itu terlalu berharga untuk disingkirkan begitu saja hanya demi memperoleh sertifikat atau ijazah MULO. Oleh karena itu ia menerima tawaran tersebut. Dengan demikian ia harus menyerahkan jabatannya sebagai sekretaris JSB cabang Padang. Dalam waktu bersamaan Anas Munaf selaku ketua cabang JSB juga harus meletakkan jabatan sebagai ketua JSB cabang Padang karena juga akan melanjutkan pendidikan ke STOVIA. Dengan kepindahan kedua pimpinan itu JSB cabang Padang melakukan pemilihan kembali pimpinan dan memilih Hussein sebagai ketua dan Mohammad Hatta sebagai sekretaris.

Setelah menyelesaikan semua keperluan yang harus dibawa ke Jakarta, pada awal tahun 1919 Bahder Djohan berangkat ke Jakarta. Berpisah kembali dengan kedua orang tua tidak membuatnya gundah gulana karena sejak duduk di bangku HIS ia sudah sering berpisah dengan keluarganya. Berbeda dengan di HIS dan MULO yang mengharuskannya *indekost*, sebagai pelajar STOVIA ia tidak perlu mencari tempat indekosan karena setiap siswa STOVIA diasramakan. Asrama tersebut berada di dalam komplek STOVIA. Ia juga tidak perlu mencari perabotan untuk tidur dan masak, karena semuanya sudah dipersiapkan pihak asrama.

Sekedar untuk mengingatkan kembali STOVIA pada dasarnya merupakan peningkatan dari suatu "sekolah" kesehatan yang sudah berdiri sejak tahun 1850, yaitu sekolah *paramedic* yang disebut "Sekolah Dokter Djawa". Pada awalnya sekolah ini dipersiapkan untuk mendidik para calon tenaga medis dari kaum pribumi dalam rangka membantu Dinas Kesehatan Tentara Kerajaan Belanda mengatasi epidemi beberapa jenis penyakit di Jawa, khususnya epidemi penyakit cacar. Meningkatnya kebutuhan tenaga medis membuat sistem Pendidikan Sekolah Dokter Djawa pun mengalami perubahan, sampai akhirnya diputuskan untuk menutupnya dan diganti oleh STOVIA. Pihak yang berjasa dalam mencarikan dana guna membangun gedung STOVIA adalah Dr. H.F. Roll. Ia berhasil mengumpulkan dana dari para pengusaha swasta sebesar f 178.000 (seratus tujuhpuluh delapanribu gulden).

Pada tahun 1919 pemerintah Hindia Belanda membuat Gedung STOVIA baru di daerah Salemba. Pembangunan tahap pertama selesai pada tahun 1920 dan pembangunan baru selesai seluruhnya pada tahun 1926, sehingga semua kegiatan pembelajaran sepenuhnya pindah ke Salemba. Gedung lama yang beralamat di Hospitaalweg (sekarang Jl. Dr. Abdul Rahman Saleh 26) kemudian digunakan untuk MULO. Klinik dan Pendidikan klinik juga dipindahkan ke Centrale Burgerlijke Ziekenhuis (CBZ) yang menghadap jalan Oranje Boulevaard (sekarang Jalan Diponegoro). Sejalan dengan pembangunan Gedung Pendidikan STOVIA di Salemba pada tahun 1923 kurikulum pendidikannya juga mengalami perubahan, antara lain diperkenalkannya sistem ujian semester. Mata pelajaran klinis waktunya diperpanjang setengah tahun dengan menambahkannya pada tingkat persiapan. Kedudukan para dosen klinis yang bekerja di rumah sakit diatur secara resmi.

Gedung STOVIA kemudian menjadi monumental dalam sejarah perkembangan bangsa Indonesia, karena bukan saja banyak tokoh pergerakan nasional lahir dari STOVIA tetapi juga di Gedung STOVIA ini beberapa organisasi pemuda didirikan, seperti Boedi Oetomo (20 Mei 1908), Tri Koro Dharmo (7 Maret 1915), dan Jong Soematranen Bond (9 Desember 1917).

Seperti telah disinggung di atas, Bahder Djohan mulai menginjakkan kaki di komplek perguruan STOVIA pada tahun 1919. Tidak sulit baginya menyesuaikan gaya hidup dengan situasi kehidupan pendidikan dan asrama STOVIA. Apalagi hubungan antar pelajar kaum pribumi dari berbagai daerah dan etnik relatif longgar dan akrab sehingga mempermudah untuk menyambung tali persahabatan. Mereka umumnya merasa berada dalam satu keluarga besar. Apalagi adanya perasaan senasib, yang tentu saja berbeda dengan orang-orang Belanda atau Indo, mendorong mereka masuk ke dalam suatu organisasi perjuangan, seperti Jong Java, JSB, dan organisasi pemuda lainnya.

Bahder Djohan kembali aktif dalam JSB Jakarta, bahkan pada tahun 1919 ia dipercaya oleh organisasi itu menghadiri Kongres Nasional JSB pertama pada bulan Juni 1919 di Jakarta. Salah satu agenda kongres pada waktu itu adalah memilih pengurus baru bagi Pengurus Besar JSB. Hasilnya, Amir terpilih sebagai ketua, Bahder Djohan sebagai sekretaris, dan Mohammad Hatta sebagai bendahara.

Rupanya kegiatan JSB kembali mempertemukan Bahder Djohan dengan Mohammad Hatta.[7] Keduanya menjadi semakin akrab setelah Hatta pindah ke Jakarta. Tiap Sabtu sore Hatta datang bertandang ke asrama STOVIA dengan naik sepeda ontelnya untuk kemudian berjalan kaki bersama ke Pasar Baru atau ke Senen. Kadang-kadang Amir, yang menjadi Ketua PB JSB, juga ikut bergabung berjalan bersama atau nonton bioskop. Sambil makan atau sekedar *ngopi* di satu kedai di wilayah Senen seringkali mereka mendiskusikan atau bertukar pikiran tentang berbagai kehidupan sosial-ekonomi dan politik, terutama nasib kaum pribumi. Sebagai pelajar STOVIA, Bahder Djohan ternyata sangat tertarik pada masalah-masalah kebudayaan, sedangkan Hatta yang mempelajari ekonomi tertarik pada masalah politik, khususnya politik kebangsaan.

Pada tahun 1921 Mohammad Hatta berangkat ke negeri Belanda untuk meneruskan pendidikan, yang membuat Bahder Djohan merasa sedikit kehilangan teman berbincang dan berdiskusi. Namun

pengalaman hidup yang mandiri semasa di HIS dan MULO membuatnya tidak hanyut dalam perasaan. Rasa rindu kepada teman akrabnya itu dijadikan motivasi untuk lebih giat memajukan JSB. Apalagi komunikasi dengan Hatta tidak putus sama sekali walaupun temannya itu berada di negeri Belanda. Sesekali datang surat Hatta atau artikel Hatta tentang ekonomi dan perekonomian sampai ke tangannya untuk dimuatkan pada media massa di Indonesia.[8] Faktor ini pula yang membuat Bahder Djohan secara sadar memasuki dunia politik pergerakan yang mengandung risiko dalam suatu waktu ia akan kehilangan atau terampas kebebasannya.

Kegiatan Bahder Djohan dalam organisasi dan pergerakan nasional, khususnya pergerakan pemuda, semakin meningkat pasca kepergian Hatta ke negeri Belanda. Sebagai salah satu Pengurus Besar JSB ia ikut memprakarsai penyatuan semua organisasi kepemudaan guna tercapainya persatuan Indonesia. Seperti sudah banyak diungkapan dalam karya-karya sejarah akademik, para pemimpin organisasi pemuda akhirnya sepakat untuk menyelenggarakan "kerapatan besar pemuda", yang kemudian terkenal dengan sebutan Kongres Pemuda yang untuk pertama kali diselenggarakan pada 30 April–2 Mei 1926 di Jakarta. Hampir seluruh organisasi pemuda ikut terlibat dalam kongres tersebut, seperti Jong Java, JSB, Jong Ambon, Sekar Rukun, Jong Islamieten Bond, Studeerende Minahasaers, Jong Bataks Bond, dan Pemuda Kaum Theosofi.

Bertindak sebagai pengundang, suatu kepanitiaan yang terdiri dari beberapa pengurus organisasi pemuda yang dipimpin oleh Muhammad Thabrani sebagai ketua dan Jamaluddin sebagai sekretaris. Adapun Bahder Djohan duduk sebagai pembantu bersama Sanusi Pane, Paul Pinotoan, Hamami, Sabarani, dan Yan Toule Saulehuwly. Dalam kongres pemuda yang pertama ini Bahder Djohan menyampaikan pidatonya dengan judul "*De Positie van de Vrouw in de Indonesische Samenleving*" (Kedudukan kaum wanita dalam Masyarakat Indonesia). Tulisannya itu ternyata mendapat respon negatif dari kalangan pemerintah Hindia Belanda sehingga dilarang beredar.

Bukan hanya Bahder Djohan yang menyampaikan pidato dalam bahasa Belanda. Hampir semua menyampaikan pidato dalam bahasa Belanda karena bahasa Belandalah yang digunakan sebagai bahasa pengantar, termasuk dalam mendiskusikan bahasa apa yang akan dijadikan sebagai bahasa persatuan: bahasa Jawa atau bahasa Melayu. Meskipun menggunakan bahasa Belanda, tetapi semangat untuk mencapai persatuan Indonesia dihembuskan dengan kuat, bahkan sampai Indonesia merdeka. Kongres Pemuda I dapat dikatakan memberikan dasar kuat pada lahirnya Sumpah Pemuda yang dideklarasikan pada Kongres Pemuda II dua tahun kemudian, karena dalam kongres pertama dirumuskan "ikrar pemuda" yang kelak menjadi "sumpah pemuda". Pada kongres pertama ini pula dilahirkan "bahasa Indonesia" sebagai bahasa persatuan, menggantikan bahasa Melayu yang semula menjadi kandidat kuat sebagai bahasa persatuan Indonesia dan sudah masuk dalam rumusan Ikrar Pemuda yang disusun oleh Muhammad Yamin. Ide "bahasa Indonesia" berasal dari Muhammad Thabrani, Ketua Kongres Pemuda I, yang kemudian mendapat dukungan kuat dari Sanusi Pane.[9] Namun Ikrar Pemuda akhirnya tidak dideklarasikan pada akhir kongres itu untuk memberi kesempatan kepada Muhammad Yamin mempelajarinya dan dibicarakan dalam kongres pemuda yang akan datang.

Pada tanggal 12 November 1927 Barder Djohan dapat membuktikan bahwa aktivitasnya dalam organisasi pemuda dan pergerakan nasional tidak mengganggu masa pendidikannya di STOVIA. Pada tanggal itu ia menerima gelar Indische Arts sebagai bukti berakhirnya masa pendidikan di STOVIA dengan baik.

MENJADI PEGAWAI PEMERINTAH

Setelah menjadi dokter, Bahder Djohan diterima bekerja sebagai pegawai pemerintah dan ditempatkan di rumah umum sakit pusat (RSUP), Centrale Burgerlijke Ziekenhuis (CBZ). Rumah sakit itu tidak

asing baginya karena banyak praktik klinis semasa sekolah dilakukan di rumah sakit itu; apalagi letak gedungnya tidak jauh dari tempatnya menuntut ilmu. CBZ sekarang lebih dikenal dengan nama Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM). Selama bekerja di rumah sakit itu ia menjumpai kenyataan bahwa bagaimana pun tinggi pendidikan kaum pribumi, nilainya di kalangan orang Belanda hanya setengah dari orang Belanda. Hal ini terbukti dari gaji yang diterimanya per bulan hanya 250 gulden, sementara itu teman sekelasnya yang orang Belanda menerima gaji 500 gulden per bulan.

Perlakuan diskriminatif ini secara langsung semakin memperteguh semangat Bahder Djohan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.[10] Apalagi selama bekerja di rumah sakit itu ia sering diejek oleh rekan-rekan sekerjanya yang orang Belanda. Tentu saja ia pun mengalami hal-hal yang menyenangkan, antara lain pujian-pujian yang disampaikan oleh Prof. De Langen atas hasil kerjanya yang baik.

Setelah Kongres Pemuda II mendeklarasikan Sumpah Pemuda maka sebutan untuk Indische Arts berubah menjadi Indonesische Arts. Demikian pula perkumpulan para dokter kaum pribumi ikut berubah namanya menjadi Vereeniging van Indonesische Geneeskundigen (VIG). Bahder Djohan termasuk salah satu aktivis VIG dan sejak tahun 1929 terpilih menjadi sekretaris, yang dijabatnya sampai tahun 1939. Meskipun ia bekerja di lembaga pemerintah, namun hal itu tidak menjadi halangan baginya untuk tetap memperjuangan nasib bangsanya, antara lain melalui VIG. Melalui organisasi itu ia menuntut persamaan dan perlakuan antara dokter bangsa Indonesia dan bangsa Belanda atas dasar kompetensi yang tertuang dalam diploma dan pengalaman yang dimilikinya. Hal tersebut diperjuangkan bukan karena jumlah uangnya, tapi sikap diskriminatif dinilainya sebagai satu penghinaan yang sangat merendahkan derajat bangsa Indonesia.

Perjuangan VIG tidak hanya dalam masalah gaji, tetapi juga dalam perlakuan lain yang juga dinilai diskriminatif. Pada waktu itu dunia kedokteran menerbitkan majalah kedokteran bernama *Geneeskundige Tijdschrijt van Nederlandsch Indië*. Dokter Indonesia boleh berlangganan hanya sebagai anggota luar biasa. Peraturan ini dinilai diskriminatif oleh Bahder Djohan. Sebagai sekretaris VIG ia menuntut agar peraturan itu dicabut dengan catatan kalau tuntutan itu tidak dikabulkan maka para dokter bangsa Indonesia akan mengundurkan diri secara serentak dari keanggotaan dan keterikatannya dengan majalah tersebut. Akhirnya pemerintah mengabulkan tuntutan itu dan mencabut peraturan diskriminatif itu.

Sebagai mantan aktivis kongres pemuda, Bahder Djohan berupaya menyosialisasikan penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan para dokter bangsa Indonesia. Upaya itu akhirnya menunjukkan hasil sebagaimana terungkap, antara lain, dalam Kongres Perkumpulan dokter Indonesia yang diselenggarakan pada tahun 1939 di Surakarta. Dokter Gularso menyampaikan prasarannya dalam bahasa Indonesia. Kejadian ini mendorong banyak dokter Indonesia yang menjadi anggota perkumpulan itu mulai menggunakan bahasa Indonesia di bidang kedokteran.

Karena kesibukan di dunia kedokteran sekaligus dunia politik mungkin membuat Bahder Djohan tidak sempat memikirkan masalah pernikahan. Baru setelah umur menginjak 28 tahun, dan merasa sudah memiliki sedikit tabungan, ia mengutarakan keinginannya untuk hidup berumah tangga. Ia memilih sendiri calon istrinya. Gadis pilihannya masih berasal dari suku Minangkabau, namun tidak berasal dari kampung ayahnya ataupun kampung ibunya, melainkan dari kampung yang relatif jauh dari Padang atau Koto Gadang, yaitu dari Talawi, Sawahlunto, yang terkenal dengan tambang batubaranya. Gadis pilihannya bernama Siti Zairi Yaman, yang bekerja sebagai guru di Padang, yang ternyata keponakan Muhammad Yamin. Pernikahan diselenggarakan pada tanggal 2 Mei 1930 di Padang. Setelah menikah ia mendapat gelar "Marah Besar". Tak lama setelah itu ia memboyong istrinya ke Jakarta. Dari perkawinannya ia dikaruniai seorang putri yang diberi nama Ilya Waleida dengan panggilan "Tita".

Setelah berumah tangga kariernya sebagai dokter terus menanjak. Pengetahuannya pun semakin dalam dan luas. Pada tahun 1941 Bahder Djohan dipindahkan tugas ke Semarang. Ia diangkat menjadi Kepala Bagian Wanita dan Anak. Pada waktu itu ia sedang menyusun disertasi dan siap mempromosikannya untuk mencapai gelar akademik tertinggi. Akan tetapi niat itu tidak kesampaian karena Jepang masuk ke Indonesia dan membekukan semua kegitan sekolah seperti halnya membubarkan organisasi-oraganisasi politik dan masyarakat yang ada pada waktu itu. Namun karena kebutuhan tenaga medis guna mendukung politik perang Jepang pada tanggal 1 April 1943 sekolah kedokteran diaktifkan kembali dengan nama Ika Daigaku. Bahder Djohan ditarik menjadi salah seorang tenaga pengajar dengan pangkat Asisten Professor.

Walaupun menjadi asisten professor bukan berarti ia mendapat keistimewaan dari pemerintah pendudukan Jepang. Ia bersama beberapa tenaga dosen lain bahkan dicurigai oleh pemerintah pendudukan Jepang sebagai orang yang menghasut para mahasiswa, sehingga ia sempat ditangkap. Setelah diinterogasi secara intensif, akhirnya ia dibebaskan.

Sebagai aktivis pergerakan nasional Indonesia ia mempunyai perhatian tersendiri kepada bangsa Jepang, antara lain "jasanya" dalam membantu menyosialisasikan atau menyebarluaskan penggunaan bahasa Indonesia. Pemerintah Pendudukan Jepang melarang penggunaan bahasa lain selain bahasa Indonesia dan bahasa Jepang sebagai bahasa resmi di Indonesia. Dengan demikian bahasa Indonesia yang dicita-citakan menjadi bahasa persatuan bisa terwujud lebih cepat dari yang diperkirakannya.

Dalam situasi seperti itu beberapa tokoh Indonesia mendesak untuk mendirikan suatu komisi penyempurnaan bahasa Indonesia. Pihak Jepang terpaksa memfasilitasi hasrat bangsa Indonesia untuk menyempurnakan dan memngembangkan bahasa persatuannya. Akhirnya pada 20 Oktober 1943 didirikan Komisi Penyempurnaan Bahasa Indonesia. Tugas pokok komisi ini menentukan terminologi atau peristilahan serta menyusun tata bahasa normatif dan menentukan kata yang umum bagi bahasa Indonesia. Komisi ini dipimpin oleh Kepala Kantor Pengajaran Jepang yang mendapat bantuan dari beberapa tokoh politik dan sastra, seperti Soekarno, Hatta, Suwandi, St. Takdir Alisjahbana, dan Abas St Pamuntjak. Komisi kemudian memberi kesempatan kepada setiap disiplin ilmu untuk mengumpulkan istilah Indonesia dalam bidang ilmu bersangkutan. Para dokter Indonesia juga membentuk kepanitiaan guna mengumpulkan istilah-istilah kesehatan/kedokteran. Panitia ini diketuai oleh dr. Aulia, Bahder Djohan sebagai wakil ketua, serta dr. Ahmad Ramali dan Abas St. Pamuntjak (ahli bahasa) sebagai anggota. Bahder Djohan berhasil mengumpulkan 3.000 istilah kedokteran dalam bahasa Indonesia.[11]

Dalam kasus bahasa Indonesia, Jepang memang terbukti membantu perkembangan dan perluasan pemakaiannya. Akan tetapi dalam dunia kedokteran, pemerintah pendudukan Jepang mengorbankan para ahli kedokteran Indonesia akibat kelalaian seorang dokter Jepang dalam kasus pemberantasan penyakit tetanus yang pada tahun 1944 menyerang lebih dari 1.000 orang *romusha.* Dari hasil uji labolatorium terungkap bahwa sebelum terjangkit penyakit tetanus para *romusha* disuntik dengan vaksin kolera, tipus, dan disentri yang mengandung toksin tetanus. Polisi militer Jepang menangkap hampir seluruh karyawan Labolatorium Eijkman, Jakarta. Dari sekian banyak orang yang ditangkap tersebut di antaranya Prof. Dr. Ahmad Muchtar (direktur Lab. Eijkman) dan tiga dokter lainnya, yaitu Juhana Wiradikarta, MA Hanafiah, dan Sutarman. Prof. Ahmad Muchtar ditetapkan sebagai orang yang harus bertanggung jawab atas epidemi tetanus yang menyerang para *romusha.*

Bahder Djohan mengetahui banyak mengenai kasus itu karena sebelumnya ia diperintahkan oleh Prof. Dr. Tamija (orang Jepang), yang waktu itu menjabat sebagai Direktur CBZ, untuk memeriksa keadaan perkampungan *romusha* di Klender. Pada waktu itu diperkirakan puluhan orang *romusha* mengidap penyakit meningitis (radang selaput otak). Untuk memastikan kebenarannya, Bahder Djohan meminta bantuan pihak Labolatorium Eijkman mengetes "fungsi lumbal" (tusukan tulang belakang).

Rombongan dokter Bahder Djohan diperkuat oleh dokter Aulia dan seorang dokter tentara Jepang, Kapten dr. Hirosato Nakamura. Berdasarkan hasil penelitian dan uji laboratorium disimpulkan bahwa para *romusha* itu tidak mengidap penyakit meningitis melainkan penyakit tetanus. Mereka diketahui bahwa seminggu sebelumnya mendapat suntikan vaksin tipus-kolera-disentri produk Institut Pasteur. Ketika Bahder Djohan meminta agar bekas botol vaksin kolera-disentri-tipus dikirimkan kepadanya, pemerintah Jepang menolak. Akhirnya upaya penyelamatan jiwa para *romusha* mengalami kegagalan. Sekitar 90 *romusha* menemui ajal.

Untuk memastikan penyebab kematian itu tetanus, Bahder Djohan melakukan sayatan pada bekas luka suntikan vaksin pada beberapa mayat *romusha*, lalu dikirim ke Labolatorium Eijkman pimpinan Prof. Dr. Ahmad Muchtar. Beberapa hari kemudian Prof. Ahmad Muchtar ditangkap dan akhirnya dihukum mati dengan tuduhan memberikan vaksin tercemar tetanus kepada para *romusha*. Bahder Djohan mengetahui bahwa kapten Jepang yang memperkuat timnya keliru mengadakan percobaan, menambahkan *tetanus anektosin* ke dalam vaksin kolera-tipus dan disentri, yang kemudian disuntikan kepada para *romusha* tersebut.

Pemerintah pendudukan Jepang sengaja mengorbankan para dokter Indonesia demi menjaga dunia kedokteran Jepang di dunia internasional. Pihak Jepang juga berupaya membentuk opini agar masyarakat Indonesia yakin bahwa Prof. Ahmad Muchtar memang patut dihukum mati. Selain telah menjadi agen musuh (Sekutu) ia membunuh ribuan *romusha* yang *nota bene* adalah bangsa Indonesia. Beberapa tokoh nasional, antara lain Ir. Soekarno, juga ikut terpengaruh sehingga sempat mengatakan bahwa Ahmad Muchtar memang harus dihukum mati karena telah membunuh ribuan orang Indonesia.

MEMBANTU PEJUANG KEMERDEKAAN INDONESIA

Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu tanpa syarat, bangsa Indonesia memanfaatkan peluang yang ada untuk memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Bahder Djohan ikut hadir dalam pembacaan proklamasi kemerdekaan yang sangat bersejarah itu. Sewaktu Soekarno-Hatta membentuk kabinet, yang kemudian dikenal dengan sebutan "Kabinet Bucho", Bahder Djohan tidak termasuk di dalamnya. Ia tidak masuk dalam pemerintahan, namun tidak berarti ia lepas begitu saja dari pergolakan politik yang memuncak pasca proklamasi kemerdekaan. Sejak awal September 1945 Bahder Djohan bersama beberapa dokter lain sibuk membantu Menteri Kesehatan (Menkes) dr. Boentaran membentuk Palang Merah Indonesia (PMI). Pembentukan PMI itu merupakan perintah langsung Presiden RI Soekarno kepada Menkes dr. Boentaran.

Ide pembentukan PMI pada dasarnya sudah muncul pada tahun 1932 sewaktu wilayah Indonesia disebut Hindia Belanda. Pelopornya adalah Dr. R.C.L. Senduk dan Dr. Bahder Djohan. Mereka menyusun rancangan pembentukan PMI, yang kemudian diajukan ke dalam sidang Konferensi Nederlandsche Roode Kruis Afdeeling Indië (NERKAI–Palang Merah Hindia Belanda) pada tahun 1940. Namun usulan itu ditolak. Kemudian sewaktu wilayah kepulauan Indonesia diduduki Jepang, Dr. Senduk dan Dr. Bahder Djohan kembali mengajukan rancangan pembentukan PMI kepada pemerintah pendudukan Jepang. Rancangan itu juga ditolak. Rancangan itu kembali dipelajari sewaktu mereka dimasukkan ke dalam Tim pembentukan PMI oleh Menkes dr. Boentaran. Tim Pembentukan PMI itu antara lain Dr. R.C.L. Senduk sebagai ketua, Dr. Bahder Djohan sebagai sekretaris (penulis), serta dr. R. M. Djoehana Wiradikarta, dr. Marzuki, dan dr. Sitanala sebagai anggota. Tepat sebulan sesudah proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu pada 17 September 1945, PMI resmi berdiri. Tanggal pendirian PMI tersebut kemudian diperingati oleh bangsa Indonesia sebagai hari PMI.

Sejak diresmikan PMI langsung menjalankan fungsi dan tugas, yakni merawat dan mengobati para korban peperangan, yang sebagian besar bangsa Indonesia. Dalam waktu tiga bulan saja sudah ada

sekitar 400 orang pasien korban konflik bersenjata antara pihak RI (*republikein*) dan pihak Sekutu/NICA yang dirawat CBZ. Bangsal tempat merawat korban peperangan itu kemudian dinamai "bangsal pahlawan".[12]

Sewaktu pusat pemerintahan RI dipindahkan ke Yogyakarta pada bulan Januari 1946, Bahder Djohan sebagai pimpinan PMI Pusat tetap tinggal di Jakarta; bahkan kemudian ia diangkat menjadi Ketua PMI Jakarta. Sesuai dengan konvensi Jenewa Tahun 1949, Palang Merah (baik internasional maupun nasional) merupakan lembaga kemanusiaan yang netral dan tak boleh diserang oleh kekuatan-kekuatan militer yang sedang berkonflik. Oleh karena itu Pemerintah NICA juga memberikan bantuan dan fasilitas kepada PMI. Hal ini dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Bahder Djohan untuk kepentingan perjuangan bangsa Indonesia, antara lain dengan melatih tenaga-tenaga Indonesia menjadi perawat atau para medis untuk membantu PMI serta mengirimkan obat-obatan dan sekaligus perawat-perawat yang sudah dilatihnya ke wilayah RI untuk membantu kesehatan para pejuang Indonesia.

Sewaktu tantara NICA melancarkan agresi pada tahun 1947 dan menduduki kantor PMI Jakarta Bahder Djohan harus berjuang memindahkan kantor PMI ke RSUP yang pada waktu itu pimpinannya dijabat oleh Bahder Djohan. Sementara itu Fakultas Kedokteran–Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia terpaksa memindahkan sebagian kegiatannya ke Klaten, sedangkan sisanya—yang karena sesuatu hal tidak dapat ikut pindah—melakukan kegiatan perkuliahan di beberapa rumah dosen sesuai dengan jenis mata kuliahnya, tetapi pusat administrasinya ditempatkan di rumah Bahder Djohan di Jalan Kimia No. 9, Jakarta Pusat.[13] Sementara itu gedung Fakultas Kedokteran yang diambil alih pemerintah NICA diserahkan kepada Universiteit van Indonesië (UvI) yang membawahi beberapa fakultas, yaitu Kedokteran, Hukum, Ekonomi, dan Sastra & Filsafat.

Ketika tentara NICA kembali melancarkan agresi pada bulan Desember 1948 Bahder Djohan mendapat kabar bahwa Belanda/NICA akan mengambil alih RSUP. Ia berusaha memindahkan alat-alat penting ke rumahnya. Dalam tempo tiga jam ia berhasil memindahkan alat-alat kedokteran, obat-obatan, alat kantor, dan para pasien yang umumnya bangsa Indonesia korban peperangan ke rumahnya. Demikian pula kantor PMI Jakarta ikut pindah ke rumahnya.

MENJADI MENTERI PP&K

Pasca perang kemerdekaan, tepatnya pada masa pemerintahan Perdana Menteri Mohammad Natsir, Bahder Djohan ditunjuk sebagai Menteri PP&K. Pada kabinet sebelumnya, yakni kabinet yang dipimpin Moh. Hatta, jabatan Menteri PP&K dipercayakan kepada Sarmidi Mangunsarkoro. Kabinet Natsir dibentuk pada tanggal 6 September 1950, yang sekaligus merupakan awal kerja Bahder Djohan sebagai Menteri PP&K. Sebagai catatan, ia masuk ke dalam kabinet sebagai orang tidak berpartai atau nonpartai.

Program umum yang penting dalam Kabinet Natsir adalah 1) menggiatkan usaha mendapat keamanan dan ketenteraman, 2) melakukan konsolidasi dan penyempurnaan susunan pemerintahan, 3) menyempurnakan organisasi Angkatan Perang dan pemulihan bekas anggota tentara dan gerilya ke dalam masyarakat, 4)memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat, dan 5) mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat sebagai dasar bagi melaksanakan ekonomi nasional. Dari kelima program itu terlihat masalah pendidikan dan kebudayaan tidak mendapat tempat yang khusus atau istimewa. Bahder Djohan selaku Menteri PP&K melihat program konsolidasi dan penyempurnaan susunan pemerintahan masih relevan untuk dijadikan program kementeriannya. Hal itulah yang dilakukannya, yaitu memperbaiki susunan organisasi dengan memanfaatkan tokoh-tokoh pendidikan dan kebudayaan yang ahli di bidang masing-masing.

Terkait dengan pendidikan dan pengajaran pada masa Menteri Bahder Djohan pada dasarnya masih bertumpu pada Surat Keputusan Menteri PP&K tanggal 11 November 1947 No.154, yang kemudian disempurnakan oleh Undang-undang No. 4. Tahun 1950 yang dinamai Undang-undang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah. Undang-undang itu menyebutkan kewajiban belajar, bahwa anak-anak yang sudah berumur enam tahun berhak untuk belajar di sekolah, sedikitnya enam tahun lamanya. Adapun untuk pendidikan agama telah mendapat pengakuan dari Menteri Agama.

Dalam Keputusan Menteri awal tahun 1951 disebutkan ruang lingkup pekerjaan Kementrian PP&K antara lain sebagai berikut:

a. Menentukan corak, macam, serta isi pendidikan dan pengajaran kepada warganegara baik di dalam maupun di luar sekolah, kecuali hal-hal yang mengenai agama dan hal-hal yang diserahkan kepada kementrian atau instansi-instansi negara lainnya.
b. Menyelenggarakan, memimpin, menyokong, serta mengamat-amati semua macam pendidikan dan pengajaran yang disebutkan pada butir "a".
c. Mengamat-amati pendidikan dan pengajaran bahasa asing.
d. Menyelidiki menurut syarat-syarat ilmu pengetahuan soal-soal pendidikan dan pengajaran.
e. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi mengenai pendidikan dan pengajaran.
f. Mengikuti serta membantu perkembangan gerakan pemuda.
g. Menyelenggarakan bermacam-macam perpustakaan guna pendidikan dan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan negara.[14]

Seperti diakui Bahder Djohan bahwa dasar-dasar pendidikan dan pengajaran sebenarnya telah disusun oleh dua pendahulunya, yaitu Menteri PP&K Suwandi yang dilanjutkan oleh Menteri PP&K Abu Hanifah. Menteri Bahder Djohan hanya menyempurnakan dasar yang telah dipersiapkan oleh dua pendahulunya itu sesuai dengan kemampuan dan dana yang tersedia. Dalam kunjungannya ke berbagai daerah Bahder Djohan menyaksikan keadaan pendidikan yang realitanya masih jauh dari memuaskan. Masih banyak yang harus diperbaiki, baik sarana maupun prasarananya, namun hal-hal tersebut tidak bisa diselesaikan seuai dengan rencana karena kekurangan dana. Dana yang ada pada Kementerian PP&K pada waktu itu hanya dikeluarkan untuk hal-hal yang sangat perlu dan mendesak sifatnya.

Pada masa itu keamanan belum sepenuhnya dapat dicapai, sehingga membuat tugas kabinet (pemerintah) cukup berat. Ada dua masalah politik yang cukup berat dan harus diselesaikan oleh Kabinet Natsir. Pertama masalah Aceh. Daerah ini, yang selama perang kemerdekaan tidak diduduki oleh Sekutu atau NICA serta tetap mendukung pemerintahan RI selama masa peperangan tersebut, merasa kecewa oleh keputusan pemerintahan pusat menetapkan status wilayah ini hanya setingkat keresidenan di bawah Sumatera Utara. Aceh di bawah Gubernur militer Tengku Muhammad Daud Syah Beureu'eh tidak dapat menerima keputusan itu. Aceh menuntut untuk tetap menjadi satu provinsi. Masalah kedua adalah masalah Irian Barat, yang dalam keputusan KMB disebutkan akan diserahkan kepada Indonesia setahun kemudian, terhitung diakunya kedaulatan RIS oleh pemerintah Belanda. Hal ini menjadi tugas sekaligus beban bagi Kabinet Natsir, apalagi dalam perundingan-perundingan yang berlangsung pemerintah Belanda menunjukkan keengganannya menyerahkan Irian Barat ke tangan Indonesia.

Kabinet mendapat mosi tidak percaya dari Hadikusumo, salah satu wakil Partai Nasional Indonesia (PNI). Akibat mosi tidak percaya itu akhirnya pada tanggal 21 Maret 1951 Perdana Menteri Natsir mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno. Dengan sendirinya Bahder Djohan yang merupakan bagian dari Kabinet Natsir terpaksa harus ikut mundur pula. Dalam waktu hanya enam bulan kementerian di bawah kepemimpinannya belum dapat berbuat banyak. Jabatan Menteri PP&K kemudian diserahkan kepada Mr. Wongsonegoro, yang dipilih Perdana Menteri Sukiman menggantikan Kabinet Natsir sejak 26 April 1951.

Upacara penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Jasa Pratama oleh Pemerintah RI kepada Prof. dr. Bahder Djohan tanggal, 6 Desember 1980 yang disampaikan Menteri Kesehatan dr. Suwardjono Suryaningrat bertempat di kediaman Prof. dr. Bahder Djohan

(Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia)

Lebih kurang setahun kemudian Bahder Djohan terpilih kembali menjadi Menteri PP&K dalam Kabinet Wilopo. Kabinet ini dilantik oleh Presiden Soekarno pada tanggal 3 April 1952. Program Kabinet Wilopo mempersiapkan Pemilihan Umum, kemakmuran pendidikan rakyat, dan keamanan, sedangkan program luar negeri terutama menyelesaikan masalah Irian Barat serta menjalankan politik bebas aktif.

Jika masalah pendidikan dalam program umum Kabinet Natsir tidak begitu jelas, masalah pendidikan dalam Kabinet Wilopo mendapat perhatian relatif lebih besar dengan adanya program memakmurkan pendidikan. Bahder Djohan, yang sebelumnya pernah menjadi Menteri PP&K, sangat memahami tantangan yang harus dihadapi dalam upaya melaksanan program kabinet di bidang pendidikan dan pengajaran. Oleh karena itu ia tidak membuat perubahan dalam program, struktur, dan personalia, sebab yang menjadi tantangan dan memerlukan perhatian adalah dalam masalah pelaksanaan serta dana yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program. Upaya yang demikian gigih dilakukan oleh Bahder Djohan beserta para pembantunya mengatasi pelbagai permasalahan yang menghambat penyelenggaraan pendidikan yang baik untuk anak-anak serta tercukupinya guru yang kompeten di bidangnya akhirnya harus menyerah dengan satu kenyataan ekonomi dan politik yang melanda Indonesia pada masa itu.

Pada masa jabatannya yang kedua ada satu peristiwa cukup penting terkait dengan pendidikan dan pengajaran, yaitu masalah bahasa pengantar dalam pembelajaran, terutama di perguruan tinggi. Persoalan bahasa pengantar sebenarnya sudah muncul pada masa Menteri PP&K Wongsonegoro. Pada bulan Desember 1951 muncul surat dari Majlis Pendidikan Pengurus Besar (PB) Persatuan Guru Islam Indonesia (PGII) yang mengusulkan agar bahasa pengantar dalam perkuliahan di perguruan tinggi yang semula bahasa Belanda diganti dengan bahasa Inggris, sebab banyak mahasiswa mengalami kesulitan mengikuti perkuliahan dalam bahasa Belanda. Demikian pula dalam membaca buku-buku wajib berbahasa Belanda. Sementara itu, jika menggunakan bahasa Inggris sebagai pengantar jauh lebih mudah mengingat sejak SMP dan SMA para siswa telah belajar bahasa Inggris.[15]

Sebelum pemerintah menanggapi permohonan PB PGII, pada bulan Januari giliran Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI) mengirimkan resolusi kepada pemerintah RI. Isinya antara lain menuntut agar pemerintah secara resmi menghapuskan kewajiban menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar di perguruan tinggi, sebab kewajiban menggunakan bahasa Belanda mengakibatkan kemunduran pendidikan nasional. Secara tegas IPPI menuntut agar perkuliahan menggunakan bahasa Indonesia sebagai pengantar, melarang penggunaan bahasa Belanda di kantor-kantor, serta melarang mengajarkan bahasa Belanda di sekolah-sekolah SMA dan yang sederajat dengan SMA. Selain itu IPPI

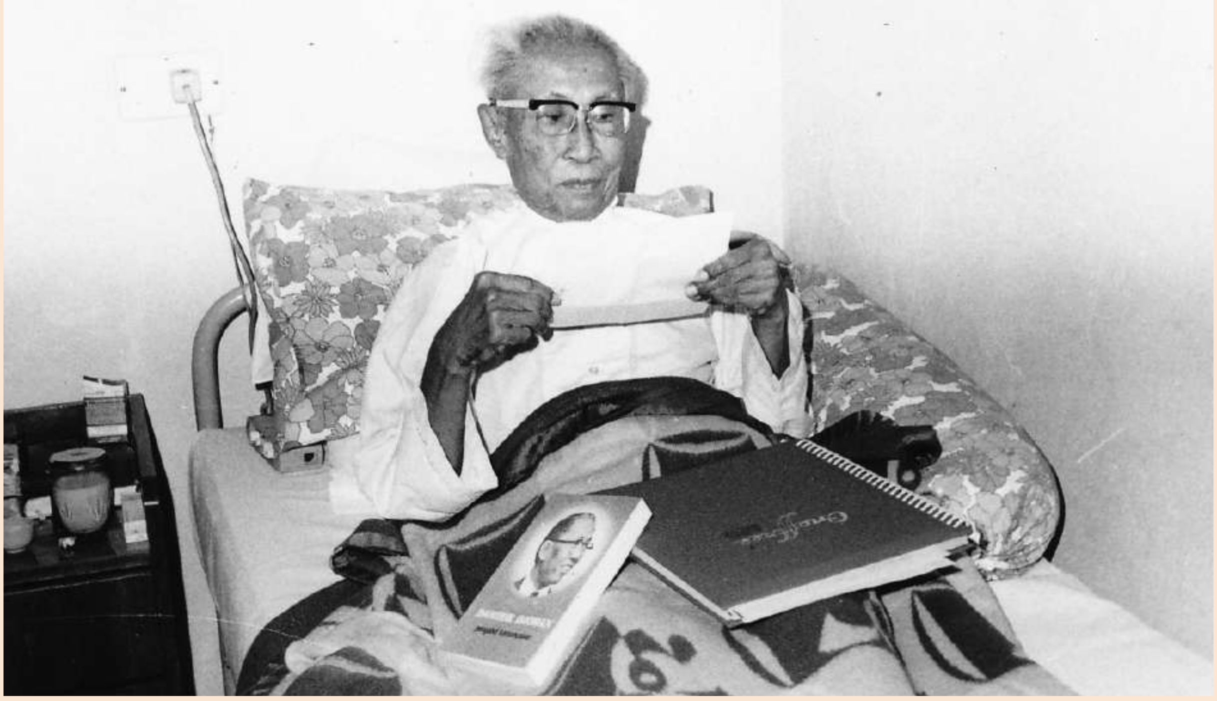

Kunjungan/ penyerahan buku "Bahder Djohan pengabdi kemanusiaan" kepada Prof. Dr. Bahder Djohan yang dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dalam rangka HUT-nya yang ke 78 tgl. 24 Juli 1980 oleh Soemarmo (Yay. Idayu), Prof. Amura (Yay. Ibnu Chaldun) dan Ali Amran (PT. Gunung Agung) dan Darsjar Rahman

(Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia)

menuntut agar pemerintah menyediakan buku-buku dalam bahasa Indonesia di perguruan tinggi serta mendirikan "Panitia Penilikan isi-isi buku pelajaran" yang diterjemahkan dari bahasa Belanda serta tidak mengangkat guru besar yang tidak dapat berbahasa Indonesia.[16]

Masalah ini tidak sempat dibahas oleh Kementrian PP&K masa Menteri Wongsonegoro karena Kabinet Sukiman tidak lama berkuasa akibat mosi tidak percaya dari DPR. Dengan demikian masalah bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar di perguruan tinggi menjadi "pekerjaan rumah" Menteri Bahder Djohan. Akhirnya Bahder Djohan mengundang para mantan Menteri PP&K dan para ahli pendidikan, bahasa, dan satra untuk berkumpul membahas dan mendiskusikan permasalahan bahasa Belanda sebagai pengantar di perguruan tinggi.

Setelah terjadi pembicaraan dan diskusi, pertemuan itu akhirnya mengajukan tiga rekomendasi kepada menteri. Pertama, pada masa kolonial, penggunaan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar mulai dari HIS/ELS, MULO, sampai tingkat perguruan tinggi, juga digunakan sebagai bahasa percakapan setiap hari, sehingga para pelajar praktis fasih berbahasa Belanda. Namun dalam kenyataannya masih ada mahasiswa yang tidak lulus ujian. Jika bahasa Belanda terus dipertahankan sebagai bahasa pengantar di perguruan tinggi, akan muncul kesukaran karena bahasa pada masa kini tidak lagi menjadi bahasa percakapan sehari-hari. Kedua, buku-buku teks dalam bahasa Belanda umumnya merupakan terbitan sebelum perang dunia. Oleh karena itu sebaiknya yang akan dijadikan buku-buku teks atau acuan yang akan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah buku-buku yang lebih mutakhir sepeti yang diterbitkan di Inggris atau Amerika Serikat. Ketiga, untuk sementara waktu, boleh saja bahasa Inggris digunakan sebagai bahasa pengantar karena bahasa Inggris praktis lebih luas penggunanya dan juga lebih mudah dipelajari daripada bahasa Belanda. Namun untuk jangka panjang sebaiknya digunakan bahasa Indonesia yang merupakan bahasa perjuangan dan bahasa persatuan. Kalau perlu, seluruh pegawai diwajibkan bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia, yang akan berpengaruh positif pula pada perkembangan kebudayaan Indonesia.[17]

Kabinet Wilopo relatif berkuasa lebih lama dibandingkan dengan kabinet-kabinet parlementer pendahulunya. Walaupun begitu, kurun waktu yang kurang 30% dari yang seharusnya membuat kabinet ini pun tidak mampu menyelesaikan program kerjanya secara baik, termasuk program kerja kementerian PP&K. Pada tanggal 2 Juni 1953 muncul mosi tidak percaya dari DPR sebagai buntut peristiwa Tanjung Morawa. Perdana Menteri Wilopo akhirnya mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno.

Setelah berhenti dari jabatan Menteri PP&K pada masa Kabinet Natsir, Bahder Djohan meneruskan hobi dalam bidang kebudayaan. Telah disebutkan di atas bahwa hobi ini sudah digemarinya semenjak

Prof. Dr. Bahder Djohan berfoto bersama keluarga

(Sumber: Perpustakaan Nasional Repuplik Indonesia)

ia aktif di JSB. Mungkin karena perhatiannya terhadap kebudayaan cukup tinggi, maka ia kemudian dipilih menjadi ketua Lembaga Kebudayaan Indonesia (LKI). Pada masa kepemimpinannya, LKI menyelenggarakan Kongres Kebudayaan ke-2 pada tanggal 6–11 Oktober 1951, yang dihadiri oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta dan Menteri PP&K Mr. Wongsonegoro.

Dalam pidato selaku Ketua LKI, Bahder Djohan mengatakan bahwa keinsyafan atas harga diri menjadi titik pangkal perjuangan kemerdekaan bangsa selama 40 tahun, pun tidak luput menjelma dalam lapangan kebudayaan. Semenjak zaman penjajahan telah timbul kesadaran dalam kepribadian manusia Indonesia. Pada Kongres Kebudayaan ke-1, kebudayaan telah ditempatkan sebagai bagian dari pembangunan negara dan masyarakat. Selanjutnya Bahder Djohan mengatakan bahwa kebudayaan adalah masalah antara hubungan manusia dan alam, antara adab dan kodrat, antara kultur dan natur, antara akal dan budi. Dalam masyarakat, peradaban merupakan penjelmaan kebudayaan. Dalam kebudayaan Indonesia masa lalu, banyak tempat yang kelihatan kabur, tetapi ada pula puncak yang disinari cahaya gemilang. Oleh karena itu LKI harus menunjukkan perhatiannya pada soal yang konkret yang ditemui oleh masyarakat Indonesia dalam perkembangan ke segala jurusan hidup. Masalah itu adalah hak pengarang, kritik seni, dan sensor film. Keputusan Kongres Kebudayaan ke-2 ternyata tidak jauh berbeda dengan isi pidato pembukaan yang disampaikan oleh Ketua LKI Bahder Djohan, yaitu:

1. mengenai hak pengarang,
2. mengenai perkembangan kesusastraan,
3. mengenai kritik seni, dan
4. mengenai sensor film, dan mengenai organisasi kebudayaan.[18]

Setelah berhenti sebagai Menteri PP&K pada Kabinet Wilopo, Bahder Djohan kembali ke profesi semula di bidang kesehatan. Pada tahun 1953 ia diangkat menjadi Direktur RSUP. Di samping itu ia juga diangkat sebagai guru besar pada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI). Pada tahun berikutnya dia diangkat menjadi Presiden (Rektor) UI, sehingga jabatan direktur pada RSUP dilepasnya. Kedudukan sebagai Presiden UI diemban tidak sampai masa jabatan berakhir. Ia melepaskan jabatan itu sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan konflik PRRI/Permesta. Ia menolak penyelesaian secara militer. Ia berusaha menemui para pejabat yang berwenang dalam masalah itu, seperti Jenderal A.H. Nasution, bahkan juga Presiden Soekarno. Namun upaya untuk bertemu tidak pernah tercapai. Karena pemerintah tetap melaksanakan penyelesaian PRRI/Permesta secara militer, maka pada bulan Februari 1958 Prof. Dr. Bahder Djohan meletakkan jabatan sebagai Presiden/Rektor UI.

Tak lama setelah meletakkan jabatan sebagai rektor, Bahder Djohan mengajukan permohonan pensiun sebagai pegawai negeri sipil. Tindakan ini mengejutkan berbagai pihak. Banyak yang tidak menyangka Bahder Djohan berani bertindak tegas memperjuangkan prinsip hidupnya. Hal ini antara lain tercermin dari beberapa komentar beberapa surat kabar, baik yang terbit di ibukota maupun di daerah. Tentu saja komentar setiap koran berbeda-beda, tergantung kekuatan politik yang ikut mewarnainya.

PENGABDIAN SETELAH PENSIUN

Sesudah pensiun dan hidup sebagai warga biasa, ia pun tidak bersedia membuka praktik dokter di rumahnya seperti umumnya para dokter waktu itu. Meskipun demikian, kalau ada orang sakit yang datang ke rumahnya meminta bantuan, dengan senang hati ia membantu. Untuk pertolongan semacam itu ia tidak mau dibayar. Sampai dengan akhir masa "Demokrasi Terpimpin" Bahder Djohan praktis hidup sederhana dengan uang pensiunnya. Baru pada tahun 1966 perusahaan Panca Niaga, yang berkantor Gedung CTC di Jalan Kramat Raya, memintanya berpraktik sebagai dokter perusahaan. Tawaran itu pun diterima dengan senang hati.

Pada akhir tahun 1968 pimpinan Universitas Ibnu Khaldun (UIK) menghubungi Bahder Djohan dan memohon kesediaannya menjadi Rektor UIK, karena rektor lama, yaitu Prof. Nasrun S.H., meninggal dunia. Setelah membicarakannya dengan seksama, Bahder Djohan menerima tawaran itu sehingga sejak tanggal 10 Maret 1969 Prof. Dr. Bahder Djohan resmi menjadi Rektor UIK. Salah satu motivasi yang mendorong ia menerima tawaran itu karena melihat kondisi perguruan tinggi Islam umumnya tertinggal oleh perguruan tinggi swasta lain. Salah satu faktor penyebabnya antara lain umumnya para pengusaha atau saudagar muslim enggan menginvestasikan atau menyedekahkan hartanya di bidang pendidikan. Untuk mengubah hal ini memerlukan waktu dan tekad yang kuat.

Upaya yang dilakukan oleh Bahder Djohan memajukan UIK selama kepemimpinannya memang tidak sia-sia. Walaupun perkembangannya tidak secepat universitas swasta Kristen atau Katholik, namun perubahan yang ada, membuat fakultas-fakultas di lingkungan UIK, kecuali fakultas kedokteran, diakui oleh Kopertis wilayah II.

Selain mengabdi di dunia pendidikan masih banyak kegiatan yang dilakukan dalam mengisi masa pensiunnya, seperti membantu Centre for Minangkabau Studies pimpinan Muchtar Naim M.A., serta menjadi *Steering Committee* Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau. Sampai akhirnya pada 8 Maret 1981 Bahder Djohan meninggal dunia di Jakarta dalam usia 78 tahun karena penyakit jantung.

ENDNOTES

1 Lihat Verbaal No.3, Tahun 1852, *ANRI*, Jakarta.

2 Safwan, Mardanas, *Por. Dr. Bahder Djohan: Karya dan Pengab diannya.* Jakarta: DepartemenPendidikan dan Kebudayaan: IDSN, 1985, hlm. 7.

3 Safwan, Mardanas dan Sutrisno Kutoyo (ed.), *Sejarah Pendidikan Daerah Sumatera Barat.* Padang: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Sumatera Barat. hlm. 80.

4 Hatta, Mohammad, *Memoir.* Jakarta: Tintamas, 1978. hlm. 36.

5 Safwan, *Op.cit.* 1985, hlm. 10.

6 *Ibid.* hlm. 12.

7 Hatta, *Op.cit.* hlm.78.

8 Safwan, *Op.ct.* 1985, hlm. 16.

9 Harimurti Kridalaksana, *Masa-masa Awal Bahasa Indonesia.* Depok: FIBUI, Labolatorium Leksikologi dan Leksikografi, 2010, hlm. 16.

10 Safwan, *Op.ct.* 1985, hlm. 17.

11 Thalib Ibrahim, *Jiwa Juang Bangsa Indonesia.* Jakarta: Mahabudi, 1975, hlm.72.

12 *Ibid.* hlm. 73

13 *Ibid.* hlm. 72.

14 Tim Penyusun, *Sejarah Kelembagaan Kebudayaan dalam Pemerintahan dan Dinamikanya.* Jakarta: Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata, 2004, hlm. 43-44.

15 Surat dari Pengurus Besar PGII, 18 Desember 1951 No.7/MP/51, dalam Kabinet Presiden No. 8808/Pg/51, *ANRI.* Jakarta.

16 Resolusi Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia, Bojonegoro, 5 Januari 1952, dalam arsip Kabinet Presiden No. 152, Pg/52, *ANRI.* Jakarta.

17 Lihat "Penjelasan hasil Rapat ke-10Bada Pertimbangan Kebudayaan yang diselenggarakan pada 5 Mei 1952 di Jalan Cilacap 4, Jakarta. arsip Kabinet Presiden, No. 5064/Pg/52, *ANRI,* Jakarta.

18 Safwan, *Op.cit.*. hlm. 80.

Wongsonegoro

Masa Jabatan
27 April 1951 – 3 April 1952

Wongsonegoro

Kangjeng Raden Mas Tumenggung (KRMT) Mr. Wongsonegoro merupakan nama lengkap Mr. Wongsonegoro, Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (PP&K) pada Kabinet Sukiman-Suwirjo. Gelar yang melekat di depan namanya jelas menunjukkan bahwa ia berasal dari keluarga yang asal muasalnya bukan dari kalangan rakyat biasa. Ayahnya, Raden Ngabehi (R.Ng.) Gitodiprojo, seorang *abdi dalem panewu* Sri Susuhunan Pakubuwana X, Surakarta; sedangkan ibunya, Raden Ayu (RA) Soenartinah, merupakan cucu buyut Mangkunegara II. Dari pasangan R.Ng. Gitodiprojo dengan RA Soenartinah lahir 10 orang anak, lima anak laki-laki dan lima anak perempuan. Wongsonegoro merupakan anak tertua yang lahir pada tanggal 20 April 1897. Nama yang diberikan oleh kedua orang tuanya Soenardi, yang kemudian dilekatkan gelar kebangsawanan Raden Mas (RM), sehingga sewaktu remaja dia dikenal dengan nama RM Soenardi.

Angka tahun kelahirannya menunjukkan bahwa Soenardi lahir pada masa Surakarta khususnya dan Indonesia pada umumnya masih berada dalam kekuasaan pemerintah kolonial Belanda bernama Hindia Belanda. Pada waktu itu kedudukan para priyayi, termasuk ayah Soenardi, menjadi bagian kekuasaan dan pemerintahan Surakarta yang *nota bene* menjadi “abdi pemerintahan” Hindia Belanda, atau dengan kata lain telah berkompromi dengan pemerintahan kolonial Belanda. Meskipun demikian, para *priyayi luhur*, Raja Jawa dan keluarganya, masih tetap menjadi yang dipertuan di negerinya sendiri. Demikian pula Gitoprojo sebagai bagian dari dinasti (wangsa) *priyayi luhur* juga memiliki kekuasaan menjadi pemimpin masyarakat.

Umumnya kaum *priyayi luhur* di Surakarta menyerahkan pengasuhan anaknya yang masih kecil kepada pembantu atau keluarga tertentu yang menjadi *abdi*-nya. Merekalah yang mengasuh dan memberi tuntunan serta mengajarkan adat istiadat, perilaku, norma-norma, dan nilai-nilai sesuai dengan adat istiadat yang berlaku dalam lingkungan keluarga bangsawan Surakarta. Adapun yang terkait dengan pendidikan tetap menjadi tanggung jawab langsung kedua orang tuanya.[1]

Kebudayaan Jawa yang diserap Soenardi dari lingkungan, terutama dari para *abdi* yang mengasuhnya, yang kemudian dipraktikan sejak umur belia ternyata cukup kuat mempengaruhi perilakunya. Setelah menjadi seorang pemuda dan kemudian menjadi lebih dewasa, kecintaannya kepada budaya dan seni semakin tampak. Ia menyenangi seni *karawitan* dan seni *olah kanuragan* ‘ilmu bela diri’ seperti pencak silat. Ia mahir pula olah seni tari seperti *ringgit purwa* (wayang kulit). Kedua orang tuanya yang membesarkannya rupanya memahami dan menyadari “hobi” anaknya itu. Dengan susah payah mereka membelikan atau menyediakan seperangkat gamelan di rumahnya. Hal itu mereka lakukan karena anaknya, Soenardi, sering menghimpun para pemuda temannya atau tetangganya berlatih *karawitan*. Kegiatan tersebut sering dilakukan sejak tahun 1911 sewatu masih duduk di Meer Uit Gebreid Leger Onderwijs (MULO).

Kebudayaan Jawa lain yang ditekuninya sampai akhir hayat adalah dunia kebatinan. Bagi kalangan *njero* ‘dalam’ keraton Sala khususnya dan masyarakat Jawa pada umumnya budaya spriritual seperti kebatinan merupakan kebudayaan yang tak bisa diubah begitu saja oleh budaya-budaya lain, termasuk oleh budaya besar seperti agama Islam dan Kristen. Beberapa penelitian akademik sudah membuktikan adanya agama Kristen Jawa atau Islam abangan atau Islam priyayi seperti yang disampaikan Clifford Geertz.

Sejak kecil Soenardi tertarik pada dunia kebatinan yang diperkenalkan dan diajarkan oleh kedua orang tuanya. Ia sering melakukan *pasa*, *tapa brata*, *tirakat*, serta melakukan perjalanan spiritual, terutama ketika memperingati hari-hari penting atau manakala ada masalah penting, seperti hari kelahiran atau menghadapi ujian sekolah. Ia pernah melakukan tirakat di makam

leluhurnya yang berada di Desa Mayang dan Tirip di Kecamatan Getak yang berjarak 20 km dari tempat tinggalnya. Ia sengaja datang ke dua desa itu dengan berjalan kaki. Kecintaan terhadap dunia kebatinan itu diwujudkan pula dengan keikutsertaannya membentuk organisasi kebatinan Badan Kongres Kebatinan Indonesia (BKKI). Setelah namanya berganti menjadi Wongsonegoro, ia juga memperjuangkan masalah kebatinan dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dengan kata lain kebudayaan dan peradaban Jawa sudah menjadi bagian dari hidupnya.[2]

Wongsonegoro menikah dengan BRA Soewarni, putri Pangeran Koesoemodiningrat, seorang bangsawan terkemuka dari Kasunanan Surakarta.[3] Dari pernikahan itu Wongsonegoro dikaruniai tujuh orang anak, yaitu RA Soenarni, RA Soenarsi, RM Soenarso, RA Sri Danarti, RA Endang Soetanti, RM Tripomo, dan RM Djoko Soedibjo.

Pada tahun 1917, setelah menamatkan pendidikan di Rechts School, Wongso bekerja di Pengadilan Negeri (Landraad) Surakarta. Setelah berhenti dari Pengadilan Negeri Surakarta, ia bekerja di Kantor Kepatihan dengan pangkat Panewu. Pada tahun 1921 ia diangkat menjadi jaksa, berkedudukan sebagai Bupati Anom dengan gelar Raden Tumenggung (RT) Djaksanegoro. Tak lama kemudian ia mendapat tugas (beasiswa) dari Kasunanan untuk melanjutkan belajar di Sekolah Tinggi Hukum (Recths Hooge School). Pada tahun 1924 ia pun lulus dan mendapat gelar Meester in de Rechten (Mr./S.H.).

MASA BERSEKOLAH DAN PENGABDIAN DI KASUNANAN SURAKARTA

Umumnya rakyat Indonesia yang disebut pribumi (*inlander*) pada masa kolonial sangat sulit untuk memperoleh pendidikan formal, bukan saja karena jumlah sekolah yang sangat terbatas tetapi karena penguasa kolonial memang membiarkan kebodohan menjadi bagian tak terpisahkan dari kaum pribumi. Keberadaan sekolah-sekolah formal di suatu daerah pada dasarnya terkait erat dengan kebutuhan pemerintah dan pengusaha kolonial, dan bukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena yang dibutuhkan adalah tenaga-tenaga pribumi terampil yang mampu membaca dan berhitung, maka sekolah yang didirikan juga sekolah-sekolah yang hanya melatih keterampilan dengan waktu hanya tiga atau lima tahun. Sekolah yang disebutan terakhir itu, di Surakarta, dikenal dengan nama Sekolah Angka Loro (Sekolah Desa kelas II).

Anak-anak para priyayi, termasuk Soenardi, mendapat keistimewaan karena "disamakan" dengan anak-anak Belanda sehingga boleh masuk sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak orang Belanda. Pada masa belia, Soenardi dimasukkan ke Taman Kanak-kanak Belanda (TK–Forbel School). Setelah tamat TK tahun 1905, ia masuk Europeeshe Lagere School (Sekolah dasar untuk orang-orang Eropa). Soenardi tidak mengalami kesulitan selama menimba ilmu di ELS dan dapat menyelesaikan pendidikannya dengan baik dan tepat waktu. Setamat dari ELS ia masuk Meer Uitgebreid Lagere Onderwijs (MULO/Pendidikan Menengah Pertama). Seperti halnya di ELS, Soenardi berhasil menyelesaikan pendidikannya di MULO pada tahun 1914 dengan baik dan tanpa kendala. Setamat dari MULO ia terpaksa harus meninggalkan kota Surakarta dan pergi mengembara ke Batavia karena sekolah lanjutan—Rechts School (RH/Sekolah Hukum Menengah)—yang diminatinya tidak tersedia di kotanya dan hanya ada di Batavia. Tanpa tawar-menawar ia pun pergi ke Batavia. Kemauan yang kuat dan dipadu dengan kecerdasan bawaan membuat Soenardi menyelesaikan pendidikan hukum pada tahun 1917 dengan baik dan sesuai dengan jadwal; padahal—di samping belajar di RH—ia pun aktif sebagai pengurus organisasi pemuda Tri Koro Darmo.

Setelah memperoleh sertifikat kelulusan dari Rechts School, Soenardi kembali ke Sala dan mulai merintis karier di dunia hukum. Ia bekerja pada Pengadilan Negeri (Landraad) Surakarta. Ia tidak lama bekerja di lembaga pengadilan itu, hanya sekitar satu tahun, lalu mengundurkan diri. Ia tidak puas dengan kebijakan Pemerintah Hindia Belanda yang sering mencampuri urusan dalam pemerintahan

tradisional Kasunanan Surakarta, yang secara tidak langsung sangat merugikan pihak Karaton Surakarta. Dengan pengalaman sebagai aktivis gerakan pemuda, ia bertekad ikut membenahi sistem pemerintahan Kasunanan Surakarta, agar tidak ada lagi alasan bagi pemerintah Hindia Belanda mencampurinya.

Meskipun dia termasuk *kawula* atau warga dalam Kasunanan, namun untuk bekerja di lingkungan keraton ia tetap harus melalui masa yang disebut *magang* lebih dahulu. Sekitar dua tahun ia menjalani kerja *magang* sampai akhirnya diterima secara resmi sebagai pegawai Kasunanan. Pada tahun 1920 ia diangkat menjadi pegawai Kantor Kepatihan dengan pangkat Panewu dengan gelar "Sastrosoewignyo". Pengalamannya sebagai pengurus Tri Koro Darmo ternyata sangat membantu melaksanakan pekerjaan sebagai *abdi* Kasunanan, sehingga ia mampu memperbaiki struktur administrasi dan kinerja pemerintah Kasunanan. Oleh karena itu di samping pekerjaan utamanya ia diberi kepercayaan memimpin perkumpulan Krida Wacono.

Karena prestasinya itu pada tahun 1921 ia diangkat menjadi jaksa dengan kedudukan sebagai Bupati Anom dan dianugerahi gelar RM Tumenggung Djaksodipura.[4] Jabatan ini diemban sampai tahun 1924 karena pada tahun tersebut ia mendapat tugas belajar ke Jakarta dari Kasunanan Surakarta pada jenjang pendidikan ilmu hukum yang lebih tinggi, yaitu pada Rechts Hooge School (RHS/Sekolah Tinggi Hukum). Karena kecerdasan yang disertai kedisiplinannya dalam membagi waktu belajar maka ia pun berhasil menyelesaikan masa studi tepat waktu. Pada tahun 1929 ia meraih gelar Meester in de Rechten (Mr.) sehingga nama lengkapnya menjadi Mr. RMT Soenardi Djaksodipuro.

Selama menjalani tugas belajar di RHS Jakarta ia masih tetap memelihara hubungan dengan pihak keraton, bahkan pada bulan Februari 1926 ia diminta sebagai pembicara dalam pertemuan Narpo Wandowo. Pada kesempatan itu Soenardi, yang di kalangan Keraton Surakarta waktu itu disebut RMT Djaksadipuro, dikenal sebagai tangan kanan Wurjaningrat, menyampaikan pidato berisi kritikan dan setengah gugatan terhadap dominasi Pemerintah Hindia Belanda atas struktur pemerintahan Kasunanan. Pidatonya mendapat tepukan meriah dari para hadirin.[5]

Setelah meraih gelar Meester in de Rechten, Soenardi kembali mengabdikan diri di Kantor Kepatihan Surakarta. Pada tahun 1930 dia diangkat menjadi Bupati Ngayoko Sewu yang menangani Pangreh Praja atau pemegang kebijakan di Kantor Kepatihan merangkap sebagai pemegang roda pengadilan keluarga Sri Susuhunan Paku Buwono. Pada tahun itu ia dianugrahi gelar Kangjeng Raden Mas Tumenggung oleh pemerintah Kasunanan sehingga namanya menjadi KRMT Mr. Wongsonegoro, yang lambat laun "mengubur" nama Soenardi.[6]

TERJUN KE DUNIA POLITIK

Soenardi alias Wongsonegoro mengenal dunia politik sewaktu masih menjadi pelajar Rechts School di Jakarta. Ia sangat berperhatian terhadap para pemuda STOVIA yang telah menginspirasi banyak pemuda lain dengan mendirikan Budi Utomo. Sebagai seorang pemuda pelajar yang tumbuh dan mencari atau memperkuat jati dirinya, ia merasa kecewa melihat perkembangan Budi Utomo yang lebih banyak dikuasai kaum tua dan kurang memperhatikan aspirasi kaum muda. Oleh karena itu, ia sepakat dengan para pemuda lain untuk mendirikan kembali organisasi yang dapat mewakili suara dan aspirasi kaum muda. Sebenarnya bukan hanya Soenardi dan teman-temannya yang kecewa melihat perkembangan Budi Utomo, bahkan para pendirinya—seperti Cipto Mangunkusumo dan Sutomo—juga kecewa, yang akhirnya mengundurkan diri dari organisasi tersebut dan membentuk organisasi baru. Pada waktu itu, Budi Utomo yang didominasi para priyayi Jawa lebih berorientasi pada kepentingan Belanda dan sangat kooperatif, di samping tetap memelihara tujuan semula menghidupkan kembali Kejayaan Jawa Raya atau Nasion Jawa.[7]

Komisi Besar Indonesia Muda

Duduk dari kiri ke kanan: Mr. K.R.M.T. Wongsonegoro, Mr. Muhammad Yamin, R.K. Purbopranoto, dan R.M. Jusupadi Danudhiningrat. Berdiri dari kiri ke kanan: Adnan K. Gani, Asaat, Krung Raba Nasution, R. Sudiman, dan Moh. Tamzil

(Sumber: Repro *Lukisan Revolusi 1945–1949*)

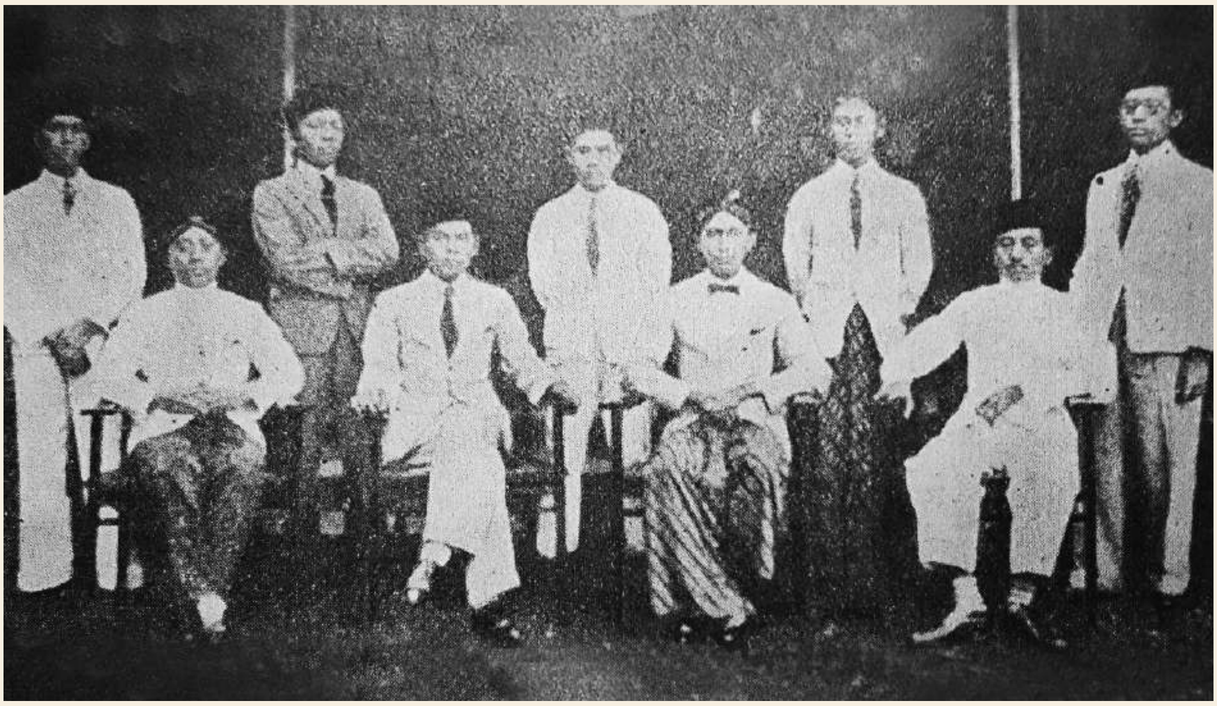

Pada tanggal 7 Maret 1915 Soenardi, dr. R. Satiman Wiryosanjoyo, dan Kadarman beserta beberapa pemuda lain berkumpul di Jakarta. Mereka sepakat membentuk organisasi pemuda baru yang diberi nama Tri Koro Dharmo. Mereka sepakat pula bahwa yang akan diterima menjadi anggotanya hanyalah anak-anak sekolah yang berasal dari Pulau Jawa dan Madura. Pada tahun awal pendiriannya, tercatat ada sekitar 50 orang pelajar yang bergabung ke dalam Tri Koro Dharmo. Pada tahun 1915 pula Tri Koro Dharmo cabang Surabaya didirikan. Organisasi ini menerbitkan majalah yang diberi nama sama dengan nama organisasinya, yaitu *Tri Koro Dharmo*, yang mulai terbit pada tanggal 10 November 1915.[8]

Pada tahun awal Tri Koro Dharmo berdiri, Sunardi dipercaya menjadi wakil ketua mendampingi Ketua Satiman Wiryosanjoyo. Namun ia tidak terlalu lama aktif sebagai Wakil Ketua Tri Koro Dharmo Jakarta. Hal ini terlihat dari keputusannya kembali ke Surakarta setelah menyelesesaikan pendidikan pada Rechts School. Selanjutnya, ia menjadi pegawai Kasunanan Surakarta. Yang patut dipertanyakan adalah setelah menjadi *kawula karaton* apakah ia memutuskan hubungan dengan Tri Koro Dharmo. Yang pasti, pada tahun 1918 Tri Koro Dharmo berubah nama menjadi Jong Java akibat ada semacam "tekanan" para anggotanya yang berasal dari etnis Sunda dan Madura karena menilai organisasi terlalu menonjolkan kejawaannya.

Kecintaan dan perhatian Soenardi terhadap dunia kepemudaan dan pergerakan kebangsaan tidak berubah. Hanya frekuensinya disesuaikan dengan tugas dan kewajiban sebagai pegawai pemerintahan Kasunanan Surakarta. Apalagi dia bukan satu-satunya bangsawan Surakarta yang terlibat dalam dunia pergerakan politik kebangsaan. Sebagai contoh Pangeran Hangabei sejak tahun 1912 diketahui menjabat Ketua Sarekat Islam Surakarta. Selain itu ada RM Wuryaningrat yang menjabat sebagai Ketua Budi Utomo cabang Sala lalu menjadi aktivis Partai Nasional Indonesia (PNI).

Adapun Soenardi yang pada waktu itu sudah bergelar RT Djaksodipuro masih memelihara hubungan dengan Jong Java. Pada Kongres Jong Java kedelapanbelas, tanggal 29 Desember sampai 2 Januari 1926, ia terpilih menjadi ketua Jong Java. Kemudian setelah Kongres Pemuda II ia terpilih menjadi anggota Komisi Besar yang mendapat tugas membentuk "Indonesia Muda". Untuk mewujudkan tugasnya itu Komisi Besar yang diketuai oleh R.K. Purbopranoto menyelenggarakan kongres pada 28 Desember 1930-2 Januari 1931 di Jakarta.

Wongsonegoro kemudian bergabung ke dalam Partai Indonesia Raya (Parindra), yang merupakan hasil fusi Persatuan Bangsa Indonesia dengan Budi Utomo dan beberapa organisasi pemuda etnik lain yang diselenggarakan pada tanggal 24 Desember 1935 di Gedung Habi Proyo Surakarta. Dr. Sutomo dan RM Wuryaningrat masing-masing terpilih sebagai ketua dan wakil ketua. Baru pada tahun berikutnya

Wongsonegoro menjadi Komisaris Pusat Parindra. Pada awalnya Parindra dikenal sebagai organisasi pergerakan yang memilih jalan koperatif terhadap kebijakan pemerintah dan juga dianggap sebagai partai "aliran kanan", namun dalam perjalanan kemudian—terutama setelah ketua beralih ke tangan Muhammad Husni Thamrin—pemerintah Hindia Belanda menilai Parindra sudah bergeser menjadi radikal, bahkan dianggap sebagai "agen" Jepang. Karena itulah Thamrin yang sedang sakit pun ditangkap.

Sebagai *bupati nayaka*, Soenardi alias Wongsonegoro dianggap berhasil menyelesaikan berbagai kasus hukum dengan adil baik di lingkungan keraton maupun di luar keraton, bahkan ia dianggap berhasil pula menyatukan para bangsawan istana. Karena keberhasilannya itu ia diangkat menjadi Bupati Sragen sejak bulan Agustus 1939.

Kepemimpinan Wongsonegoro sebagai Bupati Sragen juga dinilai berhasil dalam menjalankan tugas, terutama dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat melalui beberapa kebijakan, antara lain mengenalkan mina padi, yaitu memelihara ikan di persawahan saat padinya masih berumur 1–3 bulan dan masih digenangi air untuk menunjang pertumbuhan. Dengan demikian para petani mendapat nilai tambah dari tanah sawahnya. Di samping itu dilakukan pembuatan sumur di ladang serta membuat waduk atau bendungan guna mengatur irigasi agar sawah menjadi lebih baik dan lebih luas. Ia juga berupaya memberantas keyakinan-keyakinan yang menyesatkan dan merugikan petani.

Sebagai seorang pecinta budaya, Bupati Wongsonegoro berupaya membina kebudayaan setempat, antara lain mendirikan perkumpulan kesenian pada awal tahun 1942 yang diberi nama Mardi Budaya. Perkumpulan ini bertugas, antara lain, menginventarisasi berbagai kesenian yang ada serta menyelenggarakan berbagai kegiatan kesenian, seperti seni *karawitan*, seni tari, dan seni pencak silat. Kegiatan-kegiatan itu dilaksanakan tidak semata-mata agar eksistensi seni budaya itu diakui oleh masyarakat, tetapi juga dimaksudkan sebagai media komunikasi para pejabat dengan para seniman dan pemuda, terutama terkait dengan pembinaan dan kesetiakawanan, sekaligus menumbuhkan rasa bangga terhadap seni budaya sendiri. Ketika tentara pendudukan Jepang memasuki wilayah Sragen, karier Wongsonegoro sebagai Bupati Sragen berakhir. Ia ditangkap dan dipenjara, namun beberapa waktu kemudian dibebaskan; bahkan menurut Maskan—penulis buku *Tokoh Wongsonegoro*—Wongsonegoro kemudian diangkat menjadi Wakil Residen Semarang, namun tidak menjelaskan sampai kapan jabatan itu berakhir. Sebab, sewaktu dibentuk Panitia Perancang Undang-undang Dasar dengan Ir. Soekarno sebagai ketuanya, Wongsonegoro masuk sebagai salah satu anggotanya. Kepada panitia inilah segala persoalan undang-undang dasar diserahkan.[9] Panita Perancang ini kemudian membentuk Panitia Kecil Perancang Undang-undang Dasar yang diketuai oleh Prof. Dr. Supomo dengan para anggota Wongsonegoro, Ahmad Subardjo, A.A. Maramis, Singgih, Agus Salim, dan Sukiman.[10]

Sebagai penghayat kebatinan, Wongsonegoro tidak menyia-nyiakan keanggotaannya dalam Panitia Kecil Perancang Undang-undang Dasar. Ia melihat pasal 29 ayat 2 yang berpotensi mengingkari atau mengabaikan keberadaan aliran kebatinan atau aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam ayat itu disebutkan tentang kewajiban bagi orang Islam untuk menjalankan syariat Islam, yang dapat ditafsirkan bahwa negara berhak memaksa orang Islam menjalankan syari'atnya. Oleh karenanya, ayat tersebut perlu ditambah kata-kata "dan kepercayaannya" yang diletakkan antara kata-kata "agamanya masing-masing".[11]

Pada tanggal 13 Oktober 1945, Mr. Wongsonegoro diangkat menjadi Gubernur Jawa Tengah menggantikan Raden Pandji Soeroso. Oleh karena itu ia memboyong keluarganya ke Semarang yang telah ditetapkan sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah. Tugas pertamanya sebagai Gubernur Jawa Tengah ternyata tidak ringan, sebab yang harus dibenahi bukan masalah administratif semata. Sebagai negara yang baru beberapa bulan merdeka, selain harus melakukan "pemindahan kekuasaan" dalam

tempo yang sesingkat-singkatnya, Republik Indonesia (RI) harus pula menyesuaikan diri dengan situasi politik yang semakin memanas sebagai dampak perpindahan kekuasaan tersebut.

Pada waktu itu berbagai kelompok pemuda menuntut agar pemerintah sesegera mungkin meminta pihak Jepang menyerahkan persenjataannya kepada pihak Indonesia sebelum pasukan Sekutu yang akan melucuti pasukan Jepang tiba di Semarang. Sebagai catatan, di Semarang terdapat batalion elit pimpinan mayor Kido dan dikenal dengan sebutan *Kido Butai*. Wongsonegoro meminta Mayor Kido agar menyerahkan persenjataan batalionnya/pasukannya kepada pemerintah RI dengan jaminan persenjataan itu tidak akan digunakan untuk melawan Jepang. Ia berpikir positif bahwa Mayor Kido akan dengan sukarela mengabulkan permintaannya karena sebelumnya ia telah berunding dengan Jenderal Nakamura di Magelang dan memperoleh banyak senjata. Memang benar Mayor Kido mengabulkan permintaan seperti yang diharapkannya, namun setelah diperiksa ternyata senjata-senjata yang diserahkan itu adalah senjata-senjata usang. Hal ini menimbulkan kemarahan para pemuda yang tergabung dalam Barisan Keamanan Rakyat (BKR) dan lasykar-lasykar perjuangan. Mereka pun melakukan aksi perampasan senjata dan kendaraan Jepang secara paksa.[12]

Kondisi semakin panas dan konflik dengan pasukan Kido Butai tidak dapat dihindari, yang dipicu oleh larinya beberapa tawanan Jepang yang sedang dikawal para pemuda menuju penjara Bulu. Para tawanan yang lari itu kemudian bergabung dengan pasukan Kido Butai di Jatilangeh. Pada tanggal 15 Oktober 1945 pasukan Kido bergerak ke dalam kota Semarang sehingga berkobar pertempuran, antara lain di Simpang Lima dan Hotel Du Pavillon. Pasukan Kido membunuh siapa saja yang mereka jumpai, bahkan para pemuda yang menyerah atau telah menjadi tawanan mereka. Pasukan Kido juga berhasil menangkap Gubernur Wongsonegoro di kantor gubernurannya.[13] Sebagai balasannya para pemuda membunuh orang-orang Jepang yang ditahan di penjara Bulu.

Pada 17 Oktober 1945 resmi diadakan perundingan di markas polisi militer Jepang. Perundingan tersebut menghasilkan kesepakatan gencatan senjata di antara kedua belah pihak, tetapi perdamaian sulit terjangkau karena pihak Jepang memaksakan satu opsi yang sulit dipenuhi oleh pihak RI (*republikein*), yakni pihak *republikein* menyerahan semua senjatanya ke pihak Jepang. Akibatnya pertempuran antara kedua belah pihak kembali pecah. Dalam peperangan tersebut, pihak Jepang mendapat tekanan sehingga Jenderal Nomura meminta gencatan senjata. Ia mengancam akan mengebom kota Semarang bila permintaannya tidak dipenuhi pada keesokan harinya.

Bagi Wongsonegoro, selaku penguasa tertinggi di Jawa Tengah yang mempunyai kewajiban melindungi warganya, situasi seperti itu dirasa sangat menyedihkan. Ia yakin tuntutan pihak Jepang yang meminta penyerahan kembali senjata Jepang tidak akan berhasil; sedangkan kalau perundingan tidak berhasil, keesokan harinya, tepat pada pukul 10.00 pagi, kota Semarang akan dibom oleh Jepang. Ia merasa cemas, apalagi sudah banyak laporan yang menyebutkan banyaknya korban yang jatuh di pihak Indonesia. Dalam pertempuran di Semarang yang berlangsung sampai dengan tanggal 19 Oktober 1945 (lima hari) sekitar 2.000 orang *republiken* meninggal dunia, sedangkan dari pihak Jepang sekitar 500 orang meninggal dunia.[14]

Dalam situasi kritis itu, pada pukul 07.45 tanggal 19 Oktober 1945 di pelabuhan Semarang berlabuh kapal perang HMS Glenroy yang mengangkut tentara Sekutu dari Brigade Gurkha ke-49 di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Bethell. Mereka tiba di Semarang untuk menjalankan tugas melucuti tentara Jepang dan mengembalikan ke negara asalnya. Kedatangan pasukan Sekutu secara tidak langsung menyelamatkan kota Semarang dari kemungkinan pemboman pesawat tempur Jepang.

Pada awalnya kedatangan Bethell dan pasukannya disambut oleh pihak RI. Mr. Wongsonegoro selaku Gubernur Jawa Tengah menyetujui dan menyepakati permintaan Brigjen Bethell agar pihak RI membantu tugasnya dalam proses rekapitulasi tentara Jepang serta membebaskan tahanan Jepang yang

ada di Jawa Tengah. Termasuk dalam kesepakatan itu pihak RI akan menyediakan bahan makanan yang diperlukan oleh pihak Inggris selama menjalankan tugas tersebut. Sebaliknya, pihak Inggris berjanji tidak akan mengganggu kedaulatan RI serta akan segera meninggalkan wilayah Jawa Tengah setelah masalah rekapitulasi tentara Jepang serta masalah tahanan selesai.[15]

Pada dasarnya pihak Inggris datang ke Indonesia dengan dua agenda: 1) menunaikan tugas sebagai pasukan Sekutu (AFNEI), yaitu melakukan rekapitulasi tentara Jepang dan 2) membantu memulihkan kembali kekuasaan Belanda di kepulauan Indonesia sesuai kesepakatan antara Belanda dan Inggris pada bulan Agustus 1945 di London. Oleh karena itu, setelah berhasil membebaskan para tahanan, yang umumnya para mantan KNIL, pasukan Inggris kemudian mempersenjatai bekas tahanan tersebut. Di Magelang, pasukan Inggris bahkan bertindak lebih jauh dengan mengambil alih kekuasaan serta melucuti TKR. Hal ini secara langsung menimbulkan kemarahan pihak Indonesia, terutama para pemuda anggota TKR dan lasykar-lasykar perjuangan lain, sehingga terjadi konflik antara pihak pemuda dan pasukan Inggris. Menurut suatu sumber, pihak Inggris marah terhadap Gubernur Jawa Tengah karena seorang perwiranya terbunuh dalam konflik itu. Oleh karena itu, pada tanggal 22 November 1945, pasukan Inggris datang mengepung rumah kediaman Gubernur Wongsonegoro dengan menembakkan beberapa senjata (mungkin semacam gertakan kepada gubernur). Sebaliknya, Gubernur Wongsonegoro tetap tenang dan mengajukan saran kepada Jenderal Bethell agar menghentikan pertempuran di Semarang. Pihak Inggris menolaknya.

Sebelum terjadi pengepungan, Wongsonegoro menerima kedatangan Dr. Soebandrio dan Mr. Sudjarwo yang menyarankan agar Gubernur Wongsonegoro segera meninggalkan Semarang, namun sebagai kepala daerah ia tidak dapat meninggalkan kantor pemerintahannya begitu saja. Sementara itu konflik bersenjata semakin sering terjadi dan dinilai semakin mengganggu pemerintahan. Oleh karena itu, Wongsonegoro mengungsi ke Demak setelah sebelumnya mengungsikan anak dan istrinya ke luar dari kota Semarang. Karena Demak terlalu dekat dengan Semarang, para pembantunya menyarankan agar Wongsonegoro meninggalkan Demak dan pergi ke Purwodadi. Saran itu pun diterimanya. Ia ke Purwodadi sekaligus memindahkan pemerintahan Jawa Tengah ke sana.

Sementara itu, pertempuran TKR melawan pasukan Inggris yang dimulai dari Magelang terus meluas. Resimen TKR Magelang di bawah pimpinan Letnan Kolonel (Letkol) M. Sarbini berhasil mengepung tentara Inggris dari segala penjuru, namun mereka berhasil lolos dari kekalahan yang menyakitkan karena Brigjen Bethel berhasil meminta bantuan Presiden Soekarno untuk menenangkan suasana. Pasukan Sekutu kemudian secara diam-diam meninggalkan Magelang menuju ke benteng Ambarawa. Setelah mengetahui bahwa pasukan Inggris telah ditarik ke Ambarawa, Letkol Sarbini memerintahkan pasukannya mengejar mereka. Gerakan mundur tentara Inggris ke Ambarawa tertahan di Desa Jambu karena dihadang oleh pasukan Angkatan Muda di bawah pimpinan Oni yang diperkuat oleh pasukan gabungan dari Ambarawa, Suruh, dan Surakarta.

Pada saat penarikan mundur, tentara Sekutu mencoba menduduki dua desa di sekitar Ambarawa. Pasukan Indonesia di bawah pimpinan Letkol. Isdiman berusaha membebaskan kedua desa tersebut. Dalam gerakan pembebasan itu Letkol Isdiman gugur. Sejak gugurnya Letkol. Isdiman, Komandan Divisi V Banyumas Kolonel Soedirman turun langsung ke lapangan memimpin pertempuran. Kehadirannya ternyata mampu meningkatkan semangat para pejuang, khususnya para anggota TKR. Kolonel Soedirman kemudian mengadakan koordinasi di antara para komandan sektor pengepungan. Strategi yang diterapkan adalah serangan pendadakan serentak di semua sektor. Bala bantuan terus mengalir dari Yogyakarta, Sala, Salatiga, Purwokerto, Magelang, Semarang, dan sebagainya.

Pertempuran yang menentukan antara tentara Inggris dan pihak RI terjadi di Ambarawa berlangsung selama empat hari empat malam. Pasukan Inggris berusaha keras memecahkan kepungan itu dan

menyerang balik dengan keunggulan persenjataannya. Mereka berupaya memukul balik dengan menggunakan artileri berat angkatan darat, serangan udara dengan skuadron Thunderbolt, dan tembakan meriam dari kapal penjelajah HMS Sussex. Akhirnya pasukan Inggris mundur ke perbukitan Ungaran, Semarang. Sejak tanggal 15 Desember 1945 seluruh wilayah Jawa Tengah, kecuali Semarang, sepenuhnya berada dalam kontrol TKR.

Pada akhir bulan Desember Wongsonegoro mendapat kawat dari pimpinan TKR Kolonel Soedirman yang menyarankan agar segera datang ke Yogyakarta. Di sana ia bertemu dengan Kolonel Soedirman yang ternyata menyarankan agar pusat pemerintahan Jawa Tengah dipindahkan ke Magelang. Pada awal Januari 1946, Mr. Wongsonegoro selaku Gubernur Jawa Tengah memindahkan kantor pemerintahannya ke Magelang. Ketika terjadi Agresi Militer Belanda, Wongsonegoro ikut bergerilya bersama para pejuang *republikein*. Menurut Jenderal A.H. Nasution, Wongsonegoro merupakan gubernur sipil satu-satunya yang terus-menerus ikut bergerilya bersama tentara dan rakyat melawan kekuatan kolonialis Belanda.[16]

Satu hal yang menarik untuk disebutkan bahwa selama memimpin Jawa Tengah di tengah perang kemerdekaan, selaku gubernur Jawa Tengah ia masih mampu menyelenggarakan Kongres Kebudayaan di kompleks Borobudur pada bulan Juni 1948. Sebelum kongres diselenggarakan, ia menghimbau kepada badan-badan kebudayaan, seperti perkumpulan kesenian, perkumpulan sastrawan, dan aliran-aliran kebatinan untuk mendukung penyelenggaraan kongres tersebut. Berbagai cara dilakukan oleh para seniman untuk menyukseskan acara tersebut, antara lain dengan menyelenggarakan pertunjukan serta sosialisasi kepada masyarakat. Pada bulan Agustus 1949 Wongsonegoro mengakhiri masa baktinya sebagai Gubernur Jawa Tengah.

Setelah tidak menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, Wongsonegoro aktif dalam dunia spiritualisme. Pada 1950 ia mempopulerkan aliran kepercayaan dengan istilah kebatinan. Ia juga menggagas pembentukan forum tingkat nasional untuk mendiskusikan lebih dalam mengenai dunia kebatinan. Dalam kerangka itu ia kembali menjalin komunikasi dengan rekan-rekan lamanya, baik sewaktu aktif di BU, Tri Koro Darmo, maupun Jong Java. Dengan kata lain ia kembali ke pentas politik nasional melalui politik kebudayaan atau kebatinan.

PENGABDIAN SEBAGAI MENTERI

Berhenti sebagai gubernur rupanya tidak sepenuhnya membuat kegiatan Wongsonegoro terpusat pada dunia kebatinan. Ia diminta Mohammad Hatta untuk menjabat Menteri Dalam Negeri dalam Kabinet Hatta II yang dibentuk pada tanggal 4 Agustus 1949. Pembentukan kabinet ini terjadi setelah dicapai kesepakatan antara pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda untuk mengakhiri konflik Indonesia–Belanda melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda. Hatta membentuk kabinet setelah sebelumnya menerima kembali kekuasaan dari Ketua Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) Mr. Sjafruddin Prawira Negara. Pembentukan kabinet ini sekaligus mempersiapkan delegasi RI ke KMB, termasuk mempersiapkan konsitusi untuk Republik Indonesia Serikat (RIS). Seperti sudah banyak diungkapkan dalam berbagai tulisan, ketua delegasi KMB adalah Mohammad Hatta, sedangkan Wongsonegoro ditunjuk sebagai ketua delegasi dalam bidang gencatan senjata.

Kedudukan Wongsonegoro sebagai Menteri Dalam Negeri berakhir dengan terbentuknya RIS dengan Hatta yang sebelumnya menjadi Perdana Menteri RI diangkat menjadi Perdana Menteri RIS. Wongsonegoro kembali menjadi Menteri dalam Kabinet Natsir sesudah pembubaran RIS. Dalam Kabinet Natsir ia duduk sebagai Menteri Kehakiman. Ia menjadi Menteri Kehakiman sejak 6 Sptember 1950 sampai dengan 27 April 1951 bersamaan dengan jatuhnya Kabinet Natsir karena muncul mosi tidak percaya. Dalam rentang waktu yang demikian singkat ia masih sempat membuat tim penyusunan

Kabinet Ali-Wongso
(Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia)

"Rancangan Undang-undang Pemilihan Anggota Konstituante" yang kemudian disahkan menjadi Undang-undang Pemilihan Anggota Konstituante.

Pada kabinet berikutnya, yaitu Kabinet Sukiman–Suwiryo, Wongsonegoro terpilih sebagai Menteri Pendidikan dan Pengajaran (PP&K) sejak tanggal 27 April 1951. Sebelumnya jabatan Menteri PP&K dipercayakan kepada Dr. Bahder Djohan. Beberapa kebijakan yang masih relevan dan sejalan dengan program Kabinet Sukiman tetap dipertahankan Wongsonegoro, antara lain mengadakan kerjasama dengan Kementrian Agama yang telah dirintis oleh Bahder Djohan dalam masalah pelajaran agama di sekolah dasar sampai sekolah menengah.

Kesepakatan antara Kementrian PP&K dan Kementrian Agama tertuang dalam Peraturan Nomor 1432/Kab tanggal 20 Januari 1951 (Pendidikan) dan Nomor KI/652 tanggal 20 Januari 1951 (Agama) tentang Peraturan Pendidikan Agama di Sekolah-Sekolah. Isinya antara lain sebagai berikut:

Pasal 1: Di tiap-tiap sekolah rendah pendidikan agama dimulai pada kelas 4, sebanyak dua jam dalam satu minggu.

Pasal 2: Di lingkungan yang istimewa, pendidikan agama dimulai pada kelas 1, dan jamnya dapat ditambah menurut kebutuhan, tetapi tidak melebihi empat jam seminggu, dengan ketentuan bahwa mutu pengetahuan umum bagi sekolah-sekolah rendah itu tidak boleh dikurangi dibandingkan dengan sekolah-sekolah di lain-lain lingkungan.

Pasal 3: Di sekolah-sekolah lanjutan Tingkat Pertama dan Tingkat Atas, baik sekolah-sekolah umum maupun sekolah-sekolah kejuruan diberikan pendidikan agama 2 jam dalam tiap-tiap minggu.

Pasal 4: ayat (1) Pendidikan agama diberikan menurut agama murid masing-masing; ayat (2) Pendidikan agama baru diberikan pada suatu kelas yang mempunyai murid sekurang-kurangnya 10 orang, yang menganut suatu macam agama; ayat (3) Murid dalam satu kelas yang memeluk agama lain daripada agama yang sedang diajarkan pada suatu waktu, boleh meninggalkan kelasnya selama pelajaran itu.[17]

Undang-undang tanggal 20 Januari 1951 itu kemudian disempurnakan melalui Peraturan Bersama Menteri PP&K dan Menteri Agama No. 17678/Kab tanggal 16 Juli 1951 (Pendidikan) Nomor KI/9180 tanggal 16 Juli 1951 (Agama) tentang Peraturan Pendidikan Agama di Sekolah-Sekolah Negeri. Peraturan Bersama ini ditandatangani oleh Mr. Wongsonegoro selaku Menteri PP&K dan Kyai Haji Wahid Hasjim selaku Menteri Agama. Jika dilihat secara seksama tidak ada perubahan yang cukup signifikan, kecuali untuk *point* khusus. Isi peraturan dimaksud antara lain sebagai berikut:

Kabinet formatuer Wongsonegoro S. H. melaporkan kepada Presiden Sukarno, bahwa beliau berhasil membentuk Kabinet dan menerima ucapan selamat dari Presiden Sukarno pada tanggal 30/7/1953

(Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia)

Pasal 1: Di tiap-tiap sekolah rendah dan sekolah lanjutan (umum dan vak) diberi pelajaran agama.

Pasal 2: ayat (1) Di sekolah-sekolah rendah pendidikan agama dimulai di kelas 4, banyaknya 2 (dua) jam pelajaran dalam 1 (satu)minggu; ayat (2) Di lingkungan yang istimewa pendidikan agama dapat dimulai di kelas 1 dan jamnya dapat ditambah menurut kebutuhan tetapi tidak melebihi 4 jam seminggu dengan ketentuan bahwa mutu pengetahuan umum bagi sekolah-sekolah rendah itu tidak boleh dikurangi dibandingkan dengan sekolah-sekolah rendah lainnya.

Pasal 3: Di sekolah-sekolah lanjutan tingkatan pertama dan tingkatan atas baik- sekolah-sekolah umum, maupun sekolah-sekolah vak diberi pendidikan agama 2 (dua) jam pelajaran dalam tiap-tiap minggu.

Pasal 4: Ayat (1) Pendidikan agama diberikan menurut agama murid masing-masing; ayat (2) Pendidikan agama baru diberikan kepada sesuatu kelas yang mempunyai murid sekurang-kurangnya sepuluh orang, yang menganut suatu macam agama; ayat (3) Murid dalam suatu kelas yang memeluk agama lain daripada agama yang sedang diajarkan pada sesuatu waktu, dan murid-murid yang meskipun memeluk agama yang sedang diajarkan tetapi tidak mendapat izin dari orang tuanya untuk mengikuti pelajaran itu, boleh meninggalkan kelasnya selama jam pelajaran agama itu.

Pasal 7: Dalam menjalankan kewajibannya sebagai guru, maka guru agama dilarang mengajarkan segala sesuatu yang mungkin dapat menyinggung perasaan orang yang memeluk agama atau memegang kepercayaan lain.[18]

Kabinet Sukiman, seperti kabinet pendahulunya, ternyata tidak mampu menyelesaikan semua program kerjanya karena terganjal oleh munculnya mosi tidak percaya dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Yang menjadi dasar munculnya mosi itu adalah penandatanganan persetujuan bantuan ekonomi dengan Amerika Serikat dalam kerangka Mutual Security Act (MSA). Dengan persetujuan bantuan itu Kabinet Sukiman dinilai telah melanggar politik luar negeri "bebas aktif" Indonesia. Sebab, bantuan atas dasar MSA hanya diberikan oleh Amerika Serikat kepada negara-negara yang dianggap sebagai sekutunya (Blok Barat).

MENJADI WAKIL PERDANA MENTERI

Setelah Kabinet Sukiman jatuh, Mr. Wongsonegoro mendapat kesempatan membentuk kabinet baru Bersama Mr. Ali Sastroamidjojo dari PNI berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 132 tanggal 30 Juli 1953. Ali Sastroamidjojo duduk sebagai Perdana Menteri, sedangkan Wongsonegoro sebagai Wakil Perdana Menteri. Menteri PP&K diserahkan kepada Mr. Muhammad Yamin. Ketika kabinet dibentuk

Mr. Ali Satroamidjojo sedang berada di Washington DC sehingga penyusunan kabinet sepenuhnya dilakukan oleh Wongsonegoro.

Dalam Kabinet Ali I tidak ada menteri yang berasal dari Masyumi. Sebagai gantinya masuk tiga orang dari Nahdlatul Ulama (NU). Dengan sendirinya kabinet ini tidak mendapat dukungan dari Masyumi dan juga kehilangan Partai Politik Kristen, tetapi sebaliknya mendapat simpati dari Partai Komunis Indonesia (PKI) di bawah pimpinan D.N. Aidit.

Sejak tanggal 29 September 1953 Wongsonegoro merangkap jabatan sebagai Menteri Urusan Kesejahteraan Negara. Kedua jabatan itu ia pegang sampai tanggal 23 Oktober 1954, karena pada tanggal tersebut secara resmi ia mengundurkan dari kedua jabatan itu.[19] Ia pun mengajukan pensiun kepada Presiden Soekarno.

Setelah pensiun sebagai pegawai negeri, Wongsonegoro mencurahkan perhatian pada kegiatan sosial dan kebudayaan, termasuk di dalamnya dunia kebatinan; bahkan ia terpilih menjadi Ketua Umum Badan Kongres Kebatinan Indonesia (BKKI). Jabatan Ketua Umum BKKI ia pegang sejak tahun 1955 sampai tahun 1970. Pada tahun 1970 BKKI berubah nama menjadi Sekretariat Kerjasama Kepercayaan. Semasa menjadi Ketua Umum BKKI ia berusaha agar aliran kepercayaan diakui sejajar dengan agama-agama Islam, Protestan, Hindu, dan Katholik. Akhirnya aliran kepercayaan berubah nama menjadi Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa dan diakui keberadaannya, meskipun tidak diletakkan di bawah Departemen Agama melainkan di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jabatan Ketua Umum Sekretariat Kerjasama Kepercayaan masih tetap dipegang oleh Wongsonegoro sampai dengan tahun 1974. Selain itu ia menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Pencak Silat Indonesia (sampai dengan tahun 1973), angggota Presidium Persatuan Pensiunan Seluruh Indonesia (sampai tahun 1968), anggota kehormatan PWRI (sampai tahun 1965), Dewan kurator Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, dan Dewan Penasihat Universitas Tarumanegara, Jakarta.

Pada masa Orde Baru Wongsonegoro diangkat sebagai penasihat Sekretariat Bersama Golongan Karya. Pada tahun 1971 ia terpilih menjadi anggota DPR-RI untuk periode 1971–1977 mewakili daerah pemilihan Provinsi Jawa Tengah dari Golongan Karya (Golkar).

KRMT Wongsonegoro meninggal dunia dalam usia 81 tahun pada tanggal 4 Maret 1978, menyusul istrinya yang meninggal lebih dahulu pada tanggal 26 Maret 1971. Jenazah Wongsonegoro dimakamkan di makam keluarga Astana Kandaran di desa Tirip, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

Atas jasa-jasanya terhadap bangsa dan negara Wongsonegoro dianugerahi beberapa tanda jasa, seperti Bintang Gerilya, Perintis Kemerdekaan, Setya Lencana Perang Kemerdekaan, Lencana Perang Kemerdekaan I, Setya Lencana Perang Kemerdekaan II, Bintang Bhayangkara untuk Kemajuan dan Pembangunan Kepolisian, Penghargaan sebagai Pembinaan Olah Raga Pencak Silat, dan Setya Lencana Kebudayaan.

Filosofi hidup Mr. Wongsonegoro diabadikan pada monumen makamnya di Astana Kandaran, yaitu "Janma Luwih Hambuka Tunggal", yang berarti 'orang yang mempunyai kemampuan lebih akan selalu mendekatkan diri kepada sang Pencipta'. Di sana tertulis pula kalimat "Haruming Sabda Haruming Budi", yang berarti 'orang yang selalu bertutur kata baik dalam arti yang benar, menggambarkan pribadi orang yang berbudi luhur'.

ENDNOTES

1 Maskan, *Tokoh Wongsinegoro*. Jakarta: Direktorat Tradisi dan Kepercayaan–Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Jakarta. 2002, hlm. 4.

2 *Ibid.,* hlm. 5-6.

3 George D. Larson, *Menjelang Masa Revolusi: Kraton dan Kehidupan Politik di Surakarta, 1912–1942*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990, hlm. 224.

4 *Ibid.* hlm.7 dan 15.

5 Larson, *Op.cit.*

6 *Ibid.* hlm.18.

7 Hans Van Miert, *Dengan Semangat Berkobar: Nasionalisme dan Gerakan Pemuda Indonesia, 1918-1930*. Jakarta; Hasta Mitra-Pustaka Utan Kayu-KITLV, hlm. 128.

8 Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto (ed.), *Sejarah Nasional Indonesia: Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Hindia Belanda*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008, hlm. 428.

9 Nugroho Notosusuanto, *Proses Perumusan Pancasila Dasar Negara*. Jakarta: Balai Pustaka, 1982, hlm. 22.

10 Muhammad Yamin, Prof. Mr. Haji, *Naskah Persiapan Undang-undang Dasar 1945*. I,cetakan pertama, 1959, hlm. 260.

11 Maskan, *op.cit*. hlm. 19

12 Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto (ed.), *Sejarah Nasional Indonesia: Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia*. Jil.VI. Jakarta: Balai Pustaka, 2008, hlm. 174.

13 Benedict R.O.G. Anderson, *Java in A Time Of Revolution: Occupation and Resistance 1944 – 1946*. Ithaca and London: Cornell University Press, 1972. hlm. 148.

14 *Ibid.*

15 *Ibid.* hlm. 149-147.

16 Maskan, *op.cit.* hlm.22.

17 Abd. Rachman Assegaf, *Politik Pendidikan Nasional ; Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Praproklamasi ke Reformasi*. Yogyakarta : Kurnia Kalam, 2005, hlm.119-120.

18 Lihat Djumhur dan H. Danasuparta*, Sedjarah Pendidikan* (Bandung : Tjerdas, 1961), hlm. 212 – 214.

19 Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. Singapore: Equinox Publishing.2007, hlm. 338.

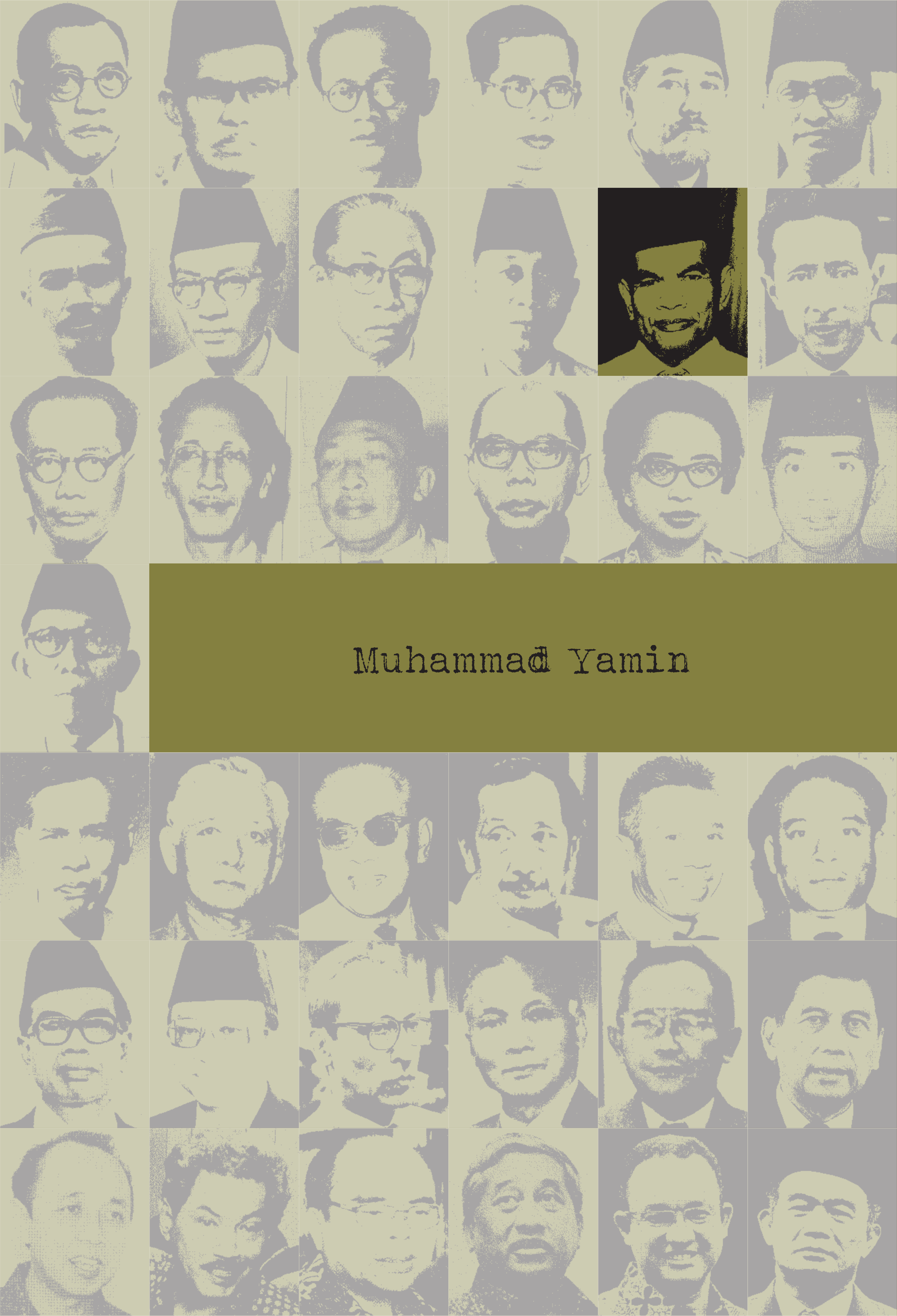

Muhammad Yamin

Masa Jabatan
30 Juli 1953 – 12 Agustus 1955

Muhammad Yamin

Mr. Muhammad Yamin merupakan tokoh kontroversial yang banyak dipuja dan juga dihujat. Ia lulusan Rechts Hoge School yang juga ahli dalam budaya, sastra, dan sejarah, serta sekaligus politisi tangguh. Ia salah satu pelopor Sumpah Pemuda sekaligus "pencipta imaji keindonesiaan" yang mempengaruhi persatuan Indonesia. Di satu sisi ia dipuji karena prestasinya sebagai ahli sastra dan disebut sebagai salah satu perintis puisi modern serta pelopor Sumpah Pemuda, namun di sisi lain ia dihujat sebagai pembohong dan dianggap telah menghilangkan notulensi hasil sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tentang "dasar negara", khususnya Pancasila. Pada sidang pertama BPUPKI yang diselenggarakan tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 Yamin duduk bersama dengan Ir. Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, dan Dr. Supomo menyampaikan usulan masing-masing tentang dasar negara. Akan tetapi pada tahun-tahun awal kemerdekaan Indonesia, Muhammad Yamin justru bersebarangan dengan Soekarno dan Hatta. Ia bergabung ke dalam kelompok "Persatuan Perjuangan" bentukan Tan Malaka, yang menjadi kelompok oposisi sejak akhir tahun 1945 sampai dengan terjadinya peristiwa yang disebut "Peristiwa 3 Juli".[1] Peristiwa itu oleh Presiden Soekarno dianggap sebagai upaya makar dengan Tan Malaka sebagai dalangnya. Pihak Persatuan Perjuangan membantahnya, apalagi realitanya sejak bulan Maret 1946 sampai terjadinya peristiwa tersebut Tan Malaka berada di penjara.[2]

Muhammad Yamin lahir di Talawi, Sawahlunto, Sumatera Barat, pada tanggal 24 Agustus 1903. Ayahnya bernama Usman Baginda Khatib, bekerja sebagai pegawai yang mengawasi dan mengurusi bidang kopi pada sebuah perusahaan Belanda;[3] sedang ibunya bernama Siti Sa'adah, asal Bengkulu yang lahir di Padang Panjang dan kemudian *dilantak* atau dijadikan orang Minang.[4] Di samping menikahi Siti Sa'adah, Baginda Khatib menikahi empat perempuan lain. Secara keseluruhan dari istri-istrinya itu Baginda Khatib mempunyai 16 orang anak, hampir semuanya menjadi intelektual, misalnya Muhammad Yaman menjadi seorang pendidik terkemuka, Djamaluddin Adinegoro menjadi seorang wartawan terkemuka pada zamannya, dan Ramana Usman menjadi pelopor korps diplomatik Indonesia. Selain itu ada pula sepupunya, Mohammad Amir, yang menjadi tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia.

JEJAK PENDIDIKAN

Setelah umurnya mencapai tujuh tahun Yamin dimasukkan ke Sekolah Angka/Kelas II, yang di Jawa Tengah terkenal dengan sebutan *Sekolah Angka Loro*, setingkat sekolah dasar untuk kaum bumiputera. Lama pendidikan sekolah ini empat tahun dengan fokus mata pelajaran keterampilan membaca dan berhitung. Adapun bahasa pengantar bahasa setempat, seperti bahasa Melayu untuk Sumatera Barat, namun setelah Kongres Pemuda, terbit keputusan pemerintah Hindia Belanda mengganti bahasa Melayu dengan bahasa Minang. Sejak di sekolah, bakat dan kemauan Yamin untuk memperoleh ilmu pengetahuan demikian kuat. Ia merasa hanya dengan berbahasa Melayu saja tidak cukup. Hasrat itulah yang mendorongnya pindah sekolah ke Hollandsch Inlandsche School (HIS).

Sejak tahun 1914 di Sumatera Barat telah ada HIS. Umumnya kaum pribumi yang boleh mendaftarkan anaknya ke sekolah itu adalah orang yang berpengasilan relatif tinggi atau sekitar 300 gulden per bulan (kurang lebih setingkat penghasilan wedana pada masa itu). Mengingat kedudukan orang tuanya yang terpandang, sangat mudah bagi Yamin pindah ke HIS. Ada yang mengatakan pada waktu itu Yamin telah duduk di kelas IV Sekolah Angka II. Ia sekolah di HIS tempat saudaranya, Muhammad Yaman, mengajar.[5]

Muhammad Yamin berhasil menyelesaikan pendidikan di HIS pada waktu umurnya menginjak 15 tahun. Rata-rata siswa HIS menempuh Pendidikan HIS selama tujuh tahun. Tidak demikian halnya dengan

Yamin, yang baru menyelesaikannya sekitar 8-9 tahun. Hal itu mungkin karena ia kehilangan waktu akibat pindah sekolah dari Sekolah Angka II. Setamat HIS ia berangkat ke Pulau Jawa karena mendapat bea siswa untuk belajar di sekolah dokter hewan di Bogor. Ia hanya sebentar duduk sebagai siswa sekolah itu karena merasa tidak berbakat. Ia mengundurkan diri dan pindah ke sekolah pertanian yang juga berada di Bogor. Ternyata kehijauan lingkungan yang disertai kesegaran udara di sekitar sekolah itu tidak cukup membuat Yamin nyaman berada di dalamnya. Mata pelajaran tentang berbagai tumbuhan dan cara bercocok tanam membuatnya bosan untuk berlama-lama menjadi pelajar di sekolah tersebut. Ia mengaku tidak bosan dengan semua mata pelajaran bercocok tanam, tetapi ia lebih tertarik mempelajari antropologi, sejarah, dan ilmu budaya lainnya. Oleh sebab itu untuk kedua kalinya ia mengundurkan diri dan memutuskan masuk sekolah yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Akhirnya ia memilih pindah ke Algemeene Middelbare School (AMS).

Sesuai dengan pilihannya ia pindah ke Yogyakarta dan mendaftarkan diri menjadi pelajar pada AMS di kota itu. Pemilihan Yogyakarta sedikit banyak terkait erat dengan ketertarikannya terhadap budaya Jawa sebagaimana diakuinya kemudian. Di sekolah ini ia merasa betah dan mengaku mata pelajaran yang diterimanya cocok dengan bakat dan minatnya. Pada dasarnya ia memang senang mempelajari sejarah, antropologi, ilmu tata negara, serta bahasa-bahasa Timur, seperti bahasa Melayu dan Sansakerta, dan juga bahasa Barat seperti bahasa Belanda yang dianggap sebagai salah satu jalan untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang sedang berkembang di dunia pada waktu itu.

Kecintaan Yamin terhadap masalah kebudayaan dan sejarah ditunjukkan, antara lain, melalui artikelnya pada jurnal yang diterbitkan oleh Jong Soematranen Bond (JSB). Umumnya tulisan-tulisannya menggunakan Bahasa Melayu, walaupun jurnal *Soemtranen Bond* resminya berbahasa Belanda. Perlu disampaikan di sini bahwa Muhammad Yamin aktif dalam organisasi pemuda, antara lain menjadi anggota JSB cabang Sumatera Barat, bahkan pernah mejabat sebagai ketua menggantikan kedudukan Bahder Djohan dan Hatta yang meninggalkan Sumatera Barat. Yamin berhasil menyelesaikan pendidikan dalam waktu relatif singkat.[6] Meskipun demikian, akibat beberapa pindah sekolah, ia baru berhasil menyelesaikan AMS pada umur yang ke-24 tahun, sementara siswa-siswa lain umumnya menyelesaikan AMS pada rentang umur 19–21 tahun.

Walaupun demikian kepindahan ke Yogyakarta tidak saja menguntungkan bagi Yamin karena dapat belajar di sekolah yang sesuai dengan minatnya, tetapi juga menguntungkan bagi perjalanan hidupnya dalam membina keluarga. Selama menuntut ilmu di AMS ia bertemu dengan Raden Ayu Siti Sundari, wanita kelahiran Semarang (25 Agustus 1905), seorang guru pada Kweekschool di Surakarta, Jawa Tengah. Siti Sundari merupakan keluarga bangsawan asal Kadilangu, Demak. Pada awalnya keluarga Sundari menentang hubungan itu karena Yamin masih sekolah di AMS, sementara Siti Sundari sudah bergaji sebagai guru. Namun akhirnya mereka diizinkan menikah dan diselenggarakan pada 14 Juli 1934 di Jakarta. Dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai satu orang putra bernama Dang Rahadian Sinayangsih Yamin.

Setelah menyelesaikan pendidikan AMS Yamin menyiapkan diri melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi di Leiden, Belanda. Akan tetapi rencana itu terpaksa diurungkan karena ayahnya meninggal dunia. Selain itu ia pun mendapat informasi bahwa yang dapat mendaftarkan diri pada universitas di negeri kincir angin itu hanya alumnus Hogere Burgerschool (HBS), sekolah sejenis AMS yang khusus menampung siswa anak keturunan Belanda, Tionghoa, dan elit pribumi. Kualitas AMS pada waktu itu dinilai lebih rendah dibandingkan dengan HBS karena didirikan untuk rakyat biasa dan bukan untuk kalangan keluarga priyayi.[7]

Sebenarnya Yamin mempunyai kesempatan masuk universitas di Leiden karena ayahnya termasuk keluarga Minang terpandang, namun keluarganya tidak seperti umumnya keluarga terpandang Minang

yang waktu itu memuja dan berkiblat pada pendidikan Barat. Keluarganya bahkan mengatakan, "Kalau ke Barat terus, Indonesianya ke mana?" Sebagai catatan, eksistensi bangsa Indonesia sudah mulai diakui oleh berbagai etnik di kepulauan Nusantara, terutama setelah dicetuskan Sumpah Pemuda, yang salah satu "sponsornya" Muhammad Yamin. Oleh karena itu akhirnya ia mendaftarkan diri ke Rechtshoogeschool (RHS) di Jakarta.

Selama kuliah di RHS ia tinggal di asrama *Indonesische Clubgebaouw* yang beralamat di Jalan Kramat Raya No. 106, Jakarta Pusat (Batavia Centrum; gedung itu pada tahun 1974 dipugar oleh Pemda DKI menjadi "Gedung Pemuda"). Sesuai dengan namanya, asrama ini dihuni oleh para pelajar kaum bumiputera, terutama yang tertarik pada kegiatan ekstra kurikuler, termasuk menjadi aktivis pada organisasi pemuda atau pergerakan kebangsaan. Di asrama itu Yamin bertemu dan bergaul dengan para pemuda dari berbagai etnik dengan bermacam-macam budayanya. Ia pun bertemu dengan sesama orang Minang dari tempat yang berbeda. Di asrama ini pula ia berkenalan, antara lain, dengan Sumanang, Amir Syarifuddin, dan Abu Hanifah.

Ketika menempuh pendidikan di RHS Yamin mendapat bea siswa, di samping itu keluarganya masih sering mengirimi uang. Namun Yamin yang dalam kehidupan sehari-harinya relatif sederhana dikenal royal terhadap teman-temannya, sering mentraktir makan atau minum kopi, bahkan juga menonton bioskop atau tonil. Selain itu dia dikenal pula suka memborong buku sehingga keuangannya kadangkala mengalami "krisis".

Yamin dapat menyelesaikan kuliah di RHS tepat waktu. Pada tahun 1932 Muhammad Yamin berhak menggunakan gelar Meester in de Rechten (Mr.), sehingga nama lengkapnya menjadi Mr. Muhammad Yamin. Sebagai seorang sarjana, relatif mudah baginya kalau ingin masuk menjadi pegawai negeri atau pegawai pemerintah Hindia Belanda. Namun umumnya kaum bumiputera yang semasa menjadi mahasiswa atau siswa aktif dalam organisasi pemuda atau organisasi pergerakan nasional membuka usaha sendiri yang lebih independental sehingga enggan menjadi pegawai negeri. Kebanyakan di antara mereka memilih menjadi pegawai swasta atau membuka lapangan kerja sendiri atau wiraswasta. Yamin termasuk salah seorang Meester in de Rechten yang enggan menjadi pegawai pemerintah Hindia Belanda.

Yamin sempat bekerja sesuai dengan bidangnya, yaitu bekerja sebagai pengacara dan *procureur* atau ahli hukum perdata pada konsultan hukum swasta Jakarta. Beberapa kliennya perusahaan asing asal Jepang. Namun tak lama ia menggeluti profesinya itu. Ia memilih bidang kerja yang mandiri, yaitu menjadi dosen dan mengajar pada Sekolah Jurnalistik dan Pengetahuan Umum. Perguruan ini didirikan oleh usaha Persatuan Djurnalistik Indonesia di Jakarta. Mata pelajaran yang diampunya Kebebasan dan Pelanggaran Pers. Bidang tulis-menulis dan kewartawanan tidak asing baginya karena sudah digelutinya dan dipraktikan semasa duduk di bangku AMS.

JEJAK DALAM KARYA FIKSI DAN NONFIKSI

Muhammad Yamin memulai pergulatannya di dunia sastra pada awal tahun 1920-an. Karya-karya pertamanya dalam dunia sastra Indonesia ditulis menggunakan Bahasa Melayu dalam jurnal *Jong Soematra* yang merupakan jurnal milik JSB. Karya-karya itu masih terikat oleh bentuk-bentuk bahasa Melayu klasik. Karya Yamin yang dinilai oleh para pemerhati dunia sastra Melayu sebagai awal sastra Melayu modern baru muncul pada tahun 1922. Pada tahun itu Yamin muncul untuk pertama kalinya sebagai penyair dengan kumpulan puisi yang diberi judul *Tanah Air*. Tentu saja yang dimaksud tanah air oleh Yamin tiada lain adalah tanah Minangkabau. Kumpulan puisi ini dapat dikatakan sebagai kumpulan puisi modern Melayu yang diterbitkan. Dalam puisinya itu ia banyak menggunakan bentuk soneta yang "dipinjam" dari literatur Belanda. Sering pula ia melakukan eksperimen bahasa dalam puisi-puisinya. Selain puisi ia juga menerbitkan drama dan novel sejarah, serta menerjemahkan atau menyadur

beberapa karya sastrawan luar negeri, seperti karya William Shakespeare (drama *Julius Caesar*) dan Rabindrananth Tagore.

Pada perayaan ulang tahun ke-5 JSB tahun 1923 di Jakarta Yamin menyampaikan gagasan menyangkut Bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan Indonesia melalui pidato yang berjudul "Bahasa Melayu pada Masa Lampau, Masa Sekarang, dan Masa Depan". Dari pidatonya jelas tersirat optimismenya bahwa Bahasa Melayu-lah yang nanti akan menjadi bahasa kebangsaan Indonesia. Pada waktu itu ia mengubah sajak yang berjudul "Indonesia Tanah Tumpah Darah" sebagai berikut.

Indonesia Tanah Tumpah Darah

Duduk di pantai tanah yang permai
Tempat gelombang pecah berderai
Berbuih putih di pasir terderai
Tampaklah pulau di lautan hijau
Gunung-gunung indah rupanya
Tumpah darahku Indonesia namanya
Lihatnya nyiur melambai-lambai
Berdesir bunyinya sesayup sampai
Tumbuh di pantai bercerai berai
Memagar daratan aman aman kelihatan
Dengarlah ombak datang berlagu
Mengajar bumi ayah ibu
Indonesia namanya "Tanah Airku"

Sejak umur 18 tahun Yamin sudah mulai menulis sajak, terutama bila kalbunya tersentuh oleh nilai-nilai keindahan, keadilan, kebesaran Illahi, dan nilai-nilai lain, maka penanya pun mulai bergerak menuliskan apa yang baru dirasakannya itu menjadi satu sajak.

Pengetahuan Muhammad Yamin yang diserapnya dari dunia pendidikan formal cukup luas, apalagi ditopang oleh kegemarannya membaca buku, yang membuatnya tidak segan-segan menggunakan bea siswa atau uang kiriman orang tuanya untuk memborong buku. Koleksi bukunya melebihi 20.000 judul, suatu jumlah buku yang masih jarang dimiliki oleh umumnya orang Indonesia. Yamin sering tertidur dengan buku masih di tangan dan kacamata masih dipakainya. Tanpa bosan-bosannya ia membaca buku tentang Indonesia, baik buku sejarah, bahasa, maupun tentang budaya pada umumnya.

Yamin dikenal mempunyai kekuatan membaca dan menulis luar biasa. Konon ia mampu mampu menulis selama tiga hari berturut-turut tanpa berhenti beristirahat sampai naskahnya selesai. Dari tangannya itu banyak karya dihasilkan dan dipublikasikan, baik pada masa sebelum Indonesia merdeka maupun setelah Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Beberapa karyanya itu antara lain *Tanah Air* (puisi, 1922), *Indonesia, Tumpah Darahku* (1928), *Kalau Dewa Tara Sudah Berkata* (drama, 1932), *Ken Arok dan Ken Dedes*

(drama, 1934), *Sedjarah Peperangan Dipanegara* (nonfiksi, 1945), *Tan Malaka* (nonfiksi, 1946), *Gadjah Mada* (novel, 1948), *Sapta Dharma* (nonfiksi, 1950), *Revolusi Amerika* (nonfiksi, 1951), *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia* (nonfiksi 1951), *Bumi Siliwangi* (Soneta, 1954), *Kebudayaan Asia-Afrika* (1955), *Konstitusi Indonesia dalam Gelanggang Demokrasi* (1956), *6000 Tahun Sang Merah Putih* (1958), *Naskah Persiapan Undang-undang Dasar*, 3 jilid (1960), dan *Ketatanegaraan Madjapahit*, 7 jilid.

JEJAK DALAM RANAH POLITIK

Telah disinggung sebelumnya bahwa Muhammad Yamin sudah tertarik kepada kegiatan yang berbau politik sejak masih di sekolah tingkat menengah. Sewaktu Jong Soematranen Bond membuka cabang di Sumatera Barat ia ikut bergabung di dalamnya, bahkan pernah menjadi ketua periode 1926–1928, padahal waktu itu ia belum lulus AMS. Namanya mulai mencuat di kalangan para pemuda pada Kongres Pemuda I yang diselenggarakan pada tahun 1926.

Gagasan untuk berkongres datang dari Muhammad Tabrani yang mendapat tanggapan positif dari para aktivis pergerakan pemuda. Persiapan kongres dilakukan pada 15 November 1925 di gedung Lux Orientis, Jakarta. Ada lima organisasi pemuda dan beberapa peserta perorangan yang hadir di hotel tersebut. Kelima organisasi itu ialah Jong Java, JSB, Jong Ambon, Pelajar Minahasa, dan Sekar Roekoen. Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan membentuk Panitia Kongres Pemuda Indonesia. Tujuan utama kongres adalah menggugah semangat kerja sama di antara berbagai organisasi pemuda di tanah air supaya dapat mewujudkan dasar pokok lahirnya persatuan Indonesia di tengah-tengah bangsa di dunia. Adapun komposisi Panitia Kongres Pemuda itu sebagai berikut. Muhammad Tabrani (Jong Java) sebagai Ketua, Sumarto (Jong Java) sebagai Wakil Ketua, Djamaluddin Adinegoro (JSB) sebagai Sekretaris, dan Suwarso (Jong Java) sebagai Bendahara. Nama lain yang duduk sebagai anggota adalah Bahder Djohan (JSB), Jan Toule Soulehuway (Jong Ambon), Paul Pinontoan (Pelajar Minahasa), Hamami (Sekar Rukun), Sanusi Pane (Jong Bataks), dan Sarbaini (JSB).

Kongres Pemuda yang pertama digelar dan diselenggarakan di Jakarta pada 30 April 1926 hingga 2 Mei 1926. Pada pidato pembukaan kongres, Tabrani—yang pada waktu itu menjadi wartawan *Hindia Baroe* pimpinan Haji Agus Salim—meminta perhatian para peserta kongres untuk mencari jalan bagaimana memajukan semangat persatuan nasional di kalangan pemuda dengan menghindari segala sesuatu yang dapat memecah belah satu dengan yang lain. Semua harus saling mengulurkan tangan, bersatu untuk mewujudkan cita-cita bersama, yaitu kemerdekaan Indonesia. Dalam kongres ini berbagai permasalahan dibahas, misalnya Bahder Djohan menyampaikan materi berjudul "Kedudukan wanita dalam masyarakat Indonesia"; Paul Pinontoan membahas peran agama dalam gerakan nasional; dan Sumarto, dengan judul pidato "de Indonesische Eenheidsgedachte (Indonesia Bersatu)", membahas pentingnya memupuk semangat persatuan Indonesia. Sementara itu Djamaluddin Adinegoro yang dijadwalkan menyampaikan pidato terlambat datang dari Bandung, sehingga pidatonya dibacakan panitia.[8]

Salah satu materi pidato yang banyak menarik perhatian peserta kongres adalah pidato yang disampaikan oleh Muhammad Yamin, berjudul "De toekomst mogelijkhaden van de Indonesische talen en letterkunde" ("Hari depan Bahasa-bahasa Indonesia dan Kesusasteraannya"). Yamin mengatakan bahwa hanya ada dua bahasa, yaitu Jawa dan Melayu, yang berpeluang menjadi bahasa persatuan. Dari kedua bahasa itu bahasa Melayu-lah yang akan lebih berkembang sebagai bahasa persatuan (*Ik voor mij heb daarnaast de volle overtuiging, det Maleisch langzamerhand de aangewezen conversatie of zal" zal zijn voor de Indonesiers end at de tookomstige Indonesische cultuur zijn uitdrukking in die taal vinden*).[9]

Pidato Yamin, yang merupakan pidato terpanjang dalam kongres itu, sempat diteliti terlebih dahulu oleh tiga orang panitia, yaitu Sanusi Pane, Djamaluddin, dan Tabrani. Ketiga orang itu setuju terhadap isinya, sehingga materi pidato tidak mengalami perubahan. Dalam rapat panitia perumus kemudian,

Berpidato di hadapan Pemimpin Rakyat Makasar

(Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia)

Yamin diikutsertakan karena pidatonya menjadi salah satu yang dibicarakan. Yamin pun diberi tugas menyusun usul resolusi (konsep perumusan) yang akan dimajukan pada sidang umum kongres sekitar satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Dalam rapat itu Sanusi Pane terlambat datang sehingga rapat hanya diikuti oleh tiga orang, yaitu Yamin, Tabrani, dan Djamaluddin. Adapun konsep yang dihasilkan oleh Yamin sebagai berikut:

1. Kami poetra dan poetri Indonesia mengakoe bertoempah darah jang satoe, tanah Indonesia.
2. Kami poetra dan poetri Indonesia mengakoe berbangsa jang satoe, bangsa Indonesia
3. Kami poetra dan poetri Indonesia menjoenjoeng bahasa persatoean Bahasa Melajoe.

Terhadap butir satu dan dua Tabrani setuju, namun tidak bisa menerima rumusan butir ketiga. Menurut jalan pikirannya, kalau tumpah darah dan bangsa disebut Indonesia maka bahasa persatuannya harus disebut bahasa Indonesia dan bukan bahasa Melayu.

Yamin tersinggung dan naik pitam mendengar perkataan Tabrani. "Tabrani menyetujui seluruh pikiran saya, tetapi kenapa menolak usul resolusi saya. Lagi pula yang ada bahasa Melayu, sedang bahasa Indonesia tidak ada. Tabrani tukang ngelamun." Sindiran Yamin dijawab oleh Tabrani, "Alasanmu Yamin betul dan kuat. Maklum lebih paham tentang bahasa daripada saya, namun saya tetap pada pendirian. Nama bahasa persatuan hendaknya bukan Bahasa Melayu, tapi Bahasa Indonesia. Kalau belum ada harus dilahirkan melalui Kongres Pemuda Indonesia Pertama ini." Djamaluddin Adinegoro condong kepada pendapat Yamin yang melihat realita waktu itu memang tidak ada Bahasa Indonesia. Kedudukan itu, jika diibaratkan main sepakbola, pada babak pertama adalah 2–1 untuk Yamin. Setelah Sanusi Pane muncul, kedudukan berubah menjadi 2–2 karena Sanusi Pane sependapat dengan Tabrani.

Tabrani selaku Ketua Panitia Kongres kemudian mengambil keputusan menunda pembacaan rumusan hasil kongres, yang untuk sementara waktu diberi judul "Ikrar Pemuda". Tabrani memberi kesempatan kepada Yamin menggodoknya lagi untuk dibawa ke Kongres Pemuda yang akan datang atau Kongres Pemuda II. Kepercayaan yang diberikan Tabrani memang tidak disia-siakan oleh Yamin. Pada Kongres Pemuda II yang diselenggarakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 di Jakarta, Yamin berbisik kepada Sugondo Djojopuspito, "*Ík he been eleganter formulering voor der resolutie*" (saya punya rumusan resolusi yang luwes) sambil menyodorkan secarik kertas. Kertas itu pun berpindah tangan. Setelah memeriksanya Sugondo pun mengangguk dan membubuhkan parafnya, lalu mempersilakan Yamin memberi penjelasan kepada para peserta kongres sebelum disahkan menjadi keputusan kongres.[10]

Ternyata Sugondo selaku Ketua Panitia Kongres Pemuda II tidak membawa resolusi "Ikrar Pemuda" itu ke dalam rapat panitia, melainkan langsung di bawa ke dalam sidang pleno atau sidang umum.

Resolusi yang diparaf Sugondo ternyata "Ikrar Pemuda", yang mencantumkan bahasa persatuan adalah Bahasa Indonesia. Judul resolusi pun berubah: tidak lagi "Ikrar Pemuda" melainkan "Sumpah Pemuda", yang secara bulat diterima peserta kongres sebagai keputusan Kongres Pemuda II. Inilah salah satu kebesaran jiwa dan jasa Muhammad Yamin. Meskipun Tabrani dituduhnya sebagai tukang ngelamun, namun ia dapat menerima argumentasi yang diakuinya memang benar, karena pada dasarnya Indonesia sebagai nusa dan Indonesia sebagai bangsa pun asalnya tidak ada. Nama Indonesia sebagai bangsa dan tanah air atau nusa baru muncul pada dasawarsa kedua abad ke-20, yang diperkenalkan oleh para aktivis pergerakan nasional.[11]

Seperti telah disinggung di atas, setelah berhasil meraih gelar Meester in de Rechten Yamin sempat bekerja sesuai dengan ijazah bidang hukum di Jakarta sampai tahun 1942. Pada tahun yang sama ia tercatat sebagai anggota Partindo yang didirikan oleh Sartono setelah membubarkan PNI pada bulan April 1931. Ada yang berpandapat bahwa pembubaran PNI sebagai strategi untuk menghindari aksi penangkapan polisi Belanda terhadap para anggota PNI yang dianggap hendak melakukan pemberontakan. Yamin ikut bergabung menjadi anggota Partindo karena menganggap memiliki pandangan yang sama dalam taktik nonkoperatif alias tak mau bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Akibat politik yang dianut, aktivitas Partindo mendapat pengawasan ketat dari pemerintah Hindia Belanda. Polisi rajin merazia pertemuan-pertemuan Partindo sampai akhirnya pada November 1936 pimpinan Partindo terpaksa membubarkan partai itu.

Setelah Partindo bubar Yamin bersama Adnan Kapau Gani, Wilopo, Adam Malik, A.K. Gani, dan Amir Sjarifoeddin mendirikan Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo). Partai ini dipimpin oleh A.K. Gani. Politik yang ditempuh sama seperti PNI dan Partindo, yaitu politik nonkooperatif. Namun karena diawasi terus-menerus oleh pemerintah Belanda, akhirnya Gerindo menempuh politik yang sebaliknya, yaitu koperatif. Meskipun demikian Gerindo tetap tidak mempunyai wakil di Volksraad karena selalu dikalahkan oleh partai lain. Hal ini dirasakan kurang menguntungkan bagi Yamin yang rupanya juga ingin menjadi anggota Volksraad. Rupanya Yamin belum kapok bermain politik radikal.

Yamin memutar otak mencari jalan untuk menjadi anggota Volksraad tanpa harus melalui partainya, Gerindo. Ia tahu bahwa untuk menjadi anggota Volksraad harus ada yang mengusulkannya. Para pengusul itu antara lain kelompok sosial atau politik yang telah mendapat pengesahan status hukumnya dari pemerintah, dewan kota, dewan kabupaten/afedeling, dan dewan adat. Ia tahu bahwa semua jenis dewan itu terdapat di Sumatera Barat. Oleh karena itu kalau ingin menjadi anggota Volksraad tanpa menggunakan jalur partai politik ia harus kembali ke Padang atau Bukittinggi dan masuk menjadi anggota salah satu dewan yang ada: Dewan Adat atau Dewan Kota. Namun masalahnya pemerintah tidak mengizinkan Yamin kembali ke Padang karena ia sudah dicap sebagai orang merah (kiri atau komunis). Label merah antara lain karena sikap nonkoperatifnya serta kedekatan dengan beberapa tokoh sosialis-komunis Wikana dan, terutama, Chaerul Saleh.

Yamin tidak kehabisan akal dalam menghadapi kebijakan pemerintah. Ia menggunakan kemampuannya dalam hal tulis-menulis. Ia rajin mengirimkan artikelnya ke beberapa media massa yang terbit di Sumatera Barat dan dikenal oleh masyarakat Minang. Akhirnya, yang dicita-citakan pun berhasil. Pada tahun 1939 ia terpilih menjadi anggota Volksraad. Pimpinan Gerindo marah kepada Yamin karena menjadi anggota Volksraad bukan sebagai wakil partai itu. Ia diultimatum memilih antara tetap menjadi anggota Gerindo yang berarti harus berhenti menjadi anggota Volksraad atau tetap menjadi anggota Volksraad yang berarti keluar dari partai. Ternyata Yamin memilih yang terakhir, yakni tetap menjadi anggota Volksraad. Akibatnya ia dikeluarkan dari Gerindo. Yamin tidak peduli; malah ia mendirikan partai baru, yakni Partai Persatuan Indonesia (Parpindo). Partai ini tidak pernah menjadi besar karena dari segi keanggotaannya juga tidak meyakinkan. Hanya sedikit kaum terpelajar yang ikut bergabung ke

dalamnya, sehingga eksistensinya nyaris tidak diakui dalam sejarah perjuangan bangsa. Sewaktu Jepang menduduki kepulauan Indonesia, partai ini dibubarkan oleh Jepang seperti umumnya partai-partai kebangsaan yang ada waktu itu.

Pada masa pendudukan Jepang, Yamin bergabung dengan Bung Karno (Soekarno) dan Bung Hatta (Mohammad Hatta) berkolaborasi dengan Pemerintah Pendudukan Jepang. Ia ikut menjadi anggota badan propaganda bikinan Jepang, Poesat Tenaga Rakjat (Poetera); bahkan—menurut suatu sumber—ia bekerja pula menjadi penasihat (*sanyoo sendenbu*) pada Departemen Propaganda (Sendenbu-Sendeka).[12] Ketika Pemerintah Pendudukan Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI–Dokuritsu Jumbi Cosakai) pada bulan Mei 1945 sebagai bagian dari realisasi janji Perdana Menteri Koiso, Yamin termasuk salah satu yang diminta menjadi anggotanya.

Pribadi dan pengetahuan Yamin rupanya menarik perhatian para aktivis pergerakan nasional yang lebih senior. Salah satu bukti dari kondisi ini terlihat sewaktu beberapa tokoh memperebutkan Yamin agar ikut bersama kelompoknya. Sewaktu Dr. Radjiman Wedyodiningrat membagi anggota BPUPKI ke dalam tiga panitia, yaitu "panita perancang", "panitia keuangan", dan "panitia pembelaan tanah air", muncul protes ketika nama Muhammad Yamin masuk ke dalam kelompok Panitia Keuangan. Ir. Soekarno, yang ditunjuk sebagai ketua Panitia Hukum Dasar, mendadak bangkit memprotes, "Mohon maaf supaya Tuan Yamin diberikan kepada kami. Sebab, kami anggap beliau salah satu ahli hukum yang pikirannya perlu kami pakai." Seorang anggota lainnya, Abikusno, meminta Yamin masuk ke Panitia Pembelaan Tanah Air. Sementara Radjiman teguh dengan pendiriannya.

Yamin juga marah dan menolak bergabung ke dalam Panitia Keuangan. Alasannya, "Karena kurang pengetahuan apa-apa, jadi saya tak ada sumbangan buat panitia." Radjiman tetap kukuh dengan pendiriannya. Keputusan tidak dapat diubah lagi. "Sudah selesai," katanya. Tapi Yamin tetap membantah keputusan itu, "Saya tidak terima," katanya. Soekarno berusaha membujuk Radjiman agar mengizinkan Yamin pindah ke kelompok Panitia Hukum Dasar, antara lain dengan menugaskan Latuharhary membuat surat kepada perwakilan Jepang, tetapi upaya ini pun tidak berhasil alias tetap ditolak. Yamin tetap di Panitia Keuangan.[13]

Walaupun secara formal masuk ke dalam kelompok Panitia Keuangan yang diketuai Mohammad Hatta, namun dalam buku *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panittia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI): 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945* yang diterbitkan oleh Sekretariat Negara Republik Indonesia menunjukkan Yamin banyak berperan dalam berbagai diskusi tentang dasar negara. Sewaktu Soekarno membacakan buah pikirannya tentang "Pancasila", Yamin juga ikut menghadirinya.

Akhirnya Yamin masuk ke kelompok panitia yang sesuai dengan keahliannya di bidang hukum, yaitu menjadi anggota Panitia Kecil yang bertugas membahas dasar negara. Panitia Kecil inilah yang pada 22 Juni 1945 membuahkan hasil yang sekaligus juga mengundang "kontroversi", yaitu Piagam Jakarta.

Jika pada masa persidangan BPUPKI dan PPKI Yamin masih sejalan dengan pemikiran Soekarno dan Hatta dalam membangun bangsa dan negara Indonesia, tidak demikian halnya setelah Indonesia merdeka. Pada bulan-bulan awal pemerintah Republik Indonesia (RI), Yamin berada dalam posisi berseberangan dengan Soekarno-Hatta. Ia bergabung dengan Tan Malaka membentuk kelompok yang menamakan dirinya "Persatuan Perjuangan" (PP). Sebagai catatan, kelompok ini mempunyai minimum program yang harus diupayakan sebelum melakukan perundingan dengan pihak Sekutu (AFNEI–*Allied Forces Netherland East Indie*) dan NICA (*Netherland Indie Civil Administration*), yaitu pengakuan atas RI 100% merdeka. Jika ketentuan itu tidak dipenuhi oleh Sekutu atau NICA, maka tidak ada lagi perundingan. Pendirian inilah yang membuat Yamin juga ikut di dalamnya sebagai kekuatan oposisi terhadap pemerintahan Perdana Menteri Syahrir.

Muhammad Yamin, kedua dari kiri, dalam sidang pemeriksaan tokoh-tokoh yang dianggap terlibat Peristiwa 3 Juli (Pengadilan diselenggarakan pada 19 Februari 1948).

Untuk mematahkan kekuatan PP, pemerintahan Syahrir menangkap dan memenjarakan Tan Malaka sejak bulan Maret 1946. Namun kekuatan PP tidak dapat dipatahkan dengan cara memenjarakan ketuanya atau tokohnya. Kelompok itu terus bergerak sampai akhirnya terjadi "Peristiwa 3 Juli". Pada pagi hari itu Jenderal Mayor R.P. Soedarsono (yang bersimpati kepada PP) bersama beberapa anggota PP mendatangi Soekarno dan Hatta di Istana Keraton Yogyakarta yang pada masa itu menjadi istana kepresidenan. Mereka datang dengan membawa empat maklumat (yaitu maklumat No. 2, No. 3, No, 4; dan No. 5) untuk segera ditandatangani oleh Presiden Soekarno. Konsep atau rumusan maklumat itu disusun oleh Yamin dengan bantuan Ahmad Subardjo dan Chaerul Saleh. Inti keempat maklumat itu adalah Presiden membubarkan Kabinet Syahrir serta menyatakan apabila Presiden Soekarno dan Hatta berhalangan, maka pimpinan nasional diserahkan kepada Tan Malaka dengan tokoh-tokoh PP sebagai menteri-menterinya, seperti Boeddhyarto sebagai Menteri Dalam Negeri, Ahmad Soebardjo sebagai Menteri Luar Negeri, Soepomo sebagai Menteri Hukum, A.A. Maramis sebagai Menteri Kesehatan, dan Muhammad Yamin sebagai Menteri Penerangan dan Komunikasi.[14]

Ternyata perhitungan kelompok PP meleset. Panglima Besar TNI Jenderal Sudirman juga hadir di Keraton Yogyakarta mendampingi Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta. Akhirnya Sudarsono dan kawan-kawannya ditangkap. Pernyataan resmi Pemerintah RI tentang peristiwa 3 Juli adalah upaya makar Tan Malaka dkk. Namun Muhammad Yamin dalam pledoi pembelaannya (dibukukan dengan judul *Sapta Darma*, yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1950) menolak semua tuduhan itu. Alasannya, maklumat yang mereka susun justru untuk memperkuat perjuangan dan memperkuat pemerintahan. Tuduhan yang menyebutkan Tan Malaka sebagai dalang yang merencanakan makar juga berlebihan. Bagaimana mungkin Tan Malaka yang dipenjara sejak bulan Maret 1946, terpisah dari para pendukung dan simpatisannya, mampu merencanakan semuanya itu.[15] Sebagai konsekuensi keterlibatannya dalam Peristiwa 3 Juli Yamin harus mendekam dalam penjara selama dua tahun. Kemudian perkaranya diajukan ke Mahkamah Agung. Masa penahanannya justru bertambah menjadi empat tahun.

Pada tahun 1948 Yamin kembali menghirup udara kebebasan karena pada peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1948 ia mendapat grasi yang membebaskan dirinya dari penjara. Setahun setelah pembebasannya, ia diangkat sebagai penasihat delegasi RI ke Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda.

Menteri P.Pk dan K, Muhammad Yamin, memberi sambutan dalam Peringatan 100 wafatnya Pangeran Diponegoro di Istana Negara 8 Januari 1955. Tampak hadir antara lain Presiden Sukarno

(Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia)

JEJAK DALAM JABATAN PEMERINTAH/NEGARA

1. Menteri Kehakiman

Sesudah KMB, Yamin diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), namun tidak terlalu lama karena pada 27 April 1951 ia diangkat menjadi Menteri Kehakiman dalam Kabinet Sukiman-Suwiryo. Sebagai pejabat kehakiman lagi-lagi ia membuat *blunder.* Kedekatannya dengan Chaerul Saleh mendorong ia membuat keputusan membebaskan para tahanan politik eksponen Laskar Bambu Runcing dan Gerakan Rakyat Revolusioner (GRR), yang salah satu eksponennya adalah Chairul Saleh. Kedua organisasi ini pada perang kemerdekaan dikenal penganut garis keras yang 100% Indonesia merdeka dan berkiblat pada Tan Malaka. Konsekuensi dari tindakan itu Yamin mendapat kecaman keras dari berbagai kalangan sipil, oposisi, serta media massa yang tidak sehaluan dengan garis politik Tan Malaka-Murba. Rasa setiakawan Yamin pada Chairul Saleh rupanya lebih penting ketimbang jabatan. Ketika kabinet Sukiman-Suwiryo dilanda krisis akibat keputusan Yamin, maka Yamin pun merasa lebih baik mengundurkan diri daripada mengorbankan setiakawannya dengan Chairul Saleh. Pada 14 Juni 1951 ia mengundurkan diri dari Menteri Kehakiman. Untuk sementara Menteri Kehakiman dirangkap oleh Menteri Negara Urusan Umum A. Pellaupessy.

2. Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan

Pada bulan Juli 1953 Muhammad Yamin kembali menjadi seorang menteri, yakni Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan pada Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Kabinet Ali terbentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 132 Tahun 1953 tertanggal 30 Juli 1953. Yamin diangkat menjadi menteri sebagai tokoh nonpartai, walaupun banyak yang menilai dia tetap tokoh aliran kiri.

Seperti telah disinggung sebelumnya, Yamin mempunyai perhatian dan kecintaan yang besar terhadap kebudayaan Jawa. Kecintaannya itu tercermin antara lain dari beberapa karyanya, seperti *Kalau Dewa Tara Sudah Berkata* (1932), *Ken Arok dan Ken Dedes* (1934), *Sedjarah Peperangan Dipanegara* (1945), dan *Gadjah Mada* (1945). Karena kecintaan itu pula ia belajar bahasa Sansakerta dan huruf Palawa agar mampu pula membaca sumber data seperti prasasti yang bertuliskan huruf Palawa dan bahasa Sansakerta. Meskipun demikian, bagi beberapa pihak, kecintaan itu tidak sejajar dengan partisifasi atau sumbangan langsung terhadap satu proses pemeliharaan kebudayaan. Hal ini antara lain tercermin dalam peristiwa pembuatan prasasti tanda selesainya restorasi candi utama Prambanan. Dalam prasasti itu tercantum kalimat: "Proses pemugaran di bawah pimpinan Yang Terhomat Menteri PP dan K Muhammad Yamin". Pencantuman nama Yamin dalam prasasti itu ditentang keras oleh Kepala

Menteri P.Pk dan K, Muhammad Yamin, memberi sambutan dalam Peringatan 100 wafatnya Pangeran Diponegoro di Istana Negara 8 Januari 1955. Tampak hadir antara lain Presiden Sukarno

(Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia)

Patung Muhammad Yamin di Museum Pemuda Jakarta

(Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia)

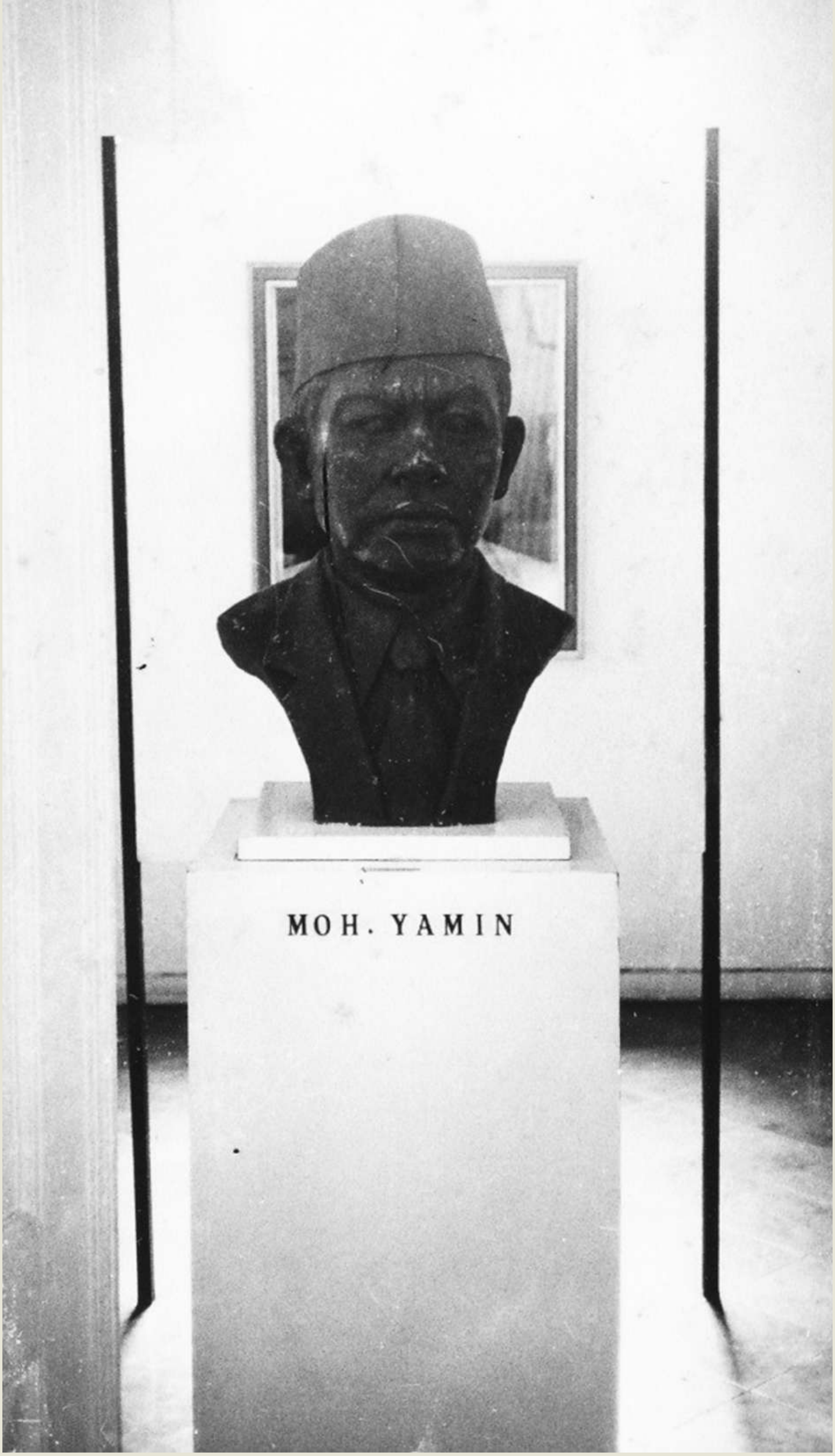

Jawatan Purbakala Soekmono karena Yamin dianggap tidak mempunyai sumbangan apa-apa dalam proses pemugaran. Oleh karena itu, setelah Yamin lengser dari jabatan Menteri PP dan K, Soekmono mendesak agar prasasti itu dibongkar. Akhirnya dengan restu pemerintah, prasasti pun dibongkar.

Terlepas dari peristiwa kontroversi, selama menjadi Menteri PP dan K Yamin juga memberi sumbangsih besar terhadap pelestarian kebudayaan. Salah satu sumbangannya adalah menjalin kerjasama dengan Negeri Belanda dan beberapa negara Eropa terkait pengembalian benda-benda bersejarah dan benda-benda budaya lain yang pada masa lalu dijarah oleh kekuatan kolonialis Belanda dan bangsa Barat. Dari proyek kerjasama ini terdapat sekitar 1.151 benda bersejarah dan bernilai budaya yang tersimpan pada beberapa museum Belanda dapat dikembalikan ke Indonesia dan sekitar 31 benda bersejarah lain dari Jerman, Denmark, dan Belgia.[16] Beberapa tahun kemudian beberapa benda bernilai sejarah juga dapat kembali ke Indonesia, antara lain tengkorak Sangiran, *kropak Negara Kretagama*, patung asli Pradnyaparamitha, serta berbagai naskah Melayu, Jawa, dan Madura.

Selain di bidang kebudayaan, Yamin juga melakukan beberapa gebrakan di bidang pendidikan dan pengajaran. Untuk menanggulangi kurangnya tenaga pengajar Yamin menerbitkan kebijakan tentang pendirian Perguruan Tinggi Pendidikan Guru. Kelak perguruan ini berubah menjadi Institut Keguruan Ilmu Pendidikan (IKIP), yang pada era reformasi berubah menjadi universitas, misalnya IKIP Jakarta berubah menjadi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan IKIP Bandung menjadi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Menurut Sutrisno Kutoyo, institut keguruan ini merupakan karya besar Yamin.

Perguruan tinggi pendidikan guru pertama kali didirikan di Sumatera Barat, tepatnya di Batusangkar, ibukota Tanah Datar, yang terletak tidak terlalu jauh dari Sawahlunto, kota kelahiran Yamin. Perguruan ini diresmikan pada tanggal 1 September 1954 oleh Yamin. Pada tahun-tahun awal perkuliahannya perguruan ini memanfaatkan bangunan-bangunan peninggalan Belanda yang berada di komplek Benteng Van Der Capellen di dataran tinggi Jorong Kampung Baru, Nagari Baringin, Tanah Datar. Sebulan kemudian perguruan tinggi sejenis didirikan pula di Bandung, Jawa Barat, dan kemudian menyusul di Malang, Jawa Timur. Secara keseluruhan pada masa itu berdiri 18 perguruan tinggi seperti itu di berbagai kota besar Indonesia.

Kepada setiap pengelola perguruan tinggi tersebut Yamin meminta agar tidak segan mengundang dosen dari luar negeri untuk mengisi bidang-bidang yang keahliannya sangat diperlukan dan relevan dengan tujuan pendidikan guru; bahkan Yamin sendiri terjun langsung menjadi salah satu tenaga dosen luar biasa atau dosen terbang di beberapa perguruan tinggi daerah. Alasannya, pusat-pusat kegiatan intelektual harus ada pula di daerah dan tidak menumpuk di Jakarta atau di kota-kota besar Jawa saja.

Sebagai Menteri PP dan K ia memberi dukungan kepada para pemuda yang hendak belajar di luar negeri. Salah satu pemuda yang pada waktu itu ingin belajar ke luar negeri adalah Bacharuddin Jusuf Habibie. Ketika tahu bahwa Habibie mendapat bea siswa untuk belajar di Jerman, Yamin memberi masukan agar memilih jurusan konstruksi pesawat terbang. Dalam menyampaikan saran itu Yamin mengelus-elus kepala Habibie sambil berkata, "Kamu ini harapan bangsa."; padahal kala itu banyak teman seangkatan Habibie yang belajar di Jerman memilih jurusan perkapalan. Rupanya di kemudian hari terungkap saran itu dikuti oleh Habibie.

Yamin juga memberi penghargaan kepada para pelajar yang ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan dalam bentuk bea siswa dan ikatan dinas untuk bekerja pada kantor-kantor pemerintah, walaupun dalam praktiknya tidak semua pelajar dapat menikmatinya karena anggaran yang relatif terbatas. Menurut Restu Gunawan, penulis buku *Muhammad Yamin dan Cita-cita Persatuan*, Yamin juga menggulirkan gagasan agar perlu diadakan pembebasan uang belajar bagi masyarakat tidak mampu.

Pada bulan Agustus 1955 Yamin harus meletakkan jabatan sebagai Menteri PP dan K karena Kabinet Ali

terpaksa meletakkan jabatan pula akibat mosi tidak percaya, terutama karena kaitannya dengan situasi politik di luar Jawa. Tidak semua program Yamin dapat terwujud. Salah satunya adalah mendirikan universitas di Irian Barat (sekarang Papua) serta program 10 tahun pemberantasan buta huruf sebagaimana dikehendaki Bung Karno.

Setelah berhenti dari jabatan Menteri PP dan K Yamin sempat bebas dari jabatan negara atau kenegaraan sampai akhirnya diangkat kembali menjadi menteri pada Kabinet Kerja I yang dibentuk Presiden Soekarno pasca bubarnya Kabinet Djuanda. Namun Yamin tidak terlalu lama menjadi Menteri Urusan Sosial dan Kebudayaan karena sejak tanggal 30 Juli 1959 jabatan ini dihapuskan. Mohammad Yamin kemudian diangkat menjadi Ketua/Menteri Negara Dewan Perencanaan Nasional; padahal sebelumnya ia juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawasan IKBN-Antara sejak tahun 1961.

Kedua jabatan yang disebut terakhir dilepas juga karena pada tahun 1962 terjadi *reshuffle* kabinet. Yamin diangkat menjadi Wakil Menteri Pertama/Koordinator Khusus sekaligus merangkap menjadi Menteri Penerangan. Ternyata jabatan ini merupakan jabatan terakhir dalam lingkungan birokrasi pemerintah yang dijabatnya, sebab pada sore hari tanggal 17 Oktober 1962 Yamin meninggal dalam usia 59 tahun, sekitar satu jam setelah putranya, Dang Rahadian Sinayangsih Yamin, datang menjenguknya.

Atas jasa-jasanya kepada bangsa dan negara, Muhammad Yamin mendapat beberapa penghargaan, antara lain sebagai berikut:

1. Gelar Pahlawan Nasional pada tahun 1973 sesuai dengan SK Presiden RI No. 088/TK/1973.
2. Bintang Mahaputra RI, tanda penghargaan tertinggi dari Presiden RI atas jasa-jasanya pada nusa dan bangsa.
3. Tanda penghargaan dari Corps Polisi Militer sebagai pencipta lambang Gajah Mada dan Panca Darma Corps.
4. Tanda penghargaan Panglima Kostrad atas jasanya menciptakan Pataka Komando Cadangan Strategi Angkatan Darat.

ENDNOTES

1 Anton E. Lucas, *One Soul One Struggle: Peristiwa Tiga Daerah.* Yogyakarta: Resist Book, 2004, hlm. 305. dan Benedict R.O.G. Anderson, *Java in A Time of Revolution: Occupation and Resistance 1944-1946.* Ithaca and London: Cornell University Press, 1972, hlm. 394–402.

2 Muhammad Yamin, *Sapta Dharma.*

3 Kementrian Sosial, *Wajah dan Perjuangan Pahlawan Nasional.* Jakarta: Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial, 2012, hlm. 347.

4 Tempo, *Muhammad Yamin: Pengagas Indonesia Dihujat dan Dipuji.* Jakarta: KPG, 2014, hlm. 39–40.

5 *Ibid.* hlm. 44.

6 Kementrian Sosial, *Op.cit.*

7 Tempo, *Op.cit.* hlm. 58.

8 Ahmaddani G. Martha dkk, *Pemuda Indonesia: Dalam Dimensi Sejarah Perjuangan Bangsa.* Jakarta: Yayasan Sumpah Pemuda, 1984, hlm. 60–61.

9 Harimurti Kridalaksana, *Masa-masa Awal Bahasa Indonesia.* Depok: Laboratorium Leksikologi dan Leksikografi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya – Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, 2010, hlm. 15, mengutip

10 Tempo, *Op.cit.* hlm. 75.

11 Harimurti Kridalaksana, *Op.cit.* 16.Menurut Tabrani, laporan kongres yang berjudul *Verslag van Het Eerste Indonesisch Jeugdcongress* (Laporan Kongres Pemuda Indonesia Pertama) yang diterbitkan oleh Panitia Kongres telah dimusnahkan Belanda.Ia mengetahui kabar itu ketika tengah bersiap meninggalkan Tanah Air untuk berangkat ke Jerman. "Jadi tidak sempat mengurusnya." Tapi, untunglah, sebelumnya ia telah mengirimkan salinan laporan itu ke Museum Pusat dan sejumlah media massa. Pada 1973, Tabrani menemukan dokumen kongres itu di Museum Pusat, kini bernama Museum Nasional. "Kondisinya sudah memprihatinkan," ujarnya

12 Saafroedin Bahardan Nannie Hudawati (peny.), *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panittia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI): 28 Mei 1945–22 Agustus 1945.* Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1998, hlm.519. dan Kementrian Sosial, *Op.cit.* hlm. 350.

13 Tempo, *Op.cit.* hlm. 95.

14 Anderson, *Op.cit.* hlm. 397–398.

15 *Ibid.* hlm. 399 -340.; lihat Muhammad Yamin, *Sapta Dharma.* Djakarta: N.V. Nusantara, 1950.

16 *Tempo*, *Op.cit.* hlm. 115.

Soewandi Notokoesoemo

Masa Jabatan
12 Agustus 1955 – 24 Maret 1956

Soewandi Notokoesoemo

R.M. Soewandi Notokoesoemo lahir pada tanggal 25 Desember 1904. Ia lulusan Techinsche Hoogeschool (THS) Bandung pada tahun 1936. Pada masa pendudukan Jepang ia sempat bekerja sebagai pengajar di Bandoeng Kogyo Daigaku (Technische Hoogeschoolte Bandoeng) dengan mengampu mata kuliah Ilmu Bangunan.

Sesudah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, disusul kemudian dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, para mahasiswa Bandoeng Kogyo Daigaku bertindak cepat melucuti dosen-dosen berkebangsaan Jepang dan menahan mereka di rumah masing-masing. Praktis sejak itu urusan Bandoeng Kogyo Daigaku, yang namanya kemudian diubah menjadi Sekolah Tinggi Teknik Bandung, dipegang oleh pada dosen dan tenaga kependidikan bangsa Indonesia. Dalam pidato pengukuhannya sebagai Doktor Honoris Causa di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tanggal 25 Maret 1977 ia menyebutkan bahwa pada 27 Agustus 1945 di ruang Aula Bandoeng Kogyo Daigaku (Aula Barat ITB) terjadi serah terima Bandoeng Kogyo Daigaku dari bala tentara Jepang kepada Pemerintah Republik Indonesia (RI). Satu kelompok insinyur Indonesia yang mempunyai cita-cita Indonesia merdeka, seperti Soenaryo, Soewandi, Abidin dan Rooseno berinisiatif mengambil alih perguruan itu yang praktis baru berdiri satu minggu untuk kemudian diserahkan kepada Pemerintah RI.

Tak lama setelah itu kegiatan Bandoeng Kogyo Daigaku dibuka kembali namun dengan nama yang telah diindonesiakan, yaitu Sekolah Tinggi Teknik Bandung (STT Bandung), di bawah pimpinan Prof. Ir. Roosseno Soerjohadikoesoemo dengan dibantu oleh Ir. R. Goenarso, Ir. R.M. Soewandi Notokoesoemo, Ir. Soenarjo, dan Sutan Muchtar Abidin. Menurut Prof. Rooseno, "Modal kerja pada saat itu hanya nasionalisme yang berkobar-kobar, antusiasme, *devotion,* untuk memulai pendidikan teknik di Indonesia. Suatu tugas berat di atas pundak para insinyur. Pada saat itu hanya ada 170 insinyur di Indonesia. Apa mungkin 170 gelintir insinyur mengurus pekerjaan teknik dalam negara RI yang berdaulat dengan penduduk 90 juta?"[1]

Apa yang disampaikan oleh Prof. Rooseno memang tidak berlebihan. Dalam situasi politik yang tidak kondusif berikut sarana dan prasarana pendidikan yang sangat terbatas, para insinyur sebagaimana disebutkan oleh Prof. Roosseno itu berani membuka tiga program studi, yaitu Bagian Bangunan Jalan dan Air, Bagian Kimia, serta Bagian Mesin dan Teknik Elektro dengan lama pendidikan empat tahun. Jumlah program studi itu sama persis dengan yang ditawarkan oleh Techinishe Hoogeschool pada zaman Kolonial Belanda dan Bandoeng Kogyo Daigaku zaman Pendudukan Jepang.[2]

Ada satu hal yang menarik dari para mahasiswa STT Bandung, yaitu acara "Ikrar Bersama" di hadapan dua orang anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), Otto Iskandardinata dan Ir. M.P. Soerachman Tjokrohadisoerio (yang kemudian menjadi Presiden Universitas Indonesia yang pertama), sebelum berangkat ke Jakarta untuk menghadiri rapat Pleno KNIP pertama tanggal 16–17 Oktober 1945 di Balai Muslimin Jakarta. Dalam ikrar itu para mahasiswa bertekad tidak sudi kembali ke kampus selama kemerdekaan penuh bangsa Indonesia belum tercapai. Mereka bersedia dan rela mengorbankan jiwa dan raga bagi kemerdekaan bangsa.[3]

Sekitar dua bulan kemudian ternyata situasi politik memaksa para mahasiswa harus meninggalkan kampus. Mulai bulan November 1945 kegiatan perkuliahan terpaksa dibubarkan, meskipun kegiatan kantor administrasi di bawah Sutan Muchtar Abidin dan Soenarjo tetap berjalan. Situasi dalam kota Bandung sudah tidak aman bagi para civitas akademika STT Bandung karena NICA dengan para serdadunya masuk ke kota Bandung. Pada tanggal 6 Januari 1946 akhirnya kantor STT Bandung

dipindahkan ke Yogyakarta di bawah pimpinan Prof. Ir. Roosseno, Ir. R.M. Soewandi Notokoesoemo, dan Ir. Soenarjo.

Di Yogyakarta Prof. Roosseno dan timnya menghubungi Panitia Pendirian Yayasan Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada sesuai dengan permohonan Menteri Pendidikan RI. Pada suatu rapat dengan panitia tersebut muncul perbedaan pendapat antara Prof. Roosseno dan kawan-kawan dengan panitia. Pihak panitia menghendaki yang didirikan adalah perguruan tinggi swasta, sedangkan Prof. Roosseno dan kawan-kawan yang telah mendapat pesan dari Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan menghendaki perguruan tinggi yang didirikan adalah perguruan tinggi negeri. Oleh karena itu pada 17 Februari 1946, STT Bandung di Yogyakarta mulai dibuka dengan memanfaatkan Gedung Sekolah Menengah Tinggi B Negeri Yogyakarta di kawasan Kota Baru (kini SMA Negeri 3 Yogyakarta). Kegiatan perkuliahan diselenggarakan pada sore hari.

Pada awalnya pimpinan STT Bandung di Yogya dipegang oleh Prof. Ir. Roosseno. Kedudukan ini kemudian digantikan oleh Ir. Wreksodiningrat Notodiningrat pada tanggal 1 Maret 1947. Sebagai catatan Notodiningrat adalah insinyur sipil pertama Indonesia lulusan Technishe Hoogeschool Delft tahun 1916. Setelah Pemerintah RI mendirikan Universitas Negeri Gadjah Mada, STT Bandung digabungkan ke dalamnya menjadi Fakultas Tehnik dengan Ir. Wreksodiningrt sebagai dekan (1947–1951) dan pada tahun 1949 dikukuhkan sebagai Guru Besar UGM .

Demikian pula Ir. Soewandi Notokoesoemo dan hampir semua dosen STT Bandung di Yogyakarta ikut bergabung menjadi salah staf dosen Fakultas Teknik. Pada tanggal 19 September 1954 Soewandi diangkat menjadi Guru Besar Fakultas Teknik UGM pada bidang Ilmu Konstruksi Baja. Ia menyampaikan pidato pengukuhannya sebagai guru besar pada 19 September 1954 dengan judul "Perkembangan di dalam Pemakaian Bahan Logam untuk Konstruksi Djembatan dan Faktor-faktor jang Mempengaruhinja". Beberapa dosen asal STT Bandung yang menjadi guru besar UGM adalah Ir. Soenarjo yang diangkat menjadi Guru Besar UGM pada tahun 1950, Ir. Ali Djojoadinoto menjadi Guru Besar Ilmu Ukur Tanah pada tahun 1960, serta Herman Johannes menjadi Guru Besar UGM serta kemudian menjadi Dekan Fakultas Teknik UGM (1951–1956) dan Rektor UGM untuk periode 1961–1966.

Sesudah perang kemerdekaan Ir. R.M. Soewandi Notokoesoemo memilih jalan berkarya di dunia perguruan tinggi. Seperti telah disinggung di atas, ia menjadi salah satu guru besar di Fakultas Teknik sejak September 1954. Namun setahun setelah menjadi guru besar ia menerima tawaran menjadi menteri. Sejak tanggal 12 Agustus 1955 hingga 3 Maret 1956 ia menjabat Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (PP dan K) pada Kabinet Burhanuddin Harahap. Pada masa kepemimpinannya dapat dikatakan tidak ada satu kebijakan baru terkait dengan pendidikan, pengajaran, dan bidang kebudayaan di Kementerian PP dan K. Apalagi program kabinet Burhanuddin Harahap hampir tersita oleh persiapan pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 1955. Setelah Pemilu selesai dengan kemenangan berada dalam genggaman Partai Nasional Indonesia (PNI), formatur pembentukan kabinet baru diserahkan kembali ke Mr. Alisastroamidjojo. Dalam susunan Kabinet Ali ini Suwandi Notokoesoemo tidak terpilih menjadi Menteri PP dan K. Ia pun kembali ke pekerjaan sebelumnya, yaitu menjadi Guru Besar UGM. Empat tahun kemudian, tepatnya pada 25 Desember 1960, Prof. Ir. R.M. Suwandi Notokoesoemo meninggal dunia dalam usia 56 tahun.

ENDNOTES

1 Pidato pengukuhan sebagai guru besar luar biasa ilmu beton pada tanggal 26 Maret 1949 di Aula *Faculteit van Technische Wetenschap Universiteit van Indonesie*, Bandung.

2 Sakri, A.. *Dari TH ke ITB: Kenang-kenangan lustrum keempat 2 Maret 1979*, Bandung: Penerbit ITB.1979.

3 *Ibid.*

Sarino Mangun Pranoto

Masa Jabatan
24 Maret 1956 - 9 April 1957

Sarino Mangun Pranoto

Ki Sarino Mangun Pranoto lahir pada tanggal 15 Januari 1910 di Bagelen, Kabupaten Purworejo, Keresidenan Kedu, Jawa Tengah. Setelah usianya cukup, ia dimasukkan ke Hollandsch Inlandsche School (HIS/sekolah setingkat sekolah dasar, dengan bahasa pengantar bahasa Belanda, yang diperuntukkan bagi kaum pribumi) di Purworejo. Karena suatu alasan ia pindah sekolah di Kabumen. Setelah lulus HIS ia mengikuti pelatihan mengajar di Taman Siswa. Selesai pelatihan pada tahun 1929 ia menghabiskan 13 tahun di wilayah pantai utara Pulau Jawa, terutama di daerah Pemalang, sebagai guru sampai akhirnya menjadi Kepala Sekolah Taman Siswa Pemalang.

Taman Siswa merupakan lembaga perguruan yang didirikan oleh Suwardi Suryaningrat (Ki Hadjar Dewantara). Sejak awal didirikan lembaga pendidikan ini sangat kental dengan sifat nasionalisme (mulanya nasional Indisch, kemudian menjadi nasional Indonesia). Sifat ini sangat menarik perhatian Sarino dan bahkan mempengaruhi cara pandang Sarino terhadap perjuangan. Ia kemudian masuk ke kancah pergerakan nasional. Selain menjadi pengurus Taman Siswa sejak tahun 1929–1943, ia juga menjadi anggota Partai Indonesia (Partindo), suatu partai yang dianggap sebagai penerus Partai Nasional Indonesia (PNI).[1]

Ia merupakan tokoh yang disegani oleh masyarakat Pemalang, baik karena pendidikan dan ilmu pengetahuan maupun karena kekayaan keluarganya (menurut pengakuan Sarino, mertuanya merupakan tuan tanah di daerah Pemalang yang menguasai sekitar 12 ha sawah yang diperoleh dari para petani yang meminjam uang kepadanya dan tak mampu mengembalikan uang pinjaman tersebut).[2] Para tuan tanah—bersama orang-orang yang mendapat pendidikan sekolah-sekolah Belanda yang kemudian menjadi pegawai *pangreh praja* serta para pedagang atau tuan tanah Cina—menjadi kelompok elit dalan stratifikasi masyarakat Pemalang.

Meskipun mertuanya seorang tuan tanah, sosok Sarino sangat dihormati oleh masyarakat Pemalang karena banyak prakarsanya yang justru sangat membantu masyarakat di wilayah itu. Sebagai tokoh Taman Siswa ia juga menjadi penggerak pembentukan koperasi yang banyak membantu para petani dan buruh mengatasi "kesulitan" dalam hal kekurangan modal atau kekurangan dana untuk membeli bibit padi atau keperluan yang lain. Sarino mengajak Partindo dan organisasi-organisasi kemasyarakatan lain menggunakan Gedung Taman Siswa umtuk rapat walaupun ia sendiri bukan anggota partai atau organisasi bersangkutan.

Sarino juga aktif dalam organisasi kepanduan. Kegiatannya dalam organisasi kepanduan membuat ia berkenalan dan secara pribadi akrab dengan para anggota *pangreh praja*. Oleh karena itu Taman Siswa tidak pernah ditegur oleh pemerintah atau polisi walaupun mengizinkan gedungnya digunakan untuk rapat-rapat politik, atau karena dengan sengaja tidak mengibarkan bendera Belanda pada hari ulang tahun Ratu Wilhelmina, atau karena pada tahun 1933 tidak memecat guru-guru Taman Siswa yang berdasarkan Ordonansi Sekolah Liar telah melanggar ketentuan. Pengaruh Sarino inilah yang, menurut Anton Lucas, membuat kondisi sosial-politis Pemalang sesudah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia agak berbeda dengan daerah Brebes dan Tegal.[3]

Sarino sangat memahami situasi dan kondisi daerahnya, kabupaten dan kota Pemalang, terutama hubungan antara kaum yang berpunya dan kaum yang tidak punya alias miskin. Oleh karena itu sewaktu pecah kurusuhan di Pemalang, juga di Pekalongan dan Brebes, bukan suatu hal yang aneh baginya. Faktor-faktor penyebabnya sudah tampak sejak masa akhir kolonial Belanda, terutama pada masa Pendudukan Jepang. Ia mengatakan, "Keadaan di desa melarat."[4]

Pada masa pendudukan Jepang semua lembaga pendidikan ditutup oleh Pemerintahan Pendudukan Jepang, tak terkecuali Taman Siswa, yang ditutup sejak bulan Maret 1943. Setelah peristiwa itu Sarino

Ki Sarino Mangunpranoto (berdiri baris depan no. 3 dari kiri) bersama-sama dengan para anggota majelis Luhur Taman Siswa yang dipimpin oleh Nyi Hadjar Dewantara menghadap Presiden Soekarno, Jakarta 1963

(Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia)

pindah ke Pati dan menghabiskan waktu di sana. Di tempat ini ia bergaul dengan para nelayan dan bekerja sama dengan mereka.

Pada tahun awal kemerdekaan Indonesia, Sarino Mangunpranoto diangkat menjadi Wakil Residen Pati dan pada akhir tahun 1947 jabatannya naik menjadi Residen Pati. Dalam kedudukannya itu ia memainkan banyak peran dalam menegakkan pemerintahan Republik di wilayah ini (Region I). Sesudah agresi militer Belanda pada bulan Juli 1947 ia memindahkan administrasi pemerintahannya dari Pati ke arah pedalaman, yaitu ke Wonosobo, dan membentuk pemerintahan Residensi Pati dalam "pengasingan".[5]

Selain sibuk menjalankan jabatan sebagai residen, Sarino menjadi aktivis PNI untuk wilayah Pati. Pada kongres ketiga di bulan Juni 1948 ia terpilih sebagai ketua PNI Jawa Tengah. Setelah konflik Republik Indonesia dan Belanda berakhir melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) disusul kemudian pada Agustus 1950 kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Sarino terpilih sebagai anggota Parlemen RI sampai dengan tahun 1956. Pada tahun 1956 ia terpilih kembali menjadi wakil PNI nomer urut 189 di Badan Konstituante.

Pada tahun 1956 ia meninggalkan keanggotaannya dalam Konsituante karena dipilih menjadi salah satu menteri pada Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Ia menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (24 Maret 1956-9 April 1957). Sebelumnya, pada Kabinet Burhanuddin Harahap, kementerian ini dijabat oleh Mr. Suwandi Notokoesoemo. Sarino hanya sekitar satu tahun menjabat sebagai Menteri PP dan K karena Kabinet Ali II terpaksa mengembalikan mandat kepada Presiden pada awal tahun 1957. Dalam waktu yang relatif singkat itu ia menyumbangkan suatu pemikiran yang sekaligus diterapkannya, yaitu tentang pendidikan nonformal dalam tatanan pendidikan nasional.[6]

Mungkin karena prestasi dan kecintaannya pada dunia pendidikan, pada tanggal 8 Maret 1966 ia diangkat kembali sebagai Menteri PP dan K dalam Presidium Kabinet Dwikora II. Namun seperti halnya pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo II ia tak lama menjabat sebagai Menteri PP dan K. Ketika terjadi perubahan kabinet dari Kabinet Dwikora II menjadi Kabinet Ampera I dengan Ketua Jenderal Soeharto, Sarino masih terpilih menjadi Menteri PP dan K. Jabatan tersebut dipegangnya sampai 14 Oktober 1967. Pada pertengahan Oktober terjadi perombakan Kabinet Ampera I menjadi Kabinet Ampera II. Dalam Kabinet Ampera II kedudukan Sarino sebagai Menteri PP dan K digantikan oleh "teman" separtainya, yaitu tokoh PNI Sanusi Hardjandinata.

Setelah lepas dari jabatannya selaku Menteri PP dan K tidak berarti Sarino Mangunpranoto lepas dari dunia pendidikan karena pada dasarnya jiwa Sarino berada di dunia pendidikan. Kegiatannya sebagai

Atas

Menteri P.P. dan K, Sarino Mangunpranoto, sedang memberikan sambutan

(Sumber: Arsip Nasional Republik Indonesia)

Tengah

Menteri P.P. dan K, Sarino Mangunpranoto, bersama para tamu undangan sedang menghadiri peringatan Hari lahir Pancasila

(Sumber: Arsip Nasional Republik Indonesia)

Bawah

Menteri P.P. dan K Sarino Mangunpranoto menerima para mahasiswa di Bandung, 30 Mei 1956 dalam rangka konferensi mahasiswa Asia Afrika

(Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia)

Ceramah Ki Sarino Mangunpranoto dengan judul "Pendidikan sebagai Sistem Perjuangan Kemerdekaan Indonesia" bertempat di Gedung Kebangkitan Nasional, 24 Mei 1976

(Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia)

politisi dan birokrasi tidak memisahkannya dari dunia pendidikan. Menurut beberapa temannya, dalam darah Sarino mengalir jiwa pendidik.[7] Hal ini antara lain tercermin pula dari pembicaraan atau tulisan-tulisannya yang tidak jauh dari masalah pendidikan, baik yang ditulis pada masa kolonial maupun setelah Indonesia merdeka.

Beberapa artikel yang ditulis pada masa kolonial, antara lain, dimuat dalam majalah *Pandji Pustaka* dan *Bintang Timoer* periode 1932-33. Ia juga menulis dalam jurnal *Madjalah Pusara* milik Taman Siswa, misalnya, tentang nilai pendidikan yang terkandung dalam permainan anak-anak. Tulisan lain yang diterbitkan misalnya *Sosio-Nasional Demokrasi* (Yogyakarta: Taman Siswa, 1946), *Pokok-pokok Pikiran Politik Pendidikan Indonesia* (Jakarta: Taman Siswa, 1946), *Setahun Kabinet Ampera* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1967). Selain itu masih banyak artikel dalam seminar-seminar yang menampilkan subjek dan gagasan mengenai pendidikan .

Sarino dikenal bukan hanya sebagai ahli teori pendidikan, melainkan juga menerapkan pemikirannya pada sekolah yang diasuhnya beberapa tahun kemudian. Pada tahun 1950-an ia membangun kembali Taman Siswa di Semarang. Di samping itu ia juga membantu menyusun kembali Yayasan Sarjanawiyata yang kemudian disahkan akte pendiriannya di depan Notaris R.M. Wiranto di Yogyakarta pada 28 Desember 1959. Di antara para pendiri yayasan tersebut terdapat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Nyi Hadjar Dewantara. Untuk pertama kalinya yayasan diketuai oleh Ki Sarino Mangunpranoto. Kegiatan yang pertama kali dilakukan adalah mempersiapkan berdirinya fakultas. Sejalan dengan itu maka pada tahap awal Yayasan Sarjanawiyata mendirikan Taman Wiyata, setingkat *collage*, yang bertujuan antara lain untuk melatih para guru. Kemudian, sesuai dengan tujuan yayasan mendirikan fakultas, pada akhir tahun 1959 beberapa jurusan digabungkan menjadi satu fakultas dan salah satu program studinya adalah Sastra dan Filsafat. Pada tahun 1970 Sarino menjadi Rektor Sarjanawiyata menggantikan Nyi Hajar Dewantara. Selain itu Yayasan Sarjanawiyata pada tahun 1975 mendirikan Lembaga Studi Kedesaan (LSPK) dan pada tahun 1980 mendirikan Lembaga Pengkajian Kebudayaan (LPK).

Yayasan Sarjanawijaya di bawah pimpinan Sarino juga merintis pembukaan semacam sekolah kejuruan setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), yaitu Sekolah Farming Menengah Atas (SFMA), di Ungaran, Jawa Tengah, yang memulai kegiatannya sejak tahun 1961. Pendirian SFMA ini terilhami oleh gagasan Rabindranat Tagore dan Mahatma Gandhi sewaktu Sarino berkunjung ke luar negeri, terutama ke India. Pendidikan di sekolah itu lebih menekankan pada pelajaran yang bersifat praktis dalam kerangka mempersiapkan anak didik terjun ke dunia kerja setelah selesai sekolah.[8]

Atas

Ki Sarino Mangunpranoto, Menteri PP dan K RI pada tahun 1956-1957 bersilaturahmi dengan Ki Hadjar Dewantara di Taman Siswa

(Sumber: Biro Umum, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)

Tengah

Upacara pemberian gelar kehormatan Doctor Honoris Causa oleh IKIP Malang kepada Ki Sarino Mangunpranoto, 17 April 1976

(Sumber: Perpustakaan nasional Republik Indonesia)

Bawah

Menteri P.P dan K, Sarino Mangunpranoto, Menteri Penerangan BM. Diah dan Menteri Kehakiman Prof. Umar seno Adji dari Kabinet Ampera I ikut serta menghadiri Upacara Hari Kesaktian Pancasila

(Sumber: Arsip Nasional Republik Indonesia)

Ki Sarino Mangunpranoto berjabat tangan dengan Presiden Soeharto pada acara tatap muka Munas Koperasi ke-11, 17 Januari 1983, beberapa jam sebelum meninggal dunia pada 17 Januari 1983

(Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia)

SFMA kadangkala disebut sekolah Sewakul, mengacu pada nama sebuah bukit yang ada di sekitar sekolah yang menjadi pusat kegiatan pendidikan sekolah tersebut. Sekolah ini sekaligus menjadi penerapan ide-ide Sarino sewaktu menjadi Menteri PP dan K pada masa Kabinet Ali II, yaitu pengembangan sekolah nonformal. Kurikulum SFMA memadukan antara pendidikan yang ada dengan ide pendidikan nonformal yang digagasnya. Di Ungaran inilah Sarino beserta stafnya melakukan eksperimen baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah, khususnya di sekitar bukit Sewakul, menuju pada peningkatan hidup yang nyaman dan berseni (hidup berseni).[9] Para pelajar dilatih membangun kehidupan sendiri dengan memadukan pelatihan formal dan nonformal, tempat-tempat tinggal dengan bentuk gaya *ashram*, gubuk sederhana dengan memanfaatkan bahan-bahan serta konstruksi gaya desa, bagaimana mengolah lahan pertanian, dan sebagainya. Dengan demikian para pelajar Sewakul memahami betul bagaimana nanti hidup bermasyarakat. Kini ada sekitar tujuh SFMA di Jawa Tengah yang dikelola oleh swasta, baik yayasan Katholik maupun Protestan, di bawah bantuan pemerintah. Selain di Jawa Tengah SFMA juga terdapat di Lampung.

Karena prestasi serta kecintaannya dalam dunia pendidikan, pada tahun 1976, Senat Guru Besar Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Malang menerima usulan Prof. Dr. D. Dwidjoseputro untuk memberikan gelar Doktor Honoris Causa kepada Sarino Mangunpranoto. Prof. Dwidjoseputro bertindak sebagai promotornya. Pada 17 April 1976 secara resmi Sarino Mangunpranoto dikukuhkan sebagai Doktor (HC) oleh Senat Guru Besar IKIP Malang.[10]

Seperti telah diuraikan di atas Sarino tidak bisa lepas dari dunia pendidikan. Artinya, menjadi Menteri PP dan K atau tidak, dunia pendidikan merupakan dunianya. Banyak yang menilai Sarino seorang yang sederhana dan siap menerima tantangan hidup, apa pun bentuknya; termasuk ketika ia sibuk sebagai residen. Ia harus menjalankan roda pemerintahan dalam suasana tekanan dan ancaman tantara NICA yang melancarkan agresinya ke wilayah Jawa Tengah. Pada waktu itu, tepatnya pada tahun 1947, istrinya meninggal dunia dengan meninggalkan empat orang anak yang masih kecil-kecil. Ia membesarkan anak-anaknya sendiri tanpa menikah lagi.

Pukulan kedua ia terima pada bulan Januari 1982, ketika putranya yang kedua—bernama Unggul—meninggal dunia karena lekeumia. Setahun kemudian, pada 17 Januari 1983, ia menyampaikan pidato pada Konsultasi Nasional tentang Koperasi di Jakarta. Pidato itu menimbulkan kesan mendalam pada teman-teman seperjuangan dan juga para muridnya.[11]

ENDNOTES

1 Anton Lucas, "In Memoriam: Ki Sarino Mangunpranoto", *Indonesia.* Volum/issue. 35, Cornell University South East Asia Program, 1983. hlm. 133.

2 Anton E. Lucas, *One Spoul One Struggle: Peristiwa Tiga Daerah.* Yogyakarta: Resist Book, 2004, hlm. 1.1.

3 *Ibid.* hlm. 33.

4 Lucas, *Op.cit.* 1983, hlm. 133.

5 Lihat, Kementerian Penerangan Indonesia, *Republik Indonesia Propinsi Djawa Tengah.* Jakarta, hlm. 24.

6 Sarino Mangunpranoto, "Menuju ke Demokrasi Pendidikan di Indonesia" (Pidato pada Upacara Penerimaan gelar Doktor Kehormatan dalam Ilmu Pendidikan pada Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Malang pada tanggal 17 April 1976).

7 Lucas, *Op.cit.*1983, hlm. 135.

8 Lihat "Risalah Latarbelakang Seminar Pendidikan Kedesaan Tingkat Nasional tanggal 25-30 Juli 1976 di Bogor".

9 Lihat kembali catatan 8.

10 Lihat kembali Pidato Promotor Prof. Dr. D. Dwidjoseputro pada pemberian gelar Doctor Honoris Causa Pendidikan kepada Bapak Sarino Mangunpranoto pada 17 April 1976 (Malang : IKIP, 1976).

11 Abdurrachman Surjomihardjo, "In Memoriam Ki Sarino Mangunpranoto, 15.1.1910-17.1.1983," *Kompas*, 30 Januari 1983.

Prijono

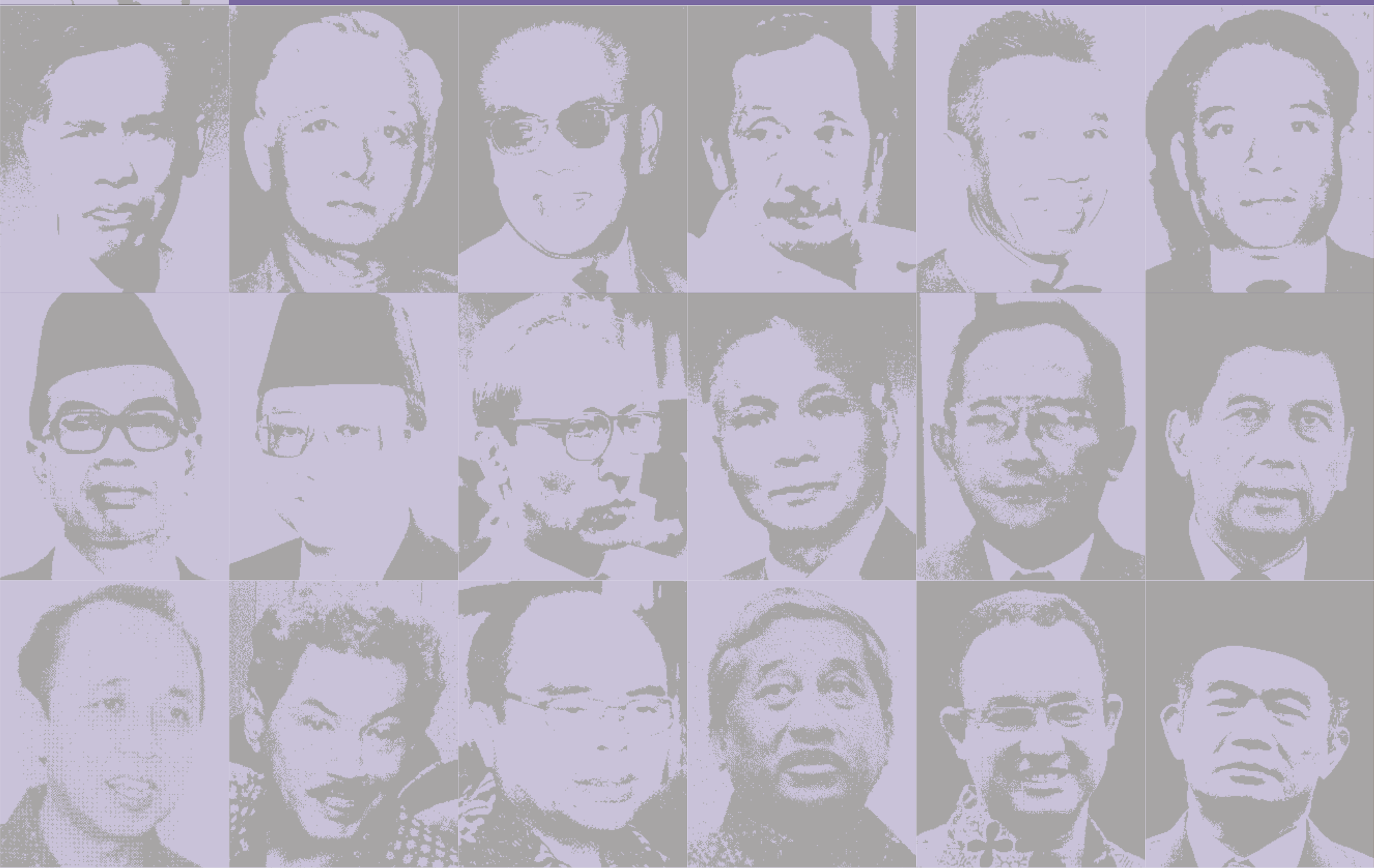

Masa Jabatan
9 April 1957 - 28 Maret 1966

Prijono

Prijono dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 20 Juli 1905. Ia termasuk tokoh penting dari Partai Murba dan pernah menjadi anggota Komite Perdamaian Indonesia. Ia menempuh pendidikan di Universitas Leiden dan lebih banyak berada di Eropa. Prijono menyandang gelar profesor setelah menerima gelar doktor dalam bidang sastra dan linguistik dari perguruan tinggi ternama di Belanda itu. Harry A. Poeze, dalam *Di Negeri Penjajah: Orang Indonesia di Negeri Belanda 1600-1950* (2008), menyebutkan bahwa Prijono—selain kuliah—aktif memperkenalkan kebudayaan Indonesia di negeri kincir angin khususnya dan dunia Eropa pada umumnya. Ia turut serta mendirikan Studentenvereeniging ter Bevordering van Indonesische Kunst (SVIK- Persatuan Pelajar/Mahasiswa untuk Memajukan Seni Indonesia) di Belanda dan menjadi anggota kehormatan pada Maret 1938.

Kecintaan Prijono terhadap kebudayaan Indonesia, khususnya budaya daerah, berlanjut setelah ia kembali ke Indonesia. Ia berusaha keras memajukan seni dan budaya daerah, termasuk ketika menjadi menteri. Menurut Prijono, kebudayaan daerah yang berkualitas tinggi akan memperkaya kebudayaan nasional. Ia juga menegaskan bahwa kesenian bangsa Indonesia memang harus berupa kesenian nasional dalam rohnya, tetapi dalam bentuknya bisa berupa kesenian daerah.[1] Rumusan Prijono ini menandai awal sebuah kebijakan yang menempatkan kesenian daerah sesuai dengan tujuan nasional dan perilaku masyarakat Indonesia. Ia menghargai budaya dan kesenian Barat, namun berupaya untuk menyingkirkan pengaruh-pengaruh negatifnya seperti yang disebutnya sebagai kesenian yang "penuh nuansa seks" serta bermuatan karakter moral rendah.

Prijono sangat menekankan pentingnya kebudayaan daerah. Kendatipun demikian ia sangat menjunjung tinggi persatuan. Ia mengatakan bahwa komitmen pembangunan budaya daerah harus diarahkan untuk bangsa, bukan untuk suku-suku tertentu. "Kita harus, jika mungkin, menghapuskan kesadaran kesukuan dan meningkatkan kesadaran manusia ke tingkat bangsa," tegasnya dalam "Nation Building and Education".[2] Oleh karena itu tidak terlalu mengherankan jika setelah Indonesia, seperti yang tertulis dalam karya Tod Jones *Culture, Power, and Authoritarianism in the Indonesian State* (2013), Prijono mengabdikan dirinya pada Universitas Indonesia (UI) pada Fakultas Seni, bahkan pernah menjabat sebagai Dekan fakultas bersangkutan. Prestasi akademik inilah yang menjadi pertimbangan Presiden Soekarno menunjuknya sebagai Menteri Kordinator Pendidikan dan Kebudayaan sejak 14 Maret 1957.[3]

Meskipun sudah mempunyai kesibukan sebagai seorang dosen, ia masih tetap aktif dalam organisasi sosial. Di samping aktif dalam Komite Pardamaian Indonesia ia juga aktif dan menjadi Ketua Asosiasi Persahabatan Indonesia-Cina periode 1955-1957. Atas aktivitasnya itu pada 18 Desember 1954 Prijono dianugerahi *The International Stalin Prize for Strengthening Peace Among Peoples* (Penghargaan Internasional Stalin untuk Memperkuat Perdamaian antar-Manusia) dari pemerintah Uni Soviet. Selain Prijono, sederetan nama tokoh dunia pernah memperoleh penghargaan ini—yang sejak 1957 berganti nama menjadi nama menjadi *The International Lenin Peace Prize*—antara lain Pablo Neruda, Pablo Picasso, Nikita Khrushchev, Rameshwari Nehru, Kwame Nkrumah, Fidel Castro, Indira Gandhi, dan Nelson Mandela.

MENJADI MENTERI

Prijono pertama kali menjadi Menteri PP&K pada akhir periode demokrasi liberal dalam Kabinet Djuanda (9 April 1957–10 Juli 1959). Kebijakan yang dijalankannya selaku menteri pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan kebijakan yang dijalankan oleh para menteri sebelumnya, yakni bertolak pada Undang-undang (UU) Pokok Pendidikan Nomor 4 Tahun 1950. Pada 29 September 1959, misalnya, ia membuka kampus Fakultas Sastra "Udayana" Bali sebagai cabang Universitas Airlangga. Fakultas Sastra

inilah yang menjadi embrio Universitas Udayana, yang diresmikan berdirinya pada 17 Agustus 1962, berdasarkan Surat Keputusan Menteri PTIP No.104/1962, tanggal 9 Agustus 1962.[4]

Masa pengabdiannya sebagai Menteri PP&K pada Kabinet Djuanda berakhir dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sekaligus pula mengakhiri masa demokrasi liberal dengan sistem parlementernya. Demikian pula struktur Kementrian PP&K dalam Kabinet Presidensial yang pertama kali dibentuk sejak Dekrit 5 Juli 1959, yaitu Kabinet Kerja I (10 Juli 1959–18 Februari 1960), mengalami perubahan. Kementerian yang mengurusi pendidikan dibagi menjadi tiga menteri muda, yaitu Menteri Muda Bidang Sosial Kulturil, Mentri Muda PP&K, dan Mentri Muda Urusan Pengerahan Tenaga Rakyat. Mentri Muda Sosial Kulturil dipercayakan kepada Dr. Prijono.

Perubahan politik sejak Dekrit Presiden Soekarno 5 Juli 1959 secara perlahan juga tampak pada iklim pendidikan nasional. Perubahan tersebut terutama terletak pada "konsep" tujuan pendidikan nasional. UU No. 4/1950 dan UU No. 12/1954 menetapkan bahwa tujuan pendidikan dan pengajaran adalah "Membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masayarakat dan tanah air" (pasal 3). Setelah itu tujuan dan arah pendidikan nasional mengalami pergeseran seiring dengan iklim politik pemerintah Soekarno yang menganut sistem demokrasi terpimpin.

Secara politik kharisma Presiden Soekarno pada waktu itu memang sangat kuat, apalagi mendapat dukungan kuat pula dari Angkatan Darat, sehingga dekrit dan Manipol menjadi bahan "acuan" bagi Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang bersidang pada tahun 1960. Salah satu produk MPRS, yaitu Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 tentang pendidikan nasional dan kebudayaan, menunjukkan pengaruh Presiden Soekarno ikut mewarnainya. Ketetapan (Tap) itu, khususnya Bab II pasal 5, menyatakan, "Menyelenggarakan kebijaksanaan dan sistem pendidikan nasional menuju ke arah pembentukan tenaga-tenaga ahli dalam pembangunan sesuai dengan syarat-syarat manusia sosialis Indonesia, yaitu berwatak luhur". Kemudian pada pasal 2 ayat 1 menyebutkan, "Melaksanakan Manipol/USDEK di bidang mental/agama/kebudayaan dengan syarat spiritual dan material agar setiap warga negara dapat mengembangkan kepribadiannya dan kebangsaan Indonesia serta menolak pengaruh-pengaruh buruk kebudayaan asing". Selanjutnya terkait dengan pendidikan agama, Bab II pasal 3 menyebutkan, "Pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah umum mulai sekolah rendah (SD) sampai universitas, dengan pengertian bahwa murid berhak tidak ikut serta dalam pendidikan agama jika wali/murid dewasa menyatakan keberatannya."

SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL PANCA WARDHANA-PANCACINTA

Prof. Dr. Prijono dapat dikatakan sebagai salah seorang loyalis Presiden Soekarno yang paling setia. Ketika pada upacara kenegaraan tanggal 17 Agustus 1959 Presiden mencetuskan tentang ditemukannya kembali revolusi kita (*Rediscovery of our Revolution*), yang kemudian oleh ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA) diberi nama Manifesto Politik (Manipol) serta ditambah dengan kata USDEK (Undang-undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kerakyatan), Prijono langsung menanggapi dan mengaitkan Manipol/USDEK dengan program-program pendidikan di lingkungan kementerian yang dipimpinnya.[5]

Waktu penyelenggaraan Musyawarah Besar Kepribadian Nasional di Salatiga, Jawa Tengah, pada bulan Agustus 1960, Prijono menyatakan bahwa "Kita bisa dan kita harus membentuk identitas Indonesia modern, yang saya rasa belum terbentuk sedalam dan seluas sebagaimana mestinya, dengan menggunakan apa yang telah kita warisi dari nenek moyang kita, dengan cara yang konsisten, dengan Manifesto Politik dan USDEK". Dengan cara ini, tambahnya, "identitas Indonesia modern akan menjadi identitas nasional Indonesia yang karakteristiknya diterima secara luas dan yang jiwanya sosialis."[6]

Atas

Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan

(Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia)

Tengah

Menteri P. D. dan. K. berpidato di hadapan Anggota wajib latih di Senayan 15 Februari 1962

(Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia)

Bawah

Dari kiri ke kanan, Prof. Sarwono Prawirohardjo (Ketua MIPI), Lennart Mattson (Direktur UNESCO Coorporation Office for Southeast Asia), Prof. Dr. Prijono (Menteri PP dan K), dan Brigjen Kosasih (“Pangdan Jawa Barat)

(Sumber foto: Berita MIPI, Tahun IV, No.1, Februari 1960)

Prijono, yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Muda bidang Sosial Kulturil (Kabinet Kerja I 10 Juli 1959 s/d 18 Februari 1960), kemudian menerbitkan Instruksi No. 1 yang disebut Sapta Usaha Tama, yang terdiri:

1. menertibkan aparatur dan usaha-usaha Kementerian PPK,
2. menggiatkan kesenian,
3. mengharuskan usaha halaman,
4. mengharuskan penabungan,
5. mewajibkan usaha-usaha koperasi,
6. mengadakan kelas masyarakat, dan
7. membentuk regu kerja di kalangan SLA dan universitas.

Tak lama setelah terbit surat keputusan pengangkatannya kembali menjadi Menteri PP&K (Kabinet Kerja II 18 Februari 1960 s/d 6 Maret 1962) Dr. Prijono menerbitkan Instruksi No. 1 kemudian disusul oleh Instruksi Nomor 2 tahun 1960 yang menegaskan Pancasila dan Manipol sebagai landasan pendidikan nasional. Pada bulan Oktober tahun yang sama Panca Wardhana sebagai berikut:

1. Perkembangan Cinta Bangsa dan Tanah Air, Moral, Nasional/ Internasional/ Keagamaan.
2. Perkembangan Intelegensia.
3. Perkembangan Emosional, Artistik atau Rasa Keharuan dan Keindahan Lahir Batin.
4. Perkembangan Kerajinan Tangan.
5. Perkembangan Jasmani. Gagasan ini paling tidak telah disetujui oleh Soekarno sebagai Pemimpin Besar Revolusi seperti yang diakuinya sendiri dalam pidatonya (Tavip).

Ada dua alasan yang mendorong Prijono menerbitkan kedua instruksinya itu (Sapta Usaha Tama dan Panca Wardhana), yang sedikit banyak dipengaruhi oleh pemikiran politik sekaligus rasa kagumnya kepada Presiden Soekarno. Pertama, sistem pendidikan Panca Wardhana pada hakikatnya adalah pendidikan dengan pemusatan pada pertumbuhan dan perkembangan pribadi serta bercorak nasionalistik yang memenuhi tuntutan revolusi Indonesia yang sedang berjalan. Kedua, menurut Prijono, kebijakan itu merupakan penolakannya terhadap Undang-undang No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954 tentang Pokok-pokok Pendidikan dan Pengajaran yang hanya cocok dilaksanakan pada masa demokrasi liberal.[7]

Konsep Panca Wardhana merupakan dokumen politik Pendidikan Nasional Indonesia yang pernah ada dan tercatat dalam UNESCO, dan melalui Kepala Misi UNESCO untuk Indonesia konsep ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi *The Five Principles of Education*, yang isinya sebagai berikut:

1. Perkembangan Cinta Bangsa dan Tanah Air, Moral, Nasional/ Internasional/ Keagamaan.
2. Perkembangan Intelegensia.
3. Perkembangan Emosional, Artistik atau Rasa Keharuan dan Keindahan Lahir Batin
4. Perkembangan Kerajinan Tangan.
5. Perkembangan Jasmani.

Meskipun demikian, pada awalnya, banyak masyarakat pendidik menolak konsep pendidikan yang diperkenalkan oleh Menteri PP&K Prijono, terutama karena sikap politiknya bersama-sama dengan Sekretaris Jenderal PP&K yang mendukung pendirian Lembaga Pendidikan Nasional (LPN). Lembaga tersebut dikenal berafiliasi pada Partai Komunis Indonesia (PKI). Melalui lembaga tersebut PKI merumuskan Pancacinta sebagai isi moral Sistem Pendidikan Panca Wardhana. Alasan lembaga tersebut merumuskan Pancacinta karena penyelenggaraan pendidikan di Indonesia sampai waktu itu masih lebih banyak menekankan pada aspek intelektual, padahal pengetahuan tentang ilmu beserta kecakapannya harus dipraktikan dalam kehidupan sehari-hari.[8]

Namun protes atau nada keberatan terhadap penerapan konsep pendidikan nasional Panca Wardhana yang kemudian berubah menjadi Panca Wardhana-Pancacinta sebagai pengganti sistem lama—yang

disebut oleh Prijono sebaga sistem Pendidikan nasional yang cocok untuk era Demokrasi Liberal—diabaikan. Presiden Soekarno lebih tertarik pada sistem pendidikan nasional yang bertumpu pada Pancasila dan Manipol/USDEK seperti yang diuraikan dalam konsep Prijono. Hal ini antara lain tersirat dalam Penetapan Presiden (Penpres) yang terbit pada tahun 1965, yaitu Penpres No. 145 Tahun 1965 tentang Nama dan Rumusan Induk Sistem Pendidikan Nasional. Penpres tersebut menetapkan sistem pendidikan nasional Indonesia sebagai Sistem Pendidikan Pancasila yang berdasarkan pada amanat Presiden, bahwa dasar-dasar dan isi moral pendidikan nasional adalah Pancasila dan Manipol/USDEK.

Dalam situasi pro dan kontra terhadap konsep Panca Wardhana-Pancacinta itu Presiden Soekarno kembali menerbitkan Penpres baru, yaitu Penpres No. 19 Tahun 1965 yang secara tegas menyebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah melahirkan warga negara sosialis Indonesia yang susila, yang bertanggung jawab atas terselenggaranya masyarakat sosialis Indonesia, adil, dan makmur, baik spiritual maupun material, dan berjiwa Pancasila. Artinya politik pendidikan nasional adalah Manipol/USDEK.[9]

Suatu sistem, termasuk sistem pendidikan yang bersifat nasional, tentu mempunyai keunggulan dan kelemahan. Salah satu kelemahannya kadangkala kurang mengakomodir kepentingan lokal atau daerah-daerah dengan kebudayaan tertentu. Kadangkala untuk mengisi kebutuhan itu diperlukan semacam tuntutan antara kurikulum yang baik, yang memberikan ruang bagi lokalitas tertentu untuk menyempurnakannya, atau dengan kata lain memungkinkan dimasukkannya muatan-muatan lokal. Pada waktu konsep pendidikan Menteri PP&K Prijono diterbitkan situasi dan kondisi objektif masyarakat berada dalam situasi dan kondisi yang disebut oleh Presiden Soekarno sebagai masyarakat yang baru saja menemukan kembali revolusinya. Karena itu kurikulum yang disusun juga berupaya untuk menerjemahkan tujuan pendidikan sesuai dengan jiwa zamannya, seperti isi jiwa yang memiliki semangat kepercayaan dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkeadaban sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia, mempunyai semangat perikemanusiaan dalam bentuk persahabatan dengan seluruh bangsa di dunia atas semangat membangun dunia baru (*the new emerging forces*) yang terbebas dari imperialisme dan neo kolonialisme, serta semangat bermusyawarah dan bermufakat dalam kegotongroyongan. Pada dasarnya isi kurikulum ini mewakili apa yang ada di setiap sila Pancasila yang menjadi ideologi bangsa Indonesia. Namun pasca Gestapu tahun 1965 kurikulum Panca Wardhana-Pancacinta dijadikan dasar yang menunjukkan bahwa Menteri PP&K Dr. Prijono telah mengkhianati Pancasila sebagai ideologi negara.

Sementara itu untuk mendukung terlaksananya sistem pendidikan dan pelaksanaan kurikulum Panca Wardhana-Pancacinta pada tahap pertama dirancang suatu rencana pelajaran untuk tiap jenjang pendidikan yang disebut "Rentjana Pelajaran dan Pendidikan TK-SD/SMP, SMA-Gaya Baru. Setiap mata pelajaran pada prinsipnya bukan sekedar berisi serentetan bab-bab dari berbagai jenis pelajaran, tetapi juga segi kependidikan yang tersimpul dalam tiap-tiap pelajaran yang harus diajarkan kepada peserta didik. Mata pelajaran Sejarah Nasional, misalnya, diharapkan setelah peserta didik selesai mempelajari sejarah nasional mengenali jati dirinya sebagai bangsa Indonesia dan sesuai jenjang pendidikannya mampu memperkenalkan jati diri bangsanya yang berjuang dan mampu mengusir kolonialisme. Kemudian mata pelajaran musik dan sastra digunakan untuk menopang perkembangan emosional dan artistik peserta didik. Sementara untuk mendorong intelegensi agar berkembang maksimal digunakan mata pelajaran klasik, seperti "menulis", "membaca", dan "ilmu berhitung" untuk mengasah "roh" intelektual.

Pada tahun 1962 Kementrian Pendidikan Dasar dan Kebudayaan menyelenggarakan rapat-kerja Direktur-direktur Taman Kanak-kanak, SMP-SMA Negeri dan swasta seluruh Indonesia di kota Bandung.[10] Rapat kerja itu menghasilkan semacam buku rumusan induk tentang pembelajaran dari tingkat prasekolah atau Taman Kanak-kanak sampai dengan Sekolah Menengah Atas. Hasil rapat kerja itu kemudian disempurnakan lagi pada tahun 1964 menjadi Rencana Pembelajaran Gaya Baru. Rencana pembelajaran yang disebutkan terakhir menghapuskan pembagian kelas A dan B yang pada waktu itu diterapkan untuk Sekolah Menengah Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Tingkat Atas. Dengan

Menteri P. D. & K. menerima kunjungan Menteri Kebudayaan USSR pada tanggal 29 Februari 1960

(Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia)

penghapusan pembagian itu maka para peserta didik merasa sederajat dengan sesama temannya tanpa memandang latar belakang kehidupan keluarganya.

Dalam kurikulum Gaya Baru untuk tingkat sekolah menengah ada penambahan mata pelajaran baru, yaitu Ilmu Administrasi dan Kesejahteraan Keluarga. Kedua mata pelajaran baru itu bertujuan agar peserta didik mempunyai bekal sewaktu terjun bermasyarakat. Sementara itu pendidikan untuk tingkat Sekolah Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar menekankan nilai-nilai dalam masyarakat dan masyarakat pulalah yang menentukan isi bahan pelajaran serta arah yang harus dikembangkan, dengan catatan tidak bertentangan dengan filsafat dan dasar negara. Dengan kata lain peserta didik harus menjadi manusia Pancasila yang bertanggung jawab atas terselenggaranya masyarakat adil dan makmur.[11]

PGRI DAN RETOOLING APARATUR PP DAN K

Salah satu faktor yang ikut menentukan keberhasilan atau ketidakberhasilan suatu sistem pendidikan adalah faktor guru. Di Indonesia pada masa itu jumlah guru relatif masih jauh dari mencukupi, apalagi jika yang dibutuhkan guru yang sesuai kompetensi keilmuan dengan mata pelajaran yang diampu. Upaya untuk menambah jumlah guru yang kompeten di bidangnya telah diupayakan oleh beberapa Menteri PP&K, seperti Menteri Bahder Djohan, Menteri Muhammad Yamin, dan Menteri Suwandi Notokoesoemo. Walaupun pada masa itu banyak pelajar yang enggan memilih profesi sebagai guru sekolah, namun status dan peran guru ternyata cukup menarik bagi organisasi politik dan serikat buruh, khususnya dalam menguasai bidang/jalur pendidikan. Banyak politisi dan praktisi mencoba menjadi anggota organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) atau sebagai organisasi buruh. Hal ini terlihat sejak pertengahan dasawarsa 1950-an, terutama pasca Pemilihan Umum tahun 1955. Oleh karena itu semenjak Kongres VIII PGRI tahun 1956 di Bandung kegiatan dan perjuangan PGRI mulai dibina kembali. Para pimpinan Pengurus Besar (PB) PGRI waktu itu berusaha meyakinkan berbagai kekuatan politik dan serikat buruh, bahwa PGRI bukan serikat buruh karena jabatan guru secara hakiki berbeda dan tidak bisa disamakan dengan jabatan buruh murni.

Meskipun demikian upaya menarik PGRI menjadi bagian dari satu kekuatan politik tetap berjalan, bahkan upaya itu disertai pula dengan praktik memecah belah atau mengadu domba para pengurus PB PGRI. Praktik adu domba atau memecah belah semakin jelas sejak Kongres IX PGRI yang diselenggarakan di Surabaya pada bulan Oktober/November 1959. Pada kongres itu sekelompok guru di bawah pimpinan Soebandri berupaya mengagalkan M.E. Subiyadinata terpilih sebagai Ketua Umum

Menteri P.P dan K, Prof. Prijono menghadiri acara penyambutan secara adat di Kutaraja
(Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia)

PGRI dengan membentuk dan mengajukan calon tandingan. Namun upaya itu tidak berhasil karena Subiyadinata tetap terpilih sebagai Ketua Umum PGRI

Upaya Soebandri dkk. menyingkirkan Subiandinata dari tampuk pimpinan PGRI tidak hilang begitu saja. Tiga tahun kemudian, pada Kongres X PGRI yang diselenggarakan di Jakarta pada tahun 1962, Soebandri dkk. mengedarkan selebaran yang isinya menyebutkan M.E. Subiyadinata anti Manipol/USDEK. Selebaran itu ditandatangani oleh 14 orang. Keempatbelas orang penandatangan selebaran itu dituduh sebagai fitnah, sehingga kemudian ditangkap dan ditahan oleh aparat keamanan. Namun Subiyadinata memohon kepada para petugas untuk membebaskan mereka pulang ke daerah masing-masing. Peristiwa itu rupanya berpengaruh kepada kongres, yang akhirnya menyepakati masuknya Pancasila dan Manipol/USDEK sebagai dasar PGRI. Meskipun sudah dicapai kesepakatan untuk mencantumkan Pancasila–Manipol dan USDEK dalam anggaran dasar PGRI, para penandatangan selebaran fitnah di bawah kordinator Soebandri tetap berupaya menguasai organisasi guru sehingga perpecahan di tubuh PGRI tidak terhindarkan. Dasar dari perpecahan itu memang sangat prinsipil. Kelompok atau kubu Subiyadinata melihat aksi-aksi Soebandri dkk. dengan dalih *machtsvorming en macthsaanwending* 'pembentukan kekuatan dan penggunaan kekuatan' sangat mengancam keselamatan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945 dan generasi baru. Perpecahan di kalangan guru dinilai akan berdampak pula pada para peserta didik. Kubu Subiyadinata mengatakan bahwa ancaman terhadap cita-cita proklamasi itu antara lain datang melalui sistem pendidikan Pancacinta dan Pancatinggi yang digagas oleh PKI.

Kubu Soebandri menunjuk Abdullah S Soepardi dan Goldfriend Macam menjadi calon ketua dan wakil ketua pada pemilihan Pengurus Besar PGRI. Goldfriend Macam akhirnya dikeluarkan dari pencalonan karena diprotes oleh sebagian besar peserta. Sebagai catatan, Macam merupakan satu di antara penandatanganan selebaran "fitnah". Pemilihan Ketua PB PGRI akhirnya berjalan sesuai agenda dan ME Subiyadinata terpilih sebagai Ketua Umum PB PGRI. Pada bulan-bulan pertama PGRI mengalami kesulitan besar, terutama karena kekurangan dana (disabot pengurus PGRI yang pro PKI). Meskipun demikian kegiatan PGRI dalam upaya memperjuangkan nasib para guru tetap berjalan.

Untuk memperkuat citra di kalangan masyarakat pada bulan Februari 1963 PKI menyelenggarakan "Seminar Pendidikan Pengabdi Manipol". Kemudian pada tanggal 17 Juli 1963 lima partai politik (parpol), dengan sekitar 40 organisasi masyarakat binaannya, menyelenggarakan musyawarah "Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Pendidikan Nasional". Pengurus PB PGRI ikut sebagai salah satu peserta musyawarah tersebut. Ada yang menyebutkan bahwa musyawarah ini diselenggarakan sebagai reaksi terhadap seminar yang diselenggarakan oleh PKI pada bulan Februari 1963.

Akibat dua peristiwa itu ketegangan dalam tubuh PB PGRI kembali muncul karena ada upaya dari beberapa kekuatan politik untuk menarik atau menguasai organisasi guru itu. Bagi para pengurus PB PGRI semakin terbuka siapa yang memihak PKI. Lahirnya PGRI Nonvaksentral di bawah kepengurusan Soebandri–Moejono–Ichwani semakin memperjelas perpecahan. PGRI Nonvaksentral sangat aktif melakukan propaganda dan penyusupan, terutama terhadap aparatur pendidikan, khususnya di lingkungan Departemen PP&K. Dengan meminjam kata Dr. Umasih, pada masa itu muncul apa yang disebut "Guru Nasionalis" dan "Guru Manipolis" yang saling bertentangan.[12]

Pada rapat pertama Majelis Pendidikan Nasional, Dr. Busono Wiwoho menyarankan kepada Menteri Prijono agar Panca Wardhana diisi dengan moral Pancacinta. Seperti telah disinggung di atas, Pancacinta merupakan gagasan PKI yang isinya 1) cinta nusa dan bangsa, 2) cinta Ilmu Pengetahuan, 3) cinta kerja dan rakyat yang bekerja, 4) cinta perdamaian dan persahabatan antara bangsa-bangsa, dan 5) cinta orangtua.

Pidato Dr. Busono Wiwoho yang menjelaskan Panca Wardhana yang diisi moral Pancacinta menimbulkan pertentangan dan kegelisahan di kalangan para pendidik. Demikian pula penjelasan Menteri PP&K Prijono tentang Panca Wardhana-Pancacinta yang disampaikan pada rapat dinas tanggal 23 Juli 1964 di lingkungan Kementrian PP&K semakin memperuncing polemik tentang sistem pendidikan. Pembantu Menteri Tartib Prawirodiharjo meninggalkan rapat. Tindakan itu dinilai oleh sebagian pihak sebagai satu pengkhianatan terhadap Menteri Prijono. Sebagai balasan Menteri Prijono melakukan perombakan struktur organisasi kementeriannya, antara lain jumlah pembantu menteri atau eselon I yang semula berjumlah tiga orang disederhanakan menjadi dua orang. Tindakan Prijono ini bertolak dari Keputusan Presiden No. 187/1964 tanggal 4 Agustus 1964, yang menurut beberapa pihak diambil atas usul Menteri PP&K Dr. Prijono. Tindakan Prijono berdampak besar pada para pegawai Kementrian PP&K. Banyak pegawai yang merasa tidak punya kepastian lagi dengan kariernya.

Dalam situasi seperti itu 27 orang pegawai (pada awalnya 28 orang, namun 1 orang mengundurkan diri) mengirim surat kepada Menteri Prijono dengan maksud menjernihkan suasana. Namun Prijono memberhentikan ke-27 pegawai itu dengan alasan "atas permintaan sendiri". Tindakan Prijono mengundang kegaduhan. Beberapa ormas dan perwakilan pendidikan dan kebudayaan memprotes keras kasus pemberhentian itu. Sebaliknya Serikat Pekerja Pendidikan dan PGRI Nonvaksentral menyokong dan mendukung tindakan Menteri Prijono sehingga kedudukan Prijono menjadi kuat.

Pada *reshuffle* Kabinet Kerja menjadi Kabinet Dwikora akhir Agustus 1964 Presiden Soekarno mengangkat kembali Dr. Prijono menjadi Menteri Kondinator (Menko) Pendidikan dan Kebudayaan serta Ny. Artati Marzuki sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (PD dan K) baru. Setelah *reshuffel* kabinet "kelompok 27" mengirim surat kepada Menteri PD dan K dan memohon kesediaannya untuk membantu mereka. Surat itu tidak dibalas dengan alasan permasalahan ke-27 orang itu sudah berada di tangan presiden.

Sebagai salah satu solusi mengenai ke-27 orang pegawai P & K itu Markas Besar TNI Angkatan Darat, yang *nota bene* berseberangan dengan PKI, menampung 24 orang di antaranya dan langsung menempatkan mereka di bawah kepengurusan Letnan Kolonel Amir Murtono S.H. Satu orang diangkat menjadi pegawai Kementrian Dalam Negeri dan dua sisanya masing-masing diangkat sebagai Pembantu Khusus Menteri dan sebagai Ketua PMI Pusat.

Akhirnya Presiden Soekarno membentuk "Panitia Penyempurnaan Pendidikan Sistem Pendidikan Pancawardhana" dengan tugas menyampaikan pertimbangan tentang "pemecatan massal". Hasil kerja panitia menyatakan bahwa ke-27 orang itu tidak bersalah. Untuk menyelamatkan muka Menko Menteri P&K Dr. Prijono sebanyak 13 orang dari 27 orang yang terkena pemecatan diperbolehkan kembali bekerja pada Departemen P & K, sedangkan sebagian ada yang tetap bekerja di Markas Besar TNI

AD dan sebagian lagi tetap bekerja di Departemen Dalam Negeri. Ketika pemerintahan berganti dengan Pemerintahan Orde Baru ke-27 orang itu direhabilitasi nama baiknya dan dikembalikan lagi ke Departemen P & K.

Pada awal Oktober 1965 terjadi aksi penculikan oleh kelompok bersenjata terhadap beberapa perwira Tinggi TNI AD di Jakarta dan dua orang perwira menengah di Yogyakarta. Peristiwa itu kemudian dikenal dengan sebutan Peristiwa Gestapu atau G-30-s PKI. Pasca peristiwa itu terjadi pergeseran kekuasaan di pucuk pemerintahan Indonesia. Kekuatan yang anti PKI/Komunis mulai mengambil alih kekuasaan, terutama sejak terbitnya Supersemar (11 Maret 1966). Dalam rangka memenuhi tuntutan rakyat (Tritura), beberapa kali Presiden Soekarno melakukan *reshuffle* kabinet. Sampai dengan Kabinet Dwikora II nama Dr. Prijono masih tetap pada posisinya sebagai Menteri P&K, namun aksi-aksi Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat) yang semakin sering turun ke jalan sejak 10 Januari 1966 menuntut Prijono selaku Menko P&K dan Menteri PD dan K Sumardjo turun dari jabatannya. Sumardjo dinilai sebagai orang atheis, sedangkan Prijono dinilai kebijakannya sering merugikan dan menimbulkan kemarahan kaum muslimin, antara lain mendukung agar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dibubarkan seperti yang diusulkan oleh Dipa Nusantara Aidit Ketua CC PKI.[13]

Seperti diungkapkan Sulastomo, Ketua Umum PB HMI saat itu, yang dituangkan dalam tulisan *Hari-hari yang Panjang: Transisi Orde Lama ke Orde Baru* (2008), HMI menggelar aksi unjuk rasa, yang salah satu tuntutannya mendesak Soekarno mencopot Prijono dari jabatan menteri. Bung Karno menolak pembubaran HMI, tetapi juga tidak mengganti Prijono.[14]

Menjelang akhir kabinet ini pada 16 Maret 1966 ia diculik oleh para aktivis yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI) dan Lasykar Arief Rachman Hakim dan dibawa ke markas Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad). Sementara Prijono yang dituduh terlibat dengan kekuatan G-30-S PKI meninggal pada 6 Maret 1969 dengan meninggalkan seorang anak bernama Lembu Amiluhur Prijono.

ENDNOTES

1 *Pewarta PPK*, 1958: hlm. 11

2 Lihat Herbert Feith & Lance Castles, *eds., Indonesian Political Thinking 1945-1965,* 1970: hlm. 328.

3 Tod Jones, *Culture, Power, and Authoritarianism in the Indonesian State.* 2013, hlm. 98.

4 Gianie dkk (ed.), *Direktori 100 perguruan tinggi di Indonesia 2017: Kompaspedia,* Jakarta: Buku Kompas, 2017.

5 Mengenani penemuan kembali revolusi Indonesia, lihat Pidato Presiden Soekarno pada 17 Agustus 1959; "Penemuan Kembali Revolusi Kita". dalam *Haluan Politik dan Pembangunan Negara*. Departemen Penerangan Republik Indonesia, 1959. hlm. 40.

6 Lihat Prijono, *Sekitar Arti Kepribadian Nasional*, 1960, hlm. 20.

7 Umasih, "Ketika Kebijakan Orde Lama Memasuki Domain Pendidikan: Penyiapan dan Kinerja Guru Sekolah Dasar di Indonesia", *Paramita* Vol.24, No.1, Januari 2014, hlm. 108.

8 *Ibid.*

9 *Ibid.* hlm. 109; lihat juga Drs. Estiko Suparjono, *Sistem Pendidikan Nasional Pancasila*, Djakarta: Bhratara, 1966, hlm. 76.

10 Suradi Hp dkk, *Sejarah Pemikiran Pendidikan dan Kebudayaan*, Jakarta: Departemen P dan K, 1986, hlm. 127.

11 *Ibid.* hlm. 128; lihat juga Departemen. Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, *Rentjana Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar*, Djakarta: Departemen. Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, 1964, hlm. 8.

12 Umasih, *Opcit*. hlm. 109-110.

13 Harold Crouch, *The Army and Politics in Indonesia*. Equinox Publishing (Asia), 2007, hlm. 194.

14 Sulastomo, *Hari-hari yang Panjang: Transisi Orde Lama ke Orde Baru* .Jakarta: Penerbit Buku Kompas 2008, hlm. 85.

Iwa Kusuma Sumantri

Masa Jabatan
3 Maret 1961 – 13 Maret 1962

Iwa Kusuma Sumantri

MUNCULNYA KESADARAN KEBANGSAAN DAN KEMERDEKAAN

Iwa Kusuma Sumantri dilahirkan di Ciamis, ujung timur Tanah Parahyangan, Jawa Barat, pada tanggal 31 Mei 1899. Seperti kebanyakan tokoh pergerakan Indonesia, Iwa berasal dari pasangan keluarga priyayi.[1] Ayahnya bernama Raden Wiramantri, putra Bupati Ciamis Utara; sedangkan ibunya bernama Nji Raden Redjaningsih, putri Bupati Imbaranegara. Ketika Iwa lahir ayahnya sedang menjadi calon guru pada Sekolah Kelas Dua.[2] Selain bermain bola, catur, dan gitar, Iwa kecil memiliki kebiasaan membaca buku, terutama buku petualangan karangan Karl May dan dongeng karya Conan Doyle.[3] Meskipun berasal dari keluarga elite politik, Iwa tidak pernah berbeda sikap terhadap anak orang kaya dan orang miskin. Sikap egalitarian ini mungkin yang kelak berpengaruh terhadap keputusannya meninggalkan sekolah pamong praja Opleiding School voor Inlandsche Ambtenaren (OSVIA).

Iwa dipersiapkan oleh keluarganya menjadi orang terpandang melalui jalur pendidikan. Untuk menambah kemampuan bahasa Belanda ia diberi pelajaran tambahan bahasa Belanda oleh Nyonya Stamler.[4] Pada tahun 1915, selepas menyelesaikan pendidikan di Hollandsch Inlandsche School (HIS), Iwa dimasukkan ke sekolah calon pegawai negeri OSVIA di Bandung. Meskipun dengan berat hati Iwa menerima anjuran ayahnya, tetapi kemudian ia memutuskan untuk meninggalkan OSVIA. Ia menganggap bahwa sekolah ini "terlalu ke barat-baratan, persaingan di antara siswa tidak sehat, dan ia tidak setuju model perploncoannya".[5] OSVIA memisahkan dirinya dengan dunia "rakyat jelata" yang dekat dengannya sejak kanak-kanak di desa.[6] Di samping itu Iwa mengaku tidak sudi menjadi alat Belanda sesudah kelak menyelesaikan sekolah.[7]

Setelah keluar dari OSVIA, Iwa masuk Recht School (Sekolah Menengah Hakim) di Batavia. Sejak sekolah di Batavia inilah Iwa mengenal dunia pergerakan, meskipun semula belum terjun secara aktif. Iwa mulai membaca majalah *Bintang Hindia* yang dipimpin oleh Ahmad Rivai, salah satu penggerak pencerahan pikiran–atau yang dikenal sebagai *nobility by birth* 'kebangsawanan pikiran'–di kalangan masyarakat terdidik.[8] *Bintang Hindia* membuka horizon berpikir Iwa, sebab koran ini menghimpun informasi mengenai situasi global yang berlangsung pada masa itu. Di sisi lain Iwa mengikuti situasi pergerakan nasional yang terjadi di tanah Jawa, mulai dari pendirian Boedi Oetomo, Sarekat Islam, sampai Indische Partij. Iwa kemudian bergabung dalam organisasi Tri Koro Darmo yang kemudian berubah menjadi Jong Java. Ia menjadi salah seorang pengurus saat Soekiman Wirjosandjojo–yang kelak menjadi salah satu sahabatnya di Belanda–menjabat sebagai ketua pada tahun 1918.[9]

Setelah menyelesaikan pendidikan di sekolah hukum pada tahun 1921 Iwa bekerja di kantor Pengadilan Negeri Bandung, kemudian dipindahkan pada kantor Pengadilan Tinggi Surabaya dan Jakarta. Dengan bekerja di kantor pemerintahan Belanda, Iwa berharap memperoleh kesempatan belajar ke negeri Belanda. *In het land van de overheerser* 'di negeri penjajah', meminjam istilah Harry Poeze, merupakan tempat terbaik untuk menimba ilmu hukum bagi para mahasiswa Indonesia. Sebagian besar orang Indonesia yang belajar hukum kuliah di Fakultas Hukum Universiteit Leiden. Pada bulan September 1922 Iwa berangkat ke Belanda bersama salah seorang temannya, Sartono.

Iwa merupakan bagian dari gelombang baru kedatangan pelajar Indonesia ke Belanda setelah Perang Dunia I yang tidak lagi didominasi oleh keluarga kerajaan Jawa. Orang tua yang berlatar belakang birokrat dan kelas menengah atas mulai mengirimkan anak-anaknya belajar ke Belanda.[10] Hal ini dimungkinkan oleh kebijakan politik etis yang menawarkan akses terhadap anak-anak yang berasal dari keluarga menengah atas untuk masuk ke pendidikan dasar dan menengah dengan bahasa pengantar bahasa Belanda.[11] Alasan lain, sebagaimana dikemukakan Poeze, adalah lulusan pendidikan STOVIA dan Recht

Iwa Kusuma Sumantri (tengah) bersama pengurus Indonesische Vereeniging, dari kiri ke kanan: Darmawan Mangoenkoesoemo, Moh. Hatta, Iwa Kusuma Sumantri (ketua) Sastromoeljono, Sartono

(Sumber: Repro *Di Negeri Penjajah: Orang Indonesia di Negeri Belanda 1600-1950*. Jakarta: Gramedia, 2008)

School lebih mudah melanjutkan pendidikan ke Belanda karena tidak harus menempuh ujian masuk. Di samping itu tersedia berbagai beasiswa pendidikan dengan syarat sesudah menyelesaikan pendidikan kedokteran atau pendidikan hukum mereka harus bekerja pada pemerintah Belanda beberapa tahun lamanya.[12] Di antara gelombang baru kedatangan pelajar Indonesia ke Belanda ini terdapat nama-nama yang kelak menjadi tokoh pergerakan, seperti Ali Sastroamidjojo, Soetan Sjahrir, Achmad Soebardjo yang keluarganya berlatar belakang pejabat rendah, Darmawan Mangoenkoesomo yang berasal dari keluarga kepala sekolah, Arnold Mononutu yang merupakan anak seorang dokter, dan Moh. Hatta yang keluarganya berlatar belakang ulama dan pedagang kaya.

Selama menjadi pelajar di Universiteit Leiden, Iwa Kusuma Sumantri tidak hanya menghabiskan hari-harinya dengan belajar. Ia terjun ke dunia pergerakan dengan bergabung ke dalam organisasi perkumpulan pelajar Indonesia, Indonesische Vereeniging. Pada waktu ia datang di Belanda sedang terjadi perubahan di dalam organisasi nasionalis ini. Organisasi yang pada awalnya bernama Indische Vereeniging dan hanya merupakan klub perkumpulan pelajar dengan "orientasi senang-senang" ini kemudian berubah haluan menjadi radikal dan politis. Perubahan ini sebagian besar disebabkan oleh kedatangan generasi baru pasca-Perang Dunia I yang memiliki kesadaran politik jauh lebih tinggi dari generasi mahasiswa sebelumnya.[13] Mereka pada umumnya memiliki pengalaman karena sudah terlibat dalam organisasi sosial-politik pemuda ketika masih berada di tanah air.[14] Perubahan nama dari "Indische" ke "Indonesische" menyiratkan sikap yang lebih kuat sebagai orang Indonesia: bukan bagian ataupun orang Hindia Belanda.

Selang setahun bergabung dalam Indonesische Vereeniging Iwa dipilih sebagai ketua, menggantikan Hermen Kartawisastra. Naiknya Iwa menjadi pemimpin Indonesische Vereeniging membuat organisasi ini semakin berwatak antikolonial. Di bawah kepemimpinan Iwa, Indonesische Vereeniging mengemukakan tiga asas pokok yang menjadi pegangan tetap bagi Indonesische untuk tahun-tahun mendatang: kemerdekaan bagi Indonesia, *self-help*, dan perjuangan ke arah kesatuan.[15] Asas *self-help* kemudian berkembang menjadi prinsip "nonkooperasi" dalam arti Indonesische Vereeniging tidak akan bekerjasama dengan pemerintah Belanda dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tujuan organisasi ini, yaitu kemerdekaan Indonesia, kemudian disalurkan melalui organ majalah mereka yang juga turut berganti nama dari *Hindia Poetra* menjadi *Indonesia Merdeka*. Pendahuluan edisi perdana *Indonesia Merdeka* menyebutkan bahwa perubahan nama *Hindia Poetra* menjadi *Indonesia Merdeka* mengungkapkan tujuan dan usaha organisasi ini, yaitu merdeka! Di samping itu kata *Indonesia Merdeka* diharapkan dapat menjadi semboyan yang menarik pemuda Indonesia untuk berjuang mencapai kemerdekaan.[16]

Pada tahun 1925 Iwa berhasil menyelesaikan studi dan mendapat gelar Meester in de Rechten (Mr.). Pada tahun ini, di bawah kepemimpinan Soekiman Wirjosandjojo, Indonesische Vereeniging berganti nama—dengan menggunakan terjemahan bahasa Melayu—menjadi Perhimpunan Indonesia (PI). PI melandaskan perjuangan pada empat prinsip: swadaya, nonkooperasi, solidaritas, dan kesatuan nasional.[17] Tidak hanya berfokus untuk membangun kontak dengan pergerakan di tanah air, pada tahun 1925 PI memiliki strategi baru untuk memperluas jaringan politik dengan organisasi dan aktivis antikolonial internasional di Eropa. Perwakilan-perwakilan PI dikirimkan ke beberapa kota penting di Eropa yang merupakan basis utama pergerakan antiimperialisme. Iwa mendapat tugas berangkat ke Moskow, Soviet, guna mempelajari *eenheidsfront* 'front persatuan'. Di Moskow ia tinggal di asrama pekerja, buruh, dan pelajar yang berasal dari daerah Timur; hal yang berbeda dengan Semaun yang tinggal di hotel mewah.[18] Untuk menambah uang keperluan hidup, ia mengajar di universitas dan menulis buku.[19] Secara keseluruhan Iwa tinggal selama satu setengah tahun di Soviet.

Pada tahun 1927 PI—yang semakin aktif melebarkan jaringannya di dunia internasional—diundang menghadiri Kongres Menentang Kolonialisme dan Imperialisme di Brussels, Belgia. Salah satu hasil konferensi ini adalah kesepakatan membentuk Liga Anti Imperialisme dengan Moh. Hatta duduk sebagai salah satu anggota tertinggi. Keterlibatan PI dalam Liga Anti Imperialisme mengundang kekhawatiran Pemerintah Belanda yang menganggap bahwa organisasi tersebut bernuansa radikal karena ada beberapa anggotanya yang merupakan tokoh komunis internasional. Akhirnya pemerintah Belanda menangkap para anggota PI yang berada di Den Haag dan Leiden, di antaranya Ali Sastroamidjojo, Pamontjak, Hatta, dan Abdoelmadjid Djojoadhiningrat. Iwa Kusuma Sumantri berhasil meloloskan diri dari tangkapan polisi Belanda. Ia bersama Soebardjo pergi ke Belgia dengan membuat paspor baru di Ostende. Dari Belgia ia terbang ke London.[20] Iwa hanya tinggal selama kurang dari seminggu di London karena kondisi kesehatannya memburuk—sebetulnya kondisi ini sudah diderita sejak tinggal di Moskow. Dari London Iwa pergi ke Paris melalui Southampton dan Boulogne.[21]

Hidup berpindah-pindah dengan kondisi kesehatan yang tidak baik membuat Iwa berpikir pulang ke Indonesia. Namun, penangkapan aktivis komunis secara besar-besaran di Indonesia membuatnya menimbang-nimbang keinginan tersebut. Pada akhirnya Iwa memutuskan kembali ke tanah air melalui perjalanan selama empat minggu dari Marseille, singgah di Singapura, kemudian tiba di Indonesia.

PENGACARA, POLITIK, DAN PENGASINGAN

Sekembalinya ke tanah air Iwa Kusuma Sumantri diajak bergabung di kantor pengacara Iskaq Tjokrohadisurjo yang merupakan kawan lama di PI. Atmosfer pergerakan sangat bergelora di Bandung sebab kota ini merupakan markas Partai Nasional Indonesia (PNI) yang dipimpin oleh Soekarno. Iwa Kusuma Sumantri bersama dengan para alumni PI, di antaranya Mr. Sartono, Mr. Soenario, dan Mr. Iskaq, memutuskan bergabung dengan PNI, yang menurut mereka memiliki kesamaan visi dengan PI.

Iwa tidak lama bekerja di Bandung dan memutuskan pindah ke kantor pengacara Mr. Sartono di Jakarta. Di sini pun ia tidak lama karena diminta oleh pamannya di Medan, Dr. Abdul Manaf, membuka kantor pengacara di sana. Di kota itu belum banyak pengacara sehingga mungkin terdapat banyak kesempatan bagi Iwa untuk membaktikan ilmunya. Ketika itu Medan merupakan salah satu wilayah *poenale sanctie* sehingga kehadiran seorang pengacara Indonesia dapat membantu buruh-buruh yang mengalami masalah akibat peraturan tersebut. Pertemuannya dengan kalangan buruh dan petani yang terepresi di wilayah Deli dan sekitar Sumatera Timur mendekatkannya dengan politik kelas bawah.[22]

Di Medan, Iwa Kusuma Sumantri memimpin surat kabar *Matahari Indonesia*. Secara teratur ia menyalurkan pandangan politiknya yang mengkritik pemerintah kolonial melalui tulisan-tulisannya di media tersebut.[23] Ia menjadi penasihat organisasi Pergerakan Persatuan Sopir dan Pekerja Bengkel

yang dikenal dengan nama Persatuan Motoris Indonesia (PMI). Selain itu ia juga terpilih sebagai ketua Opium Regis Bond Luar Jawa dan Madura (ORBLDM) dan penasihat organisasi kepanduan Indonesisch Nationale Padvinders Organisatie (INPO). Di samping aktif dalam politik pergerakan, Iwa juga membantu orang-orang Kristen di Batak agar dapat diangkat sebagai pendeta yang sebelumnya hanya didominasi oleh kalangan Eropa saja.[24]

Tulisan-tulisan politiknya yang tajam mengkritik pemerintah kolonial, seperti "Janji Bohong" dan "Omong Kosong", di *Matahari Indonesia* membuat ia ditangkap tahun 1929 oleh pemerintah Belanda yang semakin merasa *insecure* pasca kegagalan pemberontakan komunis 1926-1927.[25] Iwa dituduh melakukan kegiatan *aanslag tot omverwerping van het wettig gezag* 'berupaya menggulingkan kekuasaan yang sah'.[26] Iwa dipenjara di Medan selama setahun, dipindah ke Jakarta untuk kemudian dibuang ke Banda Neira.[27]

Pengasingan yang dialami Iwa di Banda Neira merupakan buah kebijakan pemerintah kolonial yang menekan mekarnya pergerakan antikolonialisme dengan tindakan langsung menangkap tokoh-tokoh nasionalis antikolonial, seperti Soekarno, Hatta, dan Sjahrir.[28] Sementara itu, di Banda Neira, sebelumnya telah terlebih dahulu diasingkan tokoh pergerakan nasional awal Indonesia, Tjiptomangoenkoesoemo. Setelah Iwa Kusuma Sumantri menyusul Hatta dan Sjahrir diasingkan ke Banda Neira.[29] Iwa menghabiskan sekitar 10 tahun sebagai tahanan politik di Banda Neira. Untuk menghemat kebutuhan hidup setelah tunjangan dipotong akibat malaise, para tahanan biasanya bercocok tanam sayur mayur sendiri.

Selama di pengasingan Iwa kembali mempelajari bahasa Arab dan agama Islam. Pada tahun 1941 ia dipindahkan ke Makassar. Salah satu alasan pemindahan ini adalah keinginan Belanda memperkuat politik antifasis terhadap ancaman Jepang yang melakukan ekspansi ke wilayah Indonesia. Sebagai tahanan politik, gerak-gerik Iwa di Makassar tetap dibatasi. Ia dilarang bepergian ke luar kota. Meskipun demikian permintaannya menjadi pengajar di Taman Siswa dikabulkan. Di Taman Siswa Iwa bertemu dengan Manai Sophiaan. Ia juga berhubungan dengan tokoh lain, seperti Nadjamuddin Daeng Malewa dan Sutan Jusuf Samah.

Ketika Jepang memasuki Makassar pada bulan Februari 1942, Iwa dan para tokoh lainnya memilih mengungsi ke luar kota, Sungguminasa. Akibatnya suasana kota Makassar dalam keadaan sunyi. Jepang berusaha menghubungi para tokoh politik di Makassar agar bersedia menjalankan pemerintahan kota seperti biasa. Para tokoh Makassar memilih Nadjamuddin Daeng Malewa sebagai Walikota Makassar dengan dibantu Sutan Jusuf Samah dan Iwa Kusuma Sumantri. Jepang mengangkat Iwa Kusuma Sumantri sebagai Kepala Dai Ichi Bucho (Kantor Pengadilan) pertama di Makassar.[30] Meskipun mendapat posisi strategis, Iwa merasa tidak aman atas masa depannya di Makassar. Salah satu penyebabnya adalah berita tentang pembersihan tokoh-tokoh politik di Banjarmasin oleh Jepang. Dengan alasan untuk berobat, ia minta izin ke Jawa. Jepang meluluskan permintaan tersebut, sehingga Iwa pergi ke Surabaya dengan berlayar selama lima hari. Ia menumpang teman lamanya di PI yang menjadi penasihat ekonomi Jepang di Surabaya, Ali Sastroamidjojo.

Iwa Kusuma Sumantri tidak tinggal lama di Surabaya. Ia memutuskan pergi ke Jakarta. Bersama kerabat lain di PI, A.A. Maramis, ia mendirikan kantor pengacara di Jakarta. Para tokoh pergerakan, seperti Soekarno, Hatta, Ahmad Soebardjo, dan Sartono, menyambut kedatangan Iwa di Jakarta. Selama di Jakarta, Iwa terjun ke dalam pergerakan bawah tanah melawan pemerintah Jepang. Menurut Kahin, ada empat kelompok pemuda bawah tanah melawan Jepang: (1) gerakan bawah tanah di bawah pimpinan Sjahrir dengan mengembangkan gerakan di Jakarta, Garut, Cirebon, Semarang, dan Surabaya; (2) kelompok persatuan mahasiswa yang terdiri dari mahasiswa kedokteran di Jakarta; (3) kelompok yang dipimpin oleh Sukarni, yang di dalamnya ada Chaerul Saleh, Adam Malik, dan Wiguna; (4) kelompok yang dipimpin oleh Amir Sjarifuddin, yang memiliki massa besar di kalangan golongan pemuda kiri.[31]

Kabinet pertama Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta. Tampak pada bagian belakang paling kanan Iwa Kusuma Sumantri di antara para tokoh lain Ahmad Soebardjo, Ali Sastroamidjojo, Soepomo, Maramis, Sartono, Kasman Singodimedjo, dan Amir Sjarifuddin

(Sumber: Repro *Tan Malaka, Gerakan Kiri, dan Revolusi Indonesia Jilid 1: Agustus 1945-Maret 1946*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia & KITLV-Jakarta, 2008)

Jepang yang mengetahui keberadaan jaringan organisasi bawah tanah ini melakukan penangkapan terhadap tokoh-tokohnya. Benedict Anderson mengatakan bahwa meskipun gerakan pemuda pada masa Jepang militan namun tidak terkoordinir dengan baik.[32]

Ketika tanda-tanda kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II semakin tampak, para pemuda bergegas mendorong para tokoh pergerakan untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Tanggal 14 Agustus 1945 berita penyerahan Jepang diumumkan oleh perwira Kaigun Jepang dalam pertemuan di sebuah rumah di Kebon Sirih. Iwa Kusuma Sumantri menjadi salah satu tokoh yang hadir dalam pertemuan itu. Iwa dan Ahmad Soebardjo berkata kepada para pemuda agar mereka segera menghubungi Soekarno. Para pemuda tersebut mendesak agar Soekarno dan Hatta, sebagai tokoh yang memiliki reputasi dalam pergerakan Indonesia, menyatakan kemerdekaan Indonesia dengan segera. Pada tanggal 16 Agustus 1945 beberapa pemuda bahkan membawa Soekarno-Hatta ke Rengasdengklok. Setelah melalui perdebatan akhirnya Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta untuk mempersiapkan naskah proklamasi kemerdekaan. Naskah proklamasi semula diberi judul "Maklumat Kemerdekaan", namun setelah menerima usulan, termasuk dari Iwa Kusuma Sumantri, judul tersebut diganti menjadi "proklamasi".[33] Pada akhirnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan upacara sederhana di Pegangsaan Timur.

MENTERI SOSIAL PERTAMA

Dalam susunan kabinet pertama Indonesia setelah kemerdekaan, Iwa Kusuma Sumantri diberi mandat menjadi Menteri Sosial dan Perburuhan. Iwa menghadapi masalah kembalinya *romusha* yang dipekerjakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk dikembalikan ke tempat asalnya.[34] Selain itu hal mendesak yang dihadapi Kementerian Sosial adalah masalah fakir miskin dan gelandangan yang menumpuk di Jakarta.[35] Mereka terlantar sejak masa pendudukan Jepang. Tantangan lain yang juga dihadapi Menteri Iwa Kusuma Sumantri adalah menghidupkan kembali organisasi buruh yang sempat kolaps pada masa Jepang. Iwa berhasil menggalang buruh-buruh dan dikumpulkan dalam Kongres Buruh yang diadakan di Surakarta pada tanggal 7-9 Oktober 1945. Kebijakan lain yang dilakukan Iwa selaku Menteri Sosial dan Perburuhan dalam melengkapi kelembagaan republik baru ialah membentuk Palang Merah Indonesia (PMI), yang dibangun bersama dengan Menteri Kesehatan Boentaran Mertoatmodjo pada tanggal 19 September 1945.

Kiprah Iwa Kusuma Sumantri dalam kabinet presidensial tidak berlangsung lama. Pada bulan November 1945 kabinet ini digantikan oleh kabinet parlementer yang dipimpin Sjahrir. Hubungan Sjahrir dengan

Kiri

Iwa Kusuma Sumantri sedang berbicara dalam sebuah acara

(Sumber: Arsip Nasional Republik Indonesia)

Kanan

Iwa Kusuma Sumantri, Menteri Perguruan Tinggi Ilmu Pengetahuan I, tahun 1961-1962

(Sumber: Arsip Nasional Republik Indonesia)

Iwa kurang begitu baik. Menurut Iwa, Sjahrir sebagai ketua Badan Pekerja (BP) Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) berjalan sendiri tanpa kontrol anggota ataupun sidang anggota. Perundingan-perundingan dengan Inggris dan Belanda yang disiapkannya mencemaskan pemimpin lain, seperti Soekarno, Soebardjo, dan Iwa. Tindakan Sjahrir tersebut dianggap Iwa sebagai "inkonstitusionil". Atas sikap tersebut Iwa menerima surat keputusan pemberhentian sebagai Menteri Sosial sesampainya di Jakarta sepulang dari perundingan.[36] Iwa memutuskan menjadi oposisi terhadap jalan diplomasi yang ditempuh Perdana Menteri Sjahrir. Ia bergabung dengan Persatuan Perjuangan (PP) yang dipimpin Tan Malaka yang juga menentang politik berunding dengan Belanda.[37] PP memiliki slogan "merdeka 100%". Gagasan mereka berpengaruh besar sebab Jenderal Soedirman secara terbuka memberikan dukungan dalam sebuah rapat terbuka di Purwokerto dengan mengatakan "... lebih baik diatoom sama sekali daripada merdeka ta' 100%".[38]

Perbedaan politik antara PP dan pemerintah yang semakin memanas berujung pada aksi penculikan Sjahrir pada tahun 1946. Sebagai tindak balasan, para tokoh PP, seperti Tan Malaka, Yamin, Ahmad Soebardjo, Boentaran, dan Iwa, ditangkap oleh pemerintah dan dipenjarakan. Iwa dipindahkan dari satu penjara ke penjara lain sebelum akhirnya dibebaskan pada tanggal 9 Agustus 1948 oleh Presiden Soekarno. Iwa mendapat grasi dan namanya direhabilitasi karena tidak terbukti bersalah.

Ketika Belanda melaksanakan aksi militer kedua pada bulan Desember 1948, Iwa Kusuma Sumantri yang sedang berada di Yogyakarta ikut ditangkap bersama dengan Soekarno dan Hatta serta pemimpin-pemimpin lain seperti Sjahrir dan Ali Sastroamidjojo. Sesudah dibebaskan oleh Belanda, Iwa masuk Partai Murba yang didirikan oleh Tan Malaka, Chaerul Saleh, Sukarni, dan Adam Malik pada tahun 1948. Ia diminta Partai Murba menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat (DPR-RIS) mewakili kelompok progresif lembaga ini.[39]

Jabatan penting yang diemban Iwa berikutnya adalah Menteri Pertahanan dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo tahun 1953 mewakili faksi progresif. Posisi ini strategis, tetapi memiliki tantangan berat sebab Iwa harus membenahi perpecahan di dalam Angkatan Darat pasca peristiwa 17 Oktober 1952. Program inti Iwa menyatakan bahwa "wibawa militer harus dikembalikan ke dalam proporsi yang sewajarnya".[40] Iwa membuat kebijakan yang menjadikan Jakarta sebagai daerah militer tersendiri yang terpisah dengan Jawa Barat. Buah program tersebut adalah pembentukan Kodam V Jaya. Selain itu Iwa memberi perhatian kepada pembangunan asrama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dan pensiun janda pahlawan.[41] Perwira-perwira militer yang berprestasi pun diusulkan untuk mendapat pendidikan di luar negeri.

Setelah Kabinet Ali Sastroamidjojo berakhir dan digantikan Kabinet Burhanuddin Harahap, Iwa kembali menjadi anggota DPR mewakili fraksi pembangunan.[42] Ia juga menjadi Ketua Badan Musyarawah Sunda (BMS). Pada tahun 1958 ia meninggalkan dunia politik dan bergabung ke dalam lembaga pendidikan. Atas usul Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan ia ditunjuk oleh Presiden Soekarno sebagai Rektor Universitas Padjajaran (Unpad) di Bandung. Ketika menjabat Rektor Unpad, Iwa mengusulkan adanya Undang-undang (UU) Perguruan Tinggi untuk memperbaiki mutu pendidikan.[43] Ia juga menghapus sistem perploncoan yang feodal dan diganti dengan sistem pengenalan biasa yang lebih egaliter.[44] Saat menjabat sebagai Rektor Unpad inilah Iwa dikukuhkan sebagai guru besar di bidang hukum pidana. Ia menyampaikan pidato pengukuhan berjudul "Revolusionisasi Hukum Indonesia".

MENTERI PTIP, MANIPOL-USDEK, PEREMAJAAN UNIVERSITAS, DAN UU PERGURUAN TINGGI

Pada penghujung dasawarsa 1950-an krisis di bidang politik, militer, dan kedaerahan yang menggerogoti demokrasi parlementer berubah menjadi pukulan mematikan.[45] Sederet kabinet yang dibentuk oleh koalisi partai ternyata gagal menentukan arah politik dan malah melahirkan konflik-konflik politik yang tiada habisnya.[46] Dalam tubuh internal angkatan darat serta hubungan politik antara politisi dan militer tidak selalu stabil. Masalah tersebut diperparah oleh tumbuhnya permusuhan di daerah-daerah yang tidak puas atas mekanisme pengaturan hubungan antara pusat dan daerah. Percikan yang terjadi di beberapa daerah di Sumatera dan Sulawesi membuka peluang bagi Soekarno mengambil alih kendali. Soekarno, yang mengeluhkan kecilnya peran presiden sebagaimana diamanatkan Undang-undang Dasar Sementara (UUDS) 1950, mengajak rakyat memikul bersama kegagalan demokrasi liberal dan mendukung gagasannya mengenai demokrasi terpimpin yang dianggap lebih sesuai dengan alam kenyataan Indonesia.[47] Dalam pandangan Soekarno, demokrasi liberal bertentangan dengan proses politik yang dibutuhkan oleh Indonesia. Segala lembaga yang didasarkan pada filosofi tersebut harus disingkirkan, termasuk parlemen yang ada, dan diganti dengan model kepemimpinan serta perencanaan yang berpandangan benar. "Apabila kita hendak membangun masyarakat sosialis di Indonesia maka kita harus memiliki perencanaan komprehensif, dan perencanaan tersebut harus dijalankan dengan pengarahan yang cakap, jadi kita harus punya demokrasi terpimpin," kata Soekarno dalam diskusi dengan Dewan Nasional ketika menggodok konsep demokrasi terpimpin pada bulan Juli 1958.[48]

Pada tahun 1959, melalui Dekrit Presiden, Soekarno menghapus UUDS 1950, membubarkan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), dan memberlakukan kembali Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Dengan langkah tersebut Soekarno ingin mengembalikan Indonesia ke jalan politik yang semestinya, yaitu berdasarkan semangat revolusi antiimperialisme dan bukan berdasarkan ideologi liberal. Hal ini diungkapkan secara gamblang oleh Soekarno dalam pidato pada Hari Kemerdekaan Indonesia tahun 1959. Bagi Soekarno, tahun 1959 merupakan tahun "penemuan kembali revolusi kita" sesudah melewati masa 1950-1955 yang kacau balau. Setelah melewati masa itu, menurut Soekarno, kita mengalami *purgatorio* 'penyucian' dan melanjutkan perjalanan Indonesia di atas rel revolusi demi mengejar cita-cita revolusi, yaitu masyarakat adil dan makmur.[49] Sarana mencapai tujuan itu hanya bisa melalui demokrasi terpimpin, yang merupakan demokrasi kekeluargaan, tanpa anarki liberalisme, tanpa autokrasi diktator.[50] "Manifesto Politik" yang digaungkan oleh Soekarno lewat pidatonya tersebut dilengkapi dengan simbol-simbol ideologis, yaitu loyalitas terhadap UUD 1945, sosialisme Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, dan kepribadian Indonesia. Rangkaian simbol-simbol ideologis ini kemudian dipopulerkan dengan akronim "Manipol-USDEK", singkatan yang melambangkan kegemaran Soekarno melontarkan slogan-slogan yang menyengat.[51]

Salah satu lembaga strategis yang dapat menyalurkan dan menanamkan gagasan Manipol-USDEK secara efektif kepada masyarakat adalah lembaga pendidikan, terutama perguruan tinggi. Sebagai

salah satu alat revolusi, perguruan tinggi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan alat kekuatan revolusi.[52] Sehubungan dengan hal itu, untuk mendukung penyebaran gagasan Manipol-USDEK, Pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No.130 tanggal 14 April 1961 yang isinya mengatur pengelompokan baru Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (Kementerian PP dan K).[53] Berdasar keputusan tersebut Kementerian PP dan K dipecah menjadi dua: Kementerian Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (PD dan K) dan Kementerian Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (Kementerian PTIP). Dasar pembagian ini adalah masalah perguruan tinggi membutuhkan perhatian khusus yang diperlukan satu kementerian baru yang khusus untuk mengurusnya.[54]

Kemnterian PTIP dipimpin oleh Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (Menteri PTIP). Ada dua tugas Kementerian PTIP, yaitu (1) mengatur, menyelenggarakan, membimbing, dan mengawasi semua usaha pendidikan tinggi dan yang bertalian dengan itu, baik negeri maupun swasta; serta (2) membimbing dan mengawasi perkembangan ilmu pengetahuan.[55] Seluruh kebijakan politis-teknis ditetapkan oleh Menteri PTIP bersama Menteri PP dan K, namun kebijakan yang berkaitan dengan hal teknis ditetapkan pelaksanaanya oleh Menteri PTIP.[56] Presiden Soekarno menunjuk Prof. Iwa Kusuma Sumantri Sebagai Menteri PTIP pertama atas saran beberapa pihak, termasuk Dr. Prijono. Wewenang perguruan tinggi yang sebelumnya dipegang Dr. Prijono sebagai Menteri PD dan K dialihtugaskan di bawah Kementerian PTIP.

Pada awalnya Iwa Kusuma Sumantri merangkap jabatan sebagai Menteri PTIP, Rektor Unpad, dan anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Namun karena intensitas tugasnya yang luar biasa sibuk, tugas sebagai Rektor Unpad digantikan sementara oleh drg. Suriasumantri yang kemudian diganti oleh Sanusi Harjadinata, mantan Gubernur Jawa Barat, Menteri Dalam Negeri, dan Duta Besar RI di RPA.[57]Salah satu tugas utama Kementerian PTIP di bawah Iwa Kusuma Sumantri adalah agar konsepsi Manipol-USDEK dapat diimplementasikan di lingkungan pendidikan tinggi.[58] Pemerintah mengharap bahwa kementerian ini dapat melengkapi Kementerian PD dan K menuju ke arah tercapaianya doktrin revolusi, yakni terciptanya masyarakat sosialisme Indonesia. Penjelasan umum Undang-undang (UU) No. 22 tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi menyebutkan bahwa "Perguruan tinggi adalah alat revolusi. Tujuannya adalah membentuk manusia susila yang berjiwa Pancasila dan bertanggung jawab akan terwujudnya masyarakat sosialis Indonesia yang adil dan beradab".[59]

Soekarno, dalam pidato di hadapan para mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) di Sitihinggil Yogyakarta, tanggal 7 April 1961, menyatakan bahwa pembentukan kementerian baru, Kementerian PTIP, yang menterinya Iwa Kusuma Sumantri, bertujuan mendidik para pemuda Indonesia agar tidak terkena apa yang disebut sebagai "subversi mental".[60] Menurut Soekarno, subversi yang mengancam Indonesia bermacam-macam, tidak hanya dalam bentuk subversi politik, subversi ekonomi, subversi senjata, tetapi juga subversi mental. Dalam pidato tersebut Soekarno mengkhawatirkan bahwa subversi mental paling rentan subur di kalangan mahasiswa. Oleh sebab itu, ketika melantik Iwa sebagai Menteri PTIP, Soekarno mengamanatkan untuk mengatasi subversi mental tersebut. Sesudah pelantikan Iwa, Soekarno menyapanya untuk berbicara. Soekarno berbisik, "Sekarang Pak Iwa saya pasrahi mendidik, menjaga pendidikan daripada pemuda-pemuda kita, terutama sekali mahasiswa dan mahasiswi. Ketahuilah mahasiswa dan mahasiswi itu adalah sangat subur alamnya untuk subversi mental. Jangan sampai ada subversi mental, Pak Iwa, di dalamnya kalangan mahasiswa-mahasiswi kita, sebab manakala mahasiswa-mahasiswi kita kena subversi mental, sama dengan tanah air kita kena subversi mental, hancur lebur tanah air kita ini …."[61]

Menurut Rosihan Anwar, Iwa tidak hanya diserahi mahasiswa, tetapi juga diserahi tugas mengatasi problem subversi mental di kalangan para guru besar. Anwar bercerita bahwa "konon menurut

cerita orang dalam, salah satu tugas penting yang harus dikerjakan oleh Iwa Kusuma Sumantri adalah mengadakan pembersihan di kalangan para guru besar UGM yang dikatakan masih merupakan 'benteng reaksioner' atau *Javaans bolwerk* yang belum sepenuh hati menerima Manipol-USDEK dan karena itu harus di-*retool*".[62] Masih ada sebagian guru besar di UGM yang kurang bersemangat menerima Manipol-USDEK dan tidak mengimplementasikannya ke dalam sistem pembelajaran secara mendalam sehingga oleh karena itu sikap mereka kurang revolusioner progresif.[63]

Dalam otobiografinya, Iwa Kusuma Sumantri mengatakan bahwa banyak sekali tugas yang dihadapi oleh kementeriannya, namun satu hal yang penting adalah melakukan peremajaan tenaga-tenaga pengajar dan rektor universitas supaya sesuai dengan negara-negara lain.[64] Menurut Iwa, para pengajar yang sudah tua tidak dapat diandalkan lagi karena kalah cepat, kalah efisien, dan kalah maju dibanding tenaga yang lebih muda. Oleh sebab itu Iwa menyampaikan usul peremajaan dengan mengganti rektor-rektor yang sudah lanjut usia dengan tenaga-tenaga yang lebih muda.[65] Dalam pandangan Iwa, para ahli yang sudah berusia lanjut, seperti Prof. Sardjito dan Sadaryun, sudah waktunya beristirahat. Para tenaga yang lebih muda yang akan menggantikan mereka. Segi nasionalisme dosen yang sudah berusia lanjut pun harus dipupuk agar mereka tidak memiliki mental kolonial. Dalam catatan Safwan dinyatakan bahwa pada masa Iwa menjabat Menteri PTIP masih banyak dosen dan rektor yang sudah berusia lanjut dan sebagian di antaranya masih berjiwa Belanda. Oleh karena itu Iwa melakukan peremajaan dan penggantian untuk mengikis habis sisa-sisa Belanda yang dianggap tidak sesuai dengan alam kemerdekaan.[66] Prof. Toyib Hadiwijaya, yang menggantikan Iwa sebagai Menteri PTIP, dalam otobiografinya mengatakan bahwa pada masa Iwa Kusuma Sumantri dilakukan pemindahan guru besar dari UGM dan Unpad ke Universitas Indonesia (UI).[67] Mungkin inilah bagian dari strategi pemerintah untuk mengatasi masalah subversi mental di kalangan tenaga pendidik.

Demi mendapatkan pemahaman tentang kualitas tenaga pengajar, baik dari dunia Barat maupun Timur, pada pertengahan tahun 1961 Iwa berangkat ke Eropa Barat dan Eropa Timur. Ia pergi ke London School of Economics di London untuk bertemu dengan sejarawan besar dunia yang terkenal, khususnya sejarah peradaban, Arnold Toynbee.[68] Iwa bersama rombongan juga melakukan studi banding ke Rusia, Jerman Timur, Hungaria, Rumania, dan Bulgaria. Ia merintis program mencari tenaga pengajar dari sana untuk menyumbangkan pendapat dan gagasan terhadap perkembangan perguruan tinggi di Indonesia;[69] bahkan, dalam pengakuan Iwa, terdapat beberapa pengajar yang menawarkan diri sebagai pengajar di Indonesia.

Dalam periode Iwa Kusuma Sumantri sebagai Menteri PTIP yang singkat terdapat dua universitas baru yang didirikan, yaitu Universitas Syah Kuala di Kutaraja terhitung mulai 1 Juli 1961 dengan SK. MPTIP No. 11/1961 dan Universitas Sulawesi Utara dan Tengah di Manado yang berubah menjadi Universitas Sam Ratulangi terhitung mulai 4 Juli 1961 dengan SK. MPTIP 22/1961.[70] Usaha lain yang dilakukan Iwa mewujudnyatakan UU Perguruan Tinggi.[71] UU Perguruan Tinggi bertujuan membentuk manusia susila yang berpengetahuan luas. UU ini juga berkait erat dengan maksud program peremajaan dan pembersihan dosen-dosen yang tidak bermental progresif di lingkungan universitas.

Kebijakan Iwa Kusuma Sumantri mengadakan peremajaan dan pembersihan tenaga pengajar di perguruan tinggi yang bermental kolonial menimbulkan gejolak sosial-politik. Reaksi datang terutama dari orang-orang yang merasa dirugikan oleh kebijakan tersebut.[72] Iwa menegaskan bahwa ia tidak menyetujui tenaga pengajar perguruan tinggi yang berbau ke-Belanda-Belanda-an atau mereka yang telah berusia lanjut bukan karena alasan pribadi, namun demi kepentingan pendidikan dan para mahasiswa ke depan.[73] Meskipun demikian tetap ada beberapa pihak yang menentang kebijakan tersebut, bahkan mencoba menurunkan Iwa Kusuma Sumantri dari kursi Menteri PTIP.

Pada bulan Maret 1962 Iwa Kusuma Sumantri diundang Presiden Soekarno ke Istana Bogor. Dalam pembicaraan di istana inilah Soekarno menanyakan kebijakan Iwa mengenai peremajaan dan pembersihan

di perguruan tinggi.[74] Soekarno bertanya kepada Iwa, "Mengapa Kang Iwa menjadi reaksioner begitu?" Iwa menjawab, "Lho, bukan saya yang reaksioner, justru merekalah yang reaksioner." Dalam otobiografinya yang disunting oleh Nina Herlina Lubis, Iwa Kusuma Sumantri mengatakan bahwa "Presiden Soekarno tidak mempunyai alasan lain untuk memberhentikan saya dari jabatan Menteri PTIP, dan saya mengerti hari itu rupanya hari terakhir saya sebagai Menteri PTIP".[75] Penulis biografi Iwa Kusuma Sumantri, Safwan, menganalisis bahwa demi menghindarkan perpecahan dan pertentangan yang berlarut-larut, akhirnya Iwa diganti oleh Prof. Dr. Ir. Toyib Hadiwijaya, yang pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Pertanian UI, pada tanggal 12 Maret 1962.[76] Presiden Soekarno memberi jabatan lain kepada Iwa sebagai Menteri Negara. Selama empat tahun Iwa Kusuma Sumantri menjabat Menteri Negara. Setelah tidak diikutkan lagi sebagai menteri dalam Kabinet 100 Menteri oleh Soekarno tahun 1966, Iwa memilih memasuki masa pensiun dari semua jabatan pemerintahan. Untuk mengisi waktu luangnya ia menulis buku sampai akhir hayat. Karya-karya yang pernah dipublikasikan antara lain *Ilmu Hukum Keadilan*, *Sejarah Revolusi Indonesia jilid I sampai III*, *Ke Arah Perumusan Konstitusi Baru*, *Pengantar Ilmu Politik*, *Pokok-Pokok Ilmu Politik*, dan *Pemberontakan 30 September.*

Prof. Iwa Kusuma Sumantri menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Umum Pusat Cipto Mangunkusumo akibat penyakit jantung pada hari Sabtu 27 September 1971 setelah beberapa hari menjalani rawat inap. Atas jasa-jasanya bagi kemerdekaan Indonesia dan sumbangsihnya bagi pemerintah Indonesia Iwa Kusuma Sumantri berhak untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, namun atas permintaan keluarga dan pesan pribadi sebelum meninggal ia dimakamkan di Pemakaman Karet. Upacara pemakaman dilakukan secara kenegaraan. Menteri Sosial Mintareja menjadi Inspektur Upacara untuk mengenang Iwa sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia yang pertama.[77] Upacara pemakaman dihadiri oleh para pejabat negara, antara lain Menteri Kehakiman Prof. Oemar Senoaji, Menteri Dalam Negeri Amir Machmud, Menteri P & K Mashuri, dan Gubernur Daerah Istimewa Jakarta Ali Sadikin.[78]

ENDNOTES

1 Nina Herlina Lubis (ed.). *Sang Pejuang dalam Gejolak Sejarah: Otobiografi Prof. Mr. R.H. Iwa Kusuma Sumantri* (Bandung: Satya Historika, 2002), hlm. 1. Onghokham. "Patah Tumbuh Seorang Penulis", *Majalah Tempo*, 19-25 Agustus 2002, hlm. 83.

2 Roel Sanre. "Iwa Kusumasumantri: Upaya Menertibkan Tentara", *Prisma*, No. 5 (1984), hlm. 61.

3 Lubis (ed.). *Sang Pejuang*, hlm. 12.

4 *Ibid*, hlm. 61.

5 Mardanas Safwan. *Prof. Mr. Iwa Kusuma Sumantri SH: Hasil Karya dan Pengabdiannya* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direkorat Sejarah dan Nilai Tradisional, 1983/1984), hlm. 1.

6 Sanre, *Iwa Kusumasumantri*, hlm. 61.

7 Lubis (ed.). *Sang Pejuang*, hlm. 18.

8 Taufik Abdullah. *Indonesia: Towards Democracy* (Singapore: ISEAS, 2009).

9 Sanre, *Iwa Kusumasumantri*, hlm. 62.

10 Klaas Stutje. "To Maintain Independent Course: Interwar Indonesian Nationalism and International Communism on a Dutch-European Stage", *Dutch Crossing: Journal of Low Countries*, Vol. 39, No. 3 (2015), hlm. 200.

11 John Ingleson. *Perhimpunan Indonesia dan Pergerakan Kebangsaan* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1993), hlm. 3.

12 Harry Poeze. *Di Negeri Penjajah: Orang Indonesia di Negeri Belanda 1600-1950* (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 155.

13 Ingleson, *Perhimpunan Indonesia*, hlm. 3.

14 Robert van Niel. *Munculnya Elit Modern Indonesia* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1984), hlm. 290.

15 Poeze, *Di Negeri Penjajah*, hlm. 174.

16 J. Th. P. Blumberger. *De Nationalistische Beweging in Nerderlansch-Indië* (Haarlem: Tjeenk Willink, 1931), hlm. 187. Poeze, *Di Negeri Penjajah*, hlm. 175.

17 Asvi Warman Adam, "Iwa Kusuma Sumantri, Penggagas Proklamasi", dalam Asvi Warman Adam. *Membongkar Manipulasi Sejarah: Kontroversi Pelaku dan Peristiwa* (Jakarta: Penerbit Kompas, 2009), hlm. 23.

18 Lubis (ed.). *Sang Pejuang*, hlm. 57.

19 Sanre, *Iwa Kusumasumantri*, hlm. 64.

20 *Ibid*, hlm. 65.

21 Lubis (ed.). *Sang Pejuang*, hlm. 79.

22 *Ibid*, hlm. 66.

23 Safwan, *Prof. Mr. Iwa Kusuma Sumantri SH*, hlm. 6.

24 Ibid, hlm. 6.

25 Onghokham, "Patah Tumbuh", hlm. 83. Lubis (ed.). *Sang Pejuang*, hlm. 95.

26 Adam, "Iwa Kusuma Sumantri", hlm. 24.

27 J.B. Soedarmanta. *Jejak-Jejak Pahlawan: Perekat Kesatuan Bangsa Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2007), hlm. 368.

28 Lihat John Ingleson. *Jalan ke Pengasingan: Pergerakan Nasionalis Indonesia Tahun 1927-1934* (Jakarta: LP3ES, 1983).

29 Safwan, *Prof. Mr. Iwa Kusuma Sumantri SH*, hlm. 7.

30 Sanre, "Iwa Kusumasumantri", hlm. 69.

31 George McT. Kahin. *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2013).

32 Benedict Anderson. *Java in a Time of Revolution: Occupation and Resistance, 1944-1946* (Ithaca: Cornell Unievrsity Press, 1972).

33 Safwan, *Prof. Mr. Iwa Kusuma Sumantri SH*, hlm. 8.

34 *Ibid*, hlm. 8.

35 Sanre, "Iwa Kusumasumantri", hlm. 72.

36 *Ibid*.

37 Harry Poeze. *Tan Malaka, Gerakan Kiri, dan Revolusi Indonesia Jilid 1: Agustus 1945-Maret 1946* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia & KITLV-Jakarta, 2008), hlm. 215.

38 *Ibid*, hlm. 216.

39 Safwan, *Prof. Mr. Iwa Kusuma Sumantri SH*, hlm. 10.

40 Sanre, "Iwa Kusumasumantri", hlm. 76.

41 Safwan, *Prof. Mr. Iwa Kusuma Sumantri SH*, hlm. 10.

42 Sanre, "Iwa Kusumasumantri", hlm. 78.

43 Safwan, *Prof. Mr. Iwa Kusuma Sumantri SH*, hlm. 11.

44 *Ibid*.

45 Rémy Mardiner, "Dari Revolusi hingga Reformasi: Perjalanan Mutasi Politik yang Tak Kunjung Selesai", dalam Rémy Mardiner (ed.). *Revolusi Tak Kunjung Selesai* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia & L'Irasec, 2017), hlm. 143.

46 John D. Legge. *Soekarno. A Political Biography* (Allen Lane, 1972), hlm.

47 Mardiner, "Dari Revolusi hingga Reformasi", hlm. 143.

48 R. E. Elson. *The Idea of Indonesia: Sejarah Pemikiran dan Gagasan* (Jakarta: Serambi, 2009), hlm. 315.

49 Soekarno, "Penemuan Kembali Revolusi Kita", dalam Soekarno. *Di Bawah Bendera Revolusi*, Jilid II (Jakarta: Yayasan Bung Karno & Media Pressindo, 2015), hlm. 413.

50 *Ibid*, hlm. 413.

51 Mardiner, "Dari Revolusi hingga Reformasi", hlm. 146.

52 Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan. *Perguruan Tinggi di Indonesia* (Jakarta: Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, 1965), hlm. 15.

53 Suradi Hp., Mardanas Safwan, Djuariah Latuconsina, Samsurizal. *Sejarah Pemikiran Pendidikan dan Kebudayaan* (Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1986), hlm. 122.

54 Lubis (ed.). *Sang Pejuang*, hlm. 451.

55 Suradi, Safwan, Latuconsina, Samsurizal. *Perguruan Tinggi*, hlm. 125.

56 *Ibid*.

57 Lubis (ed.). *Sang Pejuang*, hlm. 454.

58 Suradi, Safwan, Latuconsina, Samsurizal. *Perguruan Tinggi*, hlm. 126.

59 *Ibid*, hlm. 127.

60 Soekarno. *Warisilah Api Sumpah Pemuda. Kumpulan Pidato Bung Karno di Hadapan Pemuda 1961-1964* (Jakarta: CV Haji Masagung, 1988), hlm. 42.

61 *Ibid*, hlm. 43.

62 Rosihan Anwar. *Soekarno-Tentara-PKI: Segitiga Kekuasaan sebelum Prahara Politik 1961-1965* (Jakarta: Yayasan Obor, 2007), hlm. 15.

63 *Ibid*.

64 Lubis (ed.). *Sang Pejuang*, hlm. 454.

65 *Ibid*.

66 Safwan. *Prof. Mr. Iwa Kusuma Sumantri SH*, hlm. 12.

67 Memed Erawan dan Ganda S. Partasasmita. *Toyib Hadiwijaya Prof. Dr. Ir. H: Otobiografi* (Bandung: Hifka, 1997), hlm. 130.

68 Lubis (ed.). *Sang Pejuang*, hlm. 457.

69 *Ibid*.

70 Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan. *Perguruan Tinggi*, hlm. 18.

71 *Ibid*, hlm. 455.

72 Lubis (ed.). *Sang Pejuang*, hlm. 457.

73 *Ibid.*

74 Safwan. *Prof. Mr. Iwa Kusuma Sumantri SH*, hlm. 12. Lubis (ed.). *Sang Pejuang*, hlm. 458.

75 Lubis (ed.). *Sang Pejuang*, hlm. 458.

76 Safwan. *Prof. Mr. Iwa Kusuma Sumantri SH*, hlm. 12.

77 *Ibid*, hlm. 13.

78 *Ibid*.

Toyib Hadiwijaya

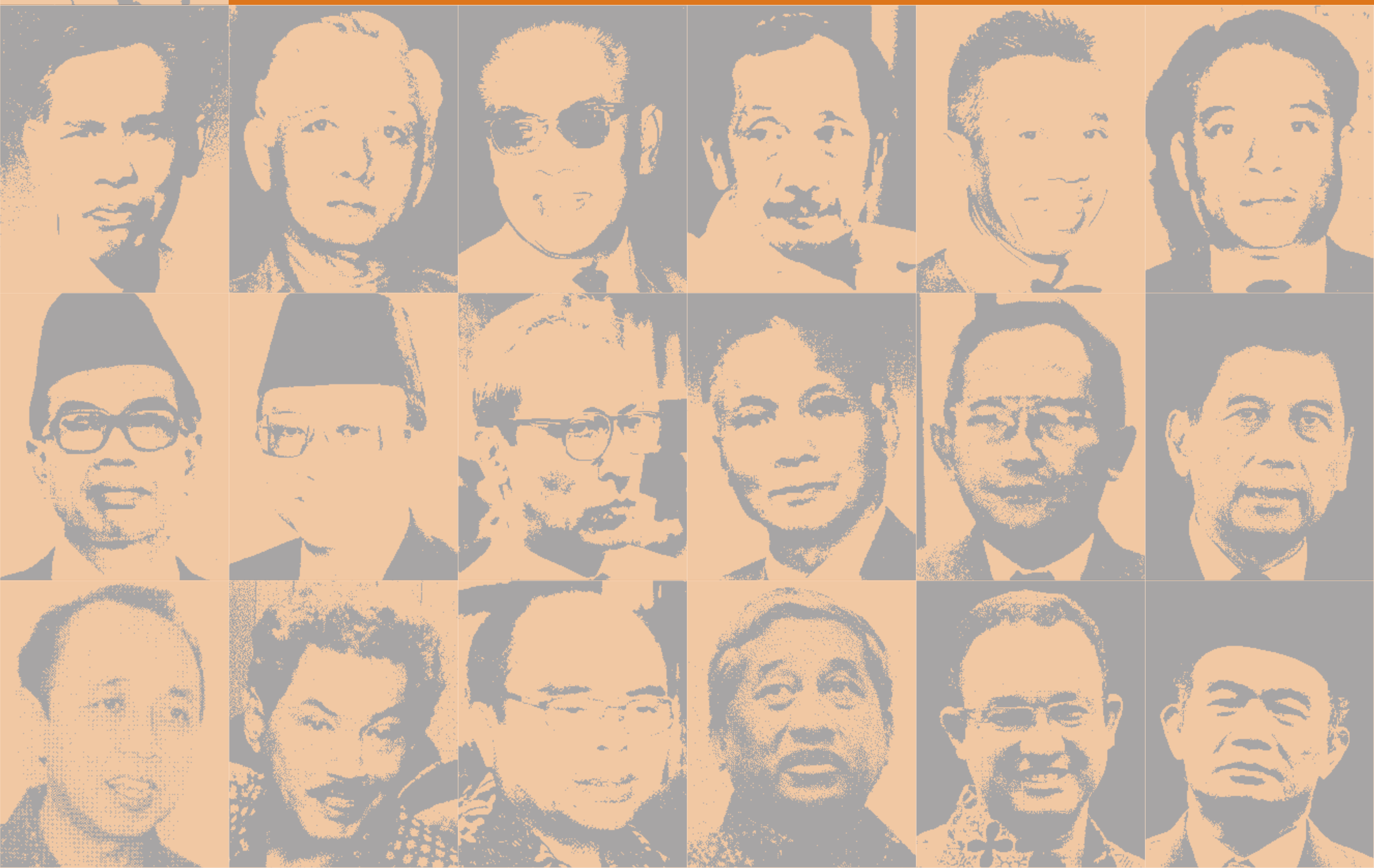

Masa Jabatan
6 Maret 1962 – 27 Agustus 1964

Toyib Hadiwijaya

Toyib Hadiwijaya lahir pada tanggal 21 Mei 1917 di Ciamis, Jawa Barat. Ia merupakan salah satu tokoh yang berperan penting di dalam beberapa pos pemerintah dan perguruan tinggi pada rezim Soekarno hingga rezim Orde Baru di bawah Soeharto, mulai dari Dekan Fakultas Pertanian Universitas Indonesia (UI), Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB), duta besar, hingga beberapa kementerian. Meskipun demikian ia lebih terkenal sebagai Menteri Pertanian dalam Kabinet Pembangunan di bawah pemerintahan Presiden Soeharto.

Toyib memulai kariernya di pemerintahan pada tahun 1962. Pada tahun 1960-an Indonesia menentang pembentukan negara Malaysia yang diasumsikan oleh Soekarno sebagai kepanjangan tangan Inggris di Asia Tenggara, sehingga politik di dalam negeri diwarnai oleh unsur revolusi melawan neokolonialisme. Hal itu terlihat pada pembentukan dewan kabinet dalam Kabinet Kerja yang memiliki tiga tujuan pokok, yaitu melengkapi sandang pangan rakyat dalam waktu singkat, menyelenggarakan keamanan rakyat dan negara, dan melanjutkan perjuangan melawan imperialisme ekonomi dan politik.

Kabinet yang dibangun Presiden Soekarno pada masa itu terkesan gemuk dan tidak efisien jika dilihat dari rasio Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).[1] Akan tetapi mungkin hal ini menunjukkan bagaimana Soekarno membangun citra sebagai pemerintahan yang kokoh di segala bidang. Salah satu lembaga yang didirikan Presiden Soekarno adalah Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP), yang didirikan berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (TAP MPRS) tahun 1960 dengan menteri pertama Profesor Iwa Kusumasumantri. Akan tetapi karena terjadi pertentangan di lingkungan universitas, antara lain karena pemindahan guru besar dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Padjadjaran (Unpad) ke UI,[2] akhirnya Presiden Soekarno mengangkat Profesor Toyib Hadiwijaya sebagai menteri baru pada tanggal 8 Maret 1962 bersama dengan menteri-menteri lain, yakni Mr. Sartono, Mr. Kadarusman, Mr. Ruslah Sarjono, dan Profesor Suyono Juned Pusponegoro di Istana Merdeka.[3] Di dalam pidatonya, Presiden Soekarno menekankan pentingnya tiap-tiap menteri bekerja keras dan efisien dalam mencapai cita-cita amanat penderitaan rakyat.

Jauh sebelum diangkat sebagai Menteri PTIP, sebagai seorang akademisi yang mempunyai pengalaman studi komparatif mengenai sistem pendidikan tinggi di Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa, Toyib melihat ada potensi untuk menciptakan perguruan tinggi di Indonesia yang berbeda dengan perguruan tinggi pada umumnya. Secara umum pendidikan tinggi mencakup dua prinsip, yakni pendidikan dan pengajaran (*teaching*) serta penelitian (*research*). Di samping itu ia mengajukan tambahan kepada pemerintah, yakni pengabdian kepada masyarakat.[4] Hal ini sesungguhnya bertentangan dengan sistem kontinental karena pengabdian kepada masyarakat dianggap sebagai hal rutin yang tidak memerlukan pemikiran ilmiah. Gagasan tersebut dianggap hanya bersifat internal di Fakultas Pertanian UI, karena pada waktu itu ia belum memiliki posisi strategis. Setelah ia dilantik sebagai Menteri PTIP gagasan tersebut ia kemukakan dalam Rapat Antar-Rektor Universitas Negeri pada bulan April 1962 dan secara resmi diterima sebagai "konsepsi filsafat Tri Dharma Perguruan Tinggi" yang berlaku sampai sekarang.[5]

Pada tahun pertama pengangkatannya sebagai Menteri PTIP, kebijakan pertama yang ia tempuh adalah membenahi pendidikan agama di lingkungan akademik.[6] Pendidikan agama menjadi mata pelajaran wajib dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi, namun boleh dibebaskan dengan syarat tertentu. Hal tersebut senada dengan apa yang dicitakan oleh Soekarno dengan konsep Nasionalis, Agama, dan Komunis (Nasakom). Ia menganggap bahwa pelajaran agama merupakan salah satu fondasi terpenting di dalam pembangunan manusia yang berkepribadian. Lebih jauh, pada suatu acara ia mengutarakan bahwa, "Orang yang beragama berarti menjiwai Pancasila, tetapi orang yang tidak beragama berarti

Toyib Hadiwijaya saat menjadi Menteri PTIP di ruang kerjanya di Jl. Imam Bonjol 24 Jakarta tahun 1963

(Sumber: Repro *Otobiografi Toyib Hadiwijaya)*

bukan seorang Pancasilais utuh, sehingga apakah layak ia saya terima di perguruan tinggi negeri."[7] Apa yang disampaikan oleh Menteri PTIP Toyib Hadiwijaya didengar dan mendapat perlawanan cukup keras dari Partai Komunis Indonesia (PKI), yang beranggapan bahwa pendidikan seharusnya tidak membeda-bedakan apakah seseorang beragama atau tidak. Ia didemo oleh sejumlah kalangan, baik di kantor maupun di kediaman pribadinya, sehingga akhirnya ia mengungsi ke rumah dinas Panglima Kodam Siliwangi di Bandung. Namun keadaan tersebut tidak berlangsung lama dan ia dapat kembali beraktivitas seperti biasa.[8]

Beberapa bulan kemudian kontroversi mengenai Menteri PTIP muncul kembali. Pada tanggal 27 September 1962 perhimpunan mahasiswa yang tergabung dalam Perserikatan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia (PPMI) mendesak Menteri PTIP mencabut instruksi lisannya mengenai larangan mahasiswa baru di universitas negeri masuk ke dalam organisasi ekstra universitas. Instruksi tersebut disampaikan oleh Presiden PPMI Unair kepada wakil-wakil organisasi mahasiswa di Surabaya pada tanggal 11 September 1962. PPMI berpendapat bahwa larangan tersebut telah mengekang hak-hak demokrasi warga negara dan bertentangan dengan Manipol. Instruksi tersebut juga dipahami sebagai upaya mengekang daya gerak mahasiswa dalam mengamalkan dharma bakti untuk menyelesaikan revolusi Indonesia.[9] Akan tetapi kabar tersebut dibantah oleh Departemen PTIP, bahwa yang ada adalah instruksi mengenai pelaksanaan studi terpimpin dalam masa peralihan. Segala sesuatu yang berhubungan dengan organisasi kemahasiswaan dilaksanakan oleh Departemen PTIP berdasarkan Undang-Undang Perguruan Tinggi, sehingga diperlukan kesediaan perguruan tinggi dan mahasiswa melakukan pendidikan studi terpimpin dalam masa peralihan dari siswa SMA menjadi mahasiswa yang memakan waktu hingga enam bulan. Program ini merupakan indoktrinasi pemerintah untuk mahasiswa baru agar memiliki jiwa nasionalis sesuai dengan semangat revolusi pemerintah.[10]

Pada saat yang sama Toyib menghadiri peringatan ke-4 Dies Natalis Universitas Lambung Mangkurat. Pemerintah, melalui Kementerian PTIP, mengumandangkan semboyan ilmu pengetahuan untuk masyarakat. Berdirinya suatu universitas di Kalimantan Selatan memberi contoh upaya pemerintah dalam pemerataan pendidikan di luar Jawa. Universitas memiliki tugas berat dalam memajukan ilmu pengetahuan dan sudah seharusnya masyarakat di Kalimantan Selatan turut aktif membantu agar universitas tetap menjadi sumber pengetahuan dan kebijaksanaan bagi seluruh masyarakat, khususnya Kalimantan Selatan, dan tetap berpedoman pada ajaran Bung Karno: "*samenbundelling van alle revolutionaire krachten*". Ia juga menekankan bahwa dies natalis bukan hanya sekedar upacara peringatan hari lahir tetapi juga agar universitas mampu melihat pencapaian-pencapaian pada masa lalu dan bagaimana hal tersebut bisa meningkatkan pencapaian pada masa depan. Universitas merupakan

investasi jangka panjang yang ditransferkan dalam ilmu pengetahuan dan daya pikir yang tidak hilang untuk kesejahteraan masyarakat serta pembentuk karakter manusia Indonesia sesuai dengan Pancasila.[11]

Untuk mendorong terciptanya keseimbangan dan keamanan di dalam dunia pendidikan tinggi, Menteri PTIP bersama Menteri Urusan Veteran menginisiasi pembentukan Badan Koordinasi Korps Veteran Pejuang Kemerdekaan di lingkungan Unpad sebagai *pilot project* pertama. Badan ini kelak akan didirikan di seluruh universitas negeri di Indonesia dan berfungsi untuk menjunjung tinggi kode kehormataan veteran dalam Panca Marga, yakni (1) pelopor pemupukan disiplin, (2) pelopor pembentukan keamanan di lingkungan universitas khususnya dan Indonesia pada umumnya, (3) pelopor penggerak persatuan, (4) pelopor pengawal keselamatan fakultas dan universitas, serta (5) sebagai pembawa panji ideologi negara.[12]

Sebagai orang yang bertanggung jawab atas nasib pendidikan tinggi di Indonesia, Menteri Toyib responsif terhadap kenyataan yang dialami para mahasiswa di Indonesia, khususnya masalah kesejahteraan, baik secara fisik, mental, maupun material. Pada pembukaan Konferensi Nasional World University Service IV di Kaliurang, Yogyakarta, pada tanggal 6 November 1962, ia menekankan pentingnya sembilan unsur kesejahteraan bagi mahasiswa, yakni perumahan, kesehatan, pangan, sandang, sarana belajar, keolahragaan, kesenian, pers, dan rekreasi mahasiswa.[13] Untuk menyukseskan gerakan tersebut ia menekankan bahwa pemerintah Indonesia melalui Departemen PTIP akan menerima bantuan dari mana pun, baik dari dalam maupun luar negeri, yang tidak mengikat.

Ia mendorong terbentuknya perguruan tinggi baru untuk menampung sebanyak mungkin calon-calon sarjana unggul untuk Indonesia. Menurut Toyib, perguruan tinggi terlahir dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pada pidato pembukaan Akademi Ilmu Teknik Ir Anwari di Gedung Wanita Jakarta ia menyatakan bahwa selain memiliki tri dharma perguruan tinggi, universitas juga harus bekerja secara revolusioner. Ia menyambut baik berdirinya akademi tersebut karena hal itu berarti ada penambahan pendidikan teknik menuju perimbangan 7 : 3 dengan pendidikan ilmu sosial seperti yang dikehendaki oleh Dewan Perancang Nasional (Depernas).[14] Ia mengungkapkan bahwa jumlah penduduk Indonesia pada tahun tersebut sebanyak 97 juta jiwa dengan dua per tiga di antaranya mendiami Pulau Jawa dan 65 persennya petani. Oleh karena itu pembangunan yang paling mendesak adalah pelaksaanaan *land reform* dan transmigrasi, sehingga tenaga sarjana berpendidikan teknik sangat dibutuhkan untuk mendukung program tersebut.[15]

Ia juga menekankan bahwa perguruan tinggi, sebagaimana yang termaktub dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat dan negara. “Perguruan tinggi adalah alat revolusi yang mana dalam menerima ilmu dari luar jangan sampai ada praduga terhadap ilmu itu sendiri, akan tetapi perguruan tinggi juga jangan sampai lupa terhadap kepribadian bangsa”.[16] Perguruan tinggi merupakan tempat ilmu pengetahuan terus dikembangkan, sehingga perguruan tinggi secara revolusioner harus bisa menerima konsepsi-konsepsi dari seluruh dunia tanpa ada *phobia-phobia* dari negara tertentu asal tetap memegang teguh prinsip kepribadian bangsa Indonesia.[17] Apa yang ia sampaikan di atas merupakan sebuah cermin: meskipun negara sedang terbelah ke dalam satu ideologi tertentu, namun dunia pendidikan lebih cair dan pengaruh politik harus disingkirkan.

Tidak berselang lama suasana akademik di Indonesia kembali memanas, yang dipicu pernyataan Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Kemasyarakatan Unpad Profesor Mochtar Kusumaatmaja, yang disinyalir telah menghina Soekarno dan meremehkan Manipol/USDEK-Demokrasi Terpimpin.[18] Atas pernyataan itu Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI) berekasi menuntut pemerintah menghilangkan anasir-anasir kontra revolusi yang bersarang di lingkungan akademik. Di lain pihak pemerintah menyesalkan tindakan yang dilakukan oleh kedua organisasi mahasiswa tersebut. Profesor Mustopo, selaku pembantu Menteri PTIP, mengatakan bahwa

Profesor Mochtar membela kepentingan Indonesia di kancah internasional. Akan tetapi nasib berkata lain. Sesuai dengan surat kawat Presiden Soekarno dari di Tokyo, Menteri Toyib memberhentikan Profesor Mochtar Kusumaatmaja dari jabatan sebagai Dekan Fakultas Hukum Unpad pada tanggal 8 November 1962.[19] Keputusan tersebut diambil untuk meredam gejolak di lingkungan pendidikan tinggi dari demonstrasi berikutnya. Pemberhentian itu mendapat kritik dari senat mahasiswa Fakultas Hukum dan Presidium Mahasiswa Unpad agar lebih berhati-hati terhadap aksi-aksi tuduhan yang mengakibatkan kekacauan di dalam pendidikan di Indonesia. Presidium GMNI mengirim surat kawat kepada Presiden Soekarno di Jepang karena atas perintahnya Prof. Mochtar Kusumaatmaja diberhentikan dari segala jabatannya oleh Menteri Toyib. Mahasiswa Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia di Unpad juga mengucapkan hal serupa.[20]

Selain sebagai alat revolusi, Toyib menekankan perguruan tinggi sebagai inkubator ilmu pengetahuan. Oleh karena itu perguruan tinggi seharusnya secara revolusioner dapat menerima konsepsi keilmuan dari seluruh dunia tanpa ada *phobia* terhadap ilmu dari negara tertentu. Dalam pidato Dies Natalis ke IX Universitas Islam Jakarta Toyib menegaskan bahwa "apa yang cocok dipegang, apa yang tidak pantas ditinggalkan". Tanpa mengesampingkan kebutuhan penelitian ilmiah, universitas harus dapat mengarahkan penelitian-penelitian ke arah pemecahan masalah yang praktis, khususnya yang berkaitan dengan masalah yang mendesak bagi masyarakat, misalnya sandang-pangan. Di samping itu perguruan tinggi harus secara aktif mengambil bagian dalam usaha pembangunan masyarakat.[21]

Ia menolak perguruan tinggi mewarisi sikap kolonialisme dalam bentuk perploncoan. Pada tanggal 15 November 1962 delegasi Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI) yang dipimpin Robby Sumolang menemui Menteri Toyib dan mendesak agar perploncoan dengan alasan apa pun di lingkungan pendidikan dihapus karena merupakan warisan sistem pendidikan kolonial dan bertentangan dengan Manipol/ USDEK. Pada saat itu praktek perploncoan masih berlaku di berbagai universitas, seperti yang terjadi di Bandung bahwa seorang mahasiswa bernama Muchlas Mubarad tewas dalam perploncoan. Berbagai organisasi, surat kabar, mahasiswa, hingga anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengharap pemerintah bertindak keras terhadap perploncoan. Menyikapi hal tersebut Toyib berjanji bahwa tahun depan tidak ada lagi perploncoan di lingkungan pendidikan. Ia akan mengeluarkan surat instruksi untuk seluruh perguruan tinggi menghapus kegiatan tersebut.

Pada dasarnya, sebagai orang yang berkecimpung di dunia pendidikan, ia menyadari bahwa perploncoan yang berbentuk seperti penghinaan dan penganiayaan tidak relevan lagi dan tidak mencerminkan sebagai orang yang berpendidikan. Di sini yang harus dihapus adalah sistem perploncoannya, karena ia melihat bahwa orientasi mahasiswa sebelum memasuki perguruan tinggi perlu dilaksanakan terlebih untuk diarahkan kepada studi terpimpin guna mendukung semangat revolusi.[22]

Dalam sambutan Dies Natalis Ke-2 Akademi Maritim Indonesia, Menteri Toyib mengemukakan bahwa konsep ilmu pengetahuan hanya untuk ilmu pengetahuan tidak lagi relevan dalam kondisi sosio politik bangsa Indonesia. Ilmu pengetahuan dan penelitian harus untuk kemajuan bangsa. Ia menambahkan bahwa penelitian yang dimaksud bukanlah survey atau kuliah kerja yang hanya dilakukan secara singkat, melainkan penelitian yang konsisten dan berkesinambungan. Perguruan tinggi sebagai alat revolusi harus bergerak secara revolusioner serta berani merombak tradisi-tradisi yang ada serta menggantinya dengan cara baru yang lebih modern dan bermanfaat dalam waktu yang singkat.[23]

Pada kesempatan yang lain, dalam pembukaan Konferensi Antar-Fakultas Ekonomi dan Sospol di Bandung, ia mengemukakan bahwa produksi tenaga sarjana, khususnya pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial-Politik, harus disesuaikan dengan kebutuhan negara. Jika terjadi kelebihan produksi, harus diambil tindakan agar jangan sampai terjadi pengangguran pendidikan tinggi. Di lain pihak ia memberi ide untuk membuka jurusan-jurusan lintas disiplin yang lebih luwes, tetapi tentu saja harus dikaji

Memulai panen hasil "action research" di salah satu sawah di Rengasdengklok
(Sumber:Repro *Otobiografi Toyib Hadiwijaya)*

sebelumnya. Selain itu ia juga mengkritik tenaga pengajar yang memberi kuliah hingga enam mata kuliah yang berlainan. Ia mengkhawatirkan terjadi penurunan kualitas di lingkungan akademik.[24]

Sementara itu ia mendapat dukungan dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) atas kebijakan pada yang dicanangkan tahun sebelumnya tentang pendidikan agama di perguruan tinggi. Toyib, dengan didampingi beberapa pejabat kementerian, menerima dengan resmi HMI yang baru saja melaksanakan musyawarah di Pekalongan dengan ketua Omar Komarudin. Di dalam pertemuan yang berlangsung di kediaman Toyib tersebut ditekankan bahwa perguruan tinggi merupakan alat revolusi. Jika universitas ingin menjadi alat yang ampuh dalam menyelesaikan revolusi maka harus universitas bersifat revolusioner, berani merombak dan memusnahkan hal-hal yang tidak sesuai dan menghambat jalannya revolusi. HMI menyampaikan bahwa mereka siap membantu pemerintah dalam memberikan pengajaran agama di universitas. Selain itu Menteri PTIP mengungkapkan kegembiraannya bahwa HMI tidak berafiliasi atau menjadi corong partai politik tertentu.[25]

Pada hari itu ia baru saja meresmikan Universitas Brawijaya, Malang, dan cabangnya di Jember, beralih status menjadi universitas negeri berdasar Keputusan Menteri PTIP, sehingga menempatkan Universitas Brawijaya sebagai universitas negeri ke-22 di Indonesia. Dengan pemberian status universitas negeri diharapkan universitas tersebut akan meningkatkan kualitas pendidikannya sebagai universitas sosialis di Jawa Timur dan alat revolusi bagi Indonesia.

Kebijakan politik Soekarno menentang imperialisme barat di Asia tidak berarti menutup semua hubungan Indonesia dengan Amerika dan Inggris. Secara politik boleh saja ada perselisihan, tetapi sebagai negara yang baru mengembangkan sumber daya manusianya Indonesia menerima bantuan dari Amerika dalam bentuk beasiswa untuk mahasiswa Indonesia yang menempuh master dan doktor di Amerika. Pada tanggal 17 April 1963, melalui Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Howard Jones, Menteri Toyib menyetujui pemberian beasiswa dalam bentuk Robert Kennedy Scholarship yang diberikan kepada puluhan mahasiswa ITB dan Unpad. Akan tetapi karena kondisi politik di Indonesia yang cenderung dekat dengan paham komunis, kebijakan tersebut mendapat kritik sangat tajam melalui opini koran yang intinya menyudutkan Menteri Toyib karena telah mengingkari cita-cita revolusi Nasakom.[26]

Toyib menyadari bahwa kesempatan belajar di Amerika Serikat untuk generasi muda Indonesia merupakan kesempatan emas. Barangkali untuk urusan ini ia tidak terlalu peduli bahwa kiblat politik Indonesia yang cenderung berhaluan komunis bertentangan dengan kiblat politik Amerika yang berhaluan liberalis. Ia sendiri sebelum menjadi menteri mempunyai pengalaman hidup di Amerika dan

Mc. Namara sedang bercakap-cakap dengan Prof. Ir. Toyib Hadiwijaya

(Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia)

melihat bagaimana sistem pendidikan di Amerika Serikat berjalan. Bahkan konsep kampus Darmaga IPB yang ia bangun terilhami model-model kampus di Amerika Serikat, khususnya University of California Berkeley.[27] Selain pemberian beasiswa untuk sekolah di luar negeri, ia juga mendorong universitas-universitas di Indonesia bekerja sama dengan universitas luar negeri guna mendorong riset kolaboratif antar perguruan tinggi sebagaimana yang ia sampaikan pada saat penandatangan nota kesepahaman antara UI dan University of the Philippines.[28]

Kebijakan menerima beasiswa tersebut menimbulkan pro kontra. Setelah mempelajari sambutan presiden dalam upacara peringatan triwarsa PTIP, GMNI bertekad membersihkan civitas akademika yang kontra revolusi. Mereka juga mendesak agar Menteri PTIP dan pimpinan ITB membatalkan pemberian beasiswa Kennedy Foundation yang diberikan kepada beberapa mahasiswa di ITB dan Unpad karena hal tersebut—menurut mereka—tidak sesuai dengan irama revolusi Indonesia yang menentang segala bentuk imperialisme.[29]

Sebagai menteri yang membidangi urusan perguruan tinggi, Toyib ingin memberi kesempatan yang lebih luas kepada mahasiswa untuk mengenyam pendidikan sebagai modal awal pembangunan. Selain pengumuman beasiswa dari Amerika Serikat, pada bulan Juni 1963—sesuai dengan keputusan sidang kabinet—pemerintah akan membebaskan uang kuliah dan memberi bantuan bus jemputan secara gratis untuk mahasiswa universitas negeri.[30] Pembebasan biaya kuliah bagi sebagian masyarakat merupakan terobosan untuk memberi kesempatan luas kepada generasi muda menempuh pendidikan tinggi di universitas negeri, tetapi kebijakan tersebut menimbulkan kecemburuan mahasiswa perguruan tinggi swasta. Kritik tajam muncul dengan tuduhan bahwa program pembebasan uang kuliah bukan jalan terbaik menyelesaikan ketimpangan di dalam masyarakat. Kebijakan tersebut disinyalir justru akan memperlebar jurang antara mahasiswa dan masyarakat dan akan berujung pada kecemburuan sosial. Untuk mengenyam pendidikan menengah saja masih banyak masyarakat yang tidak mampu karena alasan biaya.[31]

Sebagian masyarakat menduga kebijakan tersebut merupakan imbas peristiwa 10 Mei 1963 di Bandung.[32] Akan tetapi Menteri PTIP menampik tudingan tersebut dan perlu meluruskan untuk mencegah penafsiran yang salah. Kebijakan tersebut disetujui pada rapat kabinet. Peristiwa kerusuhan 10 Mei 1963 di Bandung memang mencoreng dunia akademik di Indonesia. Kerugian peristiwa ini ditaksir sekitar 69 Mobil, 246 sepeda motor, 184 sepeda, 525 rumah dan toko, serta 2 korban meninggal.[33] Salah satu dampak peristiwa tersebut adalah pemberlakuan jam malam di Bandung, hingga perintah langsung Presiden Soekarno untuk menyelesaikan masalah. Sentimen rasialis ternyata masih sangat

tinggi pada waktu itu. Kecemburuan dan kecurigaan sesama warga yang berlainan suku, khususnya Tionghoa, sangat rentan memanas.

Atas petunjuk Presiden Soekarno, melalui Menteri Koordinator Hubungan Rakyat Ruslan Abdulgani, Menteri PTIP akhirnya mengeluarkan instruksi kepada pimpinan perguruan tinggi untuk mengambil tindakan yang diperlukan dan menekan para mahasiswanya agar patuh pada Peraturan Pemerintah No 6/ 1962 Tentang Panca Dharma Bakti, yang berbunyi sebagai berikut.[34]

a. Kami mahasiswa, warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan berhaluan Manipol/USDEK, wajib berbakti, percaya dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa.
b. Kami mahasiswa, warga Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib setia dan taat kepada Kepala Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan berhaluan Manipol/USDEK.
c. Kami mahasiswa, pembela dan pendukung ideologi negara "Pancasila" dan haluan negara "Manipol/USDEK" wajib menghormati dan setia kepada martabat guru.
d. Kami mahasiswa, pembela dan pendukung ideologi negara "Pancasila" dan haluan negara "Manipol/USDEK" wajib menghormati dan setia kepada garba ilmiah (almamater).
e. Kami mahasiswa, warga Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menuntut dan mengabdi ilmu pengetahuan untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan seluruh umat manusia atas dasar perikemanusiaan.

Peristiwa itu meluas dan tidak hanya terjadi di Bandung, tetapi juga merambah hingga Cirebon, Tegal, dan Slawi sehingga menjadi urusan nasional untuk bersama-sama menjaga agar tidak meluas dan mengganggu pelaksanaan Deklarasi Ekonomi dan menyukseskan program Semesta Berencana.[35]

Toyib juga menaikkan tunjangan pokok bagi mahasiswa ikatan dinas calon pegawai negeri sipil yang belajar di dalam negeri. Tunjangan ditetapkan sebanyak Rp 512,00 untuk mahasiswa tingkat I-III dan Rp 632,00 untuk mahasiswa tingkat IV dan selanjutnya. Selain itu ada pula tambahan tunjangan pembelian alat pendidikan bagi mahasiswa ikatan dinas sebanyak Rp 100,00 untuk tingkat I-III dan Rp 150,00 untuk tingkat IV dan seterusnya. Peraturan tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1963.[36]

Pada tanggal 17 Juni 1963 Menteri Toyib secara resmi mendirikan dua fakultas tambahan di Universitas Pattimura, yakni Fakultas Pertanian/Kehutanan dan Fakultas Peternakan/Kehewanan. Pendirian dua fakultas ini untuk menjawab tantangan pendidikan di Indonesia Timur, khususnya di Maluku. Hal tersebut dianggap sebagai langkah yang progresif yang akan mendorong penelitian dan penguatan ilmu pengetahuan untuk kedua bidang tersebut. Menteri PTIP juga mengharapkan pembentukan fakultas-fakultas baru atau perguruan tinggi baru mampu mendorong masyarakat melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi[37] dan mengharap agar 10 persen penduduk Indonesia melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi.[38]

Departemen PTIP, yang diwakili oleh Pembantu Menteri Brigjen Sumantri Harjoprakosa, menghadiri pembacaan ikrar mahasiswa Universitas Cendrawasih yang menolak plebisit Irian Barat. Dalam ikrar tersebut mahasiswa sepakat menentang neokolonialisme yang ada di Irian Barat dan siap melaksanakan komando Bung Karno untuk menyelesaikan revolusi.[39] Dalam pidato perayataan Natal di UI di Jakarta Toyib juga menyerukan kepada mahasiswa agar menjadi manusia yang berjiwa Pancasila yang berkarakter. Ilmu pengetahuan tanpa karakter tidak akan mampu membawa kebahagiaan kepada masyarakat sosialis Indonesia. Peringatan ini dihadiri oleh rektor dan seluruh civitas akademika UI. Ia menambahkan bahwa "*science just for the sake of science*" tidak cocok dengan masyarakat Indonesia.[40] Sementara itu dalam pidato Dies Natalis Akademi Farming di Semarang ia menyatakan bahwa mahasiswa dididik di universitas untuk diberi tanggung jawab terhadap

tercapainya masyarakat sosialis Indonesia yang adil dan makmur secara material dan spiritual berdasarkan Pancasila. Mayoritas mahasiswa akademi tersebut berasal dari angkatan bersenjata.

Tidak selamanya ia berpendapat bahwa universitas harus terbebas dari unsur-unsur politis. Ketika mengunjungi Universitas Nusa Cendana di Kupang dalam rangka peninjauan ruangan tambahan pada tanggal 2 Januari 1964, Menteri Toyib didampingi Rektor UGM Professor Herman Johannes dan Rektor Universitas Nusa Cendana. Dalam pidatonya ia menyerukan pembentukan Resimen Mahasiswa (Menwa) dalam rangka mendukung program politik Presiden Soekarno melawan imperialisme baru dalam bentuk pendirian negara Malaysia serta untuk memperkuat pertahanan dalam negeri.[41] Akan tetapi seruan ini barangkali dapat dimaknai pula bahwa mahasiswa seharusnya memiliki karakter dan jati diri kebangsaan yang kuat untuk menangkal kekuatan dari luar yang berpotensi mengancam keselamatan negara.

Departemen PTIP, sebagaimana tujuan awal didirikan sebagai penyelenggara pelaksanaan Manipol di bidang pengajaran tinggi, juga mempunyai tugas mengawasi dan mengaudit keberadaan universitas dan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Adanya kesadaran bahwa pendidikan tinggi merupakan langkah awal meniti karier, ketika itu banyak pihak mendirikan yayasan yang di kemudian hari berkembang menjadi universitas ataupun sekolah tinggi swasta. Beberapa di antaranya memanfaatkan kesempatan tersebut untuk tujuan komersialisasi kampus, sementara tidak ada kualitas pendidikan yang diberikan.

Atas dasar keadaan itu Toyib melakukan langkah-langkah untuk mengorganisir pendirian perguruan tinggi-perguruan tinggi swasta tersebut. Sebagai contoh, surat kabar *Suluh Indonesia* tertanggal 23 Januari 1964 melaporkan bahwa Universitas Sawerigading yang berpusat di Makassar menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan membuka beberapa cabang di Riau dan Jakarta. Tim dari Departemen PTIP terjun dan menyelidiki langsung. Penyelidikan tersebut menemukan bahwa "Universitas Sawerigading" hanyalah sebuah yayasan yang sama sekali tidak mempunyai syarat-syarat sebagai perguruan tinggi karena tidak mempunyai ruang kelas, laboratorium, bahkan kuliahnya hampir tidak ada, tetapi yayasan ini memungut biaya kepada mahasiswa dan memberikan gelar B.A. atau sarjana muda kepada beberapa lulusannya.[42] Pihak yayasan membantah bahwa universitas mereka tidak memenuhi standar.

Hal ini merugikan masyarakat yang ingin menempuh pendidikan tinggi. Oleh karena itu pemerintah memberikan teguran keras kepada perguruan tinggi yang melanggar Pasal 25-27 Undang-undang No. 22 Tahun 1961 Tentang Perguruan Tinggi tersebut. Pemerintah meragukan keabsahan gelarnya (juga mutu pendidikannya), selain itu tidak ada jaminan lulusannya setia terhadap Pancasila dan Manipol sebagaimana dikehendaki dalam undang-undang. Di samping itu universitas yang berpusat di Makassar tersebut tidak memiliki akta notaris. Menteri Toyib pun memerintahkan agar universitas mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.[43]

Pada kesempatan lain Toyib mengatakan bahwa perguruan tinggi harus menjadi alat perjuangan dan pengemban amanat penderitaan rakyat (Ampera).[44] Dalam menyusun atau membuat keputusan yang berkaitan dengan perguruan tinggi harus didasarkan pada tiga pokok pikir yang masing-masing berupa dasar idiil, fisik, dan mental. Dalam pidato pembukaan rapat penyusunan konferensi kerja perumusan rancangan pelaksanaan UU PT di Wisma Hasta Senayan, ia menekankan bahwa pokok pikiran atas dasar idiil haruslah berdasarkan Pancasila dan berhaluan Manipol serta bertujuan untuk menjadikan perguruan tinggi sebagai alat perjuangan dan pengemban Ampera. Bahwa kebebasan akademik yang meliputi kebebasan belajar, kebebasan memasuki perguruan tinggi bagi pemegang ijazah SMA, kebebasan mengajar, kebebasan ilmiah, dan kebebasan mimbar akademik, harus didasarkan pada tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan bangsa dan kepribadian nasional. Pada akhirnya ia menekankan bahwa perubahan-perubahan akademik di perguruan tinggi harus didasarkan pada kebutuhan bangsa.

Toyib Hadiwijaya bersama Presiden Soekarno dan Ibu Negara setelah pelantikan sebagai Duta Besar Belgia di Istana Negara, 1964

(Sumber: Repro *Otobiografi Toyib Hadiwijaya)*

Pada tanggal 20 Juni 1964 Menteri Toyib membuka orientasi Manipol/USDEK untuk Duta Ampera ke XIX di Wisma Karti, Ragunan. Duta tersebut terdiri atas limapuluh sarjana yang akan berangkat ke Amerika Serikat untuk memperdalam keahlian masing-masing, yang didukung sepenuhnya oleh AID USA East West Center dan Ford Foundation. Ia menyerukan kepada seluruh perguruan tinggi di Indonesia untuk memelihara ketenangan, terutama di kalangan mahasiswa, dan meredam aksi-aksi unjuk rasa untuk menyukseskan Mapilindo.[45]

Sebagai menteri urusan perguruan tinggi ia juga disibukkan oleh demonstrasi mahasiswa. Pada tanggal 24 Juni 1964 HMI Jember melaporkan kepada pengadilan bahwa Prof. Utrecht anti agama dan perlu diadakan penyelidikan di bawah pengadilan apakah yang bersangkutan anti agama atau tidak. Fitnah tersebut dibantah oleh yang bersangkutan dan menyerahkan sepenuhnya kepada hukum. Apa yang dilakukan oleh HMI sebenarnya merugikan revolusi Indonesia. Sementara itu Toyib, sambil menunggu surat keputusan pemerintah mengenai pelarangan organisasi HMI, mencabut surat keputusan pimpinan Fakultas Hukum cabang Jember Universitas Brawijaya tentang HMI sebagai organisasi terlarang di kampus itu.

Perjalanan karier Toyib Hadiwijaya sebagai seorang akademisi yang kemudian diangkat sebagai Menteri PTIP di dalam kabinet Soekarno menghadapi banyak tantangan baik dari internal maupun eksternal. Seringkali kebijakannya dianggap terlalu progresif oleh Dewan Perwakilan Rakyat-Gotong Royong seperti pembebasan biaya kuliah dan penyediaan fasilitas bagi mahasiswa. Sementara itu dari sisi eksternal, kebijakannya pun tak luput dari kritik dan perlawanan dari berbagai unsur, seperti mahasiswa, partai politik, dan lembaga masyarakat lain. Pada masa kepemimpinannya pemerintah banyak mendirikan perguruan tinggi di seluruh Indonesia.

Belum genap empat tahun Toyib Hadiwijaya diberhentikan sebagai Menteri PTIP dan pada tahun 1964 diangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh Indonesia untuk Belgia oleh Presiden Soekarno.[46]

ENDNOTES

1 Nota Keuangandan APBN.

2 Lihat *Otobiografi Toyib Hadiwijaya*. Seperti dipaparkan oleh Memed Irawan dan Ganda Partasasita.

3 Arsip Nasional Republik Indonesia, Sekretariat Negara Pidato Presiden Sukarno No. 374 tentang pidato pengambilan sumpah jabatan menteri; Pada bulan November tahun 1963, Toyib Hadiwijaya diangkat kembali sebagai Menteri PTIP untuk melanjutkan jabatannya hingga tahun 1964 (*Harian Duta Masyarakat*, tanggal 14 November 1963).

4 *Otobiografi: Toyib Hadiwijaya*. Seperti dipaparkan oleh Memed Irawan dan Ganda Partasasita.

5 Dalam Rapat Antar Rektor Universitas Negeri di Jakarta telah dirumuskan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni:

a) Pendidikan dan Pengajaran: Membentuk manusia yang berkarakter yang mempunyai kemampuan teknis dan manajerial dan mampu melaksanakan penelitian ilmiah.

b) Penelitian: Melakukan penelitian ilmiah berdasarkan filsafat untuk kemajuan suatu ilmu pengetahuan, kebudayaan dan kehidupan kemasyarakatan.

c) Pengabdian kepada masyarakat: Mengamalkan ilmu oleh perguruan tinggi demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

6 Lihat Instruksi No. 3 Tahun 1962 tanggal 5 April 1962 tentang Pemberian Pendidikan Agama sebagai mata pelajaran pada Perguruan Tinggi Negeri.

7 *Otobiografi Toyib Hadiwijaya*. Seperti dipaparkan oleh Memed Irawan dan Ganda Partasasita.

8 *Ibid*.

9 *Antara*, 27 September 1962.

10 *Warta Bhakti*, September 1962.

11 *Antara*, 27 September 1962.

12 *Antara*, 10 Oktober 1962.

13 *Kedaulatan Rakyat*, 6 November 1962.

14 *Antara*, 9 November 1962.

15 *Antara*, 10 November 1962.

16 *Kedaulatan Rakyat*, 12 November 1962.

17 *Kedaulatan Rakyat*, 16 November 1962. Disampaikan dalam pidato Dies Natalis Universitas Islam Jakarta ke-XI.

18 *Warta Bhakti*, 3 November 1962. *Kedaulatan Rakyat*, 7 November 1962.

19 *Kedaulatan Rakyat*, 8 November 1962.

20 *Antara*, 12 November 1962.

21 *Berita Antara*, 15 November 1962.

22 *Berita Antara*, 15 November 1962.

23 *Antara*, 18 November 1962.

24 *Antara*, 18 November 1962.

25 *Antara*, 3 Januari 1963.

26 Lihat *Harian Bintang Timur*, 17 April 1963, opini Koran tersebut dilontarkan oleh Widagdo. Ia mengomentari bahwa sumber dari pembiayaan beasiswa tersebut berasal dari buku karangan adik Presiden Kennedy, Robert Kennedy, yang berjudul *Just Friends and Brave Enemies*. Salah satu isi buku tersebut dalam intepretasi penulis opini berisi penghinaan terhadap perjuangan nasional Indonesia. Ia menyesalkan di saat Indonesia sedang melaksanakan Panca Program Front Nasional, secara resmi PTIP mengumuka npemberian beasiswa tersebut.

27 *Otobiografi: Toyib Hadiwijaya*. Seperti dipaparkan oleh Memed Irawan dan Ganda Partasasita.

28 *Suluh Indonesia*, 6 Februari 1964.

29 *Suluh Indonesia*.

30 Lihat *Harian Bintang Timur*, 26 Juni 1963.

31 Menurut laporan Koran tersebut pembebasan uang kuliah dan memberikan bus gratis justru akan memisahkan rakyat dengan mahasiswa. Mahasiswa akan menjadi satu komunitas tersendiri dan tidak dapat mengimplementasikan ilmunya langsung pada masyarakat. Mahasiswa seharusnya membaur dengan masyarakat karena nantinya mereka akan kembali pada masyarakat.

32 Pada tanggal 10 Mei 1963 di Institut Teknologi Bandung terjadi kerusuhan rasialis antara mahasiswa Tionghoa dan non Tionghoa. Bermula dari perebutan bangku kuliah ketika pergantian jam pelajaran dengan mem*booking* kursi terlebih dahulu yang dilakukan oleh kebanyakan mahasiswa Tionghoa. Hal tersebut sebenarnya merupakan kecemburuan social karena fasilitas pribadi yang dimiliki mahasiswa Tionghoa tergolong mewah. Akibatnya terjadi kerusuhan cukup parah hingga menimbulkan gangguan ekonomi dan keamanan di Bandung.

33 *Kedaulatan Rakyat*, 16 Mei 1963.

34 Panca Dharma Bakti tertuang dalam Peratura Presiden Nomor 6 Tahun 1962 Tanggal 16 Agustus 1962 diundangkan dalam Lembaran Negara 16 Agustus 1963.

35 *Kedaulatan Rakyat*, 16 Mei 1963.

36 *Kedaulatan Rakyat*, 6 Juni 1963.

37 *Antara*, 17 Juni 1963.

38 *Warta Bhakti*.

39 *Suluh Indonesia*.

40 *Kedaulatan Rakyat*, 23 Desember 1963.

41 *Suluh Indonesia*, 4 Januari 1964. Lihat Peraturan Menteri PTIP No. M/A/20/63 tanggal 24 Januari 1963 tentang Pelaksanaan Wajib Latih dan Pembentukan Resimen Mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi.

42 *Suluh Indonesia*, 23 Januari 1964.

43 *Suluh Indonesia*, 27 Januari 1964.

44 *Suluh Indonesia*, 24 Maret 1964.

45 *Suluh Indonesia*.

46 Arsip Nasional Republik Indonesia, Sekretariat Negara Pidato Presiden Sukarno tentang pidato pengambilan sumpah jabatan duta besar RI.

Artati Marzuki Sudirdjo

Masa Jabatan
27 Agustus 1964 - 21 Februari 1966

Artati Marzuki Sudirdjo

DINAMIKA KEHIDUPAN

Ny. Artati Marzuki-Sudirdjo (Ny. Artati) merupakan perempuan pertama dan satu-satunya dalam sejarah pemerintahan Republik Indonesia (RI) sampai saat ini yang menjadi Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (P dan K). Sebelum menjabat sebagai menteri ia mengawali karier di berbagai instansi pemerintahan, yang sebagian besar berhubungan dengan hukum sesuai dengan pendidikannya.

Ny. Artati merupakan perempuan yang cerdas dan menguasai banyak bahasa asing secara aktif, di antaranya bahasa-bahasa Inggris, Belanda, Perancis, dan Italia. Bahasa lain yang dikuasai secara pasif adalah bahasa Jerman dan bahasa Jepang. Ia juga memiliki andil besar atas terjalinnya hubungan RI dengan negara-negara lain. Atas jasa-jasanya tersebut ia mendapat banyak penghargaan, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, di antaranya Italia, Belanda, dan Belgia.[1]

Ny. Artati lahir di Bringin, Salatiga, tanggal 15 Juni 1921, lulus *Faculteit der Rechtsgeleerdheid* 'Fakultas Hukum', Jakarta, pada tanggal 9 Agustus 1941.[2] Ia menikah dengan J. Marzuki, sehingga dari suaminyalah ia mendapat nama Marzuki. Dari pernikahan tersebut ia dikaruniai dua orang anak.

KARIER DAN KARYA

Ny. Artati memulai karier di pemerintahan sejak tahun 1942 dengan bekerja sebagai penerjemah di Kantor Gubernur Jawa Barat di Bandung. Tahun berikutnya ia pindah ke Jakarta dan bekerja sebagai *Buitengewoon Substituut Griffier* (*BS Griffier*) atau Panitera Kantor Pengadilan Kepolisian. Pada bulan Februari 1944 ia pindah ke kantor Pusat Kehakiman sebagai pegawai pada Bagian Urusan Umum. Di sini ia bekerja sekitar tujuh bulan sebelum kembali ke Bandung pada bulan November 1944 untuk bekerja sebagai panitera di kantor Pengadilan Negeri Bandung dan Sumedang sampai bulan Oktober 1946.

Ny. Artati kemudian menjadi diplomat. Karier di bidang diplomasi bermula dari pekerjaannya sebagai pegawai pada Bagian Politik dan Konsuler Kementerian Luar Negeri RI. Sampai bulan Desember tahun 1949 ia ditempatkan di Kementerian Luar Negeri RI yang berkantor di Yogyakarta dan pada awal tahun 1950 dipindahkan ke Sekretariat Jenderal Kementerian Luar Negeri di Jakarta.

Pada bulan April tahun 1950 Ny. Artati mengawali karier sebagai seorang diplomat yang ditugaskan sebagai Kepala Bagian Sosial, Humaniter, dan Kebudayaan pada Perwakilan Tetap Republik Indonesia di markas besar PBB, New York, Amerika Serikat. Tahun 1955 ia menjadi anggota delegasi dalam Konferensi Asia Afrika di Bandung pada bagian sekretariat.[3]

Semasa menjalani karier sebagai diplomat Ny. Artati sangat aktif mengikuti berbagai seminar, konferensi, serta rapat internasional. Pada tahun 1950 ia diangkat sebagai Penasihat Delegasi Indonesia pada Konferensi Bantuan Teknik di New York dan pada tahun 1950-1952 menjadi wakil Indonesia dalam penyusunan buku tahunan PBB tentang hak asasi manusia (HAM). Ia aktif menghadiri General Assembly (Sidang Umum/SU) PBB sebagai anggota delegasi RI sejak SU ke-5 tahun 1950 hingga sidang ke-9 tahun 1952.[4] Di samping itu ia juga hadir dalam sidang-sidang umum ke-11 tahun 1956, ke-22, 24, 25, serta ke-28, dan sidang-sidang selanjutnya yang diadakan setiap tahun.[5] Tahun 1951 hingga 1952 dan tahun 1957 ia menjadi anggota Badan Eksekutif Dana Bantuan Darurat PBB untuk Anak-anak (UNICEF). Tahun 1953 hingga 1954 ia bertugas sebagai anggota Komite Permasalahan Kependudukan PBB. Tahun 1953 ia hadir sebagai Peninjau pada Konferensi PBB tentang Pembatasan Produksi Candu di New York. Tahun 1955 ia diangkat menjadi Penasihat Delegasi RI ke Sidang Komisi PBB untuk Asia Jauh (ECAFE) di Tokyo.

Ny. Artati Marzuki-Sudirdjo, saat mewakili Indonesia pada PBB, sedang bercakap-cakap dengan Begum Liaquat Ali Khan dari Pakistan dan Madame Lakshmi Pandit dari India, sekitar tahun 1952[6]

(Sumber: Repro buku *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum Dan Masjarakat)*

Ny. Artati Marzuki-Sudirdjo saat menghadiri suatu acara yang juga dihadiri oleh Dr. J. Leimena, Let. Jend. Purn. Dr. T.B. Simatupang, dan Dr. Moh. Hatta

(Sumber: Perpustakaan Nasional Indonesia)

DINAMIKA SELAMA MENJABAT SEBAGAI MENTERI

Selama masa jabatannya Ny. Artati harus berhadapan dengan situasi politik yang tidak stabil. Persaingan antara berbagai macam ideologi di Indonesia, yang kala itu masih berumur sangat muda, terjadi tidak hanya di permukaan saja. Di dalam badan-badan internal pemerintahan, persaingan dan perebutan hegemoni terjadi begitu sengit; di sisi lain pendidikan dan kebudayaan merupakan salah satu unsur penting dalam persaingan ideologis. Yang paling terasa tentu saja persaingan antara paham komunis dan paham-paham lain.

Sebagai akibat situasi politik yang tidak stabil itu, sejak awal enampuluhan, terbentuk dua kelompok pekerja di internal Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan. Salah satu kelompok adalah organisasi Serikat Sekerja Pendidikan (SSP) yang merupakan gabungan pejabat dan pegawai yang berideologi komunisme. Kelompok yang lain merupakan gabungan dari pejabat dan pegawai yang berideologi marhaenisme dan anggota partai yang berideologi agama, tergabung dalam Serikat Sekerja Pendidikan dan Kebudayaan (SSPK).[7] Carut-marut kondisi ini diperparah oleh persaingan ideologis dalam bentuk sistem pendidikan nasional. Secara resmi pemerintah menerapkan suatu sistem bernama Sistem Pendidikan Panca-Wardhana; di sisi lain—golongan kiri—menyerukan sistem tandingan bernama Panca Cinta, walaupun dalam pidato-pidato mereka mengklaim bahwa Panca Cinta tidak bertentangan dengan Panca Wardhana.

Selain itu ada pula persaingan antara Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan PGRI Non-Vaksentral yang merupakan salah satu organisasi mantel Partai Komunis Indonesia (PKI). Sebagai akibat dari persaingan dan perselisihan internal 27 orang pegawai Kementerian Pendidikan Dasar dan Kebudayaan mengirim surat ke Menteri Prijono. Tujuan awal surat tersebut adalah meredakan persaingan dan menyelaraskan keadaan internal Kementerian Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, namun ke-27 orang pegawai tersebut malah diberhentikan oleh Menteri Priyono dengan alasan "atas dasar permintaan sendiri".[8] Permasalahan tersebut tidak kunjung selesai hingga akhir masa jabatan Menteri Priyono, sehingga pada akhirnya menjadi masalah yang diturunkan kepada Ny. Artati sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan pengganti Prof. Prijono.

Pemberhentian ke-27 pegawai menimbulkan masalah baru yang ditanggapi serius oleh berbagai ormas dan partai. Kalangan marhaenis dan agama tidak setuju, sedang golongan kiri—terlebih PGRI Non-vaksentral—mendukung pemberhentian 27 pegawai tersebut. Begitu genting masalah tersebut sampai Presiden Soekarno harus turun tangan dan menanganinya sendiri. Ketika Ny. Artati menjadi Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan ke-27 orang pegawai yang dipecat Menteri Priyono mengirim

Ny. Artati Marzuki-Sudirdjo (duduk di tengah) saat menjadi delegasi Indonesia pada PBB.[14]

(Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia)

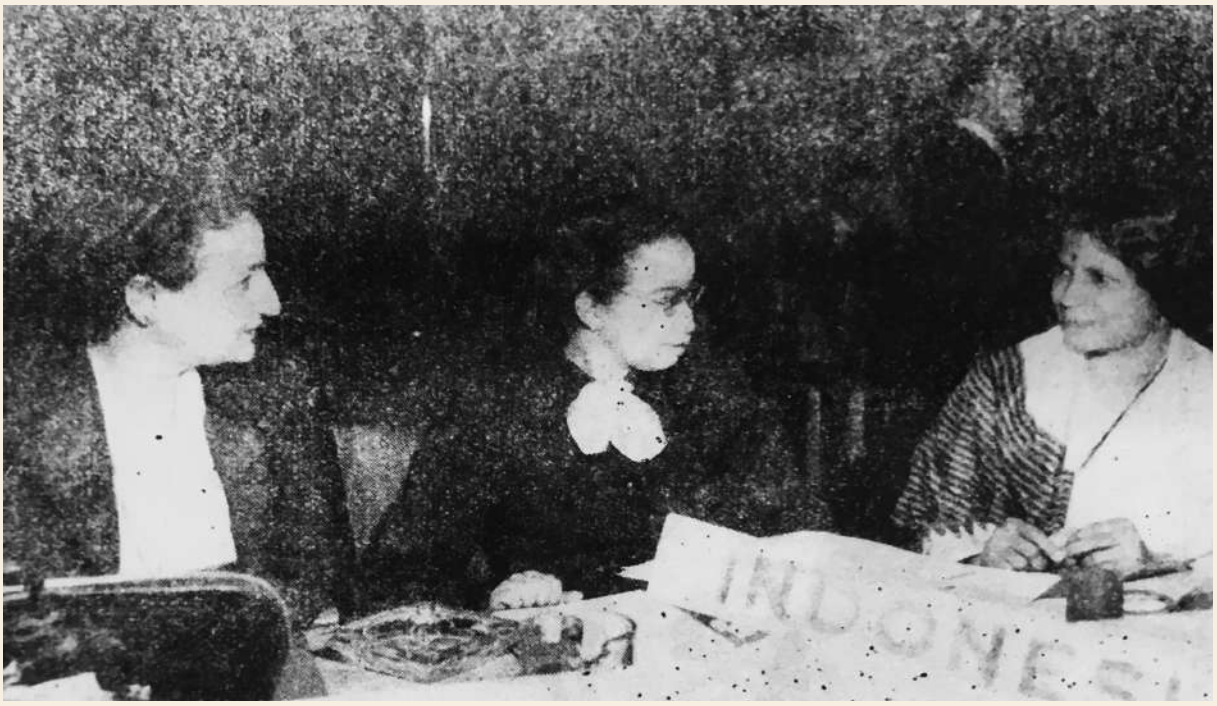

telegram kepada Ny. Artati, tetapi Ny. Artati tidak dapat menjawab karena permasalahan sudah diambil alih oleh Presiden.

Pada akhirnya, dengan bantuan pihak Angkatan Darat, Ny. Artati mampu menyelesaikan masalah dan mengembalikan kondisi internal Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan. Duapuluh empat orang yang diberhentikan dipekerjakan sementara di Markas Besar Angkatan Darat di bawah koordinasi Letnal Kolonel Amir Murtono, sedang tiga orang yang lain diterima bekerja di Departemen Dalam Negeri. Meskpun demikian mereka tidak menerima kejelasan dari Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan.

Pada bulan September 1964 Presiden Soekarno membentuk Panitya Negara Penjempurnaan Pendidikan Panca-Wardhana yang bertugas untuk (1) menyempurnakan dan mengembangkan Sistim Pendidikan Panca-Wardhana dan (2) menyampaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya usul pertimbangan mengenai persoalan pemberhentian 27 orang pegawai Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan.[9]

Panitia bentukan Presiden Soekarno kemudian menyatakan bahwa seluruh pegawai yang diberhentikan tidak bersalah, sehingga melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 313 Tahun 1964 13 orang pegawai kembali bekerja di Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan[10] dan sisanya tetap bekerja di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Mabes TNI AD) dan Departemen Dalam Negeri.[11]

Ny. Artati seorang anti-komunis dan anti-gestapu,[12] namun kapasitasnya sebagai menteri dalam Kabinet Dwikora yang bernafas NASAKOM mampu menjalankan roda kerja Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan sebagaimana diinstruksikan oleh Presiden Soekarno. Pada tanggal 1 Januari 1965 Presiden Soekarno mengeluarkan perintah wajib belajar kepada seluruh warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan, dalam kelompok usia 8-14 tahun. Atas perintah tersebut Ny. Artati sebagai menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan segera melakukan persiapan untuk melaksanakannya.[13]

Ny. Artati menyusun sejumlah garis besar Program Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan sebagai berikut:

1. Dasar
   a. Undang-undang Dasar (UUD) 1945, khususnya Bab XIII pasal 31.
   b. TAP MPRS No. 1/MPRS/1960, terutama Keputusan DPA No. /Kpts/SD/II/59 (sebagai

Ny. Artati Marzuki-Sudirdjo saat menjabat sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan RI tahun 1964-1966.[24]

(Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia)

Ny. Artati Marzuki-Sudirdjo saat mendampingi Presiden Soekarno menerima kunjungan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ghana beserta isteri di Istana Merdeka, Agustus 1965.[16]

(Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia)

lampiran), khususnya mengenai Usaha-usaha Pokok (Program Umum), D. Bidang Mental dan Kebudayaan. TAP MPRS No. II/MPRS/1960, terutama Bab II pasal 2, Bidang Mental/ Agama/Kerohanian/Pene1itian, dan Resolusi MPRS No. I/Res/MPRS/1965, beserta lampiran-lampirannya.

c. Program Kerja Kabinet Dwikora (Tri Program Pemerintah).
d. Pedoman Kerja Pelaksanaan Revolusi dalam tahapan perjuangan TAVIP, terutama dalam bidang pendidikan dan kebudayaan.

2. Program Pokok
   a. Bidang pendidikan kebudayaan
      1) Mengintensifkan penanaman ideologi negara dengan melaksanakan Manifesto Politik di bidang pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh swadaya swasta rakyat, atas:
         a) Dasar dan moral pendidikan nasional Pancasila dengan haluan Manipol/USDEK;
         b) Dengan sistem pendidikan nasional Panca Wardhana, dengan pengkhususan Nasakom untuk sekolah-sekolah swasta.
      2) Mengintensifkan usaha pelaksanaan Ketetapan-ketetapan MPRS di bidang pendidikan, terutama:
         a) Menyempurnakan pelaksanaan perimbangan pendidikan kejuruan dan umum 7 : 3 (baik pemerintah maupun swadaya rakyat);
         b) Menyempumakan pelaksanaan kewajiban belajar;
         c) Melanjutkan penyelesaian pemberantasan buta huruf, serta melanjutkan pelaksanaan *follow-up*-nya.
         d) Mengintensifkan pelaksanaan Manifesto Politik di bidang kebudayaan dan mengganyang segala unsur-unsur kebudayaan yang menyimpang dari ideologi negara dan melemahkan Revolusi (antara lain Manikebu).
         e) Mengenal kebudayaan serta kepribadian sendiri guna membina kebudayaan nasional yang progresif revolusioner serta menolak/memberantas pengaruh-pengaruh buruk kebudayaan asing.
   b. Bidang organisasi dan tata kerja
      1) Mengadakan *regrouping* aparatur departemen secara menyeluruh (integral).
      2) Menyempurnakan hubungan kerja antar aparatur Departemen PD dan K, baik di pusat maupun di daerah, atas dasar prinsip dekonsentrasi kewenangan dan penyelenggaraan.[15]

Ny. Artati Marzuki-Sudirdjo saat mendampingi Presiden Soekarno menerima kunjungan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ghana beserta isteri di Istana Merdeka, Agustus 1965.[16]

(Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia)

Meski sudah menjabat sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan kesibukan menjadi delegasi rupanya masih mengikuti Ny. Artati. Pada bulan Agustus 1965 ia bersama tujuh orang lain diutus oleh Presiden Soekarno mengunjungi Republik Rakyat Demokrasi Korea selama dua minggu untuk mempelajari pengintegrasian gerakan Pramuka dalam pendidikan.[17] Satu bulan kemudian ia dan Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Jenderal Hamengku Buwono IX mengeluarkan keputusan bersama yang ditujukan kepada para pimpinan sekolah, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga lanjutan atas, agar menganjurkan siswanya masuk menjadi anggota Pramuka.[18]

Pada bulan Oktober tahun 1965, datang undangan dari Uni Soviet, Hungaria, dan Republik Demokrasi Jerman. Ny. Artati, sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, kembali dikirim oleh Presiden Soekarno guna mempelajari sistem pendidikan dan kebudayaan di negara-negara tersebut. Saat itu hubungan Indonesia dengan negara-negara komunis sedang sangat dekat. Kunjungan tersebut memakan waktu cukup lama, hampir sebulan lamanya, meliputi 14 hari di Uni Soviet, tujuh hari di Hungaria, dan tujuh hari di Republik Demokrasi Jerman.[19]

Salah satu tugas sebagai seorang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan—selain mengurusi pendidikan nasional—menjadi ujung tombak hubungan kebudayaan Indonesia dengan negara lain. Oleh karena itu apabila ada utusan kebudayaan dari negara lain menjadi tugas Ny. Artati mendampingi presiden menerima kunjungan utusan kebudayaan bersangkutan. Pada beberapa kesempatan, apabila presiden berhalangan hadir, Menteri Pendidikan dan Kebudayaanlah yang bertugas menerima utusan-utusan tersebut.

Selain mendukung dan menganjurkan Gerakan Pramuka, Ny. Artati juga mendukung penuh pendirian organisasi persatuan pelajar di Indonesia. Oleh karena itu ia mengesahkan berdirinya Persatuan Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia (POPSI) dan Korps Peladjar Serba Guna (KODJARSENA).[20]

Ny. Artati seorang yang memiliki kemampuan beradaptasi luar biasa, terbukti ia menjadi seorang pengambil keputusan yang tepat. Dalam salah satu pidatonya ia berpesan bahwa seluruh rakyat Indonesia, baik buruh, tani, karyawan, maupun pemuda-pelajar, harus benar-benar bersatu untuk mencapai tujuan revolusi Indonesia.[21] Ny. Artati juga merupakan seorang yang sadar pentingnya arti sejarah bangsa bagi pembentukan karakter. Hampir dalam setiap pidato dan ceramah ia selalu mengawalinya dengan berbicara tentang sejarah bangsa.[22] Ia seorang pancasilais dan anti-kolonial tulen. Oleh karena itu ia menyalahkan sistem pendidikan kolonial yang membuat rakyat Indonesia susah menjadi progresif dan revolusioner.[23]

Ny. Artati seorang humanitarian dan sosialis. Ia percaya bahwa pendidikan merupakan hak semua anak tanpa membedakan faktor sosial dan ekonomi orang tua anak. Pada prinsipnya pendidikan dasar haruslah bebas dari biaya apa pun dan baru pada pendidikan lanjutan boleh dipungut biaya sesuai kemampuan orang tua anak. Pendidikan haruslah bertujuan pada terbentuknya tenaga-tenaga yang dapat memberikan sumbangan untuk terciptanya masyarakat Indonesia yang sosialis.[25]

Dalam suasana yang penuh semangat revolusi, Ny. Artati berpendapat bahwa untuk menunjang revolusi dan demokrasi terpimpin perlu dilakukan pembenahan di bidang pendidikan. Yang pertama perlu dilakukan adalah pembangunan mental dengan cara mengharuskan pembelajaran lagu-lagu wajib. Ia percaya bahwa lagu-lagu wajib mampu memupuk rasa cinta tanah air dan jiwa revolusi. Sejalan dengan jiwa Kabinet Dwikora, yaitu pembenahan sandang pangan, ia menyarankan "usaha halaman" pada tiap-tiap sekolah, yang dapat membangkitkan kesadaran anak didik dalam menghargai pekerjaan tangan dan keterampilan. Ia menyalahkan sistem pendidikan kolonial yang membuat anak didik tidak terampil dan tidak "hidup tangannya" sehingga menghambat kemajuan pendidikan teknik dan kejuruan. Ia juga sangat menyarankan menabung dan membangun koperasi. Dalam pandangan Ny. Artati, guru merupakan faktor utama dalam pendidikan anak. Guru merupakan patriot, sebab guru berdiri di garis depan melawan penjajahan pendidikan dan melawan kebodohan.[26]

Dalam mendukung Indonesia menjadi negara yang kuat secara kelautan Ny. Artati menetapkan buku *Sang Saka Melanglang Djagad* sebagai buku bacaan untuk SLTP/SLTA. Ia bersama Presiden Soekarno, Menko Roeslan Abdulgani, Menhankam/Pangab Jenderal A.H. Nasution, KASAL Laksamana R.E. Martadinata, Kepala Puspenal Kolonel Laut R.M. Ambardy, dan Komandan KRI Dewa Ruci Letkol Laut H. Sumantri memberi kata sambutan dalam buku tersebut.[27]

Presiden Soekarno melakukan *reshuffle* Kabinet Dwikora pada tahun 1966. Ny. Artati termasuk ke dalam jajaran menteri yang diberhentikan dari kabinet yang disempurnakan itu. Pencopotan beberapa menteri, termasuk Ny. Artati, menyulut amarah beberapa kalangan. Soe Hok Gie menyebut bahwa Ny. Artati orang yang anti-gestapu, sehingga pencopotannya merupakan indikator semakin dekatnya Presiden Soekarno dengan paham komunis;[28] bahkan seakan menjadi katalis kekecewaan rakyat pengganti Ny. Artati, Sumardjo, didukung penuh oleh golongan kiri.

Setelah selesai menjabat sebagai menteri, Ny. Artati tidak berhenti berkarier di pemerintahan. Ia berbakti kepada negara dalam bidang yang dicintainya: diplomasi internasional. Rasa cinta tanah air dan cinta pada kebudayaan bangsa membuat ia tetap berkecimpung dalam pelestarian budaya di Indonesia, walaupun sudah tidak lagi menjabat sebagai menteri. Pada tahun 1968 ia terpilih sebagai Wakil Ketua I Panitia Nasional Perbaikan Candi Borobudur. Ia juga merupakan salah satu tokoh di balik penggalangan dana untuk perbaikan Candi Borobudur.[29] Kariernya terakhirnya dalam pemerintahan adalah sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Swiss dan Austria.

PENUTUP

Ny. Artati seorang perempuan yang cerdas dan berani. Ia mampu beradaptasi dengan keadaan dan pekerjaan yang berganti-ganti. Ia juga mampu bertahan di antara tekanan perebutan ideologis antara golongan kiri dan kanan. Sebagai seorang profesional yang dianggap anti-gestapu dan anti-komunis ia mampu bekerja di bawah Menteri Koordinator Prijono yang seorang komunis dan mampu menjalankan tugas-tugasnya sebagai menteri dengan baik. Walaupun pada akhirnya ia diberhentikan akibat pergulatan ideologis dalam pemerintahan, namun baktinya sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan tetap membentuk sejarah bangsa ini. Ia terus berkarya dan mewujudkan rasa cintanya pada budaya bangsa. Ia merupakan inspirasi tiada henti bagi anak bangsa, terutama bagi kaum perempuan. Ia seorang menteri, diplomat, budayawan, dan negosiator ulung, sekaligus seorang ibu dan istri. Keberadaan Ny. Artati dalam sejarah jabatan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan merupakan contoh nyata bahwa Indonesia merupakan negara egaliter yang memberikan kesempatan sama bagi semua rakyatnya yang bekerja keras, bertanggung jawab, dan memiliki watak profesional.

ENDNOTES

1 S. Sumardi, dkk., *Menteri-Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Sejak Tahun 1966* (Jakarta: Departemen pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat sejarah dan nilai tradisional Proyek inventarisasi dan Dokumentasi sejarah Nasional, 1984).

2 *Ibid.*; Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudajaan, *Pewarta Pendidikan, Pengetahuan, Kebudajaan*, 1-2, 1964.

3 "Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 66 TAHUN 1955," 1955; S. Sumardi and dkk, *op. cit.*

4 "Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 184 Tahun 1954," 1954.

5 S. Sumardi, dkk, *op. cit.*

6 Nani Soewondo, *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum Dan Masjarakat* (Jakarta: Timun Mas, 1955).

7 Suradi Hp., et al., *Sejarah Pemikiran Pendidikan Dan Kebudayaan* (Jakarta: Departemen pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat sejarah dan nilai tradisional Proyek inventa risasi dan Dokumentasi sejarah Nasional, 1986).

8 M. Rusli Yunus, *Perjalanan PGRI (1945-2003)* (Semarang: Departemen Pendidikan Nasional, 2003).

9 "Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 224 Tahun 1964," September 7, 1964.

10 "Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 313 Tahun 1964," 1964.

11 M. Rusli Yunus, *op. cit.*

12 Harold Crouch, *The Army and Politics in Indonesia* (Equinox Publishing, 2007); Rudy Badil and Luki Sutrisno Bekti, *Soe Hok-Gie ... Sekali Lagi; Buku Cinta Dan Pesta Di Alam Bangsanya*, ed. Nessi Luntungan R. (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2009).

13 Indonesian National News Agency, "Antara," 1965.

14 Perpustakaan Nasional dan Yayasan Idayu, *Perserikatan Bangsa-Bangsa [Gambar]: Ny. Artati Marzuki Sebagai Anggota Delegasi Wanita Indonesia Dalam PBB*, n.d.

15 Suradi Hp. et al., *op. cit.*

16 Perpustakaan Nasional and Yayasan Idayu, *Presiden Sukarno Menerima Kunjungan Menteri P.D.K. Ghana Beserta Isteri Di Istana Merdeka Pada Bln. Agustus 1965, Yang Diantar Oleh Menteri P.D.K. Ny. Artati Marzuki Sudirdjo [Gambar]*, 2005.

17 "Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 192 Tahun 1965," June 23, 1965.

18 *Kompas*, September 29, 1965, editsi Rabu; Johnny TG, "KOMPAS," November 19, 2017, edition Senin.

19 *op. cit.*, June 23, 1965.

20 Direktorat Pendidikan Kesenian, *Sangka*, 1-2, 1970.

21 kedaulatan Rakjat, "Kedaulatan Rakjat," 31 JulI, 1965, edisi Sabtu.

22 *Ibid.*; Artati Marzuki-Sudirdjo, "Pelaksanaan Pendidikan Nasional Berdasarkan Pantjasila," in *Kumpulan Tjeramah-Tjeramah Pada Pendidikan Kader Revolusi Angkatan Dwikora (31 Agustus 1964 s/d 10 Nopember 1964)* (Jakarta: Bagian Pendidikan/Peladjaran Badan Pelaksana Pendidikan Kader Revolusi Angkatan Dwikora, 1964).

23 Marzuki-Sudirdjo, *op. cit.*

24 Perpustakaan Nasional and Yayasan Idayu, *Potret Ny. Artati Marzuki Sudirdjo [Gambar]*, n.d.

25 *Ibid.*

26 *Ibid.*

27 C. Kowaas, *Dewa Ruci: Pelayaran Pertama Menaklukkan Tujuh Samudra: Sebuah Kisah Nyata* (Penerbit Buku Kompas, 2010).

28 Rudy Badil and Luki Sutrisno Bekti, *op. cit.*

29 S. Sumardi and Dkk, *op. cit.*

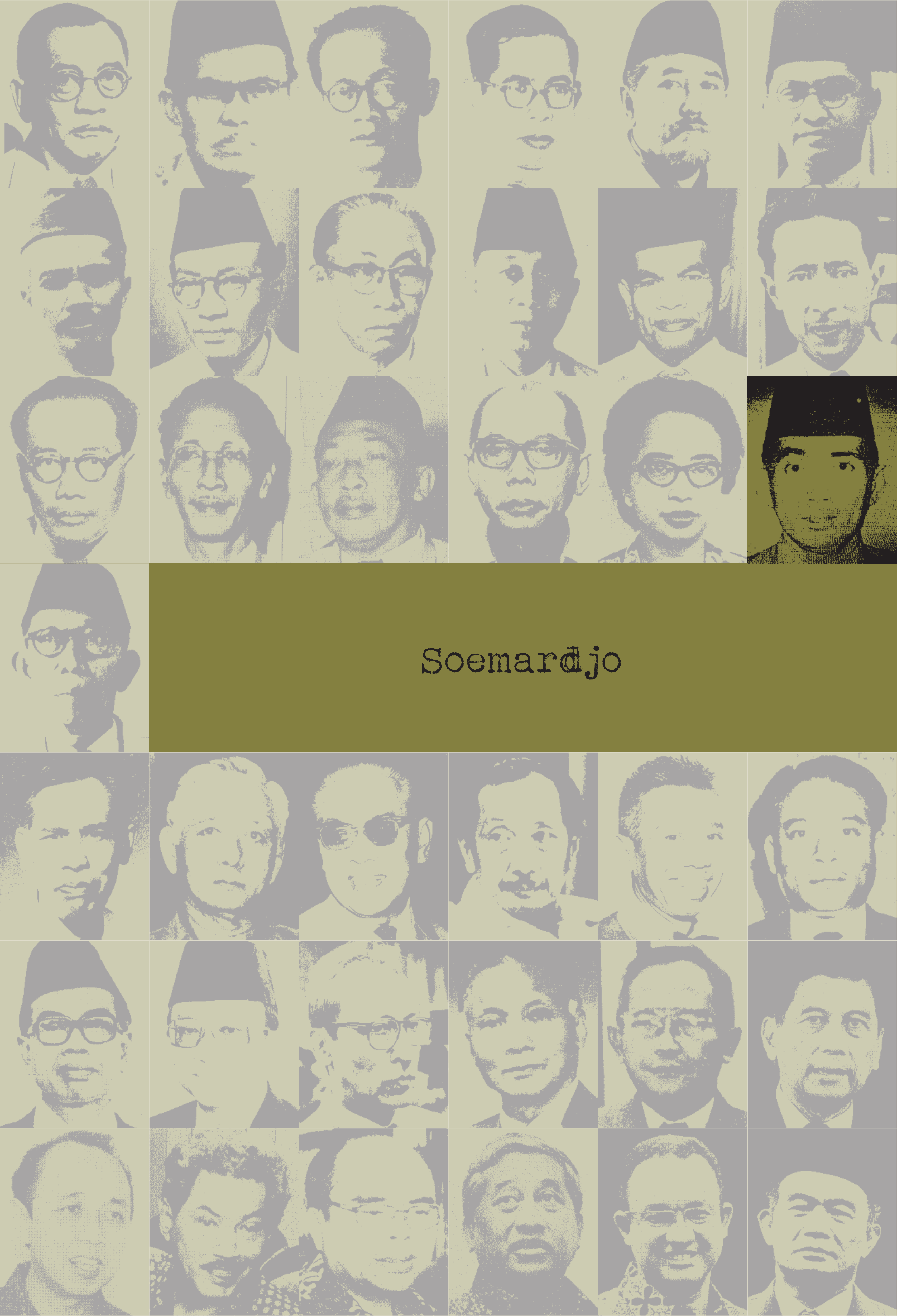

Soemardjo

Masa Jabatan
21 Februari – 18 Maret 1966

Soemardjo

RIWAYAT SINGKAT

Soemardjo lahir dan pernah tinggal di Yogyakarta, namun tidak banyak yang diketahui tentang latar belakang pendidikannya. Sejak usia remaja dan masa muda ia aktif dalam berbagai kegiatan organisasi. Ia melanjutkan pendidikan di bidang sejarah dan lulus B2 Sejarah di Yogyakarta. Setelah menjadi sarjana ia menjadi anggota Himpunan Sarjana Indonesia (Asvi Warman Adam, tt.: 118). Disinyalir ia membantu Soekarno menuliskan beberapa pidato kepresidenan, terutama yang berkaitan dengan sejarah (Rith Mc Vey, 1979).

Selama menjadi mahasiswa ia aktif di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) yang beraliran nasionalis. Ia juga aktif di berbagai kegiatan akademik, sosial, dan budaya, sehingga dekat dengan berbagai kalangan yang tergabung dalam organisasi kemahasiswaan dan sosial budaya lainnya. Ia dekat dengan tokoh-tokoh Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), seperti Nyoto, dan menurut kesaksian sahabatnya ia selalu hadir dalam setiap diskusi yang diselenggarakan oleh Lekra tentang seni dan budaya sekalipun ia bukan anggota resmi (Hersri Setiawan, 2018). Ia menulis beberapa artikel tentang kebudayaan yang diterbitkan dalam beberapa surat kabar dan majalah. Ia pun pernah bekerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI hingga kemudian ditunjuk sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan pada Kabinet Dwikora II.

ANGGOTA KABINET DWIKORA II

Soemardjo ditunjuk sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan dalam Kabinet Dwikora II atau Kabinet yang Disempurnakan. Kabinet Dwikora II dibentuk untuk menggantikan Kabinet Dwikora I yang dianggap tidak dapat menyelesaikan berbagai persoalan bangsa saat itu. Masa kerja Kabinet Dwikora I dari 27 Agustus 1964 sampai dengan 22 Februari 1966. Nama Dwikora merupakan kependekan dari Dwi Komando Rakyat, yakni komando Presiden Soekarno ketika melancarkan konfrontasi bersenjata terhadap Malaysia untuk menghalangi berdirinya negara Malaysia. Komando ini dikeluarkan dalam pidato Presiden Soekarno di depan apel besar sukarelawan di Jakarta tanggal 3 Mei 1964, berisi dua perintah, yaitu 1) perhebat ketahanan revolusi Indonesia dan 2) bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Serawak, dan Brunei. Lahirnya Dwikora tidak lepas dari peran PKI dalam pemerintahan, yang pengaruhnya mengarahkan politik bebas aktif Indonesia condong ke Republik Rakyat China (RRC) dan memunculkan apa yang disebut Poros Jakarta-Beijing.

Kabinet Dwikora II diumumkan pada tanggal 21 Februari 1966 dan anggota kabinet dilantik pada tanggal 24 Februari 1966. Kabinet ini juga dikenal dengan nama Kabinet Seratus Menteri karena jumlah anggota kabinetnya lebih dari 100 menteri. Dalam Kabinet ini Soekarno sebagai Presiden merangkap Panglima Tertinggi dan Perdana Menteri dengan didampingi lima Wakil Perdana Menteri. Di samping itu ada dua menteri pendidikan: yang pertama Soemardjo sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan dan yang kedua Leimena sebagai Menteri Pendidikan/Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan.

Jumlah menteri yang banyak merupakan upaya Soekarno untuk meyakinkan rakyat bahwa pemerintah akan segera melakukan tindakan-tindakan serius untuk mengatasi masalah kebangsaan. Namun kabinet dibentuk pada masa yang sangat genting, saat rakyat sedang melakukan demonstrasi menuntut pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) setelah peristiwa besar 30 September 1965 (G 30 S/PKI) yang menyebabkan tewasnya beberapa perwira tinggi TNI. Oleh karena peristiwa politik yang cepat berubah itu Kabinet Dwikora II tidak berumur panjang. Beberapa menteri bahkan belum melakukan

Pelantikan Kabinet Dwikora 24 Februari 1966

(Sumber: Istimewa)

langkah nyata dalam posisinya sebagai menteri. Kabinet ini dibubarkan pada tanggal 27 Maret 1966 dan limabelas anggota kabinet, termasuk Soemardjo, ditahan.

PENAHANAN SOEMARDJO

Pada saat berlangsung sidang kabinet pada bulan Maret 1966 dengan dipimpin oleh Presiden Soekarno, Panglima Pasukan Pengawal Presiden (Tjakrabirawa) Brigadir Jenderal (Brigjen) Sabur melaporkan bahwa banyak "pasukan liar" atau "pasukan tak dikenal"—yang belakangan diketahui adalah Pasukan Kostrad di bawah pimpinan Mayor Jenderal (Mayjen) Kemal Idris yang bertugas menahan orang-orang dalam kabinet karena diduga terlibat G 30 S/PKI—di antaranya Wakil Perdana Menteri (PM) I Soebandrio. Mendapat laporan tersebut Presiden Soekarno bersama Wakil PM I Soebandrio dan Wakil PM III Chaerul Saleh berangkat ke Bogor.

Situasi ini dilaporkan kepada Mayjen Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat, yang menggantikan Letnan Jenderal (Letjen) Ahmad Yani yang gugur akibat peristiwa G-30-S/PKI. Mayjen Soeharto saat itu tidak menghadiri sidang kabinet karena sakit. Ia kemudian memerintahkan tiga orang perwira tinggi Angkatan Darat (AD) menemui Presiden Soekarno di Istana Bogor. Mereka itu adalah Brigjen M. Jusuf, Brigjen Amirmachmud, dan Brigjen Basuki Rahmat. Pada malam harinya, setiba di Istana Bogor, ketiga perwira tinggi AD itu berbicara dengan Presiden Soekarno mengenai situasi yang terjadi. Ketiga perwira itu juga menyatakan bahwa Mayjen Soeharto mampu mengendalikan situasi dan memulihkan keamanan bila diberikan surat tugas atau surat kuasa yang memberikan kewenangan kepadanya untuk mengambil tindakan. Presiden Soekarno menyetujui dan dibuatlah surat perintah yang ditujukan kepada Mayjen Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan yang perlu dalam rangka memulihkan keamanan dan ketertiban. Surat yang ditandatangani pada tanggal 11 Maret itu kemudian dikenal dengan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang sampai di tangan Mayjen Soeharto tanggal 12 Maret 1966 dini hari (A. Pambudi, 2016).

Sebagai pengemban Supersemar Mayjen Soeharto segera mengambil tindakan untuk menata kembali kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Pada tanggal 12 Maret 1966 ia mengeluarkan surat keputusan yang berisi pembubaran dan larangan PKI beserta ormas-ormasnya yang bernaung dan berlindung atau senada dengannya beraktivitas dan hidup di seluruh wilayah Indonesia. Keputusan tersebut diperkuat dengan Keputusan Presiden/Pangti ABRI/Mandataris MPRS No.1/3/1966 tanggal 12 Maret 1966. Keputusan pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya mendapat sambutan dan dukungan dari seluruh rakyat, karena sesuai

dengan perjuangan Angkatan 66 melalui aksi mewujudkan Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura), yakni (1) bubarkan PKI, (2) turunkan harga, dan (3) *reshuffle* kabinet. Upaya *reshuffle* Kabinet Dwikora pada 21 Februari 1966 dan Pembentukan Kabinet Seratus Menteri tidak juga memuaskan rakyat sebab rakyat menganggap di dalam kabinet tersebut duduk tokoh-tokoh yang dianggap terlibat dalam peristiwa G 30 S/PKI.

Pada tanggal 18 Maret 1966 Soeharto "mengamankan" 15 orang menteri yang dinilai tersangkut G 30 S/PKI dan diragukan etika baiknya (Nina Herlina, 2011: 61). Mereka itu sebagai berikut.

1. Dr. Subandrio (Wakil PM I, Menteri Departemen Luar Negeri, Menteri Luar Negeri/ Hubungan Ekonomi Luar Negeri)
2. Dr. Chaerul Saleh (Wakil PM III, Ketua MPRS)
3. Ir. Setiadi Reksoprodjo (Menteri Urusan Listrik dan Ketenagaan)
4. Sumardjo (Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan)
5. Oei Tju Tat, S.H. (Menteri Negara diperbantukan kepada presidium kabinet)
6. Ir. Surachman (Menteri Pengairan dan Pembangunan Desa)
7. Jusuf Muda Dalam (Menteri Urusan Bank Sentral, Gubernur Bank Negara Indonesia)
8. Armunanto (Menteri Pertambangan)
9. Sutomo Martopradoto (Menteri Perburuhan)
10. A. Astrawinata, S.H. (Menteri Kehakiman)
11. Mayjen Achmadi (Menteri Penerangan di bawah presidium cabinet)
12. Drs. Moh. Achadi (Menteri Transmigrasi dan Koperasi)
13. Letkol. Imam Sjafei (Menteri Khusus Urusan Pengamanan)
14. J.K. Tumakaka (Menteri/Sekretaris Jenderal Front Nasional)
15. Mayjen Dr. Soemarno (Menteri/Gubernur Jakarta Raya)

Tidak ada keterangan jelas dari pemerintah tentang penahanan Soemardjo, namun—menurut Asvi Warman Adam (2011:118)—ia dituduh menyusun kurikulum pendidikan dan "menyesatkan".

PEMIKIRAN TENTANG KEBUDAYAAN

Meskipun Soemardjo belum sempat menjalankan tugasnya sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan secara maksimal karena situasi politik yang mengakhiri jabatannya secara paksa, namun ia memiliki beberapa rencana penting dalam pembangunan kebudayaan Indonesia dan telah disampaikannya kepada Presiden Soekarno. Barangkali karena pemikiran-pemikiran itu ia ditunjuk oleh Presiden Soekarno sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan. Bersama beberapa tokoh lain yang aktif di Lekra, khususnya Nyoto, Soemardjo diminta Presiden Soekarno merumuskan kebijakan tentang kebudayaan nasional Indonesia. Pemikiran-pemikiran yang dipaparkan berikut tentu pemikiran kolektif, namun tidak dapat dimungkiri bahwa Soemardjo memiliki sumbangan besar dalam gagasan Kebudayaan Nasional Indonesia (wawancara dengan Hersri Setiawan, 2018). Rumusan pemikiran tentang kebudayaan yang disampaikan kepada Presiden Soekarno pada tanggal 12 Oktober 1959 melalui sekretaris Joebar Ajoeb (BPLEKRA, 1960: 71-75) itu meliputi lima unsur pokok untuk membendung kebudayaan imperialis Barat dan membantu para pekerja kebudayaan nasional Indonesia secara demokratis dan kerakyatan, yaitu (1) lapangan film, (2) lapangan musik, (3) perkembangan taman-taman kebudayaan, (4) pendidikan kebudayaan, dan (5) kesusastraan. Pada kelima lapangan inilah, menurut Soemardjo, dominasi kebudayaan imperialis sangat menekan perkembangan kebudayaan nasional kita dan sangat merusak moral revolusi yang seharusnya tumbuh berkembang pada pemuda dan pelajar serta sebagian masyarakat di kota besar.

BIDANG FILM

Soemardjo mengemukakan beberapa gagasan dalam bidang industri dan seni film nasional antara lain sebagai berikut:

1. Penggunaan Program Nasional Film yang dihasilkan oleh Musyawarah Film Nasional ke-I sebagai bahan pokok bagi kebijaksanaan pemerintah di lapangan film.
2. Mengatur impor film, di samping sebagai *suplesi* produksi nasional, juga dengan dasar-dasar kultural sesuai dengan kepentingan pendidikan massa rakyat dalam periode penyelesaian Revolusi Agustus 1945.
3. Memusatkan distribusi film dan menguasai penggunaan seluruh gedung bioskop di bawah suatu badan nasional yang dibimbing oleh pemerintah.
4. Membentuk suatu badan khusus pemerintah yang membimbing perkembangan industri dan seni film nasional. Jika pemerintah berpendapat bahwa badan untuk ini adalah Dewan Film Pemerintah yang sekarang sudah ada, diusulkan agar badan itu dirombak atau ditambah personalianya dengan para wakil dari kalangan seniman dan industri film nasional, sebab mereka itulah yang akan melaksanakan program nasional Indonesia di lapangan film.

BIDANG MUSIK

Soemarjo mengusulkan empat aspek dalam pengembangan musik sebagai berikut:

1. Supaya impor piringan hitam yang sekarang ini liar dibimbing oleh pemerintah atau suatu badan yang ditunjuk untuk itu. Impor piringan hitam hendaknya mempunyai suatu dasar kultural yang sesuai dengan kepentingan penyelesaian Revolusi Agustus dan perkembangan apresiasi musik yang sehat dari masyarakat bangsa Indonesia.
2. Supaya pemerintah mendirikan suatu pusat lembaga musik di mana musik rakyat dan daerah kita diolah dan dikembangkan secara ilmiah dan kerakyatan.
3. Supaya Radio Republik Indonesia (RRI) dan/atau Departemen Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan secara konkrit membantu perkembangan ansambel paduan-paduan suara yang sekarang sudah mulai tumbuh.
4. Supaya pemerintah memberikan tugas dan fasilitas kerja kepada komponis-komponis Indonesia.

PEMBANGUNAN TAMAN-TAMAN KEBUDAYAAN

Somardjo menyambut baik keputusan Departemen Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang hendak membangun Taman-taman Kebudayaan pada beberapa kota besar sebagai permulaan. Keputusan itu sudah nyata, namun masih belum direalisasi. Oleh karena itu diusulkan kepada pemerintah supaya tingkat pertama membangun sebuah Taman Kebudayaan di Jakarta dengan menggunakan Taman Raden Saleh dan semua gedung peninggalan almarhum Raden Saleh.

Di samping di beberapa kota yang sudah mempunyai tempat untuk Taman-taman Kebudayaan, pembangunannya perlu sesegera mungkin dimulai dalam waktu yang singkat manakalah syarat-syarat pembangunannya sudah bisa disediakan oleh pemerintah. Menurut Soemardjo tidak ada salahnya jika pemerintah dalam hal membangun Taman-taman Kebudayaan mengajak organisasi-organisasi kebudayaan dan organisasi masyarakat lainnya, sehingga rencana atau putusan-putusan itu tidak dingin di dalam arsip pemerintah saja. Lebih lanjut Soemarjo mengusulkan agar Taman-taman Kebudayaan ini dapat berfungsi (I) sebagai forum bagi perkembangan dan kegiatan-kegiatan kesenian dan kebudayaan rakyat dan (2) menjadi taman rekreasi dan *entertainment* bagi rakyat. Soemardjo

berpendapat bahwa Taman-taman Kebudayaan ini bisa menjadi benteng kita dalam melawan segala macam subversi kebudayaan imperialis dan oleh karena itu harus dibangun dan diselenggarakan sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.

BIDANG KESUSASTRAAN

Situasi kesusastraan Indonesia sampai akhir tahun 1950an, menurut Soemardjo, belumlah menggembirakan. Artinya, belum cukup mempunyai peran nyata bagi kehidupan dan perkembangan spiritual bangsa Indonesia yang tengah menyelesaikan revolusi nasionalnya. Walaupun harus diakui bahwa ada karya sastra-karya sastra baru yang baik dan berguna dan daya cipta para sastrawan Indonesia tidaklah menyerah kalah kepada segala macam kesukaran yang menimpanya. Mengingat keadaan objektif peralatan kesusastraan Indonesia dewasa ini, seperti penerbit dan perpustakaan-perpustakaan, Someardjo mengusulkan kepada pemerintah agar:

1. Memberikan tugas dan tanggung jawab serta fasilitas kepada para sastrawan untuk lebih langsung mengenal masalah kehidupan Rakyat Indonesia bagi penggubahan karya sastra-karya sastra mereka.
2. Memberikan tugas dan tanggung jawab serta fasilitas kerja pada sastrawan Indonesia untuk melakukan penyelidikan ilmu dan menggubah karya sastra-karya sastra yang bersifat sejarah perjuangan Rakyat Indonesia.
3. Menerbitkan hasil karya mereka dan menyebarkannya secara baik.

Tindakan-tindakan ini sangat penting untuk membimbing dan memberikan syarat-syarat perkembangan bagi kesusastraan Indonesia yang berakar pada masalah-masalah kehidupan dan perjuangan Rakyat Indonesia sendiri dan dengan begitu kesusastraan Indonesia bukan hanya berakar dan tumbuh pada massa rakyat Indonesia, tetapi juga menjadi juru bicara kemanusiaan, keadilan, dan keindahan perjuangan serta cita-cita rakyat.

BIDANG PENDIDIKAN KEBUDAYAAN

Di samping memperbaiki semua lembaga pendidikan dan pengajaran pemerintahan di lapangan seni, satra, dan filsafat, Soemardjo berpendapat bahwa sangat perlu dan mendesak menyelenggarakan suatu pendidikan kebudayaan pada sekolah rakyat, sekolah menengah, dan universitas karena pemuda dan pelajar/mahasiswa Indonesialah yang sangat diganggu atau sangat dirusak perkembangannya dalam hal kebudayaan dan moral revolusinya oleh “musik-musik histeris, lektur cabul, dan film dekaden kebudayaan imperialis”. Oleh karena itu diharapkan sekolah-sekolah tersebut menyelenggarakan secara meluas dan terpimpin pendidikan dan kegiatan-kegiatan senirupa dan atau kerajinan tangan, seni drama (untuk sekolah menengah ke atas), paduan suara, serta tari dan musik dengan instrumen musik rakyat.

Johannes Leimena

Masa Jabatan
21 Februari – 27 Maret 1966

Johannes Leimena

KEHIDUPAN PRIBADI DAN PENDIDIKAN

Dr. Johannes Leimena, yang lebih akrab dipanggil "Om Jo", merupakan putra Maluku. Ia dilahirkan di Ambon, Maluku, pada 6 Maret 1905,[1] dari lingkungan keluarga yang dekat dengan dunia pendidikan. Ayahnya, Dominggus Leimena, merupakan seorang guru bantu di Ambon. Ibunya, Elizabeth Sulilatu, juga seorang guru. Saat Leimena berumur 5 tahun, ayahnya meninggal dan kemudian ibunya menikah lagi. Sejak saat itu Leimena diasuh oleh bibinya, yang menikah dengan Jesaya Jeremias Lawalata, juga seorang guru sekolah dasar tamatan Kweekschool Ambon.[2]

Guru, dalam masyarakat adat Ambon, termasuk ke dalam golongan atas. Meskipun tugas dan fungsinya berbeda, guru sangat dihormati dan disejajarkan dengan pendeta ataupun bangsawan. Mereka sama-sama memiliki tugas dan fungsi serta hubungan sosial yang dekat dengan masyarakat. Pada masa tersebut seorang guru juga dianggap dekat dengan kebudayaan barat yang dianggap terhormat.

Leimena bersekolah di Ambonsche Burgerschool Ambon, setingkat dengan sekolah dasar. Pada tahun 1914 ia pindah ke Cimahi, Jawa Barat, mengikuti pamannya yang mendapat tugas sebagai kepala sekolah di daerah itu. Dari Cimahi kemudian ia pindah ke Batavia dan meneruskan pendidikan di Chrustelijke Europeesche Lagere School. Karena sekolah tersebut dianggap kurang cocok bagi Leimena, sang paman memindahkannya ke Paul Krugerschool di daerah Kwitang, yang merupakan salah satu sekolah paling baik pada waktu itu.[3] Kehidupan keseharian Leimena remaja sangat disiplin. Ia selalu mengerjakan pekerjaan rumah, seperti mencuci piring dan mencuci bajunya sendiri serta membantu urusan dapur. Untuk pergi ke sekolah pun ia lakukan dengan berjalan kaki.

Setelah menamatkan pendidikan dasar, pamannya memasukkan Leimena ke MULO. Berbeda dengan sekolah dasar Paul Kruger yang kebanyakan siswanya anak-anak Belanda, siswa MULO lebih beragam. Leimena menyelesaikan pendidikan MULO pada tahun 1922, kemudian melanjutkan pendidikan ke STOVIA, sekolah tinggi di bidang kedokteran. STOVIA berangsur-angsur dilebur dan menjadi Geneeskunde Hoogeschool[4] dengan lama pendidikan delapan tahun, yang dibagi menjadi dua bagian: masa persiapan dan bagian spesialisasi kedokteran.

Atas inisiasi pelajar STOVIA yang berasal dari Ambon dan sekitarnya pada tahun 1917 dibentuklah Jong Ambon dengan ketua pertamanya Stoviaan J. Kayadu. Pada awalnya organisasi ini dibentuk untuk menyalurkan hobi para anggotanya, yakni olah raga sepak bola, dan belum ada pandangan menuju gerakan ideologis ataupun politis. Sebagai bagian dari STOVIA, Leimena turut ambil bagian dalam kegiatan organisasi ini. Pada tahun 1924 muncul kebutuhan suatu organisasi yang mengedepankan kegiatan kebudayaan dan ideologis yang tidak hanya kegiatan olahraga. Maka dibentuklah Vereniging Ambonsche Studenten (VAS) dengan ketua pertamanya Toule Salehuwey, yang merupakan seorang mahasiswa Rechts Hoge School (RHS).[5] Lambat laun dua organisasi ini saling melengkapi dan memiliki irisan: anggota yang saling bergiat dalam kedua organisasi tersebut.

PERGUMULAN PEMIKIRAN DAN POLITIK

Pada waktu itu Leimena berpikir belum ada kesadaran identitas tunggal dari apa yang disebut dengan "masyarakat Maluku" di lingkungannya. Kurangnya kesadaran identitas ini disebabkan oleh masih terpolarnya aktivitas masyarakat Maluku di Batavia. Belum terdapat suatu wadah yang dapat menyatukan mereka agar muncul suatu gerakan kebersamaan. Polarisasi ini didukung oleh kebijakan pemerintah kolonial yang sangat menekankan perbedaan status dalam masyarakat, sehingga masyarakat jarang

Dr. J. Leimena bersama istri dan anak-anak (1951). (Duduk tengah, kiri ke kanan), tamu WHO, R. Tjitjih Wiyarsih Leimena, Lendra Kraton Melani Kusumahati (digendong), Dr. J. Leimena. (Berdiri belakang, kiri ke kanan) Adrianus Djauhar Dominggus, Anne Marie Elisabeth, Catharina, Veronica. (Duduk depan, kiri ke kanan) Viveka Nanda, Johannes Erick, Remy Jesaja

(Sumber: koleksi Institut Leimen)

memiliki kesempatan untuk membaur dengan masyarakat yang lain. Leimena juga berpendapat bahwa masih banyak organisasi atau kelompok yang memiliki pandangan "lokal" dalam ideologi mereka dan belum mengarah pada pandangan yang lebih luas, misalnya paham kebangsaan dan persatuan.

Leimena memulai kegiatan organisasi sejak duduk di bangku Sekolah Tinggi Geneeskunde Hoogeschool (GHS) di Jakarta. Selama menjadi mahasiswa ia aktif dalam sejumlah organisasi seperti Jong Ambon dan Christelijke Studentenvereniging (CSV). Melalui organisasi itulah Leimena berkenalan dengan Soekarno, yang kelak membuat hubungan antar keduanya sangat dekat. Leimena juga menunjukkan kepedulian pada gerakan kepemudaan. Pada tahun 1926 ia aktif dalam Gerakan Oikimene dan Jong Ambon serta mulai mempersiapkan Kongres Pemuda. Dalam perhelatan bersejarah tersebut Leimena menjadi salah satu panitia, sehingga dapat dikatakan ia berperan dalam pelaksanaan Sumpah Pemuda. Ia juga dikenal sebagai salah satu pendiri Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI).[6]

Salah satu gerakan dan paham yang sangat mempengaruhi Leimena pada masa studinya adalah pergerakan nasional dan paham kebangsaan. Ketertarikan ini dipicu oleh pergaulannya di Batavia yang dekat dengan banyak orang dari berbagai golongan masyarakat, ditambah dengan bacaan-bacaan yang menyangkut masalah kebangsaan. Sekitar tahun 1925-1926 Leimena mulai memahami pemikiran dan ide-ide Soekarno tentang masa depan bangsa Indonesia yang kelak sangat mempengaruhinya. Leimena sadar telah terjadi perubahan baru dalam tatanan masyarakat Hindia-Belanda dengan lahirnya kaum intelektual.

Selain pergerakan dan paham kebangsaan, Leimena juga berkenalan dengan gerakan keagamaan dan religius yang juga sangat mempengaruhi pandangan, kebijakan, dan kepribadiaannya. Gerakan tersebut adalah Oikumene, yang berarti 'kesadaran', suatu kesadaran yang bertanggung jawab, kesadaran untuk menyatukan umat Kristen tanpa harus melepaskan identitas sosial dan budaya mereka. Gerakan Oikumene ia kenal lewat hubungannya dengan penginjil untuk kalangan mahasiswa dari organisasi Zendingsconsuulaat Batavia. Dalam gerakan ini Leimena menemukan hubungan antara gerakan politik dan agama, yang diyakininya bukan dua hal yang bertolak belakang, melainkan dapat digabungkan demi tujuan yang mulia.

KARIER SEBAGAI DOKTER DAN POLITIKUS

Leimena memulai karier sebagai dokter sejak tahun 1930 di Centrale Burgelijke Ziekenhuis (CBZ) Batavia, yang kini lebih dikenal dengan Rumah Sakit (RS) Cipto Mangunkusomo, Jakarta. Tak lama

Atas

Sebagian peserta Kongres Pemuda II (Oktober 1928) berfoto di halaman gedung Indonesische Clubgebouw (sekarang Gedung Sumpah Pemuda) di Jakarta. Dr. J. Leimena menjadi sekretaris dalam kongres tersebut

(Sumber: koleksi Institut Leimena)

Tengah

Menteri Kesehatan dr. J. Leimena sedang berbicara dalam Muktamar Ikatan Dokter Indonesia di Gedung Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di Salemba pada tgl. 30 September 1951

(Sumber: koleksi Institut Leimena)

Bawah

Perundingan di atas kapal Renville pada tgl. 17 Januari 1948. Tampak dari kiri ke kanan: Mr. Latuharhary, Mr. Ali Sastroamidjojo, H. Agus Salim, dr. J. Leimena, Drs. Setiadjit, Mr. Amir Syarifuddin

(Sumber: koleksi Institut Leimena)

Dr. J. Leimena sedang menandatangani surat pengangkatan sebagai Pejabat Presiden RI disaksikan Presiden Soekarno pada tahun 1961

(Sumber: koleksi Institut Leimena)

setelah pengangkatannya sebagai dokter, ia dipindahtugaskan ke daerah Kedu, yang pada saat itu mengalami bencana akibat Gunung Merapi meletus. Setelah tugasnya di daerah bencana selesai ia bertugas di Rumah Sakit Zending Immanuel Bandung sejak tahun 1931 hingga 1941.[7]

Tahun-tahun awal di rumah sakit tersebut Leimena bertugas di bagian "anti-opium", yaitu bagian perawatan para pecandu morfin. Pengobatan yang dilakukannya memadukan metode medis dengan menyisipkan nilai-nilai spriritual dan humanisme. Sekitar tahun 1936, di bawah naungan RS Immanuel, Leimena melakukan pendampingan para jururawat melakukan tindakan preventif kesehatan di lingkungan masyarakat sekitar Bandung.[8] Karier yang semakin menanjak seiring dengan semakin banyak kenalan membuat Leimena tidak jarang berinteraksi dengan tokoh-tokoh politik yang kelak akan menjadi sejawatnya di pemerintahan. Di rumah sakit RS Immanuel pula Leimena bertemu dengan Wijarsih Prawiradilaga, yang kelak menjadi istrinya. Wijarsih merupakan perempuan dari bangsawan Priangan Timur dan pernah bersekolah di Juliana School Sukabumi.

Leimena menganggap bahwa proklamasi merupakan suatu tindakan logis atas kelanjutan usaha-usaha pergerakan nasional. Ia yakin bahwa perjuangan bersama sebagai bangsa lebih penting daripada alasan-alasan kedaerahan atau hal-hal kecil lainnya. Dalam diri Leimena persatuan agama dengan kebangsaan bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan melainkan dua hal yang dapat diselaraskan untuk mencapai kemerdekaan kehidupan berbangsa. Pemikiran tersebut muncul atas banyaknya kelompok yang menonjolkan ideologi keagamaan dan kedaerahan masing-masing walaupun dengan tujuan sama, yakni kemerdekaan. Dalam perkembangan politik dan pemerintahan, Leimena dikenal sebagai menteri dari Partai Kristen Indonesia (Parkindo). Pada bulan November 1945 Pemerintah mengizinkan terbentuknya parta politik dan Parkindo dibentuk oleh umat Kristen pada tanggal 10 November.[9]

Karier politik Leimena dalam pemerintahan Negara Republik Indonesia (RI) dimulai sejak kabinet pertama terbentuk, tidak lama setelah kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Keadaan ini tidak lepas dari persahabatannya dengan petinggi pemerintahan RI. Sebelum Kabinet Syahrir II terbentuk, Leimena berulang kali ditunjuk dan diminta masuk ke dalam kabinet, tetapi berulang kali pula Leimena menolak hingga akhirnya "dijemput paksa" ke Jakarta dan diangkat sebagai Menteri Muda Kesehatan.[10] Dalam Kabinet Syarifuddin, Leimena menjadi Menteri Kesehatan secara penuh; jabatan yang sebenarnya tidak dikehendakinya, tetapi atas desakan Soekarno yang menginginkan perwakilan umat Kristen dalam kabinet akhirnya ia pun menerimanya.[11]

Leimena menganggap keberadaannya di dalam kabinet pada masa revolusi lebih dari sebagai representasi atau wakil dari Maluku. Sejak awal ia beranggapan bahwa ia harus menempatkan konteks yang lebih luas, yakni konteks nasional Indonesia, sehingga perannya tidak hanya untuk kepentingan daerah melainkan untuk kepentingan bangsa Indonesia. Setelah Kabiner Syahrir III bubar akibat "pertentangan" atas Perjanjian Linggarjati, Leimena diangkat menjadi Menteri Kesehatan dalam Kabinet Amir Syarifuddin.

Leimena turut serta dan berperan aktif di dalam perundingan-perundingan dengan Belanda. Beberapa kali Leimena menjadi peserta pengganti, namun dalam Perjanjian Linggarjati ia menjadi peserta penuh. Ia menjadi Ketua Komisi Bidang Militer. Jabatan ini berlanjut pada Konferensi Meja Bundar (KMB). Komisi Militer dalam KMB menjadi salah satu komisi yang dianggap berhasil dalam perundingan. Ia menyelesaikan beberapa persoalan yang menjadi perdebatan antara Belanda dan Indonesia, seperti pembubaran KNIL dan pembentukan TNI. Keberhasilan ini tidak lepas dari sosoknya yang merupakan tokoh gerakan Oikumene Kristen serta hubungannya dengan orang-orang Belanda yang setuju dengan perjuangan bangsa Indonesia. Sifat ketenangan dan ketokohannya dapat menjadi contoh untuk delegasi yang lain.

Hingga tahun 1957 Leimena berpendapat bahwa persatuan dan kesatuan harus ditempatkan di atas segalanya. Leimena menganggap tidak ada hal lain selain Pancasila yang dapat mempersatukan bangsa

Pada tahun 1955 dr. J. Leimena, melalui tulisan dalam buku ini, mencetuskan konsep jangka panjang tentang pembangunan kesehatan yang disebut dengan *Bandung Plan* yang menjadi dasar bagi pengembangan Puskesmas-puskesmas di seluruh Indonesia

(Sumber: koleksi Institut Leimena)

ini. Setelah Kabinet Ali II jatuh pada April 1957, Leimena mengusulkan agar pemerintah mengakomodir pihak-pihak yang selama ini tersisihkan dari pusaran pemerintahan, seperti Masyumi dan angkatan bersenjata. Dengan diakomodirnya pihak-pihak ini diharapkan tidak lagi terjadi perpecahan dan tarik ulur kepentingan. Namun usul tersebut tidak dapat direalisasikan hingga akhirnya terbentuklah Kabinet Djuanda.

Pada masa Demokrasi Terpimpin, Leimena sangat dekat dengan Soekarno. Karena kedekatannya dengan Soekarno inilah beberapa kali Leimena ditunjuk langsung oleh Soekarno sebagai Pejabat Presiden yang mengurus kondisi dalam negeri saat Soekarno pergi ke luar negeri. Meskipun dekat, Leimena tidak segan berbeda pendapat dan menyampaikan perbedaan tersebut pada Soekarno. Seringkali pula Leimena menjadi penengah hubungan Soekarno dengan para pembantunya, seperti pada saat ketidaksetujuan Djuanda pada ide Soekarno mengenai penyelenggaraan pesta olahraga. Leimena menengahi mereka berdua dengan mengedepankan kebersamaan agar isu-isu tersebut tidak menjadi bahan kritik oleh pihak yang berseberangan dengan pemerintah.

Antara tahun 1959 dan tahun 1966 Leimena menjabat Menteri Koordinator Distribusi. Salah satu yang mendasari penunjukan Leimena untuk jabatan ini adalah suksesnya program *Bandung Plan*. Salah satu tugas Menteri Koordinator Distribusi adalah menjamin kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu langkah yang dilakukan Leimena bukan hanya terfokus pada peningkatan angka pendapatan per kapita saja, tetapi juga membangun jalur-jalur distribusi dan konsumsi bagi masyarakat agar roda perekonomian semakin berjalan lancar. Dalam bidang ekonomi, Leimena berpendapat bahwa campur tangan pemerintah merupakan sesuatu yang harus dilakukan untuk menjamin keadilan. Berkait dengan hal tersebut beberapa kali Leimena berbeda pendapat dengan Chaerul Saleh dalam pengambilan kebijakan mengenai peran modal asing, karena Saleh memberikan keleluasaan bagi modal asing dengan alasan pembangunan.

Salah satu masalah yang dihadapi Kementerian Koordinator Distribusi pada waktu itu adalah naiknya harga pangan, terutama beras, yang mulai langka pasokan. Leimena mengusulkan agar wilayah Sulawesi Selatan dikembangkan menjadi lumbung beras nasional. Selain itu perusahaan negara yang bertugas untuk bahan pangan diminta menjaga pasokan beras di kota-kota besar. Ia juga meminta kementerian terkait untuk memperbaiki arus distribusi pangan agar berjalan lancar dan tidak terjadi kelangkaan. Kebijakan tersebut sesuai dengan Deklarasi Ekonomi yang dicanangkan oleh Soekarno mengenai kemandirian ekonomi dan sumber daya Indonesia.

Sejak Indonesia merdeka, Leimena tercatat sebagai orang yang paling banyak masuk ke dalam kabinet. Meskipun sering terjadi pergantian kabinet, tetapi hampir setiap kabinet yang berganti selalu ada nama

Presiden Soekarno dan dr. J. Leimena saat upacara pembukaan Sidang Raya Dewan Gereja-gereja Indonesia di Istora Senayan pada tanggal 5 Mei 1964

(Sumber: koleksi Institut Leimen)

Johannes Leimena di dalamnya. Setelah terjadi peristiwa G30S, tuntutan pembubaran Kabinet Dwikora gencar terdengar. Pada 21 Februari 1966 dibentuklah Kabinet Dwikora Yang Disempurnakan. Dalam kabinet ini Leimena menduduki dua posisi berbeda: sebagai Wakil Perdana Menteri II dan sebagai Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan *ad interim* di bawah koordinasi Prof. Prijono.[12]

PEMIKIRAN TERHADAP NEGARA DAN BANGSA

Dalam hal kenegarawanannya, Leimena mempunyai pandangan bahwa baik buruk suatu negara dan bangsa ditentukan oleh warganya. Leimena menyebutnya sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Setiap warga negara yang menjadi bagian suatu bangsa atau negara memiliki tanggung jawab atas baik-buruk, maju-mundur, dan timbul-tenggelamnya suatu negara. Jika negara mengalami kemunduran maka sebagai warga negara wajib mengkritik pemerintah melalui jalur yang sesuai dengan hukum dan legal; jika negara mengalami suatu kemajuan maka warga harus memuji pemerintahan dan mendukungnya secara penuh. Hal itu, menurut Leimena, akan terjadi jika setiap warga negara memiliki kesadaran sebagai bagian dari negara dan bangsa.[13] Dengan warga negara yang bertanggung jawab, timbul pertanyaan: kepada siapa atau untuk apa kita harus bertanggung jawab. Menurut Leimena, setiap warga negara yang masuk ke dalam wilayah yuridis suatu negara harus taat dan bertanggungjawab pada aturan hukum dan undang-undang yang berlaku. Jika rakyat bertanggung jawab kepada hukum, bagaimana dengan pemerintah? Pemerintah harus bertanggung jawab kepada rakyat selaku pemberi mandat kekuasaan, sehingga pemerintah harus bisa dikontrol dan diawasi oleh rakyat. Dalam lingkup yang lebih luas, suatu negara juga harus bertanggungjawab dalam setiap langkah yang diambil. Menurut Leimena, kebertanggungjawaban negara terdiri dari dua aspek: (1) secara rohani atau spiritual negara haruslah bertanggungjawab pada Tuhan Yang Maha Esa dan (2) secara duniawi, ketatanegaraan harus bertanggungjawab kepada bangsa dan negara yang mereka layani.[14]

Terhadap hubungan antara konsep kewarganegaraan yang bertanggungjawab dan umat Kristen, Leimena menganggap bahwa umat Kristen memiliki hak dan kewajiban yang sama terhadap bangsa dan negara Indonesia; bahkan Leimena menghimbau umat Kristen harus menjadi contoh bagi masyarakat lain dalam hal kecintaan dan nasionalisme. Pandangan dan perwujudan kewarganegaraan yang bertanggungjawab harus selalu direfleksikan melalui pandangan bahwa segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, sehingga umat Kristen jangan sampai beranggapan sebagai minoritas dan dalam hal ketatanegaraan kurang berperan. Umat Kristen merupakan warga negara yang memiliki hak dan kewajiban sama seperti warga negara yang lain.[15]

Suasana berkabung di rumah duka ketika dr. Leimena meninggal. Tampak Sultan Hamengku Buwono IX sedang melayat

(Sumber: koleksi Institut Leimena)

Leimena aktif dalam beberapa organisasi pengembangan umat dan pergerakan kalangan Kristen. Dalam gerakan politik, Leimena aktif sebagai salah satu pengusul dan pengurus Parkindo—meskipun tidak hadir pada saat pembentukan partai ini—dan sejak menjadi Menteri Muda Kesehatan ia dikenal sebagai sosok yang penting dalam Parkindo. Leimena menjadi Ketua Parkindo yang kedua, antara tahun 1950 dan tahun 1957.

Pada tahun 1948 beberapa tokoh Oikumene kembali memberikan masukan agar dibentuk suatu organisasi tunggal yang menaungi seluruh gereja di Indonesia, yang dapat menjadi tempat permusyawaratan dan tempat berkumpul perwakilan gereja seluruh Indonesia. Leimena beranggapan bahwa persatuan gereja-gereja penting untuk diwujudkan karena perbedaan identitas gereja yang sebenarnya setara ini tidak bisa berjalan dalam semangat nasional. Jika persatuan gereja terwujud maka persatuan bangsa bisa menjadi lebih kokoh. Akhirnya pada bulan Mei 1950 dibentuklah Dewan Gereja-gereja Indonesia (DGI), sekarang lebih dikenal dengan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia. Organisasi ini dibentuk sebagai wadah persatuan dan musyawarah gereja-gereja di Indonesia.[16]

Salah satu karya dan kontribusi dr. J. Leimena kepada bangsa ini adalah ide tentang *Bandung Plan*. Setelah perang kemerdekaan selesai, Pemerintah Indonesia kekurangan sumber daya manusia, sarana dan prasarana kesehatan, di samping tingkat kesehatan masyarakat yang menurun akibat terjadinya perang. Pada saat itu juga terjadi tumpang-tindih pelaksanaan kebijakan kesehatan karena adanya Dinas Kesehatan Federal. Akhirnya Leimena menggabungkan kebijakan dan pelaksanaan kesehatan kedua lembaga tersebut.[17]

Leimena memulai program kesehatan percontohan di Bandung, dengan *Bandung Plan* pada 1951.[18] Ide program ini dipengaruhi oleh pengalamannya saat bertugas di Rumah Sakit Immanuel Bandung, yang lebih menekankan tindakan pencegahan dalam masalah kesehatan, sehingga peran dokter dan tenaga kesehatan lebih ditekankan pada usaha preventif. Model struktur manajemen kesehatan ini dicontoh dari manajemen kesehatan yang telah diterapkan oleh *zending*. Dipilihnya Bandung sebagai bagian dari uji coba pertama proyek ini karena wilayah Bandung dianggap memiliki tingkat ekonomi masyarakat yang terbilang baik dan mampu menunjang pembiayaan.[19]

Usaha awal projek ini adalah pembangunan rumah sakit pembantu dan pusat kesehatan di setiap kawedanan yang dapat menampung masyarakat dengan penyakit relatif ringan. Di setiap kecamatan dibangun balai pengobatan yang ditangani juru rawat dari rumah sakit pembantu. Pengawas balai pengobatan ini diambil dari dokter RS Immanuel Bandung. Jenjang-jenjang pusat kesehatan inilah yang kelak menjadi cikal bakal puskesmas di setiap kecamatan di seluruh Indonesia.

Selain tindakan penanggulangan, rumah sakit juga melakukan tindakan pencegahan kesehatan. Kebersihan menjadi aspek yang sangat diperhatikan pada waktu itu, sehingga diperlukan juru kesehatan yang dapat mendidik masyarakat mengenai pentingnya kebersihan. Juru kesehatan diambil dari anggota masyarakat, dengan harapan masyarakat dapat lebih mengenal, dekat, dan mendengarkan saran juru kesehatan. Juru kesehatan yang dipilih biasanya seorang kepala desa sehingga dapat menggerakan masyarakat. Juru kesehatan yang ditunjuk diberikan pelatihan dan pendampingan dari mantri kesehatan. Tugas juru kesehatan antara lain pendidikan kesehatan, pengawasan kebersihan rumah dan lingkungan sekitar, serta pencatatan sumber penyakit.

Setelah dianggap sukses program *Bandung Plan* mulai diujicobakan di desa-desa Kabupaten Bandung, yang selanjutnya pada tahun 1954 sistem ini mulai diterapkan di Yogyakarta dan Magelang.[20]

Saat kekuasaan pemerintahan berganti dari Soekarno ke Soeharto, Leimena tidak masuk lagi dalam kabinet. Meskipun demikian ia masih dipercaya oleh Soeharto duduk dalam Dewan Pertimbangan Agung hingga tahun 1973. Pada periode ini pulalah Leimena kembali aktif ke dalam beberapa organisasi yang dulu digelutinya, seperti DGI, UKI, dan Partindo. Selain itu ia juga menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Cikini dan Ketua Dewan Penyantun di Universitas Kristen Indonesia.

Saat kunjungan ke Eropa atas undangan kawan-kawan gerejanya, Leimena jatuh sakit. Dalam perjalanan pulang ke Indonesia, Leimena tidak dapat berjalan dan terpaksa menggunakan kursi roda. Beberapa kali tindakan medis seperti operasi tidak dapat mengembalikan kesehatannya. Akhirnya pada tanggal 6 Maret 1977 Leimena meninggal karena komplikasi pembuluh darah dan darah tinggi. Jenazahnya disemayamkan di rumah duka Jl. Cik Ditiro no. 16 untuk memberikan kesempatan penghormatan terakhir. Setelah itu jenazah dibawa ke Gereja Paulus untuk dilakukan kebaktian, selanjutnya dikebumikan dengan upacara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata.

ENDNOTES

1 O.G. Roder, *Who's Who In Indonesia : Biographies of Prominent Indonesian Personalitie in All Fields*, Jakarta : Gunung Agung, 1971, hlm. 192.

2 R.Z. Leirissa, "Biografi Dr. J. Leimena" dalam *Kewarganegaraan yang Bertanggungjawab, Mengenang Dr. J. Leimena*, Jakarta : BPK. Gunung Mulia, 1980, hlm. 1.

3 *Ibid.* hlm 3.

4 O.G. Roder, *Op. Cit.* hlm 193.

5 R.Z. Leirissa, *Op. Cit.* hlm. 6-7

6 R.Z. Leirissa, *Op. Cit.* hlm. 6-17

7 R.Z. Leirissa, *Op. Cit.* hlm. 18-19.

8 R.Z. Leirissa, *Op. Cit.* hlm. 18.

9 R.Z. Leirissa, *Op. Cit.* hlm. 43-44.

10 R.Z. Leirissa, *Op. Cit.* hlm. 41.

11 De Locomotief, 7 September 1950.

12 P.N.H. Simanjuntak, *Kabinet-kabinet Republik Indonesia, Dari Awal kemerdekaan Sampai* Reformasi, Jakarta : Penerbit Jambatan, 2003. Hlm. 268 & 272.

13 J. Leimena "Kewarganegaraan yang Bertanggung Jawab" dalam *Dr. Johannes leimena, Negarawan Sejati & Politisi Berhati Nurani,* Jakarta: BPK Gunung Agung, 2007.

14 J. Leimena "Kewarganegaraan yang Bertanggung Jawab" dalam *Dr. Johannes leimena, Negarawan Sejati & Politisi Berhati Nurani,* Jakarta: BPK Gunung Agung, 2007.

15 J. Leimena "Kewarganegaraan yang Bertanggung Jawab" dalam *Dr. Johannes leimena, Negarawan Sejati & Politisi Berhati Nurani,* Jakarta: BPK Gunung Agung, 2007.

16 https://pgi.or.id/sejarah-singkat/, diakses pada 10 Maret 2018.

17 Silas Laurens Leimena, "dari *Bandung Plan* ke Rencana leimena", dalam *Dr. Johannes leimena, Negarawan Sejati & Politisi Berhati Nurani,* Jakarta: BPK Gunung Agung, 2007. hlm. 94.

18 Saki Murakami, "Call for Doctors! Uneven Medical Provision and the Modernization of State Health Care during the Decolonization of Indonesia, 1930s–1950s", diakses melalui http://www.jstor.org/stable/ 10.1163/j.ctt1w76ts6.7 pada 10 Maret 2018.

19 Silas Laurens Leimena, "dari *Bandung Plan* ke Rencana leimena", dalam *Dr. Johannes leimena, Negarawan Sejati & Politisi Berhati Nurani,* Jakarta: BPK Gunung Agung, 2007. hlm. 94.

20 Silas Laurens Leimena, "dari *Bandung Plan* ke Rencana leimena", dalam *Dr. Johannes leimena, Negarawan Sejati & Politisi Berhati Nurani,* Jakarta: BPK Gunung Agung, 2007. hlm. 95.

Mohammad Said Reksohadiprodjo

Masa Jabatan
27 Maret - 25 Juli 1966

Mohammad Said Reksohadiprodjo

PERGUMULAN DAN DINAMIKA KEHIDUPAN

Mohammad Said lahir di Purworejo pada hari Sabtu Pahing, 21 Januari 1917, dengan nama Bambang Sonyo Sudarmo, berasal dari kalangan priyayi dan ulama. Kakeknya, Raden Tumenggung Reksodirdjo, Bupati Semarang, yang dari garis ayah masih keturunan Kyaiageng Pandanaran, bupati Semarang pertama sekaligus mubaligh Islam pertama keturunan Arab di Semarang. Dari garis keturunan ibu, ia cucu Surodiredjo, Bupati Batang, dan cicit Kyai Bustam Kertoboso I yang masih keturunan Arab yang bernama lengkap Sayid Abdullah Muhammad Bustam bin Amir Husen Al Idris. Adapun neneknya merupakan keturunan Mangkunegoro I dan Bupati Semarang, R.A.A. Suroadimenggolo I.[1]

Ayah Moh. Said bernama Raden Mas Reksohadiprodjo, Wedana Karanganyar. Ia memiliki tiga orang istri. Istri pertama puteri bupati Purworejo, namun mereka tidak memiliki anak sehingga mengangkat Iso, anak kemenakannya, dan berharap segera mendapatkan keturunan.[2] Raden Mas Reksohadiprodjo menikah dengan Murtinem (*ibu sepuh*), namun juga tidak dikaruniai anak. Raden Mas Reksohadiprodjo kemudian menikah dengan Surtiah (*ibu nom*) dan dikaruniai tujuh orang anak. Bersama Murtinem pun ia kemudian memiliki lima orang anak, dengan Moh. Said sebagai bungsu.[3]

Di samping priyayi dan ulama, keluarga Moh. Said juga merupakan keluarga berpendidikan dan memiliki jiwa nasionalisme. Cicitnya, Kyai Bustam Kertoboso I, memiliki kemampuan bahasa asing yang baik. Dengan jabatan yang dimilikinya sebagai *Onder Regent* (Pembantu Bupati), ia menjadi juru bahasa dalam hubungan diplomatik antara VOC dan Kerajaan Mataram. Adapun Raden Mas Reksohadiprodjo, ayah Moh. Said, memperoleh kesempatan bersekolah di Europeesche Lagere School (ELS) hingga Hogere Burger School (HBS).[1] Setelah lulus dari HBS ia diarahkan oleh ayahnya menjadi bupati. Pertama-tama ia menjadi wedana di Karanganyar, namun ia sering berselisih dengan Asisten Residen Karanganyar van der Hel karena sikap Raden Mas Reksohadiprodjo yang menolak menindas para petani. Pada tahun 1912 ia dipecat dan memilih memberi pendidikan bagi masyarakyat pribumi dengan mendirikan Hollandse Cursus De Vooruitgang di rumahnya, Purworejo. Sekolah atau kursus pelajaran bahasa Belanda tersebut berkembang di kota-kota lain, seperti Kutoarjo, Solo, Klaten, dan Wonogiri; bahkan mendapat dukungan Mangkunegoro VII.

Latar belakang keluarga berpengaruh banyak pada kehidupan Moh. Said. Ia dibesarkan di Purworejo saat ayahnya aktif memberi kursus bahasa Belanda. Moh. Said kecil dididik oleh ayahnya dengan pendidikan Islam, Jawa, Barat, serta nasionalisme dengan kuat.[4] Sebagai keturunan priyayi, Moh. Said dapat menikmati pendidikan yang setara dengan orang Eropa. Sekolah pertamanya ELS Purworejo. Ketika bersekolah ia aktif mengikuti organisasi kepanduan yang didirikan Budi Utomo. Pada umurnya yang ke 12 tahun, Moh. Said lulus ELS dengan nilai bahasa Belanda terbaik. Ia kemudian melanjutkan pendidikan ke HBS Semarang. Di Semarang ia tinggal bersama kakak angkatnya, Moh. Iso, di Karang Tempel. Pada tahun 1934 Moh. Said lulus dengan nilai memuaskan di sekolah dengan sistem pendidikan yang sama dengan sekolah di Belanda tersebut.[5] Kemampuan bahasa Belanda yang sangat baik membuat guru bahasa Belandanya, Jeffrouw M.J. Francken, kagum dan memberi arahan dan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.[6] Moh. Said pun kemudian memilih bersekolah di sekolah tinggi kedokteran atau Geneeskundige Hogeschool (GHS) di Batavia pada tahun 1934.

Di GHS ia mampu mengikuti pelajaran dengan sangat baik. Pada tahun ke tiga ia mengalami perdebatan ideologi dalam dirinya. Ia ingin menjadi manusia merdeka, tidak bergantung dan berhutang budi pada gurunya, Jeffrouw M.J. Francken. Oleh karena itu pada tahun 1937 ia memilih keluar dari GHS. Keluarga dan gurunya sangat kecewa terhadap keputusan Moh. Said. Dalam masa-masa pencarian diri

---

1

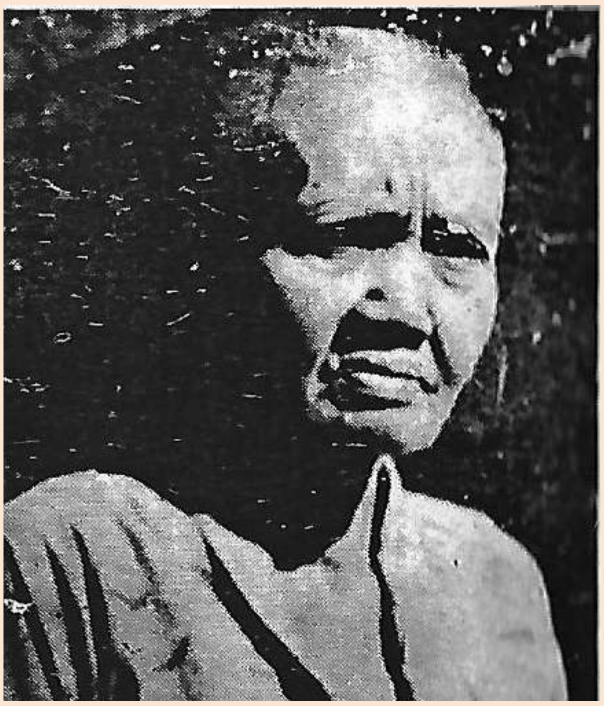

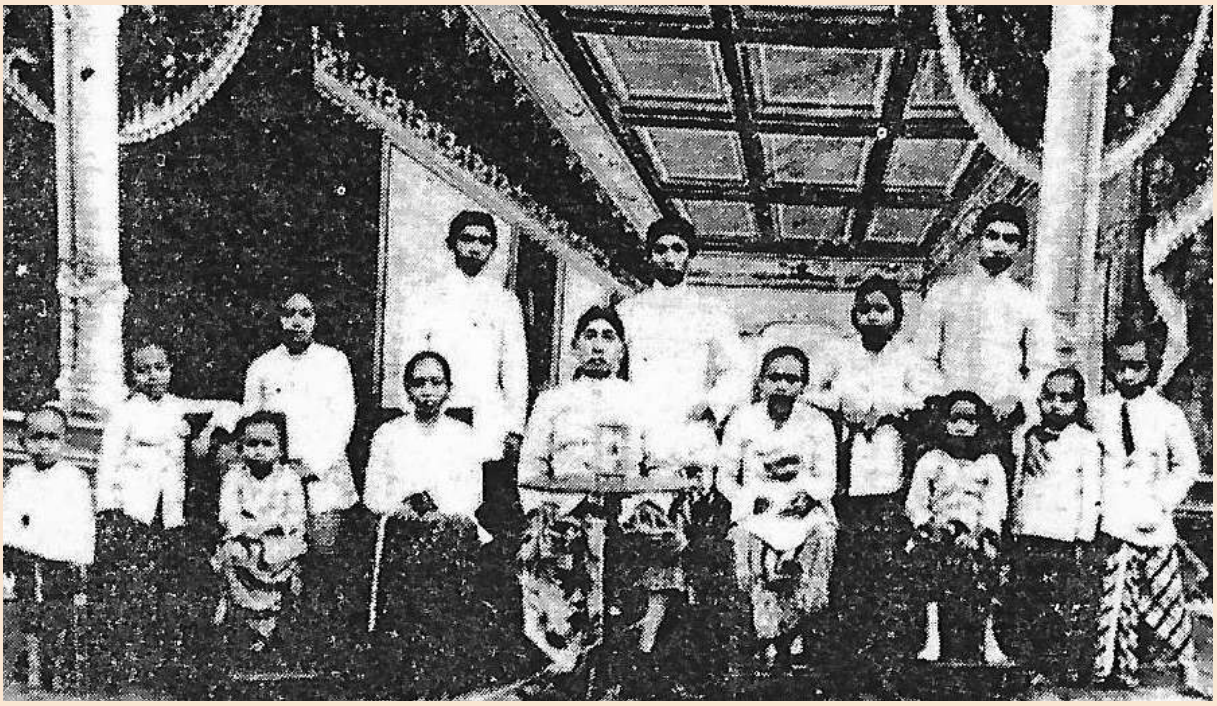

Atas

Ayah dan ibu Moh. Said: Raden Mas Reksohadiprodjo dan Murtinem

(Sumber: Repro buku *Mohammad Said Reksohadiprodjo, Hasil Karya dan Pengabdiannya*)

Tengah

Keluarga besar Raden Mas Reksohadiprodjo. Moh. Said berdiri di ujung kanan

(Sumber: Repro buku *Mohammad Said Reksohadiprodjo, Hasil Karya dan Pengabdiannya*)

Bawah

Moh. Said (memangku anak) saat tinggal di rumah Iso di Semarang

(Sumber: Repro buku *Mohammad Said Reksohadiprodjo, Hasil Karya dan Pengabdiannya*)

ia bertemu Adnan Dipodiputro di rumah Singgih di daerah Sunter, Jakarta. Di situlah perjalanan Moh. Said yang baru pun dimulai.

> "Mohammad Said menjadi penganggur. Saya tawarkan kepadanya apakah suka terjun di Taman Siswa yang diterimanya dengan penuh antusiasme tanpa banyak pembicaraan. Ki Mangunsarkoro memutuskan menetapkan Mohammad Said sebagai guru Taman Siswa."[7]

Seperti itulah Adnan Dipodiputro menjelaskan awal mula masuknya Moh. Said ke Taman Siswa Jakarta di bawah pimpinan Ki Sarmidi Mangunsarkoro. Moh. Said menjadikan Taman Siswa sebagai medan perjuangan dan pengabdian. Ia tinggal di Sunter bersama para siswanya. Seiring perjalanan waktu Moh. Said kemudian mendirikan asrama Taman Siswa yang diberi nama Soli Deo Honor (SDH) di Sunter, yang kemudian pindah ke Kemayoran Gempol, lalu ke Jl. Garuda 71.[8] Dengan nafkah seorang pamong bujangan dari Taman Siswa sebesar f 15 yang didapatkan setiap bulan Moh. Said menghidupi siswa-siswanya. Mereka berasal dari anak-anak berbagai daerah dan suku yang ditelantarkan oleh orang tua mereka. Di dalam asrama mereka hidup bekerja sama dengan bebas dan tertib.[9]

Pada tahun 1940 Moh. Said melanjutkan pendidikan di Fakultas Sastra sambil tetap mengajar di Taman Siswa. Ia memperdalam kemampuan bahasa yang dimiliki, salah satunya bahasa Jepang. Oleh karena itu ia berbahasa aktif bahasa-bahasa Belanda, Inggris, Perancis, dan Jerman, serta menguasai bahasa Rusia, Jepang, dan Cina secara pasif. Ia juga sempat mempelajari bahasa Spanyol, Portugis, dan Arab.[10]

Masa pendudukan Jepang hingga masa Revolusi menjadi masa-masa yang sulit bagi Moh. Said dan Taman Siswa. Pada pertengahan tahun 1942, saat Jepang menduduki wilayah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda, keadaan berubah. Moh. Said tidak dapat melanjutkan pendidikan karena terjadi peralihan sistem kekuasaan dan mengakibatkan kondisi yang tidak menentu. Hal tersebut berpengaruh pada keberlangsungan kegiatan belajar mengajar di Taman Siswa. Banyak pamong yang mengungsi ke pedalaman. Di sisi lain internal Taman Siswa Jakarta menghadapi perpecahan karena ada konflik antara pamong muda dan pamong tua yang mengakibatkan perubahan kepemimpinan. Kedudukan kepala sekolah diserahkan oleh Ki Mangunsarkoro kepada Moh. Sukamto, sedangkan Moh. Said menjabat sebagai wakil. Sementara itu Taman Dewasa dan Taman Madya dibubarkan pemerintah Jepang. Bahasa asing selain bahasa Jepang pun dilarang diajarkan kepada siswa. Moh. Said tidak patah semangat. Berkat dukungan Mara Sutan—salah satu pamong yang masih bertahan—dan para siswa, Taman Siswa Jakarta tetap bertahan. Untuk menyiasati peraturan yang dikeluarkan pemerintah Jepang, hal-hal yang dilarang diajarkan di Taman Siswa diajarkan dalam kursus di luar jam sekolah. Perjuangan kembali dilakukan oleh Moh. Said di dalam Taman Siswa pada masa revolusi. Taman Siswa dijadikan sebagai salah satu markas para pelajar yang siap bergerilya, tetapi diketahui oleh tentara Sekutu sehingga mengakibatkan Moh. Said harus keluar masuk penjara.[11]

Moh. Said mengakhiri masa lajang pada usia 39 tahun. Ia menikah dengan Sugiarti yang merupakan tetangga masa kecilnya di Purworejo. Mereka bertemu kembali saat Moh. Said menghadiri Kongres Kebudayaan di Sala pada tahun 1954. Saat itu Sugiarti guru Sekolah Guru B Negeri Salatiga. Ayahnya, R. Darsono, pegawai kereta api *SS-Staat Spoor* di Bandung, sedangkan ibunya bernama Setyowati. Sugiarti lahir di Bandung pada 19 Desember 1932 atau selisih 15 tahun dengan Moh.Said. Mereka menikah pada 9 Juli 1956. Pasangan pengantin batu tersebut kemudian tinggal di paviliun Taman Siswa, Jl. Garuda 25

Jakarta. Empat tahun kemudian lahirlah anak semata wayang mereka, Endang Muri Budi Setyarti, yang dikenal dengan panggilan Ake.[12]

Rokok dan kopi merupakan teman setia Moh. Said saat membaca ataupun menulis. Kebiasaan tersebut berpengaruh pada kondisi kesehatannya. Pada usia ke 62 tahun, atau tepatnya Kamis Pahing, 21 Juni 1979, pukul 19.54, ia tutup usia karena penyakit sesak napas yang dideritanya. Berita kepergiannya tercatat dalam banyak surat kabar di Indonesia. Orang-orang yang mengenal Moh. Said mengenang pertemuan dan kehidupan Moh. Said dalam tulisan pribadi atau di media massa.[13] Setelah disemayamkan di aula Taman Siswa Jakarta, Jl. Garuda 25, jenazah Moh. Said dibawa ke Yogyakarta untuk dimakamkan di makam keluarga Taman Siswa, Taman Wijayabrata, pada tanggal 23 Juni 1979. Sebagai orang yang sangat berjasa dalam pendidikan dan kebudayaan, kepergiannya dihadiri oleh sahabat dan pejabat-pejabat negara, seperti Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA) Dr. K.H. Idham Cholid, Menko Kesra Soerono, Menteri P dan K Dr. Deoed Joesoef, dan Menteri PPLH Dr. Emil Salim.[14]

"Ki Mohammad Said, tokoh pendidikan dari Taman Siswa Kamis pukul 19.55 meninggal dunia di Rumah Sakit Persahabatan, Jakarta, setelah sebulan menderita sakit asmatis bronchitis dan seminggu di rumah sakit."[15]

PEMIKIRAN DAN KARYA

Lahir di lingkungan priyayi Islam dan mengenyam pendidikan di sekolah Eropa mempengaruhi pemikiran Moh. Said saat beranjak dewasa. Ilmu tentang Islam ia dapatkan pertama-tama dari guru mengaji yang dikirim oleh ayahnya ke rumah. Raden Mas Reksohadiprodjo pun menyediakan buku-buku agama Kristen, bahkan memberi kebebasan beragama bagi putra-putrinya. Moh. Said juga belajar teosofi saat bertemu dengan Sri Katidjah di HBS Semarang, sehingga ia semakin tertarik dengan ilmu agama dan filsafat. Ia menekuninya dengan membaca buku-buku filsafat, baik filsafat Timur, Barat, maupun Jawa, seperti karya-karya Krisnamurti, Gandi, Tagore, J.D. Bierens, Frederik van Eden, Ki Ageng Suryomentaram, Ki Hadjar Dewantara, dan RM Sosrokartono. Ia memadukan ajaran agama dan filsafat yang dia pelajari dan menerapkannya ke dalam kehidupannya.[16] Selain tertarik pada filsafat, saat di HBS Semarang, Moh. Said juga bergabung dalam Kepanduan Bangsa Indonesia, suatu perkumpulan remaja dengan semangat nasionalisme.[17]

Segala ilmu yang didapatkan di sekolah Barat hingga ilmu filsafat dan agama membuat Moh. Said berfikir kembali tentang dirinya. Pada umurnya yang ke duapuluh tahun Moh. Said memilih untuk memerdekakan dan mengabdikan diri ke jalan perjuangan melalui bidang pendidikan di perguruan Taman Siswa. Di perguruan itulah ia mulai menerapkan segala ilmu yang ia miliki. Meskipun demikian Moh. Said menolak dirinya disebut penganut aliran kepercayaan. Ia ingin batinnya bebas tanpa terikat pada suatu aliran kepercayaan apa pun.[18]

Apa yang dijalani Moh. Said dalam hidupnya disebut oleh Abdurrachman Surjomihardjo sebagai aliran filsafat "personalisme", suatu aliran pikiran dalam filsafat, teologi, dan ajaran tentang masyarakat dan politik yang menempatkan manusia perorangan sebagai inti besaran kualitatif. Dalam hal tersebut manusia berusaha menempatkan sesuatu secara benar, baik dalam pikiran maupun perbuatan.[19]

Atas

Pernikahan Moh. Said dengan Sugiarti tahun 1956

(Sumber: Repro buku *Mohammad Said Reksohadiprodjo, Hasil Karya dan Pengabdiannya*)

Tengah Kiri

Keluarga Moh. Said di depan Gedung Taman Siswa Jakarta

(Sumber: Repro buku *Mohammad Said Reksohadiprodjo, Hasil Karya dan Pengabdiannya*)

Tengah Kanan

Moh. Said berada di rumahnya dengan latar lukisan Ir. Soekarno di belakangnya

(Sumber: Repro buku *Mohammad Said Reksohadiprodjo, Hasil Karya dan Pengabdiannya*)

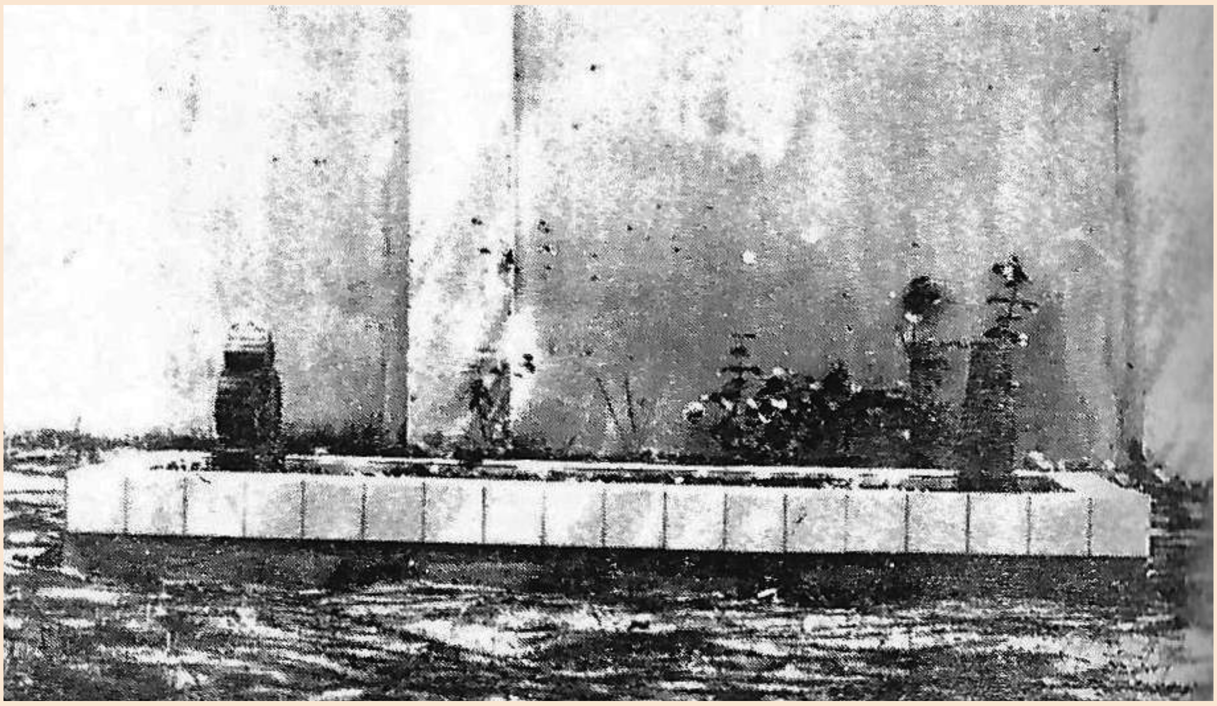

Bawah

Makam Moh. Said di Taman Wijayabrata

(Sumber: Repro buku *Mohammad Said Reksohadiprodjo, Hasil Karya dan Pengabdiannya*)

Atas

Moh. Said melakukan aktivitas Yoga

(Sumber: Repro buku *Mohammad Said Reksohadiprodjo, Hasil Karya dan Pengabdiannya*)

Tengah

Mempersiapkan peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 1963. Dari kiri: 1. Ki Urip, 2. Ki Supardo S.H., 3. Ki Sadjarwa S.H., 4. Ki Imam Sukemi, 5. Ki Moh Said

(Sumber: Koleksi 1-78, Proyek Digitalisasi Tamansiswa)

Bawah

Nyi Hadjar menghadiri undangan pada peringatan Hari Pendidikan Nasional pada tahun 1963 di Jakarta, di lapangan terbang Halim Perdanakusuma disambut oleh Ki Moh Said, Ki Sutarto, Ki Sudiro, H. Abdulgani

(Sumber: Koleksi 1-78, Proyek Digitalisasi Tamansiswa)

"Sesungguhnyalah Moh. Said tumbuh bersama tahap-tahap krisis dalam sejarah masyarakat Indonesia; nasionalisme dan pergerakan nasional dikenalnya dari perbincangan dengan kakak kelasnya Mukarto (di kemudian hari pernah menjadi Menteri Luar Negeri dan duta besar RI) ketika di HBS, demikian juga aliran teosofi yang tujuan pertamanya ialah "Membentuk suatu inti persaudaraan kemanusiaan, tanpa memandang ras, keperayaan, jenis kelamin, kasta atau warna kulit". Aliran teosofi sangat populer di lingkungan masyarakat jajahan."[20]

Sebagai pamong Taman Siswa Moh. Said betul-betul menerapkan seluruh ajaran Taman Siswa dengan sepenuh hati. Ia terus mengusahakan cita-cita Taman Siswa untuk menciptakan manusia yang merdeka. *Mamayuhayu salira, mamayuhayu bangsa, mamayuhayu manungsa* merupakan hal yang terus menjadi pegangan hidupnya.[21]

Selain sebagai pendidik, Moh. Said banyak membaca dan menulis. Pemikiran-pemikirannya tentang Taman Siswa banyak diterbitkan dalam majalah *Poesara*, surat kabar, dan buku. Tulisannya mengangkat tema-tema pendidikan dan kebudayaan, seperti peran keluarga dalam pendidikan, pembinaan generasi muda dan kenakalan remaja, pendidikan seks, pendidikan Pancasila dan P4, kepanduan, dan kewiraswastaan.[22] Salah satu buku yang berisi tulisan-tulisan pilihan Moh. Said berjudul *Masalah Pendidikan Nasional, Beberapa Sumbangan Pikiran*.[23] Buku-buku bacaan Moh. Said terkumpul dalam perpustakaan kecil di rumahnya, yang sebagian oleh-oleh teman-temannya saat berkunjung ke luar negeri. Ia seringkali membawa buku dalam berbagai aktivitasnya.[24] Hobi lain yang sering dilakukan oleh Moh. Said ialah berkebun dan yoga. Di kebunnya ia menanam sayur-sayuran dan bunga. Olah raga yoga membuat tubuhnya tetap bugar hingga hari tuanya.

KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pengalaman dan keahlian Moh. Said dalam bidang pendidikan dan kebudayaan tidak diragukan. Ia terlibat dalam berbagai kegiatan di kedua bidang tersebut, baik di dalam maupun di luar Taman Siswa. Saat Prof. Prijono menjabat menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (PP dan K), Moh. Said mengajukan usul untuk menjadikan tanggal 26 April (wafatnya Ki Hadjar Dewantara) sebagai Hari Pendidikan Nasional sekaligus memperingati jasa-jasa beliau. Usul Moh. Said tersebut diterima melalui Surat Keputusan (SK) Presiden No. 316/1959 dengan perubahan: tanggal lahir Ki Hadjar Dewantara 2 Mei yang ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional.[25]

Menjelang peristiwa 1965, Taman Siswa kembali menghadapi kondisi yang tidak stabil. Perebutan kekuasaan di dalam tubuh Taman Siswa semakin memanas akibat situasi politik. Pasca Peristiwa 1965, Taman Siswa mengambil sikap untuk menyelamatkan perguruan. Bersama Nyi Hadjar Dewantara dan Ki Sastro, Moh. Said menjadi Ketua Presidium Dewan Pimpinan Eksekutif Majelis Luhur Taman Siswa melakukan pembersihan di tubuh Taman Siswa dari pengaruh PKI.[26]

Pada tanggal 27 Maret 1966 Moh. Said Reksohadiprodjo diangkat sebagai Deputi Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan dalam Kabinet Dwikora Yang Disempurnakan.[27] Sikap hidupnya yang sederhana menjadi sorotan pers saat ia pertama kali dilantik. Hal itu pula yang paling diingat oleh para sahabatnya.

"Dalam cara berpakaian, Ki Moh. Said selalu cenderung mempergunakan pakaian yang sesederhana mungkin tapi tetap menunjukkan sifat kenasionalan (...) Di mana pun kita jumpai Moh. Said, selalu memakai baju warna putih dan celana panjang yang sederhana, tanpa dasi dan cukup bersepatu sandal saja. Kalau kita tanyakan kenapa begitu. Maka dengan tegas Moh. Said akan menjawabnya, ini kan pakaian nasional yang sesuai dengan alam kita."[28]

Kebijakan yang pertama kali ditetapkan oleh Moh. Said sebagai menteri ialah menerbitkan susunan dan personalia organisasi Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan dengan tujuan mencapai kerja yang lebih efisien dan membersihkan departemen dari dominasi partai politik.[29]

Pada tanggal 25 Juli 1966 pemerintah memberlakukan perubahan kebijakan berdasarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Sementara (MPRS). Kabinet Dwikora yang Disempurnakan dibubarkan dan diganti dengan Kabinet Ampera. Jabatan Deputi Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan dihapuskan dan diganti menjadi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar. Dalam kabinet tersebut Moh. Said diminta untuk memimpin Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, namun ia menolak karena tidak ingin terikat sebagai pegawai negeri.[30]

Setelah tidak lagi menjabat sebagai menteri, Moh. Said memusatkan dirinya untuk Taman Siswa. Pada tahun 1966 ia mengampu jabatan-jabatan penting di Taman Siswa, seperti Ketua Cabang Taman Siswa Jakarta, Ketua Perwakilan Majelis Luhur Jakarta, Wakil Ketua Umum II Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, dan pada tahun 1967 menjadi Ketua Badan Pinisepuh Persatuan Taman Siswa. Di luar Taman Siswa ia aktif di Badan Sensor Film, anggota Dewan Film Nasional, anggota Dewan Pers, anggota Dewan Harian Nasional Angkatan 45, dan sebagainya.[31]

Ternyata keahlian dan pemikirannya dalam bidang pendidikan masih dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Pada masa Kabinet Pembangunan I Moh. Said diangkat menjadi penasihat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mashuri S.H. Pemikiran dan ideologinya yang sedikit banyak terpengaruh Taman Siswa membuat kebijakan-kebijakan yang dihasilkan pada periode tersebut membawa angin segar bagi perguruan Taman Siswa.[32] Salah satu kebijakan yang ditetapkan pada periode tersebut ialah penghapusan Ujian Negara dan digantikan dengan sistem Ujian Sekolah.[33] Selain itu ia juga sempat diangkat sebagai anggota DPA RI tahun 1978.[34]

Moh. Said mendapat banyak penghargaan atas jasa-jasa yang telah dilakukannya, antara lain Satyalencana Dwidya Sistha dari Menteri Pertahanan dan Keamanan RI tahun 1967; piagam anugerah pendidikan, pengabdian, dan ilmu pengetahuan dari Menteri P & K 17 Agustus 1970; lencana emas dari PMI; piagam penghargaan dari Universitas Trisakti pada 1973; dan tanda kehormatan Bintang Mahaputera Utama dari Presiden RI 11 Agustus 1979 dengan SK Presiden RI No.039/TK/1979 dengan jabatan terakhir sebagai Purnasetiawan Taman Siswa atau Anggota Dewan Pertimbangan Agung RI.[35]

Sts.577/3/66—50.

Salinan dari salinan

SEKRETARIAT NEGARA

KEPUTUSAN REPUBLIK INDONESIA
NO. 64 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa berhubung dengan telah diadakannja penjempurnaan lagi terhadap susunan Kabinet Dwikora jang sekarang seperti ditetapkan dalam Keputusan Presiden No. 63 tahun 1966, perlu menetapkan Departemen-Departemen jang mendjadi bagiannja Kementrian masing-masing, beserta personalianja;

Mengingat : 1. Pasal 4 ajat 1 Undang-undang Dasar;
2. Keputusan Presiden No. 63 tahun 1966;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Departemen-departemen jang mendjadi bagiannja Kementrian masing-masing beserta Personalianja, adalah sebagaimana tertjantum dalam lampiran surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 27 Maret 1966.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
t.t.d.
SUKARNO

Untuk salinan jang sah
Sesuai dengan jang asli
WAKIL SEKRETARIS NEGARA/
SEKRETARIS PRESIDEN,
t.t.d.
DJAMIN.

Sesuai dengan salinan aslinja.
a/n. Pd. Kepala I Bagian Kearsipan
SEKRETARIS NEGARA BIRO I
Pd. Kepala Seksi Pengetikan,

(Ny. Soemarkinah)

129

Sts. 577/3/66—50.

KEMETRIAN PERTANIAN terdiri dari :

1. Departemen Pertanian — dikepalai oleh Deputy Menteri Ir. Sukarno.
2. Departemen Perkebunan — dirangkap oleh Menteri Drs. Frans Seda.
3. Departemen Kehutanan — dikepalai oleh Deputy Menteri Sudjarwo.
4. Departemen Perikanan dan Pengolahan Laut — Dikepalai oleh Deputy Menteri Laks. Muda Laut Hamzah Atmohandojo.

KEMENTRIAN PERHUBUNGAN terdiri dari ;

1. Departemen Perhubungan Darat — dikepalai oleh Deputy Menteri Brig. Djen. Utojo Utomo.
2. Departemen Perhubungan Laut — dikepalai oleh Deputy Menteri Kom. Laut Susanto Mardhi.
3. Departemen Perhubungan Udara — dikepalai oleh Deputy Menteri Partono.
4. Departemen Pos dan Telekomunikasi — dikepalai oleh Deputy Menteri Simatupang S.H.

KEMENTRIAN PEMBANGUNAN PROJEK2 MANDATARIS terdiri dari :

1. Departemen Djalan Raja Sumatera — dikepalai oleh Deputy Menteri Ir. Bratanata.
2. Departemen Projek2 Mandataris — dirangkap oleh Menteri Laks. Muda Udara Makki Perdanakusumah.

Tjatatan untuk WAPERDAM BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN :

a. diperbantukan pada Waperdam Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan :
   1. Maj. Djen. KKo. Ali Sadikin
   2. Arifin Harahap S.H.
   3. J.D. Massie
   4. Brig. Djen. Drs. A Sukendro
   5. T.D. Pardede
   masing-masing sebagai Anggota Staf Waperdam berkedudukan Deputy Menteri.
b. Lembaga Keparlwisataan langsung dipegang oleh Waperdam Sri Sultan Hamengkubuwono IX

II. KEMENTRIAN DALAM NEGERI terdiri dari :

1. Departemen Dalam Negeri — dirangkap oleh Menteri Maj. Djen. Basuki Rachmat.
2. Departemen Pembangunan Masyarakat Desa — dikepalai oleh Deputy Menteri H. Aminuddin Azis.
3. Departemen Agraria — dikepalai oleh Deputy Menteri Hermanses S.H.

130

4. Departemen Trasmigrasi — dikepalai oleh Deputy Menteri Laks. Muda Laut Sujoto Suparto.

KEMENTRIAN PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN KEBUDAJAAN terdiri dari :

1. Departemen Pendidikan Dasar — dikepalai oleh Deputy Menteri Mohd. Said.
2. Departemen Perguruan Tinggi — dikepalai oleh Deputy Menteri Maladi
3. Departemen Olah Raga — dirangkap oleh Menteri Sarino Mangunpranoto (ad interim)
4. Departemen Kebudajaan

Sts.577/3/66—50.

KEMENTRIAN AGAMA terdiri dari :

1. Departemen Agama — dirangkap oleh Menteri Prof. K.H. Sjaifudin Zuchri.
2. Departemen Urusan Hadji — dikepalai oleh Deputy Menteri Prof. K.H. Farid Ma'ruf.

Tjatatan untuk Kementerian2 Agama dan Sosial :

1. Kepada Menteri Agama diperbantukan Penghubung dengan Alim Ulama H. Marzuki Jatim sebagai Deputy Menteri;
2. Kepada Menteri Sosial diperbantukan Nj. Ruslah Sardjono S.H. sebagai Deputy Menteri.

DJAKARTA, 27 Maret 1966.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
t.t.d.
SUKARNO

Untuk salinan jang sah
Sesuai dengan jang asli
WAKIL SEKRETARIS NEGARA/
SEKRETARIS PRESIDEN,
t.t.d.
DJAMIN

Sesuai dengan salinan aslinya.
a/n. Pd. Kepala I Bagian Kearsipan
SEKRETARIS NEGARA BIRO I
Pd. Kepala Seksi Pengetikan,

(Nj. Soemarkinah)

131

Atas dan Tengah

Surat Pengangkatan Said Reksohadiprodjo sebagai Menteri Pendidikan Dasar

(Sumber: Repro buku *Mohammad Said Reksohadiprodjo, Hasil Karya dan Pengabdiannya*)

Bawah

Piagam Tanda kehormatan Bintang Mahaputera Utama dari Presiden RI 11 Agustus 1979 dengan SK Presiden RI No.039/TK/1979 dan Piagam Anugerah Pendidikan, Pengabdian, dan Ilmu Pengetahuan dari Menteri P & K 17 Agustus 1970

(Sumber: Repro *Mohammad Said Reksohadiprodjo, Hasil Karya dan Pengabdiannya*)

ENDNOTES

1 **Catatan:**

Moehkardi, *Mohammad Said Reksohadiprodjo, Hasil Karya dan Pengabdiannya,* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1982/1983), hlm.1.

2 Iso melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Pertanian Tinggi di Wageningen, Belanda, dan berhasil mendapatkan gelar Insinyur Pertanian. Ia juga menjadi guru besar di Universitas Gadjah Mada. Moekhardi, *ibid.,* hlm. 5.

3 *ibid.*

4 S.Sumardi,dkk., *Menteri-menteri Pendidikan dan Kebudayaan Sejak Tahun 1966,* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1984), hlm. 24

5 *ibid.,* hlm. 25.

6 Moehkardi, 1982/1983: 9.

7 Yayasan Idayu, *Mohammad Said Reksohadiprodjo di Mata Sahabatnya,* (Jakarta: Yayasan Idayu, 1979), hlm. 138)

8 *Soli Deo Honor* merupakan bahasa latin yang artinya 'hanya bagi Tuhanlah segala kehormatan'. Kata-kata tersebut didapat Moh. Said dari depan gereja Katholik Bangkong, Semarang, yang dilewatinya saat bersekolah di HBS Semarang. S. Sumardi,dkk., *op.cit.,* hlm. 26; Moehkardi, *op.cit.,* hlm. 21.

9 Moehkardi, *op.cit.,* hlm. 22-23.

10 *Ibid,* hlm. 9.

11 S. Sumardi,dkk., *op.cit.,* hlm. 26-28.

12 S. Sumardi,dkk., *ibid.,* hlm. 26-27; Moehkardi, *op.cit.,* hlm. 37.

13 S. Sumardi,dkk., *ibid,* hlm.31.

14 Yayasan Idayu, *op.cit.,* hlm. 56-57.

15 Yayasan Idayu, *op.cit.,* hlm. 64)

16 Moehkardi, *op.cit.,* hlm. 8-9.

17 *Ibid,* hlm.19.

18 *Ibid,* hlm.44.

19 Abdurrachman menemukan terminologi aliran filsafat *personalisme* dari ensiklopedi pemikiran modern yang ia baca dan menunjukkan secara jelas ciri-ciri pemikiran Moh. Said selama ini. Menurutnya Moh. Said menyetujui pemberian terminologi tersebut pada tahun 1970-an. Menurutnya personalisme mempunyai sisi kemasyarakatan, di mana menurut Emmanuel Mounier, di Perancis personalisme sebagai gerakan lahir dari dalam krisis dunia 1929 (di Indonesia pernah disebut sebagai zaman meleset=*malaise*). Krisis tersebut mendapatkan dua respon, yaitu kaum marxis dan moralis. Kaum marxis menilai krisis adalah akibat masalah ekonomi, oleh karena itu struktur ekonomi harus diubah dan penyakitnya dapat diatasi. Kaum moralis sendiri menyatakan bahwa krisis adalah akibat dari krisis manusia, krisis moral dan nilai-nilai dan karena itu manusialah yang mula-mula harus diubah dan masyarakat akan sembuh dari penyakitnya. Kedua pendekatan itu dianggap kurang memuaskan bagi personalisme, di mana menurutnya situasi krisis ialah tanggung jawab Manusia sebagai dasar." Ki Mohamad Said Reksohadiprodjo, *Masalah Pendidikan Nasional, Beberapa Sumbangan Pikiran.* (Jakarta: Haji Masagung, 1989), hlm. viii-ix.

20 *ibid.,* hlm. ix.

21 Moh. Said Reksohadiprodjo, "Taman Siswa dan Alam Gagasannya", dalam "50 Tahun Taman Siswa", (Yogyakarta: Majelis Luhur Taman Siswa Yogyakarta, 1976), hlm. 166.

22 S. Sumardi, dkk., *op.cit.,* hlm. 31.

23 Ki Mohamad Said Reksohadiprodjo, *Masalah Pendidikan Nasional, Beberapa Sumbangan Pikiran.* (Jakarta: Haji Masagung, 1989).

24 Wawancara Ny.Sugiarti Moh.Said, dalam Moehkardi, *op.cit.,* hlm. 40.

25 S.Sumardi, dkk.*op.cit.,* hlm. 28.

26 *Ibid.,* hlm. 29.

27 Kabinet ini merupakan kabinet peralihan dari pemerintahan Soekarno atau disebut Orde Lama ke pemeritahan Orde Baru dengan tiga tokoh baru, yaitu Adam Malik, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Letnan Jenderal Soeharto.*ibid.*

28 Yayasan Idayu, *op.cit.,* hlm. 43.

29 S.Sumardi, dkk.*op.cit.,* hlm. 29.

30 *Ibid.,* hlm. 29-30.

31 *Ibid,* .hlm. 30.

32 *Ibid.,* hlm. 47.

33 *ibid.,* hlm.30.

34 Lembaga tersebut merupakan lembaga negara non-departemen dengan tugas memberikan nasehat kepada presiden dalam pemerintahannya. *ibid.,* hlm. 31.

35 *Ibid.,* hlm.32.

Mohammad Sanusi Hardjadinata

Masa Jabatan
11 Oktober 1967 – 6 Juni 1968

Mohammad Sanusi Hardjadinata

Mohammad Sanusi Hardjadinata adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (RI) dalam Kabinet Ampera pada masa awal Orde Baru, menggantikan Dr. Sarino Mangunpranoto. Ia menjabat selama 1 tahun, terhitung mulai 11 Oktober 1967 hingga 6 Juni 1968.

RIWAYAT HIDUP

Sanusi anak laki-laki satu-satunya dari empat bersaudara. Ia lahir di Desa Cinta Manik, Kecamatan Sukaweni, Kabupaten Garut, pada tanggal 24 Juni 1914. Ayahnya bernama Winatadidjaja, seorang kepala desa. Dari pernikahan ayah dengan ibu kandungnya, Taswi, ia memiliki dua saudari kandung, yaitu Siti Atika dan Siti Dohaya; sementara dari pernikahan ayahnya dengan Fatimah ia memiliki seorang saudari, Siti Naga.[1]

Pada tahun 1922, saat umurnya delapan tahun, Sanusi bersekolah di Sekolah Rakyat (*Vervolgschool*) di Sukamanah, Bogor. Beberapa tahun kemudian ia pindah ke *Holland Indische School* (HIS) di Garut. Pada tahun 1930, setelah menyelesaikan pendidikan di HIS, ia melanjutkan ke *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* (MULO, setara sekolah menengah pertama), dan kemudian ke *Holland Inlandsche Kweekschool* (HIK), sekolah pendidikan guru di Tasikmalaya, dan lulus pada tahun 1936.[2]

Setamat dari HIK, Sanusi bekerja sebagai guru di HIS Muhammadiyah di Jl. Kramat, Jakarta. Ia memperoleh gaji sebesar f 25 per bulan. Setelah setahun mengabdi di HIS Muhammadiyah Jakarta, ia pindah ke Muara Dua, Palembang, dan menjabat sebagai kepala sekolah HIS di kota itu. Meski mendapatkan penghasilan yang lebih besar, kehidupan Sanusi di Palembang tidak bertahan lama karena ia mengidap penyakit kulit yang susah disembuhkan. Pada tahun 1938 ia memutuskan kembali ke Bandung dan mengajar di Perguruan Pasundan, Sukabumi, Jawa Barat. Ia baru sebentar mengajar ketika Pemerintah Balatentara Jepang membubarkan sekolah Perguruan Pasundan. Kariernya sebagai guru pun terhenti. Ia menjadi wiraswasta dan merintis usaha kecil-kecilan, seperti berjualan bakso dan membuka warung kelontong, untuk menghidupi diri dan keluarganya.[3] Pada tahun-tahun tidak menentu itu Sanusi bahkan memulai babak rumah tangga dalam kehidupannya. Dari pernikahannya ia dianugerahi delapan orang anak, yaitu Sulaiman, Jopi Suhartiwi, Jopi Suhartini, Tati Suhartini, Kiki Suharti, Ine Suhartinah, Suharlina, dan Suhartika.[4]

KARIER DI BIDANG PEMERINTAHAN

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia menjadi halaman baru bagi Sanusi. Setelah berbakti di dunia pendidikan sebagai guru, ia mulai kiprah di bidang politik. Ia terpilih menjadi anggota Komite Nasional Indonesia (KNI) cabang Parahiyangan. Di saat yang sama ia juga aktif dalam organisasi perjuangan Barisan Banteng. Berkat pengalamannya sebagai guru dan aktivitasnya di KNI Parahiyangan pada tahun 1946 Sanusi diangkat menjadi Asisten Residen Garut. Saat Bandung dan kota-kota lain di Jawa Barat diduduki Belanda, Sanusi terjun dalam perjuangan gerilya. Pada tahun 1948 Sanusi ditangkap oleh Belanda. Setelah itu ia pindah ke Jawa Tengah lalu ke Jawa Timur. Di Jawa Timur Sanusi menjadi Pembantu Residen Madiun yang saat itu dijabat oleh Samadikun. Salah satu tugas sebagai pembantu residen adalah membenahi pemerintahan sipil yang kacau akibat Peristiwa Madiun.[5]

Seusai menjadi Pembantu Residen Madiun, Sanusi pindah ke Magetan dan di kota ini ia menjadi Pejabat Bupati Magetan. Pada saat itu terjadi Agresi Militer Belanda II. Sanusi ditangkap Belanda dan kemudian ditahan di Surabaya. Ia baru dibebaskan dan dapat kembali ke Bandung setelah Indonesia dan Belanda

Kiri

Mohamad Sanusi Hardjadinata semasa muda.

(Sumber: Arsip Nasional Republik Indonesia)

Kanan

Mohamad Sanusi Hardjadinata ketika menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, c.1951-1956

(Sumber: Arsip Nasional Republik Indonesia)

mencapai kesepakatan dalam Persetujuan Roem-Royen, yakni membentuk Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tanggal 27 Desember 1949, dan Sanusi menjadi anggota Komisariat RIS.

Pada masa Demokrasi Terpimpin, Sanusi diangkat menjadi Residen Priangan.[6] Setahun berikutnya, pada tanggal 7 Juli 1951, ia diangkat menjadi Gubernur Jawa Barat[7] menggantikan R. Mas Sewaka. Ia menjabat gubernur hingga tahun 1956 dan digantikan oleh Ipik Gandamana. Saat menjabat sebagai gubernur Jawa Barat Sanusi terlibat dalam penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika (KAA). Ia menjadi Ketua Panitia Lokal KAA dengan tugas menyiapkan Bandung menyambut 24 pimpinan negara Asia Afrika. Setelah itu, pada tanggal 9 April 1957, ia diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri di bawah Kabinet Djuanda hingga tanggal 10 Juli 1959.[8]

Pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden dan oleh sebab itu Kabinet Djuanda dibubarkan. Meskipun demikian karier politik Sanusi tidak terhenti. Oleh pemerintahan Presiden Soekarno ia ditugaskan sebagai Duta Besar Indonesia untuk Mesir dan ditempatkan di Kairo selama empat tahun, terhitung mulai tahun 1960 sampai 1964. Setelah tugas sebagai duta besar selesai Sanusi kembali ke Indonesia dan menetap di Bandung. Tidak lama kemudian ia diangkat menjadi Rektor Universitas Padjajaran yang ketiga. Namanya diabadikan menjadi nama salah satu gedung dalam kompleks universitas ini, yaitu Graha Sanusi Hardjadinata.

Setelah masa pemerintahan Presiden Soekarno berakhir dan digantikan oleh Presiden Soeharto, Sanusi kembali pada kiprahnya di bidang pendidikan setelah sebelumnya diangkat sebagai Menteri Utama Bidang Industri dan Pembangunan pada periode Kabinet Ampera I (1966-1967). Sanusi mengamati bahwa kemunduran ekonomi Indonesia pada periode tersebut disebabkan oleh kurangnya keselarasan antara kepentingan politik dan ekonomi, ketiadaan pengawasan yang efektif dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap kebijakan ekonomi pemerintah, dan diabaikannya prinsip-prinsip ekonomi yang rasional dalam menghadapi masalah-masalah ekonomi.[9] Oleh karena itu ia menyampaikan garis besar rencana kebijakan industri dan pembangunan (inbang). Untuk bidang industri Sanusi mengusulkan agar dilakukan peningkatan produksi dan investasi melalui peningkatan unit produksi yang telah ada dan sedang dalam pelaksanaan untuk mencapai kapasitas produksi yang maksimal;[10] meningkatkan produksi tekstil dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan sandang masyarakat dan memberikan perhatian pada produksi kerajinan rakyat;[11] meningkatkan kapasitas pertambangan dengan menarik modal asing dan memikirkan penggunaan tenaga ahli yang saat itu belum dapat dipenuhi oleh Indonesia;[12] meningkatkan infrastruktur sungai, bangunan, saluran pengairan, jalan, dan jembatan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan merangsang pertumbuhan

Kiri

Mohamad Sanusi Hardjadinata ketika menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, c.1951-1956.

(Sumber: Arsip Nasional Republik Indonesia)

Kanan

Mohamad Sanusi Hardjadinata saat menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Kabinet Djuanda, c. 1957-1959.

(Sumber: Arsip Nasional Republik Indonesia)

ekonomi lainnya di masyarakat;[13] dan mengingatkan pentingnya koordinasi kerja yang baik antara pusat dan daerah.[14]

Ketika Kabinet Ampera I berakhir dan dilanjutkan Kabinet Ampera II Sanusi diangkat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Menteri P & K) menggantikan Dr. Sarino Mangunpranoto. Selama Kabinet Ampera I rumusan pemikiran untuk bidang pendidikan dan kebudayaan yang disusun oleh Dr. Sarino tampak mendapat pengaruh kuat dari tokoh pendidikan dan pendiri Taman Siswa Ki Hadjar Dewantara. Dr. Sarino mengemukakan,

> "Situasi kenegaraan jang berdjalan seperti di atas, di mana banjak peraturan tiap kali berobah dan tidak konstitusional itu, membawa pengaruh kurang adanja tata tertib dalam dunia pendidikan. Situasi ekonomi mempengaruhi hidup dan kehidupan masjarakat Bangsa jang menular kepada djalannja Pendidikan bagi anak-anak. Systim persekolahan tidak mendjamin dan memberi harapan akan kemampuan tiap individu untuk menjelenggarakan sesuatu baginja. Achirnja Pendidikan menghasilkan urbanisasi dan inflasi intelek hingga terdjadi pengangguran disana-sini.
>
> Dunia Pendidikan tetap beredar dan harus berputar melalui prinsip *growth and change*, sesuai dengan kodrat alamnja. Kita kembalikan ia kepada alam pikir, bahwa manusia adalah *subject* guna mentjapai pembangunan mental, spiritual dan material setjara individual. Mendidik harus diartikan memberi kemampuan untuk mengadakan sesuatu bagi keperluan hidupnja (*een ieder in staat te make nom iets tot stand te brengen*)." [15]

Mohamad Sanusi Hardjadinata saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, c.1951-1956.

(Sumber: Arsip Nasional Republik Indonesia)

Sementara itu pengembangan bidang pendidikan dan kebudayaan dalam Kabinet Ampera II dirumuskan dasar-dasar filosofis berikut:

- Tinggi rendah kebudayaan suatu bangsa dapat diukur dari sifat atau karakter bangsa itu sendiri. Begitu pula ukuran manusia sebagai individu dapat dilihat pada sifat atau karakter kebudiannya.
- Usaha pendidikan tidak lain adalah memelihara individu menjadi pribadi yang tahu pada hak asasinya dengan menuntut adanya hak untuk mengatur diri sendiri dengan penuh tanggung jawab.
- Pengakuan hak asasi pribadi dapat melahirkan prinsip demokrasi dalam pendidikan.
- Pendemokratisasian akan berhasil bila pertumbuhan (*growth*) dalam diri individu tidak dikekang, tetap bebas merdeka melalui kekuatan hidup yang dimiliki sejak manusia dilahirkan.
- Hidup yang bebas tidak berarti bebas sebebas-bebasnya tanpa batas. Oleh karena itu harus ada sistem *among*, di mana individu dibina dan diarahkan dengan *tut wuri handayani*, artinya mengarahkan dan memelihara pertumbuhan jiwa menurut saluran "Suci Tata" dan "Tertib Damai".
- Kesucian, ketaatan, dan kedamaian diukur berdasarkan kebudian serta keadaban dan martabat bangsa itu sendiri.
- Adat istiadat suatu bangsa biasanya digunakan sebagai ukuran nilai kepribadian bangsa itu. Akan tetapi, adat istiadat itu tidak bisa dipertahankan terus-menerus karena pada hakikatnya hidup manusia selalu mengalami pertumbuhan dan perubahan.
- Hidup atas dasar prinsip *tri-kon* (kontinu, konsentris, konvergen) dapat mengatur hubungan kehidupan kebudayaan yang berkembang secacara universal. Dengan demikian terjadilah hubungan antara suku-suku bangsa di Indonesia dan hubungan antara bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain.
- Pendidikan merupakan suatu upaya untuk mengembangkan dan mengadakan perubahan agar tercapai suatu tujuan, baik untuk pribadi, untuk kepentingan bangsa, maupun untuk kepentingan dunia.[16]

Pada tahun ketika Sanusi menjabat sebagai Menteri P&K dan selama tahun 1960-an pada umumnya Indonesia yang dipimpin oleh pemerintahan Orde Baru menjadikan pembangunan sebagai tujuan. Selain pembangunan infrastruktur, hal lain yang juga diperhatikan adalah bagaimana pembangunan dapat dicapai dan apakah kebudayaan-kebudayaan lokal yang ada di Indonesia selaras dengan proses pembangunan.[17] Kabinet Ampera II menyebut "pendidikan adalah pembangunan"[18] dan pokok-pokok pemikirannya sebagai berikut:

Mohamad Sanusi Hardjadinata saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, c.1951-1956.

(Sumber: Arsip Nasional Republik Indonesia)

- Konsep pemikiran bahwa manusia sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat saling bergantung untuk mewujudkan suatu kehidupan yang melahirkan suatu usaha pendidikan yang timbal balik.
- Pendidikan adalah suatu usaha memelihara setiap jiwa individu untuk tumbuh dan berubah baik bagi kebaikan dirinya maupun kebaikan bangsanya serta untuk kepentingan umat manusia.
- Dengan adanya pendemokratisasian pendidikan dapat ditumbuhkan jiwa individu yang berkembang tanpa terkekang, sehingga membuahkan hasil yang sesuai dengan bakat masing-masing.
- Mendidik adalah usaha mengurangi sifat yang tidak baik (menipiskan) dan menambah (menebalkan) sifat-sifat yang baik. Inilah yang disebut pendidikan untuk mempribadikan seseorang, yaitu tahu harga diri, tidak merasa congkak tetapi juga tidak merasa rendah diri.
- Usaha pendidikan tersebut di atas adalah suatu penerapan pembangunan mental melalui prinsip demokrasi, di mana semua pihak merasa memiliki hak dan kewajiban yang sama.
- Pembangunan mental yang dilengkapi dengan pembangunan spiritual mendorong manusia kepada suatu kecerdasan yang tertuju kepada rasio. Kecerdasan membawa suatu rasionalitas yang dapat menumbuhkan kreativitas di dalam daya pikir seseorang. Dengan demikian ia dapat menghasilkan sesuatu.
- Mendidik tidak hanya menanamkan jiwa demokrasi dan sosial terhadap sesama saja, tetapi juga memberikan pengajaran guna kecerdasan otak seseorang.
- Kecerdasan tidak mengarah ke intelektualisme, tetapi yang dapat melahirkan spirit sebagai suatu kemampuan untuk menyelenggarakan pembangunan material.
- Pendidikan harus dimulai dari lingkungan keluarga, kemudian sekolah, lalu masyarakat. Pendidikan dalam keluarga mula-mula ditekankan pada pendidikan mental, kemudian spiritual, akhirnya pendidikan material. Dalam lingkungan sekolah dimulai dari pendidikan spiritual, material dan kemudian pendidikan mental. Di lingkungan masyarakat arah pendidikan berjalan secara simultan, baik mental, spiritual, maupun material.
- Pendidikan yang dimulai sejak di lingkungan keluarga dan dilanjutkan dengan tambahan pengajaran dengan sistem sekolah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat yang menghadapi pembangunan ekonomi dan penyempurnaan teknologi.
- Pendidikan yang dimulai sejak di lingkungan keluarga dan dilanjutkan dengan tambahan pengajaran dengan sistem sekolah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat yang menghadapi pembangunan ekonomi dan penyempurnaan teknologi.
- Pendidikan harus menganut suatu falsafah bahwa manusia sendiri yang mengadakan (membangun) industri, perdagangan, transportasi, dan bukan ekonomi yang melahirkan manusia. Oleh karena itu mendidik harus diartikan memberi kemampuan untuk mengadakan sesuatu bagi keperluan hidup.
- Pendidikan dengan sistem persekolahan secara prinsipil harus dibuah dari '*theorie school*' menjadi '*doe school*', artinya mengusahakan sifat *vocational* dari keilmuan yang bersifat teoretis. Orientasi anak harus diubah dari kotasentris menjadi memakmurkan desa dengan industri agraris. Desa merupakan ruang sekolah.
- Kurikulum harus ditinjau secara menyeluruh; harus diadakan sinkronisasi dari SD sampai Perguruan Tinggi. Karena keadaan geografi, sosial, dan budaya, diperlukan diferensiasi dengan pembangunan daerah masing-masing. Di samping itu ada unit kurikulum dalam beberapa mata pelajaran pokok guna mencapai kesatuan bangsa seperti bahasa, sejarah, ilmu bumi dan *civics.*[19]

Untuk mencapai cita-cita pembangunan tersebut pemerintah juga merumuskan prasarana pendidikan berupa prinsip pokok yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Prinsip pokok itu terkandung dalam Mukadimah UUD 1945 yang tertulis dalam alinea terakhir. Susunan kata yang dirumuskan menjadi bagian pokok Mukadimah itu ialah suatu pernyataan spontan hasil cetusan jiwa dan nurani bangsa Indonesia. Ia lahir dari kancah penjajahan dan mencakup lima dasar prinsip hidup bangsa Indonesia.

Partai Demokrasi Indonesia (PDI), Pimpinan yang terdiri dari; Sanusi Hardjadinata, Prof. Usep Ranuwidaja, dll. Diterima oleh Presiden Suharto di Bina Graha

(Sumber: Arsip Nasional Republik Indonesia)

Oleh Bung karno kelima dasar hidup tersebut diuraikan dalam lahirnya Pancasila dan dirumuskan dengan istilah Pancasila. Mengenai penerapan pendidikan Pancasila dijelaskan bahwa manusia dapat menghitung dengan kekuatan pikir (otak) akan tetapi dapat pula mengukur sesuatu dengan perasaan. Di samping pikiran dan perasaan, manusia memerlukan alat kelengkapan jasmanisah yaitu daya dan gaya. Dengan demikian mendidik berarti mengembangkan akal, rasa, dan membuahkannya dalam tindak tanduk.[20]

Berdasarkan rumusan Kabinet Ampera II tersebut penerapan pendidikan Pancasila harus dilakukan dengan menggunakan akal dan rasa sehingga menghasilkan perilaku yang baik. Pancasila bukanlah suatu benda khasiat yang dapat diberi secara serah terima (*overgrave-overname*) seperti barang-barang inventaris, melainkan suatu prinsip hidup bangsa Indonesia berupa kebudayaan yang harus diwariskan kepada generasi selanjutnya melalui pendidikan. Penerapan Pancasila dengan baik dilakukan melalui beberapa sarana, seperti pendidikan agama, pendidikan perikemanusiaan, pendidikan kesatuan bangsa, pendidikan kerakyatan atas dasar musyawarah, dan pendidikan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.[21]

Pendidikan Pancasila dilaksanakan melalui tingkatan-tingkatan umur dan tiga sentra pendidikan. Materi Pancasila yang merupakan kelima unsur kepribadian bangsa Indonesia dengan alat pikir sudah dapat dijalankan dalam pelbagai mata pelajaran, misalnya cerita, membaca, ilmu bumi, sejarah, *civics*, mengarang, dan bahasa. Agama diajarkan dalam dua bentuk, yaitu sebagai pembentuk mental yang dapat dilakukan bersama-sama dengan materi Pancasila. Materinya dapat dijalin dengan mata pelajaran-mata pelajaran tersebut serta buku-buku bacaaan yang mengandung ajaran agama yang disebut pendidikan agama, sedangkan agar dapat menjalankan syariat-syariat agama menurut keyakinannya masing-masing perlu adanya pelajaran agama.[22]

Semasa Kabinet Ampera II pemerintah, melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, membuat struktur persekolahan yang secara terperinci, meliputi persoalan sistem persekolahan, penyusunan kurikulum, pendidikan guru, fungsi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP), dan fungsi perguruan tinggi.

Untuk sistem persekolahan, jenjang pendidikan dasar dibagi menjadi tiga tingkatan dengan formula enam tahun, tiga tahun, dan tiga tahun. Enam tahun pertama dibagi menjadi dua tahap. Tiga tahun pertama dimanfaatkan untuk memberikan dasar pengembangan kecerdasan dengan lebih mempertajam panca indera dan tiga tahun kedua untuk memberikan persiapan guna memperluas pandangan. Pendidikannya tahap tiga tahun kemudian disesuaikan dengan permulaan kedewasaan anak. Oleh karena masa ini merupakan transisi ke masa dewasa, maka pelajaran yang diberikan menekankan keterampilan dan kreativitas. Tiga tahun terakhir adalah periode dewasa untuk menginjak alam madya. Periode dewasa

Mohamad Sanusi Hardjadinata di kediamannya di Bandung, 1985

(Sumber: *Tempo*/ Farid Gaban)

lebih tampak dalam merenung dari bertindak secara kongkret. Jiwa "*strum und drang*" mengalir pada alam fantasi yang menimbulkan sifat keberanian. Oleh sebab itu anak harus dibawa dari alam fantasi ke alam nyata yang berhubungan dengan cita-cita pembangunan agar idealisme tidak mengarah pada cita-cita yang utopis.[23]

Kurikulum pendidikan disesuaikan dengan penggolongan usia dan periode yang dibagi menjadi Taman Indria (untuk anak umur 3-5 tahun), Taman Kanak-Kanak (6-9 tahun), Taman Muda (9-12 tahun), Taman Dewasa (12-15 tahun), dan Taman Madya (15-18 tahun). Pada tingkat SMP (Taman Dewasa) mulai digunakan alat-alat keterampilan (*vocational*), sedangkan pada tingkat SMA (Taman Madya) kurikulum yang akan disusun adalah 60% untuk materi keterampilan (menjurus) dan 40% untuk materi kecerdasan (spiritual). Lulusan SMA yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi harus menempuh ujian persiapan selama satu tahun. Persiapan ini dibutuhkan sebab perguruan tinggi diperuntukan bagi mereka yang mempunyai bakat keilmuan tinggi.[24]

Untuk menyesuaikan sistem pendidikan ini negara perlu menyesuaikan pendidikan guru. Pendidikan guru dibagi menjadi dua tingkat. Tingkat pertama berupa *junior college* selama setahun selepas lulus SMA. Lulusan *junior college* dapat menjadi guru Taman Kanak-Kanak, Taman Muda, dan Taman Dewasa. Apabila sistem ini tidak mencukupi jumlah guru yang dibutuhkan akan diadakan sistem kenaikan bertingkat dari SGC1 ke SGC2 ke SGA (atau dari SGLP ke SGLA), ke *junior college*, kemudian ke tingkat kedua: *college*. Kenaikan ini berjalan terus sehingga hanya akan ada satu macam guru saja, yaitu lulusan *college* untuk seluruh pendidikan dasar dan menengah.[25]

Rumusan pendidikan Kabinet Ampera II juga menyangkut peran IKIP yang berfungsi sebagai penyelenggara *college* dan *junior college*, sehingga kurikulum IKIP akan disesuaikan agar dapat memenuhi fungsi tersebut. Sementara itu perguruan tinggi menjadi sumber inspirasi hidup kebudayaan nasional, pusat pendidikan rakyat untuk memodernisasikan kehidupan masyarakat, dan mengilmiahkan segala sesuatu untuk mencapai tujuan hidup dan kehidupan bangsa dan umat manusia, meningkatkan keterampilan, mendidik kader pekerja riset, dan menyelenggarakan pendidikan desa untuk mencapai cita-cita pembangunan desa. Fungsi dan tujuan perguruan tinggi telah diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1961. Berdasarkan undang-undang ini juga struktur perguruan tinggi dibagi berdasarkan zona. Zona daerah bertugas menyiapkan keterampilan dan kekuatan; Zona nasional bertugas mendidik kader; zona regional bertugas menyelenggarakan riset; dan zona internasional bertugas menjaga keberlangsungan perguruan tinggi dan ikut serta dalam konferensi.

Pada jenjang perguruan tinggi dan IKIP akan diterapkan mata pelajaran wajib untuk semua jurusan, yaitu (1) Filsafat Umum, dengan penekanan pada etika, logika, dan metode; (2) Filsafat Pancasila dengan rangkaian seni budaya bangsa Indonesia; (3) Filsafat pendidikan agama; pendidikan kewiraan (aktivitas ekstrakulikuler); dan (4) Filsafat Ekonomi yang bukan berdasarkan ekonomi sosialis Marxis/Leninis dan ekonomi kapitalis imperialis. Meskipun demikian bidang filsafat untuk IKIP ditekankan pada Filsafat Pancasila dan psikologi umum serta psikologi khusus anak-anak dan psikologi masyarakat desa di samping sosiologi desa, sebab IKIP diarahkan untuk memakmurkan desa dengan sistem pendidikan desa.

Semua pokok pikiran pembaharuan pendidikan yang dikemukakan di atas kemudian dijadikan sebagai dasar bagi penyusunan kebijaksanaan dalam pendidikan dan kebudayaan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada masa Kabinet Ampera, khususnya bagi penyusunan Kurikulum 1968 yang dibuat untuk mengganti Kurikulum 1964.

Dalam Kabinet Ampera II Sanusi hanya menjabat selama setahun (Oktober 1967 - Juni 1968). Akan tetapi dalam masa jabatan yang singkat ini ia berusaha meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Memerintahkan Dirjen Pendidikan Tinggi (saat itu dijabat oleh Mashuri, S.H.) melengkapi fasilitas pendidikan IKIP dengan laboratorium untuk meningkatkan kualitas guru-guru yang lulus dari institusi ini.
- Menerima gagasan salah satu anggota DPR RI, Nyonya Walandouw, yang mengusulkan Undang-Undang/Peraturan Gaji Guru mengingat tugas dan tanggung jawab guru cukup besar.
- Memerintahkan pembentukan Panitia Bersama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Departemen Agama agar pelaksanaan pelajaran agama dapat diatur dengan lebih baik agar cita-cita membentuk manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berilmu dapat tercapai.
- Mengingatkan aparat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang mengelola Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) agar melaksakanan tugas sesuai dengan asas keadilan.
- Mendukung kehadiran organisasi mahasiswa karena organisasi semacam ini bermanfaat bagi perkembangan mahasiswa dan generasi muda.
- Menghentikan pelaksanaan proyek pengembangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang menyimpang dari peraturan yang berlaku dan menyebabkan departemen ini mengalami defisit.[26]

KARIER DI BIDANG POLITIK

Selain sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Sanusi juga dikenal sebagai tokoh Partai Nasional Indonesia yang pada tahun 1973 bersama Parkindo, partai Katolik, IPKI, dan Murba melebur menjadi bagian dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Pada tanggal 20 Februari 1975 ia diangkat menjadi Ketua Umum PDI, menggantikan Mohamad Isnaeni, atas perintah Presiden Soeharto kepada beberapa anggota PDI seperti Abdul Madjid dan Sabam Sirait.

Salah satu tugas yang dikerjakan oleh Sanusi pada tahun-tahun awal menjabat sebagai Ketua Umum PDI adalah mempersiapkan kongres I PDI di Istora Senayan pada pertengahan April tahun 1976. Berdasarkan wawancara dengan Sabam Sirait, ada lebih kurang 1.500 orang dari 26 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dari 260 cabang di seluruh Indonesia yang menghadiri kongres tersebut.

Sanusi mengundurkan diri dari partai pada tanggal 16 Oktober 1980 karena menurutnya intervensi pemerintah (Orde Baru) sudah terlalu mendalam. Sanusi berpendapat bahwa pembentukan partai dari atas tidak akan menjadikan PDI sebagai partai yang baik yang dapat membela dan memperjuangkan kepentingan rakyat dan hanya akan menjadi partai kerdil yang hanya untuk golongan tertentu serta tidak akan mengakar dengan massa.

Dalam bukunya yang terbit pada tahun 1984, *Selamatkan Demokrasi Berdasarkan Jiwa Proklamasi dan UUD 1945*, Sanusi menulis,

> "... hendaknya pemerintah menyadari, pembangunan politik dan pendidikan politik merupakan hal yang tidak mudah. Itulah sebabnya kita mengharapkan agar pemerintah tidak akan tergesa-gesa memaksakan keinginannya yang sekiranya akan menimbulkan keresahan masyarakat ...."

Setelah meninggalkan dunia politik, Sanusi menikah untuk kedua kalinya pada tahun 1987, saat umurnya 73 tahun. Ia menikah dengan Theodora Walandouw, anggota DPR yang mengusulkan peraturan untuk gaji guru ketika Sanusi menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Delapan tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 12 Desember 1995, Mohamad Sanusi Hardjadinata meninggal dunia pada umur 81 tahun.

ENDNOTES

1 Sumardi, S., dkk.,*Menteri-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Sejak Tahun 1966*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1984), hlm. 34.

2 *Ibid.,* hlm. 34-35.

3 *Ibid.,* hlm. 35.

4 *Ibid.*

5 *Ibid.,* hlm.36.

6 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 112 Tahun 1951.

7 *Ibid.*

8 https://dunia.tempo.co/read/657543/sanusi-hardjadinata-tuan-rumah-hajatan-kaa-1955 diakses pada 27 April 2018.

9 Departemen Penerangan RI,Himpunan Uraian Ketua Presidium dan Para Menutama Kabinet Ampera pada Rapat Kerdja Antara Pemerintah Pusat dan Daerah se-Indonesia, (Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1966) hlm. 63.

10 *Ibid.,* hlm. 64-65.

11 *Ibid.,* hlm. 67-68.

12 *Ibid.,* hlm. 68.

13 *Ibid.,* hlm.69.

14 *Ibid.,* hlm. 69-70.

15 Hp., Suradi, *Sejarah Pemikiran Pendidikan dan Kebudayaan*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1986), hlm. 155.

16 *Ibid.,* hlm. 155-156.

17 Koentjaraningrat, "The Indonesian Mentality and Development" dalam Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia Vol. 3 No. 2, ISEAS, 1988, hlm. 155.

18 Hp., Suradi, *op.cit.,* hlm. 155-157.

19 Hp., Suradi, *op.cit.,* hlm.158 dan Dewantara, 1977.

20 Hp., Suradi, *op.cit.,* hlm. 159.

21 *Ibid.,* hlm. 160.

22 *Ibid.*

23 *Ibid.,* hlm. 161.

24 *Ibid.,* hlm. 162.

25 *Ibid.,* hlm.162-163

26 Sumardi, S., dkk.,*op.cit.,* hlm. 37-39.

Mashuri Saleh

Masa Jabatan
6 Juni 1968 - 28 Maret 1973

Mashuri Saleh

Mashuri Saleh lahir di Juwana, Pati, Jawa Tengah, pada tanggal 19 Juli 1925. Ayahnya bernama Ki Saleh Kromoastro.[1] Ia memiliki tiga saudara kandung, yaitu Maskanan, seorang perwira tinggi yang bertugas di MBAD, sedangkan dua orang lainnya, Sutikno dan Sukarnin, merupakan pengusaha swasta.

Saat bersekolah, Mashuri Saleh sangat aktif berorganisasi, seperti Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI) dan Persatuan Pemuda Taman Siswa. Ia sering terpilih sebagai pengurus dan ketua organisasi yang diikutinya. Di Surakarta, saat Revolusi Kemerdekaan 1945-1949, Mashuri bergabung dalam Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI) Surakarta. Kemampuannya mengerahkan dan memimpin pelajar-pelajar di Surakarta membuatnya terpilih sebagai Komandan Batalion 55 Tentara Pelajar (TP) Surakarta.[2] Setelah masa revolusi kemerdekaan berakhir, Mashuri melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum (FH) Universitas Gadjah Mada (UGM). Sembari kuliah, ia aktif dalam kegiatan sosial di masyarakat dan pemerintahan. Dalam bidang sosial pendidikan Mashuri mengabdikan diri menjadi guru Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA). Saat Front Nasional Pembebasan Irian Barat (FNPIB) dibentuk pada tahun 1958 ia bergabung sebagai anggota Badan Pertimbangan. Pada tahun 1960-1965 ia menjadi Ketua Penasehat Penguasa Perang Pusat (Peperu).[3]

Tahun 1957 Mashuri lulus FH UGM dengan gelar Sarjana Hukum (S.H). Kiprahnya di bidang organisasi dan masyarakat pun semakin meluas. Ia menjadi pengacara sekaligus Ketua Pengurus Persatuan Sarjana Hukum Indonesia (Persahi). Selain berprofesi sebagai pengacara Mashuri aktif dalam organisasi dan gerakan politik. Sebagai alumnus UGM ia diminta menjadi Ketua Pusat Keluarga Alumni Gadjah Mada (KAGAMA).[4]

Mashuri mengakhiri masa lajang dengan menikahi seorang perempuan bernama Listinah, yang kemudian dikenal dengan sebutan Lies Mashuri. Lies lahir di Kalimantan Timur, namun besar dan bersekolah di Jawa. Dari pernikahan tersebut lahir enam orang anak, yaitu Ani Anggraini, Toto Wijayanto, Sri Pangastuti, Bambang Rusmanto, Djoko Riyadi Mashuri Saleh, dan Arinto Wahyuwigati. Toto Wijayanto menjadi Sarjana Ekonomi, sedangkan Bambang Rusmanto dan Djoko Riyadi Mashuri melanjutkan pendidikannya di Universitas Trisakti.[5]

Mashuri bekerja di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan kemudian menjabat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (Dirjen PTIP) selama dua periode berturut-turut tahun 1966-1967 dan 1967-1968. Kariernya semakin gemilang ketika diangkat oleh Presiden Soeharto menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam Kabinet Pembangunan I (1968-1973). Dalam Kabinet Pembangunan II (1973-1978) ia dipercaya sebagai Menteri Penerangan. Pada tahun 1977-1982 Mashuri menjadi Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat (MPR/DPR) dari Golkar dan kemudian diangkat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) (1982-1986).[6]

Mashuri menetap di Surakarta selama beberapa tahun seblum meninggal dunia di rumah kediaman keluarga pada 1 April 2001 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Bhakti, Jurug, Surakarta.[7]

PEMIKIRAN DAN KARYA

> "Pak Mashuri selalu realist dan sederhana, Pak Mashuri sederhana dalam bitjara dan berpakaian. Para mahasiswa dan pemuda sering mendjumpainya dikamar kerdjanja,

Perpisahan dengan Menteri Penerangan Mashuri Saleh, S.H. beserta nyonya di gedung RRI Jl. Merdeka Barat

(Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia)

bertjelana putih dan berkemedja putih. Para pemuda dan mahasiswa sering mendengar pidato dan tjeramahnja selalu berdasarkan pandangan realist. Realist dalam melantjarkan pendapat2nja tentang orde-lama dan orde-baru.

Dan jang terang Pak Mashuri tidak dapat dilepaskan dari perdjuangan orde-baru. Pak Mashuri tidak dapat dipisahkan dengan mahasiswa dan pemuda. Mahasiswa dan pemuda serta para peladjar jg mendjadi exponent dari angkatan 66. Suatu Angkatan jang mendobrak Kubu pertahanan orde-lama. Oleh sebab itu dimana-mana Pak Mashuri mendjelaskan seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia dipersiapkan utk mendjadi benteng2 orde baru!".[8]

Demikian *Minggu Pagi* edisi 15 Januari 1967 menggambarkan sosok Dirjen PTIP Mashuri Saleh. Ia salah seorang tokoh penting sekitar peristiwa G30S. Ia mengerahkan mahasiswa dan sangat mendukung Soeharto menggantikan Soekarno sebagai presiden.[9]

Sesudah peristiwa G30S Mahsuri, sebagai Ketua Persahi, bersama Harry Tjan menyusun memorandum kepada parlemen untuk mendakwa Soekarno yang pada saat itu tidak mau mundur dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia (RI) untuk kemudian digantikan oleh Soeharto sesuai ketetapan MPRS tanggal 5 Juli 1966. Rencana tersebut disetujui parlemen sehingga kemudian diselenggarakanlah Sidang Istimewa MPRS pada bulan Februari 1967.[10]

Mashuri duduk di kursi pemerintahan dan menjadi pendukung setia Pemerintah Orde Baru. Ia banyak mengutarakan pemikirannya melalui pidato, buku, kebijakan, dan sebagainya. Ia berusaha mengubah persepsi masyarakat, khususnya pelajar dan mahasiswa, tentang Orde Lama dan beralih mendukung Orde Baru. Hal tersebut tercermin dalam pernyataannya saat menjabat sebagai Dirjen PTIP. Ia berusaha menjadikan Perguruan Tinggi sebagai benteng Orde Baru.[11]

Bertemu dengan Presiden Soeharto pada Sidang Umum MPRS 1968. (Dari kiri) Harry Tjan, Ali Moertopo, Jusuf Wanandi, Sumiskum, Presiden Soeharto, dan Sofjan Wanandi, (membelakangi kamera) Mashuri, dan Soedjono Hoemardani

(Sumber: Repro buku *Shades of Grey: A Political Memoir of Modern Indonesia 1965-1889*)

"Diantara orang2 jang tertipu itu disebutkan orang2 jang tergolong didalam kaum kultus individu. Dengan tjara menarik dilukiskan proses daripada lahirnja kaum kultus individu itu. Mereka pada mulanja merasa tertipu, dan bisa djuga tidak suka kepada orang jang mempunjai itu. Tetapi makin lama, timbul simpatinja kepada orang jang mempunjai itu, hingga mereka mendjadi mentjintai dan memudjanja. Meskipun mereka terus ditipu, tetapi mereka merasa bahagia didalam keadaan tertipu itu. Bahkan kemudian mereka bersedia mati untuk membela orang jg menipunja itu.[12]

Dalam pidato di depan mahasiswa UGM bulan April 1967 di atas, sebagai seorang yang realis, Mashuri tampak sangat menentang pengkultusan terhadap diri seseorang. Ia menganggap bahwa hal tersebut hanya akan menyebabkan sikap yang tidak demokratis. Sikap seperti itu tercermin pada diri dua tokoh yang pada masanya dielu-elukan oleh para pendukungnya, yakni Soekarno dan Soeharto. Pada saat Soekarno tumbang, sebagai seorang Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, ia menyatakan sikap untuk tidak melihat Soekarno lebih dari para pendiri bangsa lainnya. Ia menambahkan, bahwa tanpa Soekarno, bangsa Indonesia akan tetap dapat berjuang.[13]

Sikapnya menentang pengkultusan seorang tokoh konsisten dilakukan, termasuk terhadap orang yang membawanya sukses masuk ke dalam pemerintahan: Presiden Soeharto. Pada tahun 1980-an terjadi pro dan kontra tentang pemberian gelar "Bapak Pembangunan" kepada Soeharto. Ketika itu ia menjadi Wakil Ketua DPR. Ia melihat suasana genting berkait dengan wacana pemberian gelar tersebut. Mashuri minta agar usulan pemberian gelar "Bapak Pembangunan" dihentikan sementara. Ia khawatir jika wacana tersebut diteruskan akan terjadi pengkultus individuan terhadap Soeharto, sama seperti pemujaan terhadap Soekarno secara berlebihan dalam bentuk berbagai penghargaan. Sayang pemikiran Mashuri Saleh kalah populer dengan masyarakat yang mengelu-elukan Soeharto—yang salah satunya Buya Hamka—agar diberikan gelar kehormatan sebagai "Bapak Pembangunan". Mereka beralasan bahwa pada masa kepemimpinan Soeharto-lah pembangunan baru dimulai. "Malah kita baru

Menteri P & K, Mashuri secara Simbolis menyerahkan buku-buku untuk tingkat SD kepada Gubernur Jawa Tengah Munadi di Semarang pada 27 Februari 1970

(Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia)

mengenal apa arti pembangunan itu," katanya. Karena desakan yang sangat kuat MPR mengangkat Soeharto sebagai "Bapak Pembangunan Republik Indonesia" melalui Tap MPR No V tahun 1983.[14]

Mashuri juga menuangkan pemikirannya ke dalam buku, baik tentang pendidikan maupun tentang politik. Saat bergelut dalam bidang pendidikan ia menulis buku *Masalah-masalah yang Melandasi Pembaruan Pendidikan* dan *Kebijaksanaan dan Langkah-langkah Pembaharuan Pendidikan.* Kedua buku tersebut diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1973.[15] Ia juga menulis tiga buku saat menjabat sebagai Menteri Penerangan, yaitu *Pesan-pesan Pemilu Untuk Pembangunan di Masa Depan: Retrospek dan Prospek: Kuliah*, *Catatan Peristiwa Sejarah Bangsaku Tahun 1945-1950*, dan *Demokrasi Pancasila dan Pertumbuhannya.*

KEBIJAKAN DALAM DUNIA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kiprah Mashuri sebagai pejabat di lingkungan pendidikan dimulai pada tahun 1966-1967 saat menjabat Dirjen PTIP dan yang dijabat kembali pada 1967-1968. Keputusan pertama yang dikeluarkannya sebagai Dirjen PTIP pada tahun 1966 ialah menetapkan "Kebebasan Ilmiah" dan "Kebebasan Mimbar" bagi perguruan tinggi. Keputusan tersebut bertentangan dengan kehendak Presiden Soekarno. "Kebebasan Ilmiah" dan "Kebebasan Mimbar" mendorong diadakannya suatu simposium di Universitas Indonesia, yang disebut dengan "Simposium Angkatan 66 Menjelajahi Trace Baru". Simposium tersebut melahirkan revolusi yang bertujuan menegakkan keadilan dan kebenaran, demokrasi, terlaksananya Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, terlaksanannya *the rule of law*, dan terbentuknya *the clean government* 'pemerintahan yang bersih'.[16]

Sebagai Dirjen PTIP Mashuri Saleh hadir dalam acara tersebut. Ia juga menyampaikan gagasannya dalam simposium tersebut. Tampak pula para tamu undangan lain, seperti Prof. Dr. Ir. R.M. Soemantri Brojonegoro beserta istri, dr. Nani Soemantri, serta Moh. Hatta beserta istri, Racmhi Hatta.

Mashuri juga sempat mengemukakan gagasan yang sensasional, yaitu menghapus gelar kesarjanaan, kecuali doktor dan profesor. Ide tersebut muncul karena ia beranggapan bahwa kualitas sarjana di Indonesia pada saat itu sangat rendah. Rencana kebijakan tersebut menuai pro dan kontra dari para mahasiswa. Sebagian mahasiswa yang baru akan lulus menolak rencana tersebut, meskipun ada juga yang menerimanya.[17] Pro dan kontra mahasiswa terhadap Mahsuri pun muncul dalam koran *Mercusuar.* Ikatan Sarjana Republik Indonesia (ISRI)—organisasi sarjana di bawah Partai Nasional (PNI)—Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado dianggap sebagai provokator oleh KAMI karena menuntut

Pembukaan kejuaraan team golf amatir Asteng XI oleh Menteri P & K Mashuri Saleh, SH di lapangan golf Rawamangun Sumber foto: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

(Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia)

agar Mashuri dipecat dari jabatannya. KAMI mendesak Rektor Unsrat Manado melakukan pembersihan kampus dari hal-hal yang berkaitan dengan Orde Lama.[18]

Mashuri juga mencanangkan pembaharuan dalam bidang pendidikan. Untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi, ia memberlakukan persyaratan bagi universitas. Universitas yang dianggap tidak memenuhi persyaratan akan ditutup. Ia membagi universitas menjadi tiga jenis, yaitu (1) universitas induk, (2) universitas biasa, dan *junior colege* dengan waktu belajar tiga tahun. Universitas induk antara lain UGM, UI, Institut Pertanian Bogor (IPB), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Padjadjaran (Unpad), Universitas Hasanuddin (Unhas), Institut Keguruan Ilmu Pendidikan (IKIP) Jakarta (sekarang Universitas Negeri Jakarta/UNJ), IKIP Bandung (sekarang Universitas Pendidikan Indonesia/UPI), dan IKIP Malang (sekarang Universitas Negeri Malang/UNM).[19]

Pada bulan Juni 1968 Mashuri diangkat Presiden Soeharto menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) dalam Kabinet Pembangunan I yang berlangsung sampai bulan April 1972.[20] Selama menjabat sebagai Menteri P dan K Mashuri mengeluarkan banyak kebijakan, baik di dalam maupun di luar negeri. Ia percaya bahwa pendidikan Indonesia sangat membutuhkan pemikiran ulang karena pendidikan yang ada pada saat itu masih didasarkan pada sistem Eropa, sehingga tidak cocok untuk Indonesia.

Untuk melaksanakan program tersebut Mashuri melakukan berbagai kerjasama dengan pihak luar negeri, salah satunya Ford Foundation. Ia melakukan pendekatan dan pertemuan dengan Ford Foundation pada tahun 1968. Ia juga meminta dukungan Dr. Kartomo, seorang ekonom Amerika yang terlatih, serta para intelektual lain. Ia kemudian menghubungi Frank Miller, perwakilan Ford Foundation di Jakarta, agar memberi bantuan atas rencana yang digagasnya. Atas usaha tersebut pada 1969 didirikanlah kantor staf Ford di Jakarta.[21] Salah satu bentuk kerjasama dengan Ford Foundation dalam bidang pendidikan ialah bantuan kepada panitia Seminar Sejarah Nasional yang kedua tahun 1970. Panitia yang diketuai oleh sejarawan UGM Sartono Kartodirjo tersebut disahkan oleh Mashuri dan bertugas menyusun buku sejarah nasional. Mereka dikirim ke Amerika dan Belanda untuk melakukan studi pustaka. Mereka pun resmi berhubungan dengan Ford Foundation pada tahun 1971.[22]

Mashuri melakukan banyak perubahan dan berusaha membangun Sistem Pendidikan Pembangunan, sesuai dengan nama kabinet pada saat itu. Sistem Pendidikan Pembangunan menggunakan asas *Life-Long Education*, yang di dalamnya berarti pendidikan yang diberikan seumur hidup yang membuat lingkungan pendidikan keluarga, sekolah, dan masyarakat menjadi satu keseluruhan lingkungan pendidikan untuk menjamin proses pendidikan yang sesuai dengan harapan. Jenjang pendidikan pun dibagi menjadi Taman

Mashuri Saleh, S.H. selaku Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi sedang menyampaikan gagasannya terkait simposium di UI, "Simposium Angkatan 66 Menjelajahi Trace Baru"

(Sumber: Arsip Nasional Republik Indonesia)

Suasana dalam acara simposium UI, "Simposium Angkatan 66 Menjelajahi Trace Baru". Terdepan tampak Prof. Dr. Ir. R. M. Soemantri Brojonegoro, Moh. Hatta, Rachmi Hatta, dr. Nani Soemantri, Mashuri Saleh

(Sumber: Arsip Nasional Republik Indonesia)

Kanak-kanak (2 tahun), Sekolah Dasar (8 tahun), Sekolah Lanjutan (4 tahun), Sarjana Muda (4 tahun), dan Sarjana (2 tahun). Sistem pendidikan yang dicanangkan oleh Mashuri tersebut tidak hanya menyasar pada kecerdasan intelektual anak didik, namun juga bagaimana anak didik terlibat dalam pembangunan dan masyarakat, baik dalam bidang sosial, ekonomi, lingkungan, maupun bidang yang lain.[23]

Usaha Mashuri melakukan pembaharuan pendidikan cukup berhasil. Ia membuka tiga Sekolah Tinggi Menengah (STM) Pembangunan di Jakarta, Semarang, dan Yogyakarta dalam kurun waktu 1971-1971. Dalam kurun waktu 1972-1973 ia berhasil menyusun kurikulum dan metode mengajar untuk semua mata pelajaran di tingkat Sekolah Dasar, silabus dan program kurikulum Sekolah Menengah Pembangunan, serta kurikulum untuk 17 fakultas atau jurusan di Perguruan Tinggi. Buku pelajaran untuk tingkat Sekolah Dasar pun berhasil dicetak dalam Proyek Paket Buku Departemen P dan K sebanyak 12.431.000 buah. Buku-buku tersebut dibagikan secara cuma-cuma kepada sekolah dan madrasah baik negeri maupun swasta.

Hal lain yang dilakukan Mashuri dalam bidang pendidikan ialah penghapusan ujian negara dan ijazah serta menggantikannya dengan ujian sekolah dan Surat Tanda Tamat Belajar.

> "Udjian dan idjazah negara merupakan institut jang menjebabkan timbulnja djarak antara sekolah dengan masjarakat. Dengan adanja institut itu hubungan sekolah dengan masjarakat mendjadi tidak langsung.
>
> Sekolah terasing dari kehidupan masjarakat, karena tugas sekolah berubah mendjadi se-mata2 menjiapkan anak untuk dapat lulus udjian dan memiliki idjazah negara. Apa bila udjian dan idjazah negara itu diganti dengan ujdian sekolah, maka djarak antara sekolah dengan masjarakat kita tiadakan, dan terdjadilah dialog langsung antara sekolah dengan masjarakat."[24]

Perubahan yang dilakukan oleh Mashuri mendapat sambutan hangat dari perguruan Taman Siswa. Sayang usaha tersebut tidak dilanjutkan oleh menteri pendidikan setelahnya, Prof. Dr. Ir. R.M. Soemantri Brojonegoro.

Departemen P & K - serah terima Jabatan Menteri P & K dari Mashuri Saleh S.H. kepada Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro

(Sumber foto: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia)

Selain dalam bidang pendidikan, Mashuri melakukan banyak perubahan dalam bidang organisasi, kebudayaan, dan olahraga. Melalui Keppres No. 39 athun 1969 Departemen P dan K menyederhanakan lima Direktorat Jenderal menjadi tiga Direktorat Jenderal. Ia membentuk Inspektorat Jenderal serta Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan melalui Keppres No. 48 dan Keppres No.84 tahun 1969.[25] Pada tahun 1970 ia mengeluarkan Peraturan Menteri No. 066/1970 tanggal 9 April 1970 yang berisi penyerahan wewenang di bidang tata-usaha kepegawaian kepada pejabat-pejabat tertentu dalam lingkungan Departemen P dan K dan dilengkapi dengan undang-undang, peraturan pemerintah, serta peraturan-peraturan lain dalam bidang kepegawaian.[26]

Dalam bidang kebudayaan, Mashuri melakukan banyak pembaharuan, baik yang berkait di dalam maupun yang berkait dengan luar negeri. Di dalam negeri ia mengesahkan penggunaan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) menggantikan Ejaan Soewandi pada tanggal 23 Mei 1972. Ia menandai pergantian ejaan tersebut dengan mencopot nama jalan yang melintas di depan kantor Departemen P dan K: dari Djl. Tjilatjap menjadi Jl. Cilacap.[27] Kebijakan luar negeri dilakukan terutama kerjasama dengan Malaysia dan negara Association of Southeast Nations (ASEAN) lain. Kerjasama dengan Malaysia sebelumnya terjalin pada saat Prof. Prijono menjabat sebagai Menteri Pendidikan tahun 1957,[28] namun terputus akibat kondisi politik yang berubah pasca Inggris berinisiatif menjadikan Kalimantan Utara sebagai bagian dari negara federal Malaysia. Di bawah pemerintahan Presiden Soekarno, Indonesia menyatakan perang dengan Malaysia karena Soekarno tidak rela Kalimantan Utara menjadi negara boneka Inggris. Sekitar tahun 1965 kerja sama antara Indonesia dan Malaysia terhenti, termasuk kerjasama pengiriman guru dan kebahasaan.

Sesudah peristiwa G30S pemerintahan Presiden Soekarno tumbang. Soeharto yang memegang kekuasaan pada saat itu membangun situasi harmoni di antara negara-negara ASEAN. Hubungan kerjasama Indonesia dengan Malaysia pun diperbaiki. Pada tanggal 7 September 1966 diadakan pertemuan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia, termasuk menghidupkan kembali kerja sama bidang kebahasaan. Pada tanggal 27 Juni 1967 ditandatangani kesepakatan di bidang ejaan dengan melahirkan Ejaan Melayu-Indonesia (Ejaan Melindo). Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Ny. S.W. Rujiati Mulyadi dari Indonesia dan Tuan Syed Nasir bin Ismail dari Malaysia. Kerjasama tersebut secara resmi diakui setelah dilakukan penandatanganan Komunike Bersama oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Mashuri Saleh, S.H. dan Menteri Pelajaran Malaysia Encik Hussein Onn pada tanggal 23 Mei 1972 di Jakarta.

Sebagai tindak lanjut kerjasama tersebut pada 26-29 Desember 1972 dilaksanakan sidang pertama kebahasaan di Malaysia. Salah satu keputusan sidang adalah kesepakatan membentuk wadah yang

dapat menaungi kegiatan kebahasaan di antara kedua negara, yang kemudian disebut Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia (MBIM). Sebagai garis panduan kegiatan dibuatlah Piagam Kerja Sama Kebahasaan yang ditandatangani oleh Dr. Amran Halim selaku wakil Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia dan Datuk Haji Sujak bin Rahiman selaku wakil Jawatan Kuasa Tetap Bahasa Malaysia.[29]

Selain kerjasama dalam bidang kebahasaan, Indonesia pun kembali menjalin kerjasama dalam bidang pendidikan dengan Malaysia. Soeharto ingin menjadikan pendidikan nasional sebagai *sakaguru* utama dalam negara Orde Baru. Ide tersebut kemudian membuat Soeharto memanggil Mashuri ke Cendana pada Kamis 7 Mei 1970. Mereka membicarakan ide tentang kemungkinan mengirim kembali guru-guru ke Malaysia.[30]

Selain dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, Mashuri juga melakukan kerjasama dengan Negara ASEAN lain dalam bidang olahraga. Pada tahun 1971 diselenggarakan kejuaraan tim Golf Amatir Asteng XI. Mashuri hadir dalam pembukaan kejuaraan tersebut.

Masa jabatan Mashuri Saleh sebagai Menteri P dan K berakhir pada tahun 1973. Jabatan tersebut kemudian dilanjutkan oleh Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro. Mashuri duduk sebagai Menteri Penerangan pada tahun 1973-1978 dan mewakili Golkar sebagai Wakil Ketua DPR/MPR pada tahun 1977-1982. Selanjutnya ia diminta menjadi anggota DPA pada tahun 1982-1986.

ENDNOTES

1 NN, "Mengenal Menteri Pendidikan Dari Masa ke Masa" dalamhttp://sejarahri.com/mengenal-menteri-pendidikan-dari-masa-ke-masa/ diakses pada 3 Mei 2018, pukul 12.13 WIB.

2 S. Sumardi, dkk.,*Menteri-menteri Pendidikan dan Kebudayaan Sejak Tahun 1966,* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1984), hlm. 40-41.

3 *ibid.,* hlm. 41.

4 *ibid.,* hlm. 40-41.

5 *ibid.,* hlm. 40.

6 NN, "Biografi Mashuri Saleh", dalam http://sejarah-bangsa-kita.blogspot.co.id/2011/10/biografi-Mashuri Saleh-saleh.html diakses pada 3 Mei 2018, pukul 12.45 WIB.

7 NN,"Biografi Mashuri Saleh", dalam http://sejarah-bangsa-kita.blogspot.co.id/2011/10/biografi-Mashuri Saleh-saleh.html diakses pada 3 Mei 2018, pukul 12.45 WIB)

8 NN, "Apa dan Siapa: Mashuri S.H.", dalam *Minggu Pagi,* 15 Januari 1967, hlm. 3.

9 Jusuf Winandi, *Shades of Grey: A Political Memoir of Modern Indonesia 1965-1889,* (Jakarta-Singapore: Equinox Publishing, 2012), hlm. 103.

10 Jusuf Winandi, *Shades of Grey: A Political Memoir of Modern Indonesia 1965-1889,* (Jakarta-Singapore: Equinox Publishing, 2012), hlm. 71.

11 NN, "Apa dan Siapa: Mashuri S.H.", dalam *Minggu Pagi*, 15 Januari 1967, hlm.4.

12 NN, "Tertipu Jang Harus Dikasihani, dalam *Mertjusuar*: Sabtu, 22 April 1967, hlm. 1.

13 NN, "Apa dan Siapa: Mashuri S.H.", dalam *Minggu Pagi*, 15 Januari 1967, hlm. 4.

14 Achmad, **"**Kisah awal Soeharto dapat penghargaan Bapak Pembangunan", dalam https://www.merdeka.com/peristiwa/kisah-awal-soeharto-dapat-penghargaan-bapak-pembangunan.html, diakses pada 22 Mei 2018, pukul 12.51 WIB.

15 Mashuri Saleh, *Masalah-masalah yang Melandasi Pembaruan Pendidikan*, Indonesia. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Humas Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1973.

16 S. Sumardi, dkk.,*op.cit.,* hlm. 42.

17 NN, "Mashuri S.H.", dalam *Minggu Pagi,* 15 Januari 1967, hlm. 3.

18 Annt, "KAMI desak: Bersihkan Jg Menentang Mashuri S.H.", dalam *Mercusuar,* No. 14 Th 11, 21 April 1967.

19 Ant, "Dirjen PTIP Mashuri SH: Hanja Ada 3 Djenis Universitas, Universitas jang tak penuhi sjarat akan ditutup", dalam *Mercusuar,* No. 36 Th.11, 23 Mei 1967.

20 S. Sumardi, dkk.,*op.cit.,* hlm. 41.

21 Noeline Alcorn, *To the Fullest Extent of His Powers: C.E. Beeby's Life in Education.* (Singapore: South Wind Production, 1999), hlm. 311.

22 Sartono Kartodirjo, dalam Goenwan Mohamad,*Celebrating Indonesia: Fifty Years with the Ford Foundation 1953-2003,* (Equinox Publishing (Asia), 2003), hlm. 123.

23 S.Sumardi, dkk., *op.cit.,* hlm. 42-43.

24 Mashuri, "Penggantian Udjian dan Idjazah Negara, dalam *Pusara,* Mei 1969, hlm. 155.

25 S.Sumadi, dkk., *op.cit.,* hlm. 47.

26 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Biro Personalia, 1972.

27 http://sejarahri.com/mengenal-menteri-pendidikan-dari-masa-ke-masa/ diakses pada 3 Mei 2018, pukul 12.13 WIB.

28 Anton Dwisunu Hanung Nugrahanto, "Kisah Mashuri dan Pengiriman Guru ke Malaysia", dalam https://www.kompasiana.com/anton_djakarta/kisah-Mashuri Saleh-dan-pengiriman-guru-ke-malaysia_55103f07813311a839bc625ddiakses pada 3 Mei 2018, pukul 13.10 WIB.

29 http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/mabbim, diakses pada 22 Mei 2018, pukul 10.15 WIB.

30 Anton Dwisunu Hanung Nugrahanto, "Kisah Mashuri dan Pengiriman Guru ke Malaysia", dalam https://www.kompasiana.com/anton_djakarta/kisah-Mashuri Saleh-dan-pengiriman-guru-ke-malaysia_55103f07813311a839bc625ddiakses pada 3 Mei 2018, pukul 13.10 WIB.

Soemantri Brojonegoro

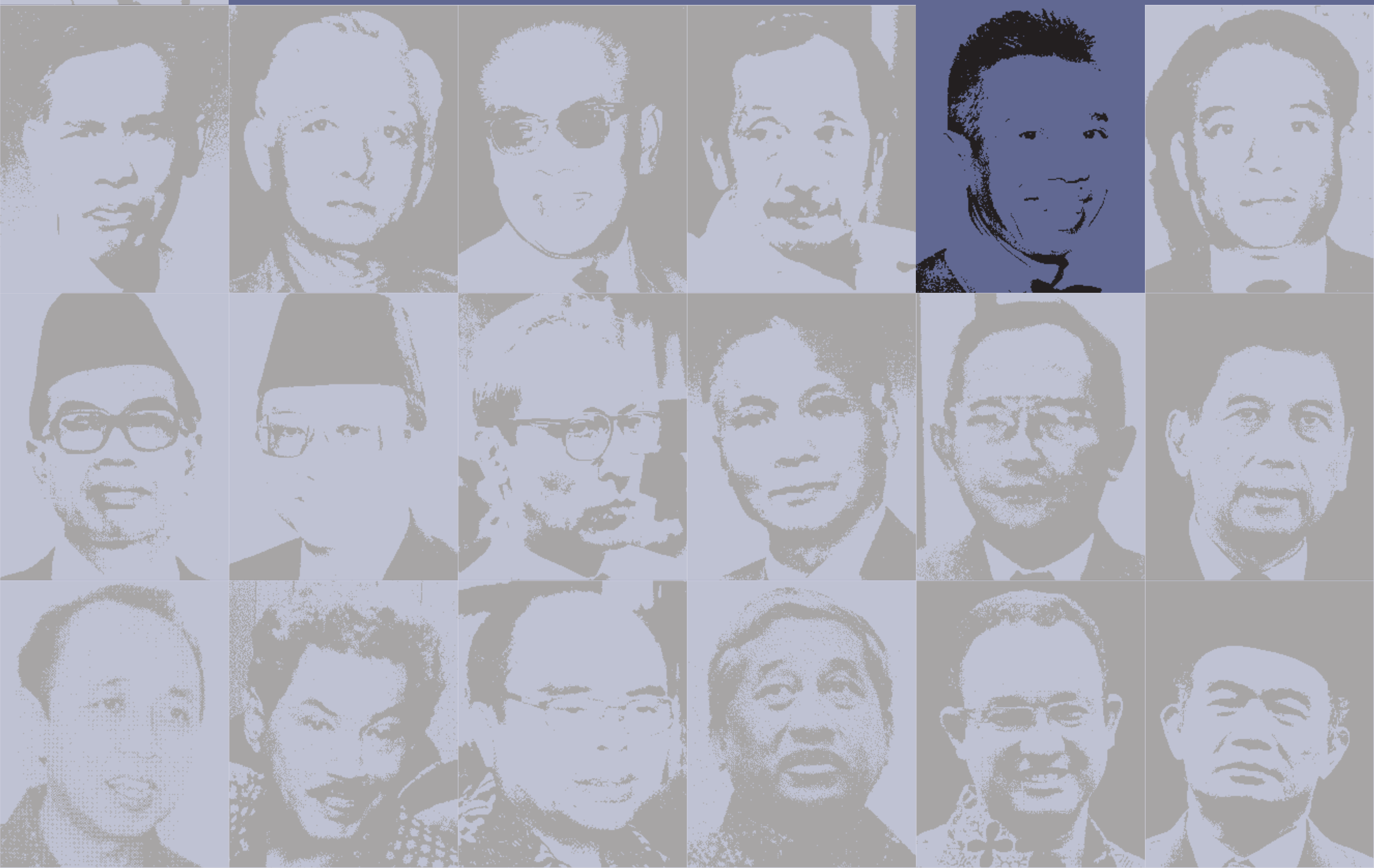

Masa Jabatan
28 Maret – 18 Desember 1973

Soemantri Brojonegoro

RIWAYAT PENDIDIKAN

Raden Mas Soemantri Brodjonegoro dilahirkan pada tanggal 3 Juni 1926 di Semarang, Jawa Tengah, dari keluarga berpendidikan. Ayahnya, Raden Soetedjo Brodjonegoro, seorang guru Hollandsch Inlandsche School (HIS) di Semarang, kemudian diangkat menjadi Kepala Sekolah HIS di Sala. Di samping dikenal sebagai pendidik Soetedjo Brodjonegoro juga dikenal sebagai tokoh pergerakan dan aktivis Partai Indonesia Raya (Parindra).[1] Kegiatan Soetedjo di Parindra berlanjut ketika terpilih sebagai Ketua Departemen Pendidikan. Selepas aktif di Parindra ia lebih banyak bergelut di dunia akademik dengan capaian akhir sebagai Guru Besar Fakultas Sastra dan Kebudayaan Universitas Gadjah Mada. Barangkali karena seorang pendidik Soetedjo mendorong anak-anaknya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang tinggi.

Soemantri mengawali pendidikan pada usia tujuh tahun. Ia masuk ke HIS Semarang pada tahun 1933. Ia tergolong murid cemerlang, terutama di bidang pelajaran matematika dan fisika. Setamat dari HIS ia melanjutkan pendidikan di Hogere Burgerschool (HBS) Semarang, namun ketika ingin menyelesaikan pendidikan pada tahun 1942 terjadi perubahan besar dalam pemerintahan. Kekuasaan pemerintah Hindia Belanda diambil alih oleh pemerintahan militer Jepang. Kegiatan Soemantri tidak banyak diketahui sejak awal hingga akhir pendudukan Jepang.

Pada tahun 1945 ia berhasil menyelesaikan pendidikan tingkat SMA Bagian B di Yogyakarta. Sesuai dengan kemampuan dan bakat yang dimilikinya ia melanjutkan ke Jurusan Chemical Engineering Technische Hoogere School (THS), yang sekarang dikenal dengan Institut Teknologi Bandung (ITB). Tidak lama duduk di bangku kuliah terjadi revolusi fisik mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari rongrongan kolonial Belanda yang ingin menguasai Indoensia kembali. Soemantri terjun ke medan juang.

Soemantri meninggalkan Bandung dan pergi ke Yogyakarta. Ia bergabung dalam Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP) pada tahun 1947. Setahun kemudian ia bertugas di Brigade XVII dengan pangkat kapten. Pada masa revolusi kemerdekaan tersebut ia pernah menjadi ajudan Kolonel A.H. Nasution yang ketika itu menjadi Panglima Komando Jawa. Setelah perang kemerdekaan berakhir ia mendapat kesempatan melanjutkan pelajaran di Technische Hooge School Delft, Belanda, sebagai mahasiswa tugas belajar dari Angkatan Perang Republik Indonesia (RI).

Semasa kuliah di Belanda Soemantri memelopori berdirinya Persatuan Pelajar Indonesia (PPI), yang anggotanya tersebar di seluruh Eropa. Dalam perkumpulan tersebut Soemantri terpilih sebagai ketua dan menjadi ketua pertama organisasi itu. Dari Technische Hooge School Delft ia memperoleh gelar insinyur (1955) dan gelar doktor (1958) dengan judul disertasi *Goschromatography*.[2]

KARIER

Setelah menyelesaikan pendidikan ia kembali ke tanah air. Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam Universitas Indonesia (UI) langsung menariknya sebagai staf pengajar. Tidak berselang lama ia diangkat sebagai Guru Besar Teknik Perminyakan di Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam UI. Di sinilah awal kiprahnya mempersiapkan Institut Teknologi Bandung (ITB).

---

1 S. Sumardi, dkk, *Menteri-menteri Pendidikan dan Kebudayaan Sejak Tahun 1966* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, 1984).

2 S. Sumardi, dkk, *ibid.*

Atas

Rektor UI Prof. Dr. Ir. Sumantri Brodjonegoro melantik para mahasiswa baru

(Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia)

Tengah

Upacara pembukaan kembali kuliah Univ. Indonesia oleh Prof. Sumantri Brodjonegoro pada tanggal 4 April 1963

(Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia)

Bawah

Menteri Luar Negeri Adam Malik, Menteri Pertambangan Ir. Sumantri Brodjonegoro dan Menteri P.U.T.L. Ir. Sutami sedang mengisi daftar M. P. S.

(Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia)

Upacara penandatanganan naskah garis batas dasar laut Indonesia-Australia yang dilakukan oleh Menteri Sumantri Brodjonegoro untuk RI dan Dubes Nigel Bowen untuk Australia tempat Departemen Pertambangan tanggal 9 Oktober 1972

(Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia)

Dari lembaran sejarah ITB diketahui bahwa Soemantri Brodjonegoro termasuk dalam Panitia Persiapan Pendirian "Institut Teknologi" di Kota Bandung dan diangkat sebagai Panitera Presidium ITB sejak ITB diresmikan tanggal 2 Maret 1959 hingga tanggal 1 November 1959. Jenjang kariernya di UI pun tergolong cemerlang. Ia menjadi Rektor ke-6 UI selama dua periode, yakni tahun 1964-1968 dan tahun 1968-1973.

Pada masa Orde Baru ia ditunjuk Presiden Soeharto selaku Menteri Pertambangan dalam Kabinet Ampera tahun 1967, dan kembali terpilih sebagai Menteri Pertambangan dalam Kabinet Pembangunan I dan Kabinet Pembangunan II serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 28 Maret 1973 hingga akhir hayatnya.

Soemantri Brodjonegoro meninggal dunia di Jakarta pada 18 Desember 1973 dalam usia 47 tahun dan dikuburkan di Kalibata dengan inspektur upacara Wakil Presiden Hamengkubuwono. Namanya diabadikan sebagai nama gunung di Pegunungan Sudirman, Provinsi Papua, yakni Puncak Sumantri Brojonegoro, nama stadion olahraga remaja di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, yakni Stadion Soemantri Brodjonegoro, serta nama jalan di lingkungan Kampus UI Depok.

Masa kepemimpinannya di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang singkat menyebabkan tidak banyak jejak ide dan gagasannya dalam bidang pendidikan di kementerian tersebut.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Ir. Sumantri menegaskan tugas-tugas penting yang akan dilakukan adalah meningkatkan pendidikan, peningkatan perguruan tinggi, pembinaan generasi muda, dan pembinaan kebudayaan nasional

(Sumber: *Kompas* pada Senin, 2 April 1973)

Prof. Soemantri Akan Lepaskan Jabatan Rektor U.I.

Jakarta, Kompas.

Menteri P & K Prof. Dr. Ir. Sumantri Brodjonegoro meng harapkan kerjasama semua karyawan dilingkungan depar temennya. Demikian diutara kannya dalam serahterima ja batan yang dilakukan di ge-dung SDC Rawamangun Ja-karta Sabtu yang lalu.

Tanpa menyinggung pem-baruan sistim pendidikan yang kini tengah berjalan, Menteri menegaskan bahwa tugas2 penting yang akan di-lakukan adalah meningkat-kan pendidikan, peningkatan peranan perguruan tinggi, pembinaan generasi muda dan pembinaan kebudayaan nasional.

Menteri Sumantri mengata kan, bahwa jabatan rektor UI yang dipangkunya sejak tahun 1964 akan dilepaskan. Siapa penggantinya, ia serah kan kepada Presiden. Ketika pers mengutarakan nama Prof. Dr. Slamet Iman Santo so dan Prof. Dr. Mahar Mar-djono, Menteri hanya menga takan: „Pengangkatan rektor adalah wewenang Presiden."

Tokoh2 pendidikan yang di hubungi „Kompas" menguta rakan keyakinannya tentang kontinuitas pendidikan. Moh. Said, tokoh Taman Siswa, mengatakan: „Saya kira Mas Sumantri akan meneruskan gagasan yang sudah ada, ten tunya ada perubahan2, tapi tidak fundamentil." (ams)

Teuku Mohammad Syarif Thayeb

Masa Jabatan
22 Januari 1974 – 29 Maret 1978

Teuku Mohammad Syarif Thayeb

MASA KECIL DAN PENDIDIKAN

Teuku Mohammad Syarif Thayeb kelahiran Peureulak, Aceh, tanggal 7 Agustus 1920, dari keluarga bangsawan dan memperoleh gelar "teuku" dari ayahnya, Teuku Cik Muhammad Thayeb, seorang *uleebalang* 'hulubalang' di Peureulak. Sebagaimana diketahui bahwa, dalam lembaran sejarah Aceh, kawasan kelahiran Syarif Thayeb merupakan bekas kerajaan yang pernah jaya sebelum kedatangan kolonialis Belanda.[1]

Catatan mengenai masa pendidikannya hanya tercatat ketika ia belajar di Geneeskundige Hogeschool di Aceh tahun 1933.[2] Pendidikan di sekolah lanjutan kedokteran masa kolonial Belanda itu ia selesaikan pada tahun 1938. Sejak sekolah di Geneeskundige Hogeschool, ia aktif dalam gerakan politik untuk Indonesia merdeka, namun masih secara sembunyi-sembunyi (gerakan bawah tanah). Hal ini sangat dimungkinkan karena Aceh pada masa itu merupakan ladang yang subur bagi tumbuhnya gerakan penentangan terhadap kolonialis Belanda. Oleh karena saat itu penjajah menjalankan politik opresif dan polisi mata-matanya (Politieke Inlichtingen Dienst-PID) bertebaran di mana-mana, maka kegiatan politik secara tidak nyata merupakan upaya yang paling mungkin dilakukan Syarif Thayeb muda. Beralihnya kekuasaan Hindia Belanda ke tangan tentara pendudukan Jepang tahun 1942 tidak membuat Syarif Thayeb mundur dari dunia pergerakan. Ia tetap aktif mengupayakan kebebasan Indonesia dari penjajah sehingga beberapa kali ditangkap militer Jepang. Tuduhan yang ditujukan kepadanya adalah ia dianggap berbahaya dan menyebar ujaran kebencian terhadap Jepang.

Pada masa pendudukan Jepang, Syarif Thayeb melanjutkan pendidikan di Ika Dai Gaku Jakarta (Sekolah Tinggi Kedokteran Jakarta). Karena tidak puas dengan pendidikannya, Syarif Thayeb melanjutkan studi di Harvard Medical School, Amerika Serikat, tahun 1955. Pendidikan di perguruan tinggi bergengsi di Boston itu dirampungkannya pada tahun 1957. Ia kemudian melanjutkan kuliah di Pediatrics School of Medicine di Philadelphia.

Pengakuan terhadap kiprah ilmu dan minat akademisnya tidak hanya diperoleh di ujung kuliah yang dijalaninya, tetapi juga diperoleh setelah aktif mendarmabaktikan ilmunya di perguruan tinggi dan sebagai pejabat publik. Setamat kuliah dan setelah kembali aktif di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai Kepala Bank dan Laboratorium Darah Angkatan Darat, Syarif Thayeb dipercayai menjadi Kepala Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Cipto Mangunkusumo di Jakarta. Ia pun menjadi dosen pada Fakultas Kedokteran Bagian Anak Universitas Indonesia (UI) dan kemudian menjadi presiden universitas tersebut, dan setelah itu menjadi Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP). Minat dan pengabdiannya yang tinggi pada dunia akademis khususnya dan dunia pendidikan pada umumnya mengantarnya menjadi penerima Doktor Honoris Causa (Dr. HC.) untuk bidang pendidikan yang dianugerahkan oleh Mindanao University Filipina tahun 1967. Delapan tahun kemudian ia kembali memperoleh Doktor Honoris Causa dari The Philipines Womens University Manila.[3] Tidak hanya menyibukkan diri dalam pendidikan umum yang berhubungan dengan dunia kedokteran, ia juga tercatat pernah mengikuti pendidikan dalam bidang kemiliteran, yakni pada Sekolah Staf Angkatan Darat (SESKOAD) di Bandung tahun 1970.

KARIER

Dunia militer memang menjadi bagian dari sejarah hidup Syarif Thayeb. Kegiatannya dalam gerakan bawah tanah guna pembebasan Indonesia dari cengkeraman kolonialis (Belanda dan Jepang) menyebabkan ia memilih masuk dunia militer pada awal kemerdekaan Republik Indonesia (RI). Ia memasuki kancah

dunia militer melalui jalur Tentara Keamaan Rakyat (TKR). Latar belakang pendidikan kedokteran membawa dirinya ditempatkan sebagai tim medis sejak keterlibatannya dalam perang mempertahankan kemerdekaan. Medan perjuangannya sebagai dokter militer ini menempatkannya di Front Surabaya. Ia juga ikut dalam penumpasan pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) Madiun tahun 1948 dan penumpasan upaya pendirian Republik Maluku Selatan (RMS) tahun 1951. Sesudah pengakuan kedaulatan hingga tahun 1955 ia ditugaskan sebagai dokter militer di Komando Militer Kota Besar Djakarta Raja (KMKB-DR) Divisi Siliwangi.

Seperti disebut di atas, tahun 1955 Syarif Thayeb melanjutkan pendidikan ke Amerika Serikat. Berturut-turut ia mengecap pendidikan di Sekolah Kesehatan Harvard University di Boston (1955-1957) dan Pediatrics School of Medicine Temple University di California (1957-1959). Setamat dari Pediatrics School of Medicine ia kembali ke tanah air dan bekerja kembali di lingkungan militer. Ia diangkat sebagai Kepala Bank dan Laboratorium Darah Angkatan Darat di Jakarta tahun sejak 1959 hingga 1961.

Pada tahun yang sama Syarif Thayeb menjabat Kepala Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Cipto Mangunkusumo sekaligus dosen senior di Fakultas Kedokteran bagian Anak UI. Kariernya terus meroket. Pada tahun 1962 dia ditunjuk menjadi Presiden UI dan pada akhir tahun 1964, ketika Bung Karno membentuk Kabinet Dwikora, ia diangkat sebagai Menteri PTIP hingga tahun 1966.

Memasuki masa transisi dari Demokrasi Terpimpin ke Orde Baru, ia terpilih sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR) tahun 1966-1971. Setelah melepas kesibukannya di DPRGR ia ditunjuk sebagai Duta Besar untuk Amerika Serikat dan Brazil yang berkedudukan di Washington dari tahun 1971 sampai tahun 1974. Karier Syarif Thayeb di dunia birokrasi terus berlanjut ketika Presiden Soeharto melantiknya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) tanggal 22 Januari 1974 menggantikan Soemantri Brodjonegoro. Sejak tahun 1976 sampai 1988, setelah selesai menjabat Menteri P dan K, beberapa kali ia memegang jabatan tertentu, antara lain sebagai anggota Badan Pelaksana UNESCO tahun 1976-1980, Chairman of SEAMEC Conference tahun 1977-1978, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) tahun 1978-1983 dan 1983-1988.[4]

PEMIKIRAN UNTUK PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Semasa menjabat Menteri Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan pada masa akhir Demokrasi Terpimpin, Syarif Thayeb menjadi salah seorang sponsor berdirinya Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). Sejak demonstrasi besar-besaran tahun 1966 ia bersuara lantang tentang kebebasan kampus. Ia mendefinisikan kebebasan akademis adalah kebebasan berpendapat serta penyampaian ilmu pengetahuan dan teknologi baik secara lisan maupun tertulis dalam beberapa forum yang biasa berlaku di Perguruan Tinggi.

Ketika mengemban jabatan sebagai Menteri P dan K Syarif Thayeb berhadapan dengan sejumlah persoalan mendasar dalam dunia pendidikan Indonesia. Persoalan ini terjadi pada tingkat pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan tinggi. Tiga dari sejumlah persoalan itu yang langsung berhubungan dengan tingkat pendidikan dasar dan menengah, yakni perluasan dan pemerataan kesempatan belajar, biaya pendidikan/pembebasan uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), dan mutu pendidikan.[5] Saat itu masih banyak anak usia sekolah, yakni anak umur 7 hingga 12 tahun, yang tidak sempat menikmati pendidikan. Kalaupun bisa bersekolah, banyak di antara mereka yang kemudian tidak mampu menyelesaikan pendidikan dan terpaksa *drop out* 'keluar sekolah' sebelum memperoleh ijazah. Menurut data yang tersedia saat itu, dari 100 siswa yang masuk kelas 1 hanya sekitar 25 % yang mampu bertahan hingga kelas 6 dan lulus. Ada banyak latar belakang yang menyebabkan pendidikan mereka terputus; tiga di antaranya adalah kurang ketersediaan sekolah tempat belajar (kalapun ada berada di tempat yang jauh dari rumah atau tempat tinggal dan akses jalan menuju sekolah sangat jelek); keadaan

GENEESKUNDIGE
HOOGESCHOOL
te Weltevreden

Zij die zich wenschen te doen inschrijven als student in de medicijnen aan de in Augustus te openen

Geneeskundige Hoogeschool

te Weltevreden, worden verzocht daarvan zoo spoedig mogelijk onder overlegging van de vereischte stukken schriftelijk of mondeling kennis te geven aan den Rector Magnificus dier Hoogeschool, Prof. Dr. J. BOEKE, Weltevreden.

Inlichtingen omtrent collegegelden, studieduur, studiebeurzen, etc. zijn te verkrijgen bij de Administratie van de S. T. O. V. I. A., Weltevreden.

Speekuur van den R. Magnificus elken Maandag, Woensdag en Vrijdag van 11 tot 12 uur v.m. in het gebouw der S t o v i a Salemba 6, Weltevreden.

De Rector Magnificus:
J. BOEKE

3792

Geneeskundige Hoogeschool Batavia. Iklan penerimaan pendaftaran mahasiswa ketika pertama kali dibuka tahun 1927

(Sumber: *De Sumatra Post* tanggal 6 Agustus 1927)

ekonomi orang tua yang tidak memungkinkan mereka bersekolah, apalagi bersekolah di lokasi di luar tempat tinggal mereka; dan mereka diajak atau dipaksa membantu orang tua bekerja, dengan kata lain alasan ketiga ini berkait erat dengan kurangnya dukungan orang tua. Hal terakhir berhubungan dengan kenyataan lain yang melilit dunia pendidikan saat itu, yakni masih banyak orang dewasa yang belum pernah mengecap pendidikan.

Salah satu kebijakan yang dijalankan Syarif Thayeb untuk mengatasi kekurangan sekolah adalah membangun gedung-gedung sekolah baru yang didanai dengan anggaran yang dialokasikan berdasarkan Intruksi Presiden (Inpres), yang dikenal dengan nama Sekolah Dasar Intruksi Presiden (SD Inpres). Pembangunan gedung ini lengkap dengan mebelnya, kamar kecil, pompa air, dan sumur. Hingga dua tahun kepemimpinan Syarif Thayeb (1976) telah dibangun 16.000 gedung dengan 96.000 ruang kelas. Sesuai dengan tujuan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan gedung pendidikan, SD Inpres dibangun di tempat-tempat yang sebelumnya belum memiliki sekolah dan umumnya di kawasan pinggiran dan pelosok.[6] Di samping membangun SD Inpres, pemerintah juga memberikan bantuan untuk memperbaiki SD Negeri dan swasta serta Madrasah Ibtidaiyah.[7]

Masalah ekonomi yang melilit sebagian besar siswa disebabkan oleh adanya kewajiban siswa membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). SPP dikenakan kepada seluruh peserta didik, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Masa kepemimpinan Syarif Thayeb mewarisi sistem yang secara yuridis diperkenalkan oleh pemerintah sejak tahun 1968. Pada kenyataannya, dalam proses belajar mengajar, peserta didik sesungguhnya tidak hanya membayar SPP semata, tetapi juga sejumlah biaya lain, seperti bahan pelajaran (buku dan alat tulis) dan biaya ekstra kurikuler. Di samping itu keadaan ekonomi negara yang masih belum stabil pascaperalihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru juga membuat biaya hidup menjadi sangat tinggi.

Syarif Thayeb menyikapi persoalan ini dengan mengeluarkan Keputusan Bersama antara Menteri P dan K, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan. Tidak tanggung-tanggung, saat itu dikeluarkan tiga Surat Keputusan sekaligus, yaitu SK Bersama No. 0257/K/1974, No. 221 tahun 1974, dan No. 1606/MK/1/11/1974 Tentang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). Ada tiga pokok pikiran yang paling penting dari ketiga SK tersebut. Pertama, SPP merupakan satu-satunya sumbangan yang dibenarkan untuk dipungut oleh sekolah atau perguruan tinggi. Kedua, keringanan yang dapat diberikan atau pembebasan dari kewajiban membayar SPP berdasarkan persetujuan Bupati Kepala Daerah Tingkat II. Ketiga, untuk perguruan tinggi, pembebasan atau keringanan diberikan atas usul pimpinan fakultas berdasarkan pertimbangan senat perguruan tinggi bersangkutan.[8]

Atas

Pelantikan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR). Anggota legislatif yang dilantik Presiden Soekarno merupakan pengganti Konstituante yang dibubarkan lewat Dekrit Presiden 5 Juli 1959

(Sumber: Buku *30 Tahun Indonesia Merdeka*, Jilid 3)

Tengah

Presiden Suharto di Bina Graha menyerahkan naskah Negara Kertagama kepada Menteri P&K, Sjarif Thayeb bertempat di Bina Graha, tgl 23 Juli 1974

(Sumber: Pepustakaan Nasional Republik Indonesia)

Bawah

Menteri P&K Syarif Thayeb menerima sumbangan uang sebesar Rp. 250.000.- untuk ITB Bandung dari Presiden Direktur PT Caltex Pacific Indonesia Julius Tahya, bertempat di ruang kerja Menteri P&K di Senayan Jakarta, tgl 9 Nop 1974

(Sumber: Pepustakaan Nasional Republik Indonesia)

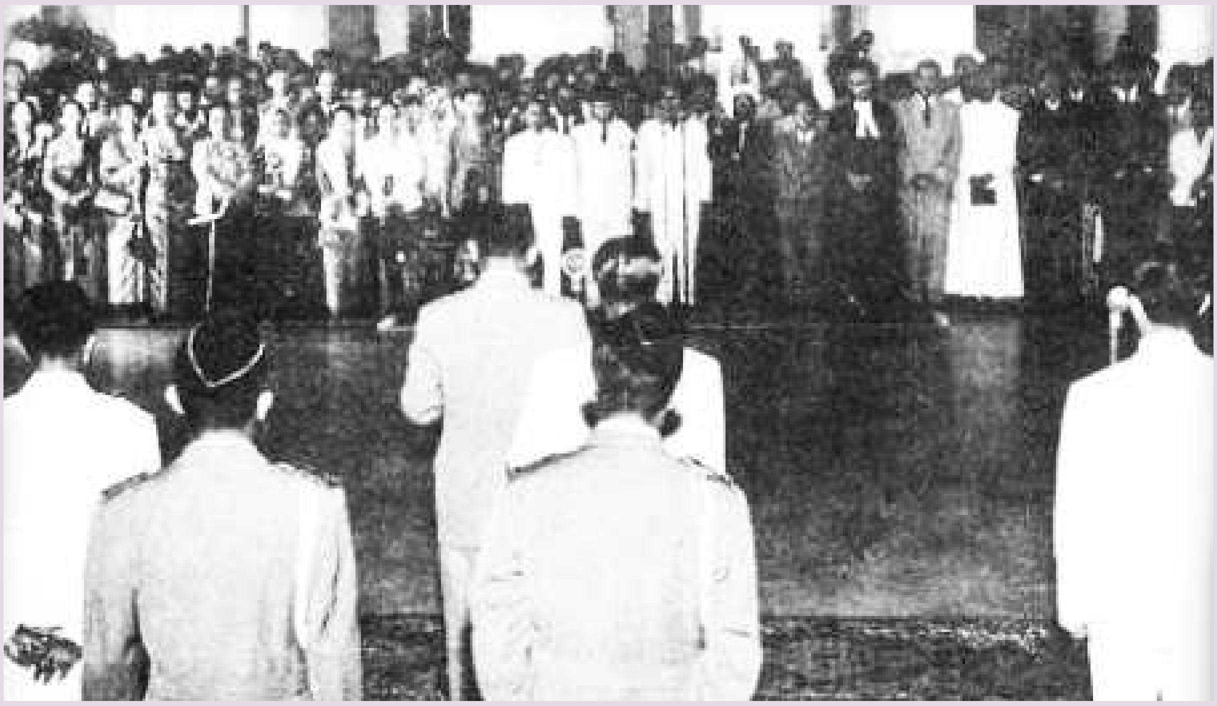

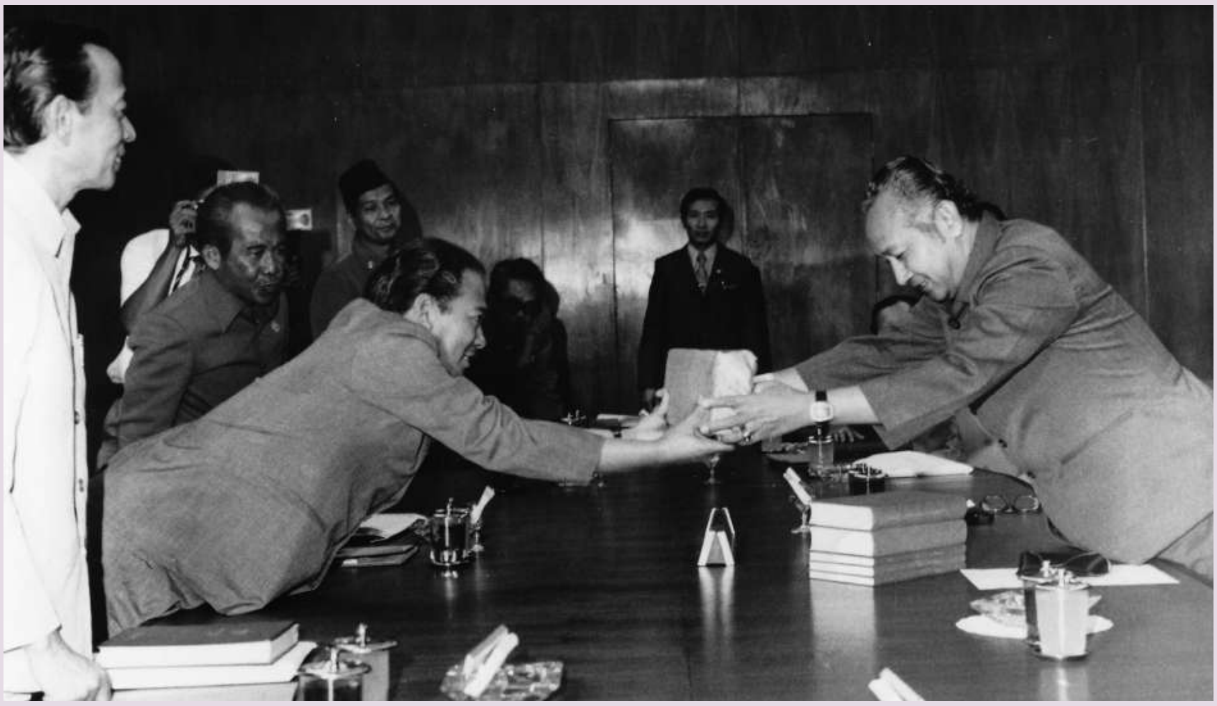

Pembukaan Rapat Koordinasi Proyek Perintis Sekolah Pembangunan se-Indonesia oleh Menteri P&K, Dr Syarif Thayeb di Hotel Horison, Jakarta

(Sumber Foto: Pepustakaan Nasional Republik Indonesia)

Di samping itu pemerintah juga menyediakan beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi namun kurang beruntung secara ekonomi. Dalam kurun waktu 1974-1975 telah diberikan beasiswa kepada 3.046 siswa sekolah dasar, sekolah lanjutan, dan perguruan tinggi dengan jumlah dana sebesar Rp 20.523.000,00. Pada tahun 1975-1976 beasiswa diberikan kepada 7.757 peserta didik dengan jumlah dana sebesar Rp 52.799.000,00. Terlihat peningkatan yang siginifikan dalam jumlah penerima beasiswa serta jumlah dana yang dialokasikan oleh pemerintah dalam dua tahun ajaran bersangkutan. Berdasar data yang tersaji terlihat bahwa penerima beasiswa terbesar adalah siswa Sekolah Dasar (SD). Pada tahun ajaran 1974-1975 jumlah yang menerima beasiswa sebanyak 1.269 orang dan tahun ajaran 1975-1976 meningkat menjadi 3.247 orang. Siswa SD yang mendapat beasiswa, terutama, untuk siswa kelas siswa kelas V dan kelas VI. Di samping siswa SD, beasiswa juga diberikan kepada siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA), Sekolah Teknik (ST), Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama (SKKP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Teknik Menengah (STM), Sekolah Kesejahteraan Keluarga Atas (SKKA), Sekolah Pendidikan Guru (SPG), Sekolah Pendidikan Olah Raga Atas (SMOA), SPSA, SPIK, serta perguruan tinggi (universitas dan institut keguruan).[9]

Pembangunan gedung sekolah baru, khususnya SD Inpres, berdampak pada peningkatan peserta didik. Pada era Syarif Thayeb pemerintah memperkirakan akan terjadi lonjakan peserta didik pada jenjang SD sebanyak 7,5 juta orang. Peningkatan jumlah siswa dan pembangunan gedung sekolah membutuhkan ketersediaan guru yang akan mengajar. Setelah diperhitungkan antara jumlah sekolah yang dibangun dan peningkatan jumlah peserta didik didapat angka kebutuhan guru sebanyak 525.000 orang. Hal itu berarti terdapat kekurangan guru sebanyak 100.000 orang karena jumlah guru SD saat itu lebih kurang 425.000. Angka 100.000 orang belum termasuk adanya guru yang pensiun dan meninggal yang jumlah diperkirakan mencapai 89.000. Oleh karena itu Syarif Thayeb mengupayakan penambahan jumlah guru SD setidaknya sebanyak 38.000 orang setiap tahun. Penambahan ini diupayakan melalui jalur SPG. Sehubungan dengan hal itu jumlah SPG ditambah dengan peningkatan daya tampung dan pembangunan gedung baru dan direncanakan akan dikembangkan sebanyak 66 SPG. Pengembangan SPG dirasa belum mampu memenuhi kebutuhan tenaga guru karena hanya akan mampu menghasilkan 13.000 lulusan. Oleh karena itulah diadakan berbagai paket pendidikan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan guru. Di samping itu juga dibangun satu Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa (SGPLB). Memang, pada era Syarif Thayeb, perhatian terhadap anak usia sekolah berkebutuhan khusus semakin meningkat, sehingga direncanakan pembangunan lembaga pendidikan yang khusus mendidik calon guru untuk sekolah dengan peserta harus mendapat perhatian dan dididik secara istimewa.

Untuk anak-anak yang putus sekolah dan tidak mampu—atau tidak ingin bersekolah secara resmi lagi—disediakan pendidikan luar sekolah, yang dilaksanakan dalam berbagai paket kursus kilat dan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan lingkungan. Lembaga yang khusus diserahi tanggung jawab menyelenggarakan pendidikan ini Pusat Pelatihan Pendidikan Masyarakat (PPLM). Tujuan utama pendidikan corak ini adalah memberikan berbagai keterampilan yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk terjun ke tengah masyarakat. Kegiatan ini terbuka bagi setiap anggota masyarakat yang ingin menambah keterampilan atau kepada mereka yang belum pernah mendapat kesempatan mengenyam pendidikan formal.[10]

Kebijakan lain yang dijalankan Syarif Thayeb adalah penyempurnaan Kurikulum 1968 dengan Kurikulum 1975, karena Kurikulum 1968 dirasa tidak mampu lagi menjawab tantangan zaman akibat berbagai perubahan yang terjadi akibatnya lajunya pembangunan nasional. Hal ini disebabkan, antara lain, oleh setidaknya lima faktor utama, yakni 1) selama Pelita I, yang dimulai pada tahun 1969, telah timbul banyak gagasan baru tentang pelaksanaan sistem pendidikan nasional; 2) adanya kebijaksanaan pemerintah di bidang pendidikan nasional yang digariskan dalam GBHN yang antara lain berbunyi "Mengejar ketinggalan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mempercepat lajunya pembangunan"; 3) adanya hasil analisis dan penilaian pendidikan nasional oleh Departemen P dan K yang mendorong pemerintah meninjau kebijaksanaan pendidikan nasional; 4) adanya inovasi dalam sistem belajar-mengajar yang dianggap lebih efisien dan efektif; 5) keluhan masyarakat tentang mutu lulusan pendidikan.

Prinsip pelaksanaan Kurikulum 1975 antara lain berorientasi pada tujuan, menganut pendekatan integratif dalam arti bahwa setiap pelajaran memiliki makna dan peran yang menunjang pada tercapainya tujuan-tujuan yang lebih integratif, menekankan pada efisiensi dan efektivitas dalam hal daya dan waktu, serta menganut pendekatan sistem instruksional yang dikenal dengan Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI). Sistem yang senantiasa mengarah pada tercapainya tujuan yang spesifik dapat diukur dan dirumuskan dalam bentuk tingkah laku siswa, dipengaruhi psikologi tingkah laku dengan menekankan pada stimulus respon (rangsang-jawab) dan latihan (*drill*). Pembelajaran lebih banyak menggunaan teori behaviorisme, yakni memandang keberhasilan dalam belajar ditentukan oleh lingkungan dengan stimulus dari luar, dalam hal ini sekolah dan guru.

Ada sembilan mata pelajaran yang ditentukan dalam kurikulum ini, yaitu 1) Pendidikan agama, 2) Pendidikan Moral Pancasila, 3) Bahasa Indonesia, 4) Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS); 5) Matematika; 6) Ilmu Pengetahuan Alam (IPA); 7) Olah raga dan kesehatan; 8) Kesenian; 9) Keterampilan khusus.

Untuk mendukung pelaksanaan Kurikulum 1975 maka pada tahun ajaran 1975/1976 pemerintah menyiapkan (mencetak) sebanyak 318.250 buku dan untuk tahun ajaran 1977/1978 disediakan 30.000 naskah dengan jumlah halaman dalam kisaran 180 halaman tiap buku.

Tidak hanya dalam pendidikan dasar dan menengah (lanjutan), Syarif Thayeb juga menaruh perhatian besar bagi pendidikan tinggi. Sehubungan dengan itu, sekitar satu tahun setelah dilantik menjadi menteri, Syarif Thayeb membentuk Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di kementeriannya. Tugas pokok lembaga yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri P dan K Nomor 0140/U/1975 tanggal 12 Juli 1975 ini adalah menangani dan membina bidang akademik, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, perguruan tinggi negeri dan swasta, serta kemahasiswaan. Seperti disebut pada bagian lain buku ini, sejak tahun 1961 pengelolaan pendidikan tinggi diurus oleh suatu kementerian khusus yang dinamakan Departemen Perguruan tinggi dan Ilmu Pengetahuan (Departemen PTIP). Keberadaan Departemen PTIP menyebabkan penanganan pendidikan tinggi terpisah dengan urusan pendidikan dasar dan menengah, namun memasuki tahun 1974 pengelolaan pendidikan tinggi menyatu kembali dalam Departemen P dan K dan pada tahun 1975 berdasarkan keputusan Mendikbud dibentuk secara resmi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti).

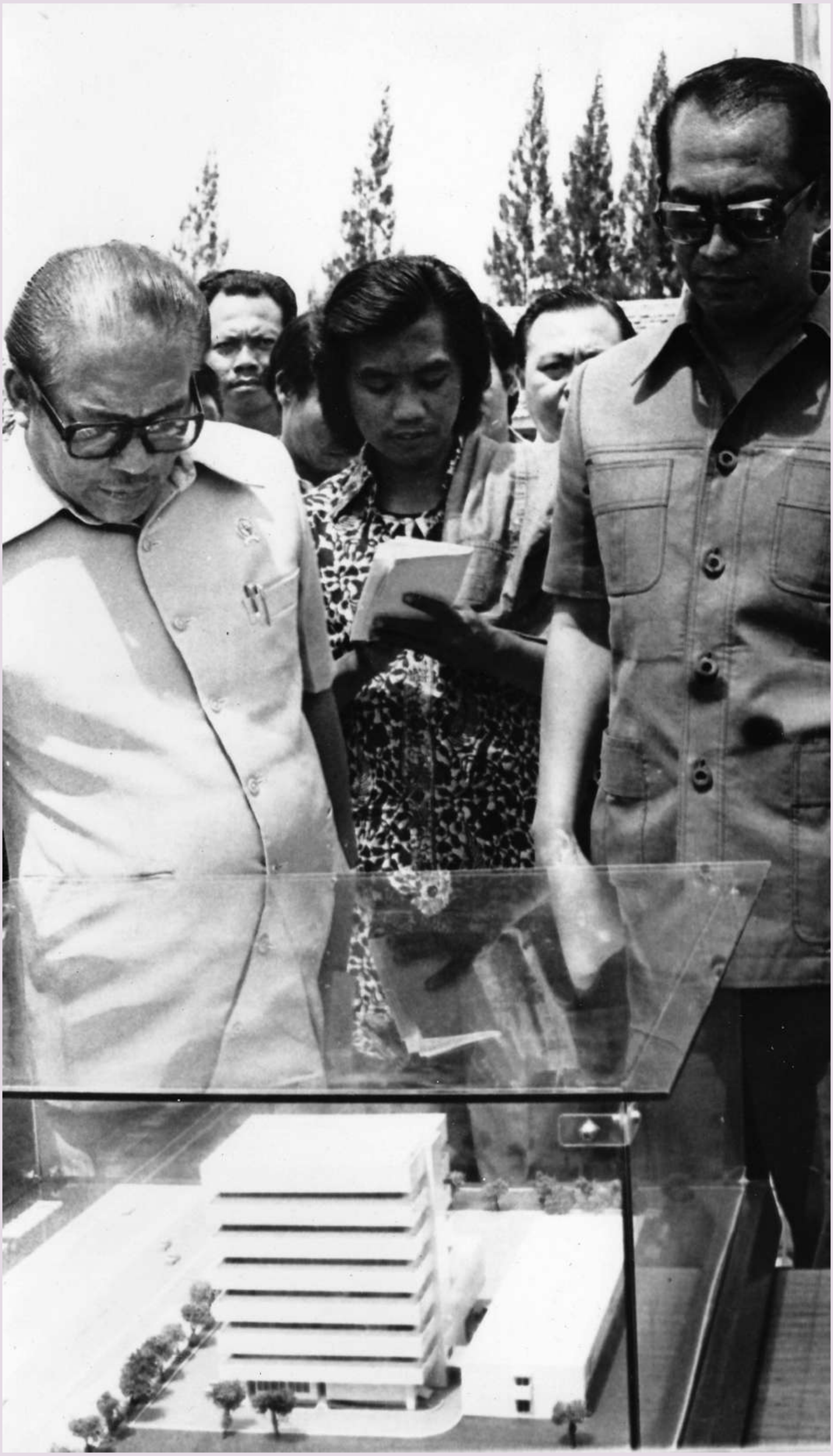

Perletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung Kantor Wilayah Departemen P&K DKI Jakarta oleh Menteri P & K Syarif Thayeb dan Gubernur Ali Sadikin pada tanggal 14 Desember 1976

(Sumber: Pepustakaan Nasional Republik Indonesia)

Upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke 49 dengan Instruktur Upacara Menteri P&K Dr. Syarif Thayeb bertempat di Istora Senayan Jakarta

(Sumber: Pepustakaan Nasional Republik Indonesia)

Pada tahun yang sama (1975), berdasarkan Keputusan Menteri P dan K ditetapkan Pelaksanaan Pola Kebijaksanaan Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi di Indonesia. Konsep pemikiran yang mendasari pengembangan pendidikan tinggi tersebut antara lain 1) pembinaan serta pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia harus berdasarkan kepada UUD 1945 dan Tap MPR serta 2) asas-asas Tridharma Perguruan Tinggi dalam hikmat kebebasan akademik yang bertanggung jawab. Di samping itu juga perlu diperhatikan hasil yang telah dicapai oleh penyelenggaraan pendidikan; harapan keluarga, masyarakat, dan pemerintahah terhadap pendidikan sebagai suatu keseluruhan dan terhadap pendidikan tinggi khususnya; implikasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi; serta dinamika dan perspektif perkembangan kebudayaan nasional. Dengan kata lain pengembangan pendidikan tinggi ditujukan pada suatu sistem pendidikan yang menyeluruh dan meliputi seluruh perguruan tinggi baik negeri maupun swasta.

Kebijakan lain adalah pembentukan Sekretariat Kerjasama Antar Lima Universitas (SKALU) yang berkaitan dengan sistem penerimaan mahasiswa baru yang dilaksanakan pada tahun 1976. Dalam sistem ini lima universitas ternama di Indonesia, yaitu Universitas Indonesia (Jakarta), Institut Teknologi Bandung (Bandung), Institut Pertanian Bogor (Bogor), Universitas Gajah Mada (Yogyakara), dan Universitas Airlangga (Surabaya), menyelenggarakan ujian masuk secara bersama. Melalui ujian bersama ini para calon tidak perlu melakukan perjalanan jauh mendatangi perguruan tinggi untuk mengikuti seleksi masuk di berbagai universitas atau institut yang akan dituju. Sistem ini jelas menghemat biaya dan waku bagi calon mahasiswa, walaupun disadari pula sistem ini menghambat kesempatan calon mahasiswa untuk memilih lebih dari satu perguruan tinggi.

Pada saat pertama kali pemberlakuan sistem SKALU calon mahasiswa diberi kesempatan memilih nama perguruan tinggi yang diminati saja, sehingga pemilihannya masih sangat umum. Namun pada tahun 1977 sistem ini disempurnakan dengan mewajibkan calon mahasiswa memilih program studi (fakultas) yang ingin dimasuki.

Berkenaan dengan dunia mahasiswa Syarif Thayeb melakukan pembenahan lembaga kemahasiswaan, baik Dewan Mahasiswa di tingkat universitas maupun Senat Mahasiswa di tingkat fakultas. Fungsi lembaga kemahasiswaan ini diarahkan untuk melayani kebutuhan mahasiswa. Dalam bahasa politik saat itu, keberadaan Dewan Mahasiswa dan Senat Mahasiswa "perlu dibina" untuk berperan lebih besar bagi pembangunan nasional. Di samping itu Syarif Thayeb melakukan gerakan pembinaan generasi muda melalui pengenalan warisan budaya yang bersifat Bhinneka Tunggal Ika, penghayatan nilai budaya bangsa, serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru.[11] Strategi lain yang bisa dilakukan dalam pengenalan budaya adalah meningkatkan daya adaptasi, inovasi, dan kreasi generasi

muda terhadap tantangan perkembangan masyarakat serta unsur kebudayaan dari luar negeri. *Output* kegiatan ini adalah pewarisan nilai-nilai budaya pada generasi berikutnya.

Untuk mewujudkan pewarisan nilai budaya, terutama untuk anak didik, pembinaan berada di tangan guru. Bila guru gagal mentransfer pengetahuan kepada peserta didik, masa depan negara dan bangsa—dalam kacamata Syarif Thayeb—berada dalam jurang kehancuran. Oleh karena itu pada masa akhir kepemimpinan Bung Karno tersebut ia menginginkan pendidikan di Indonesia mampu menjamin masa depan generasi muda yang gemilang.

Syarif Thayeb juga menggalakkan kembali pengenalan *tut wuri handayani*. Di samping itu ia melakukan empat kebijakan penting untuk mengatasi masalah pendidikan. Pertama, meningkatkan daya tampung anak sekolah untuk semua jenjang pendidikan. Kedua, membebaskan SPP untuk Sekolah Dasar, khusus untuk kelas I sampai III; sedangkan untuk perguruan tinggi Menteri P dan K memperbanyak jenis beasiswa untuk kalangan mahasiswa yang tidak mampu. Ketiga, peningkatan mutu pendidikan digarap secara sistematis pada semua tingkatan pendidikan dengan menyelenggarakan penataran untuk dosen dan guru serta penyempurnaan fasilitas pendidikan dengan pemikiran dan pendekatan inovatif. Keempat, mendirikan sekolah kejuruan STM Pembangunan Politeknik dan menyempurnakan kurikulum Fakultas Keguruan Ilmu Teknik (FKIT) sebagai usaha peningkatan relevansi pendidikan.

Khusus untuk pelajar dan mahasiswa yang belajar di luar negeri, Syarif Thayeb dan Menteri Luar Negeri Adam Malik mengeluarkan Surat Keputusan Bersama, yang isinya sebagai berikut.[12]

1. Mereka yang akan belajar di luar negeri, khususnya ditentukan Menteri P dan K setelah memperoleh pertimbangan dari Dirjen Dikdasmen dan Tim Pembantu Pelaksana Asimilasi di bidang Pendidikan dan Pengaturan Pendidikan Asing di Indonesia, dengan mengutamakan mereka yang memerlukan pendidikan luar biasa dan belum dapat diperoleh di Indonesia.
2. Mereka yang belajar di luar negeri akan dibina secara intensif dalam rangka pembinaan kesadaran nasional dan pelaksanaan program asimilasi. Pembinaan pelajar diserahkan kepada perwakilan RI setempat. Pelajar Indonesia yang berada di luar negeri harus diusahakan segera pulang ke Tanah Air untuk mengikuti sistem pendidikan nasional.
3. Sebelum berangkat ke luar negeri, setiap siswa harus belajar Santiaji Pancasila.

Aturan tersebut dimaksudkan untuk menjaga seluruh mahasiswa yang berangkat ke luar negeri jangan sampai terpengaruh ideologi terlarang dan tidak sesuai dengan keindonesiaan. Selain itu SKB bertujuan untuk membina pelajar Indonesia di luar negeri dengan tujuan agar lulusan itu masuk dalam koridor sistem pendidikan nasional.

Selain menjadi menteri, Syarif Thayeb memiliki banyak kegiatan lain, di antaranya Ketua Konferensi Pediatrics Asia Afrika, Ketua Pendidikan Tinggi Asia Tenggara (ASA IHL), Anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan Ketua Pembangunan Provinsi Aceh.[13]

ENDNOTES

1 Dennys Lombard, *Kerajaan Aceh* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991).

2 Goenarso, *Riwayat Perguruan Tinggi Teknik di Indonesia, Periode 1920-1942* (Bandung: Penerbit ITB, 1992).

3 S. Sumardi, dkk, *Menteri-menteri Pendidikan dan Kebudayaan Sejak Tahun 1966.* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, 1984).

4 S. Sumardi, dkk, *Menteri-menteri…..*

5 Mela Mita Septiana, "Kebijakan Pendidikan Menteri Syarif Thayeb Tahun 1974-1978", dalam, *journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/risalah/article/download/4931/4593*

6 Ini pulalah yang menyebabkan munculnya pandangan meremehkan di tengah masyaraat saat itu bahwa SD Inpres merupakan sekolah kelas dua, sekolah kampungan. Apalagi karena umumnya gedungnya dibangun secara "proyek", maka kualitas gedung umumnya juga jelek. Hal ini kemudian ditambah pula oleh guru yang mengajar di sana yang juga dipersiapkan dengan program khusus sehingga kemampuan mereka juga kurang dengan guru-guru yang telah mengabdi sebelumnya.

7 Suradi H.P. et al., *Sejarah Pemikiran Pendidikan dan Kebudayaan* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1986), hal. 222.

8 Suradi H.P. et al., *Sejarah Pemikiran Pendidikan dan Kebudayaan*, hal. 223.

9 Suradi H.P. et al., *Sejarah Pemikiran Pendidikan dan Kebudayaan*, hal. 224-225.

10 Mela Mita Septiana, "Kebijakan Pendidikan Menteri Syarif Thayeb….", hal. 10-11.

11 S. Sumardi, dkk, *Menteri-menteri Pendidikan dan Kebudayaan Sejak Tahun 1966.* Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, 1984.

12 SKB No. SP 562/B.U/X/76/01 dan No.0263/U/1976

13 S. Sumardi, dkk, *Menteri-menteri Pendidikan dan Kebudayaan Sejak Tahun 1966.* Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, 1984.

Daoed Joesoef

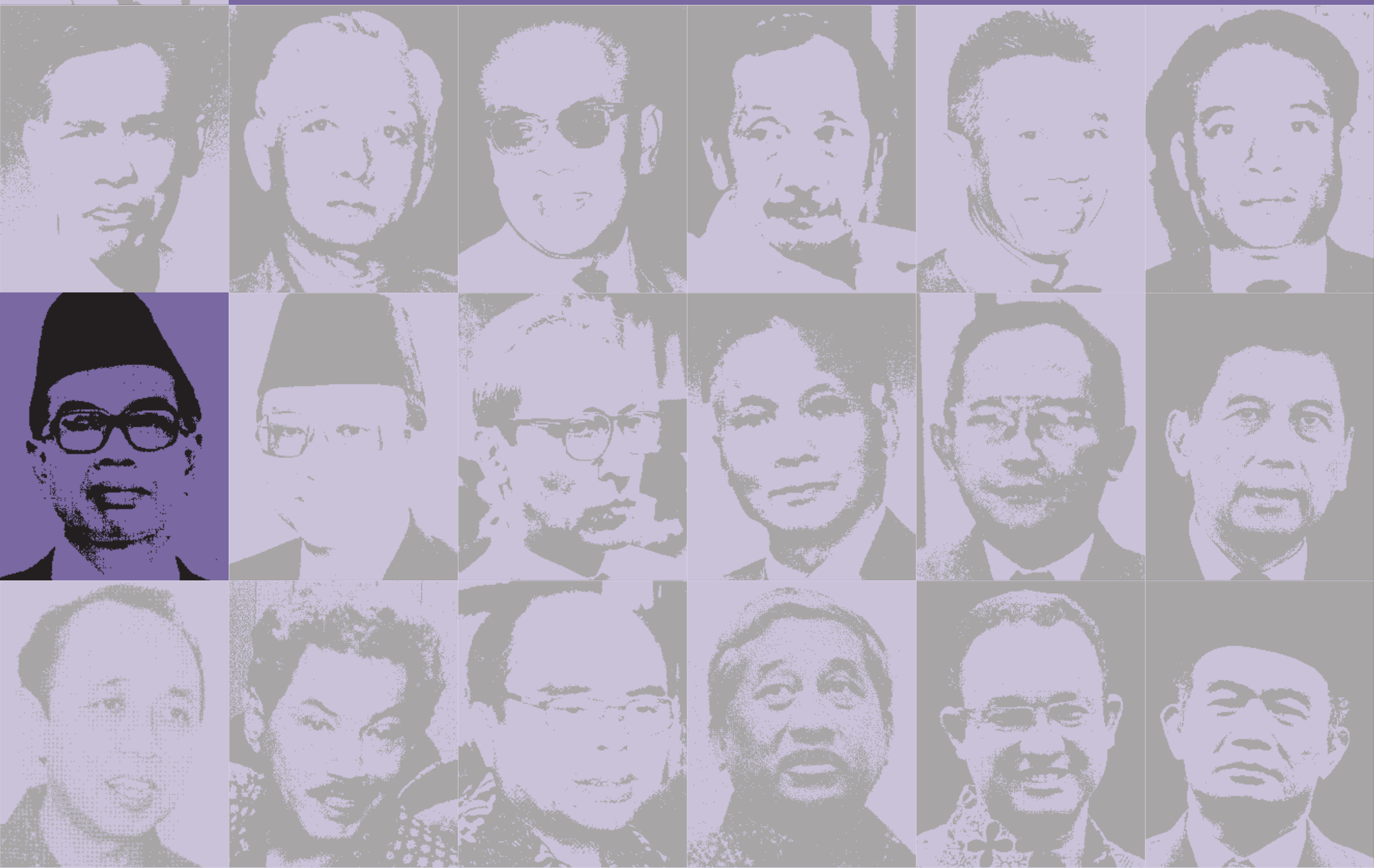

Masa Jabatan
29 Maret 1978 – 19 Maret 1983

Daoed Joesoef

MASA KECIL DAN PENDIDIKAN

Daoed Joesoef. Demikian nama lengkap Menteri P & K Kabinet Pembangunan III ini. Ia lahir di Medan tanggal 8 Agustus 1926. Ia meninggal di Jakarta tanggal 23 Januari 2018 dalam usia 91 tahun.[1] Dilihat dari umurnya ia tergolong mantan menteri yang diberi umur panjang. Daoed Joesoef dilahirkan dari pasangan Moehammad Joesoef dan Siti Jasiah asal Jeron Beteng, Yogyakarta. Dari berbagai literatur yang tersedia tidak diketahui pasti mengenai sosok kedua orang tua Daoed, namun keberadaannya pernah dia abadikan dalam sebuah novelnya yang terkenal: *Emak*. Ayahnya mantan *jawara*, yang hidup kesehariannya diisi dengan kegiatan memerah susu sapi, sedangkan Siti Jasiah ibu rumah tangga yang sederhana, pintar memasak, dan kreatif.

Pasangan Muhammad Joesoef dan Siti Jasiah hanyalah orang kampung yang buta huruf dan tidak berpendidikan formal, namun kemampuannya membaca huruf Arab sangat baik serta pemahaman agama dan Al-Quran yang mendalam menjadi bekal kuat dalam mendidik anak-anaknya.

Daoed anak keempat dari lima bersaudara yang bermukim di pinggir hutan Medan. Ia tidak banyak mengulas ingatannya terhadap tiga kakak perempuan dan satu orang adiknya; tetapi pamannya, seorang aktivis pergerakan di Medan yang dihukum buang ke Boven Digoel karena dianggap mengacaukan *rust en orde*, malah lebih membekas di sanuribarinya dan lebih berpengaruh dalam pembentukan dirinya.

Ingatannya pada sosok Siti Jasiah diabadikan ketika Daoed Joesoef berumur 77 tahun. Dalam usia yang kebanyakan sudah mengalami kepikunan, Daoed Joesoef malah menulis falsafah hidup ibunya, seorang perempuan kampung yang cenderung terbelakang dalam urusan pendidikan, namun unggul dalam pemahaman keagamaannya.[2] Dalam buku itu ia menulis kisah kegigihan Siti Jasiah yang ingin belajar naik sepeda, sementara suaminya tidak mengizinkan.

> "Nik, kita ini tidak muda lagi," kata bapak sejenak kemudian.
>
> "Sejak kapan ada pembatasan umur untuk berkeretangin?" sambut emak.
>
> "Saya lihat nyonya-nyonya Belanda yang lebih tua daripada saya naik keretangin ke sana-ke mari. Dan badannya gemuk-gemuk lagi."
>
> "Ya itulah, mereka lain sih ...."
>
> "Lain bagaimana? Mereka dan kita sama-sama manusia. Bedanya kan cuma di warna kulit. Akan saya buktikan bahwa saya pun bisa berkeretangin seperti perempuan-perempuan Belanda itu."[3]

Buku berjudul *Emak Penuntunku dari Kampung Darat Sampai Sorbonne* karya Daoed Joesoef ini menguraikan perjalanan hidup Daoed Joesoef dari tanah kelahirannya di Sumatra Barat sampai Sorbonne, Prancis

(Sumber: Istimewa)

Ayah Daoed beralasan sebenarnya khawatir istrinya menjadi bahan gunjingan istri tetangga. Siti Jasiah tetap pada pendirian, malah berujar, "Biarkan perempuan-perempuan sini menggunjing di belakang saya. Heran, kok mereka begitu benci pada kemajuan. Picik bagai katak di bawah tempurung."

Rasa sayang Daoed kepada ibunya memang dalam. Ia tidak malu-malu menyebut sosok Siti Jasiah-lah yang membentuk karakternya. Meski keluarga Daoed Joesoef tinggal di pinggir hutan di Medan, namun ia merasakan sosok ibunya sebagai pengayom dan teladan. Di halaman dua *Emak*, ia menulis, "Aku tahu benar bahwa prestasi seperti ini adalah berkat perbuatan banyak orang. Barisan orang-orang ini ternyata cukup panjang dan di ujung permulaannya tegak berdiri seorang perempuan bertubuh langsing, semampai, dengan penampilan yang anggun dan wajah mencerminkan ketinggian budi. Perempuan tersebut adalah ibuku, yang menurut kebiasaan di daerah kelahiranku, biasa kusebut emak."

Masa kecil hingga remaja Daoed lebih banyak dihabiskan di Medan. Pendidikan dasarnya dilalui di bangku Holland Inlandsche School (HIS) Medan dan diselesaikan pada tahun 1939. Sejak duduk di HIS Daoed sudah mahir melukis. Emaknya pun harus merogoh saku cukup dalam, sekadar membeli peralatan melukis. Keahlian ini kelak dimanfaatkan Daoed untuk mencari uang di perantauan.[4]

Setelah menamatkan HIS, Daoed melanjutkan ke Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO), juga di Medan. Oleh karena pada pertengahan tahun 1942 kekuasaan beralih ke tangan militer Jepang, Daoed Joesoef menyelesaikan pendidikannya di lembaga yang saat itu dinamai MULO Tjuu Gakko Medan pada tahun 1944. Tidak diketahui dengan jelas siapa yang membiayai pendidikannya, mengingat kedua orang tuanya bukanlah dari kalangan yang berkecukupan, apalagi dalam suasana serba susah pada zaman Jepang.

Memasuki masa awal kemerdekaan Daoed Joesoef terjun ke medan juang dan terdaftar sebagai militer aktif dengan pangkat Letnan Muda. Sampai akhir tahun 1946 ia aktif di Divisi IV Sumatera Timur. Pada tahun 1950 ia dipindahkan ke Komando Militer Pangkalan Jakarta Raya. Kariernya di dunia militer berkembang pesat, sampai diangkat menjadi anggota Tim Penasihat Irjenterpra/Asisten Urusan Angkatan Darat Penguasa Perang Tertinggi periode 1959-1960.[5] Setelah itu ia mengundurkan diri dari dunia militer dengan pangkat terakhir Letnan Dua.

Selama bermukim di Jakarta, Daoed Joesoef melanjutkan pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE UI). Pada tahun 1956 ia melakukan riset di Jawa Tengah dengan judul "Gerakan dan Pemberontakan Koperasi". Ia memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari FE UI pada tahun 1959. Ia meneruskan ke Program Master Universite de Paris I Pantheon-Sorbonne, Prancis, tahun 1960.[6]

Daoed Joesoef dalam acara malam anugerah sayembara Novel Dewan Kesenian Jakarta di Teater Kecil Taman Ismail Marzuki Jakarta tanggal 9 Maret 2007

(Sumber: *Tempo*, tanggal 9 Maret 2007)

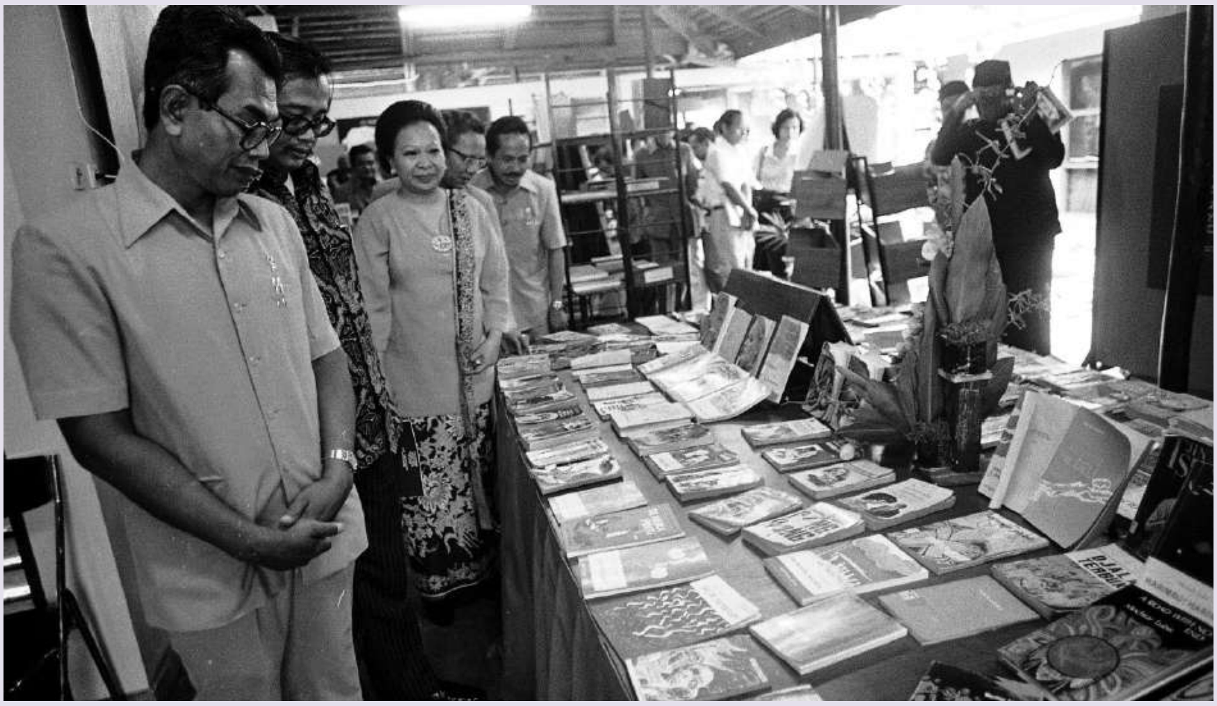

Atas

Menteri Daoed Joesoef dalam acara pameran dan bazar buku tahun 1980

(Sumber: *Tempo*, tanggal 7 Januari 1980)

Tengah

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joesoef memukul gong sebagai tanda pembukaan Country Course on Curriculum Through Systematic Evaluation yang diadakan pada tanggal 20 November 1978 di Hotel Sahid Jakarta

(Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia)

Bawah

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Daoed Joesoef dalam Rapat Kerja Komisi IX Bidang Pendidikan Kebudayaan dan Agama yang dilaksanakan tanggal 18 Juni 1979 di Gedung DPR

(Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia)

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joesoef, yang dikenal dengan konsep NKK/BKK pada akhir 1970-an

(Sumber: koleksi *Kompas TV*)

Ketika sedang berjuang menyelesaikan pendidikan di Sorbonne University, Daoed dikejutkan berita meninggalnya Siti Jasiah, ibunya. Sejak Siti Jasiah berpulang, ia mempercepat penulisan *Emak*, yang kemudian diterbitkan pertama kali tahun 2003. Khusus di bagian "Epilog", secara panjang lebar ia mengisahkan sosok ibunya, "Alangkah bahagianya mempunyai emak. Dia yang membesarkan aku dengan cinta keibuan yang lembut. Dia yang selalu memberikan aku pedoman di dalam perjalanan hidup. Dia yang, di setiap langkah, tahap dan jenjang, membisikkan padaku dalam usahaku mengolah budaya kreatif, baik yang terpaut pada ilmu pengetahuan maupun yang menyangkut dengan seni. Dia yang tidak pernah mengecewakan, apalagi menyakiti hatiku. Satu-satunya duka yang disebabkannya adalah ketika dia harus pergi meninggalkan aku untuk selama-lamanya."

Kematian ibunya tidak membuat Daoed larut dalam kesedihan. Ia segera menyelesaikan dua gelar doktor sekaligus, yakni pada bidang Ilmu Keuangan Internasional dan Hubungan Internasional tahun 1965 serta Ilmu Ekonomi pada 1973 di Universite de Paris I, Pantheon-Sorbonne, Prancis. *Kompas* tanggal 8 Agustus 2016 menyebut Daoed Joesoef merupakan orang pertama Indonesia yang mempelajari ilmu ekonomi di lembaga pendidikan tinggi Prancis dan orang Indonesia pertama yang memperoleh gelar Doctorat d'Etat atau 'doktor negara', yang lebih tinggi dibandingkan dengan Doctorat d'Universite atau doktor universitas dari Universitas Sorbonne.

JENJANG KARIER

Ketika masih berstatus mahasiswa FE UI Daoed Joesoef yang kuat dalam bidang ekonomi moneter ditawari menjadi Gubernur Bank Indonesia (BI) menggantikan Sjafruddin Prawiranegara. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1953.[7] Tawaran itu ditolak dengan alasan independensi. Daoed Josoef berkata bahwa ia tidak akan bebas berkarya dan menulis jika menjadi Gubernur BI. "Saya menolak karena jika saya masuk BI, saya tidak lagi bebas menulis dan berpikir. Segala tulisan harus dikonsultasikan dengan atasan," ujar Daoed Joesoef.

Pada tahun 1956, karena kecemerlangan akademiknya, Daoed Joesoef ditunjuk menjadi asisten dosen di FE UI. Setahun menjelang skripsinya selesai pada tahun 1958 ia diangkat menjadi dosen di fakultas tersebut. Keahliannya di bidang Ekonomi Moneter dan Perhitungan Pendapatan Nasional juga membawanya sebagai dosen terbang di FE Universitas Hasanuddin.

Karier struktural di dunia akademik segera melesat. Beberapa kali nama Daoed Joesoef tercatat sebagai Kepala Departemen dan Ketua Jurusan FE UI dalam kurun waktu 1962-1965. Beberapa jabatan

Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hapenas) Menteri Dr. Daoed Joesoef menganugerahkan satyalencana karya satya kepada 8 karyawan antara lain Drs. T. Umar Ali, Drs. Aob Situmorang, Drs. Widarso, Pj. Karamoy, Ny Suprapti Sukirman, Rosman R, Drs. Hasan Mintara dan Ny. SR. Wuisan Lumempou Ba di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 2 Mei 1980

(Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia)

yang pernah disandangnya sebagai berikut.

1. Kepala Departemen Ekonomi FE UI tahun1962-1965.
2. Kepala Jurusan Umum FE UI tahun 1962-1965.
3. Kepala Jurusan Umum dan Ekonomi Pemerintahan FE UI tahun 1964-1965.
4. Kepala Departemen Administrasi Umum FE UI tahun 1964-1965.

Setelah menyelesaikan pendidikan di Sorbonne, Daoed kembali mengabdi di almamaternya, FE UI. Kecemerlangan akademik di bidang ekonomi segera dimanfaatkan Pemerintah Orde Baru dengan memasukkannya di Centre for Strategic and International Studies (CSIS). Keterlibatannya dalam CSIS bermula pada tahun 1969. Pada waktu itu Sofjan Wanandi ditugasi Ali Moertopo (saat itu Asisten Pribadi Bidang Khusus Presiden Soeharto) berkeliling Eropa. Sofjan menemui tokoh-tokoh intelektual muda Indonesia di sejumlah kota di Eropa, termasuk Daoed Joesoef yang saat itu menjadi Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Prancis. Sofjan tertarik pada kecerdasan dan kekritisan Daoed Joesoef. Kemudian ia mengajaknya ikut-serta membesarkan lembaga *think tank* Orde Baru tersebut.

Keterlibatannya dalam CSIS segera mengibarkan namanya. Tercatat beberapa kali ia memperoleh kedudukan strategis dalam lembaga tersebut.[8] Pada tahun 1970-1973 ia ditunjuk sebagai Direktur CSIS dan anggota Research CSIS Georgetown University, Washington DC, Amerika Serikat, pada tahun 1976-1978. Pada tahun 1983-1999 dia menjabat Ketua Dewan Direktur CSIS dan tahun 1999 berada dalam posisi Pembina Yayasan CSIS. Sebelum dipilih Presiden Soeharto sebagai Menteri P dan K pada tahun 1976-1978 ia menjabat sebagai Asisten Ahli Menteri di Departemen P dan K.

PEMIKIRAN UNTUK PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Tawaran menjadi menteri menghampirinya sepulang dari Sorbonne. Presiden Soeharto memintanya menjadi menteri pada Kabinet Pembangunan III dan dilantik tanggal 31 Maret 1978. Ia bukan mengurus ekonomi yang menjadi keahliannya, melainkan mengurus pendidikan. Saat bertemu Presiden Soeharto di Cendana, Daoed Joesoef pun menyampaikan konsep pendidikan yang disiapkannya. Ia kaget ketika mengetahui Soeharto telah mengetahui konsep pendidikan yang akan diajukannya. "Itu sebuah misteri. Mungkin beliau tahu melalui Mohammad Hatta (mantan Wapres). Pasalnya, sebelum dipanggil Pak Harto, saya memang sempat menyampaikan konsep-konsep saya kepada Hatta. Entahlah," ujar Daoed Joesoef pada *Kompas*.[9]

Sebagai Menteri P & K periode 1978-1983 Daoed Joesoef menyiapkan konsep pendidikan sebagai bagian dari kebudayaan, yang membangun masa depan melalui pendidikan generasi muda. Menurut Daoed, generasi muda merupakan investasi besar bangsa. "Mereka harapan sekaligus manusia masa depan. Melalui pendidikan kita menyiapkan masa depan. Ada nilai investasi di sana dengan memberi generasi muda cukup ilmu."[10]

Daoed Joesoef termasuk salah satu Menteri P & K yang membuat banyak kebijakan yang membikin "heboh" dan memiliki arti tertentu dalam sejarah dunia pendidikan Indonesia khususnya dan dalam kehidupan berbangsa pada umumnya; bahkan beberapa kebijakannya mendapat tanggapan dan protes yang luas di tengah masyarakat. Kebijakan pertama yang menyulut heboh terjadi sekitar empat bulan setelah dilantik sebagai Menteri P & K. Daoed Joesoef menyusun Program Perpanjangan Wajib Belajar Mengajar untuk tahun ajaran 1978 ia memutuskan memperpanjang tahun ajaran selama enam bulan sehingga tahun ajaran berikutnya dimulai bulan Juli 1979. Ada beberapa alasan yang dikemukakannya mengenai kebijakan yang ia lakukan. Pertama, libur panjang bulan Desember selama ini ternyata jatuh pada saat musim hujan sedang lebat-lebatnya sehingga merusak suasana liburan. Kedua, dimulainya tahun ajaran pada bulan Januari (sejak 1966) menyulitkan perencanaan pendidikan karena bulan Januari merupakan akhir tahun angggaran. Oleh karena itu dengan pengunduran ke bulan Juli dimaksud untuk menyesuaikan dengan permulaan tahun anggaran.[11] Di samping itu, pengunduran tahun ajaran juga dimaksudkan untuk program perbaikan dan pengayaan siswa. Kebetulan beberapa saat sebelum kebijakan tersebut dikemukakan terdapat rilis hasil penelitian tentang pelaksanaan pendidikan yang menyebut bahwa daya serap murid terhadap pelajaran di sekolah dasar tidak lebih dari 50-60 %, sementara di Sekolah Lanjutan Pertama (SLP) 40 %, dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sekitar 30 %".[12] Untuk mengatasi persoalan biaya ia mengatakan bahwa selama enam bulan perpanjangan tahun ajaran siswa hanya akan dikenai SPP 50 % dari besaran resmi. Namun penurunan SPP haya berlaku di sekolah negeri, sedangkan sekolah swasta tetap membayar penuh.

Rencana Daoed Joesoef mendapat reaksi luas di tengah masyarakat, yang umumnya menentang. Penolakan berasal hampir dari semua kalangan masyarakat, mulai dari orang tua siswa hingga pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), rektor sejumlah universitas, mantan Menteri P & K, mantan Gubernur DKI Jakarta Raya, dan berbagai pihak lain. Walaupun sekitar empat minggu setelah menyatakan gagasannya Daoed Joesoef mengatakan menunda rencana tersebut, dengan kata lain tidak jadi dilaksanakan pada bulan Juli 1979, namun dalam kenyataannya rencana tetap jalan dan pergantian awal tahun ajaran tetap terjadi.[13]

Kebijakan lain yang dikeluarkan Daoed Joesoef pada hari-hari pertama kepemimpinannya adalah membentuk Komisi Pembaharuan Pendidikan yang akan menyusun sistem pendidikan baru dengan masa kerja selama satu setengah tahun. Komisi itu bertugas mengumpulkan informasi dari seluruh pelosok tanah air, menyusun konsep yang akan diterapkan, dan selanjutnya melempar konsep tersebut ke tengah masyarakat. Kegiatan ini dikatakan Daoed Joesoef sebagai upaya untuk mendapatkan umpan balik dari masyarakat. Ia mengatakan bahwa akhir kerja komisi tersebut adalah lahirnya Undang-undang (UU) Pokok Pendidikan dan Kebudayaan, yang merupakan suatu pekerjaan besar yang mungkin saja tidak akan rampung dalam masa kepemimpinannya di Departemen P & K.

Dengan merujuk pengalaman Prancis dan Jerman, serta mengutip banyak pendapat ahli, Daoed Joesoef berencana memberi perhatian yang jauh lebih besar pada pendidikan prasekolah. Berkali-kali pada hari-hari pertamanya menjadi menteri, ia menyebut bahwa pada usia sampai enam tahunlah tingkat kecerdasan anak berkembang. Ia bahkan mengritik kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan yang selama ini baru memberikan perhatian mulai dari pendidikan SD.

Salah satu kebijakan Daoed yang kontroversial dan memicu protes di kalangan mahasiswa dan masyarakat adalah pemberlakuan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK).

Atas

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joesoef Memberikan keterangan pers mengenai rapat kerja Rektor Universitas/ Institute Negeri dan Kantor Pendidikan dan Kebudayaan se Indonesia di hotel Sahid Jaya, Jakarta

(Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia)

Tengah

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Daoed Joesoef meresmikan diskusi apresiasi sastra dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda ke-51 di Taman Ismail Marzuki tanggal 29 Oktober 1979

(Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia)

Bawah

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Daoed Joesoef membuka pameran Seni Patung Indonesia 1981 di Balai Budaya

(Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia)

Kebijakan NKK berlaku resmi setelah Mendikbud Daoed Joesoef mengeluarkan Surat Keputusan No. 0156/U/1978 tentang Normalisasi Kehidupan Kampus dan BKK berlaku resmi setelah keluarnya Surat Keputusan No. 037/U/1979 tentang Badan Koordinasi Kemahasiswaan. Dengan keluarnya kedua SK tersebut kampus menjadi kawasan "steril" kegiatan politik. Senat Mahasiswa dan Dewan Mahasiswa di semua perguruan tinggi dibubarkan.

Kebijakan yang dianggap kontroversial ini sebetulnya merupakan akumulasi serentetan peristiwa yang melibatkan mahasiswa pada masa-masa sebelumnya. Muara dari berbagai peristiwa tersebut adalah protes terhadap pemerintah dan pemerintah tampaknya tidak ingin lagi menjadi sasaran protes tersebut. Pada tahap paling awal sejarah Indonesia kontemporer, kebebasan yang dinikmati mahasiswa, misalnya, berhasil menumbangkan rezim Orde Lama pada tahun 1966. Selanjutnya pada tahun 1971 mahasiswa memprotes sikap pemerintah yang dianggap berpihak kepada salah satu peserta Pemilihan Umum (Pemilu), Golongan Karya. Keberpihakan pemerintah dianggap mahasiswa menyebabkan Pemilu tidak berjalan sesuai dengan mottonya: jujur dan adil. Oleh karena itu mahasiswa mengkampanyekan "golongan putih", yakni tidak ikut-serta memberi suara dalam Pemilu. Mahasiswa juga mengkritisi rencana pemerintah membangun Taman Mini Indonesia Indah tahun 1973 karena dianggap memboroskan keuangan negara yang saat itu nilainya sebesar Rp 10,5 milyar. Mahasiswa juga memprotes keras derasnya modal asing masuk ke Indonesia dan mereka kemudian turun ke jalan berdemontrasi. Demonstrasi yang kemudian dikenal dengan Mala Petaka Lima Belas Januari (Malari) tahun 1974 itu dianggap pemerintah sebagai kegiatan yang keterlaluan, apalagi dilakukan pada saat kunjungan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka ke Indonesia (Jakarta).

Bagi Daoed Joesoef apa yang dilakukan oleh mahasiswa di atas merupakan kegiatan politik praktis, padahal mahasiswa bukan bagian pelaku politik praktis. Tugas utama mereka adalah membangkitkan kemampuan nalar individu serta mengembangkan kemampuan berpikir analisis dan sintetis. Daoed Joesoef mempersilakan mahasiswa mempelajari politik, tetapi tidak berpolitik praktis. Dengan memperkenalkan NKK/BKK ia berupaya mengembalikan kampus sebagai lingkungan kaum intelektual, lingkungan tempat menuntut ilmu, dan tempat menyemai benih-benih kecendekiawanan. Organisasi kemahasiswaan yang diperbolehkan hanya pada tingkat fakultas (senat mahasiswa) dan jurusan (himpunan mahasiswa). Konsep kebijakan NKK/BKK berhasil "membelenggu" kehidupan kampus agar steril dan jauh dari campur tangan kebijakan politik pemerintah.

Sejalan dengan pemberlakuan NKK/BKK Daoed Joeseof memperkenalkan sistem pendidikan Satuan Kredit Semester (SKS). Melalui sistem ini mahasiswa dituntut untuk segera menyelesaikan kuliah. Mereka diprogram bisa menamatkan pendidikan dalam waktu empat sampai tujuh tahun. Program ini berbeda jauh dengan sistem lama yang mahasiswanya bisa selesai dengan gelar Doktorandus/Doktoranda, Sarjana Hukum, atau Insinyur hingga belasan tahun.[14]

Segenap kegiatan mahasiswa di lingkungan kampus pada saat itu, sebagaimana ditulis Daoed Joesoef dalam buku *Rekam Jejak Anak Tiga Zaman*, tidak sesuai dengan hakikat kampus sebagai masyarakat ilmiah. Akibatnya tidak kondusif bagi usaha pemenuhan kebutuhan demokrasi untuk pembentukan masyarakat sipil; padahal eksistensi masyarakat sipil seharusnya menjadi ideal bagi gerakan mahasiswa dan bukan menjadi politikus insidental-sporadis di jalan raya. Melalui kebijakan NKK/BKK, Daoed Joesoef ingin mahasiswa menjadi pemikir seperti Bung Hatta dan bukan sibuk demonstrasi.

Seperti disebut di atas, pada Agustus 1978 Daoed Joesoef membentuk Komisi Pembaruan Pendidikan Nasional. Komisi ini bertugas merumuskan pendidikan nasional yang bersifat semesta, menyeluruh, dan terpadu. Pertama, yang dimaksud semesta meliputi seluruh elemen kebudayaan, mulai dari logika, etika, estetika, nilai-nilai moral, hingga spiritual. Kedua, menyeluruh dalam arti meliputi setiap jenis

dan jenjang pendidikan di dalam dan luar sekolah. Ketiga, terpadu merupakan pembinaan secara jelas kaitan fungsional dan hubungan perpindahan antara jenis dan jenjang pendidikan.[15]

Pada masa kepemimpinan Daoed Joesoef, Departemen P & K mendapat kucuran dana besar, bahkan pada tahun terakhir jabatannya sebanyak Rp 1,3 trilyun untuk mewujudkan program-programnya. Hingga tahun 1982 telah dibangun 16 Taman Kanak-kanak (TK), 667 Sekolah Menengah Pertama (SMP), 131 Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA), 8 Sekolah Teknik Menengah (STM), 7 Sekolah Luar Biasa (SLB), dan pemugaran 8 ruang kelas, pembangunan politeknik, pengadaan laboratorium, alat peraga, pengadaan buku ajar lebih dari 2,8 juta eksemplar, penataran terhadap 7.278 guru, serta pemberian beasiswa kepada siswa berprestasi. Khusus untuk yang terakhir ia memberi perhatian yang cukup besar kepada siswa-siswa Indonesia bagian timur. Pengadaan buku ajar dan peralatan belajar mencakup hampir semua jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMP, Sekolah Pendidikan Guru Luar Biasa (SPGLB), Sekolah Guru Olah Raga (SGO), KPG, dan Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama (PGSLP).

Kurangnya tenaga pengajar untuk pendidikan dasar dan menengah juga menjadi perhatian Daoed Joesoef. Pada 1979 ia menginstruksikan 10 Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) negeri, 2 IKIP swasta, 12 universitas negeri, dan 2 universitas swasta membuka program diploma akta mengajar khusus untuk calon-calon guru. Dengan demikian, sejak masa Daoed Joesoef, IKIP diberi prioritas penting dalam menyediakan calon-calon guru. Dalam kurikulum 1975 Daoed Joesoef melakukan sedikit revisi, terutama dalam memunculkan nama mata pelajaran matematika.

Daoed Joesoef juga membuka jenjang pendidikan S-2 dan S-3 di UI. Sebagian besar mahasiswa S-2 dan S-3 merupakan staf pengajar perguruan tinggi. Dengan demikian Daoed Joesoef termasuk menteri yang menaruh perhatian besar pada peningkatan kualitas pengajar di perguruan tinggi..

Perhatiannya pada kebudayaan pun tidak diragukan. Daoed Joesoef melihat ada hubungan yang sangat erat antara dunia pendidikan dan kebudayaan. Baginya, pusat kebudayaan adalah lingkungan sekolah mulai SMTA ke bawah. Sekolah sebagai pusat kebudayaan menjadi amat penting untuk membiasakan pada anak didik menggali, mengenal, memahami, menyadari, menguasai, menghayati, dan mengamalkan pembelajaran di sekolah. Sekolah dapat dianggap sebagai pusat kebudayaan apabila telah mampu menciptakan masyarakat belajar, meningkatkan mutu pendidikan, dan menjadi teladan masyarakat.

Sebagai pusat kebudayaan, sekolah menjadi tumpuan pengembangan logika, etika, estetika, dan praktika. Sehubungan dengan itu budaya yang bisa dan seharusnya dikembangkan di sekolah antara lain gemar, biasa dan lalu butuh membaca, rajin dan tekun belajar, suka meneliti, gairah menulis analitis, bertaqwa kepada Tuhan YME, penghayatan dan pengalaman Pancasila, sopan santun serta berkepribadian, berdisiplin, menghargai seni, dapat menikmati seni, dapat menciptakan karya baru, menghargai pekerjaan fisik (di samping karya intelektual), terampil dan cekatan, serta mampu memanfaatkan teknologi.[16]

Jauh sebelum menjadi Menteri P & K Daoed Joesoef telah melakukan gebrakan, terutama menarik perhatian dunia internasional terhadap nasib Candi Brobudur. Sejak menjadi kandidat doktor di Sorbonne, ia menyuarakan kepada UNESCO tentang pentingnya rehabilitasi peninggalan bersejarah tersebut. Lima tahun sebelum menjabat Menteri P & K ia ditunjuk merealisasikan dana dari UNESCO dan memegang tanggung jawab atas proyek pemugaran Candi Brobudur.

Daoed Joesoef pernah menolak gelar Guru Besar yang diberikan UI pada tahun 1978. Kisahnya bermula pada pertengahan bulan Juni 1978. Dekan FE UI Dr. Djuanedi Hadismuarto datang menemuinya di Departemen P & K untuk menyerahkan surat Keputusan Dewan Guru Besar FE UI tentang pengangkatan Daoed Joesoef menjadi profesor. Surat itu perlu persetujuan Menteri Pendidikan, yang notabene dirinya sendiri. "Setelah membaca isinya, surat itu aku robek-robek dan memberikan

robekannya kepadanya," tulis Daoed Joesoef. Ia mengaku tidak suka dengan pengajuan jabatan guru besar tersebut karena bernuansa menjilat dan memanfaatkan posisinya sebagai Menteri P & K. Akibat perbuatan itu ia dikucilkan oleh lembaganya.

Ketika heboh soal kontes berbagai jenis ratu, Daoed Joesoef menyuarakan pendapatnya. Ia termasuk sosok yang tidak menyetujui ajang kontes ratu-ratuan itu. Secara terbuka ia menolak segala jenis pemilihan *miss* dan ratu kecantikan. Ketika itu Indonesia memang tengah dilanda demam kontes *miss* dan ratu-ratuan, misalnya "Miss Kacamata Rayban", "Miss Jengki", "Miss Fiat", "Miss Pantai", "Ratu Ayu Daerah", dan "Ratu Ayu Indonesia". Kecenderungan ini tampaknya ada hubungan dengan maraknya kontes ratu-ratuan di tingkat internasional.

Daoed Joesoef menilai, "Pemilihan ratu-ratuan seperti yang dilakukan sampai sekarang adalah suatu penipuan, di samping pelecehan terhadap hakikat keperempuanan dari makhluk (manusia) perempuan. Tujuan kegiatan ini adalah tak lain dari meraup keuntungan berbisnis, bisnis tertentu; perusahaan kosmetika, pakaian renang, rumah mode, salon kecantikan, dengan mengeksploitasi kecantikan yang sekaligus merupakan kelemahan perempuan, insting primitif dan nafsu elementer laki-laki dan kebutuhan akan uang untuk bisa hidup mewah. Sebagai ekonom aku tidak a priori anti kegiatan bisnis. Adalah normal mencari keuntungan dalam berbisnis, namun bisnis tidak boleh mengenyampingkan begitu saja etika. Janganlah menutup-nutupi target keuntungan bisnis itu dengan dalih muluk-muluk, sampai-sampai mengatasnamakan bangsa dan negara".

Pandangan Daoed Joesoef cukup kritis, apalagi pelaksanaan berbagai kontes ratu-ratuan tersebut secara langsung atau tidak didukung oleh pemeritah, sebab dikaitkan dengan promosi wisata. Kekritisan Daoed Joesoef itu dapat dilihat dari pernyataannya, "Pendek kata kalau di zaman dahulu para penguasa (raja) saling mengirim hadiah berupa perempuan, zaman sekarang pebisnis yang berkedok lembaga kecantikan, dengan dukungan pemerintah dan restu publik, mengirim perempuan pilihan untuk turut "meramaikan" pesta kecantikan perempuan di forum internasional."

Sikap budayanya yang lain, yang juga dianggap kontroversi saat dia menjadi Menteri P&K, adalah keputusan untuk tidak meliburkan sekolah pada bulan Ramadhan, menolak mengucapkan salam (*asalamaualaikum warahmatulallihi wabarakatuh*) dalam acara-acara resmi, serta pernah mengusulkan untuk meniadakan pelajaran Agama Islam di sekolah-sekolah umum.

ENDNOTES

1 *Tempo,* tanggal 24 Januari 2018.

2 Daoed Joesoef, *Emak. Penuntunku Dari Kampung Darat Sampai Sorbonne*. Jakarta: Kompas, 2010.

3 *Kompas*, 24 Maret 2018.

4 *Kompas*, 8 Agustus 2016.

5 *Kompas,* 8 Agustus 2016.

6 *Kompas,* 25 Januari 2018.

7 *Kompas,* tanggal 28 Januari 2018.

8 Daoed Joesoef, *Rekam Jejak Anak Tiga Zaman.* Jakarta: Kompas, 2017.

9 *Kompas,* 8 Agustus 2016.

10 *Haluan,* 20 Mei 1979.

11 *Tempo*, 15 Juli 1978.

12 *Tempo*, 15 Jui 1978.

13 Hal ini bisa dimaklumi, pada masa Orde Baru, kritikan masyarakat luas terhadap kebijakan pemerintah umumnya jarang yang ditanggapi. Saat itu, apa yang dikatakan pemerintah biasanya tetap akan berjalan.

14 Sardiman & Yuliantri, "Dinamika Pendidikan Masa Orde Baru (Kebijakan Pendidikan Daoed Joesoef & Nurgroho Notosusanto", Laporan Penelitian, Tidak Diterbitkan, FIS UNY, 2012).

15 S. Sumardi, dkk, *Menteri-menteri Pendidikan dan Kebudayaan Sejak Tahun 1966.* Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, 1984.

16 Sardiman & Yuliantri, "Dinamika Pendidikan Masa Orde Baru ....", hlm. 17.

Nugroho Notosusanto

Masa Jabatan
19 Maret 1983 – 3 Juni 1985

Nugroho Notosusanto

RIWAYAT HIDUP DAN PENDIDIKAN

Nugroho Notosusanto lahir pada tanggal 15 Juni 1931 di Rembang, Jawa Tengah, dari keluarga terdidik dan terhormat.[1] Ayahnya, Prof. Mr. R.P. Notosusanto, seorang ahli hukum Islam di Fakultas Hukum (FH) Universitas Gadjah Mada (UGM), sekaligus salah satu pendiri UGM. Kakak Nugroho pensiunan Patih Rembang, sedang kakak tertua ayah Nugroho pensiunan Bupati Rembang.[2] Nugroho menikah dengan Irma Savitri Ramelan (Lilik) yang dikenalnya sewaktu menjadi mahasiswa dan dikaruniai tiga orang anak, yakni Indrya Smita, Inggita Suksma, dan Narottama.

Pendidikan dasar Nugroho dilalui di Europeesche Lagere School (ELS). Selepas ELS ia melanjutkan pendidikan ke SMP dan menamatkannya pada tahun 1944. Jenjang sekolah lanjutan tingkat ia tempuh di Yogyakarta.[3] Ketika ia menempuh pendidikan di SMA rakyat Yogyakarta khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya tengah berjuang menghadapi Belanda yang ingin kembali berkuasa di persada ini. Ia terpanggil ikut berjuang dan bergabung dengan Tentara Pelajar (TP) Brigade 17 dan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) Yogyakarta.

Seusai tamat SMA pada tahun 1951 Nugroho dihadapkan pada dua pilihan: meneruskan karier militer dengan mengikuti pendidikan perwira atau menuruti amanat ayahnya untuk menempuh karier akademis. Akhirnya ia memilih mengikuti amanat ayahnya. Atas saran ayahnya ia kuliah pada Jurusan Sejarah Fakultas Sastra (FS) Universitas Indonesia (UI). Gelar Doktorandus (Drs.) di bidang sejarah ia raih tahun 1960. Pada saat itu juga ia diangkat sebagai dosen di almamaternya. Dua tahun kemudian ia mendapat kesempatan menambah ilmu di bidang sejarah dan filsafat di University of London. Karier tertinggi di bidang akademis dicapai ketika ia berhasil menyelesaikan pendidikan doktor di UI dengan disertasi *The Peta Army During the Japanese Occupation in Indonesia*, yang disusun berdasarkan wawancara dan penelusuran dokumentasi sejarah yang ia peroleh dari dalam dan luar negeri. Disertasi itu kelak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Tentara Peta pada Zaman Pendudukan Jepang di Indonesia* dan diterbitkan oleh penerbit Gramedia pada tahun 1979. Pada tanggal 5 Januari 1980 Nugroho dikukuhkan sebagai Guru Besar FSUI dengan orasi ilmiah berjudul *Sejarah Demi Masa Kini.*

Dunia militer memang memiliki peran cukup besar dalam diri Nugroho. Seperti disebut di atas, pada masa SMA Nugroho bergabung ke dalam kesatuan TP. Pada saat dia menjadi dosen di UI, tepatnya sejak tahun 1964, ia juga dipercaya memegang posisi sebagai Kepala Pusat Sejarah Angkatan Darat. Pada tahun 1967 ia mendapat pangkat kolonel tituler berdasarkan SK Panglima AD No. Kep. 1994/12/67. Pada masa kepemimpinannya, Pusat Sejarah Angkatan Darat menerbitkan banyak buku yang berkenaan dengan operasi militer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dalam menumpas berbagai pemberontakan atau gerakan separatis yang terjadi di berbagai daerah, seperti *GOM II: Operasi Penumpasan APRA*, *GOM V: Darah Tersimbah Di Jawa Barat - Gerakan Militer V*, *GOM VI: Penumpasan DI/TII Di Jawa Tengah*, *GOM VII: Gerakan Operasi Militer VII/Penyelesaian Peristiwa DI/TII Di Aceh*, dan *Sejarah Operasi-Operasi Gabungan Terhadap PRRI/Permesta*; serta biografi beberapa tokoh pejuang serta tokoh militer, seperti *Komodor Udara Adi Sutjipto: Bapak Penerbang* dan *Panglima Besar Sudirman: Pemimpin, Pejuang dan Pahlawan.*

---

1 S. Sumardi, dkk, *Menteri-menteri Pendidikan dan Kebudayaan Sejak Tahun 1966.* Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, 1984.

2 Jabatan *patih* dan *bupati* pada masa pra-kemerdekaan merupakan suatu kedudukan yang tinggi, mengingat sulit bagi kalangan pribumi mendapatkan posisi tersebut.

3 Menurut Nugroho Notosusanto dia berkenalan dengan Daoed Joesoef, bahkan ia mengatakan bahwa Daoed Joesoef adalah mentornya ketika SMA dulu. Entah kebetulan atau tidak, ketika diamanahi menjadi Menteri P & K, Daoed Joesoef juga menjadi "senior"nya alias menjadi pendahulunya.

Buku *Tentara Peta pada Jaman Pendudukan Jepang di Indonesia* karya Nugroho Notosusanto, yang bermula dari disertasi *The Peta Army During the Japanese Occupation in Indonesia*

(Sumber: Notosusanto, 1979)

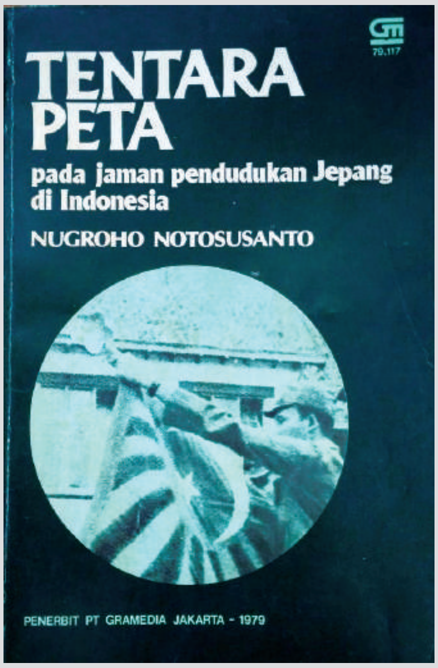

Latar belakang dosen mengantarkan Nugroho menjadi pengajar di berbagai sekolah di lingkungan ABRI. Ia tercatat sebagai staf pengajar pada Sekolah Staf Komando Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (SESKO-ABRI) pada bagian Darat, Laut, Udara, dan Kepolisian. Ia juga tercatat sebagai pengajar pada Lembaga Pertahanan Nasional (LEMHANAS) dan Sekolah Staf Dinas Luar Negeri (SESDILU). Di samping berbagai pekerjaan tersebut, Nugroho juga menjadi Wakil Ketua Harian Pembina Pahlawan Pusat, anggota Dewan Pers, dan anggota Badan Pertimbangan Perintis Kemerdekaan.

Di lingkungan kampus UI Nugroho memegang beberapa jabatan penting. Ia pernah menjadi Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan FSUI, menjadi Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan UI, dan puncak kariernya di lingkungan UI sebagai rektor. Ia dilantik menjadi orang nomor satu di kampus perjuangan itu berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 5/M/1982 untuk periode 1982-1986. Ketika dilantik menjadi Rektor UI ia disambut dengan kecemasan dan caci maki para mahasiswa UI. Mahasiswa menudingnya sebagai militer dan "orang pemerintah" yang disusupkan ke dalam kampus untuk mematikan kebebasan mahasiswa.

Status sebagai dosen, Kepala Pusat Sejarah Angkatan Darat, dan keterlibatnnya dalam berbagai lembaga pendidikan membuat Nugroho semakin akrab dengan dunia tulis-menulis, meskipun bakat tulis-menulis sesungguhnya telah muncul sejak mengikuti pendidikan di sekolah dasar dan sekolah lanjutan. Saat itu ia mempunyai kesenangan mengarang cerita, terutama napas perjuangan.

Bakat menulis Nugroho semakin tersalur ketika menjadi mahasiswa. Ia menjadi anggota redaksi harian *KAMI*. Pun ia menjadi koresponden majalah *Forum* dan menjadi redaktur majalah *Pelajar*. Di bidang keredaksian ia menjadi pemimpin majalah *Gelora*, pemimpin redaksi *Kompas*, anggota dewan redaksi *Mahasiswa*, pengurus Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional (BMKN) tahun 1955-1958, dan bersama Emil Salim pernah menjadi ketua juri hadiah sastra. Sebagai sastrawan ia dimasukkan H.B. Jassin ke dalam Angkatan 66 dan oleh Ajip Rosidi dikategorikan sebagai sastrawan Angkatan Baru (Periode 1950-an).[4]

Di antara pengarang semasanya Nugroho dikenal sebagai penulis esai, padahal sebagian besar pengarang waktu itu menulis cerita pendek (cerpen) dan sajak. Pada mulanya Nugroho memang menulis cerpen dan sajak, yang sebagian besar dimuat di harian ibu kota. Oleh karena tidak pernah mendapat kepuasan dalam menulis sajak, ia kemudian mengkhususkan diri sebagai pengarang prosa, terutama cerpen dan esai. Karya prosanya dimuat di berbagai majalah dan surat kabar, seperti *Gelora, Kompas, Mahasiswa,*

4 Ajip Rosidi, *Ichtisar Sejarah Sastera Indonesia.*(Jakarta: Binacipta, 1969).

Atas

Prof. Dr. Nugroho Notosusanto di tengah-tengah mahasiswa UI, sesaat setelah pelantikannya sebagai Rektor UI, Jakarta

(Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia)

Tengah

Menteri Penerangan Harmoko menerima kunjungan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Nugroho Notosusanto di Departemen Penerangan pada 14 Oktober 1983

(Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia)

Bawah

Mendikbud Prof. Dr. Nugroho Notosusanto memberikan pengarahan pada pembukaan Rapat Koordinasi Pendidikan Menengah pada 30 Nopember 1983

(Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia)

Atas

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof . Dr. Nugroho Notosusanto melantik Inspektur Jenderal Mayjen (Purn) Sukoco Tjokroatmodjo menggantikan pejabat lama Fx. Soediono di Depdikbud Senayan, 27 Agustus 1984

(Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia)

Tengah dan Bawah

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Nugroho Notosusanto bersama Menteri Keuangan Drs. Radius Prawiro menandatangani SKB mengenai pembentukan Tim Koordinasi Pengembangan Akuntansi dihadiri Eselon I di Depdikbud Senayan

(Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia)

Acara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Nugroho Notosusanto bertindak sebagai Inspektur Upacara pada peringatan Hari Pendidikan Nasional 1984 di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 2 Mei 1984

(Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia)

Indonesia, *Cerita*, *Siasat*, *Nasional*, *Budaya*, dan *Kisah*. Ia menyelami zamannya, terutama tentang sastra dan kebudayaan. Tulisan-tulisan yang berisi pembelaan para sastrawan muda, yaitu ketika terdengar suara-suara tentang krisis kesusastraan, menyebabkan Nugroho Notosusanto tertarik dalam dunia sastra Indonesia. Nugroholah yang memprakarsai Simposium Sastra FSUI pada tahun 1953, yang kemudian dijadikan tradisi tahunan sampai tahun 1958.

Sebagai sejarawan Nugroho menulis sejumlah makalah, artikel, dan buku. Sebagian besar karyanya berhubungan dengan dunia militer. Setidaknya ada 50-an karya jenis ini yang dihasilkannya.[5] Sebagian karya tersebut menjadi kontroversi, terutama yang berhubungan sejarah penggalian Pancasila, peran militer dalam kehidupan politik Indonesia, dan perkembangan politik Indonesia kontemporer. Kritik yang dilontarkan kepadanya berkenaan dengan sikapnya yang relatif menonjolkan peran militer dan Soeharto di panggung sejarah Indonesia kontemporer, serta mengesampingkan peran tokoh-tokoh lain seperti Soekarno.

PEMIKIRAN DI BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pada tanggal 19 Maret 1983 Nugroho Notosusanto dilantik menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam Kabinet Pembangunan IV. Langkah pertama yang dilakukannya setelah dilantik adalah memberhentikan dengan hormat Kelompok Kerja Menteri pada bulan April 1983. Nugroho menganggap kelompok ini merupakan bagian eksternal Departemen P & K, padahal ia hanya akan memberdayakan organ internal struktural saja.

Dalam pandangan Nugroho pendidikan nasional merupakan hal paling penting karena menentukan masa depan bangsa dan negara. Pendidikan nasional Indonesia haruslah berlandaskan Pancasila dan bertujuan meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan kecerdasan dan keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian, serta mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Adapun arah pendidikan nasional adalah modernisasi berlandaskan kebudayaan bangsa dan integrasi nasional berdasarkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika.

Nugroho menekankan bahwa pendidikan bukan semata-mata menjadi kewajiban sekolah (pemerintah), tetapi juga menjadi tanggung jawab keluarga dan masyarakat. Ia menegaskan hal itu karena pada kenyataannya pendidikan tidak hanya dilaksanakan di sekolah, tetapi juga di lingkungan keluarga dan masyarakat. Ia menyebut bahwa "waktu belajar" di tengah keluarga dan masyarakat jauh lebih panjang bila dibandingkan dengan waktu belajar di sekolah.

5 S. Sumardi, dkk., *Menteri-menteri Pendidikan dan Kebudayaan…..*, hlm. 80-85.

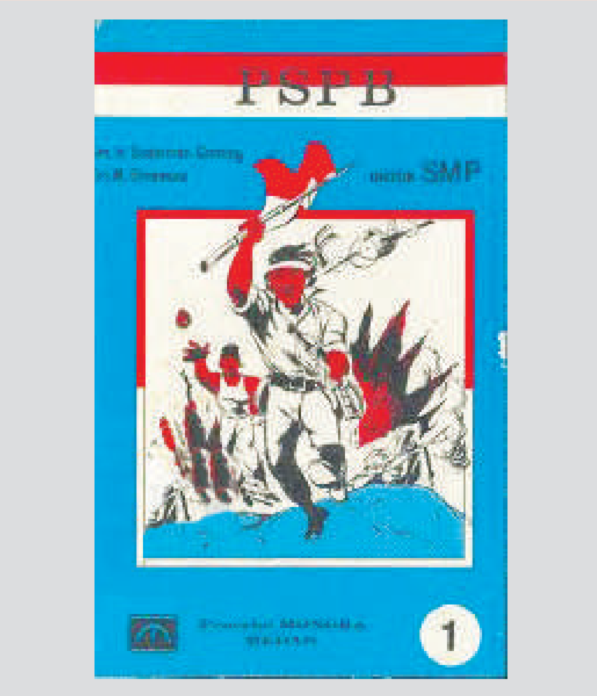

Buku pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) untuk siswa SMP kelas I

(Sumber: Direktorat Sejarah)

Nugroho menganggap bahwa pendidikan membuat peserta didik menjadi orang yang aktif dan kreatif. Sekolah hendaknya menjadi sebuah lembaga yang mendidik siswa mampu berbuat untuk dirinya, mampu mengembangkan apa yang diberikan kepadanya, baik pada masa dia sekolah maupun setelah menamatkan sekolah. Dengan demikian sekolah tidak boleh membuat siswa hanya menerima dan mencukupkan apa yang disajikan oleh para guru semata. Nugroho menganut pandangan "jangan memberi ikan kepada peserta didik, tetapi berilah dia pancing." Memberi ikan hanya akan membuat siswa memakan apa yang diberikan kepadanya, mencukupkan apa yang dimilikinya saja. Sebaliknya bila memberi pancing siswa akan aktif dan memiliki kemampuan untuk berbuat; tidak hanya untuk waktu yang sesaat, tetapi juga untuk masa yang lama dalam hidupnya.[6]

Suatu kebijakan penting dilakukan Nugroho adalah mengubah Kurikulum 1975 menjadi Kurikulum 1984. Melalui perubahan ini Nugroho memasukkan pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) sebagai mata pelajaran wajib mulai dari jenjang sekolah dasar sampai menengah atas. Di samping itu Nugroho juga menjadikan mata pelajarah Sejarah Nasional Indonesia dan Dunia (SNID) sebagai mata pelajaran wajib, terpisah dengan PSPB. Ide dasar dari mata pelajaran ini adalah agar peserta didik memperluas dan mengembangkan jiwa, semangat, dan nilai-nilai 1945 serta meningkatkan rasa cinta kepada tanah air. Dengan mengikuti pelajaran ini peserta didik mengenal sejarah bangsanya dan sejarah dunia dengan lebih baik di samping dapat mengambil pelajaran dari peristiwa sejarah.[7]

Gagasan tersebut didasarkan pada hasil kajiannya mengenai materi ajar di pendidikan dasar dan menengah yang terlalu mementingkan materi yang bersifat saintik sehingga kurang memberi tempat pada pendidikan karakter dan akhlak. Alasan lain yang juga sering disebut sebagai dasar pemberlakuan mata pelajaran yang berkaitan dengan sejarah adalah kenyataan yang ditemukan pada taruna akademi militer. Disebutkan bahwa suatu kali Jenderal M. Yusuf mendapati kenyataan bahwa taruna AKABRI memiliki pengetahuan yang dangkal mengenai sejarah perjuangan bangsanya sendiri. Berangkat dari kenyataan tersebut, M. Jusuf menyampaikan kepada Presiden Soeharto mengenai pentingnya penanaman nilai perjuangan bangsa ke dalam hati siswa dan tidak hanya sebagai pelajaran belaka.

Sejak saat itu PSPB diberlakukan sebagai satu mata pelajaran secara spesifik dan diatur langsung dalam TAP MPR No II/MPR/1982 tentang GBHN, "Dalam rangka meneruskan & mengembangkan jiwa, semangat & nilai-nilai 1945 kepada generasi muda, maka di sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta, wajib diberikan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa."

---

6 S. Sumardi, dkk, *Menteri-menteri Pendidikan dan Kebudayaan…..*, hlm. 77.

7 Rustam Ambong, "Konstelasi Kurikulum Pendidikan di Indoensia" dalam *Jurnal At-Turats*, Vol. 9, No. 2, Desember 2015, hlm. 39.

Atas dan Tengah

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Nugroho Notosusanto membuka raker khusus IKIP/Univ. FKIP dan Kopertis se-Indonesia yang dihadiri Dirjen Pendidikan Tinggi, Sukardji Ranuwirhadjo, para Rektor dan Rektor IKIP Jakarta Prof. Cony Semiawan di Hotel Wisata, Jakarta 1 April 1985

(Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia)

Bawah

Wakil Presiden Umar Wirahadikusumah didampingi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Nugroho Notosusanto sedang membuka kegiatan pendidikan di Jakarta

(Sumber: Arsip Nasional Republik Indonesia)

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Dr. Nugroho Notosusanto sedang memberikan pengarahan di depan para guru

(Sumber: Arsip Nasional Republik Indonesia)

Keberadaan PSPB ternyata menimbulkan banyak tanggapan yang umumnya bernada negatif. Materi PSPB dinilai tumpang tindih dengan materi mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP), Sejarah Nasional, dan Ilmu Pengetahuan Sosial, yang semuanya membincangkan sejarah nasional Indonesia. Di samping itu protes yang sangat keras muncul karena buku ajar untuk mata pelajaran PSPB belum disiapkan. Para guru disuruh mengaplikasikan PSPB tanpa buku ajar; atau, kalaupun sudah ada, dipersiapkan dengan tergesa-gesa. Pedasnya kritik terhadap pelaksanan pengajaran seperti ini bisa dilihat dari munculnya plesetan terhadap kepanjangan PSPB: Pedoman Supaya Pelajar Bingung.

Latar belakang sebagai Guru Besar Ilmu Sejarah UI mendorong Nugroho juga menekankan pentingnya aspek pendidikan humaniora dalam kurikulum. Dalam setiap kesempatan ia melihat pendidikan humaniora tidak mendapat apresiasi dan tidak begitu dikenal luas dalam masyarakat, padahal humaniora merupakan bidang studi yang menafsirkan makna kehidupan manusia dan berusaha menambah martabat penghidupan dan eksistensi manusia. Selain itu ilmu humaniora mampu memberi pengertian yang lebih manusiawi mengenai manusia, yang merupakan kebalikan dari aspek-aspek lain.

Nugroho juga memperhitungkan kebijakan Pemerintah Orde Baru yang ingin menyatukan seluruh ormas dan partai politik di bawah bendera Pancasila. Untuk meningkatkan pemahaman Pancasila tidak cukup melalui pendidikan Pancasila, pendidikan sejarah, PSPB, dan penataran P4. Yang lebih efektif, menurut Nugroho, dilaksanakan dalam *Pancasila in action.* Melalui kebijakan ini penegakan tata pergaulan dan tata krama dapat dilaksanakan melalui pembinaan dan keselarasan.

Di samping PSPB dan pendidikan humaniora, Nugroho banyak berjasa dalam dunia pendidikan baik untuk tingat sekolah dasar, lanjutan, maupun perguruan tinggi. Gebrakan Nugroho di jenjang pendidikan lanjutan atas adalah menghapus jurusan di SMA—yakni Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan Bahasa—dan menggantinya dengan lima jurusan, yaitu (1) Program A1, Program Ilmu Fisik, meliputi bidang studi matematika, fisika, kimia, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia; (2) Program A2, Ilmu Biologi, yang mencakup bidang biologi, matematika, kimia, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris; (3) Progam A3, Ilmu-ilmu Sosial, mencakup bidang ekonomi termasuk akuntansi, PMP, sejarah nasional Indonesia dan dunia, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris; (4) Program A4, Pengetahuan Budaya, meliputi PMP, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sejarah nasional Indonesia dan dunia, dan pendidikan seni; serta (5) Program A5, yang menjuruskan siswa SMA menekuni ilmu-ilmu agama. Selain itu dikenal juga Program B, yang khusus untuk mengantarkan lulusan SMA masuk ke dunia kerja. Sayangnya Program B dicap sebagai program untuk siswa buangan.[8]

8 Darmaningtyas, *Pendidikan yang Memiskinkan* (Yogyakarta: Galang Press, 2004). hal. 75.

Di dunia pendidikan tinggi Nugroho mengganti Proyek Perintis dengan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (Sipenmaru). Melalui sistem ini penerimaan calon mahasiswa baru di semua perguruan tinggi dilakukan secara bersamaan sehingga menghapus pengelompokan perguruan tinggi yang hebat dan tidak hebat. Bersamaan dengan itu juga diperkenalkan penerimaan mahasiswa baru tanpa tes, yang dikenal dengan nama Penelusuran Minat dan Kemampuan (PMDK). Di samping itu ia membuka Universitas Terbuka (UT) sebagai perguruan tinggi negeri paling bungsu di Indonesia. Nugroho juga meninggalkan kesan sebagai seorang menteri yang suka mengganti penamaan perguruan tinggi, misalnya mengubah nama Akademi Seni Rupa Indonesia (ASRI) menjadi Institut Seni Indonesia (ISI). Hal ini ditandai dengan perubahan nama ASRI Yogyakarta mejadi ISI Yogyakarta melalui Keputusan Presiden No. 39/1984 dan peresmian penamaan itu oleh Nugroho pada tanggal 23 Juli 1983.

Dalam rangka membantu siswa yang kurang mampu Nugroho meluncurkan Program Orang Tua Asuh (OTA). Program yang diluncurkan di Yogyakarta tersebut didukung Presiden Soeharto. Dukungan presiden ternyata berdampak luas, sebab dalam waktu yang tidak berapa lama sudah tercatat banyak orang tua asuh di berbagai sekolah. Nugroho menyebutkan bahwa melalui Program OTA seseorang bisa memberikan uang sebesar Rp 5.000,00 kepada sebuah sekolah dan sekolah tersebut akan menentukan siswa mana yang akan menjadi “anak asuh” orang bersangkutan.[9] Ia sendiri mengangkat seorang anak asuh bernama Yahda Tragedi, anak seorang penjual koran.

Khusus untuk program wajib belajar Nugroho mendorong Departemen P & K memberi kesempatan kepada setiap anak bangsa memperoleh pendidikan, sekaligus mengarah pada kebutuhan pembangunan di segala bidang dengan sistem pembinaan yang mantap dan terpadu.

Kebijakan lain Nurgoho adalah mengganti kependekan nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dari Departemen P dan K menjadi Depdikbud, Departemen Pertahanan Keamanan menjadi Dephankam, dan sebagainya. Bunyi singkatan-singkatan tersebut dinilai banyak pihak terdengar buruk dan mengacu pada singkatan yang lazim digunakan di dunia militer Indonesia, yang oleh sebagian kalangan disebut tidak berdasar kaidah penyingkatan yang benar, misalnya mengunakan huruf-huruf awal, tengah, atau belakang. Dengan mengacu pada kelaziman di dunia ABRI, pola penyingkatan yang dilakukan Nugroho campur aduk: ada ambilan huruf awal, tengah, dan akhir.[10]

Adanya bau militer dari kebijakan Nugroho juga dikaitkan orang dengan keterlibatannya dalam pembuatan skenario film *Pengkhianatan G30S/PKI*. Film tersebut dianggap sebagai versi resmi Orde Baru tentang tragedi yang terjadi pada penghujung September 1965 dan menjadi tontonan wajib untuk murid-murid sekolah di seluruh Indonesia hingga tahun 1997, yang diputar sebagai acara tahunan TVRI pada malam tanggal 30 September.

Meski demikian Nugroho diakui berjasa banyak pada Negara Republik Indonesia. Puncak pengakuan atas sumbangan Nugroho terhadap bangsa Indonesia adalah pemberian Bintang Dharma, Bintang Gerilya, Bintang Yudha Dharma Nararya, Satyalencana Penegak, Satyalencana Penegak Perang Kemerdekaan I dan II, dan Bintang Matahaputra Adi Pradhana.

Pada saat sebagian kebijakannya tengah dihebohkan masyarakat ia meninggal dunia pada hari Senin tanggal 3 Juni 1985 pukul 12.30 di kediamannya karena pendarahan otak akibat tekanan darah tinggi. Oleh karena itu kebijakan-kebijakannya tidak bisa dilaksanakan dengan utuh. Apalagi menteri yang menggantikannya juga memiliki kebijakan tersendiri pula.

---

9 *Antara*, 25 Juli 1984.

10 Darmaningtyas, *Pendidikan yang Memiskinkan*, hal. 75.

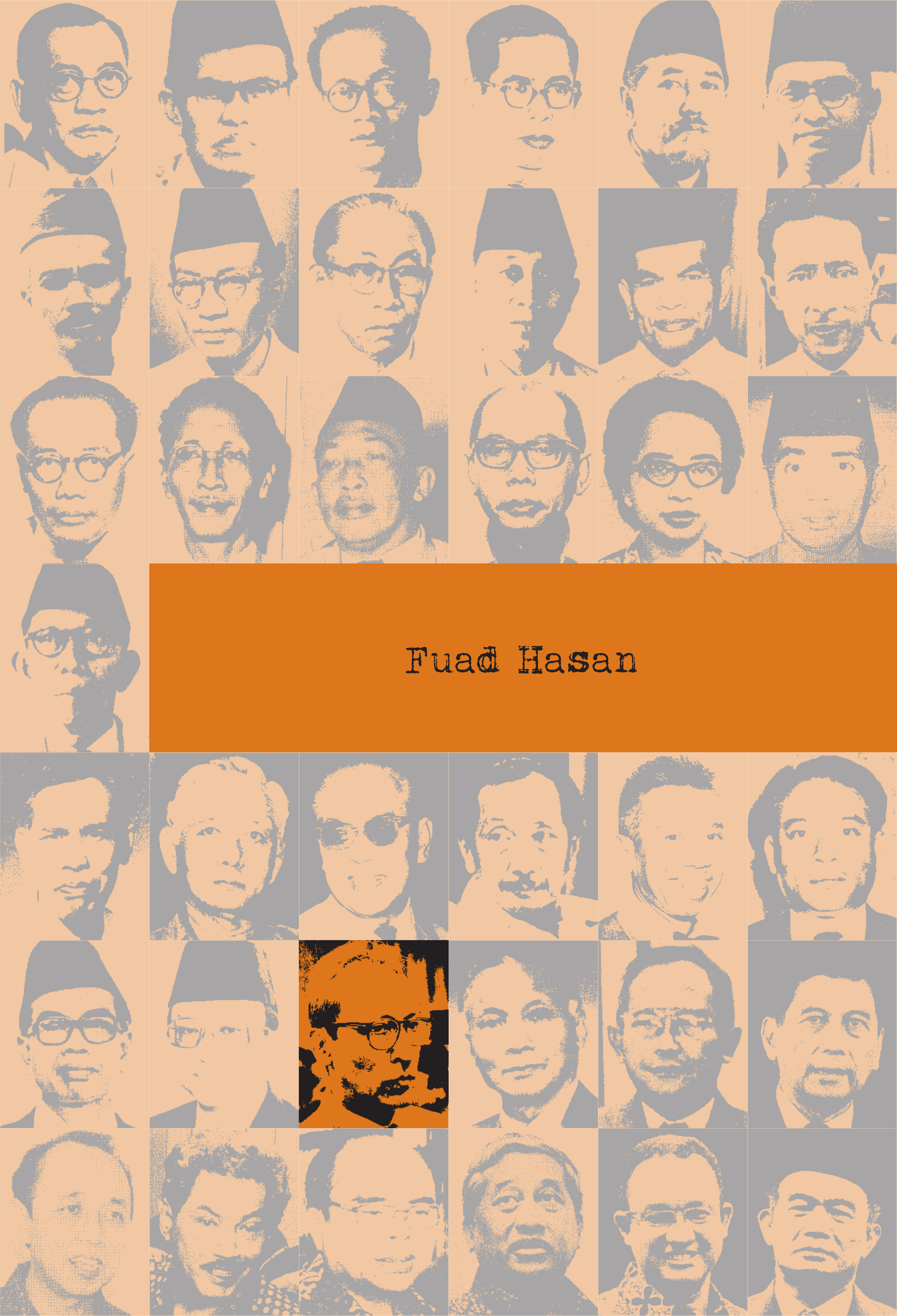

Fuad Hasan

Masa Jabatan
3 Juni 1985 – 17 Maret 1993

Fuad Hasan

MASA KECIL DAN PENDIDIKAN

Fuad Hasan dilahirkan di Semarang, Jawa Tengah, tanggal 26 Juni 1929, anak kedua dari empat bersaudara. Ayahnya, Ahmad Hasan, pemain mandolin yang piawai dan membuat Fuad Hasan mewarisi darah seni kuat; bahkan sejak kecil ia bermimpi menjadi seorang konduktor. Tidak hanya sekedar bermimpi, bahkan sejak usia sekolah dasar pun ia telah giat dalam dunia musik. Ia sering bolos sekolah hanya karena ingin bermain atau berlatih musik. Alat musik yang paling disenanginya sewaktu kecil adalah biola. Ia sering berlatih dan bermain musik di Radio Republik Indonesia (RRI) Surakarta. Kegilaan bermain musik, yang menyebabkannya sering bolos sekolah dan kebiasaan tidak baik, ini akhirnya diketahui orang tuanya. Namun ayahnya yang bersifat liberal tidak serta-merta bersikap keras melarang Fuad bermain musik, tetapi mengarahkan dan mengingatkan bahwa pendidikan formal juga perlu dan—yang paling penting—ayahnya ternyata merestui minat Fuad dengan mengatakan: kalau memilih terjun ke dunia musik terjunlah secara total, jangan setengah-setengah.

Ia menyelesaikan sekolah dasar hingga sekolah lanjutan atas di Sala. Setelah tamat sekolah lanjutan atas, berbekal restu sang ayah dan ditambah dengan keinginan besar untuk memperdalam keahlian dalam bidang musik, tahun 1950 ia berangkat ke Jakarta. Di ibukota ia mendaftar untuk mengikuti tes sekolah musik di Roma, Italia. Sayangnya, tekad yang sudah mengkristal tersebut mencair. Ia mengurungkan niat menjadi musikus profesional. Ada informasi yang mengatakan bahwa Fuad mundur karena pengaruh teman serta ada kesadaran dari diri sendiri, bahwa banyak orang bermain musik selama puluhan tahun tetapi nyaris tidak mendapat apresiasi yang wajar dari khalayak.

Fuad kemudian menjatuhkan pilihan melanjutkan pendidikan di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (UI). Pendidikan sarjananya selesai pada tahun 1958. Otak yang cemerlang mengantarkannya melanjutkan pendidikan ke S2. Ia mendalami filsafat pada Fakultas Psikologi dan Filsafat Toronto University, Kanada, yang diselesaikannya pada tahun 1962. Adapun gelar Doktor diperoleh pada tahun 1967 di Fakultas Psikologi UI dengan disertasi berjudul *Neurosis sebagai Konflik Eksistensial.*

KARIER

Sebelum menduduki kursi tertinggi di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud), Fuad Hasan memiliki serentetan panjang pekerjaan, sebagian di antaranya berhubungan dengan dunia pendidikan. Ia mengawali karier sebagai asisten pada Balai Psikoteknik Departemen P & K (1952-1956), kemudian menjadi Asisten Dosen Jurusan Psikologi Fakultas Kedokteran UI (1956-1858). Ketika Presiden Soekarno membentuk organisasi berbasis intelijen pada saat konfrontasi Indonesia-Malaysia dengan nama Komando Operasi Tertinggi G-5 (KOTI G-5) ia ditunjuk sebagai salah seorang tenaga ahli pada lembaga tersebut (1965). Setelah Soeharto naik ke tampuk pemerintahan Republik Indonesia (RI), ia masuk ke dalam lingkungan istana dan diangkat menjadi Anggota Tim Ahli bidang Politik Staf Presiden (1966-1968). Di ujung kariernya sebagai Anggota Tim Ahli bidang Politik Staf Presiden ia diangkat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat (DPR/MPR).

Sebagai pendidik, Fuad Hasan tidak hanya aktif menjadi dosen di almamaternya, tetapi juga tercatat sebagai pengajar Sekolah Komando Angkatan Darat (Seskoad), Sekolah Komando Angkatan Laut (Seskoal), dan Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas). Di almamaternya ia tercatat pernah menjadi Dekan Fakultas Psikologi UI dan pada waktu yang bersamaan juga menjadi Direktur Studi Strategis Dewan Pertahanan Keamanan Nasional (1972-1976). Segera setelah mengakhiri tugasnya di dua lembaga ini ia diangkat menjadi Dua Besar RI untuk Mesir merangkap Sudan, Somalia, dan

Jibouti (1976-1980). Kiprahnya sebagai duta besar dan pengalaman yang malang-melintang di dunia pendidikan mengantarkannya sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri (1980-1985). Dua tahun setelah menduduki jabatan itu untuk kedua kalinya ia diangkat menjadi anggota MPR (1982-1987).

Pada tanggal 30 Juli 1985 Fuad Hasan dilantik Presiden Soeharto sebagai Mendikbud menggantikan Nugroho Notosusanto yang meninggal dunia pada tanggal 3 Juni 1985. Dalam amanat saat pelantikan, Soeharto mengingatkan bahwa dalam zaman pembangunan Mendikbud mempunyai tugas yang tidak ringan karena pendidikan dan kebudayaan merupakan bagian yang teramat penting dari keseluruhan pembangunan bangsa dalam arti yang seluas-luasnya. Kecerdasan, kemampuan, bahkan juga watak bangsa Indonesia pada masa yang akan datang, lanjut Soeharto, ditentukan oleh pendidikan yang sekarang diberikan kepada anak-anak bangsa dan pengembangan budaya pada masa kini. Oleh karena itu salah satu pokok tugas negara adalah meningkatkan kecerdasan dan memperkuat watak bangsa serta mengembangkan budaya, agar bangsa Indonesia mampu tumbuh menjadi bangsa yang maju dan berbudaya, kuat, dan terhormat.

Setelah masa kerja Kabinet Karya Pembangunan IV berakhir, Fuad Hasan masih dipercaya memimpin Depdikbud pada kabinet berikutnya (1988-1993). Dalam dua masa kepemimpinan itu terlihat jelas ada perbedaan kebijakan pendidikan dan kebudayaan yang dijalankan Fuad Hasan.

Penampilan Fuad Hasan sebagai pendidik yang juga masuk dalam birokrasi pendidikan diabadikan oleh murid terbaiknya, jurnalis *Tempo* Goenawan Mohamad, yang menjadi mahasiswanya di Fakultas Psikologi UI. "Dosen kurus berpakaian putih-putih itu bernama Fuad Hasan. Kini dia Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Saya tak tahu bagaimana kelak dia akan dikenang sebagai seorang menteri dalam sejarah, tapi dia akan tetap saya ingat sebagai seorang guru dari jenis yang punya jejak panjang," demikian gores ingatan Goenawan dalam *Catatan Pinggir 3*.[1]

Pujian yang dilayangkan Goenawan bukan isapan jempol. Fuad Hasan, menurut Goenawan Mohamad, bukan sekadar sosok yang pintar di depan kelas tetapi juga memiliki kelebihan lain. "Guru jenis ini bisa menggugah minat. Ia bisa merangsang keasyikan menalar hingga kita pun jadi tekun menggunakan kapasitas pemikiran kita untuk memecahkan soal," tulis Goenawan dalam *Catatan Pinggir 3* dalam sub judul "Guru".

Tulisan-tulisan Goenawan, terutama pada tokoh nasional hingga orang yang dikagumi, jarang berisi pujian untuk sosok yang mampu mengubah paradigma hidupnya. Pada akhir tulisan mantan Pemred *Tempo* ini menegaskan bahwa tidak semua guru bermental sama dengan Fuad Hasan. Bukan tanpa alasan bila Goenawan kemudian memperkuat argumentasinya, "Ia menghidupkan generator dalam diri kita untuk menjelajahi cakrawala pengetahuan dan menjelajahi cakrawala adalah proses yang tak habis-habisnya. Karena itu jejaknya panjang."

PEMIKIRAN UNTUK PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

"Naik di tengah jalan" menyebabkan Fuad Hasan tidak membuat perubahan besar pada tahun-tahun pertama kepemimpinannya di Depdikbud; bahkan ia berjanji tidak akan menjadikan anak didik sebagai kelinci percobaan sebagaimana pameo yang berkembang di tengah masyarakat "ganti pejabat, ganti kebijakan". Menyikapi heboh mengenai Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) yang dicanangkan Nugroho Notosusanto, Fuad Hasan lebih memilih sikap meredam kehebohan. Tidak banyak pernyataan yang dia keluarkan sehubungan dengan kebijakan tersebut. Sebagai gantinya, Fuad memilih berkonsentrasi pada penuntasan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yang akan menjadi dasar Sistem Pendidikan Nasional.[2]

Fuad Hassan, semasa menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sedang membuka Pameran Lukisan Paris Jakarta 1950-1960

(Sumber: http://arsip.galeri-nasional.or.id/documentations/11917/detail_file)

Presiden Soeharto dan Wapres Umar Wirahadikusumah berbincang dengan Mendikbud Prof. Dr. Fuad Hassan selesai pelantikan di Istana Negara Jakarta 30 Juli 1985

(Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia)

Fuad Hasan merancang dan melahirkan beberapa kebijakan strategis yang kelak berpengaruh terhadap kurikulum pendidikan. Fuad Hasan, yang berlatar belakang psikologi, memberi porsi terbesar terhadap ilmu-ilmu humaniora dalam kurikulum. Salah satu kebijakannya mempertahankan kurikulum sebelumnya adalah mata pelajaran PSPB yang dirancang Nugroho Notosusanto. Mata pelajaran PSPB, yang ada sejak tahun 1984, memang memberi warna tersendiri dalam dunia pendidikan. Meski ada yang menuding bahwa kemunculan mata pelajaran itu sarat dengan nuansa politik, pelanggengan kekuasaan Orde Baru, dan menasionalisasikan masalah internal ABRI, namun keberadaan PSPB menegaskan pentingnya pengayaan nilai-nilai kesejarahan, terutama untuk peserta didik.

Dua tahun dalam masa jabatannya, Fuad Hasan kembali merancang kebijakan strategis. Pada tanggal 1 Juli 1987 ia menyampaikan gagasan pelaksanaan Evaluasi Belajar Tahap Akhir Tingkat Nasional (EBTANAS) dilaksanakan secara desentralisasi pada tahun-tahun mendatang. Gagasan tersebut dilontarkan dengan tujuan menyempurnakan sistem ujian akhir di sekolah.[3] Ia melandasi gagasannya dengan, "Pelaksanaan Ebtanas secara sentralisasi yang dilakukan selama ini merupakan pekerjaan raksasa dan banyak mengandung kerawanan," demikian katanya kepada wartawan di Bina Graha, Jakarta, setelah melapor kepada Presiden Soeharto.[4] Selain itu pelaksanaan Ebtanas dengan tersentralisasi membuat jurang pemisah antara pusat dan daerah menjadi lebih besar. Kepada jurnalis *Antara* ia mengakui bahwa munculnya gagasan desentralisasi Ebtanas dipicu banyaknya keluhan tentang pelaksanaan ujian akhir yang memberatkan peserta didik.

Fuad Hasan menyampaikan ide tersebut kepada Presiden Soeharto. Presiden pun menyetujui dan menginginkan agar Mendikbud selekasnya membuat penelitian dan pengkajian atas rencana desentralisasi Ebtanas. Untuk menindaklanjuti hal itu ia menyampaikan gagasan desentralisasi Ebtanas dalam rapat kerja nasional Depdikbud tanggal 13-15 Juli 1987. Apabila desentralisasi Ebtanas dilaksanakan Depdikbud dapat menekan biaya pelaksanaan Ebtanas yang kian membengkak. "Pengkajian yang akan dilakukan itu diharapkan dapat mengetahui apakah sistem desentralisasi tidak akan lebih mahal biayanya, mengingat sangat luasnya wilayah Indonesia", demikian tegas Fuad Hasan di depan wartawan dalam jumpa pers. Satu hal yang menjadi catatan Mendikbud untuk gagasan desentralisasi adalah menjamin mutu pendidikan tetap terjaga.

Selain persoalan desentralisasi Ebtanas, Fuad Hasan melihat ada kecenderungan baru di kalangan siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP), yang memilih sekolah kejuruan, seperti Sekolah Teknik Menengah (STM) dan Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA), dibandingkan melanjutkan ke Sekolah Menengah

Penyerahan hadiah & penghargaan kepada pengarang & penerbit Buku terbaik terbitan tahun 1984 & 1985 oleh Mendikbud Prof. Dr. Fuad Hasan bertempat di Aula Depdikbud Jakarta, 1 Desember 1987

(Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia)

Atas (SMA).[5] "Kalau dugaan itu benar, ini gejala baik, sebab dengan begitu calon-calon yang akan memasuki perguruan tinggi lebih terseleksi," kata Fuad kepada wartawan *Antara*.

Mendikbud memandang gejala tersebut sebagai langkah maju peserta didik, yang lebih memilih program studi praktis serta condong mencari pekerjaan daripada melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Dari data yang diperoleh *Antara* memang terjadi penurunan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (Sipenmaru) tahun 1987, yakni diiktuti 454.184 lulusan SLTA. Jumlah ini berkurang hampir 15 % dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 600.000 orang. "Depdikbud akan meneliti sebab-sebab menurunnya jumlah peserta Sipenmaru itu. Namun dugaan sementara adalah mulai banyaknya lulusan SLTA yang lebih memilih program studi praktis serta condong mencari pekerjaan ketimbang meneruskan studi di perguruan tinggi negeri," ungkap Fuad lebih lanjut kepada *Antara.*

Pada jenjang pendidikan tinggi, Fuad Hasan melakukan dua perubahan penting dan sangat berkesan dalam sejarah pendidikan tinggi Indonesia, yakni perubahan pola seleksi masuk perguruan tinggi dan perubahan pemakaian gelar kesarjanaan. Pada periode sebelumnya pola seleksi dinamakan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (Sipenmaru). Di samping menerima calon mahasiswa lewat tes tertulis juga ada penerimaan mahasiswa tanpa tes yang dikenal dengan nama Penelusuran Minat dan Keahian (PMDK). PMDK dianggap kurang adil karena tidak berlaku untuk semua perguruan tinggi. Dengan alasan itu, ditambah dengan sejumlah alasan lainnya, tahun 1989 diputuskan mengganti pola penerimaan mahasiswa baru dengan nama Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN). Dari sejarah seleksi penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri di Indonesia pola UMPTN inilah yang paling lama digunakan (sampai dengan tahun 2001). Seleksi penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan oleh masing-masing perguruan tinggi. Namun karena banyak perguruan tinggi yang ikut serta dalam seleksi pola UMPTN, pelaksanaan ujian dikoordinasikan dalam tiga rayon untuk mempermudah peserta ujian, yakni Rayon A, Rayon B, dan Rayon C. Rayon A meliputi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang ada di wilayah Sumatera, Kalimantan Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Rayon B mencakup PTN yang berada di wilayah Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Adapun Rayon C meliputi Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya (Papua). Seleksi diselenggarakan secara bersamaan dengan soal sama atau setara. Hal yang menentukan calon diterima atau tidak adalah nilai kelulusan yang ditentukan oleh masing-masing lembaga yang dipilih calon mahasiswa. Tinggi atau rendahnya nilai kelulusan tergantung pada "nilai" dari program studi atau fakultas bersangkutan.

Kebijakan lain Mendikbud Fuad Hasan yang berhubungan dengan mahasiswa adalah pencabutan NKK/ BKK. Kebijakan pada masa Daoed Joesoef itu dicabut oleh Fuad Hasan dan diganti dengan Pedoman

Atas

Renungan Budaya-kumpulan pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang diterbitkan Balai Pustaka

(Sumber: Istimewa)

Tengah

Menteri Pendidikan dan Kebudayan Prof. Dr. Fuad Hassan menghadiri acara penutupan Kongres Bahasa Indonesia V di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, 3 November 1988

(Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia)

Bawah

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Dr. Fuad Hassan meninjau stand PT. Gunung Agung pada pembukaan Pesta Buku Anak dan Remaja II bertempat di Balai Sidang Jakarta, 23 November 1985

(Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia)

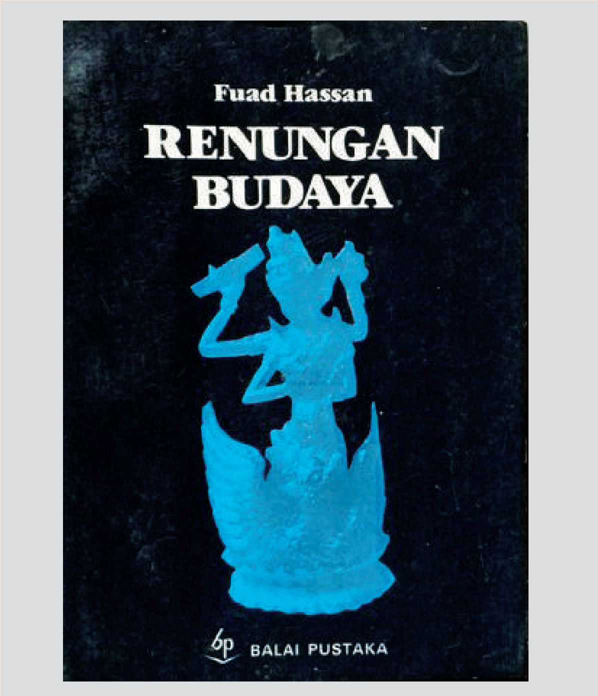

Pada masa jabatannya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Fuad Hassan memprakarsai pemugaran Galeri Nasional. Proses pemugaran ini selesai pada masa jabatan Wardiman Djojonegoro

(Sumber: Direktorat Sejarah)

Umum Organisasi Kemahasiswaan (PUOK). Melalui PUOK yang ditetapkan berdasarkan SK Mendikbud No. 0457/U/1990 menetapkan bahwa organisasi kemahasiswaan intra-kampus yang diakui adalah Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT), yang di dalamnya terdiri dari Senat Mahasiswa Fakultas (SMF) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Kebijakan tersebut dikeluarkan untuk menanggapi tuntutan mahasiswa agar mahasiswa diberi ruang untuk bergerak dan Dewan Mahasiswa (Dema) dihidupkan kembali. Pemerintah, melalui Menteri P dan K, mempersilakan mahasiswa bergerak tetapi tidak menggunakan kata Dema karena organisasi tersebut telah dibekukan. Sebagai penggantinya pemerintah menawarkan konsep SMPT dengan memposisikan mahasiswa sebagai mitra pimpinan universitas dan bukan berdiri sendiri seperti Dema. Dalam aturan ini semua organisasi mahasiswa di perguruan tinggi harus memiliki corak yang sama dan satu-satunya yang diakui, yaitu SMPT.

Perubahan lain yang juga dilaksanakan pada masa kepemimpinan Fuad Hasan adalah penamaan gelar kesarjanaan, terutama untuk gelar sarjana strata 1. Ada dua inti perubahan. Pertama, mengakhiri penggunaan gelar yang berbau kebelanda-belandaan atau kebarat-baratan dan mengganti gelar yang bernuansa Indonesia. Kedua, meyesuaikan penamaan atau penggunaan gelar kesarjanaan dengan kaidah bahasa Indonesia yang sekaligus menyebutkan bidang ilmu dalam bahasa Indoensia dari kesarjanaan pemegang gelar. Kebijakan ini sekaligus mengakhiri penggunaan gelar doktorandus (Drs.) dan gelar doktoranda (Dra.) sebagai bentuk feminim Drs. serta gelar insinyur (Ir). Gelar-gelar ini telah digunakan sejak zaman kolonial Belanda untuk berbagai bidang ilmu. Gelar Drs. atau Dra. bisa saja digunakan oleh sarjana sejarah, geografi, arkeologi, bahasa atau sastra, politik, sosiologi, filsafat, ushuludin, tarbiyah, dan sebagainya. Gelar Ir. juga digunakan oleh sarjana berbagai bidang ilmu, mulai dari teknik, pertanian, hingga peternakan. Gelar tersebut diganti dengan menyebutkan sarjana di depan bidang ilmu yang disandang berdasarkan kelompok bidang/rumpun ilmu, seperti Sarjana Humaniora, Sarjana Teknik, Sarjana Pendidikan, dan Sarjana Pendidikan Islam.

Walaupun sempat heboh pada masa awal diperkenalkan, secara lambat namun pasti perubahan tersebut diterima oleh masyarakat kampus dan umum. Apalagi, sebetulnya, pada masa sebelum perubahan ini dilakukan pola penggunaan gelar dengan menyebut sarjana dan bidang ilmu telah dikenal juga, misalnya sarjana hukum (S.H.).

Fuad Hasan juga memperhatikan masalah kebudayaan, bahkan perhatian itu hadir sejak hari-hari pertama ia menjabat Mendikbud. Perhatian itu diwujudkan dalam penataan atau perumusan ulang kebijakan kebudayaan yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Kebudayaan. Rumusan kebijakan yang mencakup delapan aspek/unsur—yang kemudian dikenal dengan Pokok-pokok

Fuad Hassan bersama Dr Ing Wardiman Djojonegoro yang baru saja diangkat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebelum memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta, Jumat 19 Maret 1993

(Sumber: *Kompas*/ Hariadi Saptono)

Kebijakan Pengelolaan Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa—itu diberlakukan tahun 1986. Kedelapan aspek/unsur budaya yang dimaksud terdiri atas 1) kepurbakalaan, 2) kesejarahan, 3) nilai tradisional, 4) kesenian, 5) kebahasaan dan kesastraan, 6) penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 7) Permuseuman, serta 8) perpustakaan dan perbukuan.[6] Kebijakan inilah yang kemudian menjadi acuan bagi keberadaan lembaga kebudayaan di pemerintahan, yang berarti kedelapan unsur kebudayaan tersebut dijadikan landasan atau dasar pembentukan lembaga-lembaga kebudayaan di berbagai tingkat atau lembaga pemerintah.

Fuad Hasan memprakarsai pemugaran Galeri Nasional dan mengganti nama Galeri Nasional menjadi "Gedung Pameran Seni Rupa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan". Renovasi Galeri Nasional selesai pada tahun 1994 saat Mendikbud dijabat oleh Wardiman Dojojonegoro.[7]

Perhatian Fuad Hasan dalam dunia pendidikan juga dapat ditelusuri dalam beberapa karyanya dalam bentuk buku dan makalah. Dalam sebuah makalah seminar yang dipresentasikan tanggal 15 Februari 1987 di UI, ia menegaskan bahwa pendidikan merupakan nilai tambah bagi kebudayaan di mana manusia menjadi tercerahkan dan merdeka dalam situasi pendidikan. Dengan kata lain, pendidikan bukan saja upaya pengalihan pengetahuan (*transfer of knowledge*), melainkan juga pengalihan nilai-nilai budaya (*transfer of cultural values*).[8]

Khusus pemikiran Fuad Hasan mengenai kebudayaan bisa dijumpai dalam beberapa karyanya. Pendapatnya mengenai seputar asal-usul budaya Nusantara diuraikan cukup lengkap, untuk menggambarkan kekayaan budaya Nusantara dari sisi unsur-unsurnya bisa ditelusuri dalam karya Koentjaraningrat berjudul *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia.* Menurut Fuad, budaya Nusantara yang plural merupakan kenyataan hidup (*living reality*) yang tidak dapat dihindari. Kebhinnekaan ini harus dipersandingkan, bukan dipertentangkan. Keberagaman merupakan manifestasi gagasan dan nilai sehingga saling menguat dan untuk meningkatkan wawasan dalam saling apresiasi.[9]

Renungan Budaya merupakan buku kumpulan karangan dan pidato sambutan Fuad Hassan semasa menjabat sebagai Mendikbud yang mengandung buah pikiran mendasar tentang perkembangan kebudayaan. Pengertian kebudayaan, menurut perspektif Fuad, ditangkap dalam aspeknya yang luas sehingga mencakup bidang-bidang kehidupan yang lebih menukik daripada sektor-sektor seni sastra belaka. Sangkutan yang mendalam dalam kebudayaan mengajak kita berbincang mengenai pendidikan nasional, disiplin nasional dan sosial, kependidikan dan lingkungan hidup, ilmu dan teknologi, sejarah, pertahanan dan keamanan, yang semuanya itu dirangkum dalam penglihatan yang berinti pada konsep kebudayaan. Dalam buku itu Fuad Hasan juga memperbincangkan bidang-bidang kehidupan yang lebih

dekat pada estetika yang secara intuisi selalu melekat pada pengertian kebudayaan, yakni seni, sastra, film, dan bahasa. Uraian-uraiannya berupa hasil renungan budaya Fuad Hasan, dalam arti batas-batas pikirannya tidak terikat pada sistem yang terlalu ketat, tetapi berlandaskan pada suatu pandangan hidup yang bernilai filsafat.

Cinta Fuad Hasan terhadap dunia pendidikan, kebudayaan, dan filsafat juga bisa ditelusuri dalam beberapa tulisannya yang lain. Salah satu di antaranya buku berjudul *Berkenalan Dengan Eksistensialisme*, diterbitkan oleh Pustaka Jaya. Keistimewaan buku ini sampai dengan tahun 2005 menunjukkan cetakan ke-9. Cetakan ke -1 tahun 1973, ke-2 tahun 1976, ke-3 tahun 1985, ke-4 tahun 1989, ke-5 tahun 1992, ke-6 tahun 1994, ke-7 tahun 1997, ke-8 tahun 2000, dan ke-9 tahun 2005. Buku setebal 144 halaman ini merangkum dan menjelaskan buah pikir para filsuf dunia, antara lain Kierkegaard, Nietzsche, Berdyaev, Jaspers, dan Satre.

Karya lain Fuad Hasan yang berhubungan dengan filsafat, psikologi, dan sastra adalah *Pengantar Filsafat Barat* (1995), *Apologia*, terjemahan karya Plato disertai pengantar tentang filsafat, *Neurosis sebagai Konflik Existensial* (1967, disertasi), dan *Kita dan Kami* (2007).

Sebagai seorang pecinta seni Fuad Hasan juga memiliki pandangan tinggi pada dunia seniman. Ia melihat bahwa seniman adalah sosok-sosok pecinta damai. Ketika menjabat Mendikbud dan diminta menjadi salah seorang pembicara dalam diskusi Polemologi (Ilmu Perdamaian) di Yogyakarta, Fuad Hasan berseloroh dengan mengatakan, "Kalau mau perang, kumpulkanlah seribu seniman untuk membicarakan soal strategi perang yang akan dipakai, nanti hasilnya tidak akan pernah terjadi perang. Sebaliknya, kalau ingin damai, kumpulkanlah seribu diplomat untuk membicarakan soal strategi damai, nanti hasilnya adalah tidak pernah akan damai, tapi malah perang terus".[10]

Fuad Hasan termasuk salah satu menteri yang memperlihatkan keprihatinannya atas sedikitnya pengajaran seni di berbagai jenjang pendidikan. Ia sadar betul bahwa pelajaran seni telah lama hilang dalam dunia sekolah. Kalaupun ada pelajaran seni, alokasi waktunya terlalu sedikit. Penyediaan waktu yang agak banyak pada pelajaran ini hanya di sekolah-sekolah yang khusus mempelajari seni, tetapi itu bukan termasuk sekolah favorit di mata sebagian besar anak bangsa. Sebagai Mendikbud, Fuad Hasan termasuk gagal menambah porsi seni dan alokasi waktu pelajaran di berbagai jenjang sekolah.

ENDNOTES

1 Goenawan Mohamad, *Catatan Pinggir 3* (Jakarta: Grafiti, 1991).

2 Darmaningtiyas, *Pendidikan Yang Memiskinkan* (Yogyakarta: Galang Press, 2004), hlm. 76.

3 *Antara* tanggal 2 Juli 1987.

4 Team Antara, *Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita*. Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hlm. 672-673.

5 *Antara* tanggal 15 Agustus 1987.

6 Aspek-aspek ini berbeda dari Pokok-pokok Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan yang dirumuskan sebelumnya (1980) yang hanya mencakup lima aspek/unsur dan bersifat relatif umum. Kelima aspek itu adalah 1) bidang kemasyarakatan, yang sasarannya diarahkan pada penanaman kesadaran berbangsa, pengukuhan jatidiri dan pendorongan tumbuhnya kebanggaan nasional; 2) bidang bahasa; (3) bidang kesenian; 4) bidang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; dan 5) bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan.

7 Wardiman Djojonegero, *Sepanjang Jalan Kenangan: Bekerja dengan Tiga Tokoh Besar Bangsa* (Jakarta: Kepustakaan Popuer Gramedia, 2016), hlm. 428.

8 “Catatan Sekitar Masalah Pendidikan.”, *Makalah.* Disampaikan dalam Seminar di Universitas Indonesia tanggal 15 Februari 1987.

9 Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan Indonesia.* Jakarta: Djambatan, 1991.

10 Darmaningtyas, *Pendidikan yang Memiskinkan*, hlm. 82.

Wardiman Djojonegoro

Masa Jabatan
17 Maret 1993 – 16 Maret 1998

Wardiman Djojonegoro

MASA KECIL DAN PENDIDIKAN

Nama lengkapnya Wardiman Djojonegoro. Ia lahir di Pamekasan, Madura, pada tanggal 22 Juni 1934;[1] anak ketiga dari sebelas bersaudara. Ayahnya seorang Kepala Sekolah Hollandsch Inlandsche School (HIS), sehingga meskipun banyak saudara tidak sulit bagi Wardiman dan saudara-saudaranya bersekolah karena secara ekonomi dan sosial ayahnya termasuk orang mampu dan terpandang. Sebagai kepala sekolah, ayah Wardiman sering pindah tugas, yang hanya sekitar dua tahun penempatan di suatu daerah. Oleh karena itu Wardiman dan saudara-saudaranya mesti pindah setiap dua tahun sekali ke kota berbeda.

Wardiman mengatakan bahwa ia menempuh pendidikan sekolah dasar dan menengah di sejumlah kota, mulai dari Pemalang (Jawa Tengah), Samarinda dan Balikpapan (Kalimantan), Pamekasan (Madura), sampai Malang dan Surabaya (Jawa Timur). Perasaan Wardiman yang selalu mengikuti tugas ayahnya di beberapa daerah berpengaruh terhadap pembentukan karakter dan kepribadiannya, yakni menjadi sosok yang terbuka.

Wardiman menamatkan Sekolah Menengah Atas (SMA) pada tahun 1953 di Surabaya. Setamat SMA, pada bulan September 1953, ia melanjutkan pendidikan ke Jurusan Teknik Mesin Universiteit Indonesia di Bandung (sekarang Institut Teknologi Bandung). Ia diterima tanpa tes masuk (karena memang tidak ada tes masuk), bahkan mendapat beasiswa Rp 250,00 per bulan. Pada bulan Mei 1954, ia menyelesaikan ujian tingkat pertama (*propadeuse* I/PI) dengan hasil sangat memuaskan, lulus untuk 11 mata ujian yang diikutinya. Keberhasilan tersebut dianggap luar biasa karena saat itu jarang sekali mahasiswa dapat menyelesaikan P-1 dalam waktu sembilan bulan. Pada tahun 1955 ia melanjutkan pendidikan ke Negeri Belanda dengan beasiswa Bank Industri Indonesia (BIN). Menurut Wardiman, ide menimba ilmu di luar negeri muncul setelah mendengar B.J. Habibie mengatakan ingin belajar di luar negeri. Di Belanda, Wardiman menuntut ilmu di Technische Hogeschool Delft (TH Delft) pada Jurusan Arsitektur Perkapalan.[2]

Pada saat itu konflik Indonesia-Belanda berkait Irian Barat (Papua) tengah menghangat, yang mengakibatkan pemerintah Indonesia menarik pulang semua mahasiswa Indonesia yang tengah belajar di negeri kincir angin itu. Wardiman pun harus meninggalkan Delft pada tahun 1958. Semangat untuk belajar di luar negeri mengantarkan Wardiman ke Jerman Barat. Ia melanjutkan pendidikan di Rheinish-Westfaelische Technische Hochschule, Aachen, dan memperoleh gelar Diplom Ingenieur (Dilp. Ing.) pada bidang teknik mesin pada tahun 1962.

Beberapa tahun kemudian Wardiman kembali ke TH Delft dan pada tahun 1985 berhasil mempertahankan disertasi dengan judul *Shipping As A Decisive Paramater In Indonesia's Energy Source Development "Policies For The Shipbuilding Industry*". Setelah menamatkan pendidikan di Delft ia kembali ke Indonesia.

KEBIJAKAN BIDANG PENDIDIKAN

Pengalaman kerja Wardiman dimulai di Bank Bapindo (1963-1967) dan kemudian bergabung dengan Pemerintah Daerah DKI Jakarta tahun 1966-1979. Tidak lama setelah Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi dibentuk, Wardiman diangkat menjadi Asisten Menteri I Riset dan Teknologi (1979-1988). Tugas ini melibatkannya pada tugas-tugas di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sebagai Direktur Analisa Sistem (1981-1982) dan sebagai Deputi Ketua BPPT untuk Bidang Administrasi (1982-1993). Pada tahun 1993 ia diangkat Presiden Soeharto menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) pada Kabinet Pembangunan VI.

Dalam memoarnya Wardiman menulis, "Seandainya ada suatu hari yang paling berkesan dalam seluruh kehidupan, hari itu adalah ketika untuk pertama kalinya saya menerima telepon dari Bapak Presiden, yaitu mendapat penugasan untuk memimpin suatu departemen yang besar di Republik tercinta ini." Penunjukan tersebut membuat hatinya bergetar.[3]

Beberapa saat setelah menerima tugas sebagai Mendikbud muncul perasaan haru, terhormat, bangga, serta beruntung. Ia mulai masuk kantor sehari setelah dilantik dan pada hari kedua mulai melakukan orientasi. Saat itu ia sadar bahwa departemen yang dipimpinnya merupakan sebuah lembaga yang sangat besar dan kompleks. Oleh karena itu, sebagaimana tertulis dalam otobiografinya, ia menyebut Depdikbud ibarat "gajah dengan tujuh kaki". Gajah berjalan lambat karena masing-masing kaki berjalan sendiri-sendiri.[4] Setidaknya ada dua hal yang menyebabkan ia memiliki penilaian tersebut. Pertama, Depdikbud memiliki jalur birokrasi yang kompleks dan rumit, baik secara horizontal, vertikal, maupun spasial, sehingga permasalahannya pun sangat luas dan relatif berat. Kedua, Depdikbud memiliki pakar dan ahli yang sangat banyak jumlahnya sehingga kesulitan besar yang akan ditemuinya adalah menyelaraskan gagasannya dengan pemikiran bawahannya.

Dibandingkan dengan para pendahulunya yang berlatar belakang pendidikan eksakta, Wardiman Djojonegoro memiliki pemahanan yang cukup unik, terutama menyelaraskan kemampuan peserta didik dalam menghadapi tantangan globalisasi. Wardiman banyak belajar dari jejak para pendahulunya dan memahami kebijakan mereka, terutama dari awal kebangkitan Orde Baru. Dengan kata lain, kebijakan di Depdikbud tidaklah harus dimulai dari nol karena menteri-menteri terdahulu telah meletakkan filosofinya.

Segala kekuatan pemikiran yang dimilikinya dan bersinergi dengan kebijakan sebelumnya untuk memecahkan masalah-masalah yang masih ada dengan gagasan-gagasan yang perlu diperbaharui. Ia pun memahami bahwa menerapkan gagasan yang lebih akurat dalam membangun pendidikan di masa depan memerlukan penelusuran pengalaman ke belakang sejauh mungkin. Situasi politik, ekonomi, budaya, dan teknologi terus berkembang sejalan dengan perubahan aspirasi, cita-cita, dan harapan sehingga melahirkan tantangan-tantangan yang juga terus berkembang seolah tanpa batas.

Wardiman menulis *Fifty Years Development of Indonesian Education*, yang merupakan penelusuran sejarah pendidikan di Indonesia. Dalam karya tersebut Wardiman menyebut bahwa pendidikan pada awal kemerdekaan (1945-1968) diselenggarakan sesuai dengan kondisi pada waktu itu, yaitu perjuangan bangsa mempertahankan dan pengisian kemerdekaan, sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945 sampai tahun 1968.[5] Pada periode itu sistem pendidikan masih sangat bervariasi serta ditandai oleh keragaman sistem dan tujuan pendidikan dari berbagai kelompok masyarakat yang berbeda-beda. Wardiman menyatakan bahwa pada periode tersebut tidak banyak yang dapat dipelajari dari pengalaman dalam membangun pendidikan dan kebudayaan karena upaya pembangunan nasional yang sistematis boleh dikatakan belum dimulai secara utuh. Meskipun demikian ada satu hal yang dapat dipelajari dari kurun waktu tersebut, yakni pembangunan sistem pendidikan dan kebudayaan yang dipengaruhi oleh situasi politik yang belum stabil menyebabkan pembangunan pendidikan tidak mungkin berjalan lancar.

Pendidikan periode berikutnya adalah Pembangunan Jangka Panjang I (PJP I) tahun 1969/1970-1993/1994, yakni periode keemasan pembangunan pendidikan di tanah air. Kesempatan belajar pada setiap jenis dan jenjang pendidikan terus diperluas. Jumlah sekolah dasar (SD) tumbuh hampir 10 kali lipat dari 17.848 pada tahun 1940 menjadi sekitar 173.000 pada tahun 1993/1994 dengan angka partisipasi sebesar 109 persen. Sementara jumlah sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) tumbuh 84 kali lipat dari 322 pada tahun 1945 menjadi 269.000 pada tahun 1993/1994 dengan angka partisipasi sebesar 55 persen. Adapun untuk sekolah menengah atas (SMA) bertambah 400 kali lipat dari 27 buah pada tahun 1940 menjadi 79 buah pada tahun 1945 dan 107.000 buah pada tahun 1993/1994 dengan angka partisipasi sebesar 43 persen. Sejak tahun 1945 jumlah perguruan tinggi tumbuh dari 38 menjadi 1.228 perguruan

Wardiman Djojonegoro dalam Pameran Karya Sekolah 1996

(Sumber: Buku *Wardiman Djojonegoro, Sepanjang Jalan Kenangan*)

Kiri

Mengunjungi Lukisan Gua di Irian Jaya 1997

(Sumber: Buku *Wardiman Djojonegoro, Sepanjang Jalan Kenangan*)

Kanan

Menteri Wardiman Djojonegoro dalam Pameran SMK

(Sumber: Buku *Wardiman Djojonegoro, Sepanjang Jalan Kenangan*)

Kiri

Mengunjungi Lukisan Gua di Irian Jaya 1997

(Sumber: Buku *Wardiman Djojonegoro, Sepanjang Jalan Kenangan*)

Kanan

Menteri Wardiman Djojonegoro dalam Pameran SMK

(Sumber: Buku *Wardiman Djojonegoro, Sepanjang Jalan Kenangan*)

tinggi negeri dan swasta, dengan jumlah mahasiswa lebih dari 2 juta orang pada tahun 1993/1994 dan angka partisipasi sebesar 9,5 persen.[6]

Pada lima tahun masa kerjanya, terdapat tiga pokok program dan kebijakan yang dilakukan oleh Wardiman Djojonegoro.[7] Pertama, aspek perluasan kesempatan belajar sebagai suatu proses yang sistematis dan berkesinambungan yang dilakukan sejak awal PJP I. Perluasan kesempatan belajar dilakukan dengan cara meningkatkan wajib belajar sembilan tahun (Wajar Dikdas 9 Tahun), sesuai dengan amanat UU Nomor 2 Tahun 1989 yang mengonsepsikan pendidikan dasar bukan hanya SD 6 tahun tetapi ditambah dengan SLTP 3 tahun. Kedua, untuk melanjutkan kerangka landasan yang telah dibangun oleh menteri-menteri terdahulu dalam upaya meningkatkan mutu, beberapa program kelanjutan diperkenalkan oleh Wardiman, seperti pembinaan sekolah unggulan, peningkatan sarana dan prasarana yang lebih memadai, pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), dan peningkatan kualifikasi pendidikan guru. Program pascasarjana serta kegiatan penelitian dan pengembangan juga dikembangkan di perguruan tinggi dalam rangka menunjang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketiga, sebagai implementasi dari konsep relevansi pendidikan, diterapkan konsep *link and match*, yakni konsep yang menyelaraskan antara dunia pendidikan dan dunia industri.

Dari ketiga program tersebut konsep pendidikan *link and match* (kesesuaian dan keterpaduan) menjadi program utama yang dijalankan oleh Wardiman. Konsep ini sebenarnya tidak lahir dari pemikiran Wardiman sendiri, tetapi diadaptasi dari pendidikan di Amerika Serikat.[8] Adalah Prof. Karl Willenbrock, pakar pendidikan dari Harvard University, Amerika Serikat, yang mengusulkan gagasan perlunya perusahaan menjadi "bapak angkat" bagi perguruan tinggi.[9]

Gagasan ini awalnya berangkat dari kerisauan Wardiman tentang banyaknya lulusan yang tidak sesuai dengan kebutuhan, baik dari tingkat keterampilan maupun dari jenis keterampilan yang dibutuhkan. Dunia pendidikan dan dunia kerja seringkali berjalan sendiri-sendiri. Menurut penuturan Wardiman, konsep *link and match*[10] berangkat dari keadaan nyata masyarakat. Tenaga kerja yang dibutuhkan sepanjang masa adalah tenaga kerja terampil serta lulusan yang memiliki keterampilan memadai (sesuai). Wardiman mengakui bahwa lembaga pendidikan sejak kemerdekaan belum mampu memenuhi kedua tuntutan tersebut. Dengan kata lain kebijakan *link and match* merupakan kebijakan Depdikbud yang dikembangkan untuk meningkatkan relevansi pendidikan, yaitu relevansi dengan kebutuhan pembangunan umumnya dan dengan kebutuhan dunia kerja, dunia usaha, dan dunia industri. Dengan demikian esensi dari relevansi adalah upaya menciptakan keterkaitan dan kesepadanan antara pendidikan dan pembangunan.

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro memukul gong tanda diresmikannya acara Festival Persahabatan Indonesia Jepang 1997

(Sumber: Festival Persahabatan Indonesia Jepang)

Dalam kesempatan lain Wardiman menyebut *link and match* semakin penting karena beberapa kecenderungan.[11] Pertama, sejalan dengan meningkatnya pembangunan nasional semakin meningkat pula tingginya tuntutan dunia kerja terhadap tenaga kerja yang bermutu baik secara kualitas maupun kuantitas. Kedua, perubahan struktur dan persyaratan dunia kerja yang semakin kompetitif dan mengandalkan keahlian dalam bidang tertentu tanpa mengabaikan wawasan dan pengetahuan secara interdisipliner. Ketiga, pandangan yang cenderung menganggap tujuan pendidikan hanyalah untuk pengembangan kepribadian sudah bergeser menjadi cara berpikir yang memandang bahwa pendidikan semestinya menyiapkan peserta didik secara utuh, meliputi pengetahuan, sikap, kemauan, dan keterampilan fungsional bagi kehidupan pribadi, warga negara, dan warga masyarakat, serta upaya mencari nafkah. Keempat, semakin populernya konsep pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang mendapatkan prioritas tinggi. Dalam hal ini pendidikan dianggap sebagai upaya pengembangan SDM yang berkualitas. Konsep pengembangan SDM mengimplikasikan bahwa pendidikan merupakan wahana untuk pembangunan dan perubahan sosial dan pendidikan merupakan investasi untuk masa depan.

Implementasi *link and match* bisa ditelusuri dalam Kurikulum 1994. Ketentuan-ketentuan yang ada dalam Kurikulum 1994 adalah (1) bersifat *objective based curriculum*, (2) nama SMP diganti mejadi SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama) dan SMA diganti SMU (Sekolah Menengah Umum), (3) mata pelajaran PSPB dihapus, (4) program pengajaran SD dan SLTP disusun dalam 13 mata pelajaran, (5) program pengajaran SMU disusun dalam 10 mata pelajaran, serta (6) penjurusan SMA dilakukan di kelas II dalam program IPA, program IPS, dan program Bahasa. Selain berisi pokok-pokok perubahan di atas Kurikulum 1994 juga menekankan pada pengembangan pendidikan kejuruan melalui jalur Pendidikan Sistem Ganda (PSG) di sekolah-sekolah kejuruan (SMK).

Pendidikan Sistem Ganda merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian profesional yang memadukan secara sistematik dan sinkron program pendidikan di sekolah dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan bekerja atau praktik langsung di dunia kerja. Melalui PSG pendidikan dapat lebih terarah untuk mencapai tingkat keterampilan atau keahlian profesional tertentu. Adapun tujuan PSG antara lain (1) menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian profesional, (2) memperkokoh *link and match* antara sekolah dan dunia kerja, (3) meningkatkan kesangkilan proses pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang berkualitas, dan (4) memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap pengalaman kerja sebagai bagian dari proses pendidikan.

Link secara harfiah berarti 'adanya pertautan, keterkaitan, atau hubungan interaktif'; sedang *match* berarti 'cocok, padan'. Pada dasarnya *link and match* merupakan keterkaitan dan kecocokan antara

Wardiman Djojonegoro bersama dua ketua umum PGRI, Basyuni dan Prof. Moh. Surya pada tahun 2014

(Sumber: Buku *Wardiman Djojonegoro, Sepanjang Jalan Kenangan*)

proses dan produk pendidikan dengan kebutuhan (*needs*, *demands*). Kebutuhan ini bersifat sangat luas, multidimensional, dan multisektoral, mulai dari kebutuhan peserta didik, kebutuhan keluarga, kebutuhan masyarakat dan negara, serta kebutuhan pembangunan, termasuk kebutuhan dunia kerja.[12]

Pada jenjang pendidikan dasar, *link and match* ditujukan untuk pembentukan pribadi yang berbudi pekerti luhur, beriman dan bertaqwa, berkemampuan, dan mempunyai keterampilan dasar untuk pendidikan selanjutnya di tingkat menengah dan untuk bekal hidup. Penekan terakhir ditujukan untuk memperoleh keterampilan dasar sebagai bekal hidup yang belum sepenuhnya mengarah pada bidang kejuruan atau pekerjaan tertentu, tetapi merupakan keterampilan dasar untuk belajar yang dapat dikembangkan lebih lanjut.

Dengan konsep *link and match* lulusan pendidikan dasar adalah mereka yang mampu belajar tetapi tidak seharusnya dianggap memiliki keterampilan kerja dan siap untuk bekerja. Tenaga terampil harus dihasilkan dari lulusan pendidikan dasar (SD dan SLTP) yang dilengkapi dengan kursus dan pelatihan yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan luar sekolah.[13]

Pada jenjang pendidikan menengah, *link and match* ditujukan untuk membekali pengetahuan dan keterampilan pada peserta didik agar memiliki kemampuan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi atau kemampuan untuk bekerja. Konsep *link and match* pada pendidikan menengah kejuruan lebih diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang diproyeksikan menjadi tenaga kerja tingkat menengah yang terampil. Mereka diharapkan mampu mengisi kebutuhan berbagai jenis lapangan kerja sesuai dengan tingkatannya serta belajar menyesuaikan keterampilanya dengan perkembangan.

Untuk tujuan tersebut, penerapan *link and match* lebih ditujukan pada pelaksanaan PSG. Konsep *link and match* pada pendidikan tinggi lebih diarahkan pada peningkatan perguruan tinggi dalam menghasilkan lulusan sesuai dengan kebutuhan industri, baik dari segi jumlah, komposisi menurut keahlian, maupun mutu keahlian yang dimiliki. Pendidikan tinggi juga harus mampu menghasilkan lulusan yang seimbang, baik dilihat dari kemampuan profesional maupun kemampuan akademik. Kemampuan akademik menekankan pada kemampuan penguasaan dan pengembangan ilmu, sedang kemampuan profesional menekankan pada kemampuan dan keterampilan kerja.[14]

Dalam perkembangannya penerapan kebijakan *link and match* menuai banyak kritik dan kontroversi serta menyimpan dilema tersendiri. *Link and match* menjadi dilema karena di satu sisi kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas SDM masyarakat Indonesia, yang dengan demikian mampu bersaing dalam dunia kerja (usaha). Masih hangat dalam ingatan kita, sampai kini masyarakat masih berbondong-bondong memasukkan anaknya untuk bersekolah di jenjang pendidikan kejuruan dengan

Salah Satu Kebijakan Wardiman Djojonegoro di bidang kebudayaan adalah pembangunan kembali Museum Nasional sehingga menjadi museum "berkelas Internasional"

(Sumber: Direktorat Sejarah)

satu harapan mereka dapat lekas bekerja. Di sisi lain kenyataan tak selamanya sepadan dengan harapan, sebab secara kualitas lulusan pendidikan kejuruan tidak selamanya *match* dengan kebutuhan dunia usaha yang semakin kompleks dan kompetitif. Banyak pengalaman siswa lulusan SMK Teknik Mesin, misalnya, justru bekerja sebagai staf administasi kantor atau buruh pabrik. Sebaliknya lulusan SMK Akutansi justru menjadi montir di bengkel mobil.

Realisasi praktik di lapangan juga sering kali bertolak belakang dari rencana yang diterapkan oleh pemerintah. Sebagai contoh, janji dan kerja sama antara pemerintah dan dunia bisnis (usaha) seringkali hanya manis di atas kertas. Alhasil, kesempatan kerja lulusan pendidikan kejuruan menjadi sangat terbatas atau bahkan nihil sama sekali. Kritik mendasar pada konsep *link and match* adalah konsep ini terkesan hanya berorientasi ekonomis serta meminggirkan substansi pendidikan sebagai wahana pencerdasan, ruang aktualisasi diri, proses pencarian dan penemuan jati diri, serta proses pemerdekaan (pembebasan) anak didik sesuai naluri dan keinginan mereka. Kritik ini sangat beralasan, sebab dalam naungan konsep *link and match* anak didik dituntut mengerjakan segala sesuatu yang berdaya jangka pendek dan berorientasi target. Kita juga dapat menambahkan bahwa biaya pendidikan yang dikeluarkan untuk memenuhi serangkaian konsep *link* and *match* juga tidak sedikit.

Kebijakan Wardiman yang juga menjadi torehan sejarah adalah perubahan sistem semester menjadi caturwulan serta penggantian penamaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) menjadi Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Perubahan nama didasari alasan bahwa dalam konsep wajib belajar sembilan tahun SMP bukan bagian dari sekolah menengah, tetapi masuk kategori pendidikan dasar. Pada kategori sekolah menengah hanya ada dua kelompok sekolah, yakni Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Sekolah yang masuk kelompok SMU hanya satu, yakni Sekolah Menengah Atas (SMA); sedangkan sekolah yang masuk kelompok SMK terdiri dari Sekolah Teknik Menengah (STM), Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA), SMKK (Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga), Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA), Sekolah Menengah Seni Rupa (SMSR), Sekolah Menengah Industri Kerajian (SMIK), dan sebagainya.[15]

Kebijakan lain yang tertuju pada pendidikan tinggi tetapi sesungguhnya didasarkan kondisi pada pendidikan dasar dan menengah adalah memperluas IKIP menjadi universitas. Dasar gagasan ini adalah kenyataan bahwa IKIP cenderung diberi tugas menghasilkan guru sebanyak-banyaknya, sehingga fokus pembangunan hanya pada jumlah dan kuantitas guru. Kompetensi dan kualitas kurang diperhatikan, antara lain dibuktikan dengan banyaknya keluhan tentang mutu guru yang masih jauh dari yang diharapkan. Oleh karena itulah Wardiman menggagas peran IKIP menentukan isi kurikulum pembelajaran, memberikan

Salah Satu Kebijakan Wardiman Djojonegoro di bidang kebudayaan adalah pembangunan kembali Museum Nasional sehingga menjadi museum "berkelas Internasional"

(Sumber: Direktorat Sejarah)

perhatian yang besar pada jurusan yang kekurangan pengajar, serta menyusun program pelatihan besar-besaran untuk guru SD. Berkait dengan hal itu Wardiman mengusulkan agar IKIP digabungkan dengan cabang ilmu lain agar ada "darah baru" pada lembaga tersebut. Dengan penggabungan itu format lembaga juga akan berubah dari institut menjadi universitas. Wardiman menegaskan bahwa perubahan IKIP menjadi universitas bukan untuk menggantikan atau membubarkan lembaga pendidikan keguruan yang sudah ada, tetapi untuk memberdayakannya.[16] Gagasan itu menimbulkan pro dan kontra, baik di kalangan Depdikbud maupun IKIP. Namun Wardiman tetap dengan idenya. Dari 10 IKIP yang ada di Indonesia, ada empat IKIP negeri yang menyetujui gagasan tersebut. Keempat IKIP tersebut adalah IKIP Yogyakarta, Bandung, Malang, dan Padang, yang masing-masing lembaga tersebut mengubah namanya menjadi Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Negeri Malang, dan Universitas Negeri Padang.[17]

Wardiman juga memberikan perhatian yang besar terhadap karier guru dan kesejahteraan guru. Ia membuat kebijakan bahwa hanya guru yang bisa menjadi pengawas sekolah[18] dan jabatan kepala sekolah (SD, SLTP, SLTA, dan SMK) dibatasi menjadi dua kali masa jabatan (dua kali empat tahun). Kebijakan tersebut memberi peluang kepada semua guru untuk bisa menduduki posisi pengawas sekolah dan kepala sekolah.

Wardiman menyadari gaji guru relatif rendah. Oleh karena itu ia mengupayakan ada kebijakan khusus untuk guru. Upaya itu membuahkan hasil ketika Menteri Penertiban Aparatur Negara (Menpan) mengeluarkan keputusan (Kepmenpan) No. 84 Tahun 1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Inti keputusan itu adalah guru diberi kemudahan naik pangkat. Dengan aturan itu guru dimungkinkan naik pangkat setiap dua tahun dan pola naik pangkat seperti ini berlaku hingga guru bersangkutan mencapai pangkat Pembina/Golongan IV/a. Untuk naik ke golongan selanjutnya guru harus mengumpulkan angka kredit, yang dapat diperoleh dari produktivitas mereka membuat karya ilmiah atau karya inovatif lain. Kebijakan ini berhasil mengantarkan sejumlah besar guru ke golongan IV/a. Sayangnya "prestasi" mereka mentok pada golongan itu dan sangat sedikit, hanya sekitar 4 %, dari mereka yang berhasil melewati golongan tersebut. Artinya, kebijakan tersebut tidak mampu meningkatkan produktivitas guru agar melahirkan karya ilmiah dan karya inovatif lain.

KEBIJAKAN KEBUDAYAAN

Bila kebudayaan dipahami dalam arti yang lebih luas, Wardiman termasuk salah satu Mendikbud yang melahirkan sejumlah kebijakan yang berkesan dalam bidang kebudayaan. Wardiman menyebut bahwa gagasan untuk "memperhatikan budaya" telah tumbuh dan ada dalam dirinya sejak lama, setidaknya semenjak ia bertugas di bawah Ali Sadikin di pemerintahan DKI Jakarta Raya pada awal tahun 1970-an.

Wardiman mempunyai peran besar dalam penggunaan bahasa Indonesia di kalangan para pengusaha, industri, pengembang, dan perbankan. Dengan kata lain, Wardiman adalah tokoh terdepan dalam kampanye pemasyarakatan bahasa Indonesia di wilayah perkotaan. Perubahan penamaan gedung, nama perumahan, bank, iklan, dan sebagainya dari semula sarat dengan bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia sesudah tahun 1995 tidak bisa dipisahkan dari ikhtiar Wardiman.

Sebagaimana diakui Taufik Ismail, Wardiman mempunyai peran besar dalam pengajaran sastra dan bahasa Indonesia di sekolah-sekolah kepada peserta didik. Dalam kegiatan yang diinisiasi oleh Taufik Ismail itu program yang dinamakan Membaca, Menulis, dan Apresiasi Sastra (MMAS) para sastrawan berbagi pengalaman dan kisah kreatif mereka dengan para guru. Melalui pertemuan dan berbagai pengalaman tersebut diharapkan guru dapat meraup ilmu dan pengalaman para sastrawan besar tanah air. Walaupun semasa Mendikbud Wardiman program ini belum terlaksanana, tetapi pada

masa berikutnya bisa dilaksanakan. Persetujuan Wardiman adalah pemantik utama terselenggaranya program ini.

Budaya baca di kalangan anak bangsa yang masih rendah juga menjadi perhatian Wardiman. Dalam rangka menumbuhkan budaya baca Wardiman mencanangkan Bulan Buku Nasional (bulan Mei) dan Bulan Gemar Membaca (bulan September). Wardiman menggagas Hari Kunjungan Perpustakaan tanggal 14 September. Tidak tanggung-tanggung, Wardiman melibatkan Presiden Soeharto dalam upaya tersebut. Hari Kunjungan Perpustakaan dicanangkan langsung oleh Presiden Soeharto. Upaya menggairahkan minat budaya baca dilakukan dengan merangkul Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) yang menyelenggarakan pameran buku tiap tahun. Tidak hanya kalangan penerbit, masyarakat juga diikutsertakan dalam gerakan ini. Jimly Assidiqie, yang didukung oleh sejumlah kalangan, misalnya, memelopori pembentukan Perhimpunan Masyarakat Gemar Membaca (PMGM).

Dalam upaya memberi penghargaan terhadap kreativitas seniman, Wardiman menggagas adanya "industri budaya", dengan maksud seni dan budaya dikelola dan diperlakukan selayaknya industri. Kesenian dilihat sebagai bagian dari "industri budaya". Apresiasi dan penghargaan dalam bentuk uang memiliki arti penting dalam pengembangan produk seni. Hasil seni yang bermutu bisa dinikmati, dikagumi dan dihargai oleh masyarakat; untuk itu produk seni yang hebat mesti "dijual" dan untuk menikmatinya harus "dibeli". Dengan demikian ada dana yang mengalir dan ada dana yang tersedia.

Torehan sejarah lain yang tidak bisa dipisahkan dari nama Wardiman adalah renovasi atau pembangunan kembali Museum Nasional. Wardiman menyebut ingin mengubah Museum Nasional yang *humble* menjadi Museum Nasional yang "berkelas internasional".[19] Dia juga mengatakan bahwa pemugaran dan perluasan Museum Nasional sebagai prioritasnya sebagai Mendikbud. Pemugaran dan perluasan, atau menurut istilah Wardiman "Membuat Wajah Baru Museum Nasional", merupakan suatu pekerjaan besar, membutuhkan dana besar, serta upaya dan semangat yang gigih. Wardiman menempuh berbagai macam cara, melobi ke Bapenas, Menteri Keuangan, Pemerintah daerah DKI Jaya, membujuk masyarakat yang rumah atau tempat usaha mereka akan tergusur, dan sebagainya. Upaya Wardiman tidak sia-sia. Walaupun ia tidak ikut-serta dalam acara peresmiannya, pembangunan Museum Nasional sebagai sebuah pusat aktivitas budaya yang menarik, menyenangkan, dan berstandar internasional akhirnya bisa dituntaskan.

Peran Wardiman dalam pemugaran dan peningkatan gedung tua dapat dilihat pada Proyek Galeri Nasional. Proyek ini juga merupakan pekerjaan besar. Banyak kendala yang dihadapi; tidak hanya masalah dana, tetapi juga persoalan non-teknis, seperti pengosongan lokasi dari para penghuni lama. Dengan berbagai pendekatan persoalan bisa dituntaskan dan dengan dukungan dana serta bantuan non-material lain dari berbagai pihak dan instansi, proyek ini bisa dituntaskan, yang diresmikan pada masa kepemimpinan Wardiman.

ENDNOTES

1 Wardiman Djojonegoro, *Lima Tahun Mengemban Tugas Pengembangan SDM: Tantangan yang Tiada Henti* (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, 1998), hlm. 3.

2 Wardiman Djojonegoro, *Sepanjang Jalan Kenangan: Bkerja dengan Tiga Tokoh Besar Bangsa* (Jakarta: Gramedia, 2016), hlm.9.

3 Wardiman Djojonegoro, *Lima Tahun Mengemban Tugas Pengembangan SDM: Tantangan yang Tiada Henti* (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, 1998), hlm. 3.

4 Wardiman, *Sepanjang Jalan Kenangan: Bekerja dengan Tiga Tokoh Besar Bangsa* (Jakarta: Gramedia, 2016), hlm. 278.

5 Wardiman Djojonegoro, *Fifty Years Development of Indonesian Education* (Jakarta:Ministry of Education and Culture, 1997), hlm. 17.

6 Wardiman Djojonegoro, *Fifty Years Development of Indonesian Education*(Jakarta:Ministry of Education and Culture, 1997), hlm. 117.

7 Wardiman Djojonegoro, *Lima Tahun Mengemban Tugas Pengembangan SDM: Tantangan yang Tiada Henti* (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, 1998), hlm. 101.

8 Wardiman Djojonegoro, *Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Sekolah Menengah Kejuruan (*Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, 1996), hlm. 39.

9 Gagasan Willenbork ini, kemudian dilanjutkan Wardiman, dengan pemahaman perusahaan tidak sekadar memberi tempat berlatih, atau menyisihkan sebagian keuntungannya, tapi juga terlibat dalam pengembangan lembaga pendidikan, khususnya pendidikan tinggi. Dari gagasan inilah kemudian konsep *link and match* diperkenalkan secara luas di dunia pendidikan. Lebih lanjut baca Wardiman Djojonegoro, *Sepanjang Jalan Kenangan: Bekerja dengan Tiga Tokoh Besar Bangsa* (Jakarta: Gramedia, 2016), hlm.203.

10 Konsep *link* and *match* kemudian dimasukkan sebagai terapi untuk mengatasi. Secara praktis, perlu dikembangkan kembali sekolah kejuruan dan disusul dengan serangkaian kerja sama Depdikbud dengan perusahaan-perusahaan serta instansi-instansi yang secara riil menikmati keuntungan, misalnya dalam hal menyediakan tempat untuk pemagangan anak-anak sekolah. Termasuk di dalam rangkaian upaya ini adalah merealisir 20 persen kurikulum lokal.Wardiman Djojonegoro, *Pendidikan dan Kebudayaan Selayang Pandang.* Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998, hlm. 131.

11 Wardiman Djojonegoro, *Kumpulan Pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Republik Indonesia* (Jakarta: Pendidikan dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, 1996), hlm. 41.

12 Dari perspektif ini, link lebih menunjuk pada proses yang berarti bahwa proses pendidikan seharusnya sesuai dengan kebutuhan pembangunan sehingga hasilnya juga match atau cocok dengan kebutuhan pembangunan dilihat dari jumlah, mutu, jenis maupun waktu. Dengan demikian, konsep link and match pada dasarnya adalah supplay and demand dalam arti luas, dunia pendidikan sebagai lembaga yang mempersiapkan SDM, dan individu, masyarakat, serta dunia kerja sebagai pihak yang membutuhkan. Kebutuhan tersebut adalah tuntutan dunia kerja atau dunia usaha yang dirasakan amat mendesak. Karena itu, prioritas link and match diberikan pada pemenuhan kebutuhan dunia kerja. Lebih lanjut baca Wardiman Djojonegoro, *Lima Tahun Mengemban Tugas Pengembangan SDM: Tantangan yang Tiada Henti* (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, 1998), hlm. 59.

13 Wardiman Djojonegoro, *Lima Tahun Mengemban Tugas Pengembangan SDM: Tantangan yang Tiada Henti* (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, 1998), hlm. 99.

14 Dengan demikian, konsep *link and match* berlaku untuk semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Namun, perlu dicatat bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan dan semakin spesifik bidang yang dipelajari, semakin tinggi pula derajat penerapan link and match. Seperti dijelaskan di atas, dasar kebijakan link and match adalah berangkat dari kebutuhan riil masyarakat terhadap dunia kerja. Sepanjang sejarah, dunia industri (usaha) membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan memadai. Tujuan link and match dengan demikian adalah mencetak SDM handal dan terampil yang siap mengisi kebutuhan dunia usaha.Lihat Wardiman Djojonegoro, *Lima Tahun Mengemban Tugas Pengembangan SDM: Tantangan yang Tiada Henti* (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, 1998), hlm. 137.

15 Darmanityas, Pendidikan yang Memiskinkan. (Yogyakarta: Galang Press, 2014), hal.77-78.

16 Wardiman, *Sepanjang Jalan Kenangan: Bekerja dengan Tiga Tokoh Besar Bangsa* (Jakarta: Gramedia, 2016), hal. 325, 327.

17 Gagasan Wardiman ini kemudian juga diadopsi oleh Departemen Agam. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang berada dibawah naungan departemen tersebut juga berubah menjadi universitas (Universitas Islam Negeri).

18 Pada periode sebelumnya posisi ini umumnya diduduki oleh mantan pejabat di lingkungan Kantor Wilayah atau kantor Depdikbud untuk menangguhkan masa pensiun mereka. Pejabat struktural yang biasanya pensiun dalam usia 56 tahun, setelah diangkat menjadi pengawas sekolah akan pensiun di usia 60 tahun.

19 Wardiman, *Sepanjang Jalan Kenangan*….., hal. 411.

Wiranto Arismunandar

Masa Jabatan
16 Maret – 21 Mei 1998

Wiranto Arismunandar

MASA KECIL DAN PENDIDIKAN

Wiranto Arismunandar dilahirkan di Semarang pada tanggal 19 November 1933, anak kedua dari enam bersaudara pasangan R. Aris Munandar dan Sri Wurjan.[1] Aris Munandar mendidik anak-anaknya sedari kecil secara keras dan disiplin serta memperhatikan betul pendidikan anak-anaknya, mulai dari memilih sekolah yang tepat sampai pada jurusan apa yang harus diambil. Usaha keras yang dilakukan Aris Munandar membuahkan hasil. Anak tertua atau kakak Wiranto, Artono Aris Munandar, merupakan teknisi elektro lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB), pernah menjabat sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) Listrik dan Energi Baru Departemen Pertambangan dan Energi dan dosen di Fakultas Teknik Universitas Indonesia (UI).[2] Anak ketiga, Budiono Aris Munandar, yang bercita-cita menjadi penerbang dianjurkan belajar di akademi perkebunan, kemudian menjabat sebagai Komisaris PT Perkebunan Nusantara (PTPN) Jawa Timur, PTPN Jawa Tengah, dan PTPN I Langsa di Aceh. Wismoyo, anak keempat, diperbolehkan masuk ke Akademi Militer Nasional (AMN) di Magelang.[3] Puncak karier militer Wismoyo adalah sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) pada masa akhir Orde Baru. Dua anak perempuannya, Titi Rarasati dan Retnowati, belajar di Universitas Gajah Mada Yogyakarta (UGM) dan kemudian menjadi guru SMU Negeri untuk mata pelajaran fisika dan matematika.

Wiranto Arismunandar memulai pendidikan di sekolah rendah di Jawa Timur. Demikian pula sekolah menengah pertama dan menengah atasnya. Prestasi sekolahnya sangat membanggakan. Oleh sebab itu ayahnya memintanya melanjutkan ke Bagian Mesin Fakultas Teknik ITB,[4] yang masa itu masih menjadi bagian UI. Selama satu semester pada awal kuliah ia tinggal di Jl. Pajajaran No. 6A, rumah ibu Prof. Anton Mulyono, kemudian tinggal di Asrama Mahasiswa Jalan Ganesa 15 B. Ia tinggal serumah dengan A. Sadali, Mathias Aroef, Samaun Samadikun, A. Nu'man, Suwarso, Sunardi, Tjokorda Raka, Tungki Ariwibowo, J.C. Kana, Mulhim, Fauzi S, Rochadji Gapar, Jasjfi, Soebhakto, Geert Pandegirot, dan teman-teman lain. Ia merasakan hidup di asrama mengasyikkan dan merasa beruntung dapat berkenalan dan menjalin pertemanan dengan orang yang berasal dari berbagai penjuru tanah air, berbagai ragam budaya, dan kehidupan bertoleransi. Ia senang mempunyai banyak teman, sebab pertemanan merupakan bekal paling utama dalam kehidupan bermasyarakat.[5]

Wiranto lulus ujian sarjana teknik mesin ITB pada tanggal 10 Februari 1959. Ketua Bagian Mesin ITB Prof. Dr. Ing. K.W. Vohdin menawarkan beasiswa belajar ke luar negeri kepada Wiranto dengan syarat mau menjadi dosen. Tawaran ini tidak pernah diduga dan ditanggapi secara cepat: Wiranto menyatakan kesediaan mengabdi sebagai dosen di almamaternya.[6] Dua bulan sebelum berangkat ke Purdue University Amerika Serikat, tepatnya pada bulan Juni 1959, Wiranto menikahi Sekarningrum Wirakusumah.

Setamat dari Purdue University Wiranto menepati janji menjadi dosen ITB. Tidak lama berselang, ia berniat melanjutkan studi pascasarjananya. Keinginan itu terwujud pada tahun 1961 dengan belajar di

---

1 Pidato Wiranto Arismunandar pada acara "Apresiasi dan Pengabdian Guru Besar dan Dosen Senior," di Departemen Teknik Mesin Aula Timur ITB, tanggal 27 September 2003.

2 *Kompas*, tanggal 9 Februari 1996.

3 *Suara Pembaruan*, tanggal 12 Februari 1996.

4 Pidato Wiranto Arismunandar pada *acara Apresiasi dan Pengabdian Guru Besar dan Dosen Senior*, di Departemen Teknik Mesin Aula Timur ITB, tanggal 27 September 2003.

5 *Suara Pembaruan*, tanggal 12 Februari 1996.

6 *Kompas*, tanggal 9 Februari 1996.

Wiranto Arismunandar bersama Isteri

(Sumber: Arsip Biro Umum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)

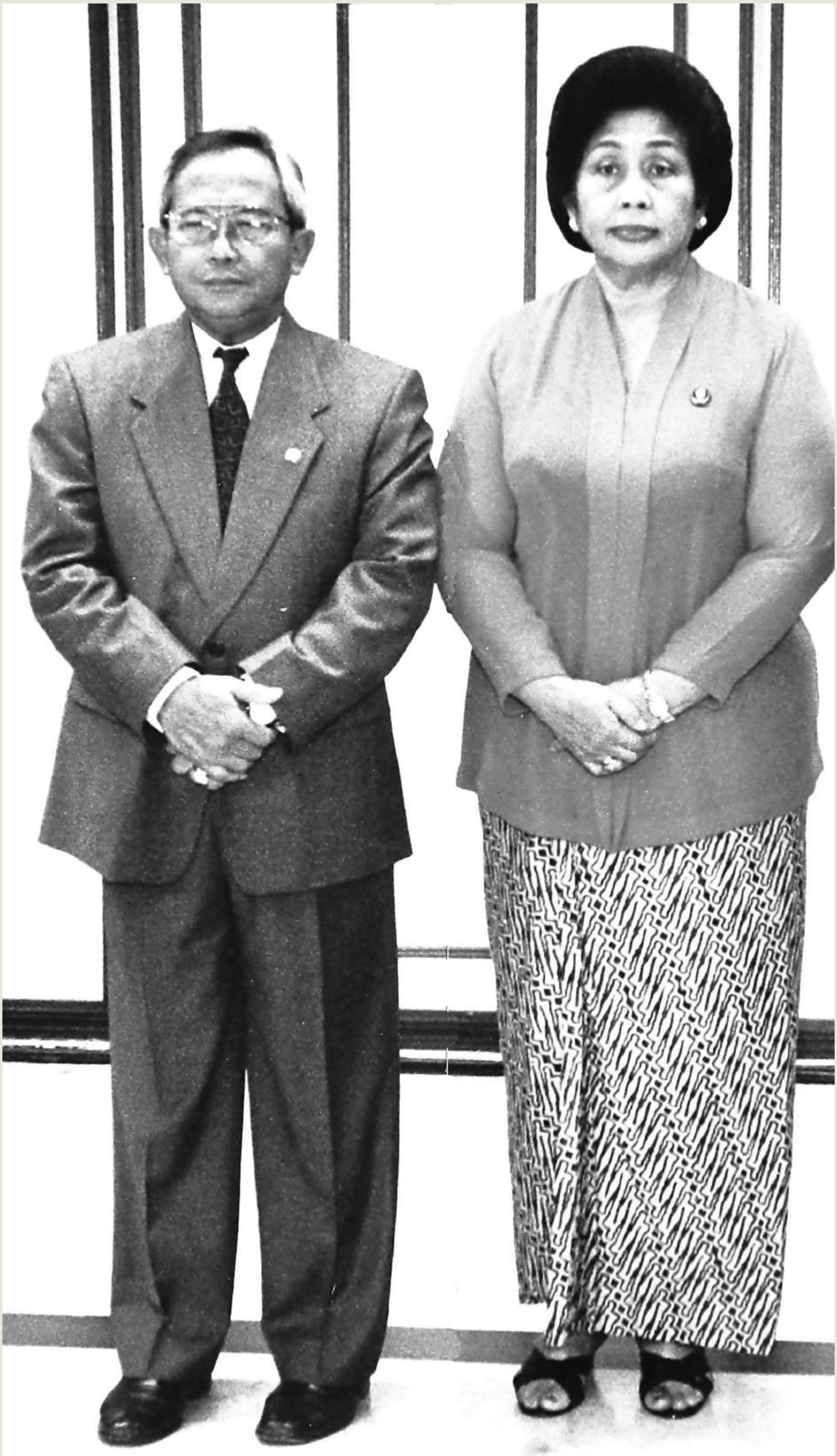

Wiranto bersama saudara-saudaranya pada masa kanak-kanak

(Sumber: Arsip Biro Umum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)

Fakultas Teknik Mesin Stanford University, Amerika Serikat. Ia berhasil menyelesaikan penddikannya pada tahun 1963. Pada tahun 1965 ia mengikuti pelatihan Tenaga Pendorong Pesawat Roket di Jepang.

KARIER

Berkat prestasi dan latar belakang pengalaman pendidikannya, pada 1973 ia ditetapkan sebagai Guru Besar Termodinamika di ITB. Kemudian secara berturut-turut ia menjadi Wakil Ketua Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) tahun pada 1978-1989, Rektor di ITB (1988-1997), menjadi ilmuwan senior Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (sejak 1989), dan menjadi penasihat ahli PT Dirgantara Indonesia (sejak 1989).[7]

Semasa menjadi dosen di Teknik Mesin, Wiranto tidak hanya menerapkan ilmu yang sudah dipelajari, tetapi juga melakukan pengembangan sebagaimana tertulis dalam buku-bukunya. *Pengantar Turbin Gas dan Motor Propulsi*, yang diterbitkan ITB (2002), ditulis sebagai panduan merawat turbin gas, baik untuk keperluan industri maupun sebagai penggerak kendaraan darat, kapal, dan pesawat terbang. Ia juga menulis *Penggerak Mula Motor Bakar Torak* (ITB, 2002). Buku ini memuat pengetahuan tentang motor bakar torak yang sampai kini masih menempati posisi paling efisien dibandingkan jenis motor bakar lain. Dalam perkembangannya, motor bakar torak dipacu dan teruji oleh tantangan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat yang semakin maju. Dalam karyanya ia menggarisbawahi bahwa setelah dihadapkan pada masalah bahan bakar minyak, berbagai usaha ditempuh untuk menjadikannya tidak peka terhadap jenis dan kualitas bahan bakar. Oleh karena itu faktor pemacu utama di balik perkembangan berikutnya adalah ekologi dan bukan ekonomi.[8]

Adapun buku-buku lain yang ditulisnya antara lain *Termodinamika Teknik; Beberapa Soal dan Penyelesaiannya* (1989), *Penggerak Mula Turbin* (2002), dan *Termodinamika Teknik: Tabel dan Grafik* (2002), yang seluruhnya diterbitkan oleh ITB, sekaligus menjadi diktat resmi dan panduan untuk merawat dan mengembangkan mesin. Buku-buku tersebut ditulis berdasarkan pengalamannya ketika mengajar di Departemen Teknik ITB serta renungannya terhadap masa depan teknologi Indonesia.[9]

---

7 Pidato Wiranto Arismunandar pada acara *Apresiasi dan Pengabdian Guru Besar dan Dosen Senior*, di Departemen Teknik Mesin Aula Timur ITB, tanggal 27 September 2003.

8 Wiranto Arismunandar, *Penggerak Mula Motor Bakar Torak*. Bandung: ITB, 2002. Buku ini berguna sebagai pemandu penggunaan *supercarjer*, sistem penyemprotan bahan bakar pada motor Otto, dan lain-lain yang memberikan gambaran tentang usaha meningkatkan prestasi dan mengurangi emisi gas buang.

9 Buletin *Mahasiswa Ganesha* No.11/Th.VI, Februari 1994.

Kiri

Wiranto Arismunandar semasa awal menjadi Guru Besar dan masuk dalam jajaran anggota Senat di Institut Teknologi Bandung

(Sumber: http://rektorkita.itb.ac.id/galeri)

Kanan

Wiranto Arismunandar semasa awal menjadi Guru Besar dan masuk dalam jajaran anggota Senat di Institut Teknologi Bandung

(Sumber: http://jatinangor.itb.ac.id/wp-content/uploads/2015/03/Presentasi-ITB-2015-revisi.pdf)

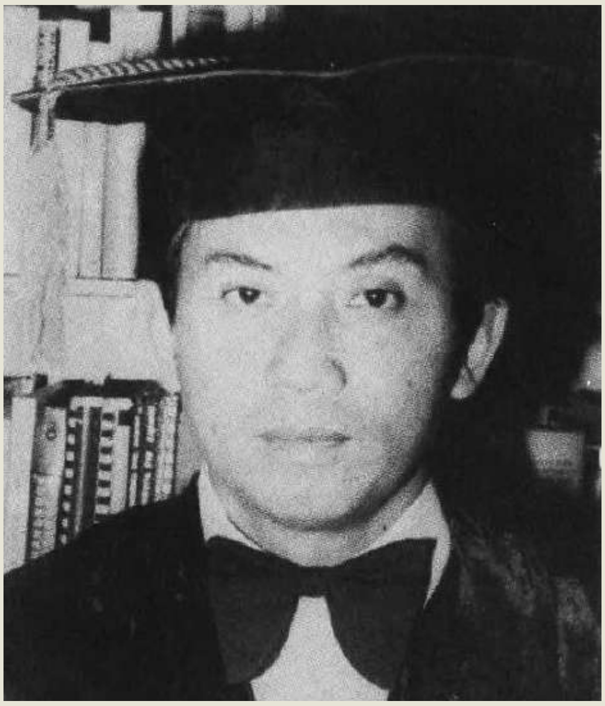

Semasa menjabat Rektor ITB Wiranto beberapa kali mengeluarkan kebijakan yang keras terhadap mahasiswa, bahkan akibat kebijakannya itu sepanjang tahun 1989 beberapa kali terjadi aksi protes yang disuarakan di ITB.[10] Tidak hanya itu. Pada tahun 1990-1994 kembali kebijakan keras dikeluarkan pihak rektorat ITB terhadap mahasiswa.[11]

PEMIKIRAN TENTANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Bersamaan dengan maraknya aksi unjuk rasa mahasiswa pada bulan Maret 1998, tongkat kepemimpinan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan beralih dari Wardiman Djojonegoro ke Wiranto Arismunandar. Barangkali dari sekian calon menteri yang ditelepon Presiden Soeharto hanya Wiranto Arismunandar yang tidak bergembira saat ditunjuk menggantikan posisi Wardiman Djojonegoro. Spekulasi kemudian bermunculan. Banyak pihak menengarai penunjukan Wiranto merupakan strategi

---

10 "Kebijakan Represif Rektor ITB. Catatan Harian Mendikbud: Prof. Ir. Wiranto Arismunandar". dalam mailling list ITB di *ITB@itb.ac.id* tanggal 6 April 1998. *Pertama*, peristiwa 5 Agustus 1989 tentang aksi penolakan kehadiran Mendagri Rudini di ITB, rektorat menindak 41 mahasiswa, terdiri dari sembilan mahasiswa kena DO, 30 mahasiswa diskorsing selama 1-4 semester, dan empat mahasiswa mendapat peringatan keras. *Kedua*, peristiwa 3 November 1989 yakni demonstasi menuntut pencabutan SK DO atas peristiwa 5 Agustus. Dalam hal ini rektorat bertindak represif melakukan pemukulan terhadap mahasiswa oleh orang-orang yang tidak dikenal yang dikerahkan rektorat. *Ketiga*, kasus pelarangan KPM yang dituduh sebagai motor aksi 5 Agustus yang berbuntut pelarangan KPM di lingkungan ITB. *Keempat*, terjadinya penutupan kampus selama 72 jam oleh rektorat pada bulan Desember 1989. *Kelima*, kasus penutupan Orientasi Studi Keluarga Mahasiswa (OS KM) bagi mahasiswa angkatan 1988. Kegiatan ini dilarang karena ketuanya terlibat peristiwa 5 Agustus, dan rektorat tidak mengijinkan pelaksanaan OS KM. *Keenam*, pelarangan ITB sebagai secretariat Badan Koordinasi Mahasiswa Bandung (BKMB). *Ketujuh*, penyegelan sekretariat Program Pengenalan Lingkungan Kampus (PPLK). *Kedelapan*, pencabutan status (DO) mahasiswa Geofisika yang diduga mencatat nomor mobil tugas Bakorstanasda. *Kesembilan*, pelarangan penggunaan sekretariat PPLK, Grup Apresiasi Sastra (GAS) dan lapangan basket.

11 Sepanjang tahun 1990 ada beberapa kebijakan pihak rektorat yang dikenakan terhadap mahasiswa ITB, di antaranya penutupan sepihak OS KM 1990 bagi mahasiswa angkatan 1989; skorsing dua mahasiswa karena pelaksanaan Diklatsar Himpunan Mahasiswa Teknik Geologi (HMTG) 'GEA' 1990 ada salah satu peserta yang masuk ke rumah sakit; pelarangan foto berjilbab di kartu tanda mahasiswa; dan rektorat menskorsing dua mahasiswa karena terlibat perkelahian dalam pertandingan sepak bola liga ITB. Pada tahun 1991, terjadi dua kebijakan yang merugikan mahasiswa. Pertama, rektorat menskorsing satu mahasiswa karena tidak ijin menggunakan lapangan sepak bola dan fasilitas listrik. Kedua, rektorat melarang berdirinya organisasi Unit Aktifitas Aufklaurung.Tahun 1992 merupakan tahun di mana terjadi banyak peristiwa mengejutkan karena berbagai pergesekan fisik antarorganisasi mahasiswa. *Pertama*, karena perkelahian dan penghinaan terhadap Resimen Mahasiswa (MENWA) rektorat menskorsing dua mahasiswa selama 1 semester. *Kedua*, rektorat menskorsing tujuh mahasiswa karena terlibat adu fisik antara panitia dan peserta Penerimaan Anggota Himpunan Mahasiswa Planologi. *Ketiga*, rektorat tidak mengijinkan acara *Open House* Unit-Unit Aktifitas Mahasiswa ITB. *Keempat*, rektorat tidak mengijinkan berdirinya Unit Aktifitas Bantuan Teknologi ITB. *Kelima*, rektorat memberikan sanksi kepada empat) mahasiswa yang berteriak saat ceramah P4. *Keenam*, rektorat menerbitkan buku Peraturan-Peraturan ITB dalam 3 jilid yang mengatur semua aktifitas mahasiswa. Akan diberikan sanksi bagi yang melanggar peraturan ini. Pada tahun 1996, terjadi pula beberapa kebijakan yang cenderung represif dan merugikan para dosen dan mahasiswa. *Pertama*, penghentian kontrak kerja tiga asisten dosen secara sepihak karena ketiga asisten dosen tersebut hadir dalam Penerimaan Anggota Baru Ikatan Mahasiswa Arsitektur-Gunadarma ITB. *Kedua*, rektorat melarang terbitnya bulletin Ganesha karena dinilai melanggar kode kehormatan dan peraturan dalam terbitannya edisi khusus Aprilrektorat memaksa kepada 22 Himpunan Mahasiswa ITB untuk mengubah AD/ARTnya.Lihat dalam *Kompas*, tanggal 9 Februari 1996; *Suara Pembaruan*, tanggal 12 Februari 1996; dan*Pikiran Rakyat*, tanggal 24 April 1996.

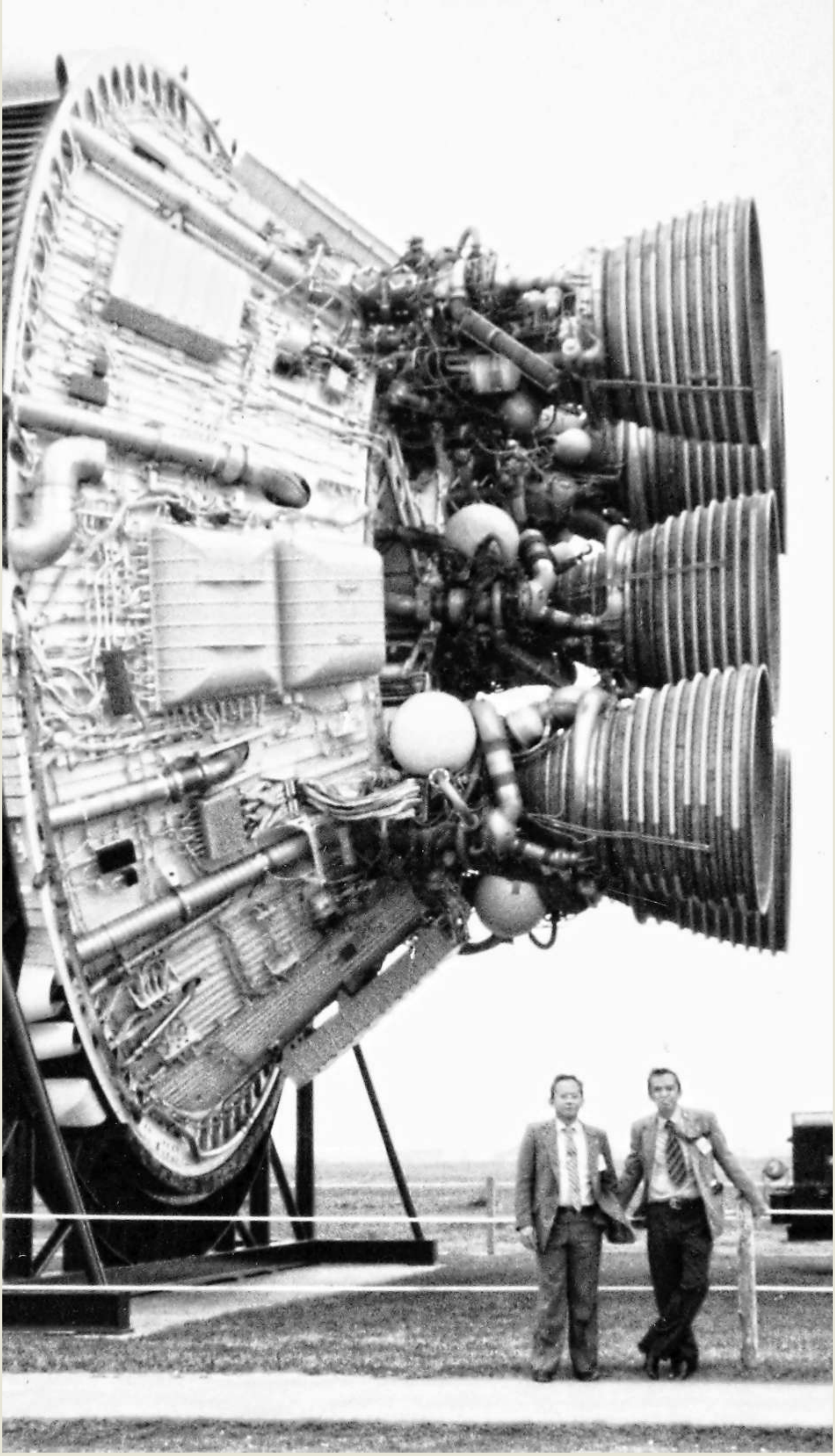

Wiranto Arismunandar sempat menjabat sebagai Wakil Ketua Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 1978-1989

(Sumber: Arsip Biro Umum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)

Wiranto Arismunandar

(Sumber: Arsip Biro Umum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)

meredam gelombang aksi mahasiswa yang menuntut Presiden Soeharto mundur. Hal itu didasarkan pada rangkaian kebijakan yang dikeluarkan Wiranto semasa menjabat Rektor ITB tahun 1989-1996 sebagai orang yang keras terhadap mahasiswa: tegas dan tak segan memberi skorsing bagi mahasiswa yang membandel.

Acara serah terima jabatan dari Wardiman ke Wiranto berlangsung pada Rabu tanggal 18 Maret 1998. Dalam pidato sambutannya dengan suara tegas Wiranto menyampaikan beberapa kebijakan penting yang akan ditempuhnya. Pertama, pentingnya menyukseskan program wajib belajar sembilan tahun. Kedua, upaya memajukan dunia riset dengan pengalokasian anggaran yang wajar. Ketiga, meneruskan program menteri sebelumnya, yakni program *link and match*. Program ini merupakan agenda untuk mengenalkan secara lebih dalam dunia pendidikan dan dunia kerja, yang dimaksudkan agar selepas menyelesaikan pendidikan seorang mahasiswa dapat beradaptasi secara baik dengan dunia lapangan pekerjaan.[12]

Selama lebih kurang 60 hari menjabat menteri, program dan gagasan Wiranto kurang berjalan optimal. Hal ini dapat dimengerti sebab pada bulan Maret-Mei 1998 merupakan masa yang sangat genting dalam dunia politik-ekonomi Indonesia. Di satu sisi Indonesia sedang dihadapkan pada krisis ekonomi yang luar biasa pengaruhnya terhadap segala sektor kehidupan, termasuk dunia pendidikan; sedang di sisi lain gelombang demonstrasi mahasiswa menuntut pergantian kekuasaan semakin keras dan menemukan titik puncak pada pertengahan bulan Mei 1998.

Dalam kurun waktu itu pula Wiranto disibukkan untuk berkomunikasi dengan jajaran rektor dan pemimpin universitas di seluruh Indonesia. Boleh jadi hal tersebut merupakan perintah Presiden Soeharto dalam rangka meredam demonstrasi mahasiswa yang marak di seluruh daerah. Alhasil sejarah mencatat tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto resmi mengundurkan diri sebagai presiden. Keadaan semakin tidak menentu. Krisis tetap berlanjut, sementara pucuk pimpinan nasional diserahkan kepada Wakil Presiden B.J. Habibie. Dengan demikian karier, gagasan, pemikiran, dan cita-cita Wiranto untuk memajukan dunia pendidikan pun ikut tenggelam bersama riuh rendah Reformasi 1998.

12 Majalah *D&R*, 28 Maret 1998.

Juwono Sudarsono

Masa Jabatan
23 Mei 1998 – 20 Oktober 1999

Juwono Sudarsono

PENDIDIKAN DAN KELUARGA

Juwono Sudarsono adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Kabinet Reformasi Pembangunan di bawah Presiden BJ. Habibie. Pemerintahan Habibie merupakan pemerintahan transisi dari pemerintahan Orde Baru ke periode "pemerintahan reformasi". Masa pemerintahan reformasi merupakan periode pemerintahan setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto pada tanggal 20 Mei 1998.

Juwono Sudarsono lahir pada tanggal 5 Maret 1942 di Banjar, Ciamis, Jawa Barat. Ia berasal dari keluarga pejuang kemerdekaan. Ayahnya, Dr. Sudarsono, adalah seorang dokter dan diplomat, menjadi Menteri Dalam Negeri pada Masa Kabinet Syahrir II. Oleh karena itu, perjalanan masa kecil dan masa remaja Juwono tidak bisa lepas dari kehidupan ayahnya sebagai seorang diplomat yang bertugas di beberapa negara. Ketika ayahnya ditugaskan di India, Juwono—yang saat itu baru berumur enam tahun—menyusul ayahnya. Ia masuk Sekolah Dasar di India, Sekolah Menengah Pertama (SMP) diselesaikan di Jakarta, sedangkan Sekolah Menengah Atas (SMA) ditempuh di Inggris. Ia mendapat gelar B.A. dan M.S. dari Universitas Indonesia (UI), gelas M.A. dari The Institute of Social Studies di Den Haag, Belanda, dan The University of California at Berkeley, Amerika Serikat, serta gelar Ph.D. dari The London School of Economics.

Juwono kuliah di UI dan tamat sebagai sarjana publistik pada tahun 1966. Begitu memperoleh gelar sarjana ia melamar pekerjaaan di Departemen Luar Negeri (Deplu), tetapi lamarannya ditolak. Pada saat itu Indonesia peristiwa G30S/PKI baru usai sehingga pemerintah mengadakan pemeriksaan terhadap karyawan Deplu yang terlibat PKI. Juwono kemudian bekerja di almaternya, UI, sebagai asisten dosen yang membantu Miriam Budiharjo untuk mata kuliah Sistem Politik Asia. Ketika penerimaan pegawai di Deplu kembali dibuka ia tidak tertarik lagi melamar sebagai pegawai Deplu. Ia memantapkan diri sebagai dosen dengan menempuh pendidikan S2 di Universitas Berkeley, Amerika Serikat, dalam bidang ilmu politik dan kemudian meraih gelar Ph.D. untuk Ilmu Hubungan Internasional di *London School of Economic* di London, Inggris.

Dua bulan sebelum lengser dari kekuasaan, Soeharto membentuk Kabinet Pembangnan VII menyusul kemenangannya di Pemilu 1997. Posisi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dipercayakan kepada Prof. Ir. Wiranto Arismunandar. Setelah Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998, jabatan presiden diamanahkan kepada B.J. Habibie. Habibie membentuk kabinet baru dengan nama Kabinet Reformasi Pembangunan, namun kabinet ini dinilai kurang aspiratif karena masih didominasi para pejabat masa Orde Baru. Dari 36 anggota kebinet, 20 di antaranya adalah "wajah lama". Adapun Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu dijabat oleh Prof. Dr. Juwono Soedarsono.[1]

Presiden B.J. Habibie mengangkat Juwono Sudarsono sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 23 Mei 1998 (Kepres No. 122/M Tahun 1998). Masa jabatan Juwono sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tidak begitu lama, hanya 18 bulan, seiring dengan berakhirnya masa pemerintahan B.J. Habibie pada tanggal 20 Oktober 1999 karena pidato pertanggungjawaban Habibie sebagai presiden di depan MPR pada tahun 1999 ditolak oleh MPR.[2]

Di samping sebagai akademisi, Juwono Sudarsono juga seorang birokrat yang memegang berbagai jabatan penting dalam pemerintahan. Sebelum berkarier di pemerintahan, Juwono memegang jabatan struktural di kampus UI, terutama di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), antara lain Pembantu Dekan (1971-1973 dan 1979-1981), Ketua Jurusan Ilmu Politik (1973-1975), Ketua Jurusan Hubungan Internasional (1985-1988), dan Dekan FISIP UI (1988-1994).[3]

Sebagai pembicara di Gedung Kebangkitan Nasional. Ceramahnya berjudul "Aspek aspek ASEAN ditinjau dari segi perjuangan nasional" diselenggarakan GKN di GKN Jakarta, 20 Mei 1981

(Sumber Foto: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia)

Pada masa Orde Baru, Juwono menjabat sebagai Wakil Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) dan Menteri Negara Lingkungan Hidup pada Kabinet Pembangunan VII (1997-1998). Setelah menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada masa Presiden Habibie (1998-1999) ia masih dipercaya memegang jabatan pemerintahan pada presiden berikutnya. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid ia dipercaya sebagai Menteri Pertahanan (Kepres No. 355/M Tahun 1999) dan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono ia juga menjadi Menteri Pertahanan (Kepres No. 187/M Tahun 2004).

MENEMPATKAN TOKOH SEJARAH

Masa pemerintahan reformasi merupakan periode yang penting dalam sejarah perubahan politik pemerintahan di Indonesia. Kelahiran pemerintahan reformasi dilatarbelakangi oleh berakhirnya pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Berakhirnya pemerintahan Orde Baru tersebut diawali oleh krisis ekonomi Asia yang melanda beberapa negara, seperti Thailand, Korea Selatan, Malaysia, dan Indonesia. Krisis ekonomi di Indonesia bahkan merambah menjadi krisis politik, yang ditandai adanya demontrasi mahasiswa secara besar-besaran, kerusuhan pada bulan Mei 1998, dan mundurnya Soeharto sebagai presiden.[4]

Masa pemerintahan reformasi melahirkan kelompok masyarakat yang anti Soeharto. Ada enam tuntutan reformasi, yang salah satu di antaranya adalah mengadili Soeharto. Selama menjadi presiden, Soeharto memiliki kekuasaan politik yang sangat kuat. Seluruh wilayah kekuasaan berada di bawah kendali tangan Soeharto, baik wilayah eksekutif, wilayah legislatif, maupun wilayah yudikatif. Akibat kekuasaan yang kuat tersebut, kelompok reformasi yang anti Soeharto menganggap Soeharto melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum yang disebut dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), suatu istilah yang muncul pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1998.

Kuatnya kedudukan Presiden Soeharto berpengaruh pula terhadap kebijakan pendidikan. Salah satu bagian penting dari kebijakan pendidikan adalah kurikulum, khususnya mata pelajaran sejarah. Narasi sejarah untuk kepentingan pendidikan adalah mengembangkan nilai. Nilai dapat dikembangkan melalui peran tokoh-tokoh sejarah dalam peristiwa-peristiwa sejarah. Dalam sejarah Indonesia peristiwa-peristiwa sejarah yang ditampilkan adalah peristiwa-peristiwa yang memiliki nilai terhadap proses lahir dan berkembangnya Republik Indonesia (RI), seperti perang melawan penjajah serta perjuangan menuju dan mempertahankan kemerdekaan.

Soeharto termasuk salah seorang tokoh yang berperan dalam perjuangan bangsa, khususnya perjuangan pada periode revolusi fisik dan peristiwa penumpasan G30S/PKI atau Gerakan Tiga Puluh September (Gestapu). Peran Soeharto sangat ditonjolkan dalam buku pelajaran sejarah di sekolah. Khusus pada peristiwa G30S/PKI, ada kesan interpretasi sejarah bahwa Soekarno termasuk pihak yang bertanggung jawab terhadap peristiwa G30S/PKI. Interpretasi sejarah terhadap kedua tokoh tersebut (Soeharto dan Soekarno) dalam peristiwa G30S/PKI berbanding terbalik: Soeharto diinterprestasikan sebagai penyelamat ideologi bangsa, sedangkan Soekarno sebaliknya.

Dominasi peran Soeharto dalam sejarah Indonesia sebagaimana diajarkan sebagai materi pelajaran sejarah menjadi isu kontroversial dalam penulisan sejarah pada masa reformasi. Kelompok yang anti-Soeharto ingin menghilangkan peran sejarah Soeharto. Pada masa awal reformasi terdapat gerakan-gerakan yang ingin agar interpretasi sejarah tahun 1965 yang berkaitan dengan dalang peristiwa Gestapu ditinjau ulang. Gerakan ini menjadi salah satu tema Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional (KIPNAS) yang diselenggarakan di Serpong pada tanggal 9-10 September 1999 (LIPI, 1999). Dalam Konggres tersebut ada satu sesi yang membahas sejarah Gestapu dengan mengundang pembicara yang berasal dari keluarga yang terlibat Gestapu dan mantan tahanan politik yang dituduh anggota PKI. Diskusi yang terjadi dalam forum tersebut menjadi semacam gugatan interpretasi tunggal terhadap tokoh atau pihak yang dianggap dalang peristiwa Gestapu. Para mantan tahanan politik PKI yang hadir saat itu meminta agar Soeharto pun ditulis sebagai pihak yang menjadi dalang peristiwa Gestapu.

Isu kontroversial tentang tokoh sejarah, khususnya antara Soeharto dan Soekarno, menjadi perhatian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Juwono Sudarsono. Ia melihat ada upaya untuk menghilangkan peran Soeharto dan sebaliknya menghidupkan kembali peran Soekarno yang sudah lama tenggelam dalam sejarah Indonesia. Juwono memanggil Anhar Gonggong dari Direktorat Sejarah dan Nilai-Nilai Tradisi bersama Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) agar melakukan peninjauan ulang terhadap penulisan sejarah Indonesia untuk mata pelajaran sejarah di sekolah. Juwono meminta penulisan sejarah yang berimbang antarkedua tokoh tersebut dan tidak saling menenggelamkan.[5] Usulan Juwono belum mencapai hasil karena masa jabatannya sebagai Mendikbud berakhir bersamaan dengan masa jabatan Presiden Habibie yang hanya berlangsung 18 bulan. Juwono mengakhiri masa jabatan sebagai Mendikbud pada tanggal 20 Oktober 1999.

KRISIS EKONOMI, REFORMASI, DAN KEBIJAKAN SEBAGAI MENDIKBUD

Pada Tahun 1998 seperti negara-negara Asia lain yang berupaya bangkit dari dampak krisis keuangan yang merusak tatanan sosial, ekonomi, budaya, politik, Indonesia pun berupaya bangkit melalui agenda-agenda reformasi (Zuhal, 2008: hal 5). Gerakan reformasi yang dimotori oleh mahasiswa tahun 1998, pada prinsipnya, mengandung empat tuntutan, yaitu (1) demokrasi, (2) kebebasan berpendapat dan berbeda pendapat, (3) keterbukaan, dan (4) otonomi.[6]

Prioritas pembangunan pendidikan pada waktu krisis moneter harus memberikan kesempatan yang luas kepada penduduk berusia kerja, terutama kegiatan yang memberi kemungkinan kepada lulusannya terjun langsung ke dunia kerja dan melakukan kegiatan ekonomi. Peluang memberikan kemungkinan pelatihan kerja dan pengenalan lebih jauh tentang dunia kerja dapat dilakukan melalui program muatan lokal dalam Kurikulum 1994. Hal ini sesuai dengan pendapat "harus ada hubungan antara pendidikan dan pelatihan kerja".[7]

Pembangunan *human capital* menjadi kunci untuk mewujudkan keunggulan daya saing bangsa Indonesia agar dapat disejajarkan dengan negara-negara lain. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan adanya reformasi di bidang pendidikan yang memfokuskan keberpihakan negara terhadap sumber daya manusia yang ada. Negara harus memperhatikan kesejahteraan para guru dan dosen serta para

peneliti dan perekayasa dengan membuat aturan yang mendukung kegiatan penelitian, pendidikan, dan perekayasaan lebih bergairah. Keberhasilan pembangunan *human capital* dapat diukur dengan beberapa indikator, antara lain indeks pembangunan manusia (*human development index*).[8]

Presiden B.J. Habibie, melalui Surat Keputusan Presiden No.18 Th. 1999, membentuk Tim Reformasi Menuju Masyarakat Madani. Di dalam tim tersebut terdapat kelompok yang merumuskan *platform* reformasi bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM). Di dalam platform itu, yang selanjutnya dijadikan sumber penulisan seputar perjalanan serta pelaksanaan reformasi pendidikan dan pengembangan SDM, terangkum garis besar uraian tentang "Arah Politik Pengembangan Pendidikan dan Pengembangan SDM".[9]

Studi Hosen (2003) terhadap reformasi politik dan hukum pada pemerintahan Presiden B.J. Habibie (1998-1999) menunjukkan bahwa upaya reformasi kehidupan politik, hukum, dan pemerintahan yang bersih dilakukan dengan intensif.[10] Perdebatan di persidangan MPR 1999 dalam perumusan dokumen GBHN 1999 secara tegas menuntut reformasi di bidang pendidikan, antara lain melalui pembaharuan kurikulum dan instrumen pendidikan lainnya. Berturut-turut dalam amandemen Pasal 31 UUD 1945 secara tegas memosisikan aturan pokok kebijakan pendidikan nasional. Undang-undang Dasar (UUD) 1945, sebagai dokumen rujukan hukum tertinggi, secara terang benderang menegaskan bagaimana peran negara dan warga negara di bidang pendidikan.[11]

Era reformasi menuntut terciptanya tata kehidupan baru, yakni demokratisasi dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Masyarakat madani (*civil society*), begitu kemudian sering disebut-sebut. Sejalan dengan tuntutan itu Presiden B.J. Habibie bersama Kabinet Reformasi melakukan berbagai kebijakan dan perubahan.[12] Kebijakan pertama yang ditempuh di bidang pendidikan adalah mempertahankan hasil yang telah dicapai sekaligus meningkatkan apa yang dinilai baik. Kebijakan kedua segera mengatasi dampak krisis moneter dan ekonomi serta sosial politik melalui program pemulihan (*recovery*) dalam bentuk Program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Adapun kebijakan ketiga menyosialisasikan visi dan misi reformasi pendidikan nasional melalui berbagai strategi sebagai berikut:[13]

1. Melaksanakan otonomi dan desentralisasi.
2. Melaksanakan manajemen berbasis sekolah.
3. Menelisik kurikulum secara periodik untuk menjamin terlaksananya proses kegiatan pendidikan yang berkualitas.
4. Pemerataan dan perluasan pendidikan sebagai upaya pencerdasan kehidupan bangsa yang dapat menjamin bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan layanan pendidikan.
5. Menerapkan sistem manajemen mutu.
6. Pengelolaan anggaran pendidikan yang berorientasi kepada prinsip efisiensi dan ketergunaan.
7. Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
8. Penerapan A *Student Center Learning.*

Visi reformasi pendidikan dan pengembangan SDM adalah mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia sesuai dengan amanat Proklamasi Kemerdekaan 1945 dengan tekad mewujudkan masyarakat madani Indonesia yang memiliki cita-cita dan harapan masa depan, demokratis dan beradab, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, berakhlak mulia, tertib dan sadar hukum, kooperatif dan kompetitif, serta memiliki kesadaran dan solidaritas antargenerasi dan antarbangsa.[14]

Misi reformasi pendidikan dan pengembangan SDM diwujudkan dalam (1) pengelolaan secara profesional; (2) penyelenggaraan yang mencakup spektrum luas dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, dan individu-individu untuk menampung berbagai kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan kondisi ekonomi, bisnis, industri, dan sosial budaya masyarakat yang sedang mengalami perubahan cepat; (3) pengembangan kurikulum dengan mengakomodasi unsur-unsur praktis dan teoritik berdasarkan

Juwono Sudarsono dalam diskusi panel "Pemikiran Politik & ekonomi Bung Hatta bagi masa kini" tgl. 23 Juni 1980 diselenggarakan oleh Fis. UI

(Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia)

kebutuhan-kebutuhan nyata dan kebutuhan yang diperkirakan sesuai dengan dinamika kehidupan yang beraneka ragam; (4) menjadikan tenaga kependidikan dan pengembangan SDM (guru, para pelatih, pengelola, dan pimpinan) sebagai simbol dan contoh yang hidup dari masyarakat beradab dan demokratis (madani) yang dapat menciptakan kemerdekaan pedagogis dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan hakikat, tujuan, dan prinsip-prinsip terbaik reformasi pendidikan dan pengembangan SDM; serta (5) mengupayakan tersedianya pembiayaan pendidikan yang wajar sehingga mencerminkan bahwa pendidikan untuk semua dan semua untuk pendidikan.[15]

Persoalan yang dihadapi oleh Mendikbud Juwono adalah penerimaan dan legitimasi B.J. Habibie sebagai presiden. Naiknya B.J. Habibie menggantikan Presiden Soeharto mengundang perdebatan hukum dan kontroversial karena Presiden Soeharto menyerahkan kepada Habibie secara sepihak kekuasaan. Sikap atas pelantikan Habibie sebagai presiden di kalangan mahasiswa terbagi atas tiga kelompok, yaitu (1) menolak Habibie karena merupakan produk Orde Baru; (2) bersikap netral karena pada saat itu tidak ada pemimpin negara yang diterima semua kalangan, sementara jabatan presiden tidak boleh kosong; dan (3) mahasiswa berpendapat bahwa pengalihan kekuasaan ke Habibie sah dan konstitusional.[16]

Juwono memang belum pernah menjadi rektor, namun ia dikenal lugas, profesional, dekat dengan mahasiswa, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Para pengamat menilai, kelemahan Juwono sebagai Mendikbud adalah tidak mengenal dengan baik perguruan tinggi swasta yang memiliki karakter dan masalah sendiri dibanding Perguruan Tinggi Negeri (PTN).[17] Harapan pada Mendikbud Juwono adalah kebebasan akademik dan pendidikan politik yang santun di dunia kampus.[18] Lingkungan akademik kampus dapat menjadi mimbar untuk kebebasan berpendapat dan menyatakan gagasan. Kampus mengharapkan Mendikbud menjadi motor perubahan pendekatan kekuasaan ke arah pendekatan moral dan hati nurani. Selain itu dunia kampus mengharapkan Juwono mampu menjembatani dunia akademik kampus dengan dunia praksis serta dunia kerja.

Mendikbud Juwono Sudarsono menyatakan bahwa krisis ekonomi yang melanda Indonesia mengakibatkan bidang pendidikan pun mengalami krisis pula. Akibatnya angka partisipasi kasar (APK) turun drastis dari 78% menjadi 58% (1997/1998). Hal tersebut disebabkan oleh 10% sampai 20% dari jumlah siswa terpaksa *drop out* (berhenti sekolah) karena kesulitan ekonomi dan sebab-sebab lain yang sejenis. Keadaan demikian tidak boleh berlangsung terus sebab akan terjadi kegagalan Wajib Belajar Pendidikan Dasar yang meliputi satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD) sampai tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).[19]

Pada masa Juwono menjadi Mendikubud terdapat 1.327.128 orang guru SD, 430.981 orang guru SMP, dan 337.796 orang guru SMA namun dengan persebaran tidak proporsional di berbagai daerah.[20] Selain itu

permasalahan yang mucul berkaitan dengan guru adalah latar belakang pendidikan guru yang didominasi oleh pendidikan setingkat Sekolah Pendidikan Guru (SPG), Diploma (D)1, dan D3. Dilihat dari tingkat kesejahteraan, kesejahteraan guru masih jauh dari memadai. Gaji guru yang relatif kecil masih kerap dipotong untuk memenuhi berbagai kewajiban. Tunjangan fungsional vang diterima guru, yang sebenarnya merupakan pengakuan dan penghargaan terhadap profesi guru, hampir tidak ada artinya. Oleh karena itu tidak mengherankan jika guru mencari pekerjaan sambilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebagai akibatnya guru tidak mampu memfokuskan perhatian pada tugas utamanya sebagai guru.[21]

Pada saat itu ada gerakan organisasi guru, yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), untuk memperjuangkan kesejahteraan guru. PGRI mengupayakan agar guru memiliki status dan kesejahteraan yang memadai serta tidak terkotak-kotak. Akar masalah adanya perlakuan terhadap guru seperti itu adalah karena tidak ada dasar hukum yang pasti dan mendasar tentang guru. Oleh Karena itu salah satu amanat kongres PGRI XVIII di Bandung bulan Nopember 1998 adalah memperjuangkan terbentuknya undang-undang tentang guru. Tanggal 4 Januari 1999 pengurus PGRI hasil kongres XVIII di Bandung melakukan dengar-pendapat dengan Mendikbud Juwono Sudarsono. Salah satu materi pembicaraannya adalah amanat kongres tentang undang-undang guru, yang ternyata mendapat sambutan baik. Pada tanggal 6 Januari 1999 pengurus PGRI di Bandung melakukan pertemuan dengan Presiden Habibie yang didampingi Mendikbud Juwono Sudarsono di Istana Merdeka. Presiden Habibie menyambut baik usulan undang-undang tentang guru.

Walaupun hanya menjabat dalam waktu relatif singkat, Mendikbud Juwono melakukan beberapa kebijakan yang menyangkut peraturan, peningkatan mutu, kesejahteraan guru, dan sebagainya.

Secara konstitusional ada perubahan penting atas amandemen atau perubahan UUD 1945 pasal 31 tentang Pendidikan, antara lain Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya duapuluh persen (20%) dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, khususnya berkaitan dengan otonomi daerah, berdampak terhadap penyelenggaraan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan yang semula bersifat sentralistik atau terpusat menjadi desentralisasi, dalam arti pendidikan diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Maksudnya adalah pengelolaan pendidikan nasional yang semula diatur secara terpusat oleh pemerintah pusat sudah saatnya pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah otonom. Desentralisasi pendidikan inilah yang kemudian terkenal dengan sebutan otonomi pendidikan.[22] Desentralisasi pendidikan merupakan bentuk penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan pengelolaan pendidikan menjadi kewenangan daerah, sehingga pengembangan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan lebih cepat, tepat, efisien, dan efektif, khususnya untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat di daerah dalam bidang pendidikan.[23]

Berkaitan dengan otonomi daerah terdapat empat isu kebijakan penyelenggaraan pendidikan nasional yang perlu direkonstruksi, yaitu (1) berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan, (2) efisiensi pengelolaan pendidikan, (3) relevansi pendidikan, dan (4) pemerataan pelayanan pendidikan. Perubahan sistem pendidikan nasional pada masa reformasi bertujuan meningkatkan mutu pendidikan dan pelayanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan dinamika yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.[24]

Dampak otonomi daerah dalam pendidikan juga berkait pada pelaksanaan kurikulum. Daerah dapat menyelenggarakan kurikulum dalam bentuk kurikulum muatan lokal. Beberapa contoh kurikulum muatan lokal seperti agrobisnis dan agroindustri, budi daya perikanan, industri kerajinan, industri kerumahtanggaan, industri kepariwisataan, serta kewirausahaan dan koperasi. Muatan lokal tersebut sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing dan harus mendapat prioritas agar efektivitas otonomi pendidikan dasar dan menengah optimal.[25]

Juwono melakukan kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan agama bekerja sama dengan Menteri Agama. Pada tanggal 8 Oktober 1999 ditandatangani Surat Keputusan bersama Mendikbud dan Menag no. 4/u/skb/1999 dan no. 570 th 1999, tentang pelaksanaan pendidikan agama pada satuan pendidikan dasar dan menengah di lingkungan pembinaan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah, yang isinya antara lain sebagai berikut:

1. Apabila terdapat sekurang-kurangnya 10 orang siswa pada suatu kelas yg menganut agama tertentu, maka pendidikan agama kepada 10 orang wajib diberikan di kelas itu.
2. Apabila terdapat siswa yg menganut agama tertentu kurang dari 10 orang dalam satu kelas, maka pendidikan agama di kelas itu wajib dilaksanakan dengan cara penggabungan beberapa kelas (kolektif) dengan cara mengatur waktu yg tidak merugikan hak siswa tersebut untuk mengikuti pelajaran lain.
3. Pelaksanaan Pendidikan Agama bagi siswa yang di kelasnya tidak diajarkan pendidikan agama yang dianutnya, dilakukan oleh Pembina Agama.
4. Apabila tidak ada Guru Pendidikan Agama pada satuan pendidikan maka dapat diangkat Guru Pendidikan Agama Tidak Tetap dan/atau Pembina Agama.

Untuk meningkatkan pembiayaan penyelenggaraan pendidikan pada tingkat dasar, Juwono mengeluarkan kebijakan Program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Bentuknya berupa beasiswa bagi anak-anak keluarga miskin dan dana bantuan operasional (DBO) ke sekolah-sekolah. Selain itu dihidupkan kembali Gerakan Nasional Orangtua Asuh (GNOTA), yaitu membantu anak-anak dari orangtua yang tidak mampu secara ekonomis agar dapat menyelesaikan pendidikannya dengan lancar.[26]

Peningkatan mutu perguruan tinggi juga menjadi perhatian Mendikbud Juwono. Keputusan Menteri Nomor 223 /U/1998 Tentang Kerjasama Antar Perguruan Tinggi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan bahwa dengan meningkatnya hubungan kerjasama antar perguruan tinggi akibat pengaruh era globalisasi perlu diatur hubungan perguruan tinggi dengan perguruan tinggi atau lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri. Kerjasama bertujuan saling meningkatkan dan mengembangkan kinerja pendidikan tinggi yang bekerja sama dalam rangka memelihara, membina, memberdayakan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian.

Dalam upaya meningkatkan mutu dan akses masyarakat terhadap perguruan tinggi, Juwono Sudarsono mengeluarkan kebijakan perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) menjadi universitas. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh upaya pemerintah meningkatkan mutu, relevansi, efisiensi, pemerataan, dan akuntabilitas pendidikan tinggi secara nasional. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 Tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Menjadi Universitas maka terjadilah perubahan status IKIP sebagai berikut:

1. IKIP Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta.
2. IKIP Surabaya menjadi Universitas Negeri Surabaya.
3. IKIP Malang menjadi Universitas Negeri Malang.
4. IKIP Ujung Pandang menjadi Universitas Negeri Makassar.
5. IKIP Jakarta menjadi Universitas Negeri Jakarta.
6. IKIP Padang menjadi Universitas Negeri Padang.

Perubahan status keenam IKIP tersebut menjadi universitas disusul oleh IKIP yang lain. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999 Tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas tiga IKIP berubah menjadi universitas:

1. IKIP Semarang menjadi Universitas Negeri Semarang,
2. IKIP Bandung menjadi Universitas Pendidikan Indonesia, dan
3. IKIP Medan menjadi Universitas Negeri Medan.

Juwono Sudarsono sebagai Menteri Pertahanan memberikan keterangan pers seusai serah terima jabatan di Gedung Departemen Pertahanan, Jakarta, Senin 25 Oktober 2004

(Sumber: *Kompas*/ Agus Susanto)

Adapun tugas-tugas IKIP setelah berubah menjadi universitas sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesional dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu.
2. Mengembangkan ilmu pendidikan, ilmu keguruan, serta mendidik tenaga akademik dan profesional dalam bidang kependidikan.

PANDANGAN TENTANG PERTAHANAN AMERIKA DAN CINA

Di samping sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Juwono Sudarsono merupakan pakar hubungan internasional, terutama tentang pertahanan. Sebagai pakar dalam bidang strategi pertahanan, manajemen, dan perencanaan, Juwono Sudarsono sangat percaya pada "pertahanan non-militer", termasuk pertahanan sumber daya manusia dan keterampilan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pertahanan keadilan sosial dan nilai-nilai budaya sebagai konstan proses pembentukan karakter dan bangsa. Sebagai pakar pertahanan dan politik luar negeri, Juwono menilai bahwa pada awal abad ke-21 dan millennium III pengaruh dan kekuatan Amerika Serikat (AS) sulit untuk ditandingi.

Pendapat tersebut didasarkan pada produksi domestik bruto AS sebesar 10,5 trilyun dollar, anggaran belanja pertahanan sekitar 350 milyar (lebih besar dari gabungan anggaran, belanja pertahanan Rusia, RRC, Jerman, Inggris, Prancis, Italia, India, dan empat negara besar lain), serta ekspor barang dan jasa lebih dari 76,0 milyar setiap tahun. Dengan kemampuan tersebut AS menjadi kekuatan multidimensional yang hadir diseluruh pelosok dunia.[27] Dengan kondisi AS unggul dalam percaturan internasional pada awal abad ke-21 ini, dua pemikir terkemuka, Henry Kissinger dan Robert McNamara, merisaukan peran AS pada masa mendatang. AS dapat menjadi pemimpin dunia dalam arti yang luhur, yakni mengajak bangsa-bangsa lain menggalang perdamaian dan kemakmuran dengan membagi-bagi berkah ilmu dan teknologi yang diterimanya sebagai keniscayaan sejarah, tetapi juga dapat semakin menegaskan kemaharajaan dengan menghalau setiap calon pesaing yang tampil dipentas dunia dengan mengandalkan kekuatan politik, ekonomi, dan teknologi militernya.[28]

Dominasi di badan terpenting Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), yakni Dewan Keamanan, menjadikan AS menjadi "penentu" tentang definisi "keamanan dan perdamaian internasional" sesuai dengan pilihan selera dan kepentingan politiknya. Meskipun demikian, menurut Juwono (2003), Republik Rakyat Cina dalam kurun waktu 30 tahun mendatang akan menjadi kekuatan politik dan ekonomi yang menyaingi Amerika Serikat dan Jepang di Asia Pasifik. Pada satu sisi pasar di RRC merupakan peluang emas untuk kepentingan bisnis perusahaan-perusahaan multinasional Amerika, Eropa dan Jepang.[29]

ENDNOTES

1 Andriono, et.al. 2011. *Jejak langkah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (1945-2011).* Jakarta: Kemendikbud, hal 191-193).

2 *Ibid.*,269

3 http://sejarahri.com/mengenal-menteri-pendidikan-dari-masa-ke-masa/06-04-2018.

4 Denny JA.2006. *Visi Indonesia Baru Steleh Reformasi 1998.* Yogyakarta: LKIS: 16-35.

5 Andriono, et.al. *op.cit.*, 269-271

6 Hamlan. 2013. "Politik pendidikan islam dalam konfigurasi Sistem pendidikan di indonesia. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 10, No. 1, Juni 2013: 194.

7 Saman, M. 2003. "Intensifikasi pelajaran muatan local Untuk mengurangi kendala penuntasan wajib belajar". *Jurnal Kependidikan*, Nomor 2, Tahun XXXill, November 2003: 187

8 Zuhal, 2008. "Meretas Jalan Panjang Keunggulan Daya Saing Indonesia di Milenium Ketiga: Refleksi 10 Tahun Reformasi Bidang Iptek". *Jurnal Demokrasi & HAM* Vol. 8, No. 1, hal 6

9 Fadjar, A. M. 2008. "10 Tahun Reformasi Pendidikan". *Jurnal Demokrasi & HAM* Vol. 8, No. 1, 2008, hal 20-31

10 Samsuri. 2011. Kebijakan pendidikan keifarganegaraan era reformasi Di indonesia. *Cakrawala Pendidikan*, Juni 2011, Th. XXX, No. 2. Hal 267

11 *Ibid.*, 272)

12 Fadjar. *Op.Cit.*, 20

13 *Ibid.*

14 *Ibid.*, 20-21

15 *Ibid.*

16 Sembiring, Manna,F, dan Tugiman. 2013. *B. J. Habibie political policy in 1998 up to 1999. Maklah* Pendidikan Sejarah FKIP-Universitas Riau

17 Media Indonesia, 23 Mei 1998

18 Kompas, 25 mei 1998

19 Saman. *Op.Cit.*,186

20 Republika, 19 Agustus 1998

21 Wardani, I G.A.I. 1999. *Program Pemberdayaan Guru*. Jurnal Ilma Pendidikan, Noi/Ember 1999, Jiltd 6, Nomor 4. Hal 293

22 Mutrofin. 1999. *Perspektif Otonomi Pendidikan (Dasar Dan Menengah).* Makalah. Tidak diterbitkan

23 Hamlan. *Op.Cit.*, 195

24 *Ibid.*

25 Mutroffin, *Loc.It.*

26 Andriono, *et.al. op.cit.*, 212

27 Sudarsono, J. 2003. *Keamanaan Internasional Abad Ke-21***.** Makalah Disampaikan Pada : Seminar Pembangunan Hukum Nasional Viii Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Ri Denpasar, 14-18 Juli 2003

28 *Ibid.*

29 *Ibid.*

Yahya A. Muhaimin

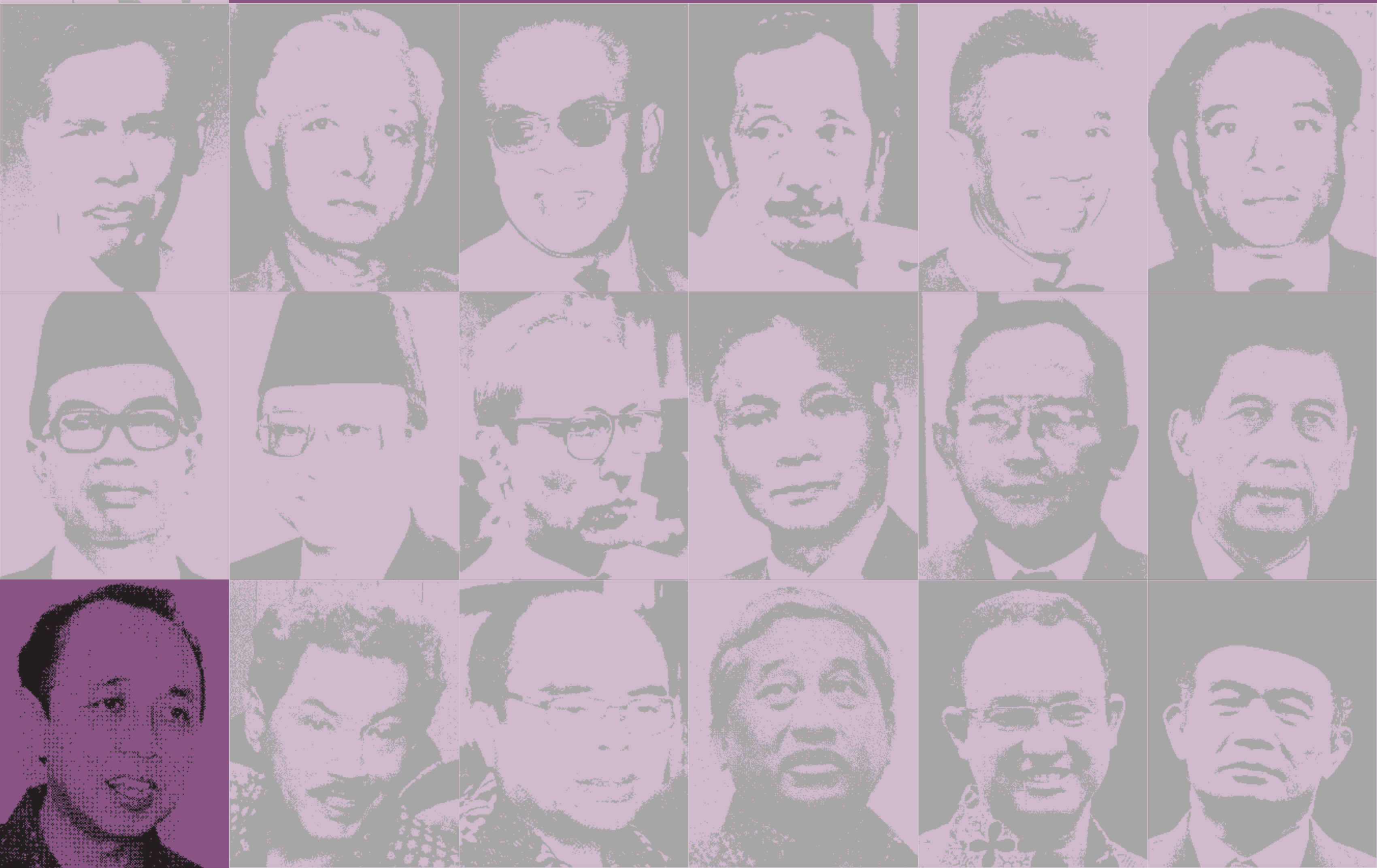

Masa Jabatan
26 Oktober 1999 – 22 Juli 2001

Yahya A. Muhaimin

Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) diubah namanya menjadi Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Yahya A. Muhaimin diangkat sebagai Menteri Pendidikan Nasional pada Kabinet Persatuan Nasional di bawah pimpinan Presiden Abdurrahman Wahid berdasar Keputusan Presiden Nomor 355/M Tahun 1999. Masa jabatan Yahya A. Muhaimin berlangsung sejak tanggal 26 Oktober 1999 hingga 22 Juli 2001.

Yahya A. Muhaimin berasal dari keluarga yang taat pada agama. Kakeknya, Haji Machfudz, seorang saudagar dan aktivis pergerakan dengan bergabung dalam Syarekat Islam. H. Machfudz bersama dengan temannya mendirikan madrasah Ta'allumul Huda, suatu perguruan Islam yang pertama di Bumiayu, pada tahun 1917.[1] Ayah Yahya A. Muhaimin, Haji Abdul Muhaimin, merupakan seorang pedagang kaya yang memperhatikan pendidikan baik pendidikan agama maupun pendidikan umum kepada anak-anaknya. Madrasah Ta'alumul Huda yang didirikan oleh kakeknya tetap dibantu oleh ayah Yahya A. Muhaimin. Ibu Yahya A. Muhaimin, Hajjah Zubaidah, sehari-hari membantu usaha suaminya. Pada masa itu Zubaidah termasuk wanita yang maju. Di samping dididik agama oleh orang tuanya, ia juga dimasukan ke sekolah umum "Kartini".[2]

Yahya A. Muhaimin dilahirkan di Bumiayu, Brebes, Jawa Tengah, pada tanggal 17 Mei 1943. Latar belakang keluarga mempengaruhi perjalanan pendidikannya. Pada umur sekolah dasar ia mengikuti dua sekolah, yaitu Madrasah Ibtidaiyah (MI) Ta'allumul Huda dan Sekolah Rakyat 5 (SR-5) di Kota Bumi Ayu, dan lulus pada tahun 1956. Kemudian ia melanjutkan ke Sekolah Menengah Islam (setingkat Sekolah Menengah Pertama/SMP) di lembaga pendidikan Ta'alamul Huda dan lulus pada tahun 1959. Setelah menyelesaikan SMP ia melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA), tetapi berpindah-pindah sekolah, yaitu SMA Muhammadiyah I Yogyakarta, SMA Negeri di Tegal, SMA Negeri I Purwokerto, SMA Muhammadiyah Purwokerta, dan lulus di SMA Negeri I Purwokerto. Ketika sekolah di SMA Negeri I Purwokerto ia mengikuti program The American Field Service International Scholarship (AFSIS), Amerika Serikat (AS), selama setahun (1962-1963).

Sepulang dari AS dan menyelesaikan SMA, Yahya melanjutkan kuliah di Universitas Gajah Mada (UGM) pada Jurusan Administrasi Negara Fakultas Sosial Politik (Sospol), tetapi kemudian pindah ke Jurusan Hubungan Internasional. Selain kuliah di UGM ia juga kuliah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Yogyakarta Jurusan Perbandingan Agama, tetapi tidak selesai. Yahya menyelesaikan kuliahnya di UGM Pada tahun 1971 dan kemudian diangkat menjadi dosen di almamaternya. Yahya melanjutkan studi ke luar negeri di The Massachusetts Institute of Technology (MIT) yang diselesaikannya pada tahun 1982 dengan memperoleh gelar Ph.D[3] di bidang Political Development and Comparative Politics dan Studi Kawasan Asia dengan disertasi berjudul *Indonesian Economic Policy, 1950-1980: the Politics of Client Businessmen*.[4]

Selama menjadi dosen di UGM Yahya memegang jabatan struktural di kampus, yaitu pengelola Program S2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM (1982-1984) serta Kepala Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian UGM (1996-1999). Pengalaman jabatan tersebut mengantarkannya menjadi Ketua Jurusan Hubungan Internasional Fisipol UGM, Pembantu Dekan Bidang Akademik Fisipol UGM; Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat, serta Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.[5]

MENJADI AKTIVIS

Selain menjadi seorang akademisi di kampus, Yahya A. Muhaimin juga seorang aktivis organisasi kemasyarakatan hingga sekarang, antara lain Persyarekatan Muhammadiyah. Kehidupan sebagai

Yahya A. Muhaimin bersama para menteri dan Presiden Abdurrahman Wahid seusai pelantikan sebagai Menteri Pendidikan Nasional di Istana Negara November 1999

(Sumber: Arsip Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)

aktivis dijalaninya sejak sekolah hingga menjadi mahasiswa. Pengalaman sebagai aktivis inilah yang kemudian membuat Yahya memiliki banyak pergaulan dengan berbagai kalangan, khususnya para aktivis kegiatan keagamaan.

Ketika duduk di bangku Sekolah Dasar, Yahya aktif dalam kegiatan kepanduan: "Pandu Islam". Ketika itu banyak organisasi kemasyarakatan memiliki organisasi pandu dengan nama tersendiri, seperti Pandu Islam, Pandu Rakyat, Pandu Ansor, Pandu Hizbul Wathon, Pandu Siap, dan Kepanduan Bangsa Indonesia. Organisasi itu sangat bermanfaat bagi pembinaan generasi muda sebagai sarana pelatihan kepemimpinan. Organisasi-organisasi kepanduan tersebut kemudian dibubarkan oleh pemerintah dan secara organisasi dilebur ke dalam satu wadah bernama Praja Muda Karana (Pramuka).

Ketika aktif di kepanduan, Yahya pernah memperoleh suatu kegembiraan. Ia akan dikirim ke Filipina mewakili Pandu Islam Kabupaten Brebes untuk mengikuti Jambore. Akan tetapi rencana pergi ke luar negeri itu tidak terlaksana. Orang tuanya tidak mengizinkan karena Yahya waktu itu masih siswa SD dan masih kecil. Orang tuanya khawatir. Walaupun agak kecewa Yahya menuruti keinginan orang tuanya. Ibunya menasihati dan mengobati kekecewaan Yahya dengan mengatakan bahwa kelak suatu saat Yahya akan bisa ke luar negeri. Nasihat orang tuanya itu kelak menjadi kenyataan ketika Yahya sekolah di SMA lolos mengikuti program pertukaran siswa ke Amerika yang dikenal dengan program The American Field Service International Scholarship (AFSIS) selama setahun (1962-1963).

Ketika menjadi mahasiswa, Yahya aktif menjadi anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). HMI adalah organisasi mahasiswa Islam yang didirikan pada tanggal 5 Februari 1947, organisasi mahasiswa Islam tertua dan terbesar di Indonesia; bahkan merupakan organisasi yang sangat berpengaruh di Indonesia karena para alumninya banyak memegang jabatan strategis di pemerintahan. HMI merupakan organisasi independen dan tidak berada di bawah struktur organisasi mana pun, sedangkan IMM adalah organisasi mahasiswa yang berada di bawah Muhammadiyah. Pada saat aktif di HMI Yahya mendirikan Sospol English Club (SSB), suatu kelompok studi mahasiswa yang membantu para mahasiswa di Sospol UGM mempelajari bahasa Inggris dan sebagai sarana untuk merekrut mahasiswa menjadi anggota HMI.[6] Ia mendirikan SSB karena ia alumni AFSIS sehingga memiliki kemampuan berbahasa Inggris secara baik.

Yahya A. Muhaimin mengenal Muhammadiyah sejak kecil karena di kampung halamannya, Bumiayu, sudah berdiri Cabang Muhammadiyah sejak sebelum ia lahir. Secara formal ia mengenal Muhammadiyah ketika sekolah di SMA Muhammadiyah I Yogyakarta dan kemudian pindah ke SMA Muhammadiyah Purwokerto walaupun hanya satu kuartal. Di lingkungan keluarga pun ia mengenal Muhammadiyah

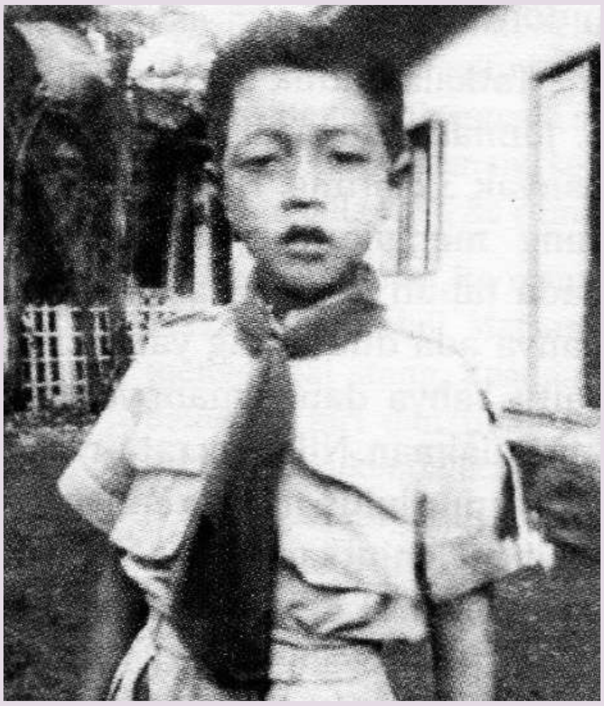

Kiri

Yahya Muhaimin kecil dengan seragam Pandu Islam, 1945

(Sumber: Buku *Tiga Kota Satu Pengabdian Jejak Perjalanan Yahya A. Muhaimin*)

Kanan

Yahya A. Muhaimin sebagai *student* pada Central Community High School (CCHS), De Witt, Iowa, Amerika Serikat, mengikuti program Amarican Field Service International Scholarship (AFSIS) 1963

(Sumber: Buku *Tiga Kota Satu Pengabdian Jejak Perjalanan Yahya A. Muhaimin*)

karena ada anggota keluarganya yang aktif di Masyumi. Saat itu banyak orang Muhammadiyah yang aktif di Masyumi, termasuk keluarga Yahya.

Ia mengenal Muhammadiyah dengan lebih dekat ketika menjadi mahasiswa di UGM dan aktif sebagai pengurus IMM. Pada tahun 1985, sepulang dari Amerika Serikat setelah menyelasikan Doktor, Yahya masuk ke dalam jajaran Pengurus Pusat Muhammadiyah. Ketika pertama kali menjadi Pengurus Pusat Muhammadiyah ia diangkat menjadi Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan. Setelah itu beberapa jabatan di Pimpinan Pusat Muhammadiyah dipegangnya, yaitu Wakil Ketua (1985-1990), Ketua (1990-1995), Pembina Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (1995-2000), dan pada tahun 2002 menjadi salah seorang Wali Amanah Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh.

Pada saat menjabat di Majelis Pendidikan Tinggi, pemikiran Yahya A. Muhaimin banyak berpengaruh pada perubahan penting bagi persyarekatan Muhammadiyah. Gagasan-gagasan dan pemikiran itu disampaikan dalam berbagai forum dan seminar. Pada saat Yahya A. Muhaimin menjabat di Persyarekatan Muhammadiyah banyak didirikan pusat studi pada universitas-universitas Muhammadiyah. Hal yang dianggap baru bagi pengembangan Universitas Muhammadyah saat itu adalah pendirian Fakultas Kedokteran di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

AHLI MILITER DAN PERTAHANAN

Selain menjadi Menteri Pendidikan Nasional, Yahya A. Muhaimin juga dikenal sebagai pengamat politik dan militer. Kedua bidang tersebut sesungguhnya secara pribadi merupakan bidang yang traumatis baginya pada masa kecil. Hal itu disebabkan daerah kelahirannya di Bumiayu, Jawa Tengah, menjadi ajang pertempuran antara TNI dan Darul Islam (DI). Yahya merupakan pengamat politik dan kemiliteran yang konsisten menyandarkan pada jalur keilmiahan, sehingga semua tulisannya menjadi rujukan untuk bahan penelitian para dosen lain.

Karya Yahya A. Muhaimin yang juga menjadi rujukan adalah *Bisnis dan Politik Kebijaksanaan Ekonomi Indonesia 1950-1980*, yang bertolak dari disertasinya. Buku tersebut membahas perkembangan *patron-client* di Indonesia dalam bidang politik dan ekonomi. Ia menyebut bahwa hubungan *patron-client* lahir sebagai konsekuensi pelaksanaan berbagai kebijaksanaan ekonomi yang ditempuh pemerintah Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga masa Orde Baru.[7] Buku tersebut juga berbicara tentang "perselingkuhan" antara penguasa dan pengusaha sebagai dampak dari pelaksanaan kebijaksanaan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintahan Indonesia sejak awal kemerdekaan sampai masa Orde Baru.

Atas

Yahya A. Muhaimin seusai wisuda di Central Community High School De Witt, Iowa, Mei 1965

(Sumber: Buku *Tiga Kota Satu Pengabdian Jejak Perjalanan Yahya A. Muhaimin*)

Tengah

Yahya A. Muhaimin bersama istri menikmati musim semi di luar kota Washinton di sela-sela tugasnya sebagai Atdikbud

(Sumber: Buku *Tiga Kota Satu Pengabdian Jejak Perjalanan Yahya A. Muhaimin*)

Bawah

Mendiknas Yahya A. Muhaimin memberi kenang-kenangan kepada Siswa SMP Cimanggu, Banten

(Sumber: Buku *Tiga Kota Satu Pengabdian Jejak Perjalanan Yahya A. Muhaimin*)

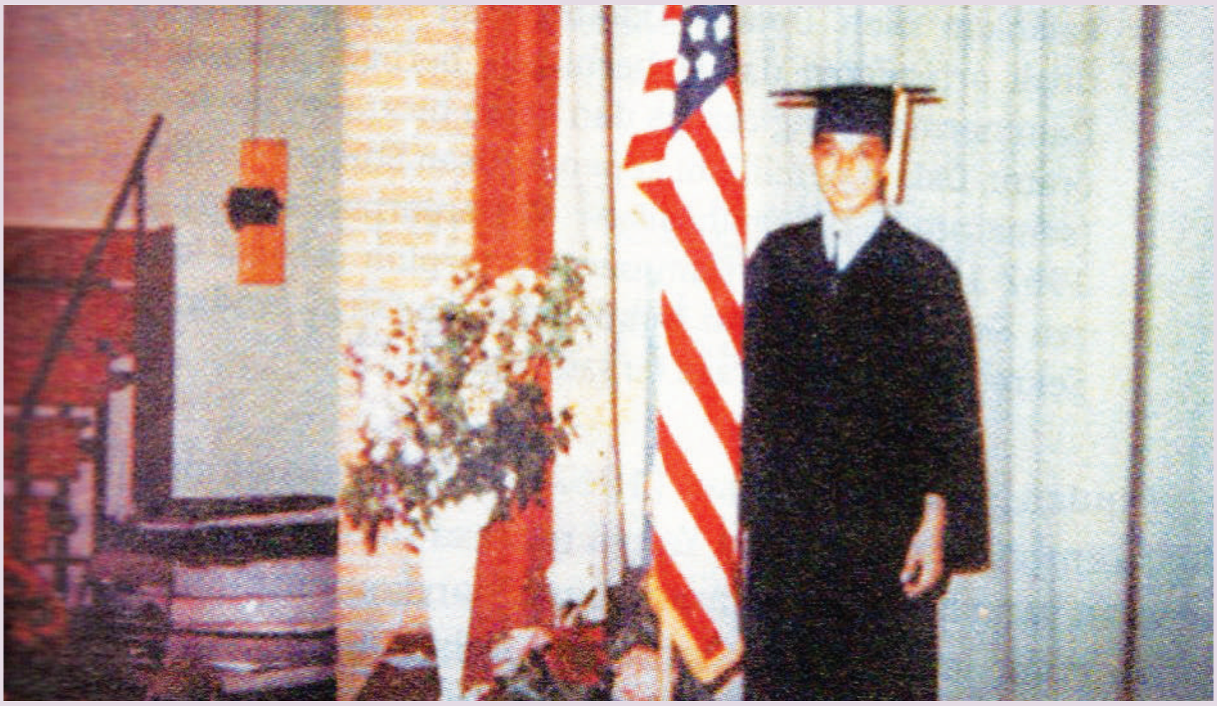

Pembangunan ekonomi sangat memerlukan semangat "kewiraswastaan", yang pada umumnya mempunyai semangat kompetitif, kemandirian, serta independensi. Akan tetapi di Indonesia semangat itu tidak ditemukan; bahkan sebaliknya muncul pengusaha yang tumbuh karena topangan negara, yang disebut Yahya sebagi *client businessmen* 'pengusaha klien'.[8] Semakin banyak pengusaha asli atau pengusaha pribumi, tetapi kebanyakan di antara mereka pengusaha yang tumbuh dan besar berkat dukungan kalangan birokrasi dan interaksi yang sangat menarik. Yahya percaya bahwa ada hubungan yang bersifat kausal antara bentuk kebijaksanaan ekonomi dengan lahir dan berkembangnya pengusaha. Ia mencoba melihat bagaimana dan teknik apa yang digunakan oleh pengusaha-pengusaha tersebut di dalam membina atau menjaga hubungan tersebut.[9]

Client businessmen adalah para pengusaha yang bekerja dengan dukungan dan proteksi dari jaringan kekuasaan pemerintahan. Para pengusaha mempunyai patron dalam kelompok kekuasaan politik-birokrasi dan mereka sangat tergantung kepada konsesi dan monopoli yang diberikan pemerintah. Mereka lahir di luar aparat birokrasi, tetapi biasanya masih termasuk ke dalam keluarga elit yang sedang berkuasa.[10] Yahya mendefinisikan *client businessmen* sebagai "individu dan perusahaan yang bergantung kepada penguasa untuk dapat melakukan kegiatan bisnis", sedangkan peran ekonominya dikatakannya lebih lanjut dengan "ketergantungan yang sifatnya menentukan kepada koneksi atau hubungan dengan pengusaha." Itulah yang membedakan antara pengusaha klien dan pengusaha mandiri.[11]

Pada tulisan yang lain[12] Yahya menjelaskan bahwa perilaku *client businessmen* bisa mengakibatkan paham "bapakisme", seperti yang marak pada zaman Orde Baru dengan istilah "Asal Bapak Senang". Negara birokrasi patrimonial merupakan lingkungan terbaik bagi tumbuh suburnya korupsi, karena korupsi banyak dilakukan dengan menggunakan kedok birokrasi. Para kapitalis semu tersebut merupakan *client businessmen*. Mereka individu dan perusahaan yang bergantung pada penguasa—yang menjadi patron mereka—untuk dapat melakukan kegiatan bisnisnya. Praktik patron-klien telah berlangsung sejak Indonesia baru mengecap kemerdekaan. Atas kritik tersebut buku Yahya A. Muhaimin disomasi oleh Probosutedjo, seorang pengusaha yang juga adik tiri Soeharto, karena merasa tersindir oleh buku terbitan LPeS tersebut.

Probosutedjo memprotes keras dan menuduh Yahya melakukan penghinaan. Meskipun demikian protes Probosutedjo disampaikan dalam batas-batas kewajaran etis. Probosutedjo memberi penjelasan, bantahan, dan tuntutan kepada yang diprotes serta ancaman gugatan pengadilan. Yahya pun siap mempertanggungjawabkan bukunya "secara imiah". Yahya memang tampak 'terpukul' oleh kasus ini dari segi non-ilmiah, tetapi solidaritas rekan-rekannya menjadi dukungan non-ilmiah yang dibutuhkannya.[13]

Pada 12 Juni 2012 di kantor Menteri Pendidikan Nasional, Jakarta, Yahya A. Muhaimin meluncurkan buku biografinya dengan judul *Tiga Kota Satu Pengabdian*. Dalam buku bersampul hijau tersebut mantan Menteri Pendidikan Nasional pada masa Presiden Abdurraman Wahid dan Megawati Soekarnoputri ini menceritakan pengalamannya di bidang yang berbeda-beda, antara lain perjalanan akademisnya, jejak langkahnya sebagai pengajar dan ilmuwan pada dunia pendidikan, dan keberadaannya sebagai pengamat militer yang disegani di negara ini. Analisisnya mengenai peran militer pada masa Orde Baru membuat dirinya semakin dikenal, yang menyebut bahwa militer saat itu memegang peran amat strategis dalam pemerintahan dan politik.

PROGRAM PADA AWAL REFORMASI

Setelah Pemilu tahun 1999 K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjadi Presiden RI dan Megawati Soekarno Putri sebagai Wakil Presidennya. Kabinetnya bernama Kabinet Persatuan Nasional. Nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan diubah menjadi Departemen Pendidikan Nasional dan kemudian diubah lagi menjadi Kementerian Pendidikan Nasional dengan Dr. Yahya A. Muhaimin sebagai menterinya. Dampak perubahan nama tersebut masalah kebudayaan tidak berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan, tetapi bergabung ke Departemen Pariwisata.[14]

Mendiknas Yahya. A. Muhaimin meresmikan 14 SMK di Untau Buo Sumetara Barat, 2000

(Sumber: Buku *Tiga Kota Satu Pengabdian Jejak Perjalanan Yahya A. Muhaimin*)

Tugas sebagai Menteri Pendidikan Nasional tidak ringan karena negara berada di tengah gejolak perpolitikan yang kian panas, perekonomian yang makin memburuk, inflasi yang semakin membumbung, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang marak di mana-mana, pengangguran dan kemiskinan semakin bertambah parah, serta kerusakan moral dan akhlak masyarakat semakin parah. Dalam kedaan krisis demikian diperlukan seorang manajer pendidikan nasional yang tangguh, memiliki pengalaman dan ilmu yang luas, serta keberanian melangkah dengan konsep-konsep yang nyata dan terarah.[15]

Ketika dilantik menjadi Menteri Pendidikan Nasional pada 26 Oktober 1999 Yahya melihat banyak sekali masalah di bidang pendidikan Indonesia, yang sebagian di antaranya merupakan peninggalan Orde Baru. Dalam suasana seperti itu tentu tidak mudah bagi seorang menteri melakukan pembenahan secara menyeluruh dan bisa diterima oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Di antara masalah-masalah pendidikan pada masa itu sebagai berikut:

1. Kecilnya alokasi anggaran pendidikan dalam APBN 2001, yang hanya 3,8% dari anggaran belanja negara (sekitar Rp 11,3 trilyun dari Rp 295 trilyun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/APBN).
2. Anggaran yang kecil itu ditambah dengan adanya krisis ekonomi dan keuangan yang serius sehingga mengakibatkan kondisi lembaga pendidikan menjadi sangat memprihatinkan. Banyak bangunan sekolah rusak, bahkan roboh, dan tidak dapat diperbaiki karena tidak ada dana yang cukup baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat.
3. Tingkat kesejahteraan guru masih tetap rendah dan tidak sepadan dengan waktu dan tenaga yang dikeluarkan; padahal pada masa itu biaya hidup sangat tinggi karena inflasi yang tinggi. Oleh karena itu, untuk pertama kali dalam sejarah, para guru turun ke jalan melakukan demonstrasi di banyak kota menuntut kesejahteraan.
4. Terjadi banyak tawuran antar pelajar atau antar mahasiswa akibat kondisi pendidikan yang kacau. Pada tahun 1999 terjadi 257 kasus tawuran di ibukota yang mengakibatkan 35 pelajar tewas, 204 pelajar luka, dan 478 kendaraan rusak. Pada tahun berikutnya Kakanwil Depdiknas DKI Jakarta Alwi Nurdin mengatakan bahwa sebanyak 1.369 pelajar dari 1.685.084 SMP dan SMA melakukan tawuran. Hal ini mengakibatkan 26 pelajar tewas, 56 pelajar luka berat, dan 109 pelajar luka ringan.
5. Adanya tindak kekerasan di Kampus Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Kekerasan fisik dilakukan mahasiswa senior terhadap mahasiswa junior. Lektor Kepala STPDN Inu Kencana Syafei mengatakan bahwa di sekolah calon pemimpin birokrat ini terdapat 50 kasus kekerasan, narkoba, dan pelecehan seksual.

6. Semakin merajalelanya penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan zat-zat adiktif lainnya. Pemakai zat-zat terlarang tersebut, generasi muda, di antaranya para pelajar. Fenomena yang seperti gunung es ini sulit diselesaikan.
7. Pergaulan bebas juga terjadi di kalangan generasi muda berupa hubungan seks di kalangan pelajar, kehamilan di luar nikah, aborsi, pernikahan dini, dan peristiwa lain yang menyertainya.
8. Makin banyak gelar kesarjanaan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga pendidikan yang tidak memenuhi standar baku, semisal melalui jalan yang tidak benar.
9. Kualitas sumber daya manusia Indonesia (*human development index*/HDI) semakin jauh di bawah negara-negara ASEAN. Kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia pada tahun 2001 berada pada peringkat 102 dari 162 negara.
10. Kualitas akademis rata-rata siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) di Indonesia masih rendah, terutama dalam hal membaca, matematika, dan sains (IPA).
11. Masalah kurikulum pendidikan nasional juga belum terselesaikan, padahal kurikulum merupakan roh dalam pendidikan.[16]

Program kerja yang dilakukan oleh Yahya mencoba menyelesaikan masalah-masalah yang ada di bidang pendidikan. Masalah-masalah tersebut, menurut Yahya, secara sederhana dikelompokkan ke dalam (1) masih rendahnya pemerataan pendidikan; (2) masih rendahnya mutu dan relevansi pendidikan; serta (3) masih lemahnya manajemen pendidikan di samping belum terwujudnya keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemandirian di kalangan akademisi.

Masalah yang berkaitan dengan perguruan tinggi adalah mutu yang rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Pada tahun 1999 mutu pendidikan tinggi di Indonesia tidak termasuk ke dalam sepuluh besar dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, Selandia Baru dan Australia. Sepuluh terbaik dunia bidang pendidikan meliputi Jepang, Korea Selatan, India, Hongkong, Singapura, Australia, Cina, Thailand, Malaysia, dan Filipina. Institut Teknologi Bandung berada pada peringkat ke-21, Universitas Indonesia ke-61, UGM ke-68, Universitas Diponegoro ke-73, dan Universitas Airlangga ke-77.[17] Oleh karena itu kemudian Menteri Pendidikan Nasional mengeluarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/u/2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa.

Human Development Report yang dikeluarkan UNDP tahun 2003 mengemukakan bahwa Indonesia berada di urutan bawah, yaitu urutan 112 dari 175 negara, jauh di bawah Malaysia dan Thailand yang masing-masing menempati urutan 58 dan 74, sedang Filipina berada pada urutan 85, bahkan Vietnam menempati urutan 109. Imam Prasodjo berpendapat bahwa pendidikan di Indonesia sebetulnya sudah masuk kategori "tahap gawat darurat", salah satu di antaranya karena mutu Pendidikan Dasar dan Menengah yang rendah serta sistem pembelajaran yang tak lagi berkembang akibat krisis sosial yang berkepanjangan.

Pada tahun 2000 ditengarai taraf pendidikan perempuan secara umum jauh lebih rendah dibanding laki-laki sehingga berakibat pada kualitas hidup perempuan lebih rendah dibanding laki-laki. Kesenjangan *gender* terkait dengan proses pembelajaran terlihat antara lain pada kurikulum pendidikan yang belum sepenuhnya terbebas dari netralitas *gender*. Kesenjangan *gender* dapat dilihat dari Satuan Kurikulum Matematika serta Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang lebih ramah kepada anak laki-laki, sedangkan kurikulum bahasa dan seni lebih ramah kepada anak-anak perempuan. Penulis buku bahan ajar pun tidak *responsive gender*, karena kenyataannya penulis buku didominasi oleh laki-laki. Profesi guru juga tidak proporsional. Pendidikan dasar didominasi oleh guru perempuan, sedangkan pendidikan menengah dan atas didominasi guru laki-laki. Atas dasar realitas ini maka masalah pengarusutamaan *gender* (PUG) bidang pendidikan mendapat perhatian pemerintah, khususnya Kemdiknas. Kemdiknas meresponnya

dengan membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Bidang Pendidikan, yang kegiatannya difasilitasi melalui program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dengan anak unit teknis dan satuan kerja. Pelaksana PUG Bidang Pendidikan adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda (PLSP). PUG Bidang Pendidikan dilaksanakan dalam tiga tahap sebagai berikut.

1. Tahap sosialisasi dan pengembangan program (2000-2004).
2. Tahap perluasan dan pemeliharaan komitmen (2005-2008).
3. Tahap penguatan dan implementasi (2009-2010).

Yahya Muhaimin mengundang para pembantu, staf ahli, serta kolega-koleganya untuk mengkaji dengan intensif permasalahan di dunia pendidikan tersebut. Ia datang ke daerah-daerah untuk melihat secara langsung dan memberi masukan-masukan agar pemasalahan di dunia pendidikan dapat terselesaikan. Ia pun melakukan berbagai program, di antaranya sebagai berikut:

1. Penertiban gelar kesarjanaan dan menertibkan manajemen pengelolaan pendidikan. Pemberian gelar kesarjanaan, seperti Doktor (S3) serta Magister Manajemen (MM) dan Magister of Business of Arts (MBA) untuk S2 oleh perguruan tinggi swasta di Indonesia merupakan program yang illegal dan menghasilkan lulusan bergelar tetapi tidak memiliki kemampuan. Yahya mengatakan, "Di masa krisis seperti sekarang ini, jangan sembarangan mendirikan perguruan tinggi. Karena bila tidak dikelola secara serius, akan merugikan rakyat, yang tadinya ingin menikmati pendidikan di daerahnya sendiri."
2. Beasiswa dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Akibat krisis ekonomi, tercatat 37 juta dari 205 juta penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Untuk itu pemerintah membuat Jejaring Pengaman Sosial (JPS) untuk membantu masyarakat miskin dengan memberikan beasiswa dan Dana Bantuan Operasional (DBO) per enam bulan untuk SD/MI/SDLB, SLTP/MTs/SLTPLB, SMU/MA/SMK/SMLB. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997/1998 berdampak besar terhadap kehidupan ekonomi rakyat Indonesia. Biaya hidup menjadi tinggi. Salah satu biaya hidup yang menjadi beban masyarakat adalah biaya untuk menyekolahkan anak. Pada saat itu sekolah memungut biaya kepada orang tua, baik biaya rutin seperti SPP maupun biaya yang bersifat insidental seperti pembelian buku. Biaya yang dituntut dari sekolah kepada orang tua menjadi beban bagi masyarakat yang tidak mampu.
3. Anggaran pendidikan 20% dari total APBN sudah ditetapkan dalam undang-undang, namun pada kenyataannya belum terwujud. Untuk itu Yahya berusaha mewujudkan anggaran pendidikan tersebut, walaupun dalam tataran pelaksanaannya berada di tangan presiden.
4. Menyusun RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Yahya menyebut lima alasan mengapa perlu dibuat Undang-Undang Sistem Pendidikan yang baru, yaitu (1) undang-undang (UU) pendidikan yang sudah ada masih bersifat sentralis, padahal kecenderungan yang sedang terjadi adalah desentralisasi; (2) UU tersebut tidak merefleksikan pengelolaan pendidikan yang transparan; (3) pengaruh arus gobalisasi semakin luas dan kuat; (4) potensi masyarakat harus diberdayakan, baik bagi pengelolaan manajerial maupun dalam pembiayaan pendidikan yang semakin besar dan kompetitif; serta (5) penertiban gelar-gelar kesarjanaan semakin mendesak untuk dilakukan.[18] UU Sisdiknas yang disahkan pada Juni 2003 pada masa Mendikbud Yahya A. Muhaimin menghadapi penolakan dari kalangan nasionalis sekuler dan kaum Kristen, tetapi banyak memperoleh dukungan dari kalangan Muslim. Menurut Busyairi[19] Yahya sejak awal tidak menjadikan agama sebagai isu sentral dalam penyusunan UU tersebut, tetapi pada perkembangan berikutnya mengalami perubahan karena pemerintahan berganti. Penolakan dari kelompok Kristen dan Katholik didasarkan pada anggapan bahwa UU tersebut terlalu mencampuradukkan urusan pribadi dengan urusan publik. Dasar penolakannya adalah Pasal 13 ayat 1 yang menghendaki setiap siswa diajarkan agama menurut agamanya. Hal itu dinilai berdampak bahwa sekolah-sekolah Kristen dan Katolik harus menyediakan guru agama Islam

Menteri Pendidikan Nasional Yahya A. Muhaimin mendampingi Presiden Abdurrahman Wahid berfoto dengan para Menteri Pendidikan peserta Konferensi "South East Asia Ministers of Education (SEAMEO)" di Bali tahun 2000

(Sumber: Buku *Tiga Kota Satu Pengabdian Jejak Perjalanan Yahya A. Muhaimin*)

jika di sekolah bersangkutan ada siswa beragama Islam. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga mempermasalahkan kata-kata taqwa, iman, dan akhlaq mulia dalam UU Sisdiknas tersebut.

5. Menyelenggarakan pendidikan khusus siswa berbakat. Program ini merupakan upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui program percepatan belajar siswa atau program akselerasi. Siswa-siswa yang memiliki bakat bagus dimasukkan ke dalam kelas khusus dengan jumlah siswa dalam satu kelas hanya sekitar 20 orang, terdiri atas siswa-siswa yang memiliki kemampuan akademik yang baik. Jam pelajaran ditambah sehingga siswa mampu menyelesaikan sekolahnya dalam dua tahun dari yang semula tiga tahun. Program akselerasi diperuntukkan bagi siswa SMP dan SMA. Mereka diberikan mata pelajaran secara intensif: materi yang lazimnya diberikan dalam enam semester diselasaikan dalam waktu empat semester. Untuk mengikuti program ini siswa harus mengikuti seleksi ketat. Hanya siswa yang memiliki kecerdasan tinggi dan berbakat yang dapat lulus dan masuk pada kelas akselerasi.
6. Menghapus biaya Evaluasi Belajar Tahap Akhir/ Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional (EBTA/EBTANAS). Biaya EBTA/EBTANAS yang menjadi beban orang tua siswa terkadang memberatkan siswa yang mampu. Untuk menangani permasalahan beban orang tua tersebut Kementerian Pendidikan Nasional membebaskan biaya EBTA/EBTANAS bagi orang tua. Biaya tersebut dibebankan kepada pemerintah daerah.
7. Membuat proyek Jejaring Pengaman Sosial (JPS). Kementerian Pendidikan Nasional memperoleh sebagian dana yang bersumber dari JPS dalam bentuk pemberian beasiswa kepada siswa mulai dari SD, SMP, hingga SMA, serta pemberian DBO atau disebut juga dengan dana (BOS). Pada tahun 1999/2000 Kementerian Pendidikan Nasional mendapat dana yang bersumber dari JPS sebesar Rp 775 milyar untuk beasiswa dan Rp 376 milyar untuk DBO.[20]
8. Program Pembinaan Karakter. Pendidikan bukan hanya sekedar transfer pengetahuan dari guru kepada siswa dan siswa bukan hanya sekedar menghafalkan ilmu pengetahuan yang diterima dari gurunya. Hal yang lebih penting dalam proses pendidikan adalah pembentukan kepribadian siswa atau pembentukan karakter. Kenakalan yang terjadi pada siswa seperti tawuran menunjukkan bahwa siswa memiliki karakter yang kurang baik atau sangat buruk. Karakter yang seperti itu sudah barang tentu tidak mencerminkan makna pendidikan. Untuk menanggulangi hal tersebut Yahya mengeluarkan program "Pembinaan Karakter". Keinginan tersebut didasarkan atas pengalamannya ketika menjadi dosen Fisipol UGM. Ketika menjadi Dekan Fisipol UGM ia merasa ada yang kurang baik pada perilaku mahasiswa. Sebagai contoh, ketika melakukan demonstrasi terkadang mahasiswa menunjukkan perilaku yang

Menteri Pendidikan Nasional Yahya A. Muhaimin berbincang dengan Presiden Abdurrahman Wahid di Bumiayu

(Sumber: Buku *Tiga Kota Satu Pengabdian Jejak Perjalanan Yahya A. Muhaimin*)

> bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi, padahal demonstrasi merupakan suatu perilaku untuk mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi. Perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi tersebut seperti main hakim sendiri yang dapat menjurus pada perilaku anarkis; bahkan dapat mengesampingkan nilai-nilai ketimuran, kepatutan, dan kemanusiaan.

Pelaksanaan program "Pembinaan Karakter" diawali dengan kebijakan menata struktur kelembagaan birokrasi yang ada di Kementerian Pendidikan Nasional. Yahya mulai melakukan perubahan dengan menempatkan Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah di bawah koordinasi langsung Sekretariat Jenderal, baru kemudian menata struktur organisasi dalam rangka pelaksanaan "Pembinaan Karakter". Dalam Sarasehan Nasional Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa Yahya mengatakan, "Indonesia dikenal memiliki karakter kuat sebelum zaman kemerdekaan, tatkala mencapai kemerdekaan, dan mempertahankan kemerdekaan. Sekarang, karakter masyarakat Indonesia tidak sekuat pada masa lalu, sangat rapuh. Pemimpin saat ini juga tidak menjaga pembangunan karakter dan budaya bangsa."[21]

Program "Pembinaan Karakter" baru bisa dilaksanakan pada saat Menteri Pendidikan Nasional dijabat Muhammad Nuh. Setelah tiga hari Nuh dilantik sebagai Menteri Pendidikan Nasional, Yahya bertemu dengan Nuh dan menyampaikan program "Pembinaaan Karakter" yang pernah dirintisnya. Nuh menanggapi dengan baik masukan Yahya dan mengeluarkan kebijakan "Pembinaan Karakter" secara massal dan harus dilakukan oleh semua sekolah mulai dari SD, SMP, hingga SMA, bahkan perguruan tinggi. Pada masa Nuh kebijakan ini dikenal dengan nama "Pendidikan Karakter" dan menjadi salah satu dasar penyelenggaraan Kurikulum 2013.

Pentingnya peran IPTEK dalam pembangunan juga tercermin dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas, tahun 2000-2004) melalui empat program nasional, yang meliputi (1) IPTEK dalam dunia usaha, (2) diseminasi informasi IPTEK, (3) peningkatan sumber daya IPTEK, dan (4) kemandirian dan keunggulan IPTEK (Zuhal, 2008: 16). Pengembangan, penguasaan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi hanya dapat terjadi dalam suatu kebudayaan yang tinggi. Kebudayaan, termasuk sistem kemasyarakatan, bahasa, kesenian, sistem pengetahuan, religi, serta peralatan dan perlengkapan hidup suatu bangsa merupakan faktor yang amat menentukan apakah ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dikembangkan dan dimanfaatkan secara efisien dan produktif oleh masyarakatnya.[22]

ENDNOTES

1 Busyairi, B. 2012, *Tiga Kota Satu Pengabdian Jejak Perjalanan Yahya A. Muhaimin*, Yogyakarta : Tiara Wacana: hal 7-9.

2 *Ibid*., hlm. 13.

3 *Ibid*., hlm. 24.

4 *Ibid*., hlm. 105.

5 *Ibid*., hlm. 159-160.

6 Ibid., hlm. 31.

7 Gaffar, A. 1991. "Hubungan Patron Client dan Kosekuensinya Terhadap Lahimya Pengusaha Indonesia: Review Buku Dr. Yahya Muhaimin". *UNISIA* 10.X1.IV.1991. hlm. 83.

8 *Ibid*., hlm. 84.

9 *Ibid*.

10 Muhaimin, Y. 1991. *Bisnis dan Politik.*Jakarta: LP3S. hlm. 152.

11 Gaffar. *Op.Cit*., hlm. 86.

12 Muhaimin, Y. 1980. "Beberapa Segi Birokrasi di Indonesia". *Jurnal Prisma* No.10 Tahun IX Oktober 1980. hlm. 21.

13 Heryanto, A. 1991. "Giliran Yahya Muhaimin". *Koran Bernas* Senin, 6 Meil 1991.

14 Andriono, dkk. 2011. *Jejak langkah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (1945-011).* Jakarta: Kemendikbud. hlm. 191.

15 Busyairi. *Op.Cit*. hlm. 166.

16 Busyairi, 2011, hlm. 176-183.

17 Suhardan, D. 2007. "Efektivitas Pengawasan Profesional dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran pada Era Otonomi Daerah". *EDUCATIONIST* No.I Vol. I Januari 2007. hlm. 57.

18 Busyairi. *Op.Cit*., hlm. 184-194.

19 *Ibid*., hlm. 196.

20 *Ibid*., hlm. 186-187.

21 *Kompas.com*, 15/01/2010.

22 2008. "Meretas Jalan Panjang Keunggulan Daya Saing Indonesia di Milenium Ketiga: Refleksi 10 Tahun Reformasi Bidang Iptek". *Jurnal Demokrasi & HAM* Vol. 8, No. 1, 2008. Hlm. 16.

Abdul Malik Fadjar

Masa Jabatan
10 Agustus 2001 - 20 Oktober 2004

Abdul Malik Fadjar

Kabinet Persatuan Nasional hanya bertahan sampai tahun 2001. Pada tanggal 23 Juli 2001 Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggelar sidang istimewa (SI). Hasil sidang tersebut melengserkan K.H. Abdurrahman Wahid sebagai presiden dan mengangkat Megawati Soekarno Putri menjadi presiden dengan Wakil Presiden Hamzah Haz. Megawati membentuk kabinet baru, Kabinet Gotong Royong. Dalam kabinet ini Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) dijabat oleh Prof. Drs. A. Malik Fadjar, Msc.[1]

A. Malik Fadjar tumbuh dan berkembang di tengah keluarga pendidik. Ia lahir pada tanggal 22 Februari 1939 di Yogyakarta, putra keempat dari tujuh bersaudara. Ayahnya, Fadjar Martodihardjo, seorang guru agama, dan ibunya bernama Hj. Salamah Fadjar.[2] Malik Fadjar tekun mempelajari ilmu agama dan keagamaan. Salah satu ajaran penting yang diwariskan kepada anak-anaknya adalah percaya diri dan keberanian diri sebagaimana ditunjukkan ayah Malik Fadjar yang dikenal sebagai pribadi pemberani, dalam arti lebih banyak menampilkan "tut wuri" yang mendorong lahirnya sikap percaya diri dan keberanian diri yang berpangkal pada iman.[3] Ayahnya, menurut Malik Fadjar, memang berpengaruh dalam membentuk kerpibadiannya melalui tiga hal, yaitu (1) komitmen pada dunia pendidikan, (2) kesederhanaan, dan (3) kepedulian kepada sanak saudara. Sementara itu Fadjar Martodirejo, ayahnya, memberi kebebasan anaknya berkembang serta memilih jenis pendidikan formal dan profesi.

Pendidikan Malik Fadjar dilalui dari bangku Sekolah Rakyat (SR) 6 tahun di Magelang (1952/1953), lalu Pendidikan Guru Agama Pertama (PGAP) 4 tahun di Magelang (1956/1957), dan Pendidikan Guru Agama Atas (PGAA) 2 tahun di Yogyakarta (1958/1959). Setelah menyelesaikan pendidikan di PGAA ia melanjutkan pendidikan di Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Malang dan berhasil meraih gelar sarjana pada tahun 1972, walaupun semula hanya menempuh pendidikan sarjana muda pada tahun 1963. Pada tahun 1981 ia meraih gelar Master of Science di Department of Educational Research, Florida State University, Amerika Serikat.

Sebelum pindah ke Malang, Malik Fadjar pernah tinggal di Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai guru agama di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Taliwang (1956-1960), guru Sekolah Madrasah Iftidaiyah (SMI), guru agama pada SGBN Sumbawa Besar (1960-1961), dan Kepala Agama pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Sumbawa Besar (1961-1963), dan Kepala Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP). Selain mengajar Malik Fadjar aktif menggerakkan kehidupan beragama (Islam) di masayarakat sekitar sehingga nama A. Malik Fadjar akrab di masyarakat Sumbawa (NTB). Di samping itu ia menampilkan diri sebagai manusia pelayan dan pengabdi kepada masyarakatnya.[4]

Setelah meraih gelar Master of Science selama kurang lebih tujuh tahun kemudian, Malik Fadjar pun berhasil menjadi guru besar di IAIN Sunan Ampel. Ia pernah menjabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) selama satu tahun (1983-1984), kemudian menjadi rektor di Universitas Muhammadiyah Surakarta dan UMM. Selama menjabat sebagai rektor ia berkesempatan menjadi Menteri Agama Indonesia menggantikan Quraisy Shihab. Jabatan itu hanya diemban selama satu tahun (1998-1999) dan digantikan oleh Mohammad Tolchah Hasan.

Pada tahun 2001 ia dipercaya kembali menjadi Mendiknas menggantikan Yahya Muhaimin hingga tahun 2004 dan kemudian digantikan oleh Bambang Sudibyo. Pada bagian akhir kedudukannya sebagai Mendiknas ia menjabat sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) ad-Interim menggantikan Jusuf Kalla sejak tanggal 22 April 2004 karena Jusuf Kalla mencalonkan diri sebagai wakil presiden dalam pemilu 2004. Pengangkatannya sebagai Menko Kesra ad-Interim tertuang dalam Surat Keputusan Presiden RI Nomor B-137 tanggal 22 April 2004. Ia dilantik pada hari Jum'at 23 April 2004. Rangkap jabatan itu hanya berlangsung lebih kurang selama enam bulan dan berakhir tanggal 21 Oktober 2004.

Malik Fadjar bersama rektor-rektor IAIN se-Indonesia. Ketika menjabat Menteri Agama, Malik Fadjar mengeluarkan kebijakan tentang pengalihan IAIN menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) dan Fakultas Cabang menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) berdasar Keputusan Presiden No. 11 Tahun 1997

(Sumber: Buku *Darah Guru Darah Muhammadiyah*)

Sebagai seorang yang berlatar belakang guru, pemikiran A. Malik Fadjar dalam pendidikan menarik untuk dikaji. Ia pernah mengurus masalah pendidikan pada dua lembaga berbeda, yaitu sebagai Menteri Agama pada tahun 1998-1999 pada masa Presiden B. J. Habibie dan Mendiknas pada tahun 2001-2004 pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid.[5]

Ketika menjabat Menteri Agama, Malik Fadjar mengeluarkan kebijakan tentang pengalihan IAIN menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) dan Fakultas Cabang menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) berdasar Keputusan Presiden No. 11 Tahun 1997. Selain itu Malik Fadjar berusaha membenahi manajemen haji, di antaranya dalam hal kurang transparansinya dana haji, kuota haji, kelompok terbang (kloter), visa, jama'ah paspor hijau, kursi (*seat*) kosong, dan komersialisasi jamaa'ah Ongkos Naik Haji (ONH) plus. Ia memulai upaya itu dengan penyusunan Rancangan Undang-undang (RUU) Haji. Malik Fadjar menanggapi positif RUU Haji yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPR tanggal 18 Februari 1999. Akhirnya Undang-undang (UU) No. 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah ditandatangani/disahkan oleh Presiden B.J. Habibie pada tanggal 3 Mei 1999.

KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Malik Fadjar dipercaya menjadi Mendiknas dalam Kabinet Gotong Royong pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri tahun 2001-2004. Ia berpendapat bahwa pendidikan nasional harus mempunyai visi dan misi. Visi dan misi itu bertumpu pada kenyataan kehidupan berbangsa di Indonesia, artinya semua aspek harus menjadi pertimbangan dalam merancang visi pendidikan nasional. Visi pendidikan hanya akan mampu menjawab tantangan apabila mempertimbangkan segala hal yang berkaitan dengan khazanah dan warisan budaya bangsa.[6] Malik Fadjar melakukan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan mutu, tata kelola, dan akses pendidikan bagi masyarakat. Kebijakan-kebijakan tersebut meliputi tingkat pendidikan usia dini (PAUD), pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan perguruan tinggi.

Dalam hal tata kelola sekolah untuk meningkatkan mutu, Malik Fadjar mengeluarkan kebijakan tentang Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Pengelolaan pendidikan berbasis sekolah dan masyarakat terutama pada jenjang pendidikan dasar dan berkelanjutan. Manajemen berbasis sekolah menekankan arah terciptanya kondisi yang desentralis baik pada tatanan birokrasi maupun pengelolaan sekolah. Melalui manajemen ini masyarakat sekolah memiliki kemandirian dalam merencanakan, mengelola, dan mengatur rumah tangga sekolah masing-masing, termasuk bagaimana dan kepada siapa peserta didiknya "dijual". Otonomi sekolah menyarankan adanya kemandirian yang unggul dibanding dengan

Peluncuran Program Pengembangan Sekolah dalam Rangka Penuntasan Wajib belajar 9 Tahun di Bali dan NTB 28 Juli 2003

(Sumber: Buku *Darah Guru Darah Muhammadiyah*)

sekolah-sekolah lain sehingga diharapkan memiliki "daya jual" tersendiri di tengah persaingan pendidikan yang mengglobal.[7]

MBS merupakan realisasi desentralisasi pendidikan. Sedikitnya ada empat bentuk yang perlu diidentifikasi, meliputi (1) dekonsentrasi, yaitu pelimpahan sebagian kewenangan atau tanggung jawab administratif ke tingkat yang lebih rendah; (2) delegasi, yaitu pelimpahan atau pemindahan tanggung jawab manajerial dan fungsional ke organisasi di luar struktur birokrasi; (3) devolusi, yaitu penguatan dan penciptaan unit pemerintah di daerah; dan (4) privatisasi atau swastanisasi, yaitu pemberian wewenang secara penuh kepada swasta untuk merencanakan, menjalankan, dan mengevaluasi seluruh sistem yang dikontruksi. MBS ditawarkan sebagai salah satu alternatif jawaban pemberian otonomi daerah di bidang pendidikan mengingat prinsip dan kecenderungan yang masih mengembalikan pengelolaan manajemen sekolah kepada pihak-pihak yang dianggap paling mengetahui kebutuhan sekolah.[8]

Sebagai orang yang pernah terlibat di Departemen Agama dan memahami tentang lembaga pendidikan agama, Malik Fadjar memahami betul bagaimana mutu madrasah-madrasah yang dikelola Departemen Agama dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang berada di Departemen Pendidikan Nasional. Kesenjangan antara madrasah swasta dan madrasah negeri pun tampaknya juga menjadi masalah yang belum tuntas diselesaikan. Kesenjangan tersebut meliputi beberapa hal, seperti pandangan guru, sarana dan prasarana, dan kualitas *input* siswa yang kesemuanya berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung pada mutu pendidikan. Oleh sebab itu dikeluarkanlah Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama yang berkaitan dengan penyediaan guru, buku-buku, dan peralatan lain dari departemen terkait.[9]

Pada saat Malik Fadjar menjabat Mendiknas isu reformasi masih begitu kuat. Reformasi pun dilakukan dalam bidang pendidikan. Salah satu hasil reformasi pendidikan adalah lahirnya UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). UU tersebut dinilai sangat reformatif karena memuat berbagai aturan sebagai tanggapan atas tuntutan keterbukaan. Gerakan reformasi mengubah banyak tatanan. Dalam kurun 1999-2002, Undang-undang Dasar (UUD) 1945 empat kali diamandemen. Konsekuensi dari amandemen itu adalah banyaknya perubahan dalam berbagai tatanan kenegaraan dan pemerintahan, termasuk bidang pendidikan. Ada dua amandemen terkait bidang pendidikan. Pertama, pada amandemen kedua (2000) dimasukkan Bab X A tentang Hak Asasi Manusia, khususnya pasal 28 C ayat 1, yang isinya antara lain tentang pendidikan sebagai hak asasi manusia. Kedua, pada amandemen keempat (2002), dimasukkan Bab XIII tentang Kebudayaan

Rapat konsultasi membahas Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) antara pimpinan DPR, pimpinan komisi dan fraksi, serta Menteri Pendidikan Nasional Abdul Malik Fadjar berlangsung di Ruang Nusantara II Lantai 3 Gedung MPR/DPR, Senin 9 Juni 2003

(Sumber: *Kompas*/ Alif Ichwan)

dan Pendidikan yang memuat pasal 31 yang khusus mengatur pendidikan secara mendasar. Untuk mewujudkan hal tersebut, Bab XIII ayat 4 mengamanatkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemberian prioritas ini merupakan suatu terobosan, sebab konsekuensinya adalah pendanaan yang tinggi, sehingga membutuhkan kesadaran kolektif tentang betapa penting pendidikan bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa yang akan datang.[10]

Pada bagian lain, UU Sisdiknas 2003 melahirkan kebijakan seperti standar nasional pendidikan. Pembentukan Badan Standar Pendidikan Nasional (BSNP) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 19 Tahun 2005 dimaksudkan untuk mewujudkan standar nasional tersebut. Implikasi kehadiran BSNP ialah terdapat pergeseran pembuatan keputusan dalam kebijakan pendidikan, terutama terkait dengan kurikulum pendidikan nasional.[11]

Otonomi pendidikan berarti pengalihan pengelolaan pendidikan dasar dan menengah dari pusat ke pemerintah daerah (Pemda), yang memandang hubungan pusat dan daerah tidak lagi dalam kerangka hierarkis, tetapi konsultatif. Pemerintah pusat hanya memantau pemberdayaan dengan menyalurkan bantuan dalam model *block grant*, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK).

Lahirnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah berdampak pula terhadap kurikulum secara nasional. Pada masa Malik Fadjar menjabat sebagai Mendiknas lahir Kurikulum 2004—atau yang dikenal dengan nama Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)—sebagai penyempurnaan kurikulum sebelumnya, yaitu Kurikulum 1994. Kurikulum 2004 menekankan pengembangan kemampuan untuk melakukan (kompetensi) tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar yang ditetapkan.[12] Empat landasan empirik yang menjadi pertimbangan lahirnya KBK sebagai berikut:

1. Adanya berbagai ketimpangan dalam kehidupan mulai dari aspek moral, akhlak, dan jati diri hingga sosial, ekonomi, dan politik.
2. Semakin terbatasnya sumber daya dan kesempatan untuk memperoleh lapangan kerja.
3. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dampaknya terhadap pendidikan.
4. Hasil pendidikan secara umum belum memuaskan.

KBK lahir sebagai tanggapan atas perkembangan teori belajar yang baru, yaitu teori konstruktivisme. Teori ini menolak pemahaman aliran behaviorisme yang berkembang sebelumnya. Para behavioris meyakini bahwa pembelajaran merupakan sebuah pembiasaan yang dilakukan secara berulang dan konsisten, sedangkan teori konstruktif beranggapan bahwa siswa beajar melalui proses menemukan

sendiri ilmu pengetahuan dan mengkonstruksi sendiri ilmu pengetahuannya berdasar pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh sebelumnya dan selama belajar.[13]

Otonomi pendidikan tidak hanya diterapkan pada jenjang sekolah, tetapi juga pada jenjang pendidikan tinggi. Malik Fadjar sebagai Mendiknas mengeluarkan kebijakan berkenaan dengan otonomi perguruan tinggi. Otonomi pendidikan tinggi dalam arti luas bukan saja masalah pengelolaan secara manajerial, tetapi juga termasuk pengembangan akademik secara terpadu (transdisiplin ilmu), pertanggungjawaban (akuntabilitas), dan jaminan mutu (*quality assurance*). Malik Fadjar mengeluarkan kebijakan yang mengubah beberapa status perguruan tinggi negeri (PTN) menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Penyelenggara perguruan tinggi yang berstatus sebagai PT BHMN memiliki otonomi akademik dan keuangan.

Di samping itu Malik Fadjar meluncurkan Televisi Edukasi (*TV-E*) untuk penyebaran informasi tentang pendidikan bagi masyarakat yang lebih luas.[14] *TV-E* dirancang untuk mendidik dan mencerdaskan masyarakat dengan rancangan yang arif dan etika tinggi, sehingga diharapkan menjadi media pembelajaran masyarakat melalui teknologi.

PEMIKIRAN PENDIDIKAN

Di samping sebagai pejabat, Malik Fadjar juga pemerhati, pemikir, dan sekaligus pelaku yang senantiasa memperhatikan pendidikan anak bangsa, sehingga tidak salah bila ia disebut sebagai "penggerak reformasi", khususnya dalam bidang pengembangan pendidikan di Indonesia. Malik Fadjar merupakan pribadi pejuang dan pengabdi yang penuh percaya diri dan keberanian dalam mengkonstruksi cita-cita dan mimpi-mimpinya.[15] Ia mengatakan bahwa pendidikan harus bisa memberi solusi nyata terhadap persoalan globalisasi yang mendera bangsa Indonesia, antara lain (1) stigma keterpurukan bangsa, (2) eskalasi politik yang masih tidak stabil, (3) krisis moral dan etika, dan (4) pudarnya identitas bangsa.[16] Banyak *berkah* yang dapat ditimba dari globalisasi, di samping sekaligus memunculkan keprihatinan dan gugatan atas berbagai negatif yang ditimbulkan, terutama berkenaan dengan pengaruh budaya luar yang berpotensi menyisihkan, bahkan mematikan budaya lokal yang dipercaya mengandung kearifan tradisional (*traditional wisdom*).[17]

Malik Fadjar berpendapat bahwa pendidikan merupakan wahana ampuh untuk membawa bangsa dan negara menjadi maju dan terpandang dalam pergaulan bangsa-bangsa dan dunia internasional.[18] Hal ini memberikan pemahaman yang sangat luas mengenai pentingnya pendidikan.[19] Dalam menghadapi era globalisasi, menurut Malik Fadjar, terdapat tiga tantangan besar yang dihadapi dunia pendidikan Indonesia, yakni (1) mempertahankan hasil-hasil yang telah dicapai, (2) mengantisipasi era global, serta (3) melakukan perubahan dan penyesuaian sistem pendidikan nasional yang mendukung proses pendidikan lebih demoraktis dan memperhatikan keragaman.[20]

Salah satu karakteristik yang membedakan antara perubahan pada masa lalu dan masa sekarang/mendatang adalah wilayah dan warna tantangan yang bersifat global, tidak mengenal batas-batas geografis negara, bangsa, suku, etnis, dan bahkan agama. Dinamika perubahan berjalan relatif lebih cepat dan kompleks karena saling berkait antara faktor dan komponen yang menjadi sebab dan akibat suatu perubahan. Hal ini tentu saja memerlukan adaptasi yang kritis dan cepat, yang kadang-kadang tidak begitu mudah dilakukan oleh lembaga sosial seperti sekolah dan perguruan tinggi. Selain itu adanya transisi yang ditandai masih belum satunya visi dan penafsiran terhadap kebijakan otonomi daerah menyebabkan dalam beberapa persolalan tertentu terasa sulit "menyatubahasakan" hak dan kewenangan daerah dengan kepentingan nasional.[21]

Pendidikan harus mengganti paradigma lama dengan paradigma baru, berorientasi pada masa depan, merintis kemajuan, berjiwa demokratis, bersifat desentralistik, berorientasi pada peserta didik,

Presiden Megawati Soekarnoputri didampingi Mendiknas Malik Fadjar dan Kepala Perpustakaan Nasional dalam rangka Hari Aksara Internasional ke-38 tahun 2003 mencanangkan Gerakan Membaca Nasional, Rabu (12 Nopember 2003) di Istana Negara Jakarta

(Sumber: http://kepustakaan-presiden.pnri.go.id)

bersifat multikultural, dan berorientasi pada perspektif global sehingga terbentuk pendidikan yang berkualitas dalam menghadapi tantangan perubahan global menuju terbentuknya masyarakat madani Indonesia. Hal tersebut disebabkan pendidikan baik formal maupun nonformal dalam tatanan konsep pada dasarnya memiliki peran penting melegitimasi—bahkan melanggengkan—sistem dan struktur sosial yang ada dan sebaliknya pendidikan merupakan proses perubahan sosial. Meskipun demikian peran pendidikan terhadap sistem dan struktur sosial sangat bergantung pada paradigma pendidikan yang mendasarinya.[22]

Tanpa mengecilkan arti perkembangan dan hasil capaian selama 10 tahun pelaksanaan reformasi pendidikan, secara jujur harus diakui bahwa masa depan dunia pendidikan di Indonesia semakin berat, lebih-lebih pada milenium ketiga sebagai tonggak psikologis di dalam kehidupan umat manusia yang ditandai dengan perubahan yang serba cepat dan dahsyat dalam berbagai aspek kehidupan. Saat ini kita berada di dalam tatanan kehidupan masyarakat mega-kompetisi abad ke-21. Tidak ada lagi ruang dan waktu dalam masyarakat tanpa kompetisi. Kompetisi telah dan akan merupakan prinsip hidup yang baru. Dunia semakin terbuka dan bersaing untuk memposisikan diri agar berada di urutan terdepan dalam menghasilkan karya-karya unggulan dan merebut setiap kesempatan serta peluang yang terbuka dalam pasar kerja, pasar untuk berbagai jenis produk jasa dan teknologi.[23]

Untuk tetap eksis dan *survive* di arena kehidupan global yang serba kompetitif, menurut Malik Fadjar, diperlukan sumber daya manusia (SDM) dalam jumlah besar yang memiliki keunggulan kompetitif. Dalam hal ini pendidikan dituntut kemampuan dan perannya untuk menumbuhkembangkan "potensi intelektual dan afeksi". Hal ini berarti (1) melalui pendidikan peserta didik harus disiapkan supaya dapat mengantisipasi perkembangan berdasarkan pengetahuan; (2) melalui pendidikan dikembangkan kemampuan dan sikap peserta didik untuk dapat memahami berbagai situasi serta berhadapan dengan situasi dan kondisi terbaru; (3) melalui pendidikan dikembangkan kemampuan peserta didik untuk mengakomodasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang pesat dan perubahan dahsyat yang ditimbulkannya, serta tetap bisa menguasai perubahan dan tidak turut tenggelam dalam perubahan itu; dan (4) melalui pendidikan persepsi peserta didik tentang dunia perlu diorientasikan kembali akibat perkembangan IPTEK dan perubahan sosial yang cepat. Tantangan zaman dulu lain dengan tantangan zaman sekarang dan tantangan yang akan datang. Dunia sekarang "semakin kecil" sehingga reformasi pendidikan dan pengembangan kualitas SDM harus berkelanjutan agar tidak ketinggalan. Inilah tantangan masa depan dunia pendidikan di Indonesia.[24]

Malik Fadjar mengatakan bahwa sebenarnya esensi pendidikan adalah pewarisan kebudayaan (ilmu pengetahuan, teknologi, ide-ide, etika dan nilai-nilai spiritual, serta estetika) dari generasi yang lebih tua kepada generasi yang lebih muda dalam setiap masyarakat atau bangsa.[25] Di samping itu pendidikan merupakan suatu kebutuhan hidup (*necessity of life*), sebagai bimbingan (*direction*), dan sebagai sarana pertumbuhan (*growth*) yang mempersiapkan dan membukakan serta membentuk disiplin hidup. Pendidikan mengandung misi keseluruhan aspek kebutuhan hidup serta perubahan-perubahan terjadi.[26] Oleh karena itu Malik Fadjar menginginkan pendidikan yang dari satu sisi harus esensialis dan di sisi lain harus progresifis. Artinya, pendidikan harus futuralistik (memandang jauh ke depan), akan tetapi tidak boleh mengabaikan nilai-nilai esensi budaya sebagai warisan dari generasi ke generasi berikutnya. Malik Fadjar menyebutnya sebagai pendidikan yang berakar kuat pada nilai sejarah masa lalu.[27]

Adapun peran lembaga pendidikan yang berkarakter, menurut Malik Fadjar,[28] meliputi (1) menerjemahkan nilai-nilai, norma-norma, dan muatan pendidikan yang dituntut oleh masyarakat, bangsa, dan negara yang terus bergerak secara dinamis; (2) mengkolaborasikan makna dan isi pendidikan sebagai praksis pembangunan bangsa sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun perkembangan dan perubahan yang tengah berlangsung; serta (3) menggali dan mencari alternatif-alternatif model dan jenis pendidikan yang berwawasan lingkungan, ekonomi, sosial, dan budaya. Peran lembaga pendidikan merupakan sebuah peran inti yang diemban demi terlaksananya pendidikan berkarakter. Implementasi yang dilakukan oleh lembaga pendidikan hendaknya bukan merupakan sebuah tindakan yang kaku dan statis demi memenuhi tuntutan di sekitarnya. Hal tersebut juga berkaitan dengan perkembangan yang terjadi di sekitar lembaga itu sendiri. Tentu saja pendidikan tidak hanya menjadi suatu lembaga yang aktif untuk melakukan pembaharuan dalam menemukan pilihan-pilihan lain yang berpengaruh terhadap lingkungan sekitarnya.

Sistem Pendidikan dan Pengembangan SDM harus mengedepankan aspek-aspek penting. Filosofi dan kebijakan pendidikan nasional yang menunjukkan bahwa reformasi filosofi dan nilai-nilai dasar pendidikan sangat diperlukan sebagai dasar pengembangan pendidikan nasional yang secara konseptual dapat diterima oleh logika, secara kultural sesuai dengan budaya bangsa, dan secara politis dapat diterima oleh masyarakat luas.

Pendidikan berbasis masyarakat, menurut Malik Fadjar, bertujuan (1) membantu pemerintah dalam memobilisasi sumber daya baik setempat maupun dari luar serta meningkatkan peran masyarakat untuk mengambil bagian yang lebih besar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan di semua jenjang, jenis, dan jalur pendidikan; (2) menstimulasi perubahan sikap dan persepsi masyarakat terhadap rasa kepemilikan sekolah, tanggung jawab, kemitraan, toleransi, dan kesediaan menerima perbedaan sosial dan budaya; (3) mendukung inisiatif pemerintah dalam meningkatkan dukungan masyarakat terhadap sekolah, khususnya orang tua dan masyarakat melalui kebijakan desentralisasi, serta (4) mendukung peran masyarakat untuk mengembangkan inovasi kelembagaan guna melengkapi, meningkatkan, dan mengganti peran sekolah dan meningkatkan mutu dan relevansi, pembukaan kesempatan yang lebih besar, serta peningkatan efisiensi manajemen pendidikan dasar untuk wajib belajar pendidikan dasar dan menengah.

PENDIDIKAN ISLAM

Malik Fadjar merupakan lulusan perguruan tinggi agama Islam sehingga mempunyai gagasan atau pemikiran tentang pendidikan Islam. Menurut Malik Fadjar, pendidikan merupakan proses humanisasi atau pemanusiaan manusia, suatu pandangan yang mengimplikasikan proses kependidikan dengan berorientasi pada pengembangan aspek-aspek kemanusiaan manusia, baik secara fisik-biologis maupun rohaniah-psikologis.[29] Ia mengemukakan bahwa pendidikan Islam paling tidak mempunyai tiga pengertian sebagai berikut:[30]

1. Pendirian dan penyelenggaraan lembaga pendidikan Islam didorong oleh hasrat mengejewantahkan nilai-nilai Islam yang tercermin dalam nama lembaga pendidikan dan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakannya. Dalam pengertian ini Islam dilihat sebagai sumber nilai yang harus diwujudkan dalam kehidupan lembaga pendidikan bersangkutan.
2. Lembaga pendidikan Islam adalah lembaga yang memberikan perhatian dan yang menyelenggarakan kajian tentang Islam yang tercermin dalam program kajian sebagai ilmu dan diperlakukan sebagai ilmu-ilmu lain yang menjadi program kajian lembaga pendidikan Islam bersangkutan.
3. Pendidikan Islam mengandung dua pengertian di atas dalam arti lembaga tersebut memperlakukan Islam sebagai sumber nilai bagi sikap dan tingkah laku yang harus tercermin dalam penyelenggaraannya ataupun sebagai bidang kajian yang tercermin dalam program kajiannya.

Pendidikan Islam mempunyai peran strategis sebagai sarana *human resources* dan *human investment*. Hal ini berarti selain bertujuan menumbuhkembangkan kehidupan yang lebih baik, pendidikan juga ikut mewarnai dan menjadi landasan moral dan etik sebagai perekat nilai kemanusiaan dalam pemberdayaan jati diri bangsa.[31]

Faktor utama kelemahan umat Islam dalam menyelenggarakan pendidikan Islam, menurut Malik Fadjar, terletak pada dataran epistemologis, yaitu bagaimana mencairkan nilai-nilai Islam sebagai *setting social cultural* yang berkembang. Dengan kata lain umat Islam masih menghadapi keterbatasan SDM, yaitu manusia yang memiliki etos, pengetahuan, dan keterampilan memadai. Paling tidak ada dua cara untuk mewujudkan sistem nilai Islam pada bidang pendidikan sebagai sebuah sistem pendidikan yang dapat diandalkan, yakni (1) meningkatkan kualitas berpikir dengan cara meningkatkan kecerdasan dan (2) memperluas wawasan dan meningkatkan kualitas kerja melalui peningkatan etos kerja.[32]

Malik Fadjar menyimpulkan permasalahan pendidikan Islam di Indonesia, di antaranya (1) lemahnya wawasan kekinian dan masa depan sehingga kemampuan memberi respon kepada tantangan dan tuntutan sangat miskin serta (2) kebanyakan masih terbatas pada mempertahankan yang baik dari masa silam dan belum membuka diri untuk mengambil yang baru dan yang lebih baik dari masa kini,[33] sehingga dari hal tersebut menimbulkan pemikiran konservatif terhadap hal-hal yang lebih baik pada era modernisasi dan globalisasi.[34]

Reorientasi pendidikan Islam dapat dilakukan dengan beberapa langkah, yakni (1) pendidikan integralistik, yaitu model pendidikan yang berorientasi pada komponen kehidupan yang meliputi unsur ketuhanan, kemanusiaan, dan kealaman; (2) pendidikan humanistik, yaitu model pendidikan yang memandang manusia sebagai manusia sehingga akan menciptakan pribadi yang menghargai hak-hak manusia; (3) pendidikan pragmatik, yaitu model pendidikan yang memandang manusia sebagai makhluk yang selalu membutuhkan sesuatu, mempertahankan dan mengembangkan hidupnya, sadar pada kebutuhan hidupnya, dan peka terhadap masalah sosial kemanusiaan; serta (5) pendidikan yang berakar pada budaya, tidak meninggalkan akar-akar sejarah, sehingga membentuk manusia yang memiliki kepribadian, harga diri, dan percaya diri.[35]

Saat ini lembaga pendidikan Islam harus merancang model-model pendidikan alternatif sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman. Muncul pertanyaan "model-model pendidikan Islam yang bagaimana?" yang diharapkan dapat menghadapi dan menjawab tantangan perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat baik sosial maupun kultural menuju masyarakat Indonesia baru. Pendidikan Islam merupakan pendidikan yang idealistik, yakni pendidikan yang integralistik, humanistik, pragmatik, dan berakar kuat pada budaya. Pendidikan integralistik mengandung komponen-komponen kehidupan yang meliputi Tuhan, manusia, dan alam pada umumnya sebagai suatu yang integral bagi terwujudnya

kehidupan yang baik, serta pendidikan yang menganggap manusia sebagai suatu pribadi jasmani-rohani, intelektual, perasaan, dan individu-sosial.[36]

Terbinanya kepribadian Muslim, menurut Malik Fadjar, tampak pada diri K.H. Ahmad Dahlan (1868-1923) yang mencita-citakan pendidikan yang memberi kedamaian dan diselenggarakan dengan (1) baik budi dalam agama, (2) luas pandangan, dan (3) bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakat. Dengan perkataan lain bahwa perwujudan pendidikan Islam K.H. Ahmad Dahlan mengacu pada tiga matra yang saling terkait, yaitu (1) tauhid yang akan mendudukkan harkat manusia sebagai *insãn ahsani taqwim*, punya daya tahan terhadap segala ujian hidup, dan siap memihak kepada kebenaran; (2) jiwa dan pandangan hidup Islam yang akan membawa cita *rahmatan lil ãlamin;* dan (3) kemajuan yang akan menempatkan manusia hidup.[37]

Oleh karena itu proses pembentukan manusia seutuhnya (*insan kamil*) akan terwujud melalui pendidikan yang berorientasi pada pengembangan sains, teknologi, dan penanaman nilai-nilai kemanusiaan (*fitrah*) untuk membebaskan manusia dari belenggu kehidupan serta mendapatkan pemahaman hakiki tentang fenomena atau misteri di balik kehidupan nyata, guna memperoleh kebahagiaan yang abadi di sisi Allah.

Itulah pendidikan yang bermakna secara horizontal sekaligus vertikal, yang akan menghasilkan manusia berkualitas iman kepada Allah, komitmen dengan ilmu pengetahuan, serta senantiasa beramal saleh.[38] Salah satu cara mendidik dalam Islam dikenal dengan pendekatan *among.* Ada dua hal yang mendasari adanya pendekatan tersebut, yakni (1) kemerdekaan sebagai syarat untuk menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir dan batin, hingga dapat hidup merdeka serta (2) kodrat alam sebagai syarat untuk menghidupkan dan mencapai kemajuan dengan secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya.[39]

ENDNOTES

1 Andriono et.al. 2011. *Jejak langkah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (1945-2011).* Jakarta: Kemendikbud, hlm. 192.

2 Fadjar, A. M. 2005. *Holistika Pemikiran Pendidikan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 4.

3 Nurhakim. 2010. "Rekonstruksi Pemikiran A. Malik Fadjar tentang Pembaharuan Madrasah Menuju Sekolah Model". *PROGRESIVA* Vol. 4, No.1, Agustus 2010, hlm. 21.

4 *Ibid*., hlm. 22.

5 Rusniati. 2015**. "**Pendidikan Nasional dan Tantangan Globalisasi: Kajian Kritis terhadap Pemikiran A. Malik Fajar". *Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA*, Agustus 2015, VOL. 16, NO. 1, 105-128, hlm. 121.

6 *Ibid*.

7 Nurhakim. *Op.Cit*. hlm. 28.

8 Rusniati. *Op.Cit*. hlm. 123.

9 *Ibid*., hlm. 116.

10 Andriono et.al. *Op.Cit*., hlm. 217-219.

11 Samsuri. 2011. "Kebijakan Pendidikan Kewarganegaraan Era Reformasi di Indonesia". *Cakrawala Pendidikan*, Juni 2011, Th. XXX, No. 2. hlm. 273.

12 Andriono et.al. *Op.Cit*., hlm. 207.

13 *Ibid*., hlm. 208-209.

14 *Kompas*, 13 Oktober 2004.

15 Wahib, A. 2008. "Corak Pemikiran A. Malik Fadjar tentang Pengembangan Madrasah pada Era Globalisasi (Studi Pemikiran Tokoh Pendidikan)", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Tarbiyah IAIN Wali Songo Semarang, hlm. 59.

16 Natasha, H. 2012. "Revitalisasi Lembaga Pendidikan dalam Upaya Membangun Karakter Bangsa". *Jurnal Pemikiran Islam*; Vol. 37, No. 1 Januari-Juni 2012, hlm. 89.

17 Fadjar. *Op.Cit*., hlm. 102.

18 *Ibid*., hlm. 103.

19 Natasha. *Op.Cit*, hlm.90.

20 Rusniati. *Op.Cit*, hlm. 125.

21 *Ibid*., hlm. 119.

22 *Ibid*., hlm. 125.

23 Fadjar, A. M. 2008. "10 Tahun Reformasi Pendidikan". *Jurnal Demokrasi & HAM* Vol. 8, No. 1, 2008. hlm. 30.

24 *Ibid*., hlm. 31.

25 Rusniati. *Op.Cit*., hlm. 113.

26 *Ibid*.

27 *Ibid*., hlm. 114.

28 Fadjar. *Holistika Pemikiran Pendidikan. Op.Cit*., hlm.104.

29 Idris, M. 2012. "Konsep Pendidikan Humanis dalam Pengembangan Pendidikan Islam". *MIQOT* Vol. XXXVIII No. 2 Juli-Desember 2014. hlm. 423.

30 Fadjar, A.M. 2004. "Pengembangan Pendidikan Islam yang Menjanjikan Masa Depan" dalam *Jurnal Edukasi* Volume 2, Nomor 1, Januari-Maret 2004.

31 *Idris. Op.Cit*., hlm. 421.

32 Rusniati. *Op.Cit*. hlm. 119.

33 Fadjar, A.M. 1998. *Visi Pembaruan Pendidikan Islam.* Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penyusunan Naskah Indonesia, hlm. 175.

34 Nurhakim. *Op.Cit*., hlm. 24.

35 Fadjar, A.M. *1999. Platform Reformasi Pendidikan dan Pengembangan Sumber DayaManusia.* Jakarta: Dirjen Binbaga Islam, hlm. 37-39.

36 Ibid., hlm. 37.

37 Fadjar A. M. 1994. "Mencari Dasar Filosofi Pendidikan Islam; Sebuah Tinjauan TerhadapPendidikan Kemuhammadiyahan dan Al-Islam, dalam Imron Nasri dan A. Hasan Kunio, (ed.). *Di Seputar Percakapan Pendidikan Dalam Muhammadiyah.* Yogyakarta: Pustaka SM, hlm. 21-22.

38 Rusniati. *Op.Cit*. hlm. 112

39 Idris. *Op.Cit*., hlm. 426.

Bambang Soedibyo

Masa Jabatan
21 Oktober 2004 – 20 Oktober 2009

Bambang Soedibyo

Bambang Sudibyo dilahirkan di Temanggung, Jawa Tengah, tanggal 8 Oktober 1952; anak kelima dari 11 bersaudara. Orang tuanya guru agama sekaligus petani tembakau dan padi di Temanggung. Semua saudara Bambang sekolah sampai jenjang pendidikan tinggi. Oleh karena itu Bambang sangat menaruh hormat kepada orang tuanya, terutama ayahnya, karena keidealismeannyalah Bambang dan saudara-saudaranya disekolahkan sampai pendidikan tinggi meskipun ayahnya hanya guru biasa dan petani. Karier Bambang bisa dianggap meliputi politikus, ekonom, dan akademisi.

Bambang Sudibyo menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) di Temanggung dengan mengayuh sepeda setiap pagi dari desa tempat tinggalnya ke Temanggung. Pada tahun 1972 ia melanjutkan pendidikan ke Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada (FE UGM) dan berhasil memperoleh gelar Sarjana Ekonomi tahun 1977. Selama menjadi mahasiswa ia mengembangkan hobi membaca. Tema-tema bacaannya tidak hanya terbatas pada bacaan ekonomi, tetapi juga agama, filsafat, sosial, dan budaya. Sejak tahun 1978, ia mengajar di UGM meskipun cita-cita awalnya bekerja di Bank Indonesia. Pada tahun 1979—yang juga tahun pernikahannya dengan Retno Sunarminingsih, juga berasal dari keluarga guru—ia dikirim negara mengambil program MBA di Universitas North Carolina, Amerika Serikat (AS), dan pada bulan Januari 1982 ia kembali meninggalkan tanah air untuk menempuh program doktor bidang *business administration* di Universitas Kentucky yang diselesaikannya pada tahun 1985.

Bambang Soedibyo merupakan Guru Besar bidang ekonomi UGM. Ia mengajar mata kuliah Riset Akuntansi Manajemen pada Program Pascasarjana UGM 1997-1999. Pada tahun 1988 ia menjadi anggota panitia pendirian Magister Manajemen (MM) UGM dan kemudian menjadi salah satu anggota pengurus atau anggota direksi program MM UGM serta menjadi pengelola bidang program keuangan. Di samping itu pada tahun 1988 ia juga aktif di pusat studi Pusat Pengkajian Strategi dan Kebijakan (PPSK) Yogyakarta yang diketuai Amien Rais. Tahun 1989 ia diangkat menjadi wakil direktur program dan pengelola akedemik dan tahun 1993 dipromosikan menjadi Direktur Program MM UGM sampai tahun 1999.

Pada tahun 1998 Bambang menjadi komisaris Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) X ketika Tanri Abeng menjabat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebelum menjadi Menteri Pendidikan, ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan (1999-2000) pada Kabinet Persatuan Indonesia masa pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid, yang pada waktu bersamaan juga menjadi Wakil Ketua Dewan Komisaris Pertamina serta menjadi anggota Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) yang diketuai Kwik Kian Gie.

Karier politik Bambang dimulai dengan keikutsertaannya mendirikan dan menjadi anggota Majlis Amanat Rakyat (MAR) dan kemudian ikut mendirikan Partai Amanat Nasional (PAN) tahun 1998 meskipun sebelumnya menghindari politik praktis secara langsung sejak ada peraturan pemerintah tentang status Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam partai politik. Di PAN ia duduk sebagai Ketua Dewan Ekonomi (November 1998-April 1999). Sebelumnya, pada tahun 1990, ia ikut mendirikan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan menjabat Ketua Bidang Ekonomi Sumberdaya 1990-1995. Dalam organisasi Muhammadiyah pada rentang November 1998-April 1999 ia menjadi Ketua Dewan Ekonomi, tahun 2000-2005 menjadi Bendahara, dan tahun 1995-2000 menjadi anggota Dewan Pakar Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah. Pada tahun 2001-2004 ia menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Fraksi Utusan Golongan mewakili Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI).

Pengembangan kurikulum pendidikan di Indonesia pada masa Bambang Sudibyo menjadi menteri pendidikan mengikuti kebijakan yang diundangkan dalam Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005, serta Peraturan Menteri (Permen) No. 22, 23, dan 24 Tahun 2006. Kurikulum mengikuti pemerintah pusat dan pengembangannya dilakukan di setiap satuan pendidikan. Kurikulum diharapkan dapat mengakomodasi dua kepentingan, yaitu kepentingan nasional dan kepentingan daerah, secara baik, sinkron, dan tanpa konflik.[1] Kepentingan nasional diwakili oleh ketetapan mengenai kompetensi lulusan (SKL) dan standar isi (SI), sedangkan kepentingan daerah diwakili oleh keterkaitan sekolah dengan lingkungan sekitar berupa muatan lokal berdasarkan Permen Diknas No. 22 Tahun 2006 tentang SI dan Permen Diknas No. 23 Tahun 2006 tentang SKL (Hasan, 2008). Atas dasar kebijakan tersebut proses pengembangan kurikulum setelah tahun 2006 mengalami penyesuaian sebagai berikut.

Semangat otonomi daerah dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) terlihat pada mata pelajaran muatan lokal. Muatan lokal diadakan dan ditentukan jenisnya oleh daerah/sekolah sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan daerah/sekolah setempat. KBK diujicobakan di sejumlah sekolah di kota-kota di Jawa dan kota besar di luar Jawa secara terbatas untuk mengetahui efektivitasnya. Hasilnya tak memuaskan. Oleh karena itu KBK diganti dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) berdasar Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, No. 23 Tahun 2006 tentang Stndar Kompetensi Lulusan, dan No. 23 tahun 2006 tentang Pelaksanaan SI dan SKL. Dalam KTSP, setiap sekolah diberi kesempatan menyusun sendiri kurikulumnya, tetapi penyusunannya tetap harus mengacu pada SI yang ditentukan secara nasional oleh Permendiknas. Beban belajar siswa pada KTSP tidak sepadat kurikulum sebelumnya agar peserta didik mendapat kebebasan untuk mengembangkan diri dan guru juga dapat lebih mengembangkan profesi, seperti menulis buku atau melakukan penelitian.[2]

Sesuai dengan ketetapan Permen No. 22 tahun 2006, KTSP dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip berikut:[3]

1. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya.
   Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
2. Beragam dan terpadu.
   Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, dan jenjang serta jenis pendidikan, tanpa membedakan agama, suku, budaya dan adat istiadat, serta status sosial ekonomi dan *gender*.
3. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berkembang secara dinamis dan oleh karena itu semangat dan isi kurikulum mendorong peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan secara tepat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
4. Relevan dengan kebutuhan kehidupan.
   Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan *stakeholders* 'pemangku kepentingan' untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha, dan dunia kerja.
5. Menyeluruh dan berkesinambungan.
   Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian keilmuan, dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antarsemua jenjang pendidikan.

Adhidharma, M Dhika, Fakhry, Avlia, dan Choirudin , pelajar Indonesia yang meraih prestasi gemilang dalam kompetisi penelitian sains dan teknologi tingkat internasional bertemu dengan Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo di Jakarta, Selasa 26 Juni 2007

(Sumber: *Kompas*/ Ester Lince Napitupulu)

6. Belajar sepanjang hayat.
   Kurikulum mencerminkan keterkaitan antara unsur-unsur pendidikan formal, nonformal, dan informal dengan memperhatikan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berkembang serta arah pengembangan manusia seutuhnya.
7. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah.
   Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kepentingan nasional dan kepentingan daerah harus saling mengisi dan memberdayakan sejalan dengan motto Bhineka Tunggal Ika dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Said Hamid Hasan[4] mengemukakan beberapa hal mengenai KTSP sebagai berikut:

1. KTSP memberi kesempatan untuk membuka pendekatan baru dalam pengembangan kurikulum di Indonesia. Kurikulum tidak lagi hanya peduli pada perkembangan ilmu dan teknologi, tetapi juga sudah peduli pada aspek kehidupan lain manusia. Oleh karena itu apabila prinsip-prinsip ini dapat diterapkan dengan baik dalam KTSP maka kelemahan yang terdapat pada SKL, SK, dan KD dapat diperbaiki.
2. Dokumen KTSP harus jelas mencantumkan keterampilan yang diperlukan sehingga seorang peserta didik mampu mengembangkan dirinya di sekolah dan sesudah selesai dari pendidikan sekolah menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selain itu materi yang dapat mengembangkan rasa ingin tahu, mengenal dan mengembangkan budaya dan adat istiadat setempat, kemampuan mengikuti dan memanfaatkan secara tepat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni merupakan kompetensi yang secara tegas dan jelas tercantum dalam dokumen kurikulum dan diorganisasikan menurut prinsip KBK.
3. Organisasi isi kurikulum yang mengikuti prinsip kompetensi akan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melatih berbagai keterampilan tersebut melalui berbagai materi pelajaran substantif. Waktu yang digunakan akan lama dan tidak mungkin hanya dalam satu pertemuan, mungkin satu semester, satu tahun, atau selama yang bersangkutan mengikuti pelajaran di satuan pendidikan tersebut. Keberulangan dalam proses pemantapan kemampuan diperlukan karena kemampuan, nilai, dan sikap yang terdapat dalam kompetensi bersifat "developmental".

Beberapa kebijakan penting yang dikeluarkan Mendiknas Bambang Sudibyo antara lain sebagai berikut:

1. Rencana Strategis (Renstra) Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009

   Visi Depdiknas lebih menekankan pada pendidikan transformatif, yang menjadikan pendidikan sebagai motor penggerak perubahan dari masyarakat berkembang menuju masyarakat maju. Pembentukan masyarakat maju selalu diikuti oleh proses transformasi struktural, yang menandai suatu perubahan dari masyarakat yang potensi kemanusiaannya kurang berkembang menuju masyarakat maju dan berkembang, yang mengaktualisasikan potensi kemanusiaannya secara optimal. Pada masa global sekarang, transformasi berjalan dengan sangat cepat yang kemudian mengantarkan pada masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge based society*).

   Dalam rangka komitmen global Renstra Depdiknas Tahun 2005-2009 diarahkan guna mempercepat sasaran Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of them Child*) yang menyatakan: "Setiap negara di dunia melindungi dan melaksanakan hak-hak anak tentang pendidikan dengan mewujudkan wajib belajar pendidikan dasar bagi semua secara bebas" (*Artikel 28*) dan konvensi mengenai hak asasi manusia (HAM) yang menyatakan: "Setiap orang berhak atas pendidikan. Pendidikan harus bebas biaya, setidaknya pada pendidikan dasar. Pendidikan dasar harus bersifat wajib. Pendidikan teknik dan profesi harus tersedia secara umum dan pendidikan yang lebih tinggi harus sama-sama dapat dimasuki semua orang berdasarkan kemampuan".[5] Hal ini sejalan dengan pencapaian sasaran pembangunan yang disepakati dalam Kerangka Aksi Dakar mengenai Pendidikan Untuk Semua (PUS) atau *education for All* (*EFA*). Adapun misi yang dikembangkan oleh Depdiknas sebagai berikut:

   a. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia.
   b. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar.
   c. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral.
   d. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global.
   e. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Dalam hal pelaksanaan kurikulum sesungguhnya masih mengikuti kebijakan menteri sebelumnya, Malik Fajar, yakni Kurikulum 2004 yang dikenal dengan nama KBK. Pada masa Bambang Sudibyo dikeluarkan KTSP 2006, yang sesungguhnya merupakan penyempurnaan KBK, karena pada dasarnya Kurikulum 2006 merupakan kurikulum yang juga berbasis kompetensi. Dengan demikian hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah pusat masih bertanggung jawab terhadap pengembangan kurikulum, pemerintah daerah berperan menjadi pengembang untuk kurikulum daerah (lokal), sedangkan sekolah menjadi penyusun dan pengembang KTSP.

3. Penyempurnaan yang kemudian melahirkan Kurikulum 2004/Kurikulum Berbasis Kompetensi atau KBK

   Kurikulum ini menekankan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan (kompetensi) tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pendidikan sangat diharapkan dapat menyiapkan pribadi yang mampu melakukan perangkat kompetensi yang telah ditentukan. Kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kebiasaan berpikir dan bertindak secara konsisten dan terus-menerus dapat memungkinkan seseorang menjadi kompeten,

dalam arti memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar untuk melakukan sesuatu, sehingga pembelajaran yang dilakukan bukan terfokus pada isi materi pelajaran.

Ada beberapa landasan empirik yang menjadi pertimbangan lahirnya KBK, antara lain (1) adanya berbagai ketimpangan dalam kehidupan mulai dari aspek moral, akhlak, jati diri, hingga sosial ekonomi dan politik; (2) semakin terbatasnya sumber daya dan kesempatan untuk memperoleh lapangan kerja; serta (3) perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dampaknya terhadap pendidikan. Secara umum hasil pendidikan belum memuaskan, sehingga KBK juga merespon perkembangan teori belajar yang baru, antara lain teori konstruktivisme. Teori ini menolak pemahaman aliran behaviorisme yang berkembang sebelumnya. Dulu para behavioris meyakini bahwa pembelajaran adalah buah dari pembiasaan yang dilakukan secara berulang dan konsisten, sedang kaum konstruktif berpendapat bahwa siswa belajar melalui proses menemukan sendiri ilmu pengetahuan, dia mengkonstruksi sendiri pengetahuannya berdasar pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh sebelumnya dan selama belajar. Siswa bukanlah gelas kosong yang diisi air ilmu oleh gurunya. Siswa lebih mirip dengan pohon kecil yang disiram oleh fasilitator, dia bertumbuh dengan sendirinya. Dengan demikian guru bukanlah satu-satunya sumber ilmu, melainkan lebih berperan sebagai fasilitator yang mencipta kondisi kondusif sehingga siswa menemukan sendiri pengetahuan, keterampilan, atau sikap sebagai buah dari proses belajar.[6]

4. Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan melalui Permendiknas NO 8 tahun 2009

   Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan, yang selanjutnya disebut program Pendidikan Profesi Guru (PPG), adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 Kependidikan dan S1/D-IV Non Kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik profesional pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, atau pendidikan menengah. Tujuan program PPG adalah untuk menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran; menindaklanjuti hasil penilaian dengan melakukan pembimbingan dan pelatihan peserta didik; serta mampu melakukan penelitian dan mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan.

5. Peningkatan Kompetensi dan Kesejahteraan Guru

   Tidak ada murid yang bodoh, namun yang sering terjadi adalah murid tidak mendapat kesempatan belajar dalam bimbingan guru yang mumpuni sehingga tidak bisa berkembang maksimal. Guru memang memegang peran sentral dalam pendidikan. Secanggih apa pun media pembelajaran, sebagus apa pun kurikulum dirancang, bila kualitas guru yang melaksanakannya tidak memadai maka proses dan hasil pendidikan juga tidak akan memuaskan. Dengan demikian peran guru begitu sentral hingga pemerintah merasa perlu makin memperhatikan mereka; bahkan keberadaan guru disejajarkan dengan profesional lain, seperti dokter, notaris, atau akuntan.

   Guru dipandang sebagai sebuah profesi utama. Untuk itu, sebagaimana profesi lain, guru dan dosen harus memiliki sertifikat profesional yang dikeluarkan resmi oleh lembaga berwenang. Sertifikat dapat diperoleh melalui proses yang disebut sertifikasi. Tujuan kebijakan sertifikasi pendidik ini untuk meningkatkan profesionalitas pendidik yang pada gilirannya akan meningkatkan mutu pembelajaran dan pendidikan secara berkelanjutan. Sebagai keseimbangan, tujuan sertifikasi ini juga untuk meningkatkan kesejahteraan guru, sebab guru yang telah mengantongi sertifikat resmi akan mendapatkan imbalan tunjangan profesi yang pantas, yaitu sebesar satu kali gaji pokok guru bersangkutan. Tunjangan profesi berlaku bagi guru berstatus pegawai negeri sipil ataupun nonpegawai negeri sipil.[7]

Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo saat bersama siswa SD Negeri 24 Kalibone, Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan, saat melakukan peninjauan program Bantuan Operasional Sekolah di akhir tahun 2015

(Sumber: *Kompas*, Rabu 30 Januari 2007)

6. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005

   UU No. 20 Tahun 2003 yang lahir pada masa Mendiknas Malik Fajar membutuhkan berbagai peraturan turunan. Salah satu turunan dari UU Sisdiknas tersebut adalah Peraturan PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (SPN). PP ini dikeluarkan untuk menindaklanjuti Pasal 35 ayat (4), Pasal 37 ayat (3), Pasal 42 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 59 ayat (3), Pasal 60 ayat (4), dan Pasal 61 ayat (4) UU Sisdiknas. Dengan adanya SPN maka dapat diketahui kriteria minimal penyelenggaraan sistem pendidikan di seluruh Indonesia. SPN meliputi delapan standar, yaitu (1) standar isi, (2) standar proses, (3) standar kompetensi lulusan, (4) standar pendidik, (5) standar sarana prasarana, (6) standar pengelolaan, (7) standar pembiayaan, dan (8) standar penilaian. Mengingat heterogenitas situasi dan kondisi, SPN berlaku secara bertahap, namun setiap tahun pendidikan wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan PP ini paling lambat tujuh tahun. SI merupakan SPN yang mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. SI meliputi kerangka dasar dan struktur kurikulum, muatan kurikulum, beban belajar, KTSP, hingga masalah kalender pendidikan.[8]

7. Program BOS

   Situasi krisis masih dirasakan oleh masyarakat ketika Bambang Sudibyo menjadi Mendiknas, sehingga terdapat sebagian masyarakat yang merasakan dampak krisis tersebut berkaitan dengan pembiayaan pendidikan. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia seharusnya tidak boleh memporakporandakan program dan langkah pemerintah membangun dunia pendidikan. Oleh karena itu, meskipun dalam keadaan sulit, pemerintah tetap berusaha memberi perhatian pada sektor pendidikan. Para siswa, terutama anak keluarga miskin, harus bisa terus bersekolah. Anak-anak miskin harus diberi kemudahan mengakses pendidikan formal. Program wajib belajar 9 tahun tidak boleh terhambat. Target Angka Partisipasi Kasar (APK) 95%, sebagai indikator ketuntasan wajib belajar pendidikan dasar, harus tercapai. Kebijakan pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diluncurkan Juli bulan 2005 berperan besar dalam percepatan pencapaian ketuntasan wajib belajar. BOS merupakan program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar.

   Standar biaya operasi nonpersonalia adalah standar biaya yang diberlakukan untuk membiayai kegiatan operasional nonpersonalia selama satu tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai standar nasional pendidikan. BOS merupakan dana kompensasi

pendidikan yang pola pembagiannya langsung diarahkan ke sekolah-sekolah SD/SDSDLB/MI dan SMP/SMPLB/Mata baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia, termasuk SMP Terbuka dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) oleh masyarakat. Siswa miskin di tingkat satuan pendidikan SMA/SMK yang tidak mendapat BOS mendapat program bantuan lain berupa Bantuan Khusus Murid (BKM). Program kejar Paket A dan B juga tidak termasuk sasaran program BOS.[9]

Seperti telah disinggung sebelumnya, siswa pada jenjang SMA tidak mendapat BOS, tetapi mendapat BKM. BKM diharapkan dapat meringankan beban siswa miskin, menurunkan potensi putus sekolah, sekaligus meningkatkan mutu pendidikan. Biaya satuan BKM adalah Rp 780.000,00/siswa/tahun (tahun 2007). BKM diberikan kepada 310.609 siswa SMA dan 418.161 siswa SMK. Total alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk BKM Depdiknas tahun 2008 mencapai Rp 571,19 miliar. Berdasarkan hasil survei, BKM terbukti membantu meringankan biaya yang dikeluarkan orang tua siswa hingga sekitar separuh (51,34%-45,85%) dari total pengeluaran. BKM mampu mencegah siswa putus sekolah dengan indikasi ketidakhadiran siswa dari 4-5 hari setiap bulan turun menjadi 2 hari sebulan. BKM mampu meningkatkan kelancaran pembelajaran.

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan

   Sertifikasi bagi guru dalam jabatan adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dalam jabatan. Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti oleh guru dalam jabatan yang telah memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV). Sertifikasi bagi guru dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Mendiknas.

9. Program Sekolah Bertaraf Internasional (SBI)

   Peningkatan mutu sekolah dilakukan oleh Bambang Sudibyo dengan, salah satunya, mengeluarkan peraturan tentang Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) pada tahun ajaran 2006-2007 untuk satuan pendidikan mulai dari SD/MI, SMP/Mata, SMA/MA, hingga SMK. Tujuan utama peraturan tersebut adalah upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan nasional, khususnya eksistensi pendidikan nasional Indonesia supaya diakui dunia dan memiliki daya saing dengan negara-negara maju. Landasan hukum program SBI mengacu pada UU No. 20/2003 Sisdiknas pasal 50 ayat 3, yang menyebutkan "Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional".

   Pijakan berikutnya adalah Kebijakan Pokok Pembangunan Pendidikan Nasional dalam Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009. Butir 2 Kebijakan Pokok yang memaparkan masalah Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing tersebut secara eksplisit menyebutkan perlunya pembangunan sekolah bertaraf internasional untuk meningkatkan daya saing bangsa. Dalam hal ini pemerintah perlu mengembangkan SBI pada tingkat kabupaten/kota dengan melakukan kerja sama yang konsisten antara pemerintah pusat dengan pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan untuk mengembangkan SD, SMP, SMA, dan SMK bertaraf Internasional di seluruh Indonesia.[10] Memang tidak mudah mencapai tahap SBI, sehingga oleh karenanya ditekankan bahwa program SBI mesti dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Pemerintah menetapkan bahwa sekolah yang memenuhi standar minimal SNP akan diberi pendampingan, pembimbingan, penguatan, dalam bentuk Rintisan SBI (RSBI). Dengan demikian untuk menuju status SBI, sekolah harus menjadi RSBI terlebih dahulu.

Pemerintah memberikan parameter dan persyaratan khusus bagi sekolah agar bisa mencapai RSBI, antara lain sekolah harus sudah mendapatkan pengakuan sebagai Sekolah Standar Nasional (SSN) dengan ketentuan (1) memiliki rata-rata ujian nasional (UN) 6,5, (2) tidak *double shift*, dan (3) berakreditasi B dari BAN Sekolah/Madrasah. Dengan kata lain, untuk menuju SBI, sekolah reguler harus mencapai beberapa tahap, yakni harus mendapatkan pengakuan SSN, kemudian mendapat pengakuan RSBI, barulah mendapat status SBI. Agar sekolah bertumbuh, pemerintah melalui APBN menganggarkan biaya pendirian atau rintisan sekolah internasional. Dana dari APBN tersebut adalah biaya operasional dalam rangka pengembangan kapasitas menuju standar kualitas SBI. Kementerian Pendidikan Nasional saat itu menentukan besaran anggaran untuk proses pembelajaran tidak lebih dari (30%), untuk sarana penunjang PBM (25%), manajemen maksimal 20%, termasuk subsidi bagi siswa miskin dan kesiswaan mencapai (25%).

Anggaran dana berasal dari APBD serta diperbolehkan mengutip sebagian biaya dari masyarakat atau orang tua. Karena SBI merupakan sekolah yang menyandang status khusus, maka perlakuan penerimaan siswa juga menggunakan cara dan status khusus, yang didasarkan pada kemampuan akademis calon siswa. Tes yang harus dijalani meliputi psikologi serta tes tertulis yang terdiri dari IPA dan Matematika (untuk SMK ditambah dengan tes kesehatan dan buta warna bagi SMK Kimia), dan terakhir berdasar nilai Ujian Nasional.[11]

10. Peningkatan Daya baca Masyarakat

“Buku adalah gudang ilmu”, “buku adalah jendela pengetahuan”, merupakan kata-kata mutiara kasih yang diterima kebenarannya oleh semua khalayak, namun tetap hanya sebatas retorika. Betapa penting peran buku dalam pengembangan potensi sumber daya manusia tak terbantahkan kebenarannya. Namun perpustakaan sebagai gudang harta karun ilmu pengetahuan masih terabaikan. Rendahnya minat baca masyarakat Indonesia masih menjadi isu pokok yang tak kunjung tertangani. Untuk itu perlu dibuat peraturan perundangan yang bersifat memaksa dan mengikat. Peningkatan budaya membaca harus dibangun secara serius di lingkungan masyakarat dan sekolah. UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan merupakan salah satu jawaban. UU ini merupakan upaya sungguh-sungguh untuk membudayakan gemar membaca menuju masyarakat pembelajar sepanjang hayat, melestarikan budaya bangsa, dan memajukan pendidikan dan kebudayaan nasional. UU Perpustakaan menetapkan bahwa masyarakat memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan serta manfaat dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan. Masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, atau terbelakang pun berhak mendapat layanan perpustakaan meski dalam bentuk layanan khusus yang sederhana dan tidak terstandar seperti di perkotaan.[12]

11. Anggaran Pendidikan di APBN

Sejak reformasi bergulir tahun 1998 suara-suara yang menginginkan peningkatan anggaran APBN untuk pendidikan semakin keras terdengar. Tuntutan pemerhati pendidikan juga semakin nyaring meminta tambahan anggaran pendidikan yang selama Orde Baru tidak lebih dari angka 10% dari APBN. Dibandingkan dengan Malaysia, anggaran pendidikan Malaysia tidak pernah kurang dari 20%, di antaranya untuk membayar guru dan dosen dari Indonesia pada waktu itu. Namun salah satu tuntutan reformasi tersebut belum dapat dipenuhi Kabinet Reformasi karena kondisi keuangan negara belum memungkinkan. Jika di masa sebelumnya anggaran pendidikan 9,3% dan kemudian 8%, pada masa Kabinet Reformasi tahun 2001 angka yang dialokasikan hanya 3,8% dari APBN. Ketika itu prioritas harus diletakkan pada pengadaan prasarana, seperti penyediaan listrik dan pelabuhan.[13]

Beruntunglah perimbangan anggaran pendidikan 20% terus dipertahankan pada APBN 2010 sebesar Rp 209, 54 triliun. Tahun 2011 pemerintah bahkan meningkatkan anggaran pendidikan menjadi 20% atau Rp 266, 9 triliun. Pada pidato penyampaian RAPBN 2012

beserta Nota Keuangannya di Gedung MPR/DPR RI Jakarta, Selasa 16 Agustus 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa dalam RAPBN Tahun 2012 pemerintah tetap dapat memenuhi amanat konstitusi. Alokasi anggaran pendidikan dalam APBN 2012 sebesar 20% (Rp 286, 6 triliun).[14] Akan halnya RAPBN tahun 2012, meskipun persentase tetap 20%, nominalnya mengalami peningkatan cukup tajam dari Rp 266,9 triliun menjadi Rp 286,6 triliun. Meskipun demikian anggaran pendidikan sebesar itu sudah termasuk untuk gaji guru dan dosen, padahal UU Sisdiknas mengatur bahwa anggaran pendidikan mininum 20% dari APBN/APBD di luar gaji pendidik. Ternyata ketentuan itu digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh seorang guru dan dosen dari Makassar. Menurut penggugat, anggaran pendidikan 20% dari APBN/APBD seharusnya termasuk gaji pendidik. Gugatan mereka dikabulkan MK yang diketuai oleh Jimmy Asshidiqie, dibacakan pada awal 2007, dan berlaku efektif sejak tahun anggaran 2008. Itu sebabnya anggaran pendidikan sejak 2009 langsung melonjak mencapai 20% dari sebelumnya yang hanya 9%.[15]

12. Badan Hukum Pendidikan (BHP)

    Salah satu hal baru yang terdapat dalam Undang-undang Sisdiknas adalah munculnya kosa kata Badan Hukum Pendidikan (BHP). BHP adalah badan hukum satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat yang mempunyai fungsi memberikan pelayanan pendidikan, serta berprinsip nirlaba dan dapat mengolah dana untuk memajukan satuan pendidikan. Pasal 53 ayat 1 UU tersebut menggariskan penyelenggara dan/atau satuan pendidikan yang didirikan oleh pemerintah dan masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan. Ayat 2 ditambahkan penjelasan bahwa badan hukum pendidikan berfungsi untuk memberikan layanan pendidikan kepada peserta didik.

    Badan hukum pendidikan berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan (ayat 3). Untuk mewujudkan amanat UU Sisdiknas tahun 2003 tersebut lahirlah UU No. 9 Tahun 2008 tentang Badan Hukum Pendidikan yang ditandatangani Presiden RI pada tanggal 16 Januari 2009. UU BHP disahkan setelah rencana undang-undangnya melalui proses panjang. RUU BHP disetujui oleh seluruh fraksi pada Rapat Paripurna ke-15 DPR-RI Tahun 2008 pada tanggal 17 Desember 2008. UU BHP memberi otonomi optimal yang diimbangi tuntutan akuntabilitas optimal pada penyelenggara satuan pendidikan atau satuan pendidikan. Negara berupaya menghargai dan memperlakukan penyelenggara satuan pendidikan atau satuan pendidikan sebagai institusi dewasa yang dapat dipercaya untuk mengurus dirinya sendiri secara mandiri, transparan, dan akuntabel tanpa banyak campur tangan pemerintah, khususnya dalam pengelolaan pendidikan. UU ini juga dianggap sebagai solusi bagi yayasan penyelenggara pendidikan yang mengalami kevakuman dasar hukum sejak tahun 2007. Kevakuman itu terjadi karena terbitnya UU No. 28 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.[16]

    UU BHP juga masih memperhatikan kaum miskin. Pasal 46 memberi kuota anak pandai dari keluarga miskin sebanyak 20 persen dari kursi yang tersedia. Satuan pendidikan BHP wajib menjaring dan menerima warga negara Indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi dan kurang mampu paling sedikit 20 persen dari keseluruhan peserta didik baru. Satuan Pendidikan BHP harus menunjukkan kepada publik bahwa mereka menerima dan menyediakan paling sedikit 20 persen beasiswa atau bantuan biaya pendidikan untuk mereka yang kurang mampu dan/atau peserta didik yang memiliki potensi akademik tinggi.[17]

13. Peraturan Mendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

    SI mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. SI dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang dibentuk berdasarkan Peraturan

Pemerintah No. 19 Tahun 2005. Dalam dokumen dibahas standar isi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, yang secara keseluruhan mencakup hal-hal berikut:

a. Kerangka dasar dan struktur kurikulum yang merupakan pedoman dalam penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan.
b. Beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah.
c. Kurikulum tingkat satuan pendidikan yang akan dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan panduan penyusunan kurikulum sebagai bagian tidak terpisahkan dari standar isi.
d. Kalender pendidikan untuk penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah.

ENDNOTES

1 Hasan, S.H. 2008. "Kurikulum, Standar Kompetensi Lulusan, dan Ujian Negara". Dalam Mulyana, A & Supardan, D (Editor), *Sejarah sebuah penilaian: Refleksi 70 Tahun Prof. Dr. H. Asmawi Zainul, M. Ed* (hlm. 173-183). Bandung: Pendidikan Sejarah FPIPS UPI.

2 Andriono dkk, 2011: 209-211.

3 Hasan, *Op.Cit*., hlm. 174.

4 *Ibid*.

5 Deklarasi HAM, Artikel 26.

6 Andriono dkk. 2011. *Jejak langkah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (1945-2011).* Jakarta: Kemendikbud, hlm. 207-209.

7 *Ibid*., hlm. 224-225.

8 *Ibid*., hlm. 227.

9 *Ibid*., hlm. 229-230.

10 *Ibid*., hlm. 237-238.

11 *Ibid*., hlm. 238-239.

12 *Ibid*., hlm. 240-241.

13 *Ibid*., hlm. 241-242.

14 *Ibid*., hlm. 243.

15 *Ibid*., hlm. 245.

16 *Ibid*., hlm. 246.

17 *Ibid*., hlm. 248.

Muhammad Nuh

Masa Jabatan
22 Oktober 2009 – 20 Oktober 2014

Muhammad Nuh

Prof. Dr. Ir. K.H. Muhammad Nuh adalah Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) yang menjabat pada periode kedua pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono (2009-2014) dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Nuh menjabat Mendiknas sejak 22 Oktober 2009 sampai dengan 20 Oktober 2014. Ia lahir di Surabaya, Jawa Timur, pada tanggal 17 Juni 1959, anak ketiga dari 10 bersaudara. Ayahnya, H. Muchammad Nabhani, adalah pendiri Pondok Pesantren Gununganyar Surabaya. Nuh menikah dengan drg. Layly Rahmawati dan dikaruniai seorang putri, Rachma Rizqina Mardhotillah.

Nuh aktif di berbagai organisasi, seperti Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan Nahdlatul Ulama (NU). Ia pernah menjabat sebagai Ketua ICMI Jawa Timur, Pengurus PCNU Surabaya, Sekretaris Yayasan Dana Sosial Al Falah Surabaya, Anggota Pengurus Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya, serta Ketua Yayasan Pendidikan Al Islah Surabaya. Berkat kesungguhannya menangani bantuan berbagai proyek *Japan International Cooperation Agency* (JICA) pada tahun 2003 ia memperoleh penghargaan JICA Special Award di ITS; suatu penghargaan yang baru pertama diberikan JICA kepada orang Indonesia.

Sebelum menjadi menteri, Nuh bekerja sebagai dosen Jurusan Teknik Elektro dan Teknik Biomedik Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya sejak tahun 1984. Nuh memperoleh gelar magister dan doktor di *Universite et Technique du Languedoc* (USTL) Montpellier, Prancis, dan pada tanggal 14 Agustus 2004 ia dikukuhkan sebagai guru besar (profesor) bidang ilmu *Digital Control System* dengan spesialisasi Sistem Rekayasa Biomedika. Pada tahun 2003–2006 ia menjadi Rektor ITS dan pada tahun 2007–2009 diangkat menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika menggantikan Dr Sofyan A Djalil, S.H., M,A. Presiden SBY meminta Nuh mengembangkan teknologi informasi (IT) di bidang pendidikan, pemerintah (layanan publik), dan bisnis.

PEMIKIRAN TENTANG PENDIDIKAN

Muhammad Nuh memiliki banyak gagasan dan pemikiran tentang pendidikan. Dalam hal hubungan agama dengan sains ia berpendapat bahwa ia mampu hidup di "dua alam", yang dianggap banyak orang tidak bisa disatukan, yaitu sains dan agama. Sayangnya, banyak guru yang belum mampu mengaitkan fenomena kealaman dengan agama atau guru agama yang tidak mau membuka wawasan tentang pentingnya ilmu kealaman. Nuh beranggapan jika kita dapat menguasai ilmu-ilmu kealaman kemudian dikaitkan dengan fenomena ke-esa-an Tuhan akan semakin menambah keimanan.

Mengenai abad ke-21 Nuh berpendapat bahwa anak-anak kita yang sekarang ini sedang bersekolah atau kuliah akan menghadapi persoalan yang semakin kompleks dan harus menyelesaikannya dalam waktu lebih singkat daripada kita. Masalah ini yang menjadi salah satu masalah objektif dunia pendidikan pada abad ke-21. Kalau bekal yang kita berikan tidak mencerminkan kemampuan (kompetensi) untuk menyelesaikan kompleksitas persoalan, sangat mungkin dunia pendidikan kita akan terjebak sebagai mesin pencipta generasi kadaluwarsa (*expired generation*), karena kompetensi yang dimiliki anak-anak kita tidak sesuai (*disconnected*) dengan persoalan yang dihadapi. Tidak ada cara lain yang lebih ampuh kecuali menyiapkan generasi yang memiliki keutuhan kompetensi sikap (*attitude*), keterampilan (*skills*), dan pengetahuan (*knowledge*). Oleh karena itu, sekali lagi, keutuhan kompetensi menjadi konsep dasar Kurikulum 2013 yang dibidaninya.

Abad ke-21 ini melahirkan suatu generasi yang disebut dengan generasi milineal. Dalam kaitan tersebut Nuh menyatakan bahwa di antara karakteristik yang menonjol dari generasi millennial dan *digital native* adalah melekatnya gaya hidup mereka dengan teknologi, khususnya *technology savvy* 'teknologi digital', *virtual collaborative* 'kolaborasi virtual', *nomadic* 'tidak terlalu terikat dengan lokasi dan kemauan yang

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Muhammad Nuh

(Sumber: Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)

Muhammad Nuh berfoto bersama kedua orang tuanya setelah diwisuda.

(Sumber: Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)

seketika', dan tidak sabar (yang disebutnya "*we want it now generation*"). Oleh karena itu rancangan pendidikan haruslah mempertimbangkan dua hal yang mendasar, yaitu (1) pemahaman tentang karakteristik dasar peserta didik dan (2) kemampuan membaca *future trends* 'kecenderungan masa depan' dan kompetensi yang dibutuhkannya. Hal itu harus dilakukan agar tidak terjadi *disconnected* antara karakteristik dasar peserta didik, sistem pembelajaran, dan kebutuhan kompetensi, *disconnected* antara *input*, proses, dan *output*.

Nuh menyatakan bahwa pembentukan karakter perlu dilakukan sejak usia dini. Karakter seseorang yang sudah terbentuk sejak usia dini tidak akan mudah berubah. Ia juga menganggap bahwa pendidikan karakter dapat membangun kepribadian bangsa. Pemerintah, melalui Kementrian Pendidikan Nasional (Kemendiknas), sejak tanggal 2 Mei 2010 menggulirkan sebuah "terobosan baru" menyangkut keharusan dalam mengembangkan pendidikan berbasis karakter. Pendidikan karakter yang dimaksud adalah sekurang-kurangnya merujuk adanya keseimbangan antara *moral knowing* 'pengetahuan tentang moral', *moral feeling* 'perasaan tentang moral', dan *moral action* 'perbuatan moral'. Generasi muda Indonesia harus mampu berpikir kreatif, sebab masyarakat dunia yang akan datang dikerumuni dan disaingi oleh orang-orang yang kreatif. Jika tidak mampu berpikir kreatif, maka kita akan menjadi aneh dan terasing dalam persaingan global. Mahasiswa pun harus selalu memiliki rasa pecaya diri dan empati yang tinggi terhadap sesama. Ia berharap generasi muda saat ini tidak berlaku zalim kepada masyarakat jika suatu saat nanti terpilih sebagai pemimpin di negara ini.

KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Pada masa menjabat sebagai Mendiknas, Muhammad Nuh mengeluarkan berbagai kebijakan. Salah satu kebijakan yang terpenting adalah tentang kurikulum, yakni Kurikulum 2013, untuk menggantikan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006. Salah satu alasan yang melatarbelakangi penggunaan Kurikulum 2013, menurut Nuh, karena terdapat banyak kekurangan pada Kurikulum 2006. Konsekuensi dari posisi pelaksanaan kurikulum menyebabkan adanya satu keharusan untuk melakukan evaluasi yang sistematik, rutin, dan terencana. Hal ini senada dengan penjelasan Ibrahim[1] bahwa evaluasi di dalam proses pengembangan kurikulum dimaksudkan untuk (1) perbaikan program, yaitu evaluasi dijadikan *input* bagi perbaikan yang diperlukan di dalam program kurikulum yang sedang dikembangkan; (2) pertanggungjawaban kepada berbagai pihak yang berkepentingan, baik pihak yang mensponsori kegiatan pengembangan kurikulum tersebut maupun pihak yang akan menjadi konsumen dari kurikulum yang telah dikembangkan; dan (3) sebagai penentuan tindak lanjut hasil pengembangan

Muhammad Nuh dalam acara pengangkatan menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II

(Sumber: Biro Umum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)

dengan menjawab pertanyaan dalam kondisi yang bagimana dan dengan cara bagaimana pula kurikulum baru tersebut akan disebarluaskan ke dalam sistem yang ada.

Perubahan kurikulum, menurut Muhammd Nuh, adalah keniscayaan. Jika kurikulum di Indonesia tidak menyesuaikan perubahan zaman, bisa dipastikan Indonesia akan tertinggal dari dunia internasional. Akan tetapi, seperti yang diungkapkan Hasan,[2] "Permasalahan yang muncul dalam implementasi kurikulum dan kesulitan guru dalam merealisasikan kurikulum tidak dijadikan fokus permasalahan, bahkan dapat dikatakan sebagai sesuatu yang dianggap bukan masalah." Begitupun dengan efisiensi penggunaan waktu dalam belajar, kesulitan penguasaan konsep dan keterampilan dari materi bahan ajar, serta pembinaan dalam mengatasi kesulitan belajar tidak menjadi perhatian dalam penerapan kurikulum.

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum berbasis kompetensi yang pernah digagas dalam Rintisan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004, tetapi belum terselesaikan karena desakan untuk segera mengimplementasikan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006. Namun, pada kenyataannya, sebelum menuntaskan program Kurikulum 2013, Nuh sudah mengakhiri jabatannya sebagai Mendikbud. Dengan penuh harap ia berpesan agar Kabinet Kerja mempertimbangkan untuk melanjutkan Penerapan Kurikulum 2013.

Selain mengeluarkan kebijakan yang berkait dengan kurikulum Nuh mengeluarkan beberapa kebijakan, di antaranya sebagai berikut:

1. Tertanggal 13 Januari 2010 Nuh mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) No. 1 tahun 2010 tentang perubahan penggunaan nama lembaga pendidikan dari Departemen Pendidikan Nasional menjadi Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas). Peraturan ini berlaku surut mulai 3 November 2009, sementara itu Nuh menyelesaikan jabatannya tahun 2014. Dalam *reshuffle* Kabinet Indonesia Bersatu II terjadi restrukturisasi fungsi di beberapa kementerian, salah satunya di Kemdiknas. Urusan kebudayaan yang semula ditangani Kementerian Budaya dan Pariwisata dikembalikan lagi ke Kemdiknas. Oleh karena itu, sebagaimana tertuang dalam Permendikbud No. 48 Tahun 2011, nomenklatur Pendidikan Nasional berubah menjadi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud).[3]

2. Dalam kaitan Rencana Pembangunan II yang berfokus pada penguatan pelayanan, Kemendikbud menyusun rencana strategis 2010-2014. Layanan pendidikan yang difokuskan pada hal-hal berikut:

   a. Ketersediaan pendidikan secara merata di seluruh pelosok Nusantara; bahwa pendidikan harus dinikmati oleh seluruh warga negara Indonesia yang berada di wilayah tanah air Indonesia dengan menyediakan sarana dan prasarana pendidikan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Muhammad Nuh dalam Sosialisasi Kurikulum 2013 di Kediri.

(Sumber: Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh meninjau tempat penyimpanan soal UN 2014 di Polresta Surabaya.

(Sumber: Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)

b. Keterjangkauan pendidikan oleh seluruh lapisan masyarakat; bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara Indonesia, oleh karena itu pendidikan harus dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa melihat status sosial ataupun *gender* dan pemerintah wajib menyediakan pendidikan yang terjangkau sampai pelosok negeri.

c. Berkualitas/bermutu dan relevan pendidikan dengan kebutuhan kehidupan bermasyarakat, dunia usaha, dan dunia industri, yang berarti pemerintah harus terus mengupayakan peningkatan kualitas pendidikan dan lulusan yang dihasilkan sesuai dengan dunia kerja.

d. Setara bagi warga negara dalam memperoleh pendidikan berkualitas; bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama mendapatkan pendidikan berkualitas.

e. Menjamin kepastian bagi warga negara Indonesia mengenyam pendidikan dan meyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri; bahwa pemerintah wajib memberikan jaminan kepastian bagi setiap warga negara memperoleh pendidikan yang bermutu dan relevan.

3. Tujuan Strategis Kemendikbud 2009-2014 antara lain sebagai berikut:

a. Tersedia dan terjangkaunya layanan PAUD bermutu dan berkesetaraan.

b. Terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar bermutu dan berkesetaraan.

c. Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan menengah yang bermutu, relevan, dan berkesetaraan.

d. Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan tinggi bermutu, relevan, berdaya saing internasional dan berkesetaraan.

e. Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan orang dewasa berkelanjutan yang berkesetaraan, bermutu, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

f. Terwujudnya penerapan nilai-nilai luhur budaya Indonesia yang mencerminkan jati diri bangsa bermartabat.

g. Tersedianya sistem tata kelola yang andal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan dan kebudayaan.

4. Bantuan Siswa Miskin (BSM) SD dengan *unit cost* sebesar Rp 364.000,00 per siswa per tahun. Sementara itu BSM SMP untuk kelas 7 dan kelas 8 sebesar Rp 550.000,00 per siswa per pertahun, kelas 9 sebesar Rp 281.000,00 per siswa per semester, dan kelas 7 baru sebesar Rp 282.000,00 per siswa per semester. Kenaikan sasaran BSM pada APBN-P 2013 untuk mengurangi beban orang tua siswa yang terkena dampak inflasi kenaikan BBM yang diperkirakan mencapai 7,2%.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh dalam Sosialisasi Kurikulum 2013 di Jawa Barat.

(Sumber: Biro Umum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Meningkatnya biaya pendidikan yang dibebankan kepada calon mahasiswa dan mahasiswa baik dalam bentuk uang pangkal maupun Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) oleh sejumlah PTN menghkhawatirkan banyak pihak karena dianggap mengganggu akses masyarakat untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Sinyal kekhawatiran ini ditanggapi oleh pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, melalui sejumlah kebijakan untuk membatasi PTN dalam pemungutan biaya pendidikan dari mahasiswa. Kompensasi dari pembatasan ini adalah pemerintah menyediakan bantuan BOPTN, yang digunakan untuk:

a. pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
b. biaya pemeliharaan pengadaaan;
c. penambahan bahan praktikum/kuliah;
d. bahan pustaka;
e. penjaminan mutu;
f. pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan;
g. pembiayaan langganan daya dan jasa;
h. pelaksanaan kegiatan penunjang;
i. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pembelajaran;
j. honor dosen dan tenaga kependidikan nonpegawai negeri sipil; dan/atau
k. pengadaan dosen tamu.

6. Salah satu hal baru yang muncul pada Kabinet Indonesia Bersatu II adalah hadirnya wakil menteri dengan tugas membantu menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas kementerian. Keberadaan wakil menteri mengacu pada Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009. Secara struktural wakil menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri. Berdasar Permendiknas No. 36 tahun 2010 pasal 6, Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

a. melaksanakan koordinasi perumusan kebijaksanaan di bidang pendidikan nasional,
b. melaksanakan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kebijaksanaan di bidang pendidikan nasional,
c. melaksanakan koordinasi dan pemantauan pengelolaan barang milik negara,
d. atas persetujuan menteri, melaksanakan pengendalian atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kemdikbud,

Atas

Sesuai Permendikbud No. 48 Tahun 2011 nomenklatur Pendidikan Nasional berubah menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

(Sumber: Direktorat Sejarah)

Tengah

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh dalam kunjungan ke SMP N 3 Sorong tahun 2014

(Sumber: Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)

Bawah

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh dalam penutupan Olimpiade Sains Nasional 2014 di Nusa Tenggara Barat

(Sumber: Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh sedang menandatangani perjanjian The 2nd Indonesia-UK Joint Working Group on Education 2014

(Sumber: Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)

e. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional, dan
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan menteri.

7. Pada saat munculnya jabatan wakil menteri pada tahun 2009, Wakil Menteri Pendidikan Nasional dijabat Prof. dr. Fasli Jalal, Ph.D, namun dua tahun kemudian ia diganti saat ada *reshuffle* kabinet. Kemdikbud mendapat dua wakil menteri. Pertama, wakil menteri yang membantu menteri mengurusi bidang pendidikan, dijabat Prof. Dr. Ir. Musliar Kasim, M.S., mantan Rektor Universitas Andalas, dan kedua, wakil menteri yang membantu menangani bidang kebudayaan, dijabat Prof. Ir. Wiendu Nuryanti, M.Arch, Ph.D, guru besar arsitektur Fakulas Teknik Universitas Gajah Mada. Keduanya dilantik pada tanggal 19 Oktober 2011.

8. Rencana Pembangunan Pendidikan II (2010-2014), dengan fokus pada penguatan pelayanan, telah memasuki tahun keempat. Beberapa capaian kinerja yang telah dihasilkan sampai dengan tahun 2013 antara lain Angka Prestasi Kasar (APK) PAUD Kemendikbud sebesar 68.10%, Angka Prestasi Murni (APM) SD/SDLB/Paket A sebesar 86.03%, APM SMP/SMLB/Paket B sebesar 65.10%, APK SMA/SMK/SMLB/MA/Paket C sebesar 75.7%, APK Perguruan Tinggi (PT) dan PTA sebesar 29.87, menurunkan jumlah penduduk tuna aksara menjadi sebesar 4.03%.

9. Kebijakan tentang pendidikan karakter

Hal yang melatarbelakangi adanya kebijakan tentang pendidikan karakter adalah adanya dekadensi moral, kenakalan remaja, tawuran antar pelajar, bentrok antar mahasiswa, hingga maraknya korupsi yang merisaukan banyak orang. Mendiknas Mohammad Nuh gelisah, bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam berbagai kesempatan berharap jajaran menterinya membuat langkah serius untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Mengapa pendidikan belum mampu mengubah perilaku menjadi lebih baik? Mengapa kejujuran, komitmen, keuletan, kerja keras, hingga kesalehan seolah lepas dari persoalan pendidikan. Semua pihak bertanya, bagaimana karakter bangsa ini? "Pembangunan watak (*character building*) amat penting. Kita ingin membangun manusia Indonesia yang berakhlak, berbudi pekerti, dan berperilaku baik. Bangsa kita ingin memiliki peradaban yang unggul dan mulia. Peradaban demikian dapat kita capai apabila masyarakat atau kita juga merupakan masyarakat yang baik (*good society*)," demikian pesan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada perayaan Hari Raya Nyepi di Jakarta.[4] Pada tanggal 14 Januari 2010 digelar acara "Sarasehan Nasional Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa" di Hotel Bidakara, Jakarta. Sekitar 200 orang yang terdiri dari pakar pendidikan, tokoh masyarakat, budayawan, rohaniawan, akademisi, birokrat, praktisi, pengelola pendidikan, dan pihak lain yang terkait hadir. Pada sarasehan tersebut disepakati komitmen pendidikan. Budaya dan karakter bangsa harus dikembangkan secara komprehensif sebagai proses pembudayaan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh bertemu dengan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Agus Arifin Numang dan mahasiswa di Makassar pada tanggal 12 Oktober 2012. Pada kesempatan ini ia menyampaikan keprihatinannya setelah terjadinya tawuran antarmahasiswa di Makasar pada hari sebelumnya

(Sumber: *Kompas*/ Aswin Rizal Harahap)

Sarasehan itu kemudian ditindaklanjuti tim khusus dengan melakukan pertemuan-pertemuan intensif untuk menggodok *grand design* 'rancangan induk' pendidikan karakter yang dilengkapi panduan pada setiap satuan pendidikan serta merancang pelaksanaannya sebagai sebuah gerakan nasional. Presiden mencanangkan pelaksanaan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa pada Puncak Peringatan Hardiknas 2010. Istilah yang digunakan menjadi pembangunan karakter, bukan lagi pendidikan karakter, sebab gerakan ini ternyata tidak hanya didukung oleh Kemendikbud tetapi meluas lintas kementerian yang meliputi Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Peranan Wanita, dan kementerian lain terkait.[5]

10 Kebijakan Bidik Misi

Kebijaksanaan Bidik Misi merupakan salah satu program prioritas seratus hari kerja Mendiknas yang dicanangkan pada tahun 2010. Setahun berikutnya diterapkan kembali dengan menerima sekitar 20.000 calon mahasiswa yang diselenggarakan 117 perguruan tinggi di bawah naungan Kemendiknas dan Kementerian Agama. Program Bidik Misi adalah bantuan bagi siswa dan mahasiswa dari keluarga tidak mampu secara ekonomi namun memiliki potensi akademik yang memadai sehingga bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Program ini menghidupkan harapan bagi masyarakat kurang mampu sekaligus diharapkan menghasilkan sumber daya insan yang mampu berperan dalam memutus mata rantai kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Mengawali pelaksanaan dilakukan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MOU) antar-Dirjen Dikti dengan para pimpinan perguruan di Masson Pine Hotel Bandung pada tanggal 16 Desember 2010. Program ini merupakan bagian dari komitmen dan tanggung jawab sosial perguruan tinggi.[6]

11. Pemberdayaan Lewat Keaksaraan

Selain mengembangkan pendidikan formal, pemerintah juga bergerak menangani pendidikan nonformal dan informal, termasuk di dalamnya pendidikan untuk orang dewasa. Meskipun program pemberantasan buta huruf sudah dicanangkan sejak awal kemerdekaan Indonesia dan dilaksanakan secara berkelanjutan, hingga kini harus diakui masih ada warga negara Indonesia yang belum melek huruf. Data Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Dirjen PAUDNI menunjukkan sampai dengan tahun 2009 terdapat 8,7 juta penduduk usia di atas 15 tahun masih buta aksara. Hal ini bertolak belakang dengan APM sekolah dasar sekitar 95%; suatu angka yang cukup tinggi. Namun, jumlah yang *drop out* juga tinggi, yakni sekitar 200.000 anak setiap tahun. Kemiskinan menjadi penyebabnya dan membuat mereka sedikit memiliki bahan bacaan dan akses pendidikan.[7]

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh berfoto dengan salah satu Mahasiswa Bidik Misi. Program Bidik Misi membuka peluang bagi pelajar yang berasal dari keluarga tidak mampu untuk mendapatkan pendidikan tinggi

(Sumber: Biro Umum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)

12. Menuntaskan Memperbaiki Sekolah Rusak

Pemerintah bertekad mewujudkan keinginan pada tahun 2012 tidak ada lagi gedung sekolah roboh. Melalui gerakan nasional program penuntasan rehabilitasi sekolah rusak, sedikitnya pada tahun 2011 diperbaiki 21.500 ruang kelas rusak berat, yang terdiri atas 18 ribu untuk ruang kelas jenjang sekolah dasar (SD) dan 3.500 ruang kelas jenjang sekolah menengah pertama (SMP). Keseluruhan ruang kelas rusak berat yang disiapkan dalam program penuntasan rehabilitasi sekolah tahun 2011-2012 sebanyak 153.026 ruang kelas. Total anggarannya mencapai Rp 20,4 triliun.[8] Perbaikan memang harus dilakukan mengingat sudah banyak gedung sekolah yang rusak, apalagi sekolah yang berada di daerah terpencil dan kantong-kantong kemiskinan. Selain belum tersentuh program pembangunan secara maksimal, juga karena banyak gedung sekolah yang dibangun pada masa program Instruksi Presiden (Inpres) tahun 1970-an saat pemerintah tengah giat-giatnya menuntaskan program wajib belajar 6 tahun. Dengan umur bangunan di atas rata-rata 30 tahun sangat wajar bila keadaannya sudah rapuh; belum lagi gedung sekolah rusak karena bencana alam.[9]

13. Garap PAUD Songsong Seabad Merdeka

Hadiah paling mahal bagi bangsa adalah menyiapkan generasi untuk zamannya. Inilah "kado istimewa" Satu Abad Republik Indonesia yang sedang disiapkan jajaran Kemendikbud. Kado untuk Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke-100 pada tahun 2045 tersebut disiapkan sejak 2011 dengan melakukan Gerakan PAUD-isasi. Mengapa PAUD? Sebab inilah masa emas generasi kita. Mereka inilah yang 30-an tahun ke depan akan menjadi pemegang kunci kemajuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain, jika ingin menyiapkan generasi 2045 harus dimulai dari sekarang dengan cara memberikan perhatian khusus pada PAUD, di samping tetap memberikan perhatian pada jenjang pendidikan yang lain.[10] Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Wahab,[11] "Salah satu cara pemberdayaan masyarakat adalah melalui pendidikan bagi anak-anak sebagai pelanjut generasi." Lebih lanjut Wahab[12] mengatakan, "Dengan memiliki sedikit pendidikan, anak akan mampu memanfaatkan sumber daya lingkungannya secara lebih baik, memiliki sikap positif tentang perubahan dan dapat bekerjasama untuk kemajuan." Jauh sebelum itu, pada tahun 2002 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah sepakat dan bertekad mengarahkan Indonesia menjadi negara keenam terkemuka di dunia pada 2045, mengingat potensi yang dimiliki bangsa Indonesia, baik sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM), cukup tersedia. Khusus untuk SDM, pada tahun 2011 hingga tahun 2045 Indonesia mengalami *demographic deviden* 'bonus kependudukan'. Hal ini berarti jumlah penduduk berusia produktif (usia di bawah 50 tahun) pada dekade tersebut sangat melimpah. Merekalah yang akan mengisi kemerdekaan

Pendidikan Anak Usia Sekolah bagi anak-anak Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia turut menjadi perhatian pemerintah. Muhammad Nuh nampak sedang melakukan dialog dengan siswa dan orang tua Indonesia di Malaysia

(Sumber: Biro Umum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)

RI yang ke-100 tahun nanti. Kenyataan ini akan menjadi potensi SDM yang luar biasa asal dipersiapkan dengan baik. Oleh karena itu pemerintah menetapkan rencana lima tahun ke depan, yakni tahun 2014. APK PAUD diharapkan mencapai 21,3 juta (72,6%).

14. Memahami PAUD

PAUD merupakan salah satu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan umur enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Tujuan PAUD adalah membantu mengembangkan seluruh potensi dan kemampuan fisik, intelektual, emosional, moral, dan agama secara optimal dalam lingkungan pendidikan yang kondusif, demokratis, dan kompetitif.[13] Sebagai gerakan nasional, program PAUD-isasi menghadapi tantangan yang besar, antara lain sebagai berikut:

a. Jumlah anak yang belum mengikuti PAUD masih cukup besar.
b. Sarana dan prasarana belajar baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif masih terbatas, karena keterbatasan kreativitas guru PAUD untuk menciptakan dan mengembangkan metode pembelajaran dan sumber belajar dengan memanfaatkan potensi budaya dan alam sekitar.
c. Kompetensi sebagian besar guru PAUD masih belum memadai karena sebagian besar di antara mereka tidak berasal dari latar belakang pendidikan PAUD dan mereka belum memperoleh pelatihan yang berkaitan dengan konsep dan ilmu praktis tentang PAUD.
d. Perbedaan APK peserta PAUD di daerah perkotaan dan pedesaan masih sangat besar.[14]

15. Permendiknas Nomor 32 Tahun 2095 tentang Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005-2025

Menebar Layanan Prima. Ke manakah sejatinya muara sepak sepak terjang Kemdikbud Republik Indonesia? Jawabannya secara gamblang diuraikan pada Visi Tahun 2025 Kemendikbud, yakni menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna). Koridor seluruh kebijaksanaan dan program Kemdikbud jelas, yakni untuk menghasilkan Insan Indonesia yang cerdas komprehensif, yakni cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual, dan cerdas kinestetik. Kemdikbud lebih menekankan pada pendidikan transformatif, yaitu menjadikan pendidikan sebagai motor penggerak perubahan dari masyarakat berkembang menuju masyarakat maju. Pembentukan masyarakat maju selalu diikuti oleh proses transformasi struktural, yang menandai suatu perubahan dari masyarakat yang potensi kemanusiaannya kurang berkembang menuju masyarakat maju dan berkembang yang mengaktualisasikan potensi kemanusiaannya secara optimal. Bahkan, pada

Muhammad Nuh mengunjungi persiapan peresmian Museum Kepresidenan Republik Indonesia, Balai Kirti, Bogor pada tahun 2014

(Sumber: Direktorat Sejarah)

era global, transformasi masyarakat Indonesia pada masyarakat berbasis pengetahuan. Tentu saja visi dan cita-cita tersebut tidak mungkin dicapai dengan sekali gebrak. Diperlukan usaha secara bertahap. Acuannya tentu saja Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025). Kemudian berdasarkan RPJPN, Kemdikbud menyusun Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005-2025 sebagaimana tertuang di dalam Permendiknas No. 32 Tahun 2095. RPPNJP dijabarkan ke dalam empat tema pembangunan pendidikan sebagai berikut:

a. Tema pembangunan I (2005-2009) terfokus pada peningkatan kapasitas dan modernisasi.
b. Tema pembangunan II (2010-2015) terfokus pada penguatan pelayanan.
c. Tema pembangunan. III (2015-2020) terfokus pada penguatan daya saing regional.
d. Tema pembangunan IV (2020-2025) terfokus ada penguatan daya saing internasional.

Adapun Tujuan Strategis Kemdikbud 2010-2014 sebagai berikut:

a. Tersedia dan terjangkaunya layanan PAUD berkualitas dengan memperhatikan inklusivitas di semua provinsi, kabupaten, dan kota.
b. Tersedia, terjangkaunya, dan terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar berkualitas dengan memperhatikan inklusivitas di semua provinsi, kabupaten, dan kota.
c. Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan menengah yang berkualitas dan relevan dengan memperhatikan inklusivitas di semua provinsi, kabupaten, dan kota.
d. Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan tinggi berkualitas, relevan, dan berdaya saing internasional dengan memperhatikan inklusivitas di semua provinsi.
e. Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan orang dewasa berkelanjutan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
f. Tersedianya sistem tata kelola yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional.[15]

Selain kebijakan-kebijakan sebagaimana tertuang dalam program Kemendiknas (2008), Mohammad Nuh pernah merencanakan agar skripsi dan karya akademik lain dipublikasikan terlebih dahulu sebelum dibawa ke ujian akhir, sementara itu jurnal ilmiah sangat terbatas jumlahnya. Kebijakan ini menimbulkan pula pro dan kontra. Menurut para pengamat, jika kebijakan ini diterapkan, maka akan banyak mahasiswa yang tidak bisa menamatkan kuliahnya. Begitupun dengan dikeluarkannya kebijakan terkait dengan pembuatan diversifikasi soal Ujian Nasional (UN). Kebijakan ini pun sempat menuai pro dan kontra oleh karena selain membutuhkan biaya dan tenaga yang lebih banyak, mencetak dan mendistribusikan ketigapuluh variasi soal UN yang telah ada tentu sangatlah rumit. Hal tersebut menyebabkan mengapa terjadi keterlambatan pencetakan serta pendistribusian naskah soal.

ENDNOTES

1 Ibrahim, R.2008. "Evaluasi dalam Pengembangan Kurikulum". Dalam Mulyana, A & Supardan, D (Editor), *Sejarah sebuah penilaian: Refleksi 70 Tahun Prof. Dr. H. Asmawi Zainul, M. Ed*. Bandung: Pendidikan Sejarah FPIPS UPI. Hlm, 133.

2 Hasan, S.H. 2008. "Kurikulum, Standar Kompetensi Lulusan, dan Ujian Negara". Dalam Mulyana, A & Supardan, D (Editor), *Sejarah sebuah penilaian: Refleksi 70 Tahun Prof. Dr. H. Asmawi Zainul, M. Ed*. Bandung: Pendidikan Sejarah FPIPS UPI, hlm. 176.

3 Andriono dkk. 2011. *Jejak langkah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (1945-2011).* Jakarta: Kemendikbud, hlm. 195-198.

4 *Ibid*., 249-250

5 *Ibid*., 250.

6 *Ibid*., 253-354.

7 *Ibid*., 255.

8 *Ibid*., 258.

9 *Ibid*., 259.

10 *Ibid*., 260.

11 Wahab, A. A. 2011. "Gagasan dan Pemikiran Pembangunan Pendidikan di Indonesia". Dalam Endang Danial & Syaifullah Syam (Editor), *Penghargaan dan Penghormatan 68 Tahun Prof. Dr. H. Abdul Azis Wahab, M. A.* (Ed.). Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Jurusan PKn FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia, hlm. 331

12 *Ibid*.

13 Kemendikbud, 2008, hlm. 262.

14 Andriono, *et.al*., hlm. 263

15 *Ibid*., hlm. 265-266

Anies Rasyid Baswedan

Masa Jabatan
27 Oktober 2014 – 27 Juli 2016

Anies Rasyid Baswedan

Anies Rasyid Baswedan, Ph.D. adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) dalam Kabinet Kerja pada pemerintahan Presiden Joko Widodo tahun 2014-2016, tetapi kemudian digantikan oleh Muhadjir Effendy. Anies Baswedan dilahirkan di Kuningan, Jawa Barat, tanggal 7 Mei 1969, dari keluarga pendidik. Ayahnya, Rasyid Baswedan, adalah mantan Wakil Rektor Universitas Islam Indonesia; sedang ibunya, Aliyah, adalah guru besar Universitas Negeri Yogyakarta. Pendidikannya, dari Taman Kanak-kanak (TK) sampai perguruan tinggi, diselesaikankan di Yogyakarta.

Anies mulai mengenyam bangku pendidikan pada umur lima tahun saat bersekolah di TK Masjid Syuhada. Menginjak umur enam tahun ia masuk Sekolah Dasar (SD) Laboratori, Yogyakarta. Setelah lulus SD ia diterima di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 5 Yoyakarta dan kemudian Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Yogyakarta. Sejak sekolah di SMP dan SMA Anies aktif dalam Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS).[1] Pada tahun 1989 ia kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada (FE UGM). Selanjutnya ia melanjutkan pendidikan melalui program beasiswa di University of Maryland, Amerika Serikat, untuk gelar magister dan pada tahun 1999 kuliah doktoral di Northern Illinois University, Amerika Serikat.[2]

Sejak kecil Anies aktif dalam berbagai organisasi yang mengasah kemampuan kepemimpinannya. Ia menjadi Ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) SMA 2 Yogyakarta dan pada tahun 1985 terpilih menjadi Ketua OSIS se-Indonesia. Pada tahun 1987 ia terpilih mengikuti program pertukaran pelajar AFS dan tinggal selama setahun di Milwaukee Wisconsin, Amerika Serikat. Proses kepemimpinan terbina kembali ketika ia menjadi mahasiswa di UGM. Ia aktif dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan baik intra maupun ekstra universiter. Ia menjadi Ketua Senat UGM dan aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Ia pun pernah menjadi pembawa acara di TVRI dalam program "Tanah Merdeka".[3]

Pada tahun 2005 Anies menjadi Direktur Riset The Indonesian Institute, suatu organisasi yang fokus pada riset dan analisis kebijakan publik. Ia sangat peduli pada bahasan otonomi daerah dan desentralisasi. Pada tahun 2009, saat berumur 38 tahun, ia terpilih menjadi Rektor Universitas Paramadina dan tercatat sebagai rektor termuda di Indonesia. Ketika menjadi Rektor Universitas Paramadina ia membuat program *Paramadina Fellowship* yang memberikan kesempatan kepada para mahasiswa tidak mampu, untuk kuliah gratis di universitas tersebut. Selain itu Anies membuat mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi yang menjadi mata kuliah wajib.

INDONESIA MENGAJAR

Sebagai aktivis Anies memiliki berbagai kegiatan dan pemikiran. Beragam program yang digagas oleh Anies sangat berhubungan dengan dunia pendidikan dan generasi muda Indonesia. "Gerakan Indonesia Mengajar" menjadi salah satu bagian kebijakan yang dianggap mampu mengembangkan keahlian tenaga pendidik muda ke seluruh pelosok wilayah negara ini. Ia juga menginisiasi kelas inspirasi dengan menggerakkan ribuan orang di berbagai kota untuk mengorganisasi dan mengajar selama satu hari di Sekolah Dasar.[4]

Program Indonesia Mengajar dilatarbelakangi oleh beberapa hal, antara lain pelajaran dari berbagai generasi, perjalanan aktivitas pengabdian dan interaksi dengan berbagai masyarakat, serta pengetahuan modern yang dipetik dari dunia akademis global. Gerakan Indonesia Mengajar diilhami oleh program Pengerahan Tenaga Mahasiswa (PTM) yang dicetuskan Rektor UGM tahun 1950-an untuk mengisi kekurangan guru SMA di daerah.

Anies Baswedan bersama Ibu dan Isteri mengunjungi makam Ayahnya, Hawad Rasyid Baswedan di sela-sela kunjungan kerja ke Yogyakarta

(Sumber: Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)

Gerakan Indonesia Mengajar dimulai pada tahun 2009 dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan merekrut lulusan baru dari universitas. Pengiriman guru-guru muda ke berbagai pelosok berfungsi menularkan optimisme, menebar inspirasi, dan menjadi jendela kemajuan di tingkat rakyat bawah. Program ini, tidak diragukan lagi, memberi inspirasi kepada masyarakat yang berpendidikan. Selain itu tanggapan terhadap panggilan lulusan muda Indonesia untuk menjadi guru selama satu tahun juga mengesankan. Dalam empat periode, 19.518 lulusan S-1 mendaftar untuk memperebutkan 242 tempat. Keterbelakangan dan ketertinggalan merupakan "pakaian" orang-orang di daerah terpencil, tetapi kehadiran guru-guru muda mendorong mereka memiliki ambisi, memiliki impian, dan menumbuhkan harapan dalam membuka pintu menuju masa depan yang jauh lebih baik. Gerakan Indonesia Mengajar menjangkau lebih dari 20.000 siswa di 136 desa.

Misi Gerakan Indonesia Mengajar adalah (1) mengisi kekosongan guru di daerah pedalaman dan (2) menjadi wahana kepemimpinan anak muda agar memahami kondisi masyarakat Indonesia seungguhnya. Adapun tujuan langsung program ini adalah untuk melengkapi sumber daya pemerintah yang tidak memadai dalam pengelolaan pendidikan. Indonesia Mengajar secara konkret menangani kekurangan guru secara memadai dan berkualitas di daerah-daerah terpencil. Indonesia Mengajar juga dimaksudkan untuk menginspirasi melalui pemenuhan janji kemerdekaan kepada masyarakat Indonesia, karena janji kemerdekaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa belum terpenuhi secara merata di seluruh pelosok kepulauan Indonesia. Anies mengajak masyarakat untuk ambil bagian dalam meningkatkan pendidikan. Ia juga mengizinkan konsep program tersebut ditiru oleh orang lain. "Tidak apa-apa untuk menyalin manajemen, proses rekrutmen. Sejak awal, IM tidak pernah berpura-pura memperbaiki semua masalah pendidikan di Indonesia," katanya di depan para wartawan. Indonesia Mengajar diadakan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan guru di daerah terpencil, tetapi juga untuk mempersiapkan pemimpin kelas dunia dengan pemahaman akar rumput. Dalam penjelasannya, ia mengutip suatu penelitian yang dilakukan oleh McKinsey, bahwa 80 persen lulusan Indonesia tidak dapat diterima di perusahaan global karena masalah bahasa. Hal ini terjadi karena Indonesia sedang mengalami transformasi identitas.

Selain Indonesia Mengajar, Anies juga melakukan Gerakan Indonesia Menyala, yakni gerakan penggalangan buku dan perpustakaan. Gerakan tersebut dilatarbelakangi oleh pentingnya buku dan kebutuhan buku yang sangat tinggi di daerah-daerah pedalaman. Prepustakaan ini tersebar di 140 SD di 16 kabupaten.

Anies Baswedan adalah pemimpin muda di Indonesia yang memiliki prestasi baik secara nasional maupun internasional. Pada bulan Juli 2010 ia menjadi satu-satunya orang Asia Tenggara yang termasuk 500 muslim paling berpengaruh di dunia menurut Pusat Studi Strategis Islam Kerajaan di Yordania.[5] Anies Baswedan,

dengan media jejaring sosialnya, dibaca dan dikenal oleh ratusan ribu pengikutnya. Ia menggunakan akun media sosial tidak hanya sebagai alat komunikasi, namun juga dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan dan untuk mengkonstruksi citra diri pada *follower*-nya. Salah satu akun media sosial yang sering digunakannya ialah instagram. Ia menggunakannya pertama kali pada tahun 2013, dan mengunggah foto pertama kali pada tanggal 11 September 2013.

PEMIKIRAN TENTANG PENDIDIKAN

Sebagai aktivis dan praktisi pendidikan, Anies Baswedan memiliki beberapa pemikiran yang berkaitan dengan pendidikan. Menurut Anies Baswedan pendidikan adalah kunci untuk meraih perubahan dan sebagai *escalator* sosial ekonomi. Kemajuan Indonesia bisa diraih jika keterdidikan menjadi sebuah kewajaran. Perbaikan kualitas guru dan kepemimpinan kepala sekolah menjadi kunci utama perbaikan pendidikan. Kekayaan utama bangsa Indonesia adalah manusianya dan bukan hanya sumber daya alam (SDA) yang melimpah. Jika manusia Indonesia terdidik, tercerdaskan, dan tercerahkan, maka Indonesia akan sejahtera dan mendominasi dunia.

Berkaitan tentang guru, Anies Baswedan menyatakan bahwa guru adalah tokoh pusat dalam ekosistem pendidikan, sehingga guru menjadi fokus utama pembenahan manajemen pendidikan nasional. Menurutnya, guru adalah kunci dalam membangun ekosistem pendidikan yang sehat, terutama melalui perannya dalam proses pendidikan. Oleh karena itu penting untuk terus meningkatkan mutu guru dalam pembenahan manajemen pendidikan nasional. Empat aspek utama dalam manajemen, persiapan, dan pengembangan guru, yaitu (1) ketersediaan, (2) kualitas, (3) distribusi, dan (4) biaya. Kebijakan yang saat itu ada menekankan pada perlunya keselarasan antara keempat dimensi tersebut, yang kemudian dimodifikasi ke dalam berbagai peraturan dan perundang-undangan. Peningkatan Manajemen dan Pengembangan Guru merupakan salah satu prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (RENSTRA) 2015-2019.

Pelaksanaan pendidikan berkait dengan anak Indonesia di masa depan. Menurut Anis, anak-anak Indonesia membutuhkan kompetensi global untuk bisa bersaing di lingkungan dunia yang disertai pemahaman empati yang mendalam. Kelompok berpendidikan wajib mendidik kelompok lain yang kurang terdidik dan tidak hanya terus mengecam kekurangan pendidikan saja.

Dalam kaitan penyelenggaraan pendidikan, Anies berpendapat bahwa pendidikan bukan tanggung jawab pemerintah semata, melainkan juga tanggung jawab seluruh bangsa. Kita harus mengembalikan pola pikir ke masa awal kemerdekaan ketika kita tidak mengandalkan semua hal di tangan pemerintah. Fungsi pendidikan tidak hanya untuk mendidik individu, tetapi untuk mengubah kelas. Namun meningkatnya biaya pendidikan membuat siswa dari keluarga miskin semakin sulit mengakses pendidikan tinggi, terutama jika mereka akademisi yang berkinerja buruk. Pendidikan harus membangun optimisme, yakni optimisme melawan arus keprihatinan publik tentang berbagai masalah sosial dan krisis ekonomi yang melanda negara. Anies mencatat bahwa orang Indonesia, biasanya, pesimis dan berpandangan negatif tentang Indonesia. Optimisme dapat menular dari para pemimpin ke rakyatnya.

TERJUN KE DUNIA POLITIK

Meskipun pada dasarnya Anies tidak memiliki catatan pribadi sebagai kader partai politik sebelumnya, namun ia mengikuti berbagai kegiatan politik. Salah satu di antaranya konvensi bakal calon Presiden yang dilakukan oleh Partai Demokrat. Ia mengikuti konvensi tersebut yang digunakannya untuk menyampaikan pemikiran dan pendapat mengenai kepeduliannya terhadap daerah terpencil di

Indonesia. Dalam hal kepemimpinan, menurutnya, perlu konsep kepemimpinan layaknya bermain angklung yang satu sama lain saling terlibat turun tangan dan membentuk satu kesatuan yang utuh.

Pada konvensi berikutnya ia mengungkapkan ide untuk mewujudkan janji kemerdekaan dengan strategi politik yang ia namakan "Indonesia 1945". Angka 1945 merupakan akronim dari 1 semangat, 9 pekerjaan, 4 janji kemerdekaan, dalam 5 tahun. Strategi politik tersebut merupakan ikhtiar Anies untuk ikut melunasi janji kemerdekaan yang telah disusun oleh para pendiri republik ini.[6] Kebijakan untuk mengurangi tayangan tidak mendidik pada acara televisi juga perlu menjadi perhatian dengan cara menguarangi sponsor yang menjadi bagian acara televisi tersebut. Masalah kesehatan pun tidak luput dari perhatian Anies saat konvensi di Bali. Ia menegaskan bahwa anggaran kesehatan perlu dinaikkan, di samping sektor pariwisata dan pengadaan kredit usaha rakyat juga perlu dipermudah.

Berikutnya, saat konvensi di Balikpapan, Anies menyoroti masalah perbatasan yang dianggap sangat penting untuk kemajuan Indonesia di masa depan. Perlu perhatian lebih untuk masyarakat perbatasan dalam memahami apa dan bagaimana kebutuhan diperlukan. Gabungan antara transportasi, pendidikan, dan kesehatan merupakan salah satu kunci utama perbaikan masalah di perbatasan. Di samping itu perlu dilakukan program padat karya untuk meningkatkan kualitas kemanusiaan. Permasalahan di lembaga hukum juga menjadi bagian yang menjadi perhatiannya. Masalah utama di bidang hukum adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat pada lembaga penegak hukum dengan menempatkan orang-orang baik dan berkompeten pada lembaga-lembaga tersebut.[7] Masalah yang juga menjadi bagian yang dikritisinya adalah wilayah Indonesia bagian timur, meliputi masalah transportasi, infrastruktur, usaha mikro, dan manajemen pengembangan kualitas manusia.

Anies juga menyampaikan program yang dinamakan "Gerakan Turun Tangan". Gerakan ini mendorong anak-anak muda di seluruh Indonesia berperan aktif dalam gerakan politik. Turun tangan tak hanya sekedar mendukung Anies, namun juga menciptakan politik yang sehat. Gerakan yang berdiri sejak tahun 2013 ini bertujuan agar masyarakat turut serta menciptakan politik sehat dalam memilih Presiden dan Wakil Presiden melalui Pemilu 2014. Relawan-relawan pada Gerakan Turun Tangan ini tergabung melalui forum *online* di internet di seluruh wilayah di Indonesia.[8] Gerakan ini juga mendorong agar kampanye dilakukan sehat tanpa ada kampanye hitam.

Anies ditunjuk sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) dalam Kabinet Kerja pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (2014-2019). Penunjukannya sebagai Mendikbud memunculkan harapan perubahan dan inovasi pendidikan Indonesia ke depan, mengingat latar belakangnya sebagai akademisi dan politisi yang sangat memperhatikan dunia pendidikan. Hal ini tentu sesuai dengan Nawacita Pemerintahan kabinet Joko Widodo, terutama yang terkait dengan pendidikan, yakni meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, melakukan revolusi karakter bangsa, serta memperteguh kebhinnekaan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

KEBIJAKAN SEBAGAI MENTERI

Sebagai Mendikbud, Anies Baswedan mengeluarkan berbagai kebijakan yang diselaraskan dengan tiga agenda prioritas Nawacita. Dalam dokumen Nawacita pada masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres), ketiga agenda prioritas tersebut mencakup program, antara lain, "Indonesia Pintar" melalui wajib belajar 12 tahun bebas pungutan, membangun pendidikan kewarganegaraan, serta mengembangkan insentif khusus untuk memperkenalkan dan mengangkat kebudayaan lokal.

Perwujudan program pendidikan dalam Nawacita dilakukan dengan berbagai kebijakan yang dianggap ideal serta sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Kebijakan pertama adalah menunda pelaksanaan

Atas

Anies Baswedan berjabat tangan dengan Muhammad Nuh dalam acara Lepas Sambut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

(Sumber: Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)

Tengah

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan dalam kunjungan ke SMKN 3 Ambon, Maluku 2015

(Sumber: Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)

Bawah

Anies Baswedan memberikan apresiasi kepada para peserta terbaik Lomba Mirip Pahlawan dalam kegiatan Peringatan Hari Sejarah tahun 2015

(Sumber: Direktorat Sejarah)

Kunjungan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ke SMA N 87 Rempoa, Banten, dalam rangka sosialisasi Kurikulum 2013, tanggal 12 Mei 2013

(Sumber: Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)

Kurikulum 2013 dan memberlakukan kembali Kurikulum 2006, serta menerapkan Kurikulum 2013 pada sejumlah sekolah terbatas sebagai uji coba. Faktor yang melandasi kebijakan penundaan Kurikulum 2013 adalah ketidaksiapan pelaksanaan kurikulum dan banyaknya keluhan siswa, guru, dan orangtua siswa.

Kebijakan yang berkaitan dengan tujuan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) yang ingin diterapkan oleh Anies Baswedan mengacu pada persiapan peserta didik pada masa yang akan datang. Rencana pemberlakuan kurikulum sekolah dengan berbasis pada kemampuan dasar (kompetensi) pada hakikatnya didasarkan pada pemikiran memberdayakan peserta didik dalam kedudukannya sebagai subjek belajar agar siap menghadapi tantangan kehidupan masa kini dan masa depan.[9]

Kebijakan yang menjadi perhatian masyarakat adalah pelaksanaan Ujian Nasional (UN). Paradigma UN sebagai suatu tantangan yang menakutkan perlu dihilangkan. Paradigma pemerintah sebagai pompa yang menolong dan memberdayakan siswa sejak dini, alih-alih sekadar penyaring yang menghakimi dan menghukum siswa pada bagian ujung proses pendidikan. Pemerintah perlu bertindak sebagai sosok yang memberikan bantuan kepada peserta didik dalam memberi layanan untuk membentuk karakter dan persiapan masa depan yang lebih baik sesuai dengan keterampilan yang dimiliki. Mengubah UN bukan sebagai tolak ukur kelulusan, tetapi hanya sebagai pemetaan pemerataan kualitas pendidikan daerah. Selain itu Anies juga membentuk Indeks Integritas Ujian Nasional untuk mengukur kejujuran siswa di setiap daerah. Nilai UN dilengkapi dengan penjelasan dan bukan hanya sekedar nilai. Tujuan besar di balik kebijakan tersebut adalah membuat UN bukan sebagai hal yang menakutkan. Anis mengeluarkan kebijakan "Ujian Nasional Perbaikan". Para siswa yang merasa kurang dalam capaian nilai UN bisa memperbaiki nilai melalui Ujian Nasional Perbaikan. Meski demikian siswa dengan nilai di bawah rata-rata tidak diwajibkan mengikuti ujian perbaikan (Susanti, 2016).

Perhatiannya terhadap guru mendorong Anis melakukan pemberdayagunaan terhadap guru. Berkaitan dengan hal tersebut ia mengeluarkan kebijakan meningkatkan mutu guru dengan Ujian Kompetensi Guru (UKG). UKG bukan merupakan upaya yang dilakukan untuk menilai tinggi dan rendahnya kemampuan seorang guru, namun menjadi suatu acuan untuk menghasilkan guru yang memiliki inovasi dan daya saing sesuai dengan perkembangan zaman. Meski dijamin tidak akan dijadikan sebagai tolak ukur penilaian kualitas guru, namun tidak sedikit guru yang resah karena khawatir tidak mampu meraih hasil maksimal.[10] Pada tahun 2015 UKG diikuti oleh sekitar tigajuta guru di seluruh Indonesia.

Dalam kaitan dengan kesejahteraan guru Anies mengupayakannya dengan berbagai program yang ditawarkan melalui kerjasama dengan berbagai pihak untuk, antara lain, melepaskan guru dari segala kepentingan politik praktis baik di pusat maupun daerah, mendorong masyarakat memberikan

keistimewaan dan keutamaan pada guru-guru kita, dan membantu guru mengurangi pengeluarannya dengan mendorong dunia bisnis memberikan program potongan harga khusus bagi guru.

Anies Baswedan pun sangat memperhatikan peran orang tua dalam pelaksanaan pendidikan. Pelaksanaan pendidikan di sekolah bukan hanya guru yang perlu melakukan pengarahan, namun orang tua juga diharapkan turut serta mengawasi dan mengevaluasi karena keluarga merupakan tempat utama yang memahami keadaan anak. Keluarga sebagai salah satu trisentra pendidikan merupakan tempat pendidikan pertama dan utama. Oleh karena itu sangat penting melibatkan orang tua secara aktif dalam proses pendidikan di sekolah agar pembelajaran yang diterima anak bisa selaras dan tidak saling meniadakan. Perlu pula disebarkan program-program yang mendukung orangtua agar mendapatkan panduan dan bimbingan dalam mengawal proses pendidikan dan tumbuh kembang anaknya. Keluarga merupakan titik awal dalam membentuk karakter seorang anak yang menjadi peserta didik di sekolah. Keluarga memberi dampak signifikan pada kepribadian anak di sekolah dan diharapkan keterlibatan orang tua di sekolah ini dapat menyelaraskan program-program pendidikan yang dilaksanakan sesuai dengan harapan baik orang tua maupun pihak sekolah.

Anies mengatakan bahwa orangtua perlu terlibat dalam mengantar anak ke sekolah. Mereka juga harus berinteraksi dengan para guru tidak hanya di hari pertama sekolah. Gerakan tersebut kemudian didukung oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dan perusahaan swasta lain, sehingga orang tua tak perlu khawatir terlambat datang ke kantor masing-masing.[11] Kebijakan ini merupakan upaya untuk meningkatkan komunikasi antara orang tua dan guru yang mengajar dengan tujuan saling bekerja sama mengawasi kegiatan pelaksanaan pendidikan.

Kebijakan untuk meningkatkan interaksi antara orang tua dan guru sangat diperlukan, meskipun pada pelaksanaannya terkadang kurang memuaskan. Melibatkan orang tua dalam pendidikan di sekolah memang sudah lama dirintis melalui apa yang dikenal dengan Badan Penunjang Pelaksanaan Pendidikan (BP3) atau Persatuan Orang Tua dan Guru. Peran orang tua dalam pendidikan dan belajar anak melalui BP3 dapat ditingkatkan pada pembelajaran anak. Sebagai contoh, untuk meningkatkan pembelajaran anak, kerja sama antara sekolah dan orang tua dapat ditingkatkan melalui visitasi atau guru yang memberi tugas-tugas pekerjaan rumah secara jelas dan terarah.[12]

Keterlibatan dan peran serta masyarakat tentu merupakan upaya yang sangat diharapkan karena kerjasama antar kedua belah pihak sangat penting untuk menghasilkan peserta didik yang mampu menjadi memimpin bangsa pada masa yang akan datang. Sekolah, dalam hal ini guru dan kepala sekolah, juga harus menyadari bahwa masyarakat merupakan sumber daya dan untuk memanfaatkannya diperlukan perencanaan mulai dari yang sederhana sampai pada yang kompleks serta dari jangka pendek sampai jangka panjang,[13]

Upaya Anies “membuka kembali” peran serta masyarakat dalam mendidik calon pemimpin bangsa merupakan sebuah terobosan. Terobosan ini penting karena ada kecenderungan orang tua menyerahkan masalah pendidikan anaknya kepada sekolah. Jika ada yang salah terhadap anak, maka sekolahlah yang dipersalahkan.[14] Menjalin hubungan antara masyarakat dan sekolah merupakan bagian untuk meningkatkan program pendidikan yang diharapkan serta memperkecil timbulnya kesalahpahaman yang terjadi antara sekolah dan masyarakat dalam pembelajaran. Hubungan sekolah dengan orang tua dan masyarakat dalam kaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pendidikan harus dikelola secara baik sehingga dapat memberi manfaat yang besar bagi pendidikan anak dan bagi kemajuan masyarakat secara keseluruhan. Kebijakan ini merupakan suatu langkah yang tepat untuk menghasilkan hubungan interaktif antara masyarakat dan sekolah; artinya kerjasama tidak hanya diharapkan bermanfaat untuk satu pihak saja, namun juga memberi dampak positif bagi keduanya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengunjungi SD Negeri Percobaan 2 di Sleman, dalam rangkaian Kunjungan Kerja ke Yogyakarta pada September 2014

(Sumber: Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)

Anies Baswedan menggagas membentuk Direktorat Keayahbundaan untuk menguatkan peran orang tua dalam mendidik anak. Tujuan pembentukan direktorat ini untuk mengubah cara pendekatan orangtua dalam mendidik anak-anak mereka sesuai dengan karakternya, mengingat peran orang tua semakin berkurang karena kesibukan dalam dunia kerja.[15] Konsep untuk melibatkan masyarakat dalam kegiatan pendidikan juga dilakukan secara terbuka pada publik mengenai kegiatan pendidikan yang dilaksanakan oleh Kemdikbud. Anies membuat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuka diri untuk berdialog secara terbuka dengan masyarakat. Melalui kegiatan "Kopi Darat" yang diselenggarakan secara teratur isu-isu pendidikan bisa dibicarakan bersama antara praktisi, masyarakat, dan pejabat kementerian. Untuk memberi tahu publik tentang kondisi pendidikan di tingkat nasional, provinsi, ataupun kabupaten Anies membuat "Neraca Pendidikan". Melalui laman yang dikelola Kemdikbud ini masyarakat dapat memperoleh informasi tentang kinerja pendidikan.[16]

Kegiatan untuk membentuk karakter bangsa juga ditunjukkan dengan menggagas program membaca sebelum masuk kelas. Untuk mempersiapkan calon pekerja yang kreatif dan inovatif, Anies menempuh cara mengembangkan budaya baca di sekolah. Anak-anak diminta untuk membaca buku non-mata pelajaran selama 15 menit setiap hari sebelum jam pelajaran dimulai. Melalui pembiasaan ini diharapkan anak-anak akan cinta membaca.[17] Program tersebut dapat mendorong minat baca peserta didik untuk menghadapi persaingan dunia luar yang dirasakan cukup berat. Membaca buku non-mata pelajaran sangat penting untuk mengasah kreativitas siswa, sebab melalui bacaan fiksi ataupun nonfiksi ide-ide anak akan muncul. Ide-ide kreatif ini akan membuat anak-anak menjadi insan yang inovatif saat mereka memasuki dunia kerja.[18] Selain itu Anies Baswedan juga mengikutsertakan keterlibatan para penulis dan penerbit untuk turut serta terlibat dalam program peningkatan membaca ini. Upaya tersebut tidak berhenti pada pembuatan Peraturan Menteri tentang pembiasaan membaca, tetapi juga mengajak para penulis buku anak dan penerbit buku anak untuk memproduksi buku-buku bacaan yang baik. Anies menyediakan anggaran pembelian buku melalui Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).[19]

Maraknya kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat program Sekolah Aman. Program ini berupaya menciptakan lingkungan belajar sesuai dengan harapan peserta didik, orang tua, dan masyarakat agar mampu menumbuhkan bakat dan keterampilan sebagai masa persiapan masuk ke dunia kerja. Sekolah diwajibkan untuk mencantumkan sejumlah nomor telepon yang dapat digunakan oleh para siswa untuk melakukan pengaduan atas tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah.[20] Program sekolah aman ini juga merupakan salah satu perwujudan pendidikan yang didasarkan pada pemikiran Ki Hadjar Dewantara. Kampanye gerakan menggelorakan kembali konsep Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hadjar Dewantara untuk membuat sekolah tempat yang

Anies Baswedan menganggap penting peran orang tua dalam pendidikan. Rapat yang diadakan pada bulan Agustus 2013 ini secara khusus membahas tentang Pendidikan Orang Tua

(Sumber: Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)

menyenangkan. Untuk mendukung keadaan sekolah yang aman, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga menghapus adanya Masa Orientasi Sekolah (MOS), yang cenderung menjadi ajang "balas dendam" kakak kelas terhadap adik kelas. MOS yang dilakukan oleh Siswa/OSIS digantikan oleh Pengenalan Lingkungan Sekolah dari pihak sekolah untuk mengurangi perpeloncoan oleh kakak kelas.

Kebijakan pendidikan pada masa Anies Baswedan juga menyangkut pendidikan anak usia dini (PAUD). Pendidikan pada anak usia dini menjadi bagian penting karena usia dini merupakan titik awal suatu pendidikan. Karena pendidikan harus dimulai dari usia dini, maka PAUD di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pun diubah sebagai percontohan PAUD terbaik yang dikenal dengan PAUD Km O.[21]

Di samping itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melibatkan para tokoh yang dianggap mampu menangani permasalahan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kebijakan tersebut menarik mereka yang tidak terlibat secara langsung dalam dunia pendidikan namun mampu mengatasi masalah dengan secara "lelang terbuka". Hilmad Farid, seorang pegiat kebudayaan, merupakan salah satu contoh hasil lelang terbuka untuk jabatan Direktur Jenderal Kebudayaan yang berasal dari Non-PNS. Di samping itu tercatat nama Catharina Girsang, mantan Jaksa KPK sekaligus Kabiro Hukum KPK, diangkat sebagai Staf Ahli bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan yang ditugaskan untuk meninjau dan menyederhanakan berbagai aturan di Kemendikbud.

Atas

Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga yang merupakan realisasi dari gagasan dibentuknya Direktorat Keayahbundaan

(Sumber: Direktorat Sejarah)

Tengah dan Bawah

PAUD Mekar Asih di lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan dibentuk menjadi PAUD Percontohan dan diberi nama PAUD KM 0 pada saat Anies Baswedan menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

(Sumber: Direktorat Sejarah)

ENDNOTES

1 Jatikom, 2016.

2 Viva. 2016. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D. *[Online].* Diakses dari: https://www.viva.co.id/siapa/read/32-anies-baswedan.

3 Jatikom. 2016. Profil Biografi Anies Baswedan LENGKAP. *[Online].* Diakses dari: https://www.jatikom.com/2016/10/profil-biografi-anies-baswedan-lengkap.html.

4 Viva. *Loc.Cit.*

5 Ramadhan, dkk. 2016. *Personal Branding of Anies Baswedan Through Facebook And Twitter Account: Study Of Image Grid Analysis in Banjarmasin Society Aged 17-24 Years*. August 2016 Vol. 7 No. 3. DOI: 10.18196/jgp.2016.0037. Journal Of Government & Politics.

6 Jatikom, *Loc.Cit*.

7 *Ibid*.

8 Jatikom, *Loc.Cit*.

9 Mahpudz, A. 2005. "Corak Kurikulum dan Tenaga Pendidik Masa Depan di Indonesia". Dalam Andi Suwirta & Didin Saripudin (Editor), *Sejarah adalah Perubahan Penghormatan 70 Tahun Prof. Dr. H. Ismaun, M.Pd* (hlm. 31-56). Bandung: Historia Utama Press, Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia.

10 Iradhatie, 2016.

11 Iradhatie, W. (2016, 11 Agustus). "Beragam Kebijakan Kontroversial Mendikbud". *[Online].* Diakses dari: https://news.okezone.com/read/2016/08/11/65/1460907/beragam-kebijakan-kontroversial-mendikbud (12 Mei 2018)

12 Wahab, A. A. 2011. "Gagasan dan Pemikiran Pembangunan Pendidikan di Indonesia". Dalam Endang Danial & Syaifullah Syam (Editor), *Penghargaan dan Penghormatan 68 Tahun Prof. Dr. H. Abdul Azis Wahab, M. A. (Ed.)* (hlm. 325-335). Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Jurusan PKn FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia.hlm. 334).

13 *Ibid*., hlm. 328.

14 Widagdo, H. (2016, 9 Agustus). "Tiga Kebijakan Anies Baswedan yang Layak Dilanjutkan". *[Online].* Diakses dari: https://indonesiana.tempo.co/read/84811/2016/08/09/handokowidagdo/tiga-kebijakan-anies-baswedan-yang-layak-dilanjutkan (12 Mei 2018).

15 Susanti, A. (2016, 27 Juli). "Reshuffle Kabinet: Ini Program Unggulan Anies Baswedan Selama Jadi Mendikbud". *[Online].* Diakses dari: https://news.okezone.com/read/2016/07/27/65/1448003/reshuffle-kabinet-ini-program-unggulan-anies-baswedan-selama-jadi-mendikbud (12 Mei 2018).

16 Widagdo. *Loc.Cit*.

17 *Ibid*.

18 *Ibid*.

19 *Ibid*.

20 Susanti. *Loc.Cit*.

21 *Ibid*.

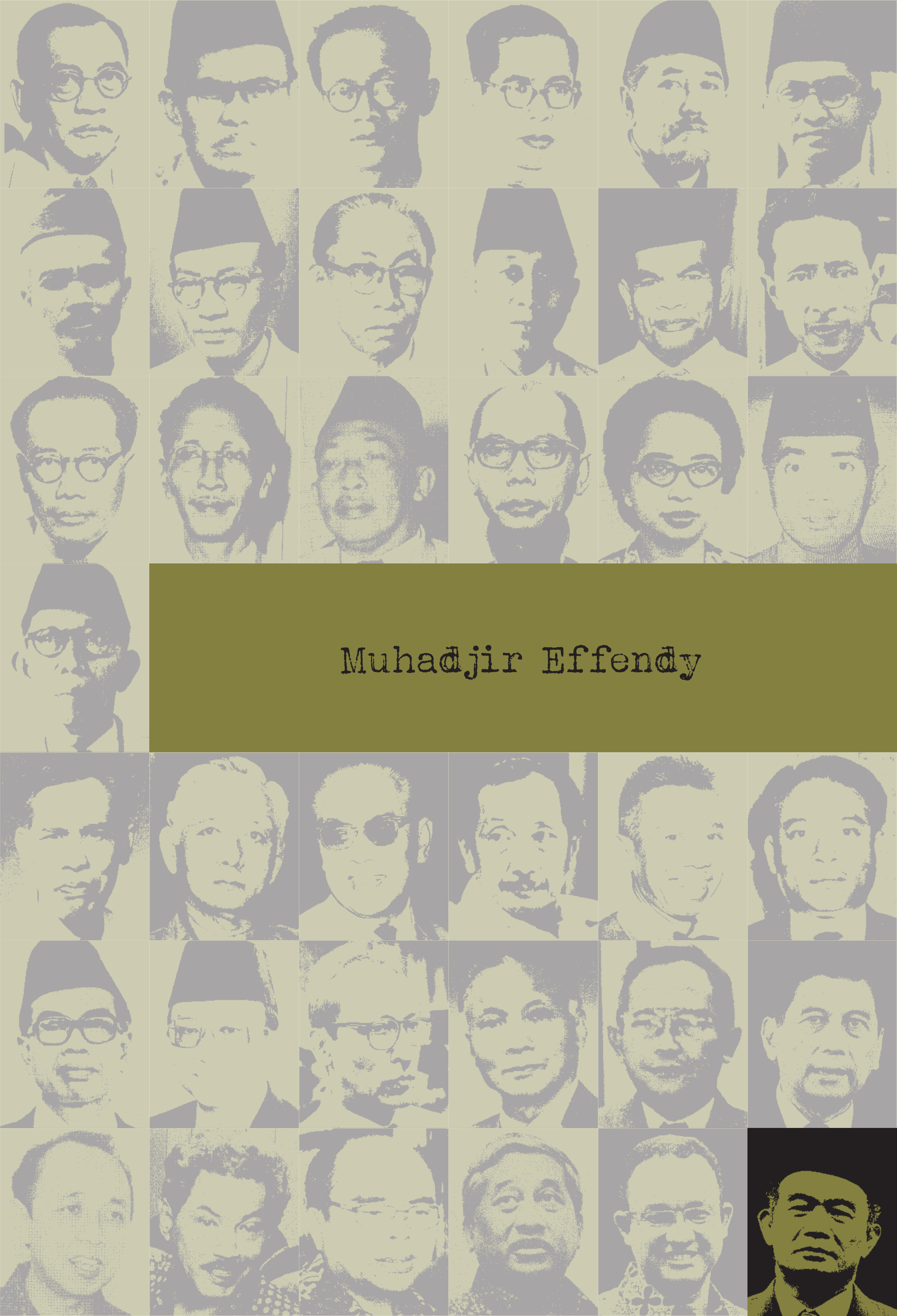

Muhadjir Effendy

Masa Jabatan
27 Juli 2016 – sekarang

Muhadjir Effendy

Prof. Dr. Drs. Muhadjir Effendy, MAP menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Republik Indonesia (RI) pada masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam Kabinet Kerja *Reshuffle* Ke-3, menggantikan Anies Baswedan, ketika Presiden Joko Widodo melakukan perombakan kabinet di beberapa kementerian, termasuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Sebelum menjabat sebagai menteri ia menjadi Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) selama tiga periode (tahun 2000–2016) dan menjadi Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Ia dikenal sebagai seorang intelektual Muslim yang memiliki kepakaran lintas-ilmu dengan menguasai bidang agama, sosiologi, politik, dan bahkan militer.

Muhadjir Effendy lahir di Madiun, Jawa Timur, pada tanggal 29 Juli 1956, putra keenam dari sembilan bersaudara keluarga Soeroja dan Sri Soebita. Pendidikan formalnya dimulai di SD Al-Islam Madiun dan selesai pada tahun 1968, kemudian Pendidikan Guru Agama Islam Negeri (PGAN) 6 tahun dan lulus pada tahun 1974. Ia melanjutkan kuliah di Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Malang, yang kini berubah menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dan memperoleh gelar Sarjana Muda (BA) pada tahun 1978. Gelar sarjana diperoleh di IKIP Negeri Malang, yang kini berubah menjadi Universitas Negeri Malang, pada tahun 1982. Pendidikan Strata 2 diselesaikan di Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM) dan memperoleh gelar Magister Administrasi Publik (MAP) pada tahun 1996. Adapun pendidikan Strata 3 diselesaikan di Jurusan Ilmu-ilmu Sosial Universitas Airlangga dan memperoleh gelar Doktor di Bidang Sosiologi Militer dengan disertasi *Pemahaman Tentang Profesionalisme Militer di Tingkat Elit TNI-AD*. Selain Pendidikan formal, Muhadjir beberapa kali mengikuti kursus di luar negeri, antara lain di Victoria University, British Columbia, Canada (1991), dan di National Defence University, Washington DC (1993).

Sosok Muhadjir Effendy lekat dengan sebutan aktivis atau penggerak organisasi, bahkan hingga ketika menjadi seorang pejabat negara. Semasa menjadi pelajar dan mahasiswa ia menjadi aktivis Pelajar Islam Indonesia (PII) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Ia juga berperan aktif dalam organisasi kemasyarakatan dan keagamaan modern, yakni Muhammadiyah, dan menjadi salah satu Pimpinan Pusat. Sesuai keahliannya, Muhadjir terpilih sebagai ketua yang membidangi pendidikan, yang membawahi lebih dari 170 Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) dan ribuan Sekolah Dasar serta Sekolah Menengah Muhamadiyah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu keahlian lain yang dimiliki oleh Muhadjir adalah kemampuan dan produktivitas menulis. Banyak buku yang dihasilkan dan diterbitkannya, antara lain *Dunia Perguruan Tinggi dan Kemahasiswaan* serta *Bunga Rampai Pendidikan*. Muhadjir juga dikenal sebagai seorang kolumnis yang menyoroti masalah agama, pendidikan, sosial, politik, dan kemiliteran.

Penempatannya sebagai Ketua Pendidikan Muhammadiyah telah diperkirakan banyak pihak, sebab sejak lama Muhadjir telah berkecimpung dalam dunia pendidikan, khususnya Pendidikan Tinggi. Sebagai contoh, ia terlibat dalam pengelolaan salah satu perguruan tinggi Muhammadiyah yang kini menjadi salah satu universitas Muhammadiyah terbaik di Indonesia dan perguruan tinggi swasta terunggul di Jawa Timur, yaitu UMM.

Sebagian besar waktu kerja Muhadjir dihabiskan di UMM bersama dengan Prof. A Malik Fadjar, Prof Imam Suprayogo, Haji Sukiyanto (almarhum), dan Kiai Haji Abdullah Hasyim (almarhum). Muhadjir muda turut serta mengembangkan UMM, melanjutkan perjuangan generasi perintis sebelumnya, seperti Kiai Bedjo Darmoleksono, A. Gafar, K.H. Mohammad Goesti, Kapten Mohammad Tahir, Ali Sacheh, Suyuti Chalil, A. Masyhur Effendy, Amir Hamzah Wiryosukarto, Sofyan Aman, Profesor Masjfuk Zuhdi, Profesor Kasiram, dan sederet tokoh Muhammadiyah Malang lainnya.

Atas

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy memberikan bantuan alat olah raga kepada siswa pada Kunjungan Kerja ke Papua pada tahun 2016.

(Sumber: Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat, Sekretariat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)

Tengah

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mendampingi Ibu Negara, Ibu Iriana Joko Widodo selaku Bunda Paud, dalam acara Anugerah PAUD Nasional 2016, 29 September 2016. Acara ini merupakan kegiatan tahunan yang diadakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberikan penghargaan kepada para pegiat pendidikan anak usia dini Effendy

(Sumber: Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat, Sekretariat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)

Bawah

Beberapa siswa Sekolah Dasar menunjukkan Kartu Indonesia Pintar pada Kunjungan Kerja Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi ke Papua pada tahun 2016. Program Indonesia Pintar merupakan salah satu program pemerintah Presiden Joko Widodo untuk membantu anak usia sekolah (usia 6 - 21 tahun) yang berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin agar dapat memperoleh Pendidikan

(Sumber: Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat, Sekretariat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)

Anies Baswedan dan Muhadjir Effendy dalam acara Serah Terima Jabatan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Effendy

(Sumber: Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat, Sekretariat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)

Muhadjir mengawali kariernya di UMM sebagai karyawan honorer, dosen, dan kemudian menjabat sebagai Pembantu Rektor III tahun 1984 pada saat rektor dijabat oleh Malik Fadjar. Ia memegang jabatan rektor di UMM tiga periode, yakni 2000-2004, 2004-2008, dan 2008-Februari 2016.

Muhadjir mengatakan bahwa kita harus mengubah cara berpikir dari pendidikan di dalam tembok sekolah menjadi pembelajaran seumur hidup, termasuk fokus baru pada pendidikan remaja dan orang dewasa. Sebagai menteri pendidikan ia perlu memastikan bahwa pendidikan harus memberi keterampilan yang lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan ekonomi pada era globalisasi ketika dunia kerja menuntut kompetensi tinggi dari karyawannya. Belajar tidak hanya berhenti di sekolah karena pada era globalisasi semua orang perlu terus belajar di masyarakat dan tempat kerja agar mampu berinovasi dan menanggapi tantangan yang paling mendesak pada zaman ini.

Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo menempatkan Sembilan Agenda Strategis yang disebut "Nawa Cita". Salah satu target agenda diarahkan dan komitmen untuk peningkatan kualitas hidup rakyat Indonesia dengan meningkatkan kualitas pendidikan melalui program "Indonesia Cerdas", dengan pendidikan wajib 12 tahun. Pemerintah juga berkomitmen merevolusi karakter bangsa melalui kebijakan restrukturisasi kurikulum pendidikan nasional dengan, antara lain, memastikan kualifikasi dan kesejahteraan guru.

Kemdikbud tidak hanya mempertimbangkan kesetaraan, tetapi juga implikasi ekonomi dan lingkungan karena harus dapat dipastikan bahwa keterampilan yang diberikan akan dapat meningkatkan perekonomian bangsa. Oleh karena itu ketika berbicara tentang peningkatan kualitas pendidikan, termasuk meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan yang layak, pendidikan harus memberi keterampilan dan pengetahuan penting yang dapat mendukung pergeseran ke industri yang lebih peduli lingkungan dan menemukan solusi baru untuk masalah lingkungan.

KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Realisasi Program Kemdikbud pada tahun 2017 dan 2018 antara lain sebagai berikut.

1. Realisasi daya serap Angaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2017 sebesar 97,09%.
2. Dana tersebut digunakan untuk pembiayaan program Indonesia *pinter* (Rp 9,54 triliun), penguatan vokasi (Rp 320 miliar), sarana dan prasarana pendidikan (Rp 6,6 triliun), penguatan guru (Rp 5,8 triliun), kebudayaan dan bahasa (Rp 1,4 triliun), peningkatan mutu dan pendidikan karakter (Rp 1,8 triliun), serta Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Rp 196 miliar).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy memberikan penjelasan mengenai wacana Full Day School di Restoran Batik Kuring, Kompleks SCBD, Jakarta Pusat pada tanggal 9 Agustus 2016

(Sumber: Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat, Sekretariat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)

3. APBN 2018 diarahkan pada program prioritas nasional berupa akses pendidikan, mutu pendidikan, kebudayaan, dan bahasa. Untuk tahun 2018 Kemdikbud memetakan perbaikan ruang kelas rusak serta standar pemenuhan sarana dan prasarana.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Kemdikbud segera mengatasi masalah kekurangan guru, pendistribusian guru, dan kesejahteraan guru non-PNS. Selain itu DPR juga minta Kemdikbud segara mewujudnyatakan berbagai undang-undang (UU), antara lain UU perfilman, UU sistem perbukuan, UU penyandang disabilitas, dan UU pemajuan kebudayaan. Untuk meringankan biaya pendidikan kemudian dikeluarkanlah kebijakan *voucher* Biaya Sekolah atau Rekening Tabungan Pendidikan. Meskipun ada peningkatan yang signifikan dalam pendanaan negara dalam beberapa tahun terakhir, namun nilai rata-rata yang dicapai oleh siswa menengah dalam ujian nasional (UN) menyusut dari 61,29 pada tahun 2015 menjadi 54,78 pada tahun 2016. Selain itu beberapa orang tua bahkan dipaksa membayar hingga Rp 20 juta hanya untuk menempatkan anak mereka di sekolah pilihan. Prioritas Kemendikbud adalah mengatasi perjuangan Indonesia untuk memberi pendidikan yang berkualitas kepada anak-anak. Perubahan cara sekolah umum yang didanai melalui *voucher* sekolah atau sistem ESA akan meningkatkan prestasi akademik para siswa dan menghindari korupsi.

Program Pembangunan Pendidikan dilaksanakan dengan menyediakan dana hampir Rp 959 miliar dengan mengirimkan 1.200 guru di garis depan Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (SM3T) untuk memprioritaskan anak-anak di daerah agar mendapatkan hal yang sama seperti di kota. Pemerataan pendidikan kota dan daerah serta distribusi guru di Indonesia masih menjadi pokok persoalan di antara berbagai permasalahan yang ada.

Dalam kaitan dengan perluasan akses pendidikan, terutama pada tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia, Kemendikbud menetapkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur menjadi tempat melanjutkan pendidikan bagi warga Indonesia di Malaysia. Kebijakan ini disampaikan Mendikbud Muhadjir pada saat peresmian PKBM di KBRI Kuala Lumpur yang dihadiri oleh perwakilan organisasi kemasyarakatan (ORMAS), Persatuan Pelajar Indonesia (PPI), staf KBRI Kuala Lumpur, dan Dharma Wanita Persatuan (DWP) KBRI. Pendidikan memiliki peran penting dalam mengatasi *generation lost*, dalam arti jika orang tua tidak berpendidikan dan anaknya juga sama maka hal itu merupakan *generation lost*. Mendikbud juga menegaskan bahwa melalui pendidikan kita mampu menghapus lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*). PKBM KBRI Kuala Lumpur didirikan dalam rangka memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat Indonesia di Malaysia untuk memperoleh pendidikan. PKBM KBRI Kuala Lumpur membuka layanan pendidikan nonformal (PNF) secara gratis untuk bimbingan belajar hingga penyelenggaraan ujian kesetaraan Paket A (jenjang SD), Paket B (jenjang SMP), dan Paket C (jenjang SMA).

Selama menjadi Mendikbud Muhadjir Effendy mengeluarkan beberapa kebijakan antara lain sebagai berikut:

1. Kebijakan Full Day School

Kebijakan yang dikenal dengan istilah *full day school* menimbulkan reaksi keras dari masyarakat. Dalam *full day school*, siswa belajar selama lima hari dengan jam belajar mulai pagi hingga sore. Terjadi penolakan secara keras yang dilakukan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan pesantren yang segaris dengan PBNU. PBNU menolak kebijakan Lima Hari Sekolah yang dikeluarkan Kemendikbud melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 23 Tahun 2017. Hal yang menjadi keberatan ialah menyangkut biaya dan waktu. Biaya berkaitan dengan siswa harus makan di sekolah sehingga ada tambahan biaya yang dikeluarkan orang tua, sedang waktu pelaksanaan belajar akan bentrok—khususnya bagi siswa-siswa Sekolah Dasar—dengan waktu siang hari bagi yang harus belajar di sekolah diniyah atau sekolah agama. PBNU agak keras menyikapi kebijakan ini karena banyak sekolah agama yang dilaksanakan oleh organisasi NU atau yayasan yang bernaung di bawah NU.

Kebijakan yang dianggap kontroversial ini bagi Muhadjir memberi dampak baik positif maupun negatif. Ia mengganggap bahwa dengan pemberlakuan lima hari sekolah dalam seminggu dapat meningkatkan penguatan karakter peserta didik. Melalui lima hari dalam sekolah dan delapan jam pembelajaran setiap hari melalui perluasan materi ko-kulikuler dan ekstra-kulikuler dapat membantu anak melengkapi kegiatan belajar-mengajar. Hal ini pun mendapat sambutan kurang baik dari orang tua siswa dan dari para pakar serta praktisi pendidikan. Jika kebijakan ini diberlakukan maka akan ada 50 juta anak terdampak dari kebijakan ini. Selain itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengingatkan bahwa Muhadjir perlu melakukan evaluasi dan pengkajian lebih lanjut karena akan berdampak pada madrasah dan pesantren; apalagi lagi sekolah-sekolah yang berada di desa-desa, pasti memerlukan kesiapan yang matang dalam pelaksanaan *full day school*.

Dasar kebijakan *full day school* adalah keinginan Muhadjir menekankan pendidikan karakter. Ia ingin mengubah porsi pendidikan tingkat sekolah dasar menjadi 70% pendidikan karakter dan 30% pendidikan pengetahuan, sedang untuk sekolah menengah ia menginginkan 60% pendidikan karakter dan 40% pendidikan umum. Ia menganggap bahwa keadaan generasi penerus saat ini sangat ironis karena terkikisnya budaya sopan santun, tanggung jawab, jujur, dan sebagainya akibat pengaruh globalisasi yang tidak mendapat filter baik dari sekolah, orangtua, ataupun diri sendiri (Ni Wayan, 2018: 2-5). Melalui pendidikan seseorang bisa mendapat suatu kemampuan dasar untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia serta mempersiapkan diri untuk mengikuti pendidikan lanjutan (Wahab, 2011: 317).

Munculnya beragam tanggapan atas kebijakan *full day school* sangat wajar mengingat kebijakan tersebut juga mempengaruhi kesiapan tenaga kependidikan, fasilitas sekolah, dan aspek bisnis. Semangat otonomi daerah juga menjadi kendala dalam penerapan kebijakan tersebut. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin merasa berkepentingan menjaga keberadaan madrasah diniyah dan pesantren agar tidak terdampak negatif oleh kebijakan sekolah lima hari. Kalangan pondok pesantren dan madrasah merasa kebijakan sekolah lima hari bisa merugikan mereka karena kebijakan sekolah lima hari membuat waktu sekolah berlangsung sampai sore. Muhadjir berpendapat sebaliknya: madrasah diniyah justru diuntungkan karena akan tumbuh menjadi salah satu sumber belajar melalui sinergi dengan sekolah dalam menguatkan nilai karakter religius.

Akibat banyaknya keberatan terhadap *full day school*, maka kebijakan sekolah lima hari diganti dengan Peraturan Presiden (Perpres). Rancangan Perpres disusun tim dari Kemendikbud, Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan organisasi masyarakat keagaman. Tim bertugas menyerap pendapat dan berkomunikasi dengan seluruh pihak terkait, seperti MUI, PBNU,

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy tampak berjabat tangan dengan para pelajar pada Upacara Peringatan Hari Guru Nasional 2016

(Sumber: Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat, Sekretariat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)

dan PP Muhammadiyah. Perpres akan mengatur penguatan posisi madrasah diniyah dan cakupannya direncanakan meluas, termasuk penangkalan terhadap paham-paham radikalisme.

2. Kebijakan Mengenai UN

UN dianggap sebagai salah satu penentu keberhasilan siswa selama tiga tahun mengenyam pendidikan, padahal UN hanya dilaksanakan dalam tiga hari, sehingga memperoleh kritik. Hampir sebagian besar siswa mengeluhkan sulitnya soal Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), apalagi ditambah soal uraian. Tiga provinsi memperoleh pencapaian nilai terendah UNBK tahun 2017, yaitu Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat. Muhadjir Effendy mengeluarkan wacana moratorium UN. Isu ini pun penyulut setuju dan tidak setuju di tengah penurunan mutu pendidikan yang merata secara nasional untuk jenjang SMP dan SMA. Muhadjir mensyinyalir nilai UN yang diprioritaskan seringkali didongkrak agar menyamai atau bahkan melebihi standar yang ditetapkan, walaupun mengesampingkan sisi etika yang seharusnya dijunjung tinggi dalam dunia pendidikan. Hal inilah yang mendasari wacana moratorium UN. Kebijakan ini pun dibatalkan oleh Presiden Joko Widodo sehingga UN tetap diselenggarakan sebagai parameter kelulusan. UN tetap dilaksanakan dengan berbasis komputer. Pemerintah, sebagaimana dikatakan Muhadjir setelah rapat kabinet di Istana Bogor (4 Januari 2017), menargetkan pelaksanaan UNBK pada tahun 2017 80% untuk jenjang SMA/SMK dan 30% SMP dari seluruh sekolah yang ada di Indonesia.

Muhadjir membuat kebijakan peningkatan kualitas soal UN dengan membuat 20% soal dengan standar internasional kategori *high order thinking skill* (HOTS), sehingga soal-soal UNBK menjadi lebih sulit bagi siswa. Dasar pembuatan soal adalah standar Programme for International Student Assessment (PISA) yang diselenggarakan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Soal jenis HOTS merupakan soal standar PISA yang sudah lama diterapkan di berbagai negara maju. Dengan soal-soal kategori HOTS diharapkan mendorong siswa berpikir kritis, kreatif dan inovatif, kemampuan berkomunikasi, kemampuan bekerja sama, serta percaya diri. Kemendikbud melakukan kebijakan tersebut untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang dianggap masih tertinggal. Pemerintah berharap kebijakan peningkatan kualitas soal UN akan menghasilkan SDM yang handal, yang punya daya juang tinggi, dan daya tubuh tahan banting sehingga mampu bersaing dengan bangsa-bangsa besar yang lain dan ke depan menjadi bangsa maju. Soal HOTS melatih siswa terbiasa belajar mengahadapi dan memecahkan persoalan yang baru dengan nalar kritis dan kreatif. Standar capaian yang rendah hanya akan membentuk generasi lembek dan takut mengambil risiko sehingga mudah menyerah saat berhadapan dengan hal sulit.

Mendikbud Muhadjir Effendy di dampingi Menko PMK Puan Maharani dan Wakil Gubernur Bengkulu Rohidin Mersya dalam kegiatan Pembukaan Lawatan Sejarah Nasional 2017

(Sumber: Direktorat Sejarah)

Kebijakan tersebut ternyata juga menuai pro dan kontra di tengah masyarakat; bahkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebut UNBK Matematika SMA sebagai malpraktik pendidikan. Peserja ujian menganggap materi soal terlalu sulit dan melenceng dari apa yang sudah dipelajari di sekolah. Beberapa ahli juga menyatakan bahwa soal berbasis HOTS tidak harus sulit dan soal yang sulit belum tentu HOTS. Mereka menyesalkan pernyataan Mendikbud yang menganggap enteng keluhan siswa dan cenderung menyederhanakan masalah. Penerapan soal HOTS harus dibarengi dengan perbaikan kurikulum, peningkatan kualitas guru, dan sarana-prasarana pendidikan penunjang. Jika ingin menerapkan ujian berstandar internasional, maka metode pembelajarannya pun harus berstandar internasional.

Muhadjir menanggapi kritikan tersebut dengan menyatakan bahwa penyisipan materi soal berstandar internasional harus didukung oleh kesiapan guru dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar, sarana-prasarana, dan metodologi pembelajaran yang relevan. Setiap tahun pemerintah berupaya memperbaiki kelemahan dalam sistem pendidikan nasional.

3. Sistem Zonasi Sekolah

Ombudsman RI menemukan 14 masalah administrasi dan dugaan tindak pidana dalam proses penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2017, di antaranya pungutan liar biaya masuk sekolah, "jual beli" kursi antara kepala sekolah dan orang tua murid, dan penyalahgunaan wewenang pejabat daerah yang meminta jatah kursi. Selain itu penerapan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang PPDB yang berlandaskan pada zonasi juga tidak berjalan lancar, karena aturan tersebut terbit terlalu dekat dengan waktu pelaksanaan PPDB.

Salah satu kebijakan Muhadjir adalah sistem zonasi sekolah. Kemendikbud menerapkan sistem zonasi untuk PPDB 2018. Sistem zonasi PPDB didasarkan pada radius terdekat rumah calon siswa ke sekolah. Sistem zonasi memprioritaskan kedekatan jarak antara rumah peserta didik dan sekolah. Sekolah yang dilaksanakan pemerintah daerah (Pemda) wajib menerima peserta didik yg bertempat tinggal pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% dari total jumlah keseluruhan PPDB yang diterima. Zonasi akan dijadikan landasan untuk program wajib belajar 12 tahun.

Kemendikbud berharap Pemda melalui Dinas Pendidikan menerapkan peraturan zonasi. Meskipun demikian Muhadjir memberikan kelonggaran bagi Pemda yang keberatan melaksanakan zonasi ini, asal ada persetujuan Kemendikbud. Dalam pelaksanaanya, sistem zonasi yang semula diterapkan di sekolah negeri akan diperluas, yakni tidak hanya mengatur keberadaan sekolah negeri tapi juga sekolah swasta. Kebijakan sistem zonasi pada sekolah swasta sifatnya tidak wajib karena mereka dapat memilih

apakah ingin bergabung dengan sistem zonasi atau tidak, namun Muhadjir akan meninjau ulang bantuan operasional sekolah (BOS) bagi sekolah swasta yang tidak melaksanakan zonasi PPDB.

Penerapan sistem zonasi bukan hanya upaya untuk mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan pada jenjang SD/SMP/SMK/SMK sederajat, tetapi juga untuk mengurangi dampak sosial, seperti tawuran antarpelajar, kemacetan, dan memberi peluang kepada guru untuk memenuhi kekurangan jam mengajar. Dampak lainnya adalah secara perlahan sistem zonasi akan menghapus predikat sekolah unggulan dan nonunggulan. Sistem zonasi juga dapat menghilangkan beban biaya akomodasi yang harus dikeluarkan orang tua setiap hari. Di samping itu sistem zonasi menjadikan peserta didik yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata akan menyebar di semua sekolah.

Meskipun demikian kebijakan zonasi pun mendapat banyak tanggapan, di antaranya sistem zonasi dinilai menghalangi siswa dengan nilai bagus mendapatkan sekolah yang diinginkan.

4. Perpres No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter menjadi perhatian Muhadjir seperti halnya para Mendikbud sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut kemudian keluarlah Perpres No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Perpres tersebut mengamanatkan guru sebagai sosok utama dalam satuan pendidikan. Mereka memiliki tanggung jawab membentuk karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga. Di samping itu guru dan tenaga kependidikan harus mampu mengelola kerjasama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat untuk mengobarkan Gerakan Nasional Revolusi Mental. Empat kementerian dan lembaga negara sepakat melakukan penandatanganan nota kesepahaman tentang penanganan narkoba dan terorisme di lingkungan pendidikan. Keempat lembaga negara—Kemendikbud, Kemenag, Badan Narkotika Nasional, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme—tersebut sepakat memaksimalkan pencegahan masuknya narkoba dan paham terorisme di lingkungan pendidikan melalui kurikulum.

Mendikbud Muhadjir Effendy menekankan pentingnya penguatan pendidikan karakter dan literasi yang merupakan bagian dari Program Nawacita Presiden Joko Widodo sebagaimana tertuang dalam Perpres No. 87 Tahun 2017. Muhadjir berpandangan bahwa penguatan karakter dan literasi warga negara merupakan bagian penting yang menjadi roh dalam kinerja pendidikan dan kebudayaan. Ia mengajak para pelaku pendidikan dan kebudayaan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman memasuki Revolusi Industri 4.0 yang bertumpu pada *cyber-physical system*. Revolusi Industri 4.0 bertumpu pada sistem dunia siber dan teknologi digital. Untuk itulah dunia pendidikan perlu didukung oleh program reformasi sekolah, peningkatan kapasitas dan profesionalisme guru, kurikulum yang dinamis, sarana dan prasarana yang andal, serta teknologi pembelajaran yang mutakhir. Selain itu gencarnya pembangunan infrastruktur harus diimbangi dengan pembangunan SDM yang terencana serta pemerataan pembangunan.

Dalam menyongsong industri 4.0, Indonesia harus membangun kemampuan anak didik untuk meningkatkan kebiasaan membaca sehingga mampu berpikir kreatif, karena era revolusi industri 4.0 ditandai dengan penggunaan secara masif teknologi digital dan semakin strategisnya peran logaritma. Muhadjir mengajak masyarakat, terutama guru dan tenaga kependidikan, menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi yang begitu cepat dan dinamis.

5. Kebijakan Pembangunan Kebudayaan

Indonesia merupakan negara yang kaya raya dalam hal kebudayaan. Hal tersebut diakui oleh Asisten Direktur Jenderal UNESCO Fransesco Bandarin, yang mengatakan bahwa Indonesia sebagai negara

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak hanya mendukung tetapi menjadi motor bagi Gerakan Literasi Nasional. Tampak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy sedang membaca buku yang ditampilkan dalam Indonesia Internasional Book Fair 2016. Acara ini diadakan pada tanggal 28 September-2 Oktober 2016 di Assembly Hall Jakarta Convention Center.

(Sumber: Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)

super power 'adidaya' kebudayaan. Muhadjir berpandangan bahwa kebudayaan yang maju akan membuat pendidikan di Indonesia semakin kuat. Jika pendidikan Indonesia subur dan rindang, akar kebudayaan akan lebih menghujam kian dalam di tanah tumpah darah.

RUU Kebudayaan yang diajukan pemerintah sejak 1982 akhirnya disahkan DPR menjadi Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan pada tahun 2017. UU tersebut mengamanatkan bahwa untuk memajukan kebudayaan diperlukan langkah strategis berupa upaya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian. Dengan disahkannya UU tersebut berarti kebutuhan untuk menangani kegiatan budaya menjadi lebih sistematis. Sehubungan dengan hal itu Kemendikbud mengusulkan kepada DPR agar anggaran untuk memajukan kebudayaan pada tahun anggaran 2019 terpisah dari 20% anggaran pendidikan nasional, karena selama ini anggaran untuk memajukan kebudayaan melekat pada anggaran pendidikan nasional. Pemerintah menyiapkan dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp 1 triliun untuk memajukan bidang kebudayaan. Dana tersebut berasal dari APBN tahun anggaran 2019. Pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi, sesuai amanat UU No. 5 Tahun 2017, harus menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) yang akan menjadi salah satu landasan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

6. Mutasi Guru

Pada tahun ajaran baru 2018/2019 Kemdikbud akan merotasi dan memutasi guru secara bertahap, walaupun penerapan kebijakan tersebut diperkirakan tidak akan berjalan lancar, sebab untuk memindahkan seorang guru SMA/SMK harus mendapat persetujuan pemerintah provinsi dan untuk guru SD/SMP menjadi wewenang pemerintah kota/kabupaten. Sementara itu kepala daerah tidak punya komitmen yang sama kuat, atau setidaknya berbeda pandangan, tentang bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan. Aturan perpindahan akan ditentukan pada jenjang apa guru yang bersangkutan mengajar. Untuk guru SMA/SMK sederajat, mutasi sangat mungkin dilakukan antarsekolah di dalam satu provinsi, sedangkan untuk guru perputaran guru SD/SMP dilakukan antarsekolah di dalam lingkup kabupaten/kota.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari semangat rotasi dan mutasi sesuai dengan wacana pemerataan distribusi guru berkualitas. Rotasi dan mutasi berfungsi untuk memetakan kebutuhan guru di setiap daerah. Selain untuk memeratakan distribusi guru kualitas, rotasi dan mutasi guru sangat penting untuk mendukung penerapan sistem zonasi PPDB. Seorang guru yang berkualitas dapat agar mutu para guru di tempat baru dapat ikut meningkat mendorong dan memandu guru lain di sekolah yang baru

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy membuka Konser Akbar Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Tiga Stanza pada tanggal 28 Oktober 2017 di Aula Simfonia, Kemayoran, Jakarta. Pada acara ini Lagu Indonesia Raya Tiga Stanza disosialisasikan.

(Sumber: Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)

7. Revitalisasi SMK

Pemerintah terus berupaya mendorong kualitas daya saing SDM. Salah satu caranya dengan mendorong penguatan pendidikan vokasi. Penguatan pendidikan vokasi menjadi salah satu prioritas kebijakan pendidikan tahun 2018. Selain pembenahan kurikulum dan peningkatan kualitas guru, ada peningkatan kemitraan dengan industri. Kurikulum SMK dibuat lebih luwes serta lebih peka terhadap perubahan kebutuhan dunia kerja. Kurikulum dibuat setidaknya dengan perbandingan 60 : 40; sebanyak 60% berupa kerja praktik di dunia industri dan 40% berupa teori di kelas.

Berkaitan dengan program *teaching factory*, pemerintah mendorong tiap SMK memproduksi barang dan/atau jasa yang dibutuhkan industri sesuai standar yang dibutuhkan industri dan/atau perusahaan jasa. Pemerintah rencanakan semua SMK memiliki barang produksi sendiri, baik bentuk utuh maupun *spare part* 'suku cadang' dengan standar industri. SMK di Malang, Jawa Timur, merupakan salah satu contoh program *teaching factory*. Sekolah tersebut saat ini sudah dapat memproduksi mesin pertanian dan bekerja sama dengan sebuah pabrik mesin pertanian.

Implementasi Revitalisasi SMK merupakan wujud pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas SDM. Inpres tersebut menginstruksikan kepada 12 kementerian, 1 lembaga, dan 34 gubernur untuk mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam merevitalisasi SMK. Dalam RAPBN 2018, pemerintah mengalokasikan anggaran hingga Rp 6 triliun untuk program penguatan pendidikan vokasi dengan rincian Rp 1,79 triliun untuk kurikulum, pelatihan, dan peningkatan tenaga guru, serta Rp 4,3 triliun untuk peningkatan sarana dan prasarana.

Sebagai langkah awal Mendikbud Muhadjir Effendy mendukung DKI Jakarta menjadi salah satu percontohan Revitalisasi SMK. DKI Jakarta menjadi *pilot project* karena memiliki wilayah yang ideal antara jumlah SMK dan dunia usaha/dunia industri yang relatif seimbang. Dengan program ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menambah gedung SMK berikut jumlah siswa SMK, yang secara keseluruhan pada 2022 akan ada 42 gedung SMK baru.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy memberikan sambutan acara Peningkatan Kapasitas SDM Pendidikan Program Penguatan Pendidikan Karakter di Hotel Santika, pada tanggal 27 September 2016.

(Sumber: Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)

PENUTUP

Oleh Anhar Gonggong[1]

Pendidikan Yang Mencerahkan Warga Terdidik Menuju dan Mewujudkan Hari Depan Indonesia Merdeka

1. PENDAHULUAN: MEREKA TELAH MEMBERIKAN GAGASAN DAN KARYANYA

Sebelum melanjutkan uraian singkat pada lembar-lembar selanjutnya ada baiknya memberi catatan tentang “epilog” dan “mencerahkan” karena kedua kata itu berkaitan erat dengan buku ini, yang berisi riwayat dan karya mereka selama menduduki jabatan Menteri Pendidikan yang diamanahkan kepada mereka dalam waktu tertentu. Epilog adalah 1) bagian penutup pada karya sastra, yang fungsinya menyampaikan intisari cerita atau menafsirkan maksud karya itu oleh seorang aktor; 2) pidato singkat pada akhir drama yang memuat komentar tentang apa yang dilakukan; dan 3) peristiwa terakhir yang menyelesaikan peristiwa terakhir (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Depdikbud, 1998, hlm. 268); sedang mencerahkan (cerah = terang, jernih) adalah menjadikan terang, menjadikan jernih (*Ibid*., 186).

Jika mengacu pada keterangan di atas, maka pendidikan yang dimaksudkan pada “epilog” ini ialah bagian akhir buku ini yang memberikan keterangan penutup tentang makna buku yang mencatat secara singkat riwayat dan karya-karya mereka selama jangka waktu menduduki jabatannya; juga untuk membuka terang dan/atau jernih pikiran.

Bagi kita—dalam proses menuju dan menjadi bangsa-negara Indonesia—sejak 1945-sekarang, ketika kita memasuki awal abad ke-20, tampillah beberapa warga anak negeri jajahan bangsa asing, bangsa Belanda, dan nama negeri kita pada waktu itu diberikan oleh mereka sejak 1800: Nederlandsch–Indië (Hindia Belanda). Warga negeri jajahan Hindia Belanda yang tampil ke arena depan untuk mengubah nasib sesama warganya adalah warga yang mendapat kesempatan memasuki lembaga pendidikan yang diadakan oleh penguasa kolonial ketika itu. Seperti diketahui, ada kebutuhan untuk memenuhi keperluan tenaga terdidik anak negeri jajahan yang akan dipekerjakan di perusahaan-perusahaan dagang mereka, khususnya perkebunan-perkebunan dengan pelbagai jenis tanamannya, dan juga memperoleh pegawai pemerintah terdidik mengisi lowongan kerja yang diperlukan. Dalam kaitan itu ternyata warga negeri jajahan yang mendapatkan pendidikan itu justru merupakan bibit-bibit yang melahirkan warga yang secara berangsur “membangun kesadaran baru” untuk pada akhirnya mengubah nasib diri mereka. Mereka yang dimaksud dengan pencipta kesadaran baru awal itu ialah siswa-siswa Kedokteran Jawa (STOVIA) yang berusia muda, 18-23 tahun, yang menciptakan alat baru untuk mengubah nasibnya, Boedi Oetomo, yang dibentuk pada “ke-rapat-an” tanggal 20 Mei 1908. Pemrakarsanya ialah siswa Soetomo yang mengajak delapan orang kawannya untuk melakukan tindakan yang pada waktu itu adalah suatu tindakan untuk “pemajuan” sesama anak negeri jajahan.

Setelah kita merdeka persoalan pendidikan dan kebudayaan tetap mendapat tempat “yang utama”, karena justru lembaga-lembaga pendidikan kita sebagai lembaga yang akan mencerdaskan otak-pikiran

1 Direktur Sejarah dan Nilai Tradisional, Ditjen. Kebudayaan, Depdikbud, 1996-2000; Deputi Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Bidang Sejarah dan Purbakala, 2001-2003; Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, 2009-sekarang. Pengajar di Fakultas Ilmu Administrasi dan Komunikasi Unika Atmajaya, Jakarta, 1984-sekarang; pengajar pada Pascasarjana-Sejarah Universitas Negeri Jakarta, 2004-sekarang.

warga bangsa yang telah merdeka, yang tentu saja pencerdasan otak-pikiran merupakan alat-cara utama untuk "mencerdaskan kehidupan kita" sebagai bangsa-negara merdeka. Dalam pengertian itu para pemimpin bangsa yang telah diberi kepercayaan untuk menduduki jabatan menteri amat penting karena berkaitan dengan perjalanan kita ke depan.

II. SASARAN DAN HASIL PENDIDIKAN YANG DIHADAPI DAN AKAN DIHADAPI

Sasaran pendidikan tentu saja warga negara kita yang sudah pada usia pendidikan, yang dimulai dari pendidikan dasar (SD), berusia 6-7 tahun. Di samping tingkat SD juga sudah ada orang-orang tua—dan ini sudah lazim—yang memasukkan anaknya untuk tingkat Taman Kanak-kanak. Pada bagian ini sangat perlu dicatat bahwa di dalam menjalankan pendidikan sejak awal kemerdekaan kita para Menteri Pendidikan harus menghadapi pelbaga i situasi baik situasi internal, yakni situasi dalam negeri kita, maupun situasi eksternal yang harus diselesaikan agar program pendidikan yang telah dibuat dapat diwujudkan. Tidak sedikit kendala yang harus dihadapi dengan kejernihan pikiran. Pada tahun 1950-an, misalnya, di beberapa provinsi (Jawa Barat, Aceh, dan Sulawesi Selatan) terjadi "pemberontakan" terhadap pemerintah. Dampaknya tentu saja program pendidikan di provinsi-provinsi tersebut tidak dapat sepenuhnya dijalankan sebagaimana yang seharusnya. Memasuki tahun 1960-an menunjukkan adanya kendala akibat konflik kekuatan-kekuatan politik yang terus terjadi, seperti adanya "pemberontakan" Permesta dan PRRI di Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Sumatera Barat serta pemberontakan G30S/PKI. Jadi, dalam periode 1950-an–1965, terjadi pelbagai kendala untuk pelaksanaan pendidikan.

Keadaan internal seperti yang digambarkan di atas juga tidak dapat dilepaskan dengan kenyataan situasi eksternal. Sejak awal kemerdekaan kita situasi eksternal-mondial berkembang dan dalam batas tertentu memberikan pengaruh yang tidak dapat diabaikan. Yang dimaksud ialah "perang dingin". Jenis perang ialah "perang ideologi", yaitu kekuatan ideologi Kapitalis-Liberal berhadapan dengan kekuatan ideologi Marxis-Leninis-Komunisme. Kekuatan Kapitalis-Liberalis disebut juga Blok Barat dengan anggota Amerika Serikat dan Eropa Barat; sedang kekuatan Marxis-Leninis-Komunis dikenal juga dengan nama Blok Timur dengan anggota Uni Soviet dan Eropa Timur. Kedua kekuatan itu berusaha memperbesar pengaruh di negara-negara berkembang atau bangsa-negara yang baru merdeka. Perang dingin berlangsung tahun 1945-1985/1990 dan dapat dikatakan bahwa bangsa-bangsa di dunia terbelah dengan pemihakan masing-masing terhadap salah satu kekuatan blok tersebut. Jika terjadi sesuatu peristiwa politik tertentu dapat memberi dampak tertentu di lingkungan lembaga-lembaga pendidikan, misalnya terjadi konflik mahasiswa di lingkungan kampus tertentu karena perbedaan sikap di dalam rangka perang dingin tersebut.

Apa yang digambarkan di atas telah kita lewati dan pelbagai kebijakan di bidang pendidikan yang telah dan sedang dijalankan oleh beberapa orang menteri yang menduduki jabatan menteri dalam periode-periode telah lewat. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sekarang sedang menjalankan program-programnya, dari SD sampai sekolah menengah (SMP, SMA, SMK); tetapi untuk periode ini pendidikan dikelola oleh dua lembaga pendidikan, yaitu untuk tingkat SD dan sekolah menengah berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Menterinya Prof. Dr. Muhadjir Efendi dan Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek) dengan Menterinya Prof. Dr. Muhammad Nasir.

Tentu pemisahan kedua tingkat pendidikan itu bukan sesuatu yang baru; sebab pada beberapa tahun yang lalu, tepatnya tahun 1960-an, ada lembaga Pendidikan Tinggi di bawah Menteri Toyib Hadiwijaya dan Letjen Syarif Tayeb. Pada kenyataan lingkungan pendidikan tinggi ketika itu berada di dalam situasi konflik karena adanya perkembangan perbedaan ideologi di lingkungan kampus. Sebagai contoh, CGMI yang merupakan anak ideologi PKI menuntut pembubaran HMI yang dianggap "lawan" karena ditengarai sebagai "anak Partai Masyumi" yang dilarang oleh pemerintah Demokrasi Terpimpin.

Kenyataan dengan situasi yang dihadapinya pada waktu lampau, 1950–1990-an, tentu saja berbeda dengan situasi tahun 2000-an atau abad ke-21. Kemajuan teknologi dengan dampaknya bagi generasi yang kini berusia 18-30 tahun yang disebut: "generasi milenial". Generasi ini adalah generasi yang memiliki tingkah laku berbeda dengan generasi-generasi kakaknya. Generasi milenial sangat "tergantung" pada situasi teknologis karena mereka memang sedang berada. Perkembangan yang sedang dihadapi oleh generasi milenial sekarang tentu akan berbeda dengan situasi yang akan datang. Dapat diduga bahwa perkembangan teknologis akan lebih padat dan demikian pula kemajuan penelitian dalam bidang ilmu akan terus terjadi. Dengan demikian generasi-generasi milenial di hari depan dituntut untuk mendapatkan jenis pendidikan yang dengan kurikulum yang dapat memberi alat untuk menghadapi tantangan masyarakat teknologis yang akan dihadapi.

III. GENERASI MILLENIAL DAN PEMAHAMAN KE-INDONESIA-ANNYA SERTA PERAN PENDIDIKAN NASIONAL

Dewasa ini lembaga-lembaga pendidikan kita sedang dan akan dimasuki generasi yang memang sedang ramai dibicarakan: generasi milenial. Menurut salah satu penulis, generasi kelahiran awal abad ke-21 memang lahir pada saat revolusi industri 4.0 dimulai. Menurut penulis tersebut "tidak ada" individu dari golongan ini yang "gaptek" (gagap teknologi). Dikatakannya juga, "Para ahli yang melakukan penelitian terhadap kaum "gen Y" ini juga menemukan bahwa para milenial tidak merasa bahwa 'jiwa patriot itu keren' (Eileen Rachman & Emilia Jakob, "*Karier Experd Milenial*", *Kompas*, Sabtu, 25 Agustus 2016, hlm. 17).

Apa pun sikap yang ditampakkan oleh generasi milenial, lembaga-lembaga pendidikan—dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi—tidaklah dapat membiarkan kenyataan dari ciri dan tingkah laku generasi millenial. Bagaimanapun lembaga pendidikan kita memiliki tanggung jawab untuk membangun "kesadaran baru" tentang keberadaan mereka bersama di sebuah bangsa-negara yang bernama Indonesia. Jika pun mereka mampu menguasai teknologi dan juga minatnya untuk berwirausaha, tidaklah dapat mengabaikan kenyataan bahwa mereka-lah yang akan mewarisi bangsa-negara ini dengan kekuatan dan kelemahannya di hari depan.

IV. PENUTUP: PENDIDIKAN UNTUK HARI DEPAN

Tidak ada suatu bangsa pun yang akan membiarkan bangsanya, setelah merdeka, tetap dalam keadaan yang tidak berkemajuan. Dengan demikian, bangsa merdeka itu, tidak memaknai merdeka sekadar melepaskan diri dari keterjajahan bangsa asing. Kemerdekaan memberi makna untuk menciptakan masyarakat bangsa merdeka yang mampu menciptakan masyarakat baru, yaitu masyarakat yang lebih baik, lebih makmur, serta memiliki pemerintah yang mampu bertindak demokratis dengan dilandasi oleh pemahaman arti keadilan dalam kemerdekaan.

Singkatnya, pendidikan untuk hari depan, dalam kaitan itu—tanpa harus mengabaikan latar belakang ideologi mereka masing-masing—para menteri yang riwayat dan karyanya digambar-sajikan dalam buku ini telah memberikan apa yang mungkin dapat diberikannya. Itu semua dapat berguna untuk menyiangi jalan menuju ke tujuan di hari depan yang lebih baik: masyarakat adil dan makmur berdasar Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Taufik. *Indonesia: Towards Democracy*. Singapore: ISEAS, 2009.

Abdullah, Taufik, dan Restu Gunawan. *Malam Bencana 1965 dalam Belitan Krisis Nasional Bagian II: Konflik Lokal*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2012.

Abimanyu, Anggito dan Andie Megantara. *Era Baru Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Kompas, 2012.

Adam Asvi, Warman. "Iwa Kusuma Sumantri, Penggagas Proklamasi", dalam Asvi Warman Adam, *Membongkar Manipulasi Sejarah: Kontroversi Pelaku dan Peristiwa*. Jakarta: Penerbit Kompas, 2009.

Alcorn, Noeline. *To the Fullest Extent of His Powers: C.E. Beeby's Life in Education*. Singapore: South Wind Production, 1999.

Ambong, Rustam. "Konstelagi Kurikulum Pendidikan di Indoensia" dalam Jurnal *At-Turats*, Vol. 9, No. 2, Desember 2015.

Anderson, Benedict. R.O.G, *Java in A Time of Revolution: Occupation and Resistance 1944-1946*. Ithaca and London: Cornell University Press, 1972.

--------. *Java in a Time of Revolution: Occupation and Resistance, 1944-1946*. Ithaca: Cornell Unievrsity Press, 1972.

Andriono, dkk. *Jejak langkah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (1945-2011).* Jakarta: Kemendikbud, 2011.

Anwar, Rosihan. *Sukarno-Tentara-PKI: Segitiga Kekuasaan Sebelum Prahara Politik 1961-1965*. Jakarta: Yayasan Obor, 2007.

Apple, M.W. *Ideology and Curriculum*. London: Routledge and Kegan Paul, 1979.

Arioka, Ni Wayan W. *Pro Kontra WacanaFull Day School,* Jurnal *Studi Kultural* Volume III No.1: 1-5, 2018.

Badil, Rudy dan Luki Sutrisno Bekti. *Soe Hok-Gie ... Sekali Lagi; Buku Cinta Dan Pesta Di Alam Bangsanya*. Editor: Nessi Luntungan R. Kepustakaan Populer Gramedia, 2009.

Bagus, dkk. *Memoria Indonesia Merdeka*. Jakarta: Megawati Institute, 2014.

Bahar, Saafroedin dan Nannie Hudawati (peny.). *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI): 28 Mei 1945–22 Agustus 1945*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1998.

Blumberger, J. Th. P. *De Nationalistische Beweging in Nerderlansch-Indië*. Haarlem: Tjeenk Willink, 1931.

Bresnan, John. *At Home Abroad: A Memoir of the Ford Foundation in Indonesia, 1953-1973*. Jakarta: Equinox Publishing Indonesia, 2006.

Busyairi, B. *Tiga Kota Satu Pengabdian Jejak Perjalanan Yahya A. Muhaimin*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2012.

Cribb, Robert. "The Historical Root of Indonesia's New Order: Beyond the Colonial Comparison" dalam Edward Aspinall dan Greg Fealy (ed.), *Soeharto's New Order and Its Legacy*. Sydney: ANU Press, 2010.

Crouch, Harold. *The Army and Politics in Indonesia*. Equinox Publishing (Asia), 2007.

Darmaningtyas, *Pendidikan yang Memiskinkan*.Yogyakarta: Galang Press, 2004.

De Locomotief, 7 September 1950.

Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudajaan. *Pewarta Pendidikan, Pengetahuan, Kebudajaan*. 1-2, 1964.

Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan. *Perguruan Tinggi di Indonesia*. Jakarta: Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, 1965.

Departemen. Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, *Rentjana Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar*. Djakarta: Departemen. Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, 1964.

Depdikbud, *Sejarah Sosial di Daerah Sumatera Barat*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek IDSN, 1983/84.

Depdiknas. *Hasil Rapat Kerja Nasional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1983*. Jakarta: Depdiknas, 1983.

Dewantara, S. Bambang. *Ki Hadjar Dewantara Ayahku*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989.

Djojonegoro, Wardiman. *Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Sekolah Menengah Kejuruan*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, 1996.

--------, *Kumpulan Pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Republik Indonesia*. Jakarta: Pendidikan dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, 1996.

---------, *Fifty Years Development of Indonesian Education*. Jakarta: Ministry of Education and Culture, 1997.

---------, *Lima Tahun Mengemban Tugas Pengembangan SDM: Tantangan yang Tiada Henti*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, 1998.

---------, *Pendidikan dan Kebudayaan Selayang Pandang*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998.

---------, *Sepanjang Jalan Kenangan: Bekerja dengan Tiga Tokoh Besar Bangsa*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2016.

Eklof, Stefan. *Power and Political Culture in Suharto's Indonesia. The Indonesian Democracy Party (PDI) and the Decline of New Order (1986-98)*. Denmark: NIAS Press, 2003.

Elson, R. E. *The Idea of Indonesia: Sejarah Pemikiran dan Gagasan*. Jakarta: Serambi, 2009.

Erawan, Memed dan Ganda S. Partasasmita. *Toyib Hadiwijaya Prof. Dr. Ir. H: Otobiografi*. Bandung: Hifka, 1997.

Fadjar, A. M. *Holistika Pemikiran Pendidikan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005.

--------."Mencari Dasar Filosofi Pendidikan Islam; Sebuah Tinjauan Terhadap Pendidikan Kemuhammadiyahan dan Al-Islam, dalam Imron Nasri dan A. Hasan Kunio, (ed.).*Di Seputar Percakapan Pendidikan Dalam Muhammadiyah*. Yogyakarta: Pustaka SM, 1994.

--------. *10 Tahun Reformasi Pendidikan*. Jurnal Demokrasi & HAM Vol. 8, No. 1, 2008,

--------.*"Pengembangan Pendidikan Islam"*, dalam Nafis (Ed), *KonstekstualisasiAjaran Islam : 70 Tahun Prof Dr. Munawir Sjadzali, MA,* Jakarta: IPHI danParamadina, 1995.

--------. *Visi Pembaruan Pendidikan Islam*. Jakarta: Lembaga PengembanganPendidikan dan Penyusunan Naskah Indonesia, 1998.

--------.*Madrasah dan Tantangan Modernitas,* cet I. Bandung: Mizan, 1999.

-------. *Platform Reformasi Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*.Jakarta: Dirjen Binbaga Islam, *1999*.

-------. *Reformasi Pendidikan Islam*. Jakarta: Fajar Dunia, 1999.

-------. "Demokrasi dalam Konteks Indonesia Baru", butir-butir bahan ceramahdisampaikan pada sidang Tanwir I Pemuda Muhammadiyah Balik Papan, 12 Januari1999, dalam *Himpunan Pidato Menteri Agama RI., Tahun, 1999*, disusun oleh Biro Hukum dan Humas Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI, 1999.

-------. *Reorientasi Pendidikan Islam*, Jakarta: Fajar Dunia. 1999.

-------. "Pengembangan Pendidikan Islam yang Menjanjikan Masa Depan" dalamJurnal *Edukasi* Volume 2, Nomor 1, Januari-Maret 2004.

-------. Pidato Pengukuhan Guru Besar, "Pengembangan Pendidikan Islam yangMenjanjikan Masa Depan", dalam Muhammad In'am Esha dan Helmi Syaifuddin (ed.) *KumpulanOrasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar UIN Malang Periode 1989-2006*. Malang: UIN Malang Press, 2006.

------. *Strategi Pengembangan Pendidikan Islam Dalam Era Globalisasi*. MakalahDisampaikan sebagai Keynote Address dalam Seminar on Islam and TheChallenges of Global Education in the New Millenium, The IIUM AlumniChapter of Indonesia di Pekan Baru, tanggal 26 Januari 2003.

Feith, Herbert & Lance Castles, *eds., Indonesian Political Thinking 1945-1965,* 1970.

Fuad Hasan, "Catatan Sekitar Masalah Pendidikan.", makalah. Disampaikan dalam Seminar di Universitas Indonesia tanggal 15 Februari 1987.

Gaffar, A. "Hubungan Patron Client dan Kosekuensinya Terhadap Lahimya Pengusaha Indonesia: Review Buku Dr. Yahya Muhaimin". *UNISIA* 10.X1.IV.1991.

Gianie, dkk. (ed.), *Direktori 100 perguruan tinggi di Indonesia 2017: Kompaspedia.* Jakarta: Buku Kompas, 2017.

Goenarso. *Riwayat Perguruan Tinggi Teknik di Indonesia, Periode 1920-1942*. Bandung: Penerbit ITB, 1992.

Gunawan, A.H. *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, 1986.

Habibie, B. J. *Detik-detik yang Menentukan*. The Habibie Center Mandiri: Jakarta, 2006.

Hadiwijaya, Toyib. *Otobografi Toyib Hadiwijaya: Seperti dipaparkan oleh Memed Erawan dan Ganda Partasasmita*, Bogor: tp, 1997.

Hamlan. "Politik Pendidikan Islam dalam Konfigurasi Sistem Pendidikan di Indonesia". *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 10, No. 1, Juni 2013: 177-202.

Hanifah, Abu, Prof. Dr. "Renungan Tentang Sumpah Pemuda", *Bunga Rampai Soempah Pemoeda*. Jakarta: Balai Pustaka, 1978.

Hasan, S.H. *Pendidikan Ilmu Sosial.* Jakarta: Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 1996.

Hasan, S.H. "Pendidikan Sejarah untuk Membangun Manusia Baru Indonesia", dalam Jurnal *Mimbar Pendidikan*, No.2 Tahun XVIII 1999, hlm.4-11.

--------. “Strategi Pembelajaran Sejarah pada Era Otonomi Daerah sebagai Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi”, dalam Helius Sjamsuddin dan Andi Suwirta, *Historia Magistra Vitae: Menyambut 70 Tahun Prof. Dr. Hj. Rochiati Wiriaatmadja, MA*. Bandung: Historia Press, 2003.

--------. “Perkembangan Pendidikan Dasar dan Menengah”, naskah untuk buku *Indonesia dalam Arus Sejarah* (dalam proses percetakan), 2006.

--------. “Landasan dan Pengembangan Kurikulum”. Makalah, disajikan di Pusat Kurikulum, 2007.

--------. *Evaluasi Kurikulum*, dalam proses percetakan, 2007.

--------. “Arah dan Perubahan Kurikulum di Indonesia: Suatu Tinjauan Historis”. Makalah, 2008.

--------. *Kurikulum, Standar Kompetensi Lulusan, dan Ujian Negara*., dalam Mulyana, A & Supardan, D (Editor), *Sejarah Sebuah Penilaian: Refleksi 70 Tahun Prof. Dr. H. Asmawi Zainul, M. Ed*. Bandung: Pendidikan Sejarah FPIPS UPI, 2008.

Hatta, Mohammad, *Memoir.* Jakarta: Tintamas, 1978.

Heryanto, A. “Giliran Yahya Muhaimin”. *Koran Bernas*, Senin, 6 Mei 1991.

Ibrahim, Muhammad. *Mr. Teoekoe Moehammad HasanKarya dan Pengabdiannya.*Departemen Kebudayaan dan Pendidikan, 1983.

Ibrahim, R. Evaluasi dakam pengembangan kurikulum. Dalam Mulyana, A & Supardan, D (Editor), *Sejarah sebuah penilaian: Refleksi 70 Tahun Prof. Dr. H. Asmawi Zainul, M. Ed* (hlm. 133-144). Bandung: Pendidikan Sejarah FPIPS UPI, 2008.

Ibrahim, Thalib. *Jiwa Juang Bangsa Indonesia.* Jakarta: Mahabudi, 1975.

Idris, M. 2012. “Konsep Pendidikan Humanis dalam Pengembangan Pendidikan Islam”. *MIQOT* Vol. XXXVIII No. 2 Juli-Desember 2014.

Ingleson, John. *Jalan ke Pengasingan: Pergerakan Nasionalis Indonesia Tahun 1927-1934*. Jakarta: LP3ES, 1983.

Ingleson, John. *Perhimpunan Indonesia dan Pergerakan Kebangsaan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1993.

Iradhatie, W. (2016, 11 Agustus). “Beragam Kebijakan Kontroversial Mendikbud”. *[Online]*. Diakses dari: https://news.okezone.com/read/2016/08/11/65/1460907/beragam-kebijakan-kontroversial-mendikbud (12 Mei 2018)

Isa, Teuku Muhammad. *Mr. Teuku Moehammad Hasan Dari Aceh ke Pemersatu Bangsa*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 1999.

Joesoef, Daoed. *Emak. Penuntunku Dari Kampung Darat Sampai Sorbonne*. Jakarta: Kompas, 2010.

-------. *Rekam Jejak Anak Tiga Zaman*. Jakarta: Kompas, 2017.

Jones, Tod. *Culture, Power, and Authoritarianism in the Indonesian State*. 2013.

Kahin, George McT. *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia*. Jakarta: Komunitas Bambu, 2013.

Kementerian Penerangan Indonesia, *Republik Indonesia Propinsi Djawa Tengah*. Jakarta, 1950.

Kementerian Sosial. *Wajah dan Perjuangan Pahlawan Nasional*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial, 2012.

Koentjaraningrat. "The Indonesian Mentality and Development" dalam *Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia*, Vol. 3 No. 2, *ISEAS*, 1988.

---------. *Manusia dan Kebudayaan Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1991.

Kowaas, C. *Dewa Ruci: Pelayaran Pertama Menaklukkan Tujuh Samudra: Sebuah Kisah Nyata*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.

———. *Sang Saka Melanglang Djagad*. Djakarta: Fa. Mega Bookstore, n.d.

Kridalaksana, Harimurti. *Masa-masa Awal Bahasa Indonesia*. Depok: Lembaga Lesikologi dan leksikografi–FIBUI, cetakan ke-2, 2010.

---------, *Masa-masa Awal Bahasa Indonesia*. Depok: Laboratorium Leksikologi dan Leksikografi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya–Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, 2010.

Larson, George D. *Menjelang Masa Revolusi: Kraton dan Kehidupan Politik di Surakarta, 1912–1942*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990.

Legge, John D. *Sukarno. A Political Biography*. Allen Lane, 1972.

Leimena, J. "Kewarganegaraan yang Bertanggung Jawab", dalam *Dr. Johannes leimena, Negarawan Sejati & Politisi Berhati Nurani,* Jakarta: BPK Gunung Agung, 2007.

Leirissa, R.Z. "Biografi Dr. J. Leimena" dalam *Kewarganegaraan yang Bertanggungjawab, Mengenang Dr. J. Leimena*, Jakarta : BPK. Gunung Mulia, 1980.

Leirissa, R.Z., dkk. *Ensiklopedi Tokoh Kebudayaan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan Depdikbud RI, 1994.

Lombard, Dennys. *Kerajaan Aceh*. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

Lubis, Nina Herlina (ed.). *Sang Pejuang dalam Gejolak Sejarah: Otobiografi Prof. Mr. R.H. Iwa Kusuma Sumantri.* Bandung: Satya Historika, 2002.

Lucas, Anton E. *One Soul One Struggle: Peristiwa Tiga Daerah.* Yogyakarta: Resist Book, 2004.

---------. "In Memoriam: Ki Sarino Mangunpranoto", *Indonesia.* Volum/issue.35, Cornell University South East Asia Program, 1983.

Mahpudz, A. "Corak Kurikulum dan Tenaga Pendidik Masa Depan di Indonesia". Dalam Andi Suwirta & Didin Saripudin (Editor), *Sejarah adalah Perubahan Penghormatan 70 Tahun Prof. Dr. H. Ismaun, M.Pd.* Bandung: Historia Utama Press, Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia, 2005.

Mangunpranoto, Sarino, "Menuju ke Demokrasi Pendidikan di Indonesia" (Pidato pada Upacara Penerimaan gelar Doktor Kehormatan dalam Ilmu Pendidikan pada Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Malang pada tanggal 17 April 1976).

Mardiner, Rémy. "Dari Revolusi hingga Reformasi: Perjalanan Mutasi Politik yang Tak Kunjung Selesai", dalam Rémy Mardiner (ed.). *Revolusi Tak Kunjung Selesai.* Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia & L'Irasec, 2017.

Martha dkk, Ahmaddani G., *Pemuda Indonesia: Dalam Dimensi Sejarah Perjuangan Bangsa.* Jakarta: Yayasan Sumpah Pemuda, 1984.

Marzuki-Sudirdjo, Artati. "Pelaksanaan Pendidikan Nasional Berdasarkan Pantjasila", dalam *Kumpulan Tjeramah-Tjeramah Pada Pendidikan Kader Revolusi Angkatan Dwikora (31 Agustus 1964 s/d 10 Nopember 1964).* Jakarta: Bagian Pendidikan/Peladjaran Badan Pelaksana Pendidikan Kader Revolusi Angkatan Dwikora, 1964.

Maskan. *Tokoh Wongsinegoro.* Jakarta: Direktorat Tradisi dan Kepercayaan–Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Jakarta. 2002.

Mihardja, Achdiat K. "Tales of Revolution"-nya Abu Hanifah", *Sinar Harapan*, 9 April 1973.

Moehkardi, *Mohammad Said Reksohadiprodjo, Hasil Karya dan Pengabdiannya,* Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1982/1983.

Mohamad, Goenawan. *Catatan Pinggir 3*. Jakarta: Grafiti, 1991.

----------, *Celebrating Indonesia: Fifty Years with the Ford Foundation 1953-2003.* Equinox Publishing (Asia), 2003.

Muhaimin, Y. 1980. "Beberapa Segi Birokrasi di Indonesia". Jurnal *Prisma* No.10 Tahun IX Oktober 1980.

--------. *Bisnis dan Politik*. Jakarta: LP3S, 1991.

Munandar, Wiranto Aris. *Penggerak Mula Motor Bakar Torak*. Bandung: ITB, 2002.

---------, Pidato pada acara "Apresiasi dan Pengabdian Guru Besar dan Dosen Senior," di Departemen Teknik Mesin Aula Timur ITB, tanggal 27 September 2003.

Mutrofin. "Perspektif Otonomi Pendidikan (Dasar Dan Menengah)", makalah. Tidak diterbitkan, 1999.

Natasha, H. "Revitalisasi Lembaga Pendidikan dalam Upaya Membangun Karakter Bangsa". *Jurnal Pemikiran Islam*; Vol. 37, No. 1 Januari-Juni 2012.

Navis, A. *Filsafat dan Strategi Pendidikan M. Sjafei.* Jakarta: PT Grasindo, 1996.

Notosusanto, Nugroho. *Proses Perumusan Pancasila Dasar Negara.* Jakarta: Balai Pustaka.

Nurhakim. "Rekonstruksi Pemikiran A. Malik Fadjar tentang Pembaharuan Madrasah Menuju Sekolah Mdel". *PROGRESIVA,* Vol. 4, No.1, Agustus 2010

Ohorella, G.A., *Prof. Dr. Abu Hanifah DT M.E.: Karya dan Pengabdiannya.* Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek IDSN, 1985.

Onghokham. "Patah Tumbuh Seorang Penulis", *Majalah Tempo*, 19-25 Agustus 2002.

Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto (ed.), *Sejarah Nasional Indonesia: Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Hindia Belanda*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

Poeze, Harry. *Di Negeri Penjajah: Orang Indonesia di Negeri Belanda 1600-1950*. Jakarta: Gramedia, 2008.

Poeze, Harry. *Tan Malaka, Gerakan Kiri, dan Revolusi Indonesia Jilid 1: Agustus 1945-Maret 1946*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia & KITLV-Jakarta, 2008.

Prijono. *Sekitar Arti Kepribadian Nasional*, 1960.

Ramadhan, dkk. "Personal Branding of Anies Baswedan Through Facebook And Twitter Account: Study Of Image Grid Analysis in Banjarmasin Society Aged 17-24 Years". August 2016 Vol. 7 No. 3. DOI: 10.18196/jgp.2016.0037. *Journal Of Government & Politics.*

Reksohadiprodjo, Moh. Said. "Taman Siswa dan Alam Gagasannya", dalam "*50 Tahun Taman Siswa*", Yogyakarta: Majelis Luhur Taman Siswa Yogyakarta, 1976.

--------. *Masalah Pendidikan Nasional. Beberapa Sumbangan Pikiran*. Jakarta: Haji Masagung, 1989.

Rochman, H. *Citra Diri Anies Baswedan melalui Akun Instagram @aniesbaswedan terhadap Follower pada Kampanye Putaran Pertama Pilkada DKI Jakarta 2017*. Fakultas Ilmu Sosial dan HumanioraUniversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Roder, O.G. *Who's Who In Indonesia: Biographies of Prominent Indonesian Personalitie in All Fields*. Jakarta: Gunung Agung, 1971.

Rosidi, Ajip. *Ichtisar Sejarah Sastera Indonesia*. Jakarta: Binacipta, 1969.

Rusniati. "Pendidikan Nasional dan Tantangan Globalisasi: Kajian Kritis terhadap Pemikiran A. Malik Fajar", Jurnal Ilmiah *DIDAKTIKA*, Agustus 2015VOL. 16, NO. 1, 105-128

Safwan, Mardanas. *Prof. Mr. Iwa Kusuma Sumantri SH: Hasil Karya dan Pengabdiannya*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direkorat Sejarah dan Nilai Tradisional, 1983/1984.

Sakri, A.. Dari TH ke ITB: Kenang-kenangan lustrum keempat 2 Maret 1979, Bandung: Penerbit ITB.1979.

Saleh, Mashuri. *Kebijaksanaan dan Langkah-langkah Pembaharuan Pendidikan Indonesia*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Humas Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1973.

----------. *Catatan Peristiwa Sejarah Bangsaku Tahun 1945-1950*. Intan Pariwara, 1988.

----------, *Demokrasi Pancasila dan Pertumbuhannya*. Departemen Penerangan R.I., 1977.

----------, *Masalah-masalah yang Melandasi Pembaruan Pendidikan*, Indonesia. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Humas Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1973.

---------, *Pesan-pesan PEMILU Untuk Pembangunan di Masa Depan: Retrospek dan Prospek: Kuliah*, Departemen Penerangan R.I., 1977.

Saman, M. *Intensifikasi pelajaran muatan local Untuk mengurangi kendala penuntasan wajib belajar*. Jurnal Kependidikan, Nomor 2, Tahun XXXill, November 20A3, 2003.

Samsuri. "Kebijakan Pendidikan Kewarganegaraan Era Reformasi di Indonesia". *Cakrawala Pendidikan*, Juni 2011, Th. XXX, No. 2, 2011.

Sanre, Roel. "Iwa Kusumasumantri: Upaya Menertibkan Tentara", *Prisma*, No. 5 (1984).

Sardiman & Yuliantri, "Dinamika Pendidikan Masa Orde Baru (Kebijakan Pendidikan Daoed Joesoef & Nurgroho Notosusanto", *Laporan Penelitian*, Tidak Diterbitkan, FIS UNY, 2012.

Sastroamidjojo, Ali. *Tonggak-Tonggak di Perjalananku,* Jakarta: PT Kinta, 1972.

Sembiring, Manna, F. dan Tugiman. *B. J. Habibie political policy in 1998 up to 1999. Maklah* Pendidikan Sejarah FKIP-Universitas Riau, 2013.

Septiana, Mela Mita. "Kebijakan Pendidikan Menteri Syarif Thayeb Tahun 1974-1978", dalam *journal. student.uny.ac.id/ojs/index.php/risalah/article/download /4931/4593.*

Setiawan, dkk. *Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 8*. Jakarta: PT Delta Pamungkas, 2004.

Simanjuntak, P.N.H. *Kabinet-kabinet Republik Indonesia, Dari Awal kemerdekaan Sampai Reformasi.* Jakarta: Penerbit Jambatan, 2003.

Soedarmanta, J.B. *Jejak-Jejak Pahlawan: Perekat Kesatuan Bangsa Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 2007.

Soekarno. *Warisilah Api Sumpah Pemuda. Kumpulan Pidato Bung Karno di Hadapan Pemuda 1961-1964*. Jakarta: CV Haji Masagung, 1988.

Soeratman, Darsiti. *Ki Hadjar Dewantara*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989,

Soewondo, Nani. *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum Dan Masjarakat*. Jakarta: Timun Mas, 1955.

Sofwan, Mardanas, *Prof. Dr. Bahder Djohan: Karya dan Pengab diannya.* Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan: IDSN, 1985.

Sofwan, Mardanas dan Sutrisno Kutoyo (ed.), *Sejarah Pendidikan Daerah Sumatera Barat.* Padang: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Sumatera Barat.

Stutje, Klaas. "To Maintain Independent Course: Interwar Indonesian Nationalism and International Communism on a Dutch-European Stage", *Dutch Crossing: Journal of Low Countries*, Vol. 39, No. 3 (2015).

Sudarsono, J. "Keamanaan Internasional Abad Ke-21", makalah disampaikan pada *Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan,* diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI. Denpasar, 14-18 Juli 2003.

Suhardan, D. "Efektivitas Pengawasan Profesional dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran pada Era Otonomi Daerah". *EDUCATIONIST* No.1 Vol. 1 Januari 2007.

Sukarno, "Penemuan Kembali Revolusi Kita", dalam Sukarno. *Di Bawah Bendera Revolusi*, Jilid II. Jakarta: Yayasan Bung Karno & Media Pressindo, 2015.

Sukmadinata, Nana Syaodih. *Kurikulum dan Pembelajaran Kompetensi*, Bandung: Kesuma Karya Bandung, 2004.

Sulastomo. *Hari-hari yang Panjang:Transisi Orde Lama ke Orde Baru*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008

Sumardi, S., dkk., *Menteri-menteri Pendidikan dan Kebudayaan Sejak Tahun 1966,* Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1984.

Sunarti, Linda, dkk. *Tokoh Indonesia Teladan. Buku Kesatu*. Jakarta: Kementrian Dalam Negeri RI, 2017.

Suparjono, Drs. Estiko, *Sistem Pendidikan Nasional Pancasila*, Djakarta: Bhratara, 1966.

Suradi, Hp., Mardanas Safwan, Djuariah Latuconsina, and Samsurizal. *Sejarah Pemikiran Pendidikan Dan Kebudayaan*. Jakarta: Departemen pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat sejarah dan nilai tradisional Proyek inventa risasi dan Dokumentasi sejarah Nasional, 1986.

Team Antara. *Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita*. Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008.

Tempo. *Muhammad Yamin: Penggagas Indonesia Dihujat dan Dipuji*. Jakarta: KPG, 2014.

Tim Penulis. *Memoria Indonesia Merdeka*. Jakarta: Megawati Institute, 2014.

Tim Penyusun, *Sejarah Kelembagaan Kebudayaan dalam Pemerintahan dan Dinamikanya.* Jakarta: Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata, 2004.

Umasih, "Ketika Kebijakan Orde Lama Memasuki Domain Pendidikan: Penyiapan dan Kinerja Guru Sekolah Dasar di Indonesia", *Paramita* Vol.24, No.1, Januari 2014.

Van Miert, Hans. *Dengan Semangat Berkobar: Nasionalisme dan Gerakan Pemuda Indonesia, 1918-1930*. Jakarta; Hasta Mitra-Pustaka Utan Kayu-KITLV.

Van Niel, Robert. *Munculnya Elit Modern Indonesia*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1984.

Wahab, A. A. "Gagasan dan Pemikiran Pembangunan Pendidikan di Indonesia". Dalam Endang Danial & Syaifullah Syam (Editor), *Penghargaan dan Penghormatan 68 Tahun Prof. Dr. H. Abdul Azis Wahab, M. A. (Ed.)*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Jurusan PKn FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia, 2011.

Wahib, A. "Corak Pemikiran A. Malik Fadjar tentang Pengembangan Madrasah pada Era Globalisasi (Studi Pemikiran Tokoh Pendidikan)", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Tarbiyah IAIN Wali Songo Semarang, 2008.

Wanandi, Jusuf. *Shades of Grey: A Political Memoir of Modern Indonesia 1965-1889*. Jakarta-Singapore: Equinox Publishing, 2012.

Wardani, I G.A.I. “Program Pemberdayaan Guru”. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, November 1999, Jilid 6, Nomor 4

Widada. 2013. *Guru Patriot: Biografi Ki Sarmidi Mangunsarkoro*. Yogyakarta: Ar-Buzz Media.

Wiryopranoto, Suhartono, dkk. 2017. *Perjuangan Ki Hadjar Dewantara: Dari Politik ke Pendidikan*. Jakarta: Museum Kebangkitan Nasional.

Yamin, Muhammad. *Sapta Dharma.* Djakarta: N.V Nusantara, 1950.

-------. *Naskah Persiapan Undang-undang Dasar 1945*. I, cetakan pertama, 1959.

Yayasan Idayu, *Mohammad Said Reksohadiprodjo di Mata Sahabatnya,* Jakarta: Yayasan Idayu, 1979.

Yunus, M. Rusli. *Perjalanan PGRI (1945-2003)*. Semarang: Departemen Pendidikan Nasional, 2003.

Zuhal. 2008. *Meretas Jalan Panjang Keunggulan Daya Saing Indonesia di Milenium Ketiga: Refleksi 10 Tahun Reformasi Bidang Iptek*. Jurnal Demokrasi & HAM Vol. 8, No. 1, 2008.

ARSIP

Instruksi No 3 Tahun 1962 Sekretariat Negara Pidato Presiden Sukarno No 374.

Inventaris Koleksi Foto Personal No. P03/213.

Inventaris Koleksi Foto Personal No. P04/208.

Inventaris Koleksi Foto Personal No. P05/350.

Inventaris Koleksi Foto Personal No. P06/573.

Inventaris Koleksi Foto Personal No. P06/578.

Inventaris Koleksi Foto Personal No. P09/406.

Inventaris Koleksi Foto Personal No. P10/047.

Inventaris Koleksi Foto Personal No. P10/155.

Inventaris Koleksi Foto Personal No. P10/164.

Kabinet Presiden No. 152, Pg/52.

Kabinet Presiden No. 8808/Pg/51.

Kabinet Presiden, No. 5064/Pg/52.

Verbaal No.3, Tahun 1852.

DOKUMEN

Himpunan Uraian Ketua Presidium dan Para Menutama Kabinet Ampera pada Rapat Kerdja Antara Pemerintah Pusat dan Daerah se-Indonesia, Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1966.

Keputusan Presiden RI Nomor 355/M Tahun 1999 Tanggal 26 Oktober 1999.

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 112 Tahun 1951.

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 66 tahun 1955.

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 184 tahun 1954.

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 192 tahun 1965, 23 juni 1965.

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 224 tahun 1964, 7september 1964.

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 313 tahun 1964.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 tahun 2005.

Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005.

Peraturan Pemerintah Nomor 19/2005.

Peraturan menteri pendidikan nasional republik indonesia nomor 28 tahun 2005.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006.

Permen Diknas nomor 22 tahun 2006.

Permen Diknas nomor 23 tahun 2006.

Peraturan menteri pendidikan nasional republik indonesia nomor 15 tahun 2007.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 41 tahun 2007.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008.

Peraturan menteri pendidikan nasional republik indonesia nomor 14 tahun 2008.

Peraturan menteri pendidikan nasional republik indonesia nomor 25 tahun 2008.

Peraturan menteri pendidikan nasional republik indonesia nomor 39 tahun 2008.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009.

Permendikbud Nomor 1 Tahun 2012.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2013.

Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017.

Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2017.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2017.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018.

SKB No. SP 562/B.U/X/76/01 dan No.0263/U/1976.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Kurikulum 2004.

SUMBER KORAN DAN MAJALAH:

Annt, "KAMI desak: Bersihkan Jg Menentang Mashuri S.H.", dalam *Mercusuar,* No. 14 Th 11, 21 April 1967.

Ant, "Dirjen PTIP Mashuri SH: Hanja Ada 3 Djenis Universitas, Universitas jang tak penuhi sjarat akan ditutup", dalam *Mercusuar,* No. 36 Th.11, 23 Mei 1967.

Antara, Januari 1963.

Antara, Juni 1963.

Antara, November 1962.

Antara Oktober 1962.

Antara, September 1962.

Antara, 25 Juli 1984.

Antara, tanggal 15 Agustus 1987.

Antara, tanggal 2 Juli 1987.

Bintang Timur, April 1963.

Bintang Timur, Juni 1963.

De Sumatra Post, tanggal 6 Agustus 1927.

Direktorat Pendidikan Kesenian. *Sangka.* 1-2, 1970.

Duta Masyarakat, Desember 1963.

Duta Masyarakat, November 1963.

Haluan, tanggal 20 Mei 1979.

Indonesian National News Agency. "Antara," 1965.

Johnny TG. *Kompas*, November 19, 2017, edition Senin.

Kedaulatan Rakjat, July 31, 1965, edition Sabtu.

Kedaulatan Rakyat, Desember 1962

Kedaulatan Rakyat, November 1962

Kompas, 8 Agustus 2016.

Kompas, tanggal24 Maret 2018

Kompas, tanggal25 Januari 2018.

Kompas, tanggal 28 Januari 2018

Kompas, tanggal 8 Agustus 2016.

Kompas, tanggal 9 Februari 1996.

Kompas, September 29, 1965, edisi Rabu.

Mahasiswa Ganesha, No.11/Th.VI, Februari 1994

Majalah *D&R*, tanggal 28 Maret 1998.

Mashuri, "Penggantian Udjian dan Idjazah Negara, dalam *Pusara,* Mei 1969, hlm. 152-156 dan 179-182.

NN, "Apa dan Siapa: Mashuri S.H.", dalam *Minggu Pagi,* 15 Januari 1967, hlm. 3.

NN, "Tertipu Jang Harus Dikasihani, dalam *Mertjusuar*: Sabtu, 22 April 1967, hlm. 1.

Pikiran Rakyat, tanggal 24 April 1996.

Republika, 19 Agustus 1998.

Suara Pembaruan, tanggal12 Februari 1996.

Suluh Indonesia, Februari 1964.

Suluh Indonesia, Januari 1964.

Surjomihardjo, Abdurrachman, "In Memoriam Ki Sarino Mangunpranoto, 15.1.1910- 17.1.1983, *Kompas*, 30 Januari 1983.

Tempo, tanggal 15 Jui 1978.

Tempo, tanggal 15 Juli 1978

Tempo, tanggal 24 Januari 2018.

Tempo, tanggal 7 Januari 1980

Tempo, tanggal 9 Maret 2007.

The Daily Colonist, January 13, 1955, edition Thursday.

Warta Bhakti, Desember 1962

Warta Bhakti, Januari 1963

Warta Bhakti, November 1962

SUMBER FOTO:

ANRI, *Koleksi Foto Personal Deppen 1966-1967,* No. 1321 dan 1328.

Foto dari koleksi Proyek Digitalisasi Tamansiswa.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, *IPPHOS*Tahun 1971-1973

Perpustakaan Nasional, and Yayasan Idayu. *Perserikatan Bangsa-Bangsa [Gambar] : Ny. Artati Marzuki Sebagai Anggota Delegasi Wanita Indonesia Dalam PBB*, n.d.

--------. *Potret Ny. Artati Marzuki Sudirdjo [Gambar]*, n.d.

--------. *Presiden Sukarno Menerima Kunjungan Menteri P.D.K. Ghana Beserta Isteri Di Istana Merdeka Pada Bln. Agustus 1965, Yang Diantar Oleh Menteri P.D.K. Ny. Artati Marzuki Sudirdjo [Gambar]*, 2005.

Sumber foto oleh Koleksi Institut Leimena

SUMBER INTERNET:

Achmad, "Kisah awal Soeharto dapat penghargaan Bapak Pembangunan", dalam https://www.merdeka.com/peristiwa/kisah-awal-soeharto-dapat-penghargaan-bapak-pembangunan.html, diakses pada 22 Mei 2018, pukul 12.51 WIB.

Adie Prasetyo, "Todung Sutan Gunung Mulia". Diakses dari: http://menyempal.wordpress.com/tokoh-pendidikan-4/todung-sutan-gunung-mulia.html. Pada tanggal 17 Mei 2018 pukul 14.22.

Anton Dwisunu Hanung Nugrahanto, "Kisah Mashuri dan Pengiriman Guru ke Malaysia", dalam https://www.kompasiana.com/anton_djakarta/kisah-Mashuri Saleh-dan-pengiriman-guru-ke-malaysia_55103f0781331la839bc625ddiakses pada 3 Mei 2018, pukul 13.10 WIB.

Asep Yana, "Pendidikan menurut Mohammad Syafei". Diakses dari: http://asepyana666.blogspot.com/2013/02/pendidikan-menurut-mohammad-syafei.html Pada tanggal 17 Mei 2018 pukul 14:32.

Gellert. 2015. *Optimism and Education: The New Ideologyof Development in Indonesia*. Journal of Contemporary Asia, 2015 Vol. 45, No. 3, 371–393. http://dx.doi.org/10.1080/00472336.2014.978352

http://koransulindo.com/sanusi-hardjadinata-memimpin-pdi-dengan-keteguhan-sikap/

http://www.depdiknas.go.id/sejarah/menteri/21_teukusyarifthayeb.jpg

http://www.unpad.ac.id/universitas/fasilitas/gedung-pertemuan/grha-sanusi-hardjadinata/

https://historia.id/kuno/articles/daoed-joesoef-dan-borobudur-vVJag

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sanusi_Hardjadinata

https://pgi.or.id/sejarah-singkat/, diakses pada 10 Maret 2018

https://tirto.id/johannes-leimena-orang-paling-jujur-di-mata-sukarno-bJLB, diakses pada 5 April 2018

https://tirto.id/m/johannes-leimena-2G, diakses pada 5 April 2018

https://www.geni.com/people/Teuku-Tjhik-Hadji-Mohammad-Thayeb/6000000001269681455

https://www.kompasiana.com/jurnalgemini/kiprah-gubernur-jawa-barat-sanusi-hardjadinata-dan-pangdam-siliwangi-kolonel-kawilarang-1951-1953-suatu-catatan awal_55178e4e813311a3689de319

Jatikom. 2016. Profil Biografi Anies Baswedan LENGKAP. *[Online]*. Diakses dari: https://www.jatikom.com/2016/10/profil-biografi-anies-baswedan-lengkap.html

Kanalbaca. “Biografi Mohammad Sjafei” Diakses dari: http://kanalbaca.com/lectura/biografi-mohammad-sjafei/ Pada 6 November 2018 Pukul 14:03.

Kebijakan Represif Rektor ITB. Catatan Harian Mendikbud: Prof. Ir. Wiranto Arismunandar.dalam mailling list ITB di *ITB@itb.ac.id* tanggal 6 April 1998.

Kemdikbud RI, “INS Kayu Tanam (1926)” Diakses dari: http://ensiklopedia.kemdikbud.go.id/sastra/artikel/INS_Kayutanam Pada 17 Agustus 2018 pukul 16:54.

Kristi. “Todung Sutan Gunung Mulia” . Diperoleh 17 Mei 2018, dari http://biokristi.sabda..org/todung_sutan_gunung_mulia.html.

Laksa Mahadikengrat. “Soewandi, sosok penting di dunia bahasa Indonesia sebelum EYD”. Diakses dari: https://www.brilio.net/sosok/soewandi-sosok-penting-di-dunia-bahasa-indonesia-sebelum-eyd-1710261.html. Pada tanggal 7 September 2018 pukul 17:20.

NN, “Biografi Mashuri Saleh”, dalam http://sejarah-bangsa-kita.blogspot.co.id/2011/10/biografi-Mashuri Saleh-saleh.html diakses pada 3 Mei 2018, pukul 12.45 WIB.

NN, “Mengenal Menteri Pendidikan Dari Masa ke Masa” dalamhttp://sejarahri.com/mengenal-menteri-pendidikan-dari-masa-ke-masa/ diakses pada 3 Mei 2018, pukul 12.13 WIB.

NN, “Putra Juwana dalam sejarah pendidikan Indonesia”, dalam https://paguyubanpati.com/berita/detail/28/putra-juwana-dalam-sejarah-pendidikan-indonesia, diakses pada 22 Mei 2018, pukul 12.16 WIB.

Nuh, M. 2017. *Pendidikan Karakter dalam Membangun Kemandirian BangsaMenuju Kejayaan Indonesia 2045*. Pidato Dies Natalis UNY ke-53 di Auditorium UNY pada Senin 22 Mei 2017) (online) diakses 12 Mei 2018. https://www.uny.ac.id/fokus-kita/prof-dr-ir-kh-mohammad-nuh-dea

Petrik Matanasi, “INS Kayutanam: Sekolah Alternatif yang Melawan Kurikulum Belanda”. Diakses dari: https://tirto.id/ins-kayutanam-sekolah-alternatif-yang-melawan-kurikulum-belanda-cJLR. Pada 17 Agustus 2018 Pukul 16:55.

PNRI. Biodata Pejabat Menteri. Diakses dari: http://kepustakaan-presiden.pnri.go.id/cabinet_personnel/popup_profil_pejabat.php?id=50&presiden_id=1&presiden=sukarno. Pada tanggal 7 September 2018 Pukul 17:18.

Pusaka Jawatimuran, “Prof. Ir. R. Goenarso, Kabupaten Ponorogo”. Diakses dari: http://jawatimuran.net/2013/02/26/prof-ir-r-goenarso-kabupaten-ponorogo/. Pada tanggal 8 September 2018 pukul 12:00.

Saki Murakami, “Call for Doctors! Uneven Medical Provision and the Modernization of State Health Care during the Decolonization of Indonesia, 1930s–1950s”, diakses melalui http://www.jstor.org/stable/ 10.1163/j.ctt1w76ts6.7 pada 10 Maret 2018

Sarmidi Mangunsarkoro - Ki Sarmidi Mangunsarkoro. (n.d). "*Ki Sarmidi Mangunsakoro*".diakses dari http://sarmidi-mangunsarkoro.kurikulum.org/ind/1347-1226/Sarmidi-Mangunsarkoro_30919_sttbinatunggal_sarmidi-mangunsarkoro-cw.html. pada (12 November 2018, pukul 20.17 WIB).

Susanti, A. (2016, 27 Juli). "Reshuffle Kabinet: Ini Program Unggulan Anies Baswedan Selama Jadi Mendikbud". *[Online]*. Diakses dari: https://news.okezone.com/read/2016/07/27/65/1448003/reshuffle-kabinet-ini-program-unggulan-anies-baswedan-selama-jadi-mendikbud (12 Mei 2018)

Viva. 2016. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D. *[Online]*. Diakses dari: https://www.viva.co.id/siapa/read/32-anies-baswedan

Widagdo, H. (2016, 9 Agustus). "Tiga Kebijakan Anies Baswedan yang Layak Dilanjutkan". *[Online]*. Diakses dari: https://indonesiana.tempo.co/read/84811/2016/08/09/handokowidagdo/tiga-kebijakan-anies-baswedan-yang-layak-dilanjutkan (12 Mei 2018)

Yommi Hanna. "Sebelum EYD, Ada Ejaan Soewandi dalam Bahasa Indonesia". Diakses dari: http://bobo.grid.id/read/08680164/sebelum-eyd-ada-ejaan-soewandi-dalam-bahasa-indonesia?page=all. Pada tanggal 7 September 2018 Pukul 17:21.

INDEKS

A

A.H. Nasution, 141, 151, 154, 251, 323, 154

abdi dalem, 95, 147

Abdullah Ahmad Adabiah, 131

Abdullah S Soepardi, 203

Abdurrahman Wahid, 414, 427-428, 431, 435-436, 441-442

Abidin, 67, 181

Abikusno, 170

Abu Hanifah, 3, 111-114, 116-123, 138, 165

Aceh, 4, 6, 83-84, 86, 88-90, 138, 331, 339, 361, 403, 514

Achdiat Kartamihardja, 122

Adam Malik, 169, 214, 216, 324, 339

Adenan Kapau Gani, 169

Adinegoro, 61, 163, 167-168

Adnan Dipodiputro, 281

AFNEI, 153, 170

Agus Salim, 77, 151, 167, 267

Ahmad Dahlan, 10, 449

Ahmad Hasan, 373

Ahmad Munandar, 111

Ahmad Subardjo, 120, 151, 171

Aidit, 157, 205

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI), 366

Akademi Farming, 223

Akademi Maritim Indonesia, 230

Akademi Militer Nasional, 403

Ali Sadikin, 220, 337, 396

Ali Sastroamidjojo, 3, 71, 76-78, 156, 172, 188, 212-217, 267

Al-Irsyad, 115

Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), 234, 236

Ambarawa, 153

Ambon, 72, 84, 265-266, 491

Ambonsche Burgerschool, 265

Amerika Serikat, 75-77, 120, 140, 156, 227, 231-232, 236, 243, 331-332, 350, 391, 403, 405, 413, 421, 427, 429, 441, 455, 487, 514

Amir Murtono, 204, 246

Amir Sjarifuddin, 43, 75, 214-215

Algemeene Middelbare School (AMS), 86-87 164-165, 167

Anas Munaf, 131

Anies Baswedan, 10-11, 487-496, 501, 503

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), 10, 227, 432, 434, 444, 461-463, 474, 503-504, 509

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), 216, 361

Artati Marzuki, 7, 204, 243-249

Akademi Seni Rupa Indonesia (ASRI), 106, 369

Astri Wandansari, 28

B

Badan Hukum Pendidikan (BHP), 463

Badan Kongres Kebatinan Indonesia (BKKI), 148, 157

Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), 148, 163, 170

Badan Penunjang Pelaksanaan Pendidikan (BP3), 493

Bahasa Indonesia, 115-116, 135, 168-169, 317, 336, 378, 513

Bahder Djohan, 3-4, 112, 114, 129-142, 155, 164, 167, 202

Balai Muslimin, 181

Balai Pustaka, 3, 28, 46, 118, 378

Balikpapan, 387, 490

Bambang Sudibyo, 10-11, 441, 455-458, 460-461

Bandoeng Kogyo Daigaku, 181

Bandung, 21, 43, 53, 67, 76, 87, 103, 107, 111, 167, 175, 181, 182, 189, 201, 211, 213, 217, 228, 230, 232, 243, 269, 272-273, 281, 293, 300, 323, 325, 331, 334, 338, 387, 396, 418, 419, 478

Bandung Plan, 270, 272-273

Bangka, 23

Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), 475

Bantuan Operasional Sekolah (BOS), 10, 434, 460, 494

Bantuan Siswa Miskin (BSM), 474

Batavia, 61, 84, 86-87, 89, 95, 103, 113, 131, 148, 211, 265-266, 279

Batavia Centrum, 103, 165

Bataviasche Nieuwsblad, 21

Batusangkar, 114, 116, 175

Belgia, 76, 175, 213, 216, 235, 243

Bengkulu, 55, 163, 507

Bidik Misi, 478-479

Badan Keamanan Rakyat (BKR), 117

Boedi Oetomo, 21, 27-28, 36, 62, 51, 53, 114, 132, 211, 513

Boentaran, 136, 215-216

Bogor, 33, 52, 117, 164, 219, 227, 258, 293, 313, 338, 481, 506

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), 387

Bukittinggi, 111, 129-131, 169

Bulan Buku Nasional, 397

Bulan Gemar Membaca, 397

Bumiputera, 1, 22, 163, 165

Bung Karno, 12, 32, 35, 75, 90, 122, 170, 176, 205, 228, 233, 332, 339

Burhanuddin Harahap, 182, 188, 217

Busono Wiwoho, 204

C

Centrale Burgerlijke Ziekenhuis (CBZ), 117, 132-135, 137, 266

Chrustelijke Europeesche Lagere School, 265

Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI), 229

Chaerul Saleh, 169, 171-172, 214, 216, 258-259, 270

Chalid, 113

character building, 477

Christelijk Etische Partij (CEP), 43

Christelijke Studentenvereniging, 266

Chuo Sangi In, 56

Ciamis, 211, 227, 413

Cimahi, 265

Cindy Adams, 122

Cipto Mangunkusumo, 21-22, 24-25, 112, 114, 149, 220

Candi Borobudur, 251

Cirebon, 104, 214, 233

civil society, 416

Centre for Strategic and International Studies (CSIS), 350

Cut Manyak, 83

D

Dana Bantuan Operasional (DBO), 434

Dang Rahadian, 164, 176

Daoed Joesoef, 345-355, 377

Datuk Manggung, 111

De Beweging, 28

De Express, 21-22, 28

De Indier, 27-28

De Locomotief, 21

Dekrit Presiden, 5, 6, 12, 198, 217, 294, 334

Delft, 88, 182, 323, 387

demokrasi, 5, 7, 104-105, 197-198, 200, 217, 228, 250, 296, 298, 312, 353, 415, 436

- demokrasi liberal, 5, 197-198, 200, 217
- demokrasi terpimpin, 198, 217, 250

Den Haag, 17, 24, 118, 154, 171, 213, 413

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud), 364, 369, 373-374, 376-377, 388, 391, 396, 427, 513

Deputi Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, 285-286

Dewan Film Nasional 286

Desa Mayang Desa Tirip, 148

desentralisasi, 9, 10, 376, 416, 418, 434, 443, 447, 487

Dewan Ekonomi, 10, 455

Dewan Gereja-gereja Indonesia (DGI), 272

Dewan Harian Nasional Angkatan 45, 286

Dewan Mahasiswa, 67, 338, 353, 379

Dewan Pers, 286, 362

Dewan Pertimbangan Agung (DPA), 35, 198, 218, 282, 309, 332

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 107, 156, 172, 230, 294, 351, 479, 504

Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR), 332

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 336, 475

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP), 6-7, 12, 198, 217-220, 227-229, 231-234, 236, 309-310, 312, 331-332, 336

Djamaloeddin, 115

Djamaluddin Adinegoro, 163, 167-168

Doktoranda, 353, 379

Doktorandus, 353, 361, 379

Douwes Dekker, E.F.E.

Dwidjoseputro, 192

E

East West Center, 236

ejaan, 46, 61-62, 316

- Ejaan Melayu-Indonesia (Ejaan Melindo), 316

Ejaan Soewandi, 46, 316

Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), 62, 316

Elsam, 113

Eropa, 350, 421, 514

ESA, 12, 101, 151, 157, 201, 233, 271, 380, 456-457, 469, 504

Europeesche Lagere School (ELS), 17, 43, 84, 111, 130, 279, 361

Evaluasi Belajar Tingkat Nasional (EBTANAS), 9, 376, 435

expired generation, 469

F

Forbel School, 148

Ford Foundation, 236, 313

Front Surabaya, 332

Fuad Hasan, 8-9, 337, 373-374, 376-377, 379-381

Full Day School, 11, 504-505

G

G-30-s PKI, 205, 415

Galeri Nasional, 9, 379-380, 397

Gani, 150, 169, 233, 251, 284

Gapi, 116

Garut, 214, 293

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), 336, 366, 416

Gedung Setan, 115

Geneeskundige Afdeling, 111

Geneeskundige Hogeschool (GHS), 113, 279, 331

geolog, 130, 406

gerakan, 4,11, 43, 54-55, 74, 104, 116, 138, 149, 153, 167, 169, 172, 215, 229, 250, 257, 265-266, 269, 272, 309, 331, 338, 346, 353, 361, 415, 418-419, 443, 446, 478-480, 487-490, 493-494, 508-509

Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), 229-230, 232, 257

Gerakan Indonesia Mengajar, 487-488

Gerakan Indonesia Menyala, 488

Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, 266

Gerakan Nasional Orangtua Asuh (GNOTA), 419

Gerakan Rakyat Revolusioner (Gerindo), 74, 103, 169

Gerakan September Tigapuluh (Gestapu), 415, 201, 246, 251

Goenarso, 67, 181

Goenawan Mohamad, 374

goldfriend, 203

Golongan Karya (Golkar), 157

Graaf van Limburg Stirum, 54

Graha Sanusi Hardjadinata, 294

Gubernur BI, 349

Gunawan, 21, 112, 114, 175

Gurkha, 118, 152

guru, 1, 6, 8, 10, 17, 19, 24, 26-27, 31, 43-45, 51-52, 54-56, 67, 71, 84, 86-89, 95-97, 99-100, 111, 116, 129-131, 134, 139, 140-141, 156, 182, 187, 190, 192, 202-204, 211, 217, 218-219, 227, 233, 245, 250, 265, 279, 281-282, 293, 299, 301-302, 309, 316-317, 323, 335-336, 339, 354-355, 361, 366, 368, 374, 391, 394, 396, 403, 405-406, 415, 417-419, 432-435, 441-443, 455-456, 459, 461-463, 469, 472, 477, 480, 487-489, 492-493, 501, 503-504, 506-510

H

Habibie, B.J., 9, 13, 175, 387, 408, 413-414, 417-418, 442

Hafni Zahra Thaib, 113

Hamami, 133, 167

Hamengkubuwono, 325

Hari Kunjungan Perpustakaan, 397

Hari Pendidikan Nasional, 35, 350, 365, 284-285

Heineman, 113, 116

Hendrik Kraemer, 43

Herman Johannes, Prof, 182, 234

Het Tijdschrift, 21

high order thinking skill (Hots), 506

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), 205, 231, 428, 487, 501

Hindia Baroe, 167

Hindia Belanda, 1, 21-22, 25, 27-28, 31, 33, 35, 43, 45, 52-53, 72, 74-75, 117, 122, 130, 132-133, 136, 147-149, 151, 163, 165, 169, 212, 281, 323, 331, 513

Hindia Poetera, 27-28

Hizbullah, 117-118

Hogere Burgerschool (HBS), 164, 323

Hollandsch Chinese School, 130

Hollandsch Inlandsche School (HIS), 163, 211, 323, 387

Honoris Causa, 46, 181, 191-192, 331

Hooge Veluwe, 62

Howard Jones, 231

human capital, 415-416

human investment, 448

human resources, 448

I

Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), 455, 469

Ika Dai Gaku Jakarta, 331

Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI), 139, 230, 309

Ikatanan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), 428-429

Institiut Keguruan dan Ilmu

Pendidikan (IKIP), 4, 10, 175, 191-192, 299, 301-302, 313, 354, 367, 394, 396, 419, 421, 501

Ikrar Pemuda, 115-116, 133, 168-169

Ilmu Konstruksi Baja, 182

Ilya Waleida, 134

Indische Arts, 129, 133-134

Indische Padvinders Organisatie, 116

Indische Partij (IP), 51, 53, 114

Indonesia Cerdas, 480, 503

Indonesia Muda, 113, 150

Indonesische Clubgebaouw, 112, 165

Indonesische Clubhuis, 116

Indonesische Vereniging, 74

Industri budaya, 397

Instruksi Presiden (INPRES), 479, 510

Insinyur, 67, 181-182, 323, 353, 379

Institut Pertanian Bogor (IPB), 227, 313

Institut Teknologi Bandung (ITB), 67, 181, 313, 323, 403

Insulinde, 22, 51, 53-54

Intruksi Presiden (Ispres), 333

IPPI (Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia), 139, 230, 232, 309

Irian Barat, 4, 76, 120, 137-139, 176, 233, 309, 387

Institut Kesenian Indonesia (ISI), 369

Iwa Kusumasumantri, Prof., 74, 227

J

Jakarta, 19, 28, 30, 33, 37, 46, 51-56, 61-62, 71, 75-76, 78, 86, 90-91, 95-97, 101-104, 106-107, 113, 117, 122, 131-135, 137, 142, 149-150, 157, 164-170, 174-175, 181, 188, 190, 192, 203, 205, 211-216, 220, 228-230, 233-234, 243, 257-260, 266-267, 269, 281-284, 286, 313,315-316, 325, 331-332, 334-335, 337-338, 345-348, 351-353, 363, 373, 376-378, 387, 396, 413-414, 419, 431-432, 463, 477, 510

jaksa, 129-130, 148-149, 495

Jaring Pengaman Sosial (JPS), 416, 419, 434-435

Jawa Tengah, 61-62, 95, 151-154, 157, 163-164, 187-188, 190, 192, 198, 293, 309, 312, 323, 346, 361, 373, 377, 387, 403, 427, 429, 455

Jawa Timur, 67, 175, 231, 293, 377, 387, 403, 469, 501, 510

Jember, 231, 236

Jerman Barat, 387

JICA, 469

Joko Widodo, 11, 13, 487, 490, 501-503, 506, 508

Jong Ambon, 133, 167, 265-266

Jong Bataks Bond, 133

Jong Islamieten Bond, 122, 133

Jong Java, 72-73, 95, 102, 132-133, 150, 154, 167, 211

Jong Soematranen Bond (JSB), 131, 164

Juliana School, 95, 269

Juwono Sudarsono, 9, 413, 415, 417-421

K

Kabinet, 1, 3-5, 7-13, 35, 57, 61, 67, 75, 103, 106, 111, 114, 118-119, 122, 129, 136-141, 147, 154-157, 171-172, 175-176, 182, 188, 190-192, 197-198, 200, 204-205, 215-217, 220, 227, 232, 236, 246, 248, 250-251, 257-259, 269-271, 273, 285-286, 293-296, 299, 301, 309, 313, 325, 332, 345, 350, 365, 374, 387, 413-414, 416, 427, 431, 441-442, 455, 462, 469, 472, 475, 477, 487, 490, 501, 506

Kabinet Ali I, 157, 182

Kabinet Amir Syarifuddin, 118, 269

Kabinet Ampera, 5, 7-8, 12, 188, 190-191, 286, 293-296, 299, 301, 325

Kabinet Djuanda, 176, 197-198, 270, 294-295

Kabinet Dwikora I, 12, 257

Kabinet Dwikora II, 5, 12, 188, 205, 257

Kabinet Dwikora Yang Disempurnakan, 271, 285-286

Kabinet Gotong Royong, 10, 13, 441-442

Kabinet Hatta, 75, 111, 114, 118

Kabinet Hatta II, 106, 154

Kabinet Kerja I, 12, 176, 198, 200

Kabinet Kerja II, 200

Kabinet Natsir, 4, 129, 137-140, 154

Kabinet Pembangunan, 8, 227

Kabinet Pembangunan I, 8, 12, 286, 309, 313, 325

Kabinet Pembangunan II, 309, 325

Kabinet Pembangunan III, 345, 350

Kabinet Pembangunan IV, 365

Kabinet Pembangunan VI, 387

Kabinet Persatuan Nasional, 10, 13, 427, 431, 441

Kabinet Presidential, 3

Kabinet Reformasi Pembangunan, 13, 413

Kabinet Sukiman, 140, 147, 155-156, 172

Kabinet Wilopo, 4, 129, 139-141

Kadarusman, Mr., 227

Kadilangu, 164
KAH Hidding, 46
Kalimantan, 51, 88, 309, 316, 377, 387
Kalimantan Selatan, 228, 377
Kanada, 75, 373
Kaoem Moeda, 21
Kartini, 111, 427
Kartini School, 51-52
kebebasan kampus, 332
Keluarga Alumni Gadjah Mada (KAGAMA), 309
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), 9, 257, 476, 494-495, 501-502, 509, 514-515
Kementerian Agama (Kemenag), 478, 505
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), 403
Kepanduan Bangsa Indonesia, 282, 309, 428
kepatihan, 148-149
Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), 332
Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), 205
Ketapang, 51
Kewarganegaraan yang bertanggungjawab, 271
Ki Bagus Hadikusumo, 163
Ki Hadjar Dewantara, 17-20, 23-39, 45, 55, 57, 61, 99-101, 103, 495
Ki Nariya, 117
Ki Sarino, 5, 187-188, 190-192
Ki Sarmidi Mangunsarkoro, 95-97, 99-100, 102-107
Kido, 152
Kido Butai, 152
KIPNAS, 415
Kyai Bustam Kertoboso I, 279
Klepek, 111
KNID, 117-118
Knowledge Based Society, 458
Kakuei Tanaka, 353
Komando Militer Pangkalan Jakarta Raya, 346
Komando Militer Kota Besar Djakarta, 332
Komisi Pembaharuan Pendidikan, 351
Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK), 445
Komite Nasional Indonesia, 75, 103, 117, 181, 216, 293
Komite Perdamaian Indonesia, 197
Konferensi Asia Afrika (KAA), 294
Konferensi Meja Bundar (KMB), 35, 106, 118, 154, 171, 188, 269
Konferensi Nasional World University Service, 229
Konflik Indonesia-Belanda, 387
Kongres, 17, 29, 30, 33, 52-54, 76, 95, 101-102, 104, 106-107, 112, 114-116, 132-134, 141, 148, 150, 154, 157, 163, 167-169, 188, 213, 215, 202-203, 266-267, 281, 302, 378, 415, 418
Kongres IX PGRI, 202
Kongres X PGRI, 203
Kongres Kebudayaan, 106, 141, 154, 281
Kongres Pemuda, 101, 112, 114-116, 133-134, 163, 167-168, 266
Kongres Pemuda I, 115, 133, 167
Kongres Pemuda II, 115, 133-134, 150, 168-168, 267
Koninklijke Nederlands-Indische Leger (KNIL), 118, 153, 269
Konstituante, 107, 115, 155, 188, 334
Konstruktivisme, 444, 459
Kontes ratu-ratuan, 355
Komando Strategi Angkatan Darat (Kostrad), 205
KOTI G-5, 373
Koto Gadang, 129-130, 134
KPM, 116
Kramat Raya, 112, 142, 165
Krido Wacono, 149
krisis ekonomi, 408, 414-415, 417, 432, 434, 460, 489
KTSP, 456-458, 460, 471-472
KTT Beograd, 76
Kuningan, 325, 487
Kupang, 23, 2343
kurikulum, 3, 6, 8, 10, 45, 118, 131-132, 192, 201-202, 259, 298-299, 301, 315, 336, 339, 368, 376, 394, 414, 416, 418, 433, 444, 456-460, 464, 471-473, 475, 492, 503, 507-508, 510
Kurikulum 1968, 301, 336
Kurikulum 1975, 9, 336, 354, 366
Kurikulum 1994, 392, 415, 444
Kurikulum 2013, 436, 469, 471-473, 475, 492
Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), 444, 456, 472, 492
Kutaraja, 84, 88-89, 203, 219
Kweekschool, 51-53, 164, 265, 293

L

Landraad, 148
Laskar Bambu Runcing, 172
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, 405, 407
Lembu Amiluhur Prijono, 205

Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas), 362, 373, 414

life-long education, 313

Linggarjati, 35, 104, 269

link and match, 9, 391-394, 408

LPK, 190

LPN, 200

LPTK, 391

LSPK, 190

Lubuk Begalung, 129

Lukman Hakim Saifuddin, 505

M

M. Amin Nasution, 91

M. Sarbini, 153

Madiun, 61, 74, 104, 293, 332, 501

madrasah, 54, 129, 315, 333, 427, 441, 443, 462, 505-506

  madrasah diniyah, 505-506

Madura, 104, 150, 175, 214, 387

Magelang, 71, 152-154, 273, 403, 441

Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia (MBIM), 317

Majelis Ulama Indonesia (MUI), 505

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), 441

Makassar 5, 111, 214, 234, 419, 463, 478

Malang, 21, 75, 104, 106, 175, 191-192, 231, 313, 387, 396, 419, 441, 501, 510

Malari, 353

Malik Fadjar, 441-449, 501, 503

Malik Hitam, 131

Maluku, 89, 233, 265, 269, 332, 377, 491

manajemen berbasis sekolah, 416, 442

Mandailing Natal, 43

Mangkunegara, 24, 27, 147

  Mangkunegara VII, 24, 27

Manifesto Politik (Manipol), 198

Manipol/USDEK, 5-6, 198, 201, 203, 229-230, 233, 236

Manipolis, 204

Malaysia, Philipina, Indonesia (Mapilindo), 236

Marajo Ameh, Dt, 3, 111

Maramis, 151, 171, 214-215

Mardi Budaya, 151

Masyumi, 104, 117-118, 157, 270, 429, 514

Medan, 4, 28, 89-91, 113, 116, 122, 213-214, 332, 345-346, 419

Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO), 346

Megawati, 10, 13, 431, 441-442, 446

Menteri, 331-339, 345, 348, 350-352, 354-355, 363-364, 368-369, 374, 378-381, 387-388, 390-391, 396-397, 406, 408, 413-415, 419, 420-421, 427-429, 431-433, 435-436, 441-444, 455-458, 460-461, 469-470, 472-479, 487, 490-492, 494, 496, 501-506, 509-511, 513-515

  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), 387, 487, 490, 501

  Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), 441, 469

  Menteri Muda, 67, 198, 200, 269, 272

    Menteri Muda Bidang Sosial, 198, 200

  Menteri P & K, 220, 286-287, 295, 312-313, 316, 337, 345, 351, 354-355

  Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, 218, 271, 331

  Menteri Pertahanan, 216, 286, 414, 420

  Menteri Utama Bidang Industri dan Pembangunan, 294

Mesir, 294, 373

Militer Jepang, 35, 56, 67, 90, 117, 135, 152, 323, 331, 346

Mindanao University, 331

Miriam Budiharjo, 413

missi goodwill, 118

MMAS, 396

Mohammad Nuh, 477-478, 481

Mochtar Kusumaatmadja, 123

Moh. Samin Thaib, 113

Moh. Yamin, 112, 114-116

Mohammad Amir, 163

Mohammad Hatta, 35, 52, 74, 88, 130-132, 141, 154, 170, 350

Mohammad Rapal, 129

Mohammad Sjafei, 51, 53, 55, 57

Soenardi Djaksodipuro, Mr. R.M.T., 149

Muchlas Mubarad, 230

Muchtar Abidin, 181

Muhadjir Effendy, 11, 487, 501, 503-511

Muhammad Joesoef, 345

Muhammad Thabrani, 133

Muhammad Yamin, 55, 133-134, 150, 163-167, 169-176, 202

Muhammadiyah, 10-11, 23, 115, 293, 427-429, 441, 455, 501, 506

Murba, 172, 197, 216, 302

Museum Nasional, 394-395, 397

Mustopo, Prof., 229

mutasi guru, 509

N

Nagari Baringin, 175

Narpo Wandowo, 149

Nasionalis Agama dan Komunis (Nasakom), 227, 231, 246, 248

Nation Building and Education, 197

National Defence University, 501

Nawa Cita, 490, 503, 508

Nazir Dt. Pamuncak, 131

Negeri Belanda, 17, 22-25, 27-28, 72, 78, 86-88, 116, 118, 132-133, 175, 197, 211, 212, 387

NERKAI, 136

NICA, 118, 123, 137-138, 170, 181, 192

NKK/BKK, 8, 349, 351, 353, 377

Normaals School, 129

Notosuroto, 28

Nugroho Notosusanto, 8-9, 361-365, 367-368, 374, 376

Nursiah Dahlan, 111

O

OECD, 506

oikumene, 266, 269, 272

Omar Komarudin, 231

Angka Loro, 95, 129, 148, 163

Orang Tua Asuh, 369

Orde Baru, 7-9, 12, 111, 122-123, 157, 205, 227, 293, 296, 302, 310, 317, 325, 332-333, 350, 368, 376, 388, 403, 413-414, 417, 429, 431-432, 462

Orde Lama, 5-7, 12, 205, 310, 313, 333, 353

Ordonansi Sekolah Liar, 33, 54, 187

Osamu Sirei, 45

OSVIA, 61, 111, 211

otonomi, 10, 57, 415-416, 418, 442-445, 456, 458, 463, 487, 505

Otto Iskandardinata, 181

P

Padang, 51, 53, 55, 111, 129-131, 134, 169, 396, 419

Padang Panjang, 111, 113-114, 163

Padang Sidempuan 43

Pamekasan, 387

Panca Dharma Bakti, 233

Panca Marga, 229

Pancawardhana, 204

Pancacinta, 198, 200-201, 203-204

Pancasila, 5, 8-9, 35, 118, 163, 170, 189, 191, 200-203, 218, 227, 229, 233-234, 248, 258, 269, 285, 298-299, 301, 312, 336, 339, 354, 365, 368, 515

Pancatinggi, 203

Pandji Pustaka, 190

Pandji Soeroso, 151

pandu, 428

Pandu Indonesia, 116

panewu, 147-149

Pangeran Hangabei, 150

Pangeran Koesoemodiningrat, 148

pangreh praja, 31, 61, 149, 187

panitia kecil, 151, 170

Panitia Penyelidik Pengajaran RI, 3, 35, 61

Papua, 176, 325, 377, 387, 502, 506

Paramadina Fellowship, 487

Pariaman, 129-130

Parindra, 150-151, 323

Partai Demokrasi Indonssia (PDI), 299, 302

Partai Indonesia Raya, 150, 323

Partai Insulinde, 51, 53-54

Partai Komunis Indonesia (PKI), 157, 200, 228, 245, 257, 332

Partai Kristen Indonesia (Parkindo), 45, 269

Partai Nasional Indonesia (PNI), 52, 74, 102, 116, 138, 150, 182, 213, 312

Partindo, 74, 103, 169, 187, 273

Pasar Baru, 132

Pati, 104, 188, 309

Paul Krugerschool, 265

Paul Pinontoan, 167

Payakumbuh, 129

Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), 9, 285, 368

Pegangsaan Timur, 75-76, 215

Pekalongan, 31, 187, 231

Pelajar Islam Indonesia (PII), 501

Pelajar Minahasa, 167

Pemalang, 187, 387

Pemuda Kaum Theosofi, 133

pendidikan, 1-13, 17, 19, 23-31, 33-35, 37-39, 43, 45, 51-57, 61, 67, 71-72, 75, 84, 86-89, 91, 95-97, 99-103, 106-107, 111-113, 118, 129-134, 137-140, 142, 147-150, 155-157, 163-166, 172, 175, 181-182, 187-188, 190-192, 197-204, 211-212, 216-219, 227-234, 243, 245-251, 257, 259-261, 265, 273, 279, 281-282, 284-287, 293-296, 298-299, 301-303, 309, 311-317, 323, 325-326, 331-333, 335-336, 338-339, 345-346, 348-354, 361-369, 373-381, 387-388, 391-394, 396, 403-408, 413- 414, 416-419, 421, 427-429, 431-436, 441-449, 457-464, 471, 473-475, 477-478, 480, 487-496, 501-511, 513-515

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 495, 503

pendidikan Islam, 279, 379, 447-449

pendidikan karakter, 11, 366, 436, 471, 477-478, 503, 505, 508, 511

pendidikan profesi guru, 459

pendidikan vokasi, 510

Pendudukan Jepang, 53, 90, 100, 117, 120, 123, 135-136, 151, 181, 187, 215, 281, 323, 331, 361-362

Pengerahan tenaga Mahasiswa (PTM), 487

Pengkhianatan G30S/PKI, 369

Penguasa Perang Tertinggi, 346

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), 508, 511

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), 505

Poenale Sanctie, 54, 213

Perhimpunan Indonesia, 27, 55, 74, 88, 116, 213

Perhimpunan Pelajar Indonesia, 350

Peristiwa 3 Juli, 163, 171

Perjanjian Linggarjati, 269

Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017, 507

Permendikbud Nomor 23/2017

Perpanjangan Wajib Belajar Mengajar, 351

persatuan, 10, 13, 36, 62, 95-96, 102, 106, 115-116, 133, 135, 139-140, 150, 157, 163, 165-170, 175, 197, 202, 213-214, 216, 229, 245, 250, 266, 269, 272, 286, 309, 323, 418, 427, 431, 441, 445, 493, 504

Persatoean Hindia, 28

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), 202, 245, 418

Persatuan Pelajar Indonesia, 323, 504

Persatuan Perjuangan, 163, 170, 216

Persatuan Sarjana Hukum Indonesia (PERSAHI), 309

Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), 272

Perserikatan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia (PPMI), 228

pesantren, 129, 469, 505

Peta, 117, 123, 353, 361-362

Peureulak, 331

PGII, 139

Piagam Jakarta, 170

Piagam Kerja Sama Kebahasaan, 317

PID, 122, 331

Pidie, 83

PJP I, 388, 391

PKBM KBRI, 504

PMDK, 369, 377

PMGM, 397

PMI, 136-137, 204, 214-215, 286

PMP, 368

PNI-Baru, 52

Poesara, 33, 285

Poetera, 32, 170

Politieke Inlichtingen Dienst, 331

Ponorogo, 67

PP&K, 57, 111, 114, 117-118, 129, 137-141, 147, 155-156, 197-198, 200-202, 204

PPKI, 33, 90, 103, 170

PPLM, 336

PPPI, 116

Prancis, 51, 86-87, 346, 349-351, 421, 469

Princess Juliana School, 95, 269

Probosutedjo, 431

Program Wajib Belajar Sembilan Tahun, 408

Proyek Paket Buku Departemen P dan K, 315

Proyek Perintis, 335, 369

PRRI, 57, 141, 361, 541

PSG, 392-393

Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB), 9, 366, 368, 374, 376, 392

PT Perkebunan Nusantara, 403

PUOK, 379

Purworejo, 187, 279, 281

Pusat Pelatihan Pendidikan Masyarakat, 336

Pusat Pengkajian Strategi dan Kebijakan (PPSK), 455

Pusat Sejarah Angkatan Darat, 361-362

Putera, 35

Putri Mardika, 51

R

R. Arismunandar, 403

R. Ngabei Sastroamidjojo, 71

R.A. Endang Soetanti, 148

R.A. Soenarni, 148

R.A. Soenarsi, 148

R.A. Sri Danarti, 148

R.M. Djoko Soedibjo, 148

R.M. Soenarso, 148

R.M. Tripomo, 148

R.P. Notosusanto, 361

Siti Sundari, Raden Ayu, 88, 164

Soenartinah, Raden Ayu, 147

Soemantri Brodjonegoro, Raden Mas, 323, 325, 332

Djaksodipura Soenardi, Raden Mas Tumenggung, 149

Gitodiprojo, Raden Ng., 147

Soetedjo Brodjonegoro, Raden, 323

radikalisme, 506

Radjiman, 34, 170

Ramana Usman, 163

Ratu Wilhelmina, 31, 187

Recht Hoogeschool, 61, 87, 149 163, 165, 265

Rechts School, 148-150

reformasi, 9, 13, 175, 408, 413-418, 431, 443, 445-447, 462, 493, 508

Rembang, 361

Rencana Pembangunan Jangka, 481, 489, 509

Menengah Nasional (RPJMN), 489, 509

Rencana Strategis (RENSTRA), 458, 489

Resimen Mahasiswa (Menwa), 234, 406

Renville, 35, 77, 105-106, 267

republikein, 123, 137, 152, 154

Republik Maluku Selatan (RMS), 89, 332

reshuffle kabinet, 11, 176, 204, 205, 251, 259, 472, 477

revitalisasi SMK, 510

revolusi industri 4.0, 508, 515

revolusi mental, 508

Rheinish-Westfaelische Technische Hochschule, 387

RHS, 149, 165, 265

Riau, 234

Rijks Universiteit, 87-88

Republik Indonesia Serikat (RIS), 3-4, 35, 75, 111, 118, 154, 294

Riset The Indonesian institute, 487

Robby Sumolang, 230

Robert Kennedy Scholarship, 231

romusha, 135-136, 215

Rooseno, 181

Radio Republik Indonesia (RRI), 260, 373

Rumah Sakit Umum Pusat Cipto Mangunkusumo, 220

Rumah Sakit Zending Immanuel, 269

Ruslah Sarjono, Mr., 227

Ruslan Abdulgani, 233

S

Sabarani, 133

Salatiga, 153, 198, 243, 281

Samarinda, 102, 387

Sanusi Hardjandinata, 188

Sanusi Pane, 43, 115-116, 133, 167-168

sanyoo sendenbu, 170

Sapta Usaha Tama, 200

Sarbaini, 167

Sarekat Islam (SI), 21, 72

Sarekat Usaha, 131

Sarjana Hukum (SH), 61, 74, 87, 309, 353, 379

Sartono Kartodirjo, 313

Sartono, Mr., 213, 227

Sastrosoewignyo, 149

Satiman Wiryosanjoyo, 150

Satya Lencana Karya Satya, 120

Sawahlunto, 134, 163, 175

Schakel School, 129-130

School tot Opleiding van Inlandsche Artsen (STOVIA), 129, 513

SD Inpres, 333, 335

SDM, 392-393, 416-417, 433, 446-448, 479-480, 506, 508, 510-511

Seinendan, 117

Sekar Roekoen, 167

sekolah, 2, 3, 7-11, 17, 19, 26-27, 31, 33, 35, 43, 51-55, 61, 67, 71-73, 84, 86-87, 89, 95-97, 99-100, 103, 111-112, 129-132, 134-135, 138-139, 147-150, 155-156, 163-165, 167, 181-182, 187, 190, 192, 198, 201-202, 211-212, 227, 232, 234, 248, 250, 261, 265-266, 279, 281-282, 286, 293, 298, 309, 313, 315, 323, 331-333, 335-336, 339, 351, 354-355, 361-362, 365-366, 368-369, 373, 376, 381, 387-389, 391-394, 396, 403, 413, 415-416, 418-419, 427-428, 432-436, 441-443, 445, 447, 455-457, 460-462, 478-480, 487, 489, 492-494, 501-508, 510, 514

- Sekolah Angka Loro, 95, 148, 163
- Sekolah Bertaraf Internasional (SBI), 461
- Sekolah Dokter Djawa, 132
- Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, 335
- Sekolah Melayu, 129
- Sekolah Pendidikan Guru, 129, 293, 335, 354, 418
- Sekolah Raja, 51, 53, 129-130
- Sekolah Rakyat, 84, 130, 261, 293, 427, 441
- Sekolah Rendah, 17, 52, 72, 155-156, 198, 403
- Sekolah Staf Komando Angkatan Darat, 373

Sekretariat Kerjasama Antar Lima Universitas, 338

Semarang, 28, 31, 54, 71, 135, 151-154, 164, 190, 214, 233, 279-280, 282, 312, 315, 323, 373, 403, 419

Senat Mahasiswa (SM), 230, 338, 353, 379

Sendenbu, 170

- Sendenbu-Sendeka, 170

Senen, 112, 132

SESDILU, 362

SESKO ABRI, 362

Seskoad, 331, 373

Seskoal, 373

SFMA, 190, 192

Sigli, 83-84, 90

Simposium Angkatan 66 Menjelajahi Trace Baru, 312, 314-315

Sin Tit Po, 103

Singgih, 61, 151, 281

Sipenmaru, 337, 369

Sistem Zonasi, 507-509

Siti Jasiah, 345-346, 349

Siti Nurhati, 113

Siti Sa'adah, 163

Siti Sundari Soedarsono, 88, 164

Siti Zairi Yaman, 134

Sjafruddin Prawiranegara, 349

SK Bersama, 333

Satuan Kredit Semester (SKS), 353

Slawi, 233

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), 388, 394, 417, 433

SM3T, 504

Sekolah Menengah Atas (SMA), 111, 190, 309, 335, 377, 387-388, 394, 413, 427, 455

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), 394

SMPT, 379

Sekolah Menengah Umum (SMU), 394

SNID, 366

Soebandrio, 153, 258

Soebardjo, 24, 88, 171, 212-216

Soedirman, 153-154, 216

Soegondo Djojopuspito, 102, 115

Soeharto, 5, 7-9, 12, 35, 38, 188, 192, 227, 258-259, 273, 294, 302, 309-313, 316-317, 325, 332, 350, 365-366, 369, 373-374, 376, 387, 397, 406, 408, 413-415, 417, 431

Soekarno, 4-8, 11-12, 32, 34-38, 44-45, 55-57, 74-76, 91, 102, 107, 120, 122, 135-136, 138-141, 151, 153, 157, 163, 170-171, 176, 188, 197-198, 200-201, 204-205, 213-220, 227, 229-236, 245-246, 248-251, 257-259, 266, 268-271, 273, 283, 294, 310-312, 316, 334, 365, 373, 415, 431, 441

Soemantri Brojonegoro, 312, 315

Soenaryo, 181

Soerabaijasch Handelsblad, 21

Soerabaija, 21

Soerachman Tjokrohadisoerio, 181

Soewandi, 3-4, 46, 61-62, 181-182, 316

Soewardi Soerjaningrat, 17, 19, 21-24, 27-28, 31, 53

Soewarni, 148

Soli Deo Honor (SDH), 281

Sala, 75, 102, 106, 148, 150, 153, 281, 323, 373

Sorbonne, 346, 349-350, 354

Sosrokartono, 28, 282

Soulehuway, 167

Sragen, 151

Sri Paku Alam III, 17

Sri Susuhunan Pakubuwono X, 147

Sudjarwo, 153

Sri Wurjan, 403

Standar Isi, 456, 460, 463-464

STM Pembangunan, 339

STPDN, 432

STT, 67, 181-182

Studeerende Minahasaers, 133

Student Center Learning, 416

studie fond, 114

Subiyadinata, 202-203

Subroto Ario Mataram, 28

Sudirman, 171, 325, 361

Sugondo Joyopuspito, 102, 115

Sukabumi, 117, 120, 269, 293

Sukiman, 74, 138, 140, 147, 151, 155-156, 172

Suku Pisang, 114

Sulastomo, 205

Sumantri Harjoprakosa, 233

Sumarto, 167

Sumatera Timur, 88, 213, 346

Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), 332-333, 475

Sumpah Pemuda, 97, 102, 112, 116, 133-134, 163, 165, 169, 338, 352

Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar), 258

Supomo, 151, 163

Surabaya, 338, 387, 419, 469, 474

Surakarta, 27, 47, 95, 105-106, 134, 147-150, 153, 164, 215, 309, 373, 441

Suruh, 153

Suryopranoto, 21

Susilo Bambang Yudoyono, 13, 414, 469

Sutan Boerhanuddin, 129

Sutan Syahrir, 104, 123

Sutomo, 112, 114, 149-150, 259

Suwandi Notokoesoemo, 182, 188, 202

Suwarso, 167, 403

Suwiryo Kadarman, 150

Suyono Juned Pusponegoro, Prof, 227

SVIK, 197

swallow, 130

Syahrir, 3, 104, 123, 170-171, 269, 413

Syarif Thayeb, 8, 331-339

T

Tabrani, 115, 167-169

Taher Marah Sutan, 131

Talawi, 134, 163

Taman Mini Indonesia Indah (TMII), 353

Taman Siswa, 1, 5, 13, 26-27, 29-31, 33, 38, 55, 74, 89-90, 95-101, 103, 187-188, 190-191, 214, 281-283, 285-286, 295, 309, 315

Tan Malaka, 163, 167, 170-172, 215-216

Tanah Air, 25, 117, 165-166, 170, 200, 339

Tanah Datar, 175

Tanjung Morawa, 113, 116-117, 140

TAP MPR, 312, 338, 366

TAP MPRS, 227, 246, 248

tapa brata, 147

Tartib Prawirodiharjo, 204

Taufik Ismail, 396

teaching factory, 510

Technische Hogeschool Delft, 387

Tegal, 187, 233, 427

Televisi Edukasi (TV-E), 445

Temanggung, 71, 455

tentara, 75, 78, 89-90, 117-118, 132, 136-137, 151-154, 181, 246, 281, 293, 309, 323, 331-332, 361-362

- Tentara Keamanan Rakyat (TKR), 117, 361
- Tentara Nasional Indonesia (TNI), 331
- Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), 204-205, 246
- Tentara Pelajar, 309, 361
- Tentara Pendudukan Jepang, 151, 331

Teuku Bintara Pineung, 83

Teuku Moehammad Hasan, 81

The Five Principles of Education, 200

The International Lenin Peace Prize, 197

The New Emerging Forces, 201

THS, 181, 323

Tjahaja Timoer, 21

Tjipto Mangoenkoesoemo, 22-23, 28

Tjokroaminoto, H.O.S., 21

Tjuu Gakko, 346

Tokyo, 56, 230, 243

Toronto University, 373

Tri Dharma, 6, 227, 229

Tri Koro Dharmo, 132, 150

Tri Tuntutan Rakyat (Tritura), 205, 259

Todung Sutan Gunung Mulia (Mulia), 3, 41, 43

Televisi Republik Indonesia (TVRI), 369, 487

U

Ujian Negara, 286, 315

Ujian Sekolah, 147, 286, 315

Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN), 377

UKG, 492

UKM, 379

uleebalang, 83-84, 86, 88, 331

UNBK, 11, 506-507

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), 117-119, 199-200, 332, 354, 508

Ungaran, 154, 190, 192

United Nations Children's Fund (UNICEF), 120, 243

universitas (university), 4, 6, 10, 24, 35, 43, 45, 72, 88, 91, 106, 141-142, 157, 164, 175-176, 181-182, 197-198, 200, 213, 217-219, 227-234, 236, 261, 267, 273, 286, 294, 309, 312-313, 323, 331-332, 335, 338, 346, 349-352, 354, 361, 369, 373, 379, 391, 394, 396, 403, 405, 408, 413, 419, 421, 427, 429, 433, 441-442, 445, 477, 487-488, 501

- Universitas Airlangga (Unair), 197, 338, 433, 501
- universitas biasa, 313
- Universitas Brawijaya, 231, 236
- Universitas Cendrawasih, 233
- Universitas Gadjah Mada (UGM), 106, 218, 227, 309, 361, 501
- Universitas Hasanuddin, 313, 349
- Universitas Indonesia (UI), 141, 197, 219, 227, 323, 331, 361, 373, 403, 413
- universitas induk, 313
- Universitas Islam Negeri (UIN), 442
- Universitas Kristen Indonesia, 45, 273
- Universitas Lambung Mangkurat, 228
- Universitas Leiden, 43, 72, 197
- Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), 441, 501
- Universitas Nusa Cendana, 234
- Universitas Padjadjaran (Unpad), 227, 313
- Universitas Pattimura, 233
- Universitas Sawerigading, 234
- Universitas Udayana, 198

University of California Berkeley, 232

University of London, 361

University of the Philippines, 232

Usman Baginda Khatib, 163

Usmar Ismail, 111

Utrecht, 236

Undang-undang (UU), 2, 106, 197, 217-218, 351, 434, 442, 456, 504

UU Pokok Pendidikan dan Kebudayaan, 351

UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), 434

V

Van Deventer, 28

Van Ophuijsen, 61

Vereniging Ambonsche Studenten, 265

Vervolgschool, 130, 293

Volksraad, 43, 54, 88-89, 169

Volkschool, 84, 130

Voorbreidende Afdeling, 111

Vrije Universiteit, 46

W

Wahidin Sudirohusono, 114

Wajar Dikdas 9 Tahun, 391

Wardiman Djojonegoro, 293, 379-380, 387-392, 394-395, 406

wayang kulit, 23, 147

Wijarsih Prawiradilaga, 269

Wikana, 105, 169

Wilhelmina, 31, 187

Wilopo, 4, 119, 129, 139-141, 169

Wiranto, 190

Wiranto Arismunandar, 9, 403, 406-408, 413

WJS Poerwadarminta, 61

Wongsonegoro, 4, 138-141, 147-157

Y

Yahya A. Muhaimin, 425, 427-432, 434-436

Yamin, 55, 115, 163-172, 175-176

Yap Thiam Hien, 45

Yogyakarta, 17, 19, 21, 27, 31, 34-36, 38, 67, 74-75, 89, 95, 97, 100, 102, 104, 106, 118, 137, 153-154, 164, 171, 182, 188, 190, 197, 205, 216, 218, 229, 243, 257, 273, 282, 315, 323, 345, 361, 369, 377, 381, 396, 403, 419, 427-429, 441, 455, 487-488, 494

Z

Zahra, 111, 113

Zendingsconsuulaat Batavia, 266

NARASUMBER

Dr. Anhar Gonggong

Anhar Gonggong adalah seorang sejarawan. Lahir di Pinrang, Sulawesi Selatan, pada 14 Agustus 1943. Mendapatkan gelar Sarjana Muda dalam bidang Ilmu Sejarah Asia, Universitas Gadjah Mada, tahun 1967; gelar Sarjana di almamater yang sama tahun 1976; Mengikuti kuliah Orientasi tentang Sistem Politik di Negara-negara Berkembang pada Jurusan Ilmu Politik Fakultas Hukum, Universitas Leiden, Belanda, yang diselesaikannya tahun 1980; dan mendapatkan gelar doktor dari Ilmu-ilmu Sastra bidang Sejarah, Universitas Indonesia, tahun 1990.

Berbagai profesi dan jabatan telah disandangnya, antara lain, Staf Pengajar di Universitas Atmajaya, Jakarta, 1984-sekarang; Staf Pengajar pada Jurusan Sejarah/Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1991-sekarang; Widyaiswara/Tenaga Profesional Lemhannas, 1985-sekarang; Staf Pengajar di Sekolah Tinggi Intelijen Negara, Sentul, Bogor, 2005-sekarang; Direktur Sejarah dan Nilai Tradisional, Depdikbud, 1996-1999; Staf Ahli Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Bidang Pranata Sosial, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2000-2001; Deputi Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Bidang Sejarah dan Purbakala, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2001-2003. Beberapa karyanya antara lain, Biografi : *H.O.S. Tjokroaminoto*, Depdikbud, 1984, *Amandemen, Konstitusi, Otonomi Daerah dan Federalisme, Solusi untuk Masa Depan,* Media Pressindo, Yogyakatra, 2001, dan *Indonesia, Demokrasi dan Masa Depan Pergumulan antara Masyarakat Warisan dengan Masyarakat Merdeka-Ciptaan,* Ombak, Yogyakarta, 2002.

TIM EDITOR

Dr. Mukhlis PaEni

Mukhlis PaEni lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, 7 Mei 1948. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Sejarah, Fakultas Sastra dan Kebudayaan, Universitas Gadjah Mada pada 1975. Mengikuti Program Doktor kerjasama Indonesia-Belanda di bidang sejarah, UGM, di bawah Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo, 1976; pendidikan PLPIIS (Pusat Latihan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial) Banda Aceh, 1977; *Advanced Studies* dalam Antropologi Sosial dan Sejarah, University of Oslo, Norwegia, 1980, dan Doktor dalam Antrologi Sosial melalui kerjasama University of Oslo, Norwegia dan Universitas Hasanuddin, 1983, dengan disertasi berjudul: *Gayo: Kelanjutan Tradisi dalam Perubahan Sosial di Aceh, Disertasi Mengupas tentang Perubahan Sosial dan Aksi-aksi Konflik yang ada di Masyarakat*, dengan predikat Cum Laude.

Berbagai profesi dan jabatan telah disandang, di antaranya: sebagai dosen Universitas Hasanuddin sejak 1975; dosen tamu di Departement of History, Australia National University; peneliti tamu SOAS University of London, 1984; Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, 1998-2003; Staf Ahli Menteri Bidang Pranata Sosial Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2004-2006; Ketua Lembaga Sensor Film 2009-2012; Tenaga Pengajar Luar Biasa Fakultas Pascasarjana Program Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 1999-sekarang; dan Ketua Umum Masyarakat Sejarawan Indonesia 2006-2016.

Dr. Karsono H. Saputra

Karsono H. Saputra adalah editor/copywriter sekaligus seorang dosen Sastra Jawa di Universitas Indonesia sejak 1989 sampai sekarang. Pria kelahiran Klaten, 15 Februari 1953, ini menempuh pendidikan S3 di Universitas Indonesia. Sampai saat ini, ia telah menghasilkan banyak karya ilmiah, di antaranya adalah *Panji Angreni: Keberpautan Kelisananan dengan Keberaksaraan, Aspek Kesastraan Panji Angreni*, dan *Sajak-sajak Bulan*.

TIM PENULIS

Prof. Dr. phil. Gusti Asnan

Gusti Asnan adalah Guru besar di Jurusan Sejarah Universitas Andalas, Padang, sejak 1988 sampai sekarang. Pria kelahiran Lubuksikaping pada 12 Agustus 1962 ini menempuh Pendidikan S3 di Fakultaet fuer Sozial-und Geisteswissenschaften, Universitaet Bremen, Jerman. Hingga kini, ia telah menghasilkan banyak karya ilmiah kesejarahan, di antaranya *Sungai dan Sejarah Sumatera,* "Historiografi Sumatera" dalam Sri Sugiharta; *Sumatera: Silang Budaya, Kontestasi Nilai-nilai Historis, Arkeologis, dan Antropologis, serta Upaya Pelestarian Cagar Budaya;* dan "Sriwijaya dan Kerajaan-kerajaan di Sumatra Era Klasik" dalam Linda Djalil (ed.), *Prof. Sutan Muhammad Zain, Sriwijaya dan Kerajaan-kerajaan di Sumatra Era Klasik.*

Dr. Mohammad Iskandar

Mohammad Iskandar adalah sejarawan yang mengabdikan diri sebagai dosen Sejarah pada Universitas Indonesia sejak 1983 sampai 2017. Pria kelahiran Sukabumi, 7 Juli 1952, ini menempuh pendidikan S2-nya di Vrije Universiteit (sandwich), Belanda, dan menyelesaikan Pendidikan S3 di Universitas Indonesia. Sampai saat ini, ia telah menghasilkan banyak karya ilmiah, di antaranya *Kurun Niaga dan Keruntuhan Tradisi Maritim di Jawa,* dan *Al-Harakat al-Munăhaah li al-mashăyikh.*

Dr. Agus Mulyana

Agus Mulyana adalah dosen Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Bandung sejak 1990 sampai sekarang. Pria kelahiran Jakarta, 8 Agustus 1966 ini menempuh Pendidikan S3 di Universitas Indonesia. Karya-karya ilmiahnya antara lain adalah *Negara Pasundan Gejolak Menak Sunda Menuju Integrasi Nasional (1947-1950)*; *Sejarah Kereta Api di Priangan*; dan *Ethnicity And Nationalism: Sipatahoenan Newspaper's Views On The Nationalist Movements In The Dutch East Indies.*

Sri Margana, Ph.D.

Sri Margana lahir di Klaten, Jawa Tengah, Indonesia pada tanggal 15 Oktober 1969. Ia memperoleh gelar Sarjana dan Magister di Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 1995 dan 2001 dan gelar doktor dari Leiden University, Belanda tahun 2007. Sejak tahun 1998 ia bekerja sebagai dosen di Departemen Sejarah, Universitas Gadjah Mada. Pada tahun 2001 ia mengikuti The Advanced Master Programme of CNWS, Universitas Leiden, Belanda dalam kerangka kerja proyek TANAP (Towards a New Age of Partnership). Ia memiliki minat di bidang sejarah sosial-politik Jawa pada masa prakolonial dan kolonial. Beberapa karyanya antara lain *Kota-kota di Jawa: Identitas, Gaya Hidup, dan Permasalahan Sosial*, terbit tahun 2010; *Ujung Timur Jawa, 1763-1913: Perebutan Hegemoni Blambangan*, terbit tahun 2012; dan *Keraton Surakarta dan Yogyakarta 1769 – 1874*, terbit tahun 2004.

Dr. Didik Pradjoko, M.Hum

Didik Pradjoko adalah dosen Sejarah di Universitas Indonesia. Pria kelahiran Surabaya, 14 Juni 1969 ini menempuh Pendidikan S1 sampai S3 di Universitas Indonesia. Karya ilmiahnya antara lain adalah *Asal Usul Nenek Moyang dan Integrasi Masyarakat Yang Tercermin Dalam Cerita Tradisi lisan Maritim di Kawasan laut Sawu Nusa Tenggara Timur*; *Perahu Terdampar" dan "Manusia Terseret Arus" Tradisi Lisan Maritim dan Sejarah Migrasi di Kawasan laut Sawu, Nusa Tenggara Timur*; dan *Upaya Memberantas Bajak Laut Modern di Perairan Selat Malaka dan Kepulauan Riau.*

KEMENTERIAN PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 1945-2018

Salah satu tujuan Indonesia Merdeka, sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD 1945, adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu sejak awal kemerdekaan, telah diangkat seorang menteri pengajaran yang diamanahkan untuk mencapai tujuan itu. Sejak itu, proses pertumbuhan dan perkembangan pendidikan terus berlangsung hingga saat ini.

Sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 hingga tahun 2018, Indonesia mempunyai 37 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Buku ini mencoba merekam dinamika perjalanan pendidikan dan kebudayaan melalui pemikiran dan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut dari masa ke masa. Beragam kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang dirumuskan, tetap berdasarkan satu tujuan yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Buku ini diharapkan dapat memberikan inspirasi dalam rangka memajukan pendidikan dan kebudayaan, serta menguatkan karakter bangsa menuju Indonesia yang maju, sejahtera, adil dan makmur di masa kini dan akan datang.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia

ISBN 978-602-1289-93-8

9 786021 289938

TIDAK UNTUK DIJUAL